

PROSPER TOGETHER *with* INDONESIA

SOROTAN 2025 2025 Highlights

31%

**Perdagangan Berjangka dan
Derivatif meningkat 31%.**
Futures and Derivatives Trading
increased by 31%.

23%

**Transaksi Timah Luar Negeri
meningkat 23% dari tahun lalu.**
Overseas Tin Transactions increased
by 23% compared to the previous year.

123%

**Fee efektif di tahun 2025 mencapai
123% dari target.**
Effective fees in 2025 exceeded
the target, namely reaching 123%
of the target.



SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB DISCLAIMER

Laporan Tahunan 2025 PT Kliring Berjangka Indonesia disusun dan diterbitkan berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka, Keputusan Menteri Perdagangan, dan Peraturan BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). Laporan Tahunan ini menyajikan data faktual yang dapat diverifikasi mengenai strategi, kebijakan, serta kinerja operasional dan keuangan Perusahaan. Selain itu, terdapat juga proyeksi kinerja tahun mendatang yang disusun berdasarkan asumsi dan pernyataan prospektif terkait kondisi bisnis di masa depan. Maka, pernyataan yang terdapat di Laporan Tahunan ini bukan menjadi jaminan kinerja di masa yang akan datang, karena yang diperoleh di masa mendatang dapat berbeda karena beberapa pengaruh dan faktor di luar kendali Perusahaan.

The 2025 Annual Report of PT Kliring Berjangka Indonesia has been prepared and published based on Law No. 32 of 1997 concerning Commodity Futures Trading, Government Regulation No. 9 of 1999 regarding Implementation of Futures Trading, Decrees of the Minister of Trade, and BAPPEBTI (Commodity Futures Trading Regulatory Agency) Regulations. This Annual Report presents verifiable factual data regarding the Company's strategies, policies, and operational and financial performance. In addition, it discloses performance projections for the coming year which are prepared based on assumptions and forward-looking statements concerning future business conditions. Therefore, the statements in this Annual Report do not constitute a guarantee of future performance as actual results may differ due to various influences and factors beyond the Company's control.

PROSPER TOGETHER *with* INDONESIA

Tolok ukur keberhasilan PT Kliring Berjangka Indonesia (PT KBI) tidak hanya direpresentasikan oleh pencapaian metrik finansial Perusahaan semata, melainkan juga oleh seberapa besar nilai tambah sosial-ekonomi yang didistribusikan kepada masyarakat luas. Melalui optimalisasi ekosistem Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, Perusahaan berkontribusi secara langsung pada penguatan sektor riil, mendorong pemberdayaan para petani serta pelaku usaha lokal guna meningkatkan daya saing mereka. Setiap inovasi layanan dan pengembangan operasional di tingkat institusi dirancang sedemikian rupa untuk mengakselerasi potensi komoditas nasional di pasar global. Komitmen fundamental untuk terus bertumbuh, berinovasi, dan mewujudkan kemakmuran bangsa secara inklusif inilah yang menjadi manifestasi utama dari semangat *"Prosper Together with Indonesia"*.

For PT Kliring Berjangka Indonesia (PT KBI), success is defined not only by financial accomplishment, but also by its contribution to national socio-economic advancement. Through the optimization of the Warehouse Receipt System ecosystem and the Commodity Auction Market, the Company reinforces the real sector while empowering farmers and local enterprises to enhance their competitiveness. Through ongoing innovation and operational excellence, the Company is committed to unlocking the global potential of Indonesia's commodities. This enduring commitment to growth, innovation, and inclusive prosperity embodies the essence of *"Prosper Together with Indonesia"*.



TENTANG LAPORAN TAHUNAN 2025

About the 2025 Annual Report

Selamat datang pada Laporan Tahunan PT Kliring Berjangka Indonesia tahun 2025 dengan tema *Prosper Together with Indonesia*. Tema tersebut dipilih berdasarkan analisis dan kajian yang mendalam berdasarkan fakta dan perkembangan bisnis PT Kliring Berjangka Indonesia di sepanjang 2025 serta keberlanjutan bisnis ke depan.

Penyusunan Laporan Tahunan PT Kliring Berjangka Indonesia mengacu pada beberapa dasar hukum dan regulasi, di antaranya:

1. Undang Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang mengatur perdagangan berjangka komoditas di Indonesia dan menetapkan PT KBI sebagai lembaga kliring yang bertanggung jawab untuk menjamin pelaksanaan transaksi perdagangan berjangka;
2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka yang memberikan rincian lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perdagangan berjangka, termasuk peran dan tanggung jawab PT KBI;
3. Keputusan Menteri Perdagangan yang memberikan arahan operasional bagi PT KBI dan mengatur prosedur kliring, persyaratan bagi pelaku pasar, dan standar operasional yang harus dipatuhi oleh PT KBI; dan
4. Peraturan BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) yang mengatur operasional PT KBI, termasuk persyaratan kliring, kewajiban pelaporan, dan standar kepatuhan yang harus dipenuhi oleh PT KBI.

Laporan PT KBI juga disusun untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan, termasuk investor, regulator, dan masyarakat umum tentang kinerja Perusahaan, strategi, dan prospek ke depan.

Dalam rangka menjalankan praktik terbaik terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG), Perusahaan juga menyampaikan beberapa aspek yang merupakan bagian dari pengembangan dan interpretasi atas isi Laporan Tahunan. Dengan demikian, Perusahaan mengharapkan Laporan Tahunan ini dapat mendorong peningkatan keterbukaan informasi yang wajar seiring dengan terpenuhinya aspek komposisi dan aspek substansi.

Laporan Tahunan PT Kliring Berjangka Indonesia 2025 memuat kata "Perusahaan" dan "PT KBI" yang merujuk pada PT Kliring Berjangka Indonesia. Laporan ini disajikan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca dan dicetak dengan kualitas yang baik. Laporan Tahunan ini dapat dilihat dan diunduh di *website* resmi Perusahaan yaitu www.ptkbi.com

Welcome to the 2025 Annual Report of PT Kliring Berjangka Indonesia, under the theme *Prosper Together with Indonesia*. This theme was selected based on a thorough analysis and study of factual developments in PT Kliring Berjangka Indonesia's business throughout 2025, as well as considerations for the sustainability of the business moving forward.

The preparation of the Annual Report of PT Kliring Berjangka Indonesia refers to several legal bases and regulations, as follows:

1. Law No. 32 of 1997 on Commodity Futures Trading, which regulates commodity futures trading in Indonesia and designates PT KBI as the clearing institution responsible for guaranteeing the settlement of commodity futures transactions;
2. Government Regulation No. 9 of 1999 on Implementation of Futures Trading, which provides further details on the organization of futures trading, including the roles and responsibilities of PT KBI;
3. Decrees of the Minister of Trade, which provide operational guidance for PT KBI and regulate clearing procedures, requirements for market participants, and operational standards that must be complied with by PT KBI; and
4. BAPPEBTI (Commodity Futures Trading Regulatory Agency) Regulations, which govern PT KBI's operations, including clearing requirements, reporting obligations, and compliance standards that must be fulfilled by PT KBI.

PT KBI's Report is also prepared to provide information to stakeholders, including investors, regulators, and the general public, regarding the Company's performance, strategy, and future prospects.

In line with the implementation of best practices in Good Corporate Governance (GCG), the Company also presents several aspects that are part of the development and interpretation of the contents of the Annual Report. Accordingly, the Company hopes that this Annual Report will promote enhanced transparency of information, while fulfilling both the compositional and substantive aspects.

The 2025 Annual Report of PT Kliring Berjangka Indonesia uses the term "the Company" and "PT KBI" to refer to PT Kliring Berjangka Indonesia. This Report is presented in both Indonesian and English, using font types and sizes that are easy to read and printed with high-quality standards. The Annual Report is available for viewing and download on the Company's official website at www.ptkbi.com

KESINAMBUNGAN TEMA

Theme Continuity



2024 Towards a Resilient & Inclusive Commodity Ecosystem

Menuju Ekosistem Komoditas yang Tangguh dan Inklusif

Tahun 2024 merupakan tahun transformasi bagi PT Kliring Berjangka Indonesia (PT KBI). Adaptasi transformasi yang dilakukan tersebut berhasil memberikan dampak positif bagi kelangsungan bisnis PT KBI secara keuangan maupun operasional. Keberhasilan atas adaptasi transformasi juga telah sejalan dengan implementasi strategi yang tepat, sehingga membuka peluang baru bagi PT KBI di tahun ini. Melalui SDM berkualitas dan diiringi proses bisnis yang efisien PT KBI mampu memperkuat daya saing dan dapat bertahan di era hiperkompetitif.

The year 2024 marked a transformative period for PT Kliring Berjangka Indonesia (PT KBI). The Company's successful adaptation to this transformation has delivered positive impacts on both its financial performance and operational sustainability. This achievement is also aligned with the effective implementation of well-defined strategies, enabling PT KBI to unlock new opportunities during the year. Supported by high-quality human capital and efficient business processes, PT KBI has strengthened its competitiveness and demonstrated resilience in an increasingly hyper-competitive environment.



2023 Spirit of New Steps for Higher Growth and Digital Transformation

Semangat Langkah Baru Menuju Pertumbuhan Lebih Tinggi dan Transformasi Digital

Dalam semangat langkah baru untuk pertumbuhan yang lebih tinggi dan transformasi digital, PT KBI telah berhasil mencapai pertumbuhan yang signifikan di tengah persaingan usaha yang semakin ketat. Prestasi ini tercermin dari komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh *stakeholder*, serta melalui upaya transformasi dan digitalisasi proses bisnis. PT KBI fokus untuk menjadi perusahaan yang berkembang lebih pesat dengan mengoptimalkan transformasi dalam tiga pilar bisnis utama yakni Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Pasar Fisik Komoditas (PFK), dan Sistem Resi Gudang (SRG). Dengan melakukan optimisasi ini, PT KBI bertekad untuk terus beradaptasi dengan perubahan kondisi dan lingkungan bisnis apa pun yang dihadapi.

In the spirit of new steps for higher growth and digital transformation, PT KBI has successfully achieved significant growth amidst increasingly fierce business competition. This accomplishment shows our dedication to top-notch services to all stakeholders and the hard work put into transforming and digitizing business operations. PT KBI is dedicated to become a rapid growing company by optimizing transformation in three core business pillars: Commodity Futures Trading (PBK), Physical Market Commodity (PFK), and Warehouse Receipt System (SRG). By undertaking this optimization, PT KBI is determined to continually adapt to changes in any business conditions and environment.



2022 Pelayanan KBI 100 Tahun

Voyage of KBI Towards 100 Years

Di tahun 2022, PT KBI mulai menjalankan transformasi menjadi *digital corporation* yang intinya mempercepat proses bisnis dan menjadikannya lebih efisien. PT KBI mengambil langkah strategis untuk melakukan efisiensi dengan mengintegrasikan tiga standarisasi. Tiga standarisasi yang dimaksud ISO 9001 tentang Sistem Manajemen Mutu, ISO/IEC 27001:2013 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi, dan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Selain terintegrasi, Perusahaan juga memastikan ketiga standar ISO itu dapat dipelihara secara efektif. PT KBI juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya melalui ragam pengembangan diri dalam rangka mencapai visi misi Perusahaan dengan tetap menjunjung tinggi tata nilai profesionalitas yang tinggi. Perusahaan siap menyongsong tahun ke depan dengan spirit yang tinggi, melalui karakter yang tangguh dan strategi yang tepat.

In 2022, PT KBI commenced its transformation into a digital corporation, aiming to expedite business processes and enhance efficiency. PT KBI took strategic steps to achieve efficiency by integrating three standardizations: ISO 9001 for Quality Management System, ISO/IEC 27001:2013 for Information Security Management System, and ISO 37001:2016 for Anti-Bribery Management System. Beyond integration, PT KBI ensures the effective maintenance of these three ISO standards. The company is also committed to continually improving the quality of its resources through various self-development initiatives, aligning with its vision and mission while upholding high standards of professionalism. With a strong spirit, resilient character, and strategic approach, PT KBI is ready to embrace the coming years.

-  Performa Penting 2025
2025 Performance Highlights
-  Laporan Manajemen
Management Report
-  Profil Perusahaan
Company Profile
-  Tinjauan Pendukung Bisnis
Business Support Overview

DAFTAR ISI

Table of Contents

Penjelasan Tema Theme Explanation	1
Tentang Laporan Tahunan 2025 About the 2025 Annual Report	2
Kesinambungan Tema Theme Continuity	3
IKHTISAR KINERJA 2025 2025 Performance Highlights	6
Ikhtisar Data Keuangan Penting Key Financial Data Highlights	8
Ikhtisar Operasional Operational Highlights	10
Ikhtisar Kinerja Saham Share Highlights	10
Informasi Mengenai Aksi Korporasi Maupun Efek Lainnya Information on Corporate Actions and Other Securities	12
Penghentian Sementara Perdagangan Saham (<i>Suspension</i>), Dan/Atau Penghapusan Pencatatan Saham (<i>Delisting</i>) Suspension and/or Delisting	12
Kronologi Penerbitan Obligasi, Sukuk, Obligasi Konversi, Dan Sumber Pendanaan Lainnya Chronology of Issuance of Bonds, Sukuk, Convertible Bonds, and Other Funding Sources	12
Penghargaan dan Sertifikasi Tahun 2025 Awards and Certifications in 2025	13
Peristiwa Penting Significant Events	15
Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) 2025 Corporate Social Responsibility In 2025	20
LAPORAN MANAJEMEN Management Report	22
Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners' Report	24
Laporan Direksi Board of Directors' Report	32
Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2025 PT Kliring Berjangka Indonesia Statement of Members of the Board of Commissioners regarding Responsibility for the 2025 Annual Report of PT Kliring Berjangka Indonesia	42
Surat Pernyataan Anggota Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2025 PT Kliring Berjangka Indonesia Statement of Members of the Board of Directors regarding Responsibility for the 2025 Annual Report of PT Kliring Berjangka Indonesia	43
PROFIL PERUSAHAAN Company Profile	44
Informasi Umum dan Identitas Perusahaan General Information and Company Identity	46
Riwayat Singkat Perusahaan Company at a Glance	49
Jejak Langkah Milestones	52

Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan Vision, Mission, and Corporate Culture	56
Logo Perusahaan Company Logo	58
Kegiatan dan Bidang Usaha Line of Business	58
Wilayah Operasional Operational Area	63
Struktur Organisasi Perusahaan Company Organizational Structure	64
Keanggotaan Perusahaan dalam Asosiasi Association Membership	64
Profil Dewan Komisaris Profile of the Board of Commissioners	66
Profil Direksi Profile of the Board of Directors	70
Profil Pejabat Eksekutif Profile of Executive Officers	74
Perubahan Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Change in the Composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors	80
Daftar Entitas Anak, Entitas Asosiasi, dan Ventura Bersama Subsidiaries, Associates and Joint Ventures	81
Informasi Anak Perusahaan Information on Subsidiaries	81
Alamat Kantor Operasional & Jaringan Usaha Office Address and Business Network	85
Kronologi Pencatatan Saham Chronology of Share Listing	85
Komposisi Pemegang Saham Shareholding Composition	85
Struktur Grup Perusahaan Group Structure	87
Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal Capital Market Supporting Professional Institutions	87
Informasi Pada Situs Web Perusahaan Information on Company Website	88
TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS Business Support Overview	98
Sumber Daya Manusia Human Resources	100
Teknologi Informasi Information Technology	103
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN Management Discussion and Analysis	110
Tinjauan Ekonomi Economic Review	112
Tinjauan Industri Industry Review	113
Tinjauan Operasi per Segmen Usaha Operational Review by Business Segment	114
Pusat Registrasi Sistem Resi Gudang Warehouse Receipt System Registration Center	117
Penjaminan dan Penyelesaian Pasar Fisik Komoditas Guaranteeing and Settling the Physical Commodities Market	118
Produktivitas dan Profitabilitas Segmen Usaha Business Segment Productivity and Profitability	119

Kinerja Keuangan Komprehensif Comprehensive Financial Performance	121
Rasio Keuangan Financial Ratios	125
Kemampuan Membayar Utang Ability to Pay Debt	126
Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal Capital Structure and Management Policy on Capital Structure	127
Ikatan Material Untuk Investasi Barang Modal Commitment to Capital Goods Investment	128
Realisasi Investasi Barang Modal Realization of Capital Goods Investment	129
Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan Material Information and Facts After the Accountant's Report Date	129
Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian yang Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi Financial Information Containing Extraordinary or Infrequent Events	130
Perbandingan Target dan Realisasi 2025 dan Target RKAP 2026 Comparison of 2025 Realization and 2026 RKAP Targets	130
Aspek Pemasaran Marketing Aspect	132
Kebijakan Dividen Dividend Policy	133
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Realization of Proceeds from Public Offerings	134
Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, Restrukturisasi Utang/Modal Material Information Regarding Investments, Expansion, Divestment, Mergers/Acquisitions, and Debt/Capital Restructuring	134
Transaksi Material, Transaksi Afiliasi, dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan Material Transactions, Affiliated Transactions, and Transactions with Potential Conflicts of Interest	135
Perubahan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan Significant Changes in Laws and Regulations	138
Perubahan Kebijakan Akuntansi Changes in Accounting Policy	143
TATA KELOLA PERUSAHAAN Corporate Governance	144
Komitmen Tata Kelola Perusahaan Commitment to Corporate Governance	146
Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders	147
Dewan Komisaris Board of Commissioners	152
Direksi Board of Directors	163
Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi Performance Assessment of the Board of Commissioners & the Board of Directors	178
Kebijakan Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Nomination and Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors	188

Hubungan Afiliasi Affiliation	194
Sekretaris Dewan Komisaris Secretary of the Board of Commissioners	194
Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris Committees Under the Board of Commissioners	196
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	206
Satuan Pengawas Internal Internal Audit Unit	210
Akuntan Publik Public Accountant	216
Sistem Pengendalian Internal Internal Control System	217
Sistem Manajemen Risiko Risk Management System	218
Sanksi Administratif Administrative Sanctions	223
Akses Informasi dan Data Perusahaan Access to Company Information and Data	223
Kode Etik Perusahaan Code of Conduct	225
Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja Kepada Manajemen dan/atau Karyawan (MSOP/ESOP) Employee and Management Stock Ownership Program (ESOP/MSOP)	230
Kebijakan Antikorupsi dan Antigratifikasi Anti-Corruption and Anti-Gratification Policy	230
Kebijakan Benturan Kepentingan Conflict of Interest	231
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) Public State Officials' Wealth Report (LKHPN)	231
Kebijakan Keberagaman Komposisi Composition Diversity	232
Kebijakan Pengungkapan Informasi Mengenai Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris Baik Secara Langsung atau Tidak Langsung Information Disclosure on Share Ownership of the Board of Directors and the Board of Commissioners, Either Direct or Indirect	233
Whistleblowing System Whistleblowing System	233
Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Development of the Implementation of Good Corporate Governance	239
TANGGUNG JAWAB SOSIAL & LINGKUNGAN Social & Environmental Responsibility	242
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Corporate Social and Environmental Responsibility	244
Program Unggulan Priority Programs	249
LAPORAN KEUANGAN Financial Report	253

01.

IKHTISAR KINERJA 2025

2025 PERFORMANCE HIGHLIGHTS



-  Performa Penting 2025
2025 Performance Highlights
-  Laporan Manajemen
Management Report
-  Profil Perusahaan
Company Profile
-  Tinjauan Pendukung Bisnis
Business Support Overview

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Key Financial Data Highlights

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Consolidated Statement of Financial Position

(dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	2023	YoY 2024- 2025 (%)
Aset Assets				
Aset Lancar Current Assets	3.075.467	2.500.018	2.182.683	23%
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	43.067	43.078	47.540	(0,16)%
Jumlah Aset Total Assets	3.118.533	2.543.096	2.230.223	23%
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity				
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	2.353.061	1.835.369	1.563.370	28%
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	18.249	14.420	19.073	26,5%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	2.371.310	1.849.789	1.582.442	28%
Ekuitas Equity	747.223	693.307	647.780	7%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	3.118.533	2.543.096	2.230.223	23%
Jumlah Investasi pada Entitas Anak* Total Investment in Subsidiaries*	51.000	51.000	51.000	-

*PT KBI tidak memiliki entitas asosiasi, sehingga tidak terdapat jumlah investasi pada entitas asosiasi

*PT KBI has no associates, therefore, there is no investment amount in associates

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Consolidated Statement of Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

(dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	2023	YoY 2024-2025 (%)
Pendapatan Operasional Operating Income	209.097	187.466	149.515	11,5%
Fee Kliring Clearing Fee	26.250	21.240	20.444	23,5%
Iuran Anggota Member Subscription	8.319	8.605	9.008	(3)%
Resi Gudang Warehouse Receipt	31120	35.921	13.008	(12)%
Pasar Fisik Komoditas Commodity Physical Market	21.353	16.685	13.687	28%
Pendapatan Aset Digital Digital Asset Revenue	5.428	2.548	2.539	113%
Pendapatan Penjaminan Income from Transaction Settlement	-	-	-	-
Pendapatan Dana Penyelesaian Transaksi Settlement Fund Revenue	82.829	74.835	48.773	11%
Pendapatan Treasury Treasury Income	33.797	27.633	42.057	22%
Beban Operasional Operating Expenses	135.779	91.395	71.443	48,5%
Laba Operasional Operating Profit	73.318	96.070	78.073	(24)%
Pendapatan (Beban) Non Operasional Non-Operating Income (Expenses)	2.769	2.249	3.250	23%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	54.922	80.529	66.753	(32)%
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	55.341	73.856	60.707	(25)%
Pendapatan Komprehensif Lainnya Other Comprehensive Income	1.425	463	564	208%



Uraian Description	2025	2024	2023	YoY 2024-2025 (%)
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Profit for the Year	53.916	73.393	60.143	(26,5)%
Labas Bersih yang Dapat Diatribusikan kepada: Net Profit Attributable to:				
Entitas Induk Parent Entity	55.774	73.718	60.578	(24)%
Kepentingan Non Pengendali Non-Controlling Interest	(433)	138	129	(413)%
Total	55.341	73.856	60.707	(25)%
Labas Bersih Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada: Comprehensive Net Profit Attributable to:				
Entitas Induk Parent Entity	54.349	73.255	60.014	(26)%
Kepentingan Non Pengendali Non-Controlling Interest	(433)	138	129	(413)%
Total	53.916	73.393	60.143	(26,5)%
Labas per Saham (Rp) Earnings per Share (IDR)	0,11	0,15	0,12	(26,2)%

Laporan Arus Kas Konsolidasian

Consolidated Statement of Cash Flows

(dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain) (in millions of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	2023	YoY 2024-2025 (%)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities	110.482	90.552	72.111	22%
Arus Kas Digunakan untuk Aktivitas Investasi Cash Flows Used in Investing Activities	(44.195)	(172.380)	(227.052)	74%
Arus Kas Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Cash Flows Used in Financing Activities	(21.480)	(20.996)	(68.605)	(2,3)%
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	44.807	(102.824)	(223.546)	143%
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year	22.043	124.870	348.484	(82)%
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at End of Year	66.850	22.043	124.870	200%

Rasio Keuangan Utama (%)

Key Financial Ratios (%)

Uraian Description	2025	2024	2023	YoY 2024-2025 (%)
Rasio Lancar Current Ratio	130,7	119,41	139,61	8,6%
Kewajiban terhadap Jumlah Aset Liabilities to Total Assets	76,0	72,74	70,95	4,5%
Margin Laba (Rugi) Kotor Gross Profit (Loss) Margin	36,0	51,25	52,22	(29,6)%
Margin Laba (Rugi) Profit (Loss) Margin	26,5	39,4	40,60	(32,8)%
Imbal Hasil Rata-Rata Aset Return on Assets (ROA)	1,9	2,9	2,72	(32,8)%
Imbal Hasil Rata-Rata Ekuitas Return on Equity (ROE)	7,7	10,65	9,37	(27,9)%
Perputaran Aset Asset Turnover	7,4	7,9	6,70	(6,5)%



IKHTISAR OPERASIONAL

Operational Highlights

Transaksi Kontrak Multilateral dan Bilateral

Multilateral and Bilateral Contract Transactions

(Dalam Ribuan) (in Thousands)

Uraian Description	2025 (lot)	2024 (lot)	2023 (lot)
Kontrak Multilateral Multilateral Contract	1.590,07	1.166,73	1.186,41
Kontrak Bilateral Bilateral Contract	8.777,85	6.581,83	6.169,14
PALN	988,38	905,59	474,55

Realisasi Penerbitan Resi Gudang

Actualization of Warehouse Receipt Issuance

Tahun Year	Penerbitan Resi Gudang Issuance of Warehouse Receipts	Berat (kg) Weight (kg)	Nilai Transaksi (Rp) Transaction Value (IDR)
2025	546	93.377.052	1.912.258.311.300
2024	1058	75.913.593	2.871.984.518.117
2023	483	61.558.792	971.951.609.000
2022	660	67.056.102	1.276.135.955.661
2021	634	13.912.421	517.264.877.931

Transaksi Timah Luar Negeri dan Timah Dalam Negeri

Foreign Tin and Domestic Tin Transactions

Tahun Year	Transaksi Timah Luar Negeri Foreign Tin Transaction			Transaksi Timah Dalam Negeri Domestic Tin Transaction		
	Lot	Ton	Nilai (\$) Value (\$)	Lot	Ton	Nilai (Rp) Value (IDR)
2025	9.898	49.606	1.672.396.607	2.326	2.326	1.258.973.294.165
2024	8.043	40.326	1.253.682.228	3.362	3.362	1.621.155.951.873
2023	9.235	46.284	1.174.188.908	2.154	2.154	1.543.615.045.900

IKHTISAR KINERJA SAHAM

Share Highlights

Informasi Saham

Per 31 Desember 2022, PT Kliring Berjangka Indonesia melakukan pembagian saham yang dimiliki dan disetor ke dalam dua jenis, yakni Saham Seri A Dwiwarna sebanyak 1 lembar atau 0,01% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan Saham Seri B sebanyak 249.999 lembar atau 99,99% dimiliki oleh PT Danareksa (Persero) sebagai holding. Perusahaan secara resmi menjadi bagian dari Holding PT Danareksa (Persero) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No. S-791/MBU/09/2020 tanggal 30 September 2020 perihal Perubahan Jenis Saham dan Perubahan Anggaran Dasar PT Kliring Berjangka Indonesia sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan PT Danareksa (Persero).

Share Information

As of December 31, 2022, PT Kliring Berjangka Indonesia issued and paid-up shares were divided into two types, namely 1 share of Series A Dwiwarna, representing 0.01%, owned by the Republic of Indonesia, and 249,999 shares of Series B, representing 99.99%, owned by PT Danareksa (Persero) as the holding company. The Company officially became part of the PT Danareksa (Persero) Holding in accordance with Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. S-791/MBU/09/2020 dated September 30, 2020 regarding Change of Share Types and Amendment of the Articles of Association of PT Kliring Berjangka Indonesia, pursuant to Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 7 of 2022 concerning Increase of the Republic of Indonesia's Capital Participation in the Share Capital of PT Danareksa (Persero).

Informasi Tentang Perdagangan Saham dan Kepemilikan Saham oleh Publik

Informasi mengenai perdagangan saham yang meliputi kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan; volume perdagangan saham; serta grafik harga penutupan dan volume perdagangan saham untuk setiap masa triwulan dalam dua tahun buku terakhir tidak disajikan dalam Laporan Tahunan. Hal ini karena hingga akhir tahun 2025, Perusahaan tidak pernah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) di bursa efek mana pun dan tidak memperdagangkannya kepada publik.

Dividen Saham

Pada tahun 2025, Perusahaan tidak melakukan pembagian dividen saham untuk buku tahun 2024 dan dividen saham tahun 2024 untuk tahun buku 2023 adalah sebagai berikut:

Dividen Final Final Dividend	2024 (tahun buku 2023) 2024 (fiscal year 2023)	2025 (tahun buku 2024) 2025 (fiscal year 2024)
Total Dividen (Rp) Total Dividend (IDR)	27.865.782.670	0
Dividend Payout Ratio (DPR) (%)	45,90%	0
Tanggal Pembayaran Dividen Date of Dividend Payment	6 Desember 2024 December 6, 2024	Tidak terdapat pembayaran dividen pada tahun 2025. The Company did not distribute any dividends in 2025.

Selama tahun 2025 tidak terdapat Aksi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*suspension*) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*) karena Perusahaan bukanlah perusahaan publik dan tidak mencatatkan sahamnya di bursa efek mana pun. Maka dari itu, informasi terkait aksi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*) dalam 2 (dua) tahun terakhir di dalam Laporan Tahunan ini tidak disajikan.

Informasi Obligasi dan Efek Lainnya

Penerbitan maupun perdagangan efek lainnya—meliputi Obligasi, Surat Berharga Komersial, Tanda Bukti Utang, Unit Penyertaan Kontrak Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, serta derivatif seperti warrant dan opsi—bukan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh PT KBI. Dengan demikian, Laporan Tahunan PT KBI untuk tahun buku 2025 tidak memuat informasi terkait obligasi maupun jenis efek lainnya.

Informasi Tentang Sumber Pendanaan Lainnya

Informasi mengenai surat berharga sumber pendanaan lainnya tidak disajikan dalam buku laporan tahunan 2025, karena PT KBI tidak menerbitkan surat berharga sumber pendanaan lainnya di tahun ini.

Information on Share Trading and Public Share Ownership

Information regarding share trading, including market capitalization based on the stock exchange listing price; the highest, lowest, and closing stock prices; trading volume; and charts of closing prices and trading volumes for each quarter over the past two fiscal years, is not presented in the Annual Report. This is because, as of the end of 2025, the Company had never conducted an Initial Public Offering (IPO) on any stock exchange and had not traded its shares publicly.

Share Dividend

In 2025, the Company did not distribute stock dividends for the fiscal year 2024, and the 2024 stock dividends for the fiscal year 2023, as follows:

In 2025, there were no suspensions and/or delistings because the Company is not a public company and has not listed its shares on any stock exchange. Therefore, information regarding suspensions and/or delistings over the past 2 (two) years is not presented in this Annual Report.

Information on Bonds and Other Securities

The issuance or trading of other securities, including bonds, commercial papers, debt securities, collective investment contract units, securities futures contracts, and derivatives such as warrants and options, is not conducted by PT KBI. Accordingly, PT KBI's Annual Report for the fiscal year 2025 does not include information on bonds or other types of securities.

Information on Other Funding Sources

Information regarding other funding source securities is not presented in the 2025 Annual Report, as PT KBI did not issue any other funding source securities during the year.



INFORMASI MENGENAI AKSI KORPORASI MAUPUN EFEK LAINNYA

Information on Corporate Actions and Other Securities

Informasi Tentang Aksi Korporasi

Hingga akhir tahun 2025, Perusahaan tidak mencatatkan aksi korporasi seperti aksi pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock split*), saham bonus, maupun penurunan nilai nominal saham.

Information on Corporate Actions

As of the end of 2025, the Company did not record any corporate actions, such as stock splits, reverse stock split, bonus shares, or reductions in the par value of shares.

PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM (*SUSPENSION*), DAN/ATAU PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM (*DELISTING*)

Suspension and/or Delisting

Sepanjang tahun 2025, PT Kliring Berjangka Indonesia tidak pernah dikenakan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*) yang berpengaruh terhadap aktivitas perdagangan saham di Bursa Efek tempat Perusahaan mencatatkan dan memperdagangkan saham.

Throughout 2025, PT Kliring Berjangka Indonesia was not subject to any suspensions and/or delistings that would affect trading activities on any stock exchange where the Company's shares are listed and traded.

KRONOLOGI PENERBITAN OBLIGASI, SUKUK, OBLIGASI KONVERSI, DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA

Chronology of Issuance of Bonds, Sukuk, Convertible Bonds, and Other Funding Sources

PT Kliring Berjangka Indonesia tidak menyajikan informasi mengenai obligasi maupun efek lainnya, seperti Obligasi, Surat Berharga Komersial, Tanda Bukti Utang, Unit Penyertaan Kontrak Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari efek seperti bukti *waran*, opsi, dan yang lainnya di tahun 2025.

PT Kliring Berjangka Indonesia does not disclose information on bonds or other securities, such as bonds, commercial papers, debt securities, collective investment contract units, securities futures contracts, and any derivatives of securities, including warrants, options, and others, for the year 2025.

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI TAHUN 2025

Awards and Certifications in 2025



Best Public Relations dalam kategori Layanan Finansial
Best Public Relations in the Financial Services Category

Tanggal Penghargaan
5 Februari 2025
Award Date **February 5, 2025**
Penyelenggara **Warta Ekonomi**
Organizer **Warta Ekonomi**



Best CEO in Market Integration Award

Tanggal Penghargaan
25 Maret 2025
Award Date **March 25, 2025**
Penyelenggara
BUMN Track
Organizer
BUMN Track



Indonesia Top Digital Innovation Award 2025

Tanggal Penghargaan
19 Februari 2025
Award Date **February 19, 2025**
Penyelenggara **The Iconomics**
Organizer **The Iconomics**



Senior Officer on Economic Program

Tanggal Penghargaan
30 Juni 2025
Award Date **June 30, 2025**
Penyelenggara
BUMN Track
Organizer
BUMN Track



Platinum Winner in Economic Pillar & Strong Commitment

Tanggal Penghargaan
30 Juni 2025
Award Date **June 30, 2025**
Penyelenggara
BUMN Track
Organizer
BUMN Track



Kolaborasi Strategis Perusahaan Terbaik
Best Strategic Corporate Collaboration

Tanggal Penghargaan
25 Maret 2025
Award Date **March 25, 2025**
Penyelenggara
BUMN Track
Organizer
BUMN Track



ISO Manajemen Terintegrasi:
ISO 9001:2015 Standar Manajemen Mutu, ISO 27001:2022 Standar Manajemen Keamanan Informasi, dan ISO 37001:2016 Standar Manajemen Anti Penyuapan
Integrated Management System Certifications: ISO 9001:2015 on Quality Management Standard, ISO 27001:2022 on Information Security Management Standard, and ISO 37001:2016 on Anti-Bribery Management Standard

Tanggal Penghargaan
17 Juli 2025
Award Date **July 17, 2025**
Penyelenggara
Badan Sertifikasi
Organizer
Badan Sertifikasi



PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI TAHUN 2025

Awards and Certifications in 2025



BUMN Corporate Excellence Award

Tanggal Penghargaan
31 Juli 2025
Award Date **July 31, 2025**
Penyelenggara
InvestorTrust
Organizer
InvestorTrust



50th Popular Person Award

Tanggal Penghargaan
8 Agustus 2025
Award Date **August 8, 2025**
Penyelenggara **The Iconomics**
Organizer **The Iconomics**



Top 100 CEO Award – Budi Susanto, Direktur Utama Top 100 CEO Award – Budi Susanto, President Director

Tanggal Penghargaan
8 Desember 2025
Award Date **December 8, 2025**
Penyelenggara
Infobank
Organizer
Infobank



Corporate Reputation Award in Special Financial Transaction Settlement and Guarantee Category

Tanggal Penghargaan
8 Agustus 2025
Award Date **August 8, 2025**
Penyelenggara **The Iconomics**
Organizer **The Iconomics**



Indonesia Top Good Corporate Governance (GCG) Awards 2025

Tanggal Penghargaan
17 Desember 2025
Award Date **December 17, 2025**
Penyelenggara **The Iconomics**
Organizer **The Iconomics**



Indonesia Best Corporate Secretary Awards 2025

Tanggal Penghargaan
17 Desember 2025
Award Date **December 17, 2025**
Penyelenggara **The Iconomics**
Organizer **The Iconomics**



Top 200 Future Leaders Award – Saidu Solihin, Direktur Pengembangan Bisnis dan Operasional Top 200 Future Leaders Award – Saidu Solihin, Director of Business Development and Operations

Tanggal Penghargaan
8 Desember 2025
Award Date **December 8, 2025**
Penyelenggara
Infobank
Organizer
Infobank

PERISTIWA PENTING Significant Events



Jan 2025 30

RUPS RKAP 2025

Rapat yang memaparkan rencana kerja dan anggaran perusahaan PT KBI sepanjang tahun 2025.

GMS on 2025 RKAP

Meeting on PT KBI's Work Plan and Budget for 2025.



Mar 2025 07

Penandatanganan MoU BAPPEBTI, PT KBI dan Bank Lampung terkait SRG

PT KBI mengadakan kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah Lampung untuk pengembangan ekosistem resi gudang di Lampung. MoU ini mengundang Bapak Tirta sebagai Kepala BAPPEBTI.

Signing of MoU between BAPPEBTI, PT KBI, and Bank Lampung Regarding SRG

PT KBI entered into a collaboration with Bank Pembangunan Daerah Lampung to develop the warehouse receipt (SRG) ecosystem in Lampung. The MoU signing was attended by Mr. Tirta, Head of BAPPEBTI.



Apr 2025 21

CNBC Indonesia: Menilik Transaksi Emas Digital di Tengah Melesatnya Harga Emas Global

Direktur Utama PT KBI, Bapak Budi Susanto menjadi bintang tamu di acara Squawk Box, CNBC. Dengan bahasan topik utama "Menilik transaksi emas digital di tengah melesatnya harga emas global".

CNBC Indonesia: Exploring Digital Gold Transactions Amid Rising Global Gold Prices

Mr. Budi Susanto, President Director of PT KBI, appeared as a guest on Squawk Box, CNBC, discussing the topic "Exploring Digital Gold Transactions Amid Rising Global Gold Prices".



Apr 2025 30

Media Gathering: Kinerja PT KBI di Tengah Dinamika Global

PT KBI menggelar *Media Gathering* bersama rekan media, dengan mengadakan ruang diskusi bersama dengan cakupan bahasan perang dagang, emas sebagai *safe haven*, serta kinerja positif PT KBI di tengah ketidakpastian *global*.

Media Gathering: PT KBI's Performance Amid Global Dynamics

PT KBI organized a Media Gathering with media partners, providing a forum to discuss topics including the trade war, gold as a safe haven, and PT KBI's positive performance amid global uncertainties.



PERISTIWA PENTING Significant Events

Risk Management, Legal, & Compliance Conference 2025

PT KBI menjadi tuan rumah untuk acara Risk Management, Legal, & Compliance Conference 2025 Holding BUMN Danareksa. Acara ini dilaksanakan di Aryanusa Ballroom, Menara Danareksa.

Risk Management, Legal, & Compliance Conference 2025

PT KBI hosted the Risk Management, Legal, & Compliance Conference 2025 for the Danareksa State-Owned Enterprise (SOE) Holding. The event was held at the Aryanusa Ballroom, Menara Danareksa.



May 2025 21-22

RUPS PT KBI 2025

PT KBI menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekosistem resi gudang nasional melalui inovasi digital. Hal ini mendapat dukungan penuh dari pemegang saham dan sinergi antar BUMN.

2025 GMS of PT KBI

PT KBI reaffirmed its commitment to strengthen the national warehouse receipt ecosystem through digital innovation. This initiative received full support from shareholders and leveraged synergies among State-Owned Enterprises (SOEs).



Jun 2025 25

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama BPDM dengan Bank Muamalat

PT KBI resmi bekerja sama dengan Bank Muamalat sebagai Bank Penyimpan Dana Margin (BPDM). Melalui kerja sama ini, Bank Muamalat akan memfasilitasi penyimpanan dan pengelolaan dana margin milik PT KBI & anggota kliring.

Signing of BPDM Cooperation Agreement with Bank Muamalat

PT KBI officially entered into a partnership with Bank Muamalat as the Margin Fund Custodian Bank (BPDM). Under this cooperation, Bank Muamalat will facilitate the safekeeping and management of margin funds belonging to PT KBI and its clearing members.



Jun 2025 26

Donor Darah PT KBI x PPA

PT KBI dan PT PPA berkolaborasi dalam menyelenggarakan kegiatan donor darah dalam memperingati HUT Ke-3 Sinergi Holding BUMN Danareksa.

Donor Darah PT KBI x PPA

PT KBI, in collaboration with PT PPA, organized a blood donation event to commemorate the 3rd Anniversary of the Danareksa SOE Holding Synergy.



Jun 2025 30



Jul 2025 28

Pelepasan Ekspor Kopi dari Resi Gudang Subang ke Tiongkok

Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah (KPGLB) sebagai mitra Pengelola Gudang PT KBI sukses melepas 576 ton kopi robusta dari Gudang Resi Gudang Subang. Ini membuktikan SRG merupakan kunci akses pembiayaan, jaminan mutu, dan daya saing ekspor sepanjang tahun 2025.

Export Release of Coffee from Subang Warehouse Receipt to China

Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah (KPGLB), as PT KBI's warehouse management partner, successfully facilitated the export of 576 tons of robusta coffee from the Subang Warehouse Receipt. This achievement demonstrates that the Warehouse Receipt System (SRG) serves as a key enabler for financing access, quality assurance, and export competitiveness.



Aug 2025 25

HUT PT KBI Ke-41

PT KBI merayakan ulang tahunnya dengan mengusung tema "KBI 41: Integrity First" di mana selama 41 tahun PT KBI berdiri, PT KBI selalu mengedepankan integritas agar selalu menjadi lembaga kliring terbaik di Indonesia.

41st Anniversary of PT KBI

PT KBI celebrated its 41st anniversary under the theme "KBI 41: Integrity First". For 41 years since its establishment, PT KBI has consistently prioritized integrity, striving to remain the leading clearing institution in Indonesia.



Aug 2025 29

Seminar Brent Crude Oil bersama JFX

JFX dan PT KBI menggelar seminar *Mini Brent Crude Oil Futures* sebagai upaya memperkuat literasi perdagangan berjangka energi global di Indonesia. Mengusung tema "Fueling Profits: Mastering Brent Crude Oil Trading", seminar ini menghadirkan James Brodie, Head of Learning and Development ONYX Capital Group.

Seminar on Brent Crude Oil in Collaboration with JFX

JFX and PT KBI organized a seminar on Mini Brent Crude Oil Futures to strengthen global energy futures trading literacy in Indonesia. The seminar, themed "Fueling Profits: Mastering Brent Crude Oil Trading", featured James Brodie, Head of Learning and Development at ONYX Capital Group.



Sep 2025

Bulan Literasi PBK 2025

PT KBI aktif dalam Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) 2025 yang diselenggarakan oleh BAPPEBTI dan Aspebtindo. Acara ini dibuka secara resmi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI).

PBK Literacy Month 2025

PT KBI actively participated in the 2025 Commodity Futures Trading (PBK) Literacy Month, organized by BAPPEBTI and Aspebtindo. The event was officially inaugurated at the Faculty of Economics and Business, University of Indonesia (FEB UI).



PERISTIWA PENTING Significant Events

Partisipasi PT KBI & JFX pada acara Minerba Convex 2025

PT KBI dan JFX pada acara Minerba Convex 2025 menjadi momentum penting bagi penguatan tata kelola dan daya saing perdagangan komoditas nasional. Dengan kehadiran lebih dari 700 pengunjung, ini menunjukkan tingginya perhatian terhadap upaya JFX dan PT KBI dalam mewujudkan perdagangan timah yang transparan, kredibel, dan diakui secara global.

PT KBI and JFX Participation at Minerba Convex 2025

PT KBI and JFX's participation in Minerba Convex 2025 served as an important milestone for strengthening governance and the competitiveness of national commodity trading. With over 700 attendees, the event demonstrated strong interest in the efforts of JFX and PT KBI to realize transparent, credible, and globally recognized tin trading.



Partisipasi PT KBI dan PT KPBI pada acara Trade Expo Indonesia 2025

PT KBI bersama PT KPBI menegaskan komitmennya sebagai satu-satunya Pusat Registrasi Resi Gudang di Indonesia dalam memperkuat infrastruktur perdagangan komoditas nasional melalui kehadirannya di ajang Trade Expo Indonesia (TEI) 2025.

PT KBI and PT KPBI Participation at Trade Expo Indonesia 2025

PT KBI, together with PT KPBI, reaffirmed its commitment as the sole Warehouse Receipt Registration Center in Indonesia by strengthening the national commodity trading infrastructure through its presence at Trade Expo Indonesia (TEI) 2025.



Penandatanganan Kerja Sama Strategis Holding BUMN Danareksa terkait Integrasi Sistem Resi Gudang

PT KBI menggagas penandatanganan kerja sama sinergis antara anggota Holding BUMN Danareksa (KIMA, JIEP, SIER, KPBI, Danareksa Finance) sebagai langkah konkret untuk memperkuat integrasi dan menciptakan nilai tambah ekosistem resi gudang nasional.

Signing of Strategic Cooperation within Danareksa SOE Holding on Warehouse Receipt System Integration

PT KBI initiated the signing of a synergistic cooperation agreement among members of the Danareksa SOE Holding (KIMA, JIEP, SIER, KPBI, Danareksa Finance) as a concrete step to strengthen integration and create added value for the national warehouse receipt ecosystem.



RKAT 2026

RKAT 2026 Disahkan, Pondasi Kokoh untuk Inovasi dan Layanan Terdepan.

2026 Work and Budget Plan (RKAT 2026)

2026 Work Plan and Budget Approved, A Solid Foundation for Innovation and Leading Services.





Peresmian PT KPBI Sebagai Pengelola Gudang

PT KPBI resmi mendapat persetujuan sebagai Pengelola Gudang SRG dari BAPPEBTI. Hal tersebut tercantum dalam Surat Tugas BAPPEBTI Nomor TU.04/215A/BAPPEBTI.5/ST/11/2025.

Inauguration of PT KPBI as Warehouse Manager

PT KPBI has officially received approval as a Warehouse Receipt (SRG) Manager from BAPPEBTI, as stated in BAPPEBTI Assignment Letter No. TU.04/215A/BAPPEBTI.5/ST/11/2025.



Media Gathering: KBI Peduli

KBI Peduli: Dorong Produktivitas Komoditas Resi Gudang, Pemberdayaan Petani, dan Dukungan Sosial. Bincang-bincang santai akhir tahun bersama rekan media.

Media Gathering: KBI Peduli

KBI Peduli: Promoting Productivity in Warehouse Receipt Commodities, Farmer Empowerment, and Social Support. A year-end casual discussion was held with media partners.



Kaleidoskop PT KBI 2025

"Kaleidoskop 2025: *Growing Harmony Together*" sebuah refleksi bahwa di tengah tantangan, kita tidak berjalan sendiri, melainkan tumbuh bersama dalam satu irama dan tujuan yang sama.

PT KBI 2025 Kaleidoscope

"Kaleidoscope 2025: *Growing Harmony Together*" reflects that, amid challenges, we do not move alone but grow together in a unified rhythm and shared purpose.

KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL) 2025

Corporate Social Responsibility in 2025

Tanggal Date	Jenis Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Corporate Social Responsibility Activity	Penjelasan Description
Maret 2025 March 2025	Program Mudik Bersama Homecoming Program	Program Mudik Aman Sampai Tujuan BUMN 2025 dengan 100 pemudik (2 bus) yang berlokasi di Jakarta Pusat The 2025 SOE "Safe Homecoming Program" (Mudik Aman Sampai Tujuan) for 100 participants (two buses) departing from Central Jakarta
Maret 2025 March 2025	Program Ramadan - Paket Sembako Ramadan Program – Basic Necessities Package	Program Ramadan bersama PT KBI - Pembagian paket sembako kepada 100 anak yatim di Yayasan As-Shofiani Ahmadi Babelan Bekasi PT KBI Ramadan program involving the distribution of basic food packages to 100 orphans at the As-Shofiani Ahmadi Foundation, Babelan, Bekasi
April 2025 April 2025	Program Ramadan - Paket Sembako Ramadan Program – Basic Necessities Package	Ramadan bersama Holding BUMN Danareksa Pembagian 1000 paket sembako kepada Yayasan Alunjiva - Jakarta Utara Ramadan Program in collaboration with Danareksa SOE Holding, involving the distribution of 1,000 basic food packages to the Alunjiva Foundation, North Jakarta
Mei 2025 May 2025	Program Kurban Eid Al-Adha Sacrifice (Qurban) Program	Kegiatan Iduladha (Kurban) Tahun 1446 Hijriyah/2025 Masehi di lingkungan Kementerian Perdagangan dan kolaborasi dengan Holding Danareksa yang berlokasi di Jakarta Pusat dan Makassar Eid al-Adha (Qurban) activities for the year 1446 Hijri / 2025 CE in the Ministry of Trade area and in collaboration with Danareksa Holding in Central Jakarta and Makassar
Mei 2025 May 2025	Penandatanganan Kerjasama (PKS) dengan UNIIA Signing of a Cooperation Agreement with UNIIA	Penandatanganan PKS dengan UNIIA untuk program beasiswa mahasiswa/i berprestasi Signing of a Cooperation Agreement with UNIIA for an outstanding student scholarship program.
Juni 2025 June 2025	Program Donor Darah Blood Donation Program	Kegiatan Program Donor Darah di lingkungan Holding BUMN Danareksa Blood donation programs within the Danareksa SOE Holding environment
Juli 2025 July 2025	Program Ramadan - Paket Sembako Ramadan Program – Basic Necessities Package	Kegiatan bersama Serikat Pekerja PT KBI, Bantuan paket ramadan dan santunan yatim piatu Yayasan Al-Kahfi di Duren Sawit, Jakarta Timur dan Yayasan Yatim Piatu Rasulullah SAW, Jakarta Pusat Joint activities with the PT KBI Labor Union, including Ramadan aid packages and donations for orphans at the Al-Kahfi Foundation, Duren Sawit, East Jakarta, and the Rasulullah SAW Orphanage Foundation, Central Jakarta
Juli 2025 July 2025	Program Kemandirian Pangan Food Self-Sufficiency Program	Program Kemandirian Pangan Batch III 2025 yang dilaksanakan di Kabupaten Sukoharjo dan Klaten melibatkan 73 petani dengan luas lahan 10 ha (Program Rolling Fund Kedelai) The 2025 Food Self-Sufficiency Program Batch III, implemented in Sukoharjo and Klaten Regencies, involving 73 farmers across 10 hectares of land (Soybean Rolling Fund Program)
Juli 2025 July 2025	Program Penyediaan Sarana Air Bersih Provision of Clean Water	Program Penyediaan Sarana Air Bersih serta kebutuhan masyarakat lainnya di SMA Negeri 1 Warungkiara, Kabupaten Sukabumi Provision of clean water facilities and other community necessities at SMA Negeri 1 Warungkiara, Sukabumi Regency
September 2025 September 2025	Program Keagamaan Religious Activities	Kegiatan keagamaan dalam memperingati Maulid Nabi SAW di Majelis Nurul Islam, Bekasi Religious activities commemorating the Prophet Muhammad's Birthday (Maulid Nabi SAW) at Majelis Nurul Islam, Bekasi
September 2025 September 2025	Penggalangan Dana Kemanusiaan Korban Banjir Bali Humanitarian Fundraising for Bali Flood Victims	Bantuan Kemanusiaan Kebutuhan mendesak bayi/balita korban terdampak banjir Bali Humanitarian assistance for urgent baby and toddler needs for flood-affected victims in Bali
November 2025 November 2025	Program Bakti Sosial Social Assistance Program	Memperingati Hari Disabilitas Internasional Tahun 2025 - Partisipasi Program Bakti Sosial Pemberian Alat Bantu Gerak bagi anggota Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia (PPDFI) pusat, Cijantung, Jakarta Timur Commemoration of International Day of Persons with Disabilities 2025 by participating in a social service program providing mobility aids to members of the Indonesian Physical Disability Association (PPDFI) Central Chapter, Cijantung, East Jakarta



Tanggal Date	Jenis Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Corporate Social Responsibility Activity	Penjelasan Description
November 2025 November 2025	Program Bantuan Baksos Social Assistance Program	Program Bantuan Baksos pengobatan gratis lansia Kegiatan Kesehatan Masyarakat di lingkungan RW 07 Kampung Baru, Kayuputih - Jakarta Timur (TJSL) Social Assistance Program – Free Medical Services for the Elderly, as part of a community health initiative in RW 07, Kampung Baru, Kayuputih, East Jakarta (CSR)
November 2025 November 2025	Program Sarana dan Prasarana Petani Rumput Laut Provision of Facilities and Infrastructure for Seaweed Farmers	Program Sarana dan Prasarana Petani Rumput Laut (Mesin Perahu) di Pantai Lontar, Serang Provision of facilities and infrastructure for seaweed farmers (boat engines) at Lontar Beach, Serang
April dan November 2025 April and November 2025	Program Reforestasi Reforestation Program	Program pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatkan produksi kopi, kegiatan Reforestasi Tanaman Komoditi Kopi Kab. Garut Batch I dan II dalam periode 1 tahun Community empowerment programs to increase coffee production through coffee commodity reforestation activities in Garut Regency, Batch I and II, conducted over a one-year period
November 2025 November 2025	Kerja Sama Kemitraan Domba dan Pertanian Hortikultura Sheep and Horticulture Farming Partnership Program	Bantuan Kerja Sama kemitraan domba dan pertanian hortikultura Kelompok Tani Sedyo Manunggal 1 Bantul, Jawa Tengah Partnership assistance programs for sheep farming and horticultural agriculture with the Sedyo Manunggal 1 Farmer Group, Bantul, Central Java
November 2025 November 2025	Penggalangan Dana Kemanusiaan Dukungan Akses Air Bersih Humanitarian Fundraising to Support Access to Clean Water	Bantuan Kemanusiaan Partisipasi Penggalangan Dana Kemanusiaan Dukungan Akses Air Bersih untuk korban bencana alam banjir di Aceh Tamiang berkolaborasi dengan Industri Perdagangan Berjangka Komoditi, PT Bursa Berjangka Jakarta Humanitarian assistance through fundraising participation to support clean water access for flood disaster victims in Aceh Tamiang, in collaboration with the Commodity Futures Trading Industry and PT Bursa Berjangka Jakarta
November 2025 November 2025	Program SEMAR Lingkungan Tanam Pohon SEMAR Environmental Program: Tree Planting	Program SEMAR Lingkungan Tanam Pohon berkolaborasi dengan Holding Danareksa yang diadakan di BUMN Kawasan Industri, Jakarta Timur The SEMAR Environmental Program involving tree planting activities in collaboration with Danareksa Holding, conducted in the SOE Industrial Estate area, East Jakarta
Desember 2025 December 2025	Penggalangan Dana Kemanusiaan Korban Banjir Sumatra Humanitarian Assistance for Sumatra Flood Victims	Bantuan 5 ton beras dan sembako untuk korban banjir Sumatra berkolaborasi dengan Holding BUMN Danareksa Distribution of 5 tons of rice and basic food supplies for flood victims in Sumatra in collaboration with Danareksa SOE Holding



02.

LAPORAN MANAJEMEN

Management Report





LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners' Report



Hernawan Bakti Sasongko

Komisaris Utama

President Commissioner

Di tengah dinamika ekonomi nasional dan global, serta perubahan struktural dalam industri perdagangan berjangka, tahun 2025 merupakan periode yang menuntut penyesuaian strategis signifikan, terutama dengan berlakunya UU P2SK yang menempatkan industri perdagangan berjangka di bawah pengawasan tiga otoritas sekaligus, yakni BAPPEBTI, OJK, dan BI.

Amid national and global economic dynamics, as well as structural changes within the futures trading industry, 2025 was a period requiring significant strategic adjustments, particularly following the enactment of the Financial Sector Development and Strengthening Law (UU P2SK), which places the futures trading industry under the supervision of three authorities simultaneously, namely BAPPEBTI, the Financial Services Authority (OJK), and Bank Indonesia (BI).



Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya, PT Kliring Berjangka Indonesia dapat melewati tahun 2025 yang diiringi dengan berbagai tantangan sekaligus peluang. Dengan ini kami menyampaikan Laporan Dewan Komisaris Tahun Buku 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.

Di tengah dinamika ekonomi global, nasional serta perubahan struktural dalam industri perdagangan berjangka, tahun 2025 merupakan periode yang menuntut penyesuaian strategis signifikan, terutama dengan berlakunya UU P2SK yang menempatkan industri perdagangan berjangka di bawah pengawasan tiga otoritas sekaligus, yakni BAPPEBTI, OJK, dan BI. Kompleksitas lanskap regulasi tersebut menuntut Direksi untuk meningkatkan ketelitian, penguatan proses, serta adaptasi model bisnis. Hal ini ditambah dengan perubahan struktural dalam industri perdagangan berjangka, penyesuaian regulasi melalui implementasi UU P2SK, serta tantangan ekonomi global dan nasional yang turut memengaruhi ekosistem usaha.

Selain itu, kondisi global yakni di antaranya penurunan harga komoditas utama seperti minyak dan kelapa karena kelebihan pasokan global serta harga minyak kelapa sawit mentah (CPO) yang diperkirakan turun karena peningkatan produksi juga dapat memengaruhi margin keuntungan dan strategi lindung nilai pelaku industri. Sebagai pelaku industri, PT KBI diwajibkan untuk mengantisipasi potensi, peluang, dan tantangan bagi Perusahaan dengan dinamika dan perubahan lingkungan bisnis dalam dinamika perubahan tata kelola dan regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penilaian terhadap Kinerja Direksi

Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas upaya Direksi PT Kliring Berjangka Indonesia dalam menjaga kesinambungan operasional dan stabilitas layanan kliring sepanjang Tahun Buku 2025 di tengah dinamika ekonomi global, nasional, serta perubahan struktural dalam industri perdagangan berjangka. Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah melakukan langkah-langkah strategis yang tepat melalui peningkatan kapabilitas pengendalian risiko kliring, penguatan keandalan sistem elektronik, serta penjaminan dalam *holding*, sehingga meningkatkan keterhubungan dan efisiensi pemrosesan operasional.

Dear Shareholders and Stakeholders,

We would like to convey our gratitude to God Almighty for His blessings and grace, which enabled PT Kliring Berjangka Indonesia to navigate through 2025 amid various challenges and opportunities. We hereby present the Board of Commissioners' Report for the Fiscal Year 2025 as our accountability for the implementation of our supervisory and advisory functions to the Board of Directors.

Amid global and national economic dynamics, as well as structural changes within the futures trading industry, 2025 was a period requiring significant strategic adjustments, particularly following the enactment of the Financial Sector Development and Strengthening Law (UU P2SK), which places the futures trading industry under the supervision of three authorities simultaneously, namely BAPPEBTI, the Financial Services Authority (OJK), and Bank Indonesia (BI). The complexity of this regulatory landscape has required the Board of Directors to enhance prudence, strengthen internal processes, and adapt the business model. This has been further compounded by structural changes in the futures trading industry, regulatory adjustments through the implementation of UU P2SK, as well as global and national economic challenges that have affected the overall business ecosystem.

In addition, global conditions, including the decline in prices of major commodities such as oil and palm due to global oversupply, as well as the anticipated decrease in crude palm oil (CPO) prices driven by increased production, may affect industry players' profit margins and hedging strategies. As an industry participant, PT KBI is mandated to anticipate potential risks, opportunities, and challenges facing the Company amid the evolving business environment and ongoing changes in governance and regulatory frameworks.

Performance Assessment of the Board of Directors

The Board of Commissioners extends its appreciation to the Board of Directors of PT Kliring Berjangka Indonesia in maintaining operational continuity and the stability of clearing services throughout the Fiscal Year 2025 amid global and national economic dynamics, as well as structural changes in the futures trading industry. The Board of Commissioners is of the view that the Board of Directors has undertaken appropriate strategic measures through the enhancement of clearing risk management capabilities, strengthening the reliability of electronic systems, and providing intra-holding guarantees, thereby improving connectivity and operational processing efficiency.



Dalam setiap kesempatan, Dewan Komisaris memastikan bahwa strategi yang dijalankan Direksi telah mempertimbangkan dinamika lingkungan bisnis, perubahan regulasi, serta kebutuhan pemangku kepentingan, sekaligus tetap berada dalam koridor tata kelola yang baik.

On each occasion, the Board of Commissioners ensured that the strategies implemented by the Board of Directors had taken into account the dynamics of the business environment, regulatory changes, and stakeholders' needs, while remaining within the framework of good corporate governance.



Di tengah dinamika pasar dan tekanan pada beberapa lini bisnis, Direksi mampu menjaga momentum pertumbuhan operasional sebesar 11% dibandingkan tahun sebelumnya. Pengawasan risiko, kepatuhan regulasi, dan integritas proses bisnis dinilai telah dikelola dengan baik. Meski demikian, Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk memastikan bahwa proses adaptasi terhadap kerangka pengawasan multi-otoritas dilakukan secara menyeluruh untuk menjaga reputasi serta keberlanjutan bisnis Perusahaan.

Amid market dynamics and pressures across several business lines, the Board of Directors managed to maintain operational growth momentum of 11% compared to the previous year. Risk monitoring, regulatory compliance, and the integrity of business processes have been assessed as being well managed. Nevertheless, the Board of Commissioners encourages the Board of Directors to ensure that adaptation to the multi-authority supervisory framework is carried out comprehensively to safeguard the Company's reputation and business sustainability.

Pengawasan Terhadap Penerapan Strategi PT KBI

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan atas perumusan dan implementasi strategi Perusahaan oleh Direksi secara intensif dan berkesinambungan. Pengawasan dilakukan melalui berbagai forum kerja yang mencerminkan mekanisme kontrol yang utuh, mulai dari rapat internal Dewan Komisaris hingga rapat gabungan bersama Direksi yang diselenggarakan secara berkala untuk membahas perkembangan kinerja operasional, kondisi keuangan, manajemen risiko, serta isu-isu strategis yang memengaruhi arah kebijakan Perusahaan. Dalam setiap kesempatan, Dewan Komisaris memastikan bahwa strategi yang dijalankan Direksi telah mempertimbangkan dinamika lingkungan bisnis, perubahan regulasi, serta kebutuhan pemangku kepentingan, sekaligus tetap berada dalam koridor tata kelola yang baik. Selain evaluasi dokumen manajerial seperti laporan keuangan, arus kas, dan laporan risiko, Dewan Komisaris juga melakukan kunjungan lapangan untuk memperoleh gambaran faktual terkait operasional dan tantangan di tingkat mitra maupun pelaku

Supervision on the Implementation of PT KBI Strategies

In 2025, the Board of Commissioners executed its supervisory function over the formulation and implementation of the Company's strategies by the Board of Directors in an intensive and continuous manner. Such supervision was conducted through various working forums reflecting a comprehensive control mechanism, ranging from internal meetings of the Board of Commissioners to joint meetings with the Board of Directors held regularly to discuss developments in operational performance, financial condition, risk management, as well as strategic issues affecting the Company's policy direction. On each occasion, the Board of Commissioners ensured that the strategies implemented by the Board of Directors had taken into account the dynamics of the business environment, regulatory changes, and stakeholders' needs, while remaining within the framework of good corporate governance. In addition to reviewing managerial documents such as financial statements, cash flow reports, and risk reports, the Board of Commissioners also conducted site visits to obtain a factual overview of operations and challenges at the partner and



usaha. Partisipasi Dewan Komisaris dalam berbagai *workshop* dan forum industri turut memperkuat pemahaman terhadap tren pasar dan perkembangan regulasi sehingga rekomendasi pengawasan dapat diberikan secara objektif dan berbasis data.

Penilaian Kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menilai bahwa seluruh komite pendukung, di antaranya Komite Audit, Pemantau Risiko, dan Tata Kelola Terintegrasi, serta Komite Nominasi dan Remunerasi, telah menjalankan tugasnya secara efektif dan sesuai pedoman kerja yang berlaku. Komite-komite tersebut berperan penting dalam memberikan analisis mendalam serta rekomendasi yang objektif bagi Dewan Komisaris, khususnya terkait pengawasan internal, tata kelola, audit, risiko, dan aspek SDM.

Komite Audit, Pemantau Risiko, dan Tata Kelola Terintegrasi telah memberikan kontribusi signifikan dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan integritas laporan keuangan. Komite ini juga mendukung fungsi pengawasan risiko secara komprehensif, terutama dalam menghadapi dinamika regulasi dan pasar yang cepat berubah. Sementara Komite Nominasi dan Remunerasi telah memastikan bahwa kebijakan pengembangan talenta, evaluasi kinerja, dan struktur remunerasi dijalankan secara objektif dan mendukung strategi jangka panjang Perusahaan.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Komite Audit, Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi, serta Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sepanjang tahun 2025. Hal ini dibuktikan dengan dilaksanakannya rapat Dewan Komisaris dengan komite-komite di bawah Dewan Komisaris, di antaranya Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, sesuai dengan kebutuhan pengawasan di pedoman kerja masing-masing komite serta indikator KPI. Dengan demikian, Dewan Komisaris menilai bahwa seluruh komite di bawah Dewan Komisaris telah berfungsi secara efektif dalam memberikan analisis, rekomendasi, dan laporan atas isu-isu yang memerlukan perhatian maupun tindak lanjut Dewan Komisaris.

industry participant levels. The participation of the Board of Commissioners in various workshops and industry forums further strengthened its understanding of market trends and regulatory developments, enabling supervisory recommendations to be provided in an objective and data-driven manner.

Assessment of Committees under the Board of Commissioners

The Board of Commissioners affirms that the Audit, Risk Monitoring and Integrated Governance Committee, together with the Nomination and Remuneration Committee, have executed their mandates effectively and in compliance with the applicable guidelines. Their contributions in providing thorough assessments and objective advice have strengthened the Board of Commissioners' supervisory role, especially with respect to governance, audit integrity, risk monitoring, internal control systems, and human capital strategy.

The Audit, Risk Monitoring and Integrated Governance Committee has made significant contributions in ensuring the effectiveness of the internal control system and the integrity of the financial statements. The Committee has also supported comprehensive risk monitoring, particularly in responding to rapidly evolving regulatory and market dynamics. Meanwhile, the Nomination and Remuneration Committee has ensured that talent development policies, performance evaluations, and remuneration structures are implemented objectively and aligned with the Company's long-term strategy.

In the execution of their supervisory functions, the Audit, Risk Monitoring and Integrated Governance Committee, as well as the Nomination and Remuneration Committee, performed all duties and responsibilities optimally throughout 2025. This is demonstrated through meetings held between the Board of Commissioners and its supporting committees, including the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee, carried out in line with supervisory requirements as defined in each committee's charter and KPI indicators. Accordingly, the Board of Commissioners concludes that all committees under its supervision have functioned effectively in providing analysis, recommendations, and reports on matters requiring the attention and follow-up of the Board of Commissioners.

Peran Dewan Komisaris dalam Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta Pengelolaan Whistleblowing System (WBS)

Dewan Komisaris senantiasa memastikan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik di PT Kliring Berjangka Indonesia berlangsung secara konsisten dan terintegrasi dalam seluruh aktivitas Perusahaan. Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan secara aktif untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, proses bisnis, dan langkah strategis Direksi berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran melalui penelaahan yang intensif terhadap laporan keuangan, sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap ketentuan regulator.

Untuk memperkuat implementasi tata kelola yang baik di Perusahaan, Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan atas efektivitas pengelolaan *Whistleblowing System* (WBS) sebagai mekanisme pelaporan pelanggaran yang krusial dalam menjaga integritas Perusahaan. Dewan Komisaris menilai bahwa sistem WBS telah berjalan dengan baik sebagai kanal pelaporan yang aman dan kredibel. Meski demikian, Dewan Komisaris terus mendorong Direksi untuk terus meningkatkan sosialisasi dan pemahaman karyawan terhadap prosedur pelaporan, serta memperkuat perlindungan bagi pelapor agar tercipta lingkungan kerja yang mendorong keterbukaan dan keberanian dalam melaporkan dugaan pelanggaran. Dewan Komisaris menilai penguatan WBS merupakan upaya fundamental dalam membangun budaya kepatuhan yang berkelanjutan.

Roles of the Board of Commissioners in the Implementation of Good Corporate Governance and Whistleblowing System (WBS)

The Board of Commissioners consistently ensures that good corporate governance at PT Kliring Berjangka Indonesia is implemented consistently and integrated across all the Company activities. Throughout 2025, the Board of Commissioners actively performed its supervisory function to ensure that policies, business processes, and strategic initiatives undertaken by the Board of Directors were aligned with the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. This was exercised through intensive reviews of financial statements, internal control systems, risk management practices, and compliance with regulatory requirements.

To reinforce the implementation of good governance within the Company, the Board of Commissioners also oversaw the effectiveness of the Whistleblowing System (WBS) as a crucial mechanism for reporting violations in maintaining corporate integrity. The Board of Commissioners is of the view that the WBS has functioned effectively as a secure and credible reporting channel. Nevertheless, the Board of Commissioners continues to encourage the Board of Directors to enhance the dissemination and employees' understanding of reporting procedures, as well as to strengthen protection for whistleblowers in order to foster a work environment that promotes openness and the courage to report suspected violations. The Board of Commissioners believes that strengthening the WBS constitutes a fundamental effort in building a sustainable culture of compliance.



Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan secara aktif untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, proses bisnis, dan langkah strategis Direksi berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

The Board of Commissioners actively performed its supervisory function to ensure that policies, business processes, and strategic initiatives undertaken by the Board of Directors were aligned with the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.





Pandangan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi

Dewan Komisaris memandang bahwa prospek usaha Perusahaan pada Tahun 2026 tetap menjanjikan pertumbuhan positif meskipun dihadapkan pada tantangan global dan nasional. Fondasi bisnis yang kuat, kapabilitas pengelolaan risiko yang memadai, serta strategi Direksi yang adaptif menjadi dasar penting bagi keberlanjutan kinerja.

Direksi juga telah menetapkan arah kebijakan yang realistis dengan mempertimbangkan dinamika pasar dan regulasi. Namun demikian, Dewan Komisaris menekankan pentingnya fokus khusus pada penguatan bisnis Sistem Resi Gudang (SRG) yang pada tahun 2025 belum mencapai kinerja optimal. Perbaikan tata kelola, penetrasi pasar, serta penguatan ekosistem SRG perlu menjadi prioritas strategis tahun mendatang.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Sepanjang periode pelaporan, Perusahaan tidak mengalami perubahan komposisi Dewan Komisaris di Perusahaan, sehingga komposisi Dewan Komisaris di Perusahaan masih mengacu pada Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-55/MBU/03/2024 dan Nomor: SK-100/MBU/04/2024, serta Surat Keputusan Direktur Utama PT Danareksa (Persero) Nomor: KPPS-5/DR/DIRUT/03/2024 dan Nomor: KPPS-7/DR/DIRUT/04/2024. Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris PT Kliring Berjangka Indonesia per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

- Komisaris Utama : Hernawan B. Sasongko
- Komisaris Independen : Fajar Massadiyah Egy
- Komisaris Independen : Irman Sahroni Ahmad

Apresiasi

Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas capaian positif Perusahaan pada tahun 2025, khususnya pertumbuhan pendapatan operasional sebesar 10,31% serta keberhasilan pendapatan *fee* kliring yang mencapai 123,48% dari target RKAP. Pencapaian tersebut menunjukkan ketangguhan dan kemampuan adaptasi Direksi serta seluruh jajaran manajemen.

Dewan Komisaris juga menyampaikan apresiasi kepada Direksi, seluruh jajaran manajemen, dan seluruh karyawan PT Kliring Berjangka Indonesia atas dedikasi, profesionalisme, serta komitmen yang telah ditunjukkan sepanjang tahun 2025. Di tengah dinamika industri dan tantangan regulasi yang semakin kompleks, Perusahaan tetap mampu menjaga stabilitas operasional dan menghasilkan capaian yang positif.

Business Outlook by the Board of Directors

Despite global and national challenges, the Board of Commissioners believes that the Company's business prospects for 2026 remain positive. A strong business foundation, adequate risk management capabilities, and the adaptive strategies implemented by the Board of Directors constitute key pillars supporting sustainable performance.

The Board of Directors has also established a realistic policy direction by taking into account market and regulatory dynamics. Nevertheless, the Board of Commissioners prioritizes strengthening the Warehouse Receipt System (SRG) business, which did not achieve optimal performance in 2025. Improvements in governance, market penetration, and ecosystem strengthening within the SRG framework should become strategic priorities for the coming year.

Board of Commissioners Changes

Throughout the reporting period, there were no changes in the composition of the Company's Board of Commissioners. Accordingly, the composition of the Board of Commissioners remains in reference to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-55/MBU/03/2024 and No. SK-100/MBU/04/2024, as well as the Decree of the President Director of PT Danareksa (Persero) No. KPPS-5/DR/DIRUT/03/2024 and No. KPPS-7/DR/DIRUT/04/2024. Therefore, the composition of the Board of Commissioners of PT Kliring Berjangka Indonesia as of December 31, 2025, is as follows:

- President Commissioner : Hernawan B. Sasongko
- Independent Commissioner : Fajar Massadiyah Egy
- Independent Commissioner : Irman Sahroni Ahmad

Appreciation

The Board of Commissioners extends its appreciation for the Company's positive achievements in 2025, particularly the 10.31% growth in operating revenue and the accomplishment of clearing fee income reaching 123.48% of the RKAP target. These achievements reflected the resilience and adaptability of the Board of Directors as well as the entire management team.

The Board of Commissioners also conveys its appreciation to the Board of Directors, the management team, and all employees of PT Kliring Berjangka Indonesia for their dedication, professionalism, and commitment demonstrated throughout 2025. Amid increasing industry dynamics and regulatory complexities, the Company has been able to maintain operational stability and deliver positive performance.

Dewan Komisaris juga berterima kasih kepada para pemegang saham, regulator, mitra usaha, serta seluruh pemangku kepentingan atas dukungan dan kepercayaannya kepada Perusahaan. Dewan Komisaris berharap rekomendasi, evaluasi, dan pandangan strategis yang disampaikan dalam laporan ini dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja dan penguatan tata kelola Perusahaan pada tahun-tahun mendatang. Dengan semangat perbaikan berkelanjutan, Dewan Komisaris meyakini bahwa Perusahaan akan mampu menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang untuk memperkuat posisinya sebagai lembaga kliring yang terpercaya dan berintegritas.

The Board of Commissioners is also grateful to the shareholders, regulators, business partners, and all stakeholders for their continued support and trust in the Company. The Board of Commissioners hopes that the recommendations, evaluations, and strategic perspectives presented in this report will contribute to enhanced performance and strengthened corporate governance in the years ahead. With a spirit of continuous improvement, the Board of Commissioners is confident that the Company will be able to navigate future challenges and seize opportunities to reinforce its position as a trusted and integrity-driven clearing institution.

Jakarta, Mei 2025
Jakarta, May 2025

Hernawan Bekti Sasongko
Komisaris Utama
President Commissioner



LAPORAN DIREKSI

Board of Directors' Report



Budi Susanto

Direktur Utama
President Director

Sepanjang tahun 2025, PT KBI memberikan perhatian besar pada penguatan internal melalui peningkatan keandalan infrastruktur teknologi informasi, percepatan otomasi berbagai proses bisnis, serta peningkatan kualitas layanan untuk memastikan operasi yang stabil, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pasar.

Throughout 2025, PT KBI prioritized internal strengthening by improving the reliability of its information technology infrastructure, accelerating the automation of various business processes, and enhancing service quality to ensure operations remained stable, efficient, and responsive to market needs.



Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya, Perusahaan dapat melewati tahun buku 2025 yang dipenuhi oleh tantangan dan peluang di dalamnya. Melalui laporan ini, Direksi menyampaikan kondisi Perusahaan yang melingkupi tinjauan makroekonomi dan industri Perusahaan, kebijakan strategis atas tantangan yang dihadapi, perbandingan hasil atas target yang telah ditetapkan, penerapan tata kelola Perusahaan, pelaksanaan kegiatan TJSL, hingga pandangan atas prospek usaha Perusahaan.

Direksi PT Kliring Berjangka Indonesia (PT KBI) menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan atas dukungan yang memungkinkan Perusahaan mencatatkan kinerja yang solid sepanjang 2025. Dalam tahun yang ditandai oleh dinamika ekonomi global, penyesuaian kebijakan nasional, serta perubahan regulasi di sektor jasa keuangan, PT KBI berhasil mempertahankan stabilitas operasional, meningkatkan layanan, dan mencapai kinerja melampaui target.

Tinjauan Makroekonomi dan Industri

Kondisi makroekonomi global sepanjang tahun 2025 banyak dipengaruhi oleh intensitas konflik geopolitik antarnegara. Ketegangan ini memicu volatilitas pada berbagai komoditas, terutama komoditas emas yang mengalami kenaikan harga signifikan. Perubahan tersebut berdampak positif bagi segmen bisnis PT KBI yang berkaitan dengan perdagangan berjangka dan pasar fisik emas digital, karena volume transaksi meningkat seiring naiknya aktivitas *trading* yang memanfaatkan volatilitas pasar. Dari sisi kontribusi bisnis, kenaikan transaksi emas menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan pendapatan Perusahaan di tahun 2025. Meskipun demikian, kondisi ekonomi global yang tidak stabil tetap menuntut kewaspadaan dan penyesuaian strategi untuk menjaga keberlanjutan operasi dan mitigasi risiko.

Sementara itu, dari sisi nasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 berada dalam kondisi relatif stabil dengan kebijakan fiskal dan moneter yang berorientasi pada pemulihan daya beli dan stabilisasi pasar keuangan. Salah satu kebijakan yang berpengaruh signifikan adalah penyaluran dana Pemerintah ke sistem perbankan melalui Bank Himbara. Kebijakan ini meningkatkan likuiditas perbankan dan menurunkan tingkat suku bunga. Bagi PT KBI, penurunan suku bunga membawa implikasi pada menurunnya *yield* penempatan dana pihak ketiga dan hasil investasi *treasury*. Meskipun demikian, dampak negatif tersebut dapat dikompensasi oleh peningkatan pendapatan operasional dari meningkatnya aktivitas pasar, terutama pada instrumen berbasis komoditas.

Dear Shareholders and Stakeholders,

We would like to convey our praise and gratitude to God Almighty, for by His grace and mercy, the Company successfully navigated the fiscal year 2025, a year marked by both significant challenges and emerging opportunities. Through this report, the Board of Directors presents a comprehensive overview of the Company's condition, encompassing a macroeconomic and industry review, strategic policies implemented to address market challenges, a comparison of actual results against set targets, the implementation of Good Corporate Governance (GCG), Corporate Social Responsibility (CSR) programs, and our outlook on the Company's business prospects.

The Board of Directors of PT Kliring Berjangka Indonesia (PT KBI) wishes to express its deepest appreciation to all stakeholders for the support that has enabled the Company to record a solid performance throughout 2025. In a year marked by global economic dynamics, national policy adjustments, and regulatory changes in the financial services sector, PT KBI successfully maintained operational stability, enhanced its services, and achieved performance levels that exceeded our targets.

Macroeconomic and Industry Review

Global macroeconomic conditions throughout 2025 were heavily influenced by the intensity of geopolitical conflicts. These tensions triggered volatility across various commodities, most notably gold, which experienced a significant price surge. These shifts had a positive impact on PT KBI's business segments related to futures trading and the digital gold physical market, as transaction volumes grew in tandem with increased trading activity capitalizing on market volatility. In terms of business contribution, the rise in gold transactions was a key driver of the Company's revenue growth in 2025. Nevertheless, unstable global economic conditions have continued to demand vigilance and strategic adjustments to ensure operational sustainability and robust risk mitigation.

On the domestic front, Indonesia's economic growth remained relatively stable throughout 2025, supported by fiscal and monetary policies oriented toward recovering purchasing power and stabilizing financial markets. One policy with a significant impact was the Government's placement of funds into the banking system through state-owned banks (*Bank Himbara*). This policy boosted banking liquidity and led to a decrease in interest rates. For PT KBI, the lower interest rates resulted in a decline in the yield on third-party fund placements and treasury investment returns. However, this negative impact was offset by an increase in operating income from heightened market activity, particularly in commodity-based instruments.



PT KBI memberikan perhatian besar pada penguatan internal melalui peningkatan keandalan infrastruktur teknologi informasi, percepatan otomatisasi berbagai proses bisnis, serta peningkatan kualitas layanan untuk memastikan operasi yang stabil, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pasar.

PT KBI placed significant emphasis on internal strengthening by enhancing the reliability of Information Technology (IT) infrastructure, accelerating the automation of various business processes, and improving service quality to ensure operations remain stable, efficient, and responsive to market demands.

Pada saat yang sama, industri perdagangan berjangka dan lembaga kliring menghadapi tahun yang penting dengan diberlakukannya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). UU ini mengubah peta pengawasan derivatif keuangan di Indonesia dengan menempatkan derivatif berbasis efek di bawah pengawasan OJK dan derivatif PUVA di bawah Bank Indonesia. Bagi PT KBI, dampak regulasi ini selama 2025 lebih banyak bersifat administratif, berupa pemenuhan perizinan baru dan kewajiban pelaporan tambahan kepada multi-regulator. Meskipun menambah beban kepatuhan, perubahan ini tidak berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan Perusahaan pada tahun berjalan. Namun demikian, hal ini menjadi momentum penting bagi PT KBI untuk memperkuat tata kelola, proses kepatuhan, serta kesiapan struktur organisasi menghadapi ekosistem regulasi yang semakin kompleks.

Kebijakan Strategis

Sepanjang tahun 2025, PT KBI menjalankan arah kebijakan strategis yang terfokus pada tiga area utama yang saling memperkuat satu sama lain. Perusahaan memberikan perhatian besar pada penguatan internal melalui peningkatan keandalan infrastruktur teknologi informasi, percepatan otomatisasi berbagai proses bisnis, serta peningkatan kualitas layanan untuk memastikan operasi yang stabil, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Pada saat yang sama, PT KBI memperkuat hubungan kelembagaan dengan para pemangku kepentingan, termasuk *shareholder*, regulator, dan memperdalam sinergi dengan Holding Danareksa agar koordinasi strategis dapat berjalan lebih solid dan terintegrasi.

Concurrently, the futures trading and clearing house industry faced a pivotal year with the enactment of the Law on the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU P2SK). This law restructured the supervisory landscape for financial derivatives in Indonesia by placing securities-based derivatives under the supervision of the Financial Services Authority (OJK) and Foreign Exchange Market (PUVA) derivatives under Bank Indonesia. For PT KBI, the impact of this regulation in 2025 was primarily administrative, involving the fulfillment of new licensing requirements and additional reporting obligations to multiple regulators. While this increased the compliance burden, these changes did not significantly impact the Company's financial performance during the current year. Nevertheless, this shift serves as a vital momentum for PT KBI to strengthen its governance, compliance processes, and organizational readiness to navigate an increasingly complex regulatory ecosystem.

Strategic Policies

Throughout 2025, PT KBI executed a strategic policy direction focused on three mutually reinforcing pillars. The Company placed significant emphasis on internal strengthening by enhancing the reliability of Information Technology (IT) infrastructure, accelerating the automation of various business processes, and improving service quality to ensure operations remain stable, efficient, and responsive to market demands. Concurrently, PT KBI bolstered institutional relationships with stakeholders, including shareholders, regulators, and industry participants, while deepening synergies within the Danareksa Holding to ensure more robust and integrated strategic coordination.





Di sisi lain, penyempurnaan model bisnis menjadi bagian penting dari strategi Perusahaan, terutama melalui penguatan peran anak perusahaan yang tahun ini mencapai kemajuan signifikan dengan diperolehnya lisensi sebagai Pengelola Gudang. Seluruh fokus strategis tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai inisiatif yang terstruktur melalui program kerja yang jelas, lengkap dengan penanggung jawab masing-masing, target waktu penyelesaian yang terukur, serta mekanisme monitoring berkala untuk memastikan progres yang berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak optimal bagi keberlanjutan usaha PT KBI.

Tantangan yang Dihadapi dan Langkah Strategis yang Diterapkan

Secara umum tidak terdapat kendala yang bersifat material dalam operasional Perusahaan tahun ini, Direksi menyadari bahwa keberlangsungan industri perdagangan berjangka memerlukan komitmen yang kuat terhadap *continuous improvement*. Tantangan utama tidak lagi sekadar terkait hambatan teknis, tetapi juga tuntutan terhadap peningkatan kualitas layanan, adaptasi terhadap regulasi, dan penyempurnaan proses bisnis dalam memastikan integritas pasar. PT KBI menempatkan koordinasi intensif dengan pemangku kepentingan; mulai dari regulator, *shareholder*, hingga pelaku industri sebagai fondasi bagi upaya Perusahaan dalam mempertahankan peran sebagai *Self-Regulated Organization* (SRO) yang kredibel dan efektif.

Dalam menjaga efektivitas layanan kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi, PT KBI mengandalkan sistem operasional yang terstruktur, andal, dan terus diperbarui sesuai kebutuhan pasar. Upaya evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan seluruh proses berjalan tanpa gangguan, sekaligus memperkuat mitigasi risiko terhadap potensi gagal bayar atau ketidakstabilan pasar. Dinamika volume transaksi sepanjang 2025 mendorong Perusahaan untuk meningkatkan kapasitas sistem, memperkuat infrastruktur teknologi informasi, dan melakukan otomasi pada berbagai bagian proses bisnis.

Penyesuaian organisasi juga dilaksanakan agar setiap fungsi dan unit dapat bekerja lebih fokus, khususnya dalam memberikan layanan sesuai karakteristik masing-masing lini bisnis. Dalam menjaga efektivitas layanan kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi, PT KBI mengandalkan sistem operasional yang terstruktur, andal, dan terus diperbarui sesuai kebutuhan pasar. Upaya evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan seluruh proses berjalan tanpa gangguan, sekaligus memperkuat mitigasi risiko terhadap potensi gagal bayar atau ketidakstabilan pasar.

Furthermore, business model refinement remained a vital component of the Company's strategy, particularly through strengthening the role of its subsidiary. This year, significant progress was achieved with the acquisition of a Warehouse Manager license. These strategic focal points were translated into structured initiatives through clear work programs, complete with designated persons-in-charge (PICs), measurable completion targets, and periodic monitoring mechanisms to ensure progress aligns with the roadmap and delivers optimal impact for PT KBI's business sustainability.

Challenges and Mitigation Measures

While there were no material constraints on the Company's operations in 2025, the Board of Directors recognizes that the long-term viability of the futures trading industry demands a firm commitment to continuous improvement. The primary challenges are no longer merely technical hurdles but involve increasing demands for service quality, adaptation to new regulations, and the refinement of business processes to ensure market integrity. PT KBI has placed intensive coordination with stakeholders, ranging from regulators and shareholders to industry players, as the foundation of its efforts to maintain its role as a credible and effective Self-Regulatory Organization (SRO).

To maintain the effectiveness of its clearing, guarantee, and transaction settlement services, PT KBI relies on a structured and reliable operational system that is continuously updated to meet market needs. Periodic evaluations are conducted to ensure all processes run without disruption, while simultaneously strengthening risk mitigation against potential defaults or market instability. The dynamics of transaction volumes throughout 2025 prompted the Company to expand system capacity, reinforce IT infrastructure, and automate various segments of its business processes.

Organizational adjustments were also implemented to ensure each function and unit can operate with greater focus, particularly in providing services tailored to the specific characteristics of each business line. In safeguarding the effectiveness of clearing and settlement services, PT KBI maintains its commitment to a system that is not only robust but also agile enough to adapt to fluctuating market volumes. Periodic evaluation is conducted to ensure that all processes run without disruption, while simultaneously strengthening risk mitigation against potential defaults or market instability.

Perbandingan antara Hasil yang Dicapai dengan yang Ditargetkan

Kinerja PT KBI sepanjang tahun 2025 secara keseluruhan mencerminkan konsistensi strategi, eksekusi operasional yang kuat, dan kemampuan Perusahaan memanfaatkan peluang di tengah perubahan pasar. Dari sisi operasional, PT KBI berhasil mencapai 123% dari target anggaran, sekaligus menunjukkan pertumbuhan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa Perusahaan tidak hanya memenuhi target internal, tetapi juga berhasil menunjukkan peningkatan volume layanan dan efektivitas proses secara berkelanjutan. Sementara itu, dari sisi finansial, pendapatan usaha mencapai Rp208 miliar, meningkat sekitar 11% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini didorong terutama oleh peningkatan aktivitas transaksi emas, penguatan layanan kliring dan penjaminan, serta stabilitas performa anak perusahaan.

Selain pencapaian finansial dan operasional, tahun 2025 juga ditandai oleh beberapa *milestone* penting yang memperkuat posisi kompetitif dan arah jangka panjang PT KBI. Perusahaan memperoleh izin prinsip sebagai Lembaga Kliring PUVA, menggambarkan pengakuan regulator atas kesiapan dan kapabilitas Perusahaan dalam menjalankan mandatnya. PT KBI juga berperan dalam lahirnya peraturan BAPPEBTI terkait emas digital, yang tidak hanya memperjelas tata kelola ekosistem emas digital nasional tetapi juga memperkuat posisi PT KBI sebagai salah satu aktor utama dalam industri tersebut. Selain itu, terjalin *Memorandum of Understanding* (MoU) sinergi dengan anggota Holding Danareksa, serta diperolehnya lisensi sebagai Pengelola Gudang melalui Anak Perusahaan, yang memperluas cakupan bisnis sekaligus meningkatkan kapabilitas layanan PT KBI secara menyeluruh. Peningkatan signifikan pada infrastruktur dan teknologi informasi juga menjadi bagian penting dari pencapaian tahun 2025.

Analisis atas Kinerja PT KBI

Secara operasional, kinerja Perusahaan menunjukkan hasil yang solid dengan capaian sebesar 123% dari anggaran. Pencapaian ini menjadi lebih signifikan mengingat target anggaran tahun 2025 ditetapkan lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2024, sehingga pertumbuhan operasional secara *year-on-year* juga tercermin dengan jelas.

Dari aspek keuangan, pendapatan Perusahaan mencapai Rp209 miliar atau meningkat sekitar 11% dibandingkan tahun sebelumnya. Kombinasi antara pertumbuhan operasional dan kenaikan pendapatan tersebut menegaskan bahwa kinerja Perusahaan sepanjang 2025 berada dalam tren positif dan menunjukkan pertumbuhan yang konsisten.

Comparison between Achievement and Target

PT KBI's overall performance throughout 2025 reflected strategic consistency, strong operational execution, and the Company's ability to capture on opportunities amidst market shifts. Operationally, PT KBI successfully achieved 123% of its budget target, while demonstrating growth compared to the 2024 realization. This indicated that the Company not only met its internal targets but also succeeded in demonstrating a sustainable increase in service volume and process effectiveness. Meanwhile, from a financial perspective, operating revenue reached IDR208 billion, an increase of approximately 11% compared to the previous year. This increase was primarily driven by the growth in gold transaction activities, the strengthening of clearing and guarantee services, and the stable performance of the subsidiary.

In addition, 2025 was also marked by several key milestones that strengthened PT KBI's competitive position and long-term direction. The Company obtained principal licenses as a PUVA Clearing House from OJK and Bank Indonesia, reflecting regulatory recognition of the Company's readiness and capability in carrying out its mandate. PT KBI also played a role in the enactment of BAPPEBTI regulations regarding digital gold, which not only clarified the governance of the national digital gold ecosystem but also solidified PT KBI's position as one of the main actors in the industry. Furthermore, a Memorandum of Understanding (MoU) for synergy was established with members of Holding Danareksa, and a license as a Warehouse Manager was obtained through a Subsidiary, which expanded the business scope while enhancing PT KBI's comprehensive service capabilities. Significant improvements in infrastructure and information technology were also significant components of the 2025 achievements.

PT KBI Performance Analysis

Operationally, the Company's performance showed solid results with an achievement of 123% of the budget. This achievement is even more significant considering that the 2025 budget target was set higher than the 2024 realization, thus year-on-year operational growth is clearly reflected.

From a financial aspect, the Company's revenue reached IDR209 billion, representing an increase of approximately 11% compared to the previous year. The combination of operational growth and revenue increase confirms that the Company's performance throughout 2025 followed a positive trend and demonstrated consistent growth.





Selain capaian operasional dan keuangan yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat sejumlah *milestone* penting yang patut mendapatkan perhatian dan apresiasi. Pada tahun 2025, PT KBI berperan dalam proses lahirnya peraturan BAPPEBTI terkait emas digital, sebuah regulasi strategis yang memperkuat ekosistem perdagangan emas digital nasional.

Di sisi sinergi kelembagaan, keberhasilan PT KBI menandatangani MOU dengan anggota Holding Danareksa dan perolehan lisensi sebagai Pengelola Gudang semakin memperkuat rantai layanan PT KBI yang ditambah dengan adanya peningkatan signifikan pada aspek teknologi informasi dan penguatan infrastruktur yang menjadi fondasi utama bagi keandalan layanan operasional Perusahaan.

Teknologi Informasi

Infrastruktur TI menjadi aspek yang diperkuat sepanjang 2025. PT KBI meningkatkan kapasitas sistem, memperkuat keamanan, serta mempercepat integrasi otomasi proses untuk menghasilkan efisiensi. Langkah ini esensial mengingat dinamika volume transaksi dan tuntutan kepatuhan yang terus meningkat. Dengan memperkuat teknologi, Perusahaan memastikan bahwa layanan tetap stabil, responsif, dan dapat diandalkan oleh seluruh Anggota Kliring.

Sumber Daya Manusia

Perusahaan mengarahkan pengembangan sumber daya manusia sepanjang tahun 2025 untuk menjaga rasio produktivitas karyawan agar tetap optimal.

On top of the operational and financial achievements, there are several key milestones that deserve attention and appreciation. In 2025, PT KBI played a role in the establishment of BAPPEBTI regulations regarding digital gold, a strategic regulation that strengthens the national digital gold trading ecosystem.

In terms of institutional synergy, PT KBI's success in signing an MOU with members of the Danareksa Holding and obtaining a license as a Warehouse Manager further solidifies PT KBI's service chain. This is complemented by significant enhancements in information technology and infrastructure strengthening, which serve as the key foundation for the reliability of the Company's operational services.

Information Technology

IT infrastructure was a key area of reinforcement throughout 2025. PT KBI expanded system capacity, strengthened security, and accelerated process automation integration to drive efficiency. These strategies were essential given the dynamics of transaction volumes and ever-increasing compliance demands. By strengthening its technology, the Company ensures that services remain stable, responsive, and reliable for all Clearing Members.

Human Capital

The Company directed human capital development throughout 2025 toward maintaining an optimal employee productivity ratio.



Pada tahun 2025, PT KBI berhasil memperoleh izin prinsip sebagai Lembaga Kliring PUVA yang menjadi tonggak signifikan dalam penguatan posisi PT KBI di industri.

In 2025, PT KBI successfully obtained principal licenses as a PUVA Clearing House, which served as a significant milestone in strengthening PT KBI's position in the industry.



PT KBI menyeimbangkan kebutuhan Perusahaan dengan efektivitas biaya, memastikan bahwa setiap pegawai bekerja pada kapasitas yang paling produktif. Peningkatan produktivitas tersebut tercapai melalui pemetaan kebutuhan organisasi, peningkatan kualitas pelatihan, dan penugasan berbasis kompetensi.

Kegiatan TJSL

Pada bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), PT KBI menjalankan seluruh program secara terkoordinasi dengan BP BUMN dan Holding Danareksa. Pendekatan *joint program* memastikan keberlanjutan manfaat bagi masyarakat dan optimalisasi nilai sosial yang dihasilkan dari setiap kegiatan. Seluruh KPI TJSL tahun 2025 tercapai dengan baik, dengan implementasi yang sesuai rencana dan capaian *Social Return on Investment* (SROI) yang menunjukkan bahwa program memberikan dampak nyata dan terukur bagi masyarakat.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik

Tahun 2025 juga menjadi tahun yang penting dalam penguatan tata kelola perusahaan. PT KBI berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN No. 2 Tahun 2023 dan ketentuan pelaksanaannya. Selain itu, PT KBI menerbitkan Keputusan Direksi tentang Pengelolaan Induk dan Anak Perusahaan untuk memastikan tata kelola grup berjalan konsisten dan efektif. Selain itu, pada aspek pengukuran risiko, PT KBI mengalami peningkatan *Risk Maturity Index* (RMI) dari 2,4 menjadi 2,9 mencerminkan kemajuan signifikan dalam kualitas manajemen risiko Perusahaan. PT KBI juga terus mengimplementasikan *Whistleblowing System* dan kebijakan anti-gratifikasi berbasis ISO 37001:2016 untuk menjaga integritas dan etika dalam setiap aktivitas bisnis.

Prospek Usaha Perusahaan

Menjelang tahun 2026, Direksi memandang bahwa prospek usaha berada dalam kondisi penuh peluang meskipun diwarnai tantangan global. PT KBI akan tetap fokus mempertahankan pangsa pasar, menjaga keberlangsungan industri perdagangan berjangka, serta memperkuat hubungan kelembagaan. Peningkatan kualitas tata kelola dan layanan akan menjadi prioritas. Keberhasilan 2025 memberikan fondasi yang kuat bagi Perusahaan untuk melangkah ke tahun 2026 dengan arah strategis yang lebih matang, kapabilitas yang lebih kuat, serta komitmen yang semakin kokoh untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

Pemenuhan Strategi Berkelanjutan

Direksi meyakini bahwa keberlanjutan hanya dapat diwujudkan apabila pertumbuhan bisnis dijalankan secara

PT KBI balanced corporate needs with cost-effectiveness, ensuring that every employee operates at their most productive capacity. This increase in productivity was achieved through organizational needs mapping, enhanced training quality, and competency-based assignments.

CSR Programs

In terms of CSR, PT KBI executed all programs in coordination with the Ministry of SOEs and Danareksa Holding. This joint program approach ensures the sustainability of benefits for the community and optimizes the social value generated from each activity. All 2025 CSR KPIs were successfully achieved, with implementation proceeding according to plan and Social Return on Investment (SROI) results demonstrating that the programs deliver real and measurable impacts for the community.

Implementation of Good Corporate Governance

2025 was also a pivotal year for the strengthening of corporate governance. PT KBI adhered to the Minister of SOEs Regulation No. 2 of 2023 and its implementing provisions. Furthermore, PT KBI issued a Decree of the Board of Directors regarding Management of Parent and Subsidiaries to ensure group governance remains consistent and effective. In terms of risk measurement, PT KBI's Risk Maturity Index (RMI) increased from 2.4 to 2.9, reflecting significant progress in the quality of the Company's risk management. PT KBI also continues to implement the Whistleblowing System and anti-bribery policies based on ISO 37001:2016 to maintain integrity and ethics in every business activity.

Business Outlook

Heading into 2026, the Board of Directors views the business prospects as being full of opportunities despite global challenges. PT KBI will remain focused on maintaining market share, ensuring the sustainability of the futures trading industry, and strengthening institutional relationships. Improving the quality of governance and services will be a priority. The successes of 2025 provide a solid foundation for the Company to move into 2026 with a more mature strategic direction, stronger capabilities, and an even firmer commitment to achieving sustainable growth.

Fulfillment of Sustainability Strategy

The Board of Directors believes that sustainability can only be realized if business growth is conducted in a healthy





sehat dan berkesinambungan, dengan berlandaskan prinsip tata kelola yang kuat. Melalui penerapan tata kelola yang baik, Perusahaan mampu mencapai *principled performance*, yakni kemampuan untuk meraih tujuan secara andal, menghadapi berbagai ketidakpastian, serta memastikan seluruh proses dan keputusan dijalankan dengan integritas.

Untuk mencapai kondisi tersebut, diperlukan komitmen penuh dari seluruh insan PT KBI. Keberlanjutan tidak dapat dianggap sebagai tugas yang dijalankan oleh sebagian pihak saja, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif yang harus diinternalisasi dalam setiap aktivitas, proses, dan pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi.

Perubahan Komposisi Direksi

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan tidak mengalami perubahan susunan keanggotaan Direksi. Sehingga susunan komposisi Direksi Perusahaan masih berlandaskan pada Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-54/MBU/03/2024 dan Surat Keputusan Direktur Utama PT Danareksa (Persero) Nomor KPPS-4/DR/Dirut/03/2024 dengan susunan sebagai berikut:

Direktur Utama:
Budi Susanto

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko:
Adiyasa Suhadibroto

Direktur Pengembangan Bisnis dan Operasional:
Saidu Solihin

Penutup

Direksi menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan dukungan, kepercayaan, dan kolaborasi strategis sepanjang tahun 2025. Capaian positif yang diraih Perusahaan, baik dari sisi operasional, keuangan, maupun penguatan tata kelola, tidak terlepas dari kontribusi dan dedikasi seluruh insan PT KBI yang terus mengedepankan profesionalisme, integritas, dan komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan.

and continuous manner, grounded in strong governance principles. Through the implementation of good corporate governance, the Company is able to achieve principled performance, namely the ability to reliably reach objectives, navigate various uncertainties, and ensure that all processes and decisions are executed with integrity.

To achieve this state, the full commitment of all PT KBI personnel is required. Sustainability cannot be viewed as a task carried out by only a few parties; rather, it is a collective responsibility that must be internalized within every activity, process, and decision-making step across all levels of the organization.

Board of Directors Changes

Throughout 2025, there were no changes in the membership of the Board of Directors. Thus, the composition of the Company's Board of Directors remains based on the Decree of the Minister of SOEs No. SK-54/MBU/03/2024 and the Decree of the President Director of PT Danareksa (Persero) No. KPPS-4/DR/Dirut/03/2024, with the following composition:

President Director:
Budi Susanto

Director of Finance and Risk Management:
Adiyasa Suhadibroto

Director of Business Development and Operations:
Saidu Solihin

Closing

The Board of Directors conveys its deepest appreciation to all stakeholders who have provided support, trust, and strategic collaboration throughout 2025. The positive achievements reached by the Company, in terms of operations, finance, and the strengthening of governance, are inseparable from the contribution and dedication of all PT KBI personnel who continue to prioritize professionalism, integrity, and a commitment to continuous improvement.

Direksi juga berterima kasih kepada para *shareholder*, regulator, serta mitra industri yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan PT KBI menjaga integritas pasar dan memperkuat ekosistem perdagangan berjangka di Indonesia. Dengan fondasi kinerja yang solid dan semangat sinergi yang semakin kuat, Perusahaan optimistis dapat melanjutkan pertumbuhan berkelanjutan dan memberikan nilai tambah yang lebih besar di tahun-tahun mendatang.

The Board of Directors also extends its gratitude to the shareholders, regulators, and industry partners who have been an essential part of PT KBI's journey in maintaining market integrity and strengthening the futures trading ecosystem in Indonesia. With a solid performance foundation and a robust spirit of synergy, the Company is optimistic about driving its sustainable growth and providing greater added value in the years to come.

Jakarta, Mei 2025
Jakarta, May 2025

Budi Susanto
Direktur Utama
President Director



SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2025 PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA

Statement of Members of the Board of Commissioners Regarding Responsibility for the 2025 Annual Report of PT Kliring Berjangka Indonesia

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Kliring Berjangka Indonesia tahun 2025 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, hereby declare that all information in the 2025 Annual Report of PT Kliring Berjangka Indonesia has been fully disclosed and we take full responsibility for the accuracy of the contents of the Company's Annual Report.

This statement is made in good faith.

Jakarta, Mei 2026

Jakarta, May 2026

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Hernawan Bakti Sasongko

Komisaris Utama
President Commissioner

Fajar Massadiah Egy
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Irman Sahroni Ahmad
Komisaris Independen
Independent Commissioner

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2025 PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA

Statement of Members of the Board of Directors Regarding Responsibility for the 2025 Annual Report of PT Kliring Berjangka Indonesia

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Kliring Berjangka Indonesia tahun 2025 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

We, the undersigned, hereby declare that all information in the 2025 Annual Report of PT Kliring Berjangka Indonesia has been fully disclosed and we take full responsibility for the accuracy of the contents of the Company's Annual Report.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made in good faith.

Jakarta, Mei 2026
Jakarta, May 2026

Direksi
Board of Directors

Budi Susanto
Direktur Utama
President Director

Adiyasa Suhadibroto
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Director of Finance and Risk Management

Saidu Solihin
Direktur Pengembangan Bisnis dan Operasional
Director of Business Development and Operations

03.

PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile







INFORMASI UMUM DAN IDENTITAS PERUSAHAAN

General Information and Company Identity

Nama Perusahaan

PT Kliring Berjangka Indonesia

Inisial Perusahaan

PT KBI

Tanggal Pendirian

PT Kliring Berjangka Indonesia didirikan sejak 25 Agustus 1984, kala itu berdiri dengan nama PT Kliring & Jaminan Bursa Komoditi (Persero) yang berfokus melayani di bidang registrasi pasar fisik komoditas karet, kopi, serta kuota tekstil. Kemudian, pergeseran fungsi strategis terjadi pada 15 Desember 2000, saat Perusahaan resmi beroperasi penuh sebagai Lembaga Kliring Berjangka. Selanjutnya, pada 16 Juni 2019, peran Perusahaan semakin meluas pada bidang Pusat Registrasi Resi Gudang. Inovasi terus berlanjut hingga satu dekade kemudian, di mana Perusahaan sukses mengantongi izin usaha Kliring Pasar Fisik Timah Murni Batangan pada 6 Agustus 2019, disusul dengan izin Lembaga Kliring Pasar Fisik Emas Digital pada 11 November 2020.

Dasar Hukum Pendirian

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 1982 tentang Bursa Komoditi.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 1982 tentang Pendirian Pokok-Pokok Organisasi Bursa Komoditi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 1984 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perseroan (Persero) di Bidang Kliring dan Jaminan Bursa Komoditi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 80 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Saham Perusahaan (Persero) PT Kliring dan Jaminan Bursa Komoditi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Saham Perusahaan (Persero) PT Kliring Berjangka Indonesia.

Company Name

PT Kliring Berjangka Indonesia

Company Initial

PT KBI

Date of Establishment

PT Kliring Berjangka Indonesia was established on August 25, 1984, initially under the name PT Kliring & Jaminan Bursa Komoditi (Persero), focusing on the registration of physical market commodity for rubber, coffee, and textile quotas. A shift in strategic function occurred on December 15, 2000, when the Company officially commenced full operations as a Futures Clearing Institution. Subsequently, on June 16, 2019, the Company's role expanded to include the function of a Warehouse Receipt Registration Center. Innovation continued over the following decade, during which the Company obtained its Clearing License for the Physical Market of Refined Tin Bars on August 6, 2019, followed by the Clearing License for the Physical Market of Digital Gold on November 11, 2020.

Legal Basis of Establishment

1. Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 35 of 1982 concerning Commodity Exchange.
2. Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 80 of 1982 concerning Establishment of the Principal Organizational Structure of the Commodity Exchange.
3. Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 6 of 1984 concerning State Capital Participation of the Republic of Indonesia for the Establishment of a State-Owned Company (Persero) in the Field of Commodity Exchange Clearing and Guarantee.
4. Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 80 of 2000 concerning Additional State Capital Participation of the Republic of Indonesia in the Shares of PT Kliring dan Jaminan Bursa Komoditi.
5. Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 48 of 2006, dated December 28, 2006, concerning Additional State Capital Participation of the Republic of Indonesia in the Shares of PT Kliring Berjangka Indonesia.



Perubahan Nama Perusahaan

1. 25 Agustus 1984:

Pertama kali berdiri dengan nama PT Kliring & Jaminan Bursa Komoditi (Persero) atau KJBK.

2. 18 Juni 2001:

Pada tahun 2001, Perusahaan mengalami pergantian nama menjadi PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero).

3. 24 Juni 2022 - Saat ini:

Sejak tahun 2022 hingga saat ini, Perusahaan telah berganti nama menjadi PT Kliring Berjangka Indonesia.

Dasar Hukum Operasional

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.
3. Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.
4. Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
5. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.
6. Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Komoditi Berjangka.

Name Changes

1. August 25, 1984:

The Company was first established under the name PT Kliring & Jaminan Bursa Komoditi (Persero) or KJBK.

2. June 18, 2001:

In 2001, the Company underwent a name change to PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero).

3. June 24, 2022 - Present:

Since 2022, the Company has adopted its current name, PT Kliring Berjangka Indonesia.

Legal Basis of Operations

1. Law of the Republic of Indonesia No. 32 of 1997 concerning Commodity Futures Trading.
2. Law of the Republic of Indonesia No. 9 of 2006 concerning Warehouse Receipt System.
3. Law No. 9 of 2011 concerning Amendments to Law No. 9 of 2006 on Warehouse Receipt System.
4. Law No. 10 of 2011 concerning Amendments to Law No. 32 of 1997 on Commodity Futures Trading.
5. Government Regulation No. 36 of 2007 concerning Implementation of Law No. 9 of 2006 on Warehouse Receipt System.
6. Government Regulation No. 49 of 2014 concerning Implementation of Commodity Futures Trading.



7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 650/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) Komoditi Agro.
8. Surat Keputusan BAPPEBTI No. 128/BAPPEBTI/IX/2001 tanggal 4 September 2001 sebagai Lembaga Kliring Berjangka.
9. Surat Keputusan BAPPEBTI No. 03/BAPPEBTI/Kep-SRG/SP/PUSREG/6/2009 tanggal 16 Juni 2009 sebagai Pusat Registrasi Resi Gudang.
10. Surat Keputusan BAPPEBTI No. 14/BAPPEBTI/PERPL/10/2010 tanggal 15 Oktober 2010 sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) kepada PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero).
11. Surat Keputusan BAPPEBTI No. 01/BAPPEBTI/SPKBPF/8/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Persetujuan Lembaga Kliring Berjangka untuk melakukan Kegiatan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi di Pasar Fisik Timah Murni Batangan.
12. Surat Keputusan BAPPEBTI No. 01/BAPPEBTI/SPKBPF/11/2020 tanggal 11 November 2020 tentang Persetujuan Lembaga Kliring Berjangka untuk melakukan Kegiatan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi di Pasar Fisik Emas Digital.
13. Surat Keputusan BAPPEBTI No. 01/BAPPEBTI/SPPPPF/11/2020 tanggal 24 November 2020 tentang Persetujuan sebagai pengelola tempat penyimpanan emas.

1. Bidang Usaha

- Lembaga Kliring & Penjaminan Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Lembaga Kliring & Penjaminan Transaksi Pasar Fisik Komoditas;
- Pusat Registrasi Sistem Resi Gudang.

2. Kepemilikan

- Saham Seri A (Dwi Warna) sebanyak 1 lembar saham dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.
- Saham Seri B (dapat dimiliki masyarakat dan/atau Negara) sebanyak 499.999 lembar saham yang dimiliki oleh PT Danareksa (Persero) sebagai *holding*.

3. Modal Perusahaan

Perusahaan mencatatkan modal sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah). Struktur permodalan ini telah dikukuhkan melalui Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 33 yang dibuat di hadapan Notaris Hadijah, S.H., pada tanggal 18 Juli 2022.

4. Jumlah Pegawai

Hingga akhir tahun 2025, Perusahaan memiliki jumlah pegawai sebesar 58 orang.

7. Decree of the Minister of Industry and Trade of the Republic of Indonesia No. 650/MPP/Kep/10/2004 concerning Provisions for the Operation of Forward Auction Markets for Agro Commodities.
8. Decree of BAPPEBTI No. 128/BAPPEBTI/IX/2001, dated September 4, 2001, appointing the Company as a Futures Clearing Institution.
9. Decree of BAPPEBTI No. 03/BAPPEBTI/Kep-SRG/SP/PUSREG/6/2009, dated June 16, 2009, appointing the Company as a Warehouse Receipt Registration Center.
10. Decree of BAPPEBTI No. 14/BAPPEBTI/PERPL/10/2010, dated October 15, 2010, appointing PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) as the Clearing and Guarantee Institution for Forward Auction Markets.
11. Decree of BAPPEBTI No. 01/BAPPEBTI/SPKBPF/8/2019, dated August 6, 2019, approving the Company as a Futures Clearing Institution for Clearing and Settlement Guarantee Activities in the Physical Market for Refined Tin Bars.
12. Decree of BAPPEBTI No. 01/BAPPEBTI/SPKBPF/11/2020, dated November 11, 2020, approving the Company as a Futures Clearing Institution for Clearing and Settlement Guarantee Activities in the Physical Market for Digital Gold.
13. Decree of BAPPEBTI No. 01/BAPPEBTI/SPPPPF/11/2020, dated November 24, 2020, approving the Company as a licensed manager of gold storage facilities.

1. Line of Business

- Clearing and Guarantee Institution for Commodity Futures Trading;
- Clearing and Guarantee Institution for Commodity Physical Market Transactions;
- Warehouse Receipt System Registration Center.

2. Ownership

- Series A Shares (Dwiwarna): 1 share owned by the Government of the Republic of Indonesia.
- Series B Shares (may be owned by the public and/or the State): 499,999 shares owned by PT Danareksa (Persero) as the holding company.

3. Company Capital

The Company recorded capital of IDR500,000,000,000 (five hundred billion Rupiah). This capital structure was ratified through Deed of the General Meeting of Shareholder Resolutions No. 33, executed before Notary Hadijah, S.H., on July 18, 2022.

4. Number of Employees

As of the end of 2025, the Company had a total of 58 employees.



5. Jaringan Usaha

Jangkauan operasional Perusahaan tersebar luas, mencakup seluruh daerah di Indonesia serta merambah hingga ke pasar mancanegara.

6. Entitas Anak dan Entitas Asosiasi

Entitas Anak: PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia

7. Alamat dan Kontak

Menara Danareksa Lt. 6
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Gambir
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110

8. Situs Web

www.ptkbi.com

9. Hubungan Investor

- Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan: Dedi Sopyan
- Kepala Divisi Operasional & Pengembangan Bisnis PBK & Aset Digital: Juventus Deka Aditama
- Kepala Divisi Operasional & Pengembangan Bisnis PFK: Juventus Deka Aditama
- Kepala Divisi Operasional & Pengembangan Bisnis SRG: Gatot Eko Nugroho

Telepon: 021-35280000 | Faksimile: 021-35280000
Surel: dsp@ptkbi.com

5. Business Network

The Company's operational reach is broad, spanning all regions of Indonesia and extending into international markets.

6. Subsidiaries and Associates

Subsidiary: PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia

7. Address and Contact

Menara Danareksa Lt. 6
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Gambir
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110

8. Website

www.ptkbi.com

9. Investor Relations

- Head of Corporate Secretary Division: Dedi Sopyan
- Head of Operations & Business Development Division – Commodity Futures Trading (PBK) & Digital Assets: Juventus Deka Aditama
- Head of Operations & Business Development Division – Physical Market Commodity (PFK): Juventus Deka Aditama
- Head of Operations & Business Development Division – Warehouse Receipt System (SRG): Gatot Eko Nugroho

Telephone: 021-35280000 | Facsimile: 021-35280000
Email: dsp@ptkbi.com

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

Company at a Glance

Sejarah Pendirian

Sesuai dengan Akta Notaris No. 185, PT Kliring Berjangka Indonesia didirikan pada tanggal 25 Agustus 1984 dengan nama PT Kliring dan Jaminan Bursa Komoditi (Persero) atau KJBK. Akta ini selaras dengan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1982 tanggal 2 Desember 1982 tentang Bursa Komoditi, Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 1982 tanggal 2 Desember 1982 tentang Pendirian dan Pokok-Pokok Organisasi Bursa Komoditi, dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1984 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Persero di Bidang Kliring dan Jaminan Bursa Komoditi. Pada awal berdiri, Perusahaan memiliki usaha di bidang penyelenggaraan aktivitas registrasi atas pasar fisik komoditas karet, kopi, dan kuota tekstil.

History of Establishment

Pursuant to Notarial Deed No. 185, PT Kliring Berjangka Indonesia was established on August 25, 1984, under the name PT Kliring dan Jaminan Bursa Komoditi (Persero) or KJBK. This Deed was in alignment with Government Regulation No. 35 of 1982 dated December 2, 1982, regarding Commodity Exchange; Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 80 of 1982 dated December 2, 1982, concerning Establishment and Organizational Principles of the Commodity Exchange; and Government Regulation No. 6 of 1984 regarding State Equity Participation of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Limited Liability Company in the Field of Commodity Exchange Clearing and Guarantee. At its inception, the Company's business activities focused on providing registration services for the physical markets of rubber, coffee, and textile quotas.



Seiring waktu berjalan, KJBK selanjutnya berganti nama menjadi PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) atau PT KBI pada tanggal 18 Juni 2001. Perubahan nama ini telah mendapatkan persetujuan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. C-02517/HT.01.04.TH.2001. Sejak saat itu, Perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan lingkup pekerjaan meliputi kliring penjaminan, penyelesaian transaksi kontrak berjangka dan derivatif lainnya, serta bertindak sebagai Pusat Registrasi Resi Gudang dan penjaminan transaksi di Pasar Fisik Komoditas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2022 tentang Penambahan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan PT Danareksa (Persero), PT KBI resmi bergabung menjadi bagian dari Holding PT Danareksa (Persero) pada tahun 2022. Masuknya Perusahaan ke dalam *holding* ini diikuti dengan perubahan nama menjadi PT Kliring Berjangka Indonesia, sesuai dengan Surat Menteri BUMN No. S-377/MBU/06/2022 tanggal 24 Juni 2022 tentang Persetujuan Pengalihan Saham serta Keputusan Para Pemegang Saham No. KPPS:46/002/DNRK pada tanggal yang sama.

Terkait aspek legalitas dan tata kelola, Perusahaan secara berkala melakukan pemutakhiran Anggaran Dasar. Penyesuaian terkini telah dituangkan dalam Akta No. 31 tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat oleh Notaris Hadijah, S.H., di Jakarta. Legalitas akta tersebut telah mendapatkan pengesahan resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-0054066.AH.01.02. Tahun 2024 pada tanggal 28 Agustus 2024.

Perkembangan Perusahaan

Terintegrasinya PT KBI ke dalam anggota Holding Danareksa telah memberikan perubahan pada jenis dan struktur saham Perusahaan. Adapun rincian kepemilikan saham saat ini adalah sebagai berikut:

Over time, KJBK subsequently changed its name to PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) or PT KBI on June 18, 2001. This change received approval from the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia through Letter No. C-02517/HT.01.04.TH.2001. Since then, the Company has carried out its operations as a State-Owned Enterprise (SOE), with business activities covering clearing and guarantee services, settlement of futures contracts and other derivative transactions, as well as acting as the Warehouse Receipt Registration Center and providing guarantee services for physical market commodity transactions.

Pursuant to Government Regulation No. 7 of 2022 concerning Additional State Capital Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of PT Danareksa (Persero), PT KBI officially became part of the Danareksa Holding in 2022. The Company's integration into the holding was accompanied by a change of name to PT Kliring Berjangka Indonesia, in accordance with Letter of the Minister of State-Owned Enterprises No. S-377/MBU/06/2022 dated June 24, 2022 regarding Share Transfer Approval, and the Shareholders' Resolution No. KPPS:46/002/DNRK issued on the same date.

With respect to legal and governance compliance, the Company conducts regular updates to its Articles of Association. The most recent amendment is reflected in Deed No. 31 dated August 20, 2024, executed before Notary Hadijah, S.H., in Jakarta. This deed has been formally ratified by the Ministry of Law and Human Rights through Decree No. AHU-0054066.AH.01.02.2024 dated August 28, 2024.

Company Development

PT KBI's integration into the Danareksa Holding brought changes to the classification and structure of the Company's shares. The current shareholding structure is as follows:

Informasi Perubahan Nama Name Changes Information

01

25 Agustus 1984:
Pertama kali berdiri dengan nama PT Kliring & Jaminan Bursa Komoditi (Persero) atau KJBK.

August 25, 1984:
The Company was first established under the name PT Kliring & Jaminan Bursa Komoditi (Persero) or KJBK.

02

18 Juni 2001:
Pada tahun 2001, Perusahaan mengalami pergantian nama menjadi PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero).

June 18, 2001:
In 2001, the Company underwent a name change to PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero).

03

24 Juni 2022 - Saat ini:
Sejak tahun 2022 hingga saat ini, Perusahaan telah berganti nama menjadi PT Kliring Berjangka Indonesia.

June 24, 2022 - Present:
Since 2022, the Company has adopted its current name, PT Kliring Berjangka Indonesia.

1. Saham Seri A (Dwi Warna): Terdiri atas 1 (satu) lembar saham yang kepemilikannya dipegang langsung oleh Negara Republik Indonesia; dan
2. Saham Seri B: Terdiri atas 499.999 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham yang dimiliki oleh PT Danareksa (Persero) selaku induk usaha (holding), yang mana jenis saham ini dapat dimiliki oleh Negara maupun masyarakat.

Legitimasi atas perubahan klasifikasi dan struktur saham tersebut merujuk pada Surat Keputusan Menteri BUMN No. S-791/MBU/09/2020 tertanggal 30 September 2020 mengenai Perubahan Jenis Saham dan Perubahan Anggaran Dasar PT Kliring Berjangka Indonesia. Ketentuan ini kemudian dituangkan dalam Akta Notaris Hadijah, S.H. Nomor 32 tanggal 19 Oktober 2020 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI melalui Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0401081 pada tanggal 23 Oktober 2020. Selain itu, landasan hukum lainnya mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan PT Danareksa (Persero).

Fokus utama bisnis Perusahaan saat ini bertumpu pada peran strategisnya sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka serta Penyelenggara Pasar Fisik. Tidak hanya terbatas pada layanan inti tersebut, portofolio usaha juga diperluas ke sektor investasi melalui penyertaan modal pada entitas lain dan penyediaan Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya. Seluruh rangkaian kegiatan operasional ini dijalankan dalam koridor keanggotaan PT KBI sebagai bagian dari Holding PT Danareksa (Persero).

1. Series A (Dwi Warna) Share: Consisting of 1 (one) share, held directly by the Government of the Republic of Indonesia; and
2. Series B Shares: Consisting of 499,999 (four hundred and ninety-nine thousand nine hundred and ninety-nine) shares held by PT Danareksa (Persero) as the parent company (holding). Series B shares may be held by the Government or the public.

The legitimacy of these changes in share classification and structure is based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. S-791/MBU/09/2020 dated September 30, 2020 concerning Amendments to Share Types and the Articles of Association of PT Kliring Berjangka Indonesia. These provisions were subsequently formalized in Notarial Deed No. 32 dated 19 October 2020 by Notary Hadijah, S.H., and ratified by the Ministry of Law and Human Rights through Decree No. AHU-AH.01.03-0401081 dated October 23, 2020. Additional legal grounding is provided by Government Regulation No. 7 of 2022 on Additional State Capital Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of PT Danareksa (Persero).

The Company's primary business focus currently lies in its strategic role as a Futures Clearing and Guarantee Institution, as well as a Clearing and Guarantee Institution for Physical Market Administration. Beyond these core services, the Company continues to expand its business portfolio through investment activities via equity participation in other entities, and by providing various Other Supporting Business Services. All operational activities are carried out within the governance framework of PT KBI as a member of PT Danareksa (Persero) Holding Group.

JEJAK LANGKAH

Milestones

Identitas awal Perusahaan saat pertama kali didirikan pada tahun ini adalah PT Kliring dan Jaminan Bursa Komoditi (Persero) atau dikenal dengan singkatan KJBK.

The Company was initially established under the name PT Kliring dan Jaminan Bursa Komoditi (Persero), commonly referred to as KJBK.

1984



Perusahaan mengantongi Izin Usaha Sementara Lembaga Kliring Berjangka No. 01/VII/2000 pada 14 Juli 2000. Selanjutnya, operasional penuh sebagai Lembaga Kliring Berjangka resmi dimulai pada 15 Desember 2000, dengan cakupan penjaminan penyelesaian untuk kontrak berjangka komoditas Crude Palm Oil (CPO), Kopi, dan Olein.

The Company obtained its Provisional Business License as a Futures Clearing Institution No. 01/VII/2000 on July 14, 2000. Full operational status as a Futures Clearing Institution commenced on December 15, 2000, covering the clearing and settlement guarantee for commodity futures contracts of Crude Palm Oil (CPO), Coffee, and Olein.

2000

Legitimasi bisnis diperkuat melalui perolehan Izin Usaha sebagai Lembaga Kliring Berjangka No. 128/BAPPEBTI/IX/2001 pada tanggal 4 September 2001. Sebelumnya, pada tanggal 18 Juni 2001, Perusahaan telah mendapatkan persetujuan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-02517 HT 01.04.TH.2001 terkait perubahan nama entitas menjadi PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero).

The Company strengthened its legal standing through the issuance of Business License No. 128/BAPPEBTI/IX/2001 as a Futures Clearing Institution on September 4, 2001. Earlier, on June 18, 2001, the Company had received approval from the Ministry of Justice and Human Rights under Letter No. C-02517 HT 01.04.TH.2001 for its name change to PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero).

2001

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 650/MPP/10/2004 tanggal 18 Oktober 2004 mengenai Ketentuan Penyelenggaraan Pasar Lelang dengan Penyerahan Fisik Segera (*Spot*) dan Penyerahan Kemudian (*Forward*) Komoditi Agro, Perusahaan menerima mandat untuk menyelenggarakan Kliring Penjaminan dan Penyelesaian transaksi di pasar tersebut.

Pursuant to the Decree of the Minister of Industry and Trade No. 650/MPP/10/2004 dated October 18, 2004 concerning Implementation of Spot and Forward Agro-Commodity Auction Markets, the Company was mandated to provide clearing, guarantee, and settlement services for transactions in these markets.

2004



Penugasan untuk menyediakan layanan kliring dan penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka Derivatif Indeks dan Mata Uang Asing resmi diterima Perusahaan. Penugasan ini merujuk pada Surat Keputusan BAPPEBTI No. 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 tanggal 27 Januari 2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif.

The Company received an assignment to deliver clearing and settlement services for Index and Foreign Exchange Derivative Futures Contracts, referring to Decree of BAPPEBTI No. 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 dated January 27, 2005 on Alternative Trading System.

2005



Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) mulai dijalankan efektif sejak 17 Februari 2006 berdasarkan SK Direksi No. 10B/KKBI/II/2006. Di sisi permodalan, struktur ekuitas diperkuat melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp82 miliar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 48 tanggal 28 Desember 2006.

Implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles began on February 17, 2006 through Decree of the Board of Directors No. 10B/KKBI/II/2006. On the capital front, the Company strengthened its equity structure through State Capital Injection (PMN) of IDR82 billion, as stipulated in Government Regulation No. 48 dated December 28, 2006.

2006

2008

Penyesuaian Anggaran Dasar dilakukan agar selaras dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar BUMN. Kualitas layanan juga dibuktikan melalui perolehan sertifikasi ISO 9001:2000 pada 25 Agustus 2008. Secara operasional, peran Perusahaan meluas dengan diperolehnya persetujuan sementara sebagai Pusat Registrasi Resi Gudang pada 19 Februari 2008 (SK No. 12/BAPPEBTI/Kep-SRG/SP/PUSREG/2/2008), sebagai amanat dari Undang-Undang No. 9 Tahun 2006.

Amendments to the Articles of Association were carried out to align with Law No. 40/2007 on Limited Liability Companies and the SOE Articles of Association. Service quality was reinforced through the achievement of ISO 9001:2000 certification on August 25, 2008. Operationally, the Company expanded its role by obtaining provisional approval as the Warehouse Receipt Registration Center on February 19, 2008 (Decree No. 12/BAPPEBTI/Kep-SRG/SP/PUSREG/2/2008), as mandated by Law No. 9/2006.



2009

Komitmen terhadap mutu layanan dipertegas lewat perpanjangan sertifikasi ISO 9001:2000 tentang Standar Internasional Kualitas Jasa pada bulan Desember. Selain itu, status sebagai Pusat Registrasi Resi Gudang dikukuhkan secara definitif melalui Surat Keputusan BAPPEBTI No. 03/BAPPEBTI/KepSRG/SP/PUSREG/6/2009 tanggal 16 Juni 2009.

The Company reaffirmed its commitment to service excellence through the extension of its ISO 9001:2000 certification in December. Additionally, its status as the Warehouse Receipt Registration Center was formally granted through the Decree of BAPPEBTI No. 03/BAPPEBTI/Kep-SRG/SP/PUSREG/6/2009 dated June 16, 2009.

Kewenangan sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) resmi didapatkan berdasarkan Keputusan BAPPEBTI No. 14/BAPPEBTI/PERPL/10/2010 tanggal 15 Oktober 2010. Pada aspek tata kelola dan pelaporan, Perusahaan mulai mengadopsi prinsip IFRS dalam laporan keuangan serta melakukan pembaruan sertifikasi mutu menjadi ISO 9001:2008. Kinerja positif tahun ini diapresiasi oleh Majalah Infobank dengan predikat "Sangat Bagus".

The Company secured authorization as a Clearing and Guarantee Institution for Forward Auction Markets under the Decree of BAPPEBTI No. 14/BAPPEBTI/PERPL/10/2010 dated October 15, 2010. From a governance perspective, the Company adopted IFRS-based reporting and renewed its quality certification to ISO 9001:2008. The Company's strong performance earned recognition from Infobank Magazine with a "Very Good" rating.

2010



Regulasi industri mengalami perubahan signifikan dengan disahkannya Amandemen UU No. 10 Tahun 2011 (tentang Perdagangan Berjangka Komoditi) serta Amandemen UU No. 9 Tahun 2011 (tentang Sistem Resi Gudang). Di tahun yang sama, kapabilitas teknologi informasi Perusahaan diakui melalui penghargaan peringkat ke-2 IT Governance dari Kementerian BUMN.

Major regulatory changes took place with the enactment of amendments to Law No. 10/2011 (Commodity Futures Trading) and Law No. 9/2011 (Warehouse Receipt System). In the same year, the Company's IT governance capability was acknowledged with a 2nd place award from the Ministry of SOEs.

2011

Persetujuan penggunaan Sistem Pengawasan Tunggal dalam transaksi Sistem Perdagangan Alternatif (SPT-SPA) diperoleh dari BAPPEBTI pada 12 Desember 2012. Dari sisi kesehatan finansial, seluruh utang Rekening Dana Investasi berhasil dilunasi, dan Perusahaan dikategorikan sebagai BUMN SEHAT merujuk pada Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 198/KMK.016/1998.

The Company received approval to use the Single Supervisory System in Alternative Trading System (SPT-SPA) transactions was obtained from BAPPEBTI on December 12, 2012. Financially, all Investment Fund Account liabilities were settled, and the Company was classified as a "Healthy SOE", referencing Decree of Minister of Finance No. 198/KMK.016/1998.

2012



2013

Konsistensi kinerja keuangan kembali terjaga, di mana Perusahaan mempertahankan status sebagai BUMN SEHAT sesuai parameter dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 198/KMK.016/1998.

The Company maintained its strong financial performance, successfully preserving its classification as a Healthy SOE, in accordance with the standards outlined in Decree of Minister of Finance No. 198/KMK.016/1998.



Inovasi produk menjadi fokus utama dengan peluncuran layanan emas ritel "KeMas" pada 1 April 2014, disusul oleh peluncuran Kontrak Berkala Emas (KBE) pada 9 September 2014. Standar mutu operasional juga tetap dijaga melalui perpanjangan sertifikasi ISO 9001:2008.

Product innovation became a key focus with the launch of the retail gold service "KeMas" on April 1, 2014, followed by the introduction of the Gold Installment Contract (KBE) on September 9, 2014. Service quality remained upheld through the extension of ISO 9001:2008 certification.

2014

Menteri Perdagangan memberikan apresiasi berupa Piagam Penghargaan pada bulan Desember 2016 atas peran aktif Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perusahaan dalam mendukung pembiayaan Sistem Resi Gudang.

The Minister of Trade awarded the Company an Appreciation Charter in December 2016 for its active role in supporting Warehouse Receipt System financing through the Partnership and Community Development Program (PKBL).

2016

Transisi standar manajemen mutu dilakukan dengan sukses melalui perolehan sertifikasi ISO 9001:2015 pada tanggal 10 Agustus 2017, menggantikan versi sebelumnya.

The Company successfully transitioned to the new quality management standard and obtained ISO 9001:2015 certification on August 10, 2017.

2017

2018

Ekspansi layanan kliring merambah ke komoditas gula, di mana Perusahaan mulai menjalankan fungsi sebagai Lembaga Penjamin dan Penyelesaian pada Pasar Fisik Gula Kristal Rafinasi sejak bulan April 2018.

Clearing services expanded to include refined crystal sugar, with the Company commencing its role as the Guarantor and Settlement Institution for the Refined Crystal Sugar Physical Market in April 2018.



Legalitas usaha semakin lengkap dengan diterimanya izin usaha untuk penyelenggaraan kliring Pasar Fisik Timah Murni Batangan pada tanggal 6 Agustus 2019.

The Company obtained the business license for clearing operations in the Physical Market for Refined Tin Bars on August 6, 2019.

2019

Ekosistem perdagangan emas digital diperkuat dengan dua perizinan strategis, yakni Izin Usaha Lembaga Kliring Pasar Fisik Emas Digital (11 November 2020) dan Izin Pengelola Tempat Penyimpanan Emas Digital (24 November 2020). Selain itu, tata kelola keamanan dan integritas ditingkatkan melalui perolehan sertifikasi ISO 27001:2013 (Manajemen Sistem Keamanan Informasi) dan ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan).

The digital gold trading ecosystem was strengthened through two strategic licenses, namely Business License for Clearing in the Digital Gold Physical Market (November 11, 2020) and License as a Digital Gold Storage Facility Operator (November 24, 2020). Compliance and integrity were further reinforced with ISO 27001:2013 (Information Security Management System) and ISO 37001:2016 (Anti-Bribery Management System) certifications.

2020



2021

Penerbitan Surat Kuasa Khusus No. SKK-115/MBU/12/2021 oleh Kementerian BUMN RI memberikan mandat kepada PT Danareksa untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham Pemerintah Republik Indonesia pada Perusahaan.

Through Special Power of Attorney No. SKK-115/MBU/12/2021, the Ministry of SOEs appointed PT Danareksa as the representative of the Government of Indonesia's shareholding in the Company.

2022

Integrasi ke dalam *Holding* Danareksa resmi terlaksana pada tahun ini. Aksi korporasi lainnya mencakup kemitraan strategis dengan MNC Bank sebagai Bank Penyimpan Dana Margin. Dari sisi manajemen, terjadi pergantian kepemimpinan dengan diangkatnya Budi Susanto sebagai Anggota Direksi menggantikan Agung Rihayanto. Kinerja Perusahaan turut diakui internasional melalui penghargaan dari Asia Corporate Excellence & Sustainability (ACES) Award, serta apresiasi domestik sebagai *The Best State Owned Enterprise Award 2022* dari Biro Riset Infobank.

The Company's integration into the Danareksa Holding was officially completed. Other corporate actions included a strategic partnership with MNC Bank as the Margin Fund Custodian Bank. Leadership changes took place with the appointment of Budi Susanto as a member of the Board of Directors, replacing Agung Rihayanto. The Company received international recognition from the Asia Corporate Excellence & Sustainability (ACES) Awards and was honored domestically with the Best State-Owned Enterprise Award 2022 by the Infobank Research.



2023

Prestasi Perusahaan ditandai dengan perolehan penghargaan *The Best State-Owned Enterprise* dalam ajang *Islamic Finance Summit 2023* serta apresiasi *Indonesia Corporate Reputation in Special Financing* dari *The Iconomics*. Momentum pertumbuhan juga ditandai secara fisik melalui peresmian gedung kantor baru.

The Company earned the Best State-Owned Enterprise award at the Islamic Finance Summit 2023 and received recognition for Corporate Reputation in Special Financing from The Iconomics. Milestones during the year also included the inauguration of the Company's new office building.

Reputasi dan kinerja operasional Perusahaan mendapatkan pengakuan luas, dibuktikan dengan raihan peringkat *idAA Stable Outlook*. Rentetan penghargaan juga diraih, antara lain Anugerah Silver dalam *Indonesia Living Legend Companies Award*, predikat *Best Corporate in Establishing The AKHLAK Implementation Index*, serta memborong 3 (tiga) penghargaan sekaligus dalam ajang *BUMN Branding and Marketing Award*.

The Company's strong reputation and operational excellence were reaffirmed with an idAA rating with Stable Outlook. Additional recognitions included a Silver Award at the Indonesia Living Legend Companies Award, the Best Corporate in Establishing the AKHLAK Implementation Index, and three awards at the SOE (State-Owned Company) Branding and Marketing Award.

2024



Penerbitan Surat Nomor 27/388/DPPK/Srt/B dari Bank Indonesia menetapkan Perusahaan sebagai Lembaga Kliring Pasar Uang Valuta Asing (PUVA). Perusahaan resmi mendapatkan ISO Manajemen Terintegrasi. Selain itu, Keputusan Kepala BAPPEBTI nomor 41/BAPPEBTI/Kep-SRG/SP/PG/11/2025 resmi memberikan persetujuan PT KPBI sebagai Pengelola Gudang dalam Sistem Resi Gudang. Perusahaan memperoleh penghargaan prestise Public Relations Terbaik dalam Kategori Layanan Finansial oleh IPRA 2025 dan memborong 2 (dua) penghargaan sekaligus dalam ajang *The Iconomics Summit 2025*.

The issuance of Letter No. 27/388/DPPK/Srt/B from Bank Indonesia designated the Company as a Foreign Exchange Money Market Clearing Institution (PUVA). The Company officially obtained ISO Integrated Management System certification. In addition, Decree of BAPPEBTI Head No. 41/BAPPEBTI/Kep-SRG/SP/PG/11/2025 officially approved PT KPBI as a Warehouse Manager within the Warehouse Receipt System. The Company received the prestigious Best Public Relations in the Financial Services Category award by IPRA 2025 and won two awards at The Iconomics Summit 2025.

2025



VISI, MISI, DAN BUDAYA PERUSAHAAN

Vision, Mission, and Corporate Culture

VISI / Vision

Menjadi Perusahaan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Komoditas dan Keuangan Terbaik di Indonesia.

Becoming the Best Commodity and Financial Transaction Settlement Guarantee Company in Indonesia.

MISI / Mission

- **Menyediakan layanan terbaik atas penjaminan penyelesaian transaksi kontrak berjangka, Resi Gudang, dan Pasar Fisik Komoditas, serta layanan informasi komoditas secara terintegrasi.**
 - **Meningkatkan layanan dan nilai tambah ekonomis para pemangku kepentingan.**
- Providing the best service for guaranteeing the settlement of futures contract transactions, Warehouse Receipts, and the Physical Market Commodity as well as integrated commodity information services.
 - Improving services and economic value added for the Stakeholders.

REVIU DAN PERSETUJUAN VISI, MISI, DAN BUDAYA PERUSAHAAN

Review and Approval of the Company's Vision, Mission and Culture

Kewajiban implementasi standar budaya bagi seluruh Badan Usaha Milik Negara di Indonesia telah ditetapkan melalui Surat Edaran Nomor SE-7/MBU/07/2020 perihal Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia. Menindaklanjuti mandat tersebut, transformasi budaya Perusahaan kini diselaraskan sepenuhnya menjadi AKHLAK.

The obligation to implement standardized corporate values across all State-Owned Enterprises in Indonesia has been established through Circular Letter No. SE-7/MBU/07/2020 concerning Core Values of Human Resources. In response to this mandate, the Company has fully aligned its cultural transformation with the AKHLAK values.

BUDAYA PERUSAHAAN / Company Culture

Merujuk pada amanat Surat Edaran Nomor SE-7/MBU/07/2020 tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan telah menetapkan fondasi budaya kerja yang kokoh. Hal ini diwujudkan melalui langkah internalisasi dan implementasi nilai-nilai strategis di seluruh lini organisasi. Adapun Budaya Perusahaan disebut sebagai 'AKHLAK' yang terdiri dari:

Referring to the mandate of Circular Letter No. SE-7/MBU/07/2020 concerning Core Values of Human Resources in State-Owned Enterprises, the Company has established a solid foundation for its corporate culture. This commitment is manifested through the internalization and implementation of strategic values across all organizational levels. The Company's core culture, known as "AKHLAK" consists of the following principles:

A

AMANAH Trustworthy

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
Upholding the trust that has been entrusted.

K

KOMPETEN Competent

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
Continuously learning and developing capabilities.

H

HARMONIS Harmonious

Saling peduli dan menghargai perbedaan.
Caring for one another and respecting differences.

L

LOYAL Loyal

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Demonstrating dedication and prioritizing the interests of the nation and the state.

A

ADAPTIF Adaptive

Terus berinovasi dan antusias dalam mengerjakan ataupun menghadapi perubahan.
Continuously innovating and demonstrating enthusiasm in driving or responding to change.

K

KOLABORATIF Collaborative

Membangun Kerja Sama yang sinergis.
Building synergistic cooperation.

AKHLAK

LOGO PERUSAHAAN

Company Logo



Member of  Danareksa

Citra perusahaan yang kukuh, solid, dan terpercaya direpresentasikan melalui penggunaan warna biru tua sebagai identitas korporat utama. Sementara itu, nilai-nilai harmoni, sinergi, dan keseimbangan divisualisasikan lewat aksentuasi dimensi yang terbentuk dari perpaduan warna ● biru tua, ● biru muda, dan ● emas. Kombinasi ketiga unsur warna ini hadir untuk mempertegas fondasi kepercayaan yang kuat.

The Company's strong, solid, and trustworthy image is represented through the use of dark blue as the primary corporate identity color. Meanwhile, the values of harmony, synergy, and balance are visualized through dimensional accents formed from a blend of ● dark blue, ● light blue, and ● gold. The combination of these three color elements serves to reinforce the foundation of strong trust.

KEGIATAN DAN BIDANG USAHA

Line of Business

Bidang Usaha

Merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Akta Nomor 31 tanggal 20 Agustus 2024, fokus operasional PT KBI berada pada sektor Lembaga Kliring Berjangka dan Perdagangan Berjangka. Adapun klasifikasi kegiatan usaha yang dijalankan adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Kliring & Penjaminan Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi

Peran sebagai fondasi manajemen risiko dan penyelesaian transaksi dalam industri perdagangan berjangka dijalankan melalui kelompok usaha ini. Kegiatannya berpusat pada penyelenggaraan sistem dan penyediaan sarana infrastruktur guna mendukung pelaksanaan kliring serta penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan berjangka.

2. Lembaga Kliring & Penjaminan Transaksi Pasar Fisik Komoditas

Guna memastikan terciptanya transaksi fisik komoditas yang tertib, aman, dan terjamin, kelompok usaha ini menyediakan fasilitas sistem kliring serta penjaminan

Business Activities

Referring to the provisions stated in Deed No. 31 dated August 20, 2024, PT KBI's operational focus lies in the sectors of Futures Clearing Institutions and Futures Trading. The classifications of business activities carried out are as follows:

1. Clearing and Guarantee Institution for Commodity Futures Trading

This business group serves as the foundation for risk management and transaction settlement within the futures trading industry. Its activities center on administering systems and providing infrastructure to support clearing operations and the guarantee of futures trading transaction settlements.

2. Clearing and Guarantee Institution for Commodity Physical Market Transactions

To ensure orderly, secure, and guaranteed physical commodity transactions, this business group provides system facilities for clearing and guaranteeing

penyelesaian transaksi. Lingkup operasionalnya mencakup transaksi yang terjadi di bursa berjangka maupun pasar lelang komoditas.

3. Pusat Registrasi Sistem Resi Gudang

Berperan dalam melakukan pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan, kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan serta penyediaan sistem dan jaringan informasi Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang.

Perdagangan Berjangka Komoditi

Mandat untuk melaksanakan fungsi Penerimaan Registrasi Transaksi dalam ranah Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia dijalankan oleh PT KBI. Kewenangan operasional ini didasarkan pada legalitas Izin Usaha sebagai Lembaga Kliring Berjangka yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Kepala BAPPEBTI No. 128/IX/2001 tertanggal 4 September 2001.

Adapun dalam kerangka regulasi nasional, Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan sebagaimana telah diamendemen dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 yang mengamanatkan bahwa setiap penyelenggaraan Bursa Berjangka wajib didukung oleh keberadaan Lembaga Kliring Berjangka berbadan hukum Perseroan Terbatas yang berizin BAPPEBTI. PT KBI hadir memenuhi amanat undang-undang tersebut dengan menjalankan peran strategis dalam memelihara integritas keuangan para pelaku usaha.

Di sisi lain, hubungan kerja dengan Anggota Kliring dilaksanakan melalui mekanisme penjaminan penyelesaian atas setiap transaksi kontrak berjangka yang didaftarkan beroperasi di bawah prinsip novasi (substitusi) dan pengelolaan risiko. Dalam skema ini, hak atas jaminan penyelesaian baru akan melekat pada setiap Anggota Kliring apabila mereka telah menunaikan seluruh kewajibannya kepada Lembaga Kliring secara tuntas.

Kemudian, untuk merespons dinamika kebutuhan pelaku pasar dan perkembangan industri yang kian kompleks, Perusahaan melakukan eskalasi layanan penjaminan hingga melampaui batas transaksi bursa. Langkah strategis ini dimulai sejak tahun 2005, di mana PT KBI memperluas cakupan operasionalnya untuk menangani aktivitas penjaminan dan penyelesaian transaksi kontrak derivatif yang diperdagangkan di luar Bursa Berjangka.

settlement of transactions. Its operational scope covers transactions taking place on futures exchanges as well as commodity auction markets.

3. Warehouse Receipt System Registration Center

It plays a role in the recording, storage, book-entry transfer, ownership, encumbrance of security rights, reporting, as well as the provision of information systems and networks for Warehouse Receipts and Warehouse Receipt Derivatives.

Commodity Futures Trading

PT KBI carries out the mandate to perform the function of Transaction Registration Acceptance within the scope of Commodity Futures Trading in Indonesia. This operational authority is based on the Business License as a Futures Clearing Institution, issued under the Decree of the Head of BAPPEBTI No. 128/IX/2001 dated September 4, 2001.

Within the national regulatory framework, Law No. 32 of 1997 on Commodity Futures Trading, as amended by Law No. 10 of 2011, stipulates that every Futures Exchange must be supported by a Futures Clearing Institution established as a Limited Liability Company licensed by BAPPEBTI. PT KBI fulfills this mandate by performing its strategic role in safeguarding the financial integrity of business actors.

Meanwhile, cooperation with Clearing Members is executed through a settlement guarantee mechanism for each futures contract transaction registered, operating under the principles of novation (substitution) and risk management. In this scheme, the right to receive settlement guarantees is only granted to Clearing Members once all their obligations to the Clearing Institution have been fully met.

To respond to evolving market needs and increasing industry complexity, the Company expanded its guarantee services beyond exchange-traded transactions. This strategic initiative began in 2005, when PT KBI broadened its operational scope to handle guarantee and settlement activities for derivative contracts traded outside the Futures Exchange.

Sistem Resi Gudang

Legitimasi operasional Perusahaan dalam ekosistem industri Resi Gudang dikukuhkan melalui Surat Keputusan BAPPEBTI No. 03/BAPPEBTI/Kep-SRG SP/PUSREG/6/2009 tertanggal 16 Juni 2009. Berdasarkan persetujuan tersebut, PT KBI memegang mandat resmi sebagai Pusat Registrasi dengan kewenangan penuh untuk mengelola infrastruktur sistem dan jaringan informasi Resi Gudang serta Derivatifnya. Ruang lingkup fungsinya meliputi pelaksanaan pencatatan, pemindahbukuan, penyimpanan, administrasi kepemilikan, pembebanan hak jaminan, hingga pelaporan.

Warehouse Receipt System

The Company's operational legitimacy within the Warehouse Receipt System industry is reinforced through the Decree of BAPPEBTI No. 03/BAPPEBTI/Kep-SRG SP/PUSREG/6/2009 dated June 16, 2009. Based on this approval, PT KBI holds an official mandate as the Registration Center with full authority to manage system infrastructure and information networks for Warehouse Receipts and their derivatives. Its functional scope includes recording, bookkeeping transfers, storage, ownership administration, encumbrance of security rights, and reporting.

SRG

01

Penerbitan
Publishing

02

Penjaminan
Guarantee

03

Penyelesaian Transaksi
Transaction Completion

04

Pengalihan
Diversification

Sentralisasi penatausahaan yang dijalankan PT KBI berperan vital dalam mewujudkan Sistem Informasi Sediaan Nasional Komoditas yang terintegrasi, sehingga memudahkan Pemerintah dalam pemantauan stok. Operasionalisasi penatausahaan ini mencakup instrumen berbasis warkat maupun tanpa warkat. Pelaksanaan fungsi tersebut merupakan implementasi dari amanat Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2011 (tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 mengenai Sistem Resi Gudang), yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum serta transparansi bagi para Kreditor dan pemegang hak.

Mekanisme penatausahaan Resi Gudang dan produk derivatif yang terstruktur ini menghadirkan nilai tambah bagi seluruh ekosistem perdagangan. Manfaat strategis yang dapat diperoleh oleh para pemangku kepentingan yang meliputi regulator, kreditor, hingga pemegang resi, adalah sebagai berikut:

Centralized administrative management conducted by PT KBI plays a vital role in enabling an integrated National Commodity Inventory Information System, thereby facilitating government oversight of national stock levels. This administrative function encompasses both scrip-based and scripless instruments. Its implementation reflects the mandate of Article 34 of Law of the Republic of Indonesia No. 9 of 2011 (amending Law No. 9 of 2006 concerning Warehouse Receipt System), which aims to provide legal certainty and transparency for creditors and rights holders.

The structured mechanism for administering Warehouse Receipts and their derivative products delivers added value across the entire trading ecosystem. The strategic benefits received by stakeholders, including regulators, creditors, and receipt holders, are as follows:

Petani Farmers

- Tunda jual untuk memperoleh harga terbaik.
- Alternatif pembiayaan bagi Petani, Poktan, Gapoktan, dan Koperasi.
- Meningkatkan posisi tawar Petani.
- Ability to delay sales to obtain optimal pricing.
- Alternative financing options for Farmers, Farmer Groups, Farmer Group Associations, and Cooperatives.
- Enhanced bargaining position.

Bank Banks

- Penyaluran kredit aman dan menguntungkan.
- Peningkatan kredit dengan jaminan yang bersifat likuid.
- Perlindungan yang tinggi atas jaminan.
- Secure and profitable credit distribution.
- Increased lending backed by liquid collateral.
- Strong protection over pledged assets.

Pemerintah Government

- Instrumen pengambilan kebijakan ekspor atau impor.
- Sarana pengendalian sediaan (stok) nasional yang efisien.
- Pengendalian inflasi komoditas pangan.
- Instrument for export/import policy decision-making.
- Efficient tool for monitoring national inventory levels.
- Support for inflation control of food commodities.

Pedagang Traders

- Ketersediaan barang dengan standar kualitas terjamin.
- Mengurangi biaya penyimpanan.
- Fasilitas pembiayaan perdagangan.
- Availability of commodities with assured quality standards.
- Reduced storage costs.
- Access to trade financing facilities.

Pabrik Manufacturers

- Mendapatkan bahan baku yang berkualitas.
- Pembiayaan komoditas untuk penambahan *cash flow*.
- Manajemen *supply chain* yang lebih baik.
- Access to high-quality raw materials.
- Commodity-based financing to strengthen cash flow.
- Improved supply chain management.

Pergudangan Warehousing Sector

- Industri perdagangan akan tumbuh.
- Income dari jasa pergudangan dan stok barang terjamin.
- Mengembangkan model bisnis lainnya.
- Growth potential for the commodity trading industry.
- Revenue from warehousing services with guaranteed inventory.
- Opportunities to expand into additional business models.

Pasar Fisik Komoditas

Sinergi operasional bersama Penyelenggara Pasar Fisik Komoditas dijalankan berdasarkan legitimasi Surat Keputusan BAPPEBTI No. 14/BAPPEBTI/PER-PL/10/2010 tertanggal 15 Oktober 2010. Regulasi ini memberikan izin bagi Perusahaan untuk bertindak sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*). Guna memastikan kelancaran aktivitas tersebut, Perusahaan mengandalkan infrastruktur teknologi bernama Sistem Penjaminan Pasar Fisik Komoditas. Keberadaan sistem ini berfungsi untuk mengakselerasi proses pendaftaran transaksi bagi para peserta, mencakup berbagai skema perdagangan mulai dari *Spot*, *Forward*, Tunai, hingga *Negosiasi*.

Lingkup layanan yang disediakan dalam ekosistem Pasar Fisik Komoditas ini meliputi:

Physical Market Commodity

Operational synergy with Physical Market Commodity Operators is carried out under the authority of Decree of BAPPEBTI No. 14/BAPPEBTI/PER-PL/10/2010 dated October 15, 2010. This regulation grants the Company authorization to act as the Clearing and Guarantee Institution for Forward Physical Market Auctions. To ensure smooth operations, the Company relies on its technological infrastructure known as the Physical Market Commodity Guarantee System. This system accelerates transaction registration processes for market participants, covering multiple trading schemes including *Spot*, *Forward*, *Cash*, and *Negotiated* transactions.

The scope of services provided within the Physical Market Commodity ecosystem includes the following:

Pasar Fisik Timah Murni Batangan

Perintah untuk mengelola sektor ini diperoleh melalui Surat Persetujuan BAPPEBTI No.01/BAPPEBTI/SP-KBPF/8/2019 tentang Persetujuan Lembaga Kliring Berjangka untuk melakukan Kegiatan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi di Pasar Fisik Timah Murni Batangan. Berdasarkan legalitas tersebut, terhitung sejak bulan Agustus 2019, Perusahaan resmi menjalankan peran strategisnya sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi khusus untuk komoditas Timah Murni Batangan.

Skema

Mekanisme penjaminan yang diterapkan Perusahaan pada Pasar Fisik Komoditas mengacu sepenuhnya pada kesepakatan prosedur yang berlaku di pasar terkait. Guna memberikan gambaran yang komprehensif, alur struktur penjaminan tersebut divisualisasikan melalui sajian info grafis berikut:

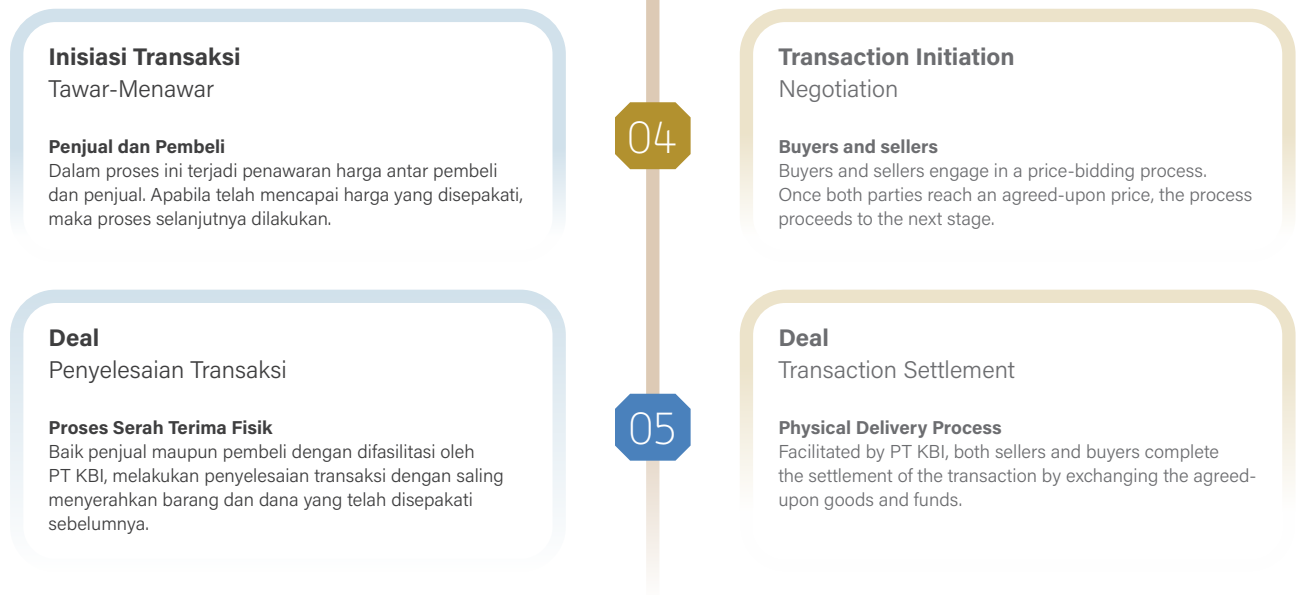
Physical Market for Refined Tin Bars

The mandate to manage this sector was granted through Approval Letter of BAPPEBTI No. 01/BAPPEBTI/SP-KBPF/8/2019 concerning approval for a Futures Clearing Institution to conduct Clearing and Settlement Guarantee activities in the Physical Market for Refined Tin Bars. Based on this authority, since August 2019, the Company has officially assumed its strategic role as the Clearing and Settlement Guarantee Institution specifically for Refined Tin Bar commodities.

Scheme

The guarantee mechanism applied by the Company in the Physical Market Commodity fully adheres to the procedural standards agreed upon in the respective market. To provide a comprehensive overview, the structural flow of the guarantee process is illustrated below:





WILAYAH OPERASIONAL OPERATIONAL AREA

Akses keterbukaan informasi terkait profil rekanan bisnis Perusahaan telah tersedia pada laman www.ptkbi.com. Jejaring kemitraan tersebut mencakup berbagai entitas yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia hingga ke mancanegara. Dalam mengelola hubungan strategis ini, Perusahaan senantiasa memegang teguh komitmen untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai koridor hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

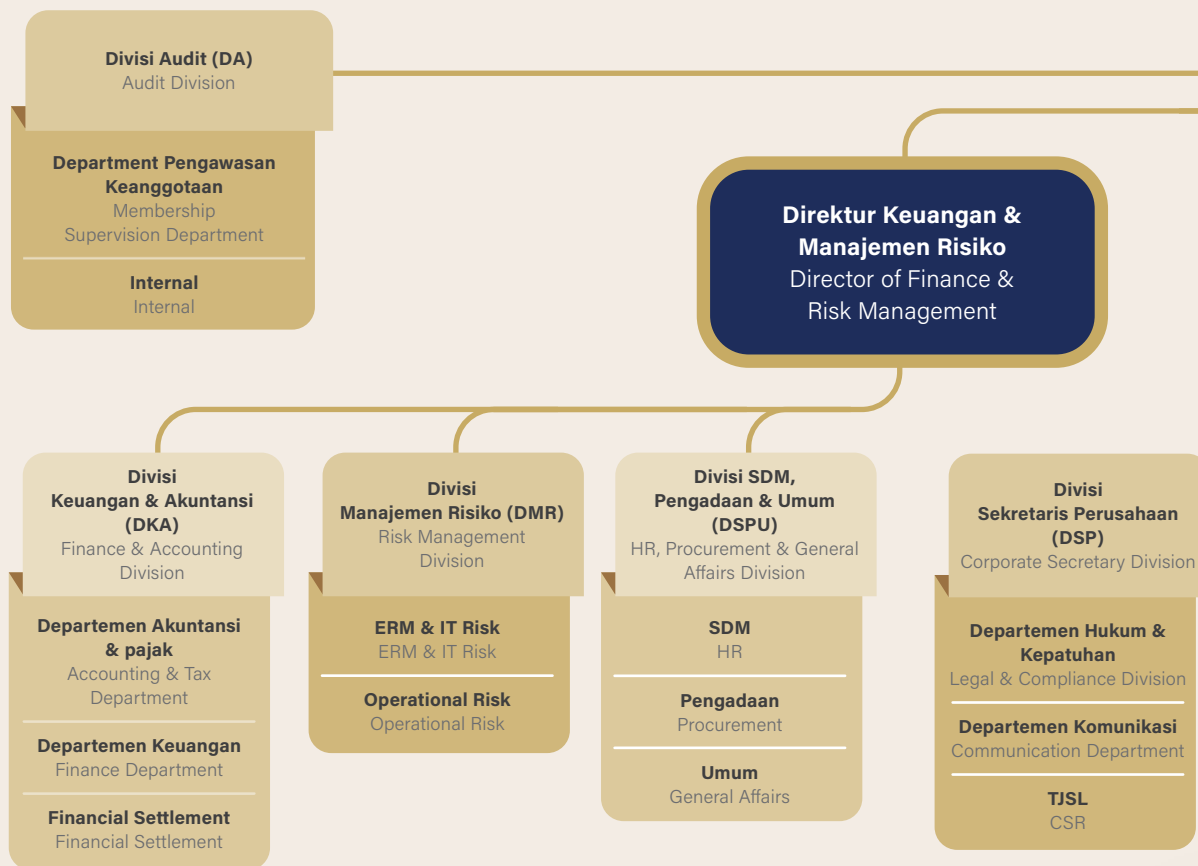
Access to information disclosures regarding the Company's business partner profiles is available through the official website at www.ptkbi.com. This partnership network encompasses a wide range of entities operating across Indonesia and extending to international markets. In managing these strategic relationships, the Company remains firmly committed to conducting all business activities within the legal framework and in full compliance with prevailing laws and regulations.

STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN

Company Organizational Structure

Sesuai dengan Keputusan Direksi PT Kliring Berjangka Indonesia No. 12/K-KBI/VI/2025 tentang Struktur Organisasi PT Kliring Berjangka Indonesia, struktur organisasi PT KBI adalah sebagai berikut:

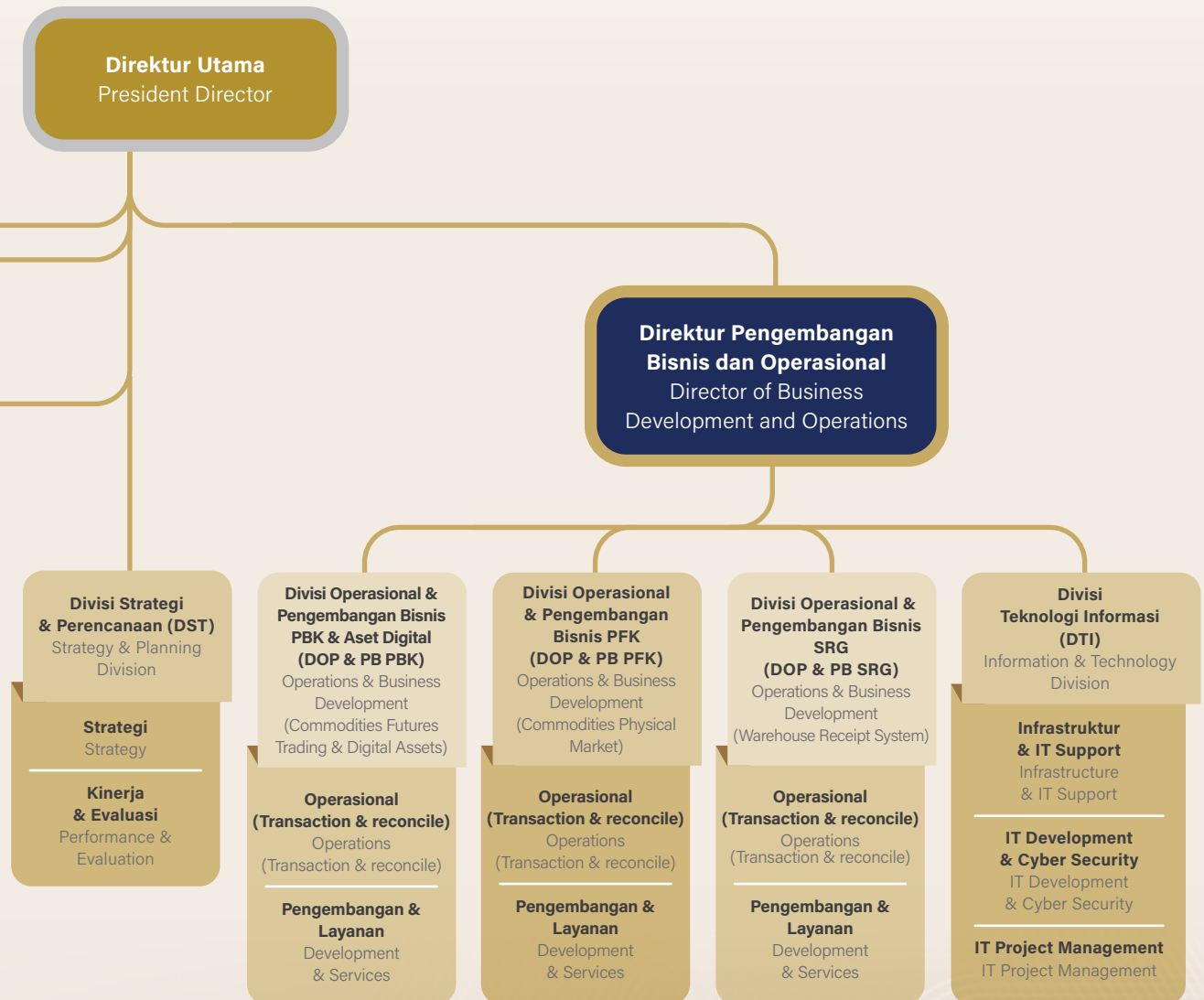
Pursuant to the Decree of the Board of Directors of PT Kliring Berjangka Indonesia No. 12/K-KBI/VI/2025 concerning Organizational Structure of PT Kliring Berjangka Indonesia, the organizational structure of PT KBI is as follows:



KEANGGOTAAN PERUSAHAAN DALAM ASOSIASI

Association Membership

Nama Asosiasi Association	Skala Asosiasi Scale
• Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia Indonesian Commodity Futures Trading Association	Nasional National
• Asosiasi Eksportir Timah Indonesia Indonesian Tin Exporters Association	
• Perkumpulan Pedagang Emas Digital Indonesia Indonesian Digital Gold Traders Association	
• Asosiasi Pengelola Gudang SRG Indonesia Indonesian SRG Warehouse Managers	



PROFIL DEWAN KOMISARIS

Profile of the Board of Commissioners



Hernawan Bakti Sasongko
 Komisaris Utama
 President Commissioner

Irman Sahroni Ahmad
 Komisaris Independen
 Independent Commissioner

Fajar Massadiah Egy
 Komisaris Independen
 Independent Commissioner

Riwayat Penunjukan

Landasan hukum penetapan posisi Komisaris Utama PT Kliring Berjangka Indonesia untuk Bapak Hernawan B. Sasongko merujuk pada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan PT Danareksa (Persero) selaku Para Pemegang Saham. Ketetapan ini disahkan melalui Surat Nomor: SK-198/MBU/07/2023 dan Nomor: KPPS-47/014/DNRK tanggal 18 Juli 2023 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama PT Kliring Berjangka Indonesia.

Riwayat Pendidikan

- S2 Master of Business Administration- Royal Melbourne Institute of Technology, Australia (1995)
- S1 Ekonomi Manajemen - Universitas Kristen Indonesia (1986)

Pengalaman Kerja

- Komisaris Utama - PT Kliring Berjangka Indonesia (2023 - Saat ini)
- Deputy Komisioner Internasional dan Riset - Otoritas Jasa Keuangan (2020 - 2022)
- Advisor Senior/Deputy Komisioner, Strategic Committee - Otoritas Jasa Keuangan (2017 - 2020)
- Deputy Komisioner Manajemen Strategis (Bidang Organisasi/SDM dan Hukum) - Otoritas Jasa Keuangan (2016 - 2017)
- Kepala Departemen Organisasi dan SDM - Otoritas Jasa Keuangan (2014 - 2016)
- Direktur Perencanaan Strategis - Otoritas Jasa Keuangan (2013 - 2014)
- Kepala Divisi/Analisis Ekonomi Senior, Departemen Internasional - Bank Indonesia (2010 - 2013)
- Analis Ekonomi Senior - Bank Indonesia Bandung (2007 - 2010)
- Senior Economist - Bank Indonesia New York (2003 - 2006)
- Project Leader - Transformasi Bank Indonesia (2000 - 2003)
- Analis Manajemen Organisasi - Biro Perencanaan Organisasi dan SDM Bank Indonesia (1995 - 2000)
- Pegawai Tugas Belajar Bank Indonesia - RMIT, Melbourne, Australia (1993 - 1995)
- Analis Junior, Departemen Internasional - Bank Indonesia (1989 - 1993)

Rangkap Jabatan

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau dengan Pemegang Saham Utama.

Pelatihan dan/atau Pendidikan pada Tahun Buku

- Seminar Nasional & Pengukenan Gelar Kompetensi Auditor Internal
- Aspek Hukum dalam Pengelolaan Korporasi BUMN

History of Appointment

The legal basis for the appointment of Mr. Hernawan B. Sasongko as President Commissioner of PT Kliring Berjangka Indonesia refers to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the President Director of PT Danareksa (Persero) as the Shareholders. This stipulation was ratified through Decree No. SK-198/MBU/07/2023 and No. KPPS-47/014/DNRK dated July 18, 2023, concerning Dismissal and Appointment of the President Commissioner of PT Kliring Berjangka Indonesia.

Educational Background

- Master of Business Administration (MBA) - Royal Melbourne Institute of Technology, Australia (1995)
- Bachelor of Economics, Management - Universitas Kristen Indonesia (1986)

Professional Experience

- President Commissioner of PT Kliring Berjangka Indonesia (2023 - Present)
- Deputy Commissioner for International and Research of Financial Services Authority (OJK) (2020 - 2022)
- Senior Advisor/Deputy Commissioner - Strategic Committee of Financial Services Authority (OJK) (2017 - 2020)
- Deputy Commissioner for Strategic Management (Organization/HR and Legal) of Financial Services Authority (OJK) (2016 - 2017)
- Head of Organization and HR Department of Financial Services Authority (OJK) (2014 - 2016)
- Director of Strategic Planning of Financial Services Authority (OJK) (2013 - 2014)
- Head of Division/Senior Economic Analyst - International Department of Bank Indonesia (2010 - 2013)
- Senior Economic Analyst of Bank Indonesia Bandung (2007 - 2010)
- Senior Economist of Bank Indonesia New York (2003 - 2006)
- Project Leader of Bank Indonesia Transformation (2000 - 2003)
- Organizational Management Analyst - Bureau of Organizational Planning and HR of Bank Indonesia (1995 - 2000)
- Bank Indonesia Study Assignment of RMIT, Melbourne, Australia (1993 - 1995)
- Junior Analyst - International Department of Bank Indonesia (1989 - 1993)

Concurrent Positions

He does not hold any concurrent positions in other companies.

Affiliation

He has no affiliation with any members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, nor with the Majority Shareholders.

Training and/or Education in the Financial Year

- National Seminar & Inauguration of Internal Auditor Competency Certification
- Legal Aspect in SOE Cooperative Management



Hernawan B. Sasongko

Komisaris Utama

President Commissioner

Periode Menjabat: 18 Juli 2023 - Saat ini

Term of Office: July 18, 2023 - Present

Warga Negara Indonesia

Indonesian

63 Tahun

Years old

Jakarta

PROFIL DEWAN KOMISARIS Profile of the Board of Commissioners



Fajar Massadiyah Egy
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Periode Menjabat: 4 Maret 2024 – Saat ini
Term of Office: March 4, 2024 – Present

Warga Negara Indonesia
Indonesian

59 Tahun
Years old

Jakarta

Riwayat Penunjukan

Landasan hukum penetapan posisi Komisaris Independen PT Kliring Berjangka Indonesia untuk Bapak Fajar Massadiyah Egy didasarkan pada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan PT Danareksa (Persero) selaku Para Pemegang Saham. Ketentuan ini disahkan melalui Surat Nomor: SK-55/MBU/03/2024 dan KPPS-5/DR/DIRUT/03/2024 tanggal 4 Maret 2024 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Independen PT Kliring Berjangka Indonesia.

Riwayat Pendidikan

- S2 Magister Ilmu Komunikasi – Universitas Paramadina (2016)
- S1 Ilmu Administrasi – Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (2004)

Pengalaman Kerja

- Komisaris Independen – PT Kliring Berjangka Indonesia (2024 – Saat ini)
- Tim Media PPAD – Persatuan Purnawirawan TNI AD (2021 – Saat ini)
- Ketua Yayasan Kita Jaga Alam (2021 – 2023)
- Komisaris Utama – PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PT PANN) (2020 – 2024)
- Tenaga Ahli – Staf Khusus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) (2019 – 2021)
- Redaktur Senior – PT Citra Media Persada (Tabloid Wanita Indonesia) (1989 – 1992)
- Wartawan – PT Citra Media Persada (Tabloid Wanita Indonesia) (1989 – 1990)
- Wartawan Harian – Pelita Jakarta (1987 – 1988)
- Penulis Lepas di Berbagai Media Cetak di Indonesia (1984 – 1987)

Rangkap Jabatan

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau dengan Pemegang Saham Utama.

Pelatihan dan/atau Pendidikan pada Tahun Buku

- Aspek Hukum dalam Pengelolaan Korporasi BUMN
- Resilience to Sustainability: Leading Through GRC in the Post Digital Era

History of Appointment

The legal basis for the appointment of Mr. Fajar Massadiyah Egy as Independent Commissioner of PT Kliring Berjangka Indonesia is stipulated through the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the President Director of PT Danareksa (Persero) as the Shareholders. This provision was enacted through Letter No.: SK-55/MBU/03/2024 and KPPS-5/DR/DIRUT/03/2024 dated March 4, 2024, concerning Dismissal and Appointment of the Independent Commissioner of PT Kliring Berjangka Indonesia.

Educational Background

- Master's Degree in Communication Science – Universitas Paramadina (2016)
- Bachelor's Degree in Administrative Science – Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (2004)

Professional Experience

- Independent Commissioner of PT Kliring Berjangka Indonesia (2024 – Present)
- Member of the PPAD Media Team – Persatuan Purnawirawan TNI AD (2021 – Present)
- Chairman of Kita Jaga Alam Foundation (2021 – 2023)
- President Commissioner of Pengembangan Armada Niaga Nasional (PT PANN) (2020 – 2024)
- Expert Staff – Special Staff to the Head of National Disaster Management Agency (BNPB) (2019 – 2021)
- Senior Editor at PT Citra Media Persada (Tabloid Wanita Indonesia) (1989 – 1992)
- Journalist at PT Citra Media Persada (Tabloid Wanita Indonesia) (1989 – 1990)
- Journalist at Harian Pelita Jakarta (1987 – 1988)
- Freelance Writer for various print media in Indonesia (1984 – 1987)

Concurrent Positions

He does not hold any concurrent positions in other companies.

Affiliation

He has no affiliation with any members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, nor with the Majority Shareholders.

Training and/or Education in the Financial Year

- Legal Aspect in SOE Cooperative Management
- Resilience to Sustainability: Leading Through GRC in the Post Digital Era

Riwayat Penunjukan

Landasan hukum penetapan posisi Komisaris Independen Perusahaan untuk Bapak Irman Sahroni Ahmad didasarkan pada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan PT Danareksa (Persero) selaku Pemegang Saham PT Kliring Berjangka Indonesia. Ketetapan ini disahkan melalui Surat Nomor SK-100/MBU/04/2024 dan Nomor KPPS-7/DR/DIRUT/04/2024 tanggal 19 April 2024 perihal Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Kliring Berjangka Indonesia.

Riwayat Pendidikan

S1 Manajemen Informatika - Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer Jayakarta (2007)

Pengalaman Kerja

- Komisaris Independen - PT Kliring Berjangka Indonesia (2024 - Saat ini)
- Direktur - PT Paser Bumi Raya (2020 - 2024)
- *Manager Marketing* - PT Pertiwi Anugerah Rinjani (2009 - 2020)
- Staff Collection Secured - PT Bank Bumiputera (2006 - 2009)
- Staff Risk Management - PT Bank Bumiputera (2005 - 2006)

Rangkap Jabatan

Direktur - PT Paser Bumi Raya (2020 - Saat ini)

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau dengan Pemegang Saham Utama.

Pelatihan dan/atau Pendidikan pada Tahun Buku

- Onboarding Commissioners Program Angkatan 9 Tahun 2025
- Aspek Hukum dalam Pengelolaan Korporasi BUMN
- Resilience to Sustainability: Leading Through GRC in the Post Digital Era

History of Appointment

The legal basis for the appointment of Mr. Irman Sahroni Ahmad as Independent Commissioner of the Company is derived from the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the President Director of PT Danareksa (Persero) as the Shareholders of PT Kliring Berjangka Indonesia. This appointment was formalized through Letter No. SK-100/MBU/04/2024 and No. KPPS-7/DR/DIRUT/04/2024 dated April 19, 2024, concerning Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Kliring Berjangka Indonesia.

Educational Background

Bachelor's Degree in Informatics Management - Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer Jayakarta (2007)

Professional Experience

- Independent Commissioner of PT Kliring Berjangka Indonesia (2024 - Present)
- Director of PT Paser Bumi Raya (2020 - 2024)
- Marketing Manager of PT Pertiwi Anugerah Rinjani (2009 - 2020)
- Secured Collection Staff of PT Bank Bumiputera (2006 - 2009)
- Risk Management Staff of PT Bank Bumiputera (2005 - 2006)

Concurrent Positions

Director of PT Paser Bumi Raya (2020 - Present)

Affiliation

He has no affiliation with any members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, nor with the Majority Shareholders.

Training and/or Education in the Financial Year

- Onboarding Commissioners Program Batch 9 of 2025
- Legal Aspect in SOE Cooperative Management
- Resilience to Sustainability: Leading Through GRC in the Post Digital Era



Irman Sahroni Ahmad

Komisaris Independen

Independent Commissioner

Periode Menjabat: 19 April 2024 - Saat ini

Term of Office: April 19, 2024 - Present

Warga Negara Indonesia

Indonesian

43 Tahun

Years old

Tangerang, Banten

PROFIL DIREKSI

Profile of the Board of Directors



Adiyasa Suhadibroto
 Direktur Keuangan dan
 Manajemen Risiko
 Director of Finance and
 Risk Management

Budi Susanto
 Direktur Utama
 President Director

Saidu Solihin
 Direktur Pengembangan Bisnis
 dan Operasional
 Director of Business Development
 and Operations

Riwayat Penunjukan

Landasan hukum pengalihan tugas menjadi Direktur Utama untuk Bapak Budi Susanto yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, merujuk pada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan PT Danareksa (Persero) selaku Para Pemegang Saham PT Kliring Berjangka Indonesia. Ketetapan ini disahkan melalui Surat Nomor: SK-54/MBU/03/2024 dan Nomor KPPS-4/DR/DIRUT/03/2024 tanggal 4 Maret 2024 perihal Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengalihan Tugas Anggota-Anggota Direksi PT Kliring Berjangka Indonesia.

Riwayat Pendidikan

- S2 Magister Pasar Modal - Universitas Indonesia (2005)
- S1 Ekonomi - Universitas Indonesia (1996)

Pengalaman Kerja

- Direktur Utama - PT Kliring Berjangka Indonesia (2024 - Saat ini)
- Direktur - PT Kliring Berjangka Indonesia (2022 - 2023)
- Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko - PT Kawasan Industri Wijayakusuma (2021 - 2022)
- Direktur - *Institutional & Retail Capital Market* - PT BRI Danareksa Sekuritas (2020 - 2021)
- Direktur *Institutional Capital Market* - PT Danareksa Sekuritas (2015 - 2021)
- Kepala Divisi *Debt Capital Market* - PT Danareksa Sekuritas (2011 - 2015)
- Kepala Divisi Riset *Fixed Income* - PT Danareksa Sekuritas (2007 - 2011)
- *Credit Analyst* - PT Danareksa Sekuritas (1997 - 2007)
- *Senior Auditor* - Ernst & Young (E&Y) (1994 - 1997)

Rangkap Jabatan

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau dengan Pemegang Saham Utama.

Pelatihan dan/atau Pendidikan pada Tahun Buku

- Seminar Nasional & Pengukuhan Gelar Kompetensi Auditor Internal
- Certified Risk Governance Professional (CRGP)

History of Appointment

The legal basis for the reassignment of Mr. Budi Susanto as President Director, who previously served as the Director of Finance and Risk Management, refers to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the President Director of PT Danareksa (Persero) as the Shareholders of PT Kliring Berjangka Indonesia. This decree was ratified through Letter No: SK-54/MBU/03/2024 and No KPPS-4/DR/DIRUT/03/2024 dated March 4, 2024, concerning Change in Job Nomenclature and Reassignment of Members of the Board of Directors of PT Kliring Berjangka Indonesia.

Educational Background

- Master's Degree in Capital Market - University of Indonesia (2005)
- Bachelor's Degree in Economics (Accounting) - University of Indonesia (1996)

Professional Experience

- President Director of PT Kliring Berjangka Indonesia (2024 - Present)
- Director of PT Kliring Berjangka Indonesia (2022 - 2023)
- Director of Finance and Risk Management of PT Kawasan Industri Wijayakusuma (2021 - 2022)
- Director of Institutional & Retail Capital Market of PT BRI Danareksa Sekuritas (2020 - 2021)
- Director of Institutional Capital Market of PT Danareksa Sekuritas (2015 - 2021)
- Head of Debt Capital Market Division of PT Danareksa Sekuritas (2011 - 2015)
- Head of Fixed Income Research Division of PT Danareksa Sekuritas (2007 - 2011)
- Credit Analyst of PT Danareksa Sekuritas (1997 - 2007)
- Senior Auditor of Ernst & Young (E&Y) (1994 - 1997)

Concurrent Positions

He does not hold any concurrent positions in other companies.

Affiliation

He has no affiliation with any members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, nor with the Majority Shareholders.

Training and/or Education in the Financial Year

- National Seminar & Inauguration of Internal Auditor Competency Certification
- Certified Risk Governance Professional (CRGP)



Budi Susanto

Direktur Utama
President Director

Periode Menjabat: 26 Agustus - RUPS 2027

Term of Office: August 26, 2022 - 2027 GMS

Warga Negara Indonesia
Indonesian

55 Tahun
Years old

Jakarta

**PROFIL DIREKSI** Profile of the Board of Directors**Adiyasa Suhadibroto****Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko**

Director of Finance and Risk Management

Periode Menjabat: 22 Agustus 2023 - RUPS 2028

Term of Office: August 22, 2023 - GMS 2028

Warga Negara Indonesia

Indonesian

59 Tahun

Years old

Jakarta**Riwayat Penunjukan**

Landasan hukum pengalihan tugas menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko untuk Bapak Adiyasa Suhadibroto, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasional, merujuk pada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan PT Danareksa (Persero) selaku Para Pemegang Saham PT Kliring Berjangka Indonesia. Ketetapan ini disahkan melalui Surat Nomor: SK-54/MBU/03/2024 dan Nomor KPPS-4/DR/DIRUT/03/2024 tanggal 4 Maret 2024 perihal Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengalihan Tugas Anggota-Anggota Direksi PT Kliring Berjangka Indonesia.

Riwayat Pendidikan

- S3 *Advance Management Program* - University of Oxford, Said Business School (2014)
- S2 *Applied Finance* - University of Melbourne (2002)
- S1 *Science in Accounting* - Indiana University (1990)

Pengalaman Kerja

- Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko - PT Kliring Berjangka Indonesia (2024 - Saat ini)
- Direktur Operasional - PT Kliring Berjangka Indonesia (2023 - 2024)
- *President Director* - OCBC Sekuritas (2022 - 2023)
- *President Director* - BNI Sekuritas (2017 - 2020)
- *Division Head SEVP, Corporate Banking* - PT Bank BNI TBK (2012 - 2017)

Rangkap Jabatan

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau dengan Pemegang Saham Utama.

Pelatihan dan/atau Pendidikan pada Tahun Buku

- Seminar Nasional & Pengukuhan Gelar Kompetensi Auditor Internal Resilience to Sustainability: Leading Through GRC in the Post Digital Era
- Risk Beyond

History of Appointment

The legal basis for the reassignment of Mr. Adiyasa Suhadibroto to the position of Director of Finance and Risk Management, from his previous role as Director of Operations, refers to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the President Director of PT Danareksa (Persero) as the Shareholders of PT Kliring Berjangka Indonesia. This stipulation was formalized through Letter No. SK-54/MBU/03/2024 and No. KPPS-4/DR/DIRUT/03/2024 dated March 4, 2024, concerning Change of Position Nomenclature and Reassignment of Duties of the Members of the Board of Directors of PT Kliring Berjangka Indonesia.

Educational Background

- Doctorate in Advanced Management Program, University of Oxford, Said Business School (2014)
- Master's Degree in Applied Finance, University of Melbourne (2002)
- Bachelor of Science in Accounting, Indiana University (1990)

Professional Experience

- Director of Finance and Risk Management of PT Kliring Berjangka Indonesia (2023 - Present)
- Director of Operations of PT Kliring Berjangka Indonesia (2023 - 2024)
- President Director of OCBC Sekuritas (2022 - 2023)
- President Director of BNI Sekuritas (2017 - 2020)
- Division Head of SEVP, Corporate Banking of PT Bank BNI Tbk (2012 - 2017)

Concurrent Positions

He does not hold any concurrent positions in other companies.

Affiliation

He has no affiliation with any members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, nor with the Majority Shareholders.

Training and/or Education in the Financial Year

- National Seminar & Inauguration of Internal Auditor Competency Certification
- Resilience to Sustainability: Leading Through GRC in the Post Digital Era
- Risk Beyond

Riwayat Penunjukan

Landasan hukum pengalihan tugas menjadi Direktur Pengembangan Bisnis dan Operasional untuk Bapak Saidu Solihin, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengembangan Bisnis, merujuk pada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan PT Danareksa (Persero) selaku Pemegang Saham PT Kliring Berjangka Indonesia. Ketetapan ini disahkan melalui Surat Nomor: SK-54/MBU/03/2024 dan Nomor KPPS-4/DR/DIRUT/03/2024 tanggal 4 Maret 2024 perihal Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengalihan Tugas Anggota-Anggota Direksi PT Kliring Berjangka Indonesia.

Riwayat Pendidikan

- S2 Manajemen Keuangan - Universitas Trisakti (2001)
- S1 Manajemen Keuangan - Universitas Trisakti (1998)

Pengalaman Kerja

- Direktur Pengembangan Bisnis & Operasional - PT Kliring Berjangka Indonesia (2024 - Saat ini)
- Direktur Pengembangan Bisnis - PT Kliring Berjangka Indonesia (2023 - 2024)
- Direktur Keuangan dan Perencanaan Perusahaan - PT Transportasi Jakarta (2022 - 2023)
- Financial Advisory Partner (2019 - 2022)
- Direktur - PT Danareksa Sekuritas (2016 - 2019)
- Komisaris - PT Garuda Nusantara Capital (2013 - 2015)
- Direktur Utama - PT Garuda Nusantara Capital (2010 - 2013)
- Direktur Pelaksana - PT NISP Securities (2007 - 2010)
- Wakil Presiden Eksekutif/Kepala Klien Ritel dan Institusi - PT Amcapital Indonesia (2006 - 2007)
- Kepala Cabang - PT Danareksa Sekuritas (2002 - 2006)
- Equity Sales - PT Danareksa Sekuritas (1997 - 2002)

Rangkap Jabatan

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau dengan Pemegang Saham Utama.

Pelatihan dan/atau Pendidikan pada Tahun Buku

- Mitigasi Risiko dalam Transformasi Digital
- Seminar Nasional - Bincang SPI 2025, dengan mengusung tema utama "Menjaga Profesionalisme Direksi dalam Bingkai Governance, Risk, & Compliance (GRC) dan Business Judgement Rule terhadap UU No. 1 Tahun 2025
- Seminar Amandemen UU BUMN Danantara

History of Appointment

The legal basis for the reassignment of Mr. Saidu Solihin to the position of Director of Business Development and Operations, from his previous role as Director of Business Development, refers to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the President Director of PT Danareksa (Persero) as the Shareholders of PT Kliring Berjangka Indonesia. This stipulation was formalized through Letter No. SK-54/MBU/03/2024 and No. KPPS-4/DR/DIRUT/03/2024 dated March 4, 2024, concerning Change of Position Nomenclature and Reassignment of Duties of the Members of the Board of Directors of PT Kliring Berjangka Indonesia.

Educational Background

- Master's Degree in Financial Management - Trisakti University (2001)
- Bachelor's Degree in Financial Management - Trisakti University (1998)

Professional Experience

- Director of Business Development & Operations of PT Kliring Berjangka Indonesia (2024 - Present)
- Director of Business Development of PT Kliring Berjangka Indonesia (2023 - 2024)
- Director of Finance and Corporate Planning of PT Transportasi Jakarta (2022 - 2023)
- Financial Advisory Partner (2019 - 2022)
- Director of PT Danareksa Sekuritas (2016 - 2019)
- Commissioner of PT Garuda Nusantara Capital (2013 - 2015)
- President Director of PT Garuda Nusantara Capital (2010 - 2013)
- Managing Director of PT NISP Securities (2007 - 2010)
- Executive Vice President / Head of Retail and Institutional Clients of PT Amcapital Indonesia (2006 - 2007)
- Branch Head of PT Danareksa Sekuritas (2002 - 2006)
- Equity Sales of PT Danareksa Sekuritas (1997 - 2002)

Concurrent Positions

He does not hold any concurrent positions in other companies.

Affiliation

He has no affiliation with any members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, nor with the Majority Shareholders.

Training and/or Education in the Financial Year

- Risk Mitigation in Digital Transformation
- National Seminar - IAU Talk 2025, with the main theme: 'Maintaining Board Professionalism within the Framework of Governance, Risk & Compliance (GRC) and the Business Judgment Rule under Law No. 1 of 2025
- Seminar on the Amendment of the SOE Law and Danantara



Saidu Solihin

Direktur Pengembangan Bisnis dan Operasional

Director of Business Development and Operations

Periode Menjabat: 22 Agustus 2023 - RUPS 2028

Term of Office: August 22, 2023 - GMS 2028

Warga Negara Indonesia

Indonesian

50 Tahun

Years old

Jakarta

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF

Profile of Executive Officers



Oki Marsetiawan

Plt. Kepala Divisi
Teknologi Informasi
Head of Information
& Technology Division

Gatot Eko Nugrahanto

Plt. Kepala Divisi Operasional
& Pengembangan Bisnis SRG
Acting Head of Operations
& Business Development Division
(Warehouse Receipt System)

Juventus Deka Aditama

Plt. Kepala Divisi
Operasional dan
Pengembangan Bisnis
PFK
Plt. Kepala Divisi
Operasional dan
Pengembangan Bisnis
PBK dan Aset Digital
Acting Head of Operations
and Business Development
Division (Commodities
Physical Market)
Acting Head of Operations
and Business Development
(Trading & Digital Assets)

Sheila Aviolanda

Plt. Kepala Divisi Audit
Acting Head of Audit
Division



**Anton Pranowo
Medianto**

Kepala Divisi SDM,
Pengadaan & Umum
Head of HR, Procurement &
General Affairs Division

**Arsita Fajrin
Khoirunisa**

Plt. Kepala Divisi
Manajemen Risiko
Acting Head of Risk
Management Division

Dedi Sopyan

Kepala Divisi
Sekretaris Perusahaan
Head of Corporate Secretary

Rohimah

Kepala Divisi Keuangan
dan Akuntansi
Head of Finance and
Accounting Division

Aswin Wiyatmoko

Kepala Divisi Strategi Perusahaan
Head of Corporate Strategy Division

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF Profile of Executive Officers



Rohimah

Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi
Head of Finance and Accounting Division

Warga Negara Indonesia
Indonesian
40 Tahun Years old
Bandung, Jawa Barat

Periode Menjabat

19 Agustus 2019 - Saat ini

Dasar Hukum

SK Direksi KBI Nomor 60/K-KBI/VIII/2019 tanggal 9 Agustus 2019

Riwayat Pendidikan

- S2 Manajemen - PPM Manajemen (2021)
- S1 Akuntansi - Universitas Mercubuana (2009)

Pengalaman Kerja

- Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi - PT Kliring Berjangka Indonesia (2023 - Saat ini)
- Kepala Divisi Operasional dan Bisnis - PT Kliring Berjangka Indonesia (2023)
- Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi - PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) (2018 - 2023)
- Penanggungjawab Umum dan SDM - PT Kliring Berjangka Indonesia (2017 - 2018)

Pelatihan dan/atau Pendidikan pada Tahun Buku

- Seminar Nasional & Pengukuhan Gelar Kompetensi Auditor Internal
- Risk Based Decision Making
- Cashflow and Treasury Management
- Toward Golden Indonesia 2045: Risk Management as a Competitive Edge in a Complex World

Term of Office

August 19, 2019 - Present

Legal Basis of Appointment

Decree of the Board of Directors No. 60/K-KBI/VIII/2019 dated August 9, 2019

Educational Background

- Master's Degree in Management - PPM School of Management (2021)
- Bachelor's Degree in Accounting - Mercu Buana University (2009)

Professional Experience

- Head of Finance and Accounting Division of PT Kliring Berjangka Indonesia (2023 - Present)
- Head of Operations and Business Division of PT Kliring Berjangka Indonesia (2023)
- Head of Finance and Accounting Division of PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) (2018 - 2023)
- General Affairs & Human Resources Coordinator of PT Kliring Berjangka Indonesia (2017 - 2018)

Training and/or Education in the Financial Year

- National Seminar & Inauguration of Internal Auditor Competency Certification
- Risk Based Decision Making
- Cashflow and Treasury Management
- Toward Golden Indonesia 2045: Risk Management as a Competitive Edge in a Complex World



Aswin Wiyatmoko

Kepala Divisi Strategi Perusahaan
Head of Corporate Strategy Division

Warga Negara Indonesia
Indonesian
37 Tahun Years old
Jakarta

Periode Menjabat

01 Mei 2024 - Saat ini

Dasar Hukum

SK Direksi No. 36/K-KBI/SDM/IV/2024 tanggal 25 April 2024

Riwayat Pendidikan

- S2 Hubungan Internasional - Universitas Airlangga (2012)
- S1 Hubungan Internasional - Universitas Airlangga (2010)

Pengalaman Kerja

- Kepala Divisi Strategi Perusahaan - PT Kliring Berjangka Indonesia (2024 - Saat ini)
- Senior Executive Vice President - PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia (2025)
- Kepala Divisi Manajemen Risiko - PT Kliring Berjangka Indonesia (2023 - 2024)
- Kepala Divisi Manajemen Risiko - PT Kawasan Industri Wijayakusuma (2022 - 2023)
- Vice President Strategic and Management System - PT Angkasa Pura Support (2020 - 2023)
- Vice President Parking Management - PT Angkasa Pura Support (2017 - 2020)

Pelatihan dan/atau Pendidikan pada Tahun Buku

Risk Awareness

Term of Office

May 1, 2024 - Present

Legal Basis of Appointment

Head of Corporate Strategy Division: Decree of the Board of Directors No. 36/K-KBI/SDM/IV/2024 dated April 25, 2024

Educational Background

- Master's Degree in International Relations Airlangga University (2012)
- Bachelor's Degree in International Relations - Airlangga University (2010)

Professional Experience

- Head of Corporate Strategy Division of PT Kliring Berjangka Indonesia (2024 - Present)
- Senior Executive Vice President of PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia (2025)
- Head of Risk Management Division of PT Kliring Berjangka Indonesia (2023 - 2024)
- Head of Risk Management Division of PT Kawasan Industri Wijayakusuma (2022 - 2023)
- Vice President of Strategic and Management System of PT Angkasa Pura Support (2020 - 2023)
- Vice President of Parking Management of PT Angkasa Pura Support (2017 - 2020)

Training and/or Education in the Financial Year

Risk Awareness

Periode Menjabat

24 Juli 2023 – Saat ini

Dasar Hukum

SK Direksi Nomor 09/K-KBI/SDM/VIII/2025
tanggal 05 Agustus 2025

Riwayat Pendidikan

- S3 Doktor Manajemen Bisnis, Strategic Management - Institut Pertanian Bogor (2023)
- S2 MBA, Strategic Management & Finance - Universitas Gadjah Mada (2013)
- S1 Teknik Industri - Universitas Indonesia (2003)

Pengalaman Kerja

- Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan - PT Kliring Berjangka Indonesia (2025 - Saat ini)
- Kepala Satuan Pengawasan Internal dan Kepatuhan - PT Kliring Berjangka Indonesia (2023-2025)
- Kepala Sekretariat Dewan Pengawas - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) (2019)
- Komite Audit - PT Kliring Berjangka Indonesia (2017 - 2022)
- Komite Pemantau Risiko - Bank Muamalat (2020 - 2022)
- Komite Manajemen Risiko - BPJS Kesehatan (2013 - 2017)
- Komite Audit - PT Bio Farma (Persero) (2008 - 2013)

Pelatihan dan/atau Pendidikan pada Tahun Buku

- Seminar Nasional & Pengukuhan Gelar Kompetensi Auditor Internal
- Corporate Secretary for Sustainability Governance

Term of Office

July 24, 2023 - Present

Legal Basis of Appointment

Decree of the Board of Directors No. 09/K-KBI/SDM/VIII/2025 dated August 05, 2025

Educational Background

- Doctorate in Business Management, Strategic Management - IPB University (2023)
- Master's Degree in Strategic Management & Finance - Gadjah Mada University (2013)
- Bachelor's Degree in Industrial Engineering - University of Indonesia (2003)

Professional Experience

- Head of Corporate Secretary Division of PT Kliring Berjangka Indonesia (2025 - Present)
- Head of Internal Audit Unit and Compliance of PT Kliring Berjangka Indonesia (2023 - 2025)
- Head of Secretariat of the Supervisory Board of Hajj Financial Management Agency (BPKH) (2019)
- Member of Audit Committee of PT Kliring Berjangka Indonesia (2017 - 2022)
- Member of Risk Monitoring Committee of Bank Muamalat (2020 - 2022)
- Member of Risk Management Committee at BPJS Kesehatan (2013 - 2017)
- Member of Audit Committee of PT Bio Farma (Persero) (2008 - 2013)

Training and/or Education in the Financial Year

- National Seminar & Inauguration of Internal Auditor Competency Certification
- Corporate Secretary for Sustainability Governance



Dedi Sopyan

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan
Head of Corporate Secretary

Warga Negara Indonesia

Indonesian

46 Tahun Years old

Tangerang, Banten

Periode Menjabat

05 Agustus 2025 – Saat ini

Dasar Hukum

SK Direksi Nomor 23/K-KBI/VIII/2025 tanggal 5 Agustus 2025

Riwayat Pendidikan

- S1 Akuntansi - Universitas Diponegoro (2016)

Pengalaman Kerja

- Plt. Kepala Divisi Audit - PT Kliring Berjangka Indonesia (2025 - Saat ini)
- Plt. Kepala Departemen Audit Eksternal - PT Kliring Berjangka Indonesia (2022 - 2025)
- Pro Specialist Divisi SPI dan Kepatuhan - PT Kliring Berjangka Indonesia (2021 - 2022)
- Pro Specialist Divisi Keuangan & Akuntansi - PT Kliring Berjangka Indonesia (2019 - 2021)
- Senior Collection Specialist - PT Gojek Indonesia (2018 - 2019)
- Account Payable Specialist - PT Frisian Flag Indonesia (2016 - 2018)

Pelatihan dan/atau Pendidikan pada Tahun Buku

- Seminar OPR: Internal Control for Risk Governance Excellence
- Thinklab: Design Thinking, Creativity & Innovation
- Seminar Nasional - Bincang SPI 2025, dengan mengusung tema utama "Menjaga Profesionalisme Direksi dalam Bingkai Governance, Risk & Compliance (GRC) dan Business Judgment Rule terhadap UU No. 1 Tahun 2025
- Certified Practitioner of Internal Audit (CPIA)
- Certified Enterprise Compliance Auditor (CECA)

Term of Office

August 5, 2025 – Present

Legal Basis of Appointment

Decree of the Board of Directors No. 23/K-KBI/VIII/2025 dated August 5, 2025

Educational Background

- Bachelor's Degree in Accounting - Universitas Diponegoro (2016)

Professional Experience

- Acting Head of Audit Division, of PT Kliring Berjangka Indonesia (2025 - Present)
- Acting Head of External Audit Department, of PT Kliring Berjangka Indonesia (2022 - 2025)
- Professional Specialist of IAU and Compliance Division, of PT Kliring Berjangka Indonesia (2021 - 2022)
- Professional Specialist of Finance & Accounting Division, of PT Kliring Berjangka Indonesia (2019 - 2021)
- Senior Collection Specialist, of PT Gojek Indonesia (2018 - 2019)
- Accounts Payable Specialist, of PT Frisian Flag Indonesia (2016 - 2018)

Training and/or Education in the Financial Year

- Seminar OPR: Internal Control for Risk Governance Excellence
- Thinklab: Design Thinking, Creativity & Innovation
- National Seminar - IAU Talk 2025, with the main theme: 'Maintaining Board Professionalism within the Framework of Governance, Risk & Compliance (GRC) and the Business Judgment Rule under Law No. 1 of 2025
- Certified Practitioner of Internal Audit (CPIA)
- Certified Enterprise Compliance Auditor (CECA)



Sheila Aviolanda

Plt. Kepala Divisi Audit

Acting Head of Audit Division

Warga Negara Indonesia

Indonesian

32 Tahun Years old

Bekasi Barat



PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF Profile of Executive Officers



Arsita Fajrin Khoirunisa

Plt. Kepala Divisi Manajemen Risiko

Acting Head of Risk Management Division

Warga Negara Indonesia
Indonesian

34 Tahun Years old
Jakarta

Periode Menjabat

28 April 2025 - Saat ini

Dasar Hukum

SK Direksi No. 12/K-KBI/IV/2025
tanggal 28 April 2025

Riwayat Pendidikan

- S2 Administrasi Bisnis - Institut Teknologi Bandung (2019)
- S1 Statistika - Universitas Gadjah Mada (2012)

Pengalaman Kerja

- Plt. Kepala Divisi Manajemen Risiko - PT Kliring Berjangka Indonesia (2025 - Saat ini)
- Anggota Komite Manajemen Risiko, Investasi, dan Pelayanan - BPJS Ketenagakerjaan (2023 - 2025)
- Analis Penyelenggaraan dan Evaluasi Diklat - Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM (2022 - 2023)
- Manajer Risiko Bisnis - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) RI (2018 - 2021)
- Ass. Manajer Commercial Banking - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d.h PT Bank BRI Syariah Tbk) (2013 - 2018)
- Sharia Officer Development Program (SODP) - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d.h PT Bank BRI Syariah Tbk) (2012 - 2013)

Pelatihan dan/atau Pendidikan pada Tahun Buku

- Risk Maturity Management Assessment for BUMN
- Business Continuity Management Certified Professional (BCMCP)
- Refreshment & Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5
- Environmental, Social & Governance (ESG) Report

Term of Office

April 28, 2025 - Present

Legal Basis of Appointment

Decree of the Board of Directors No. 12/K-KBI/IV/2025 dated April 28, 2025

Educational Background

- Master of Business Administration, Institut Teknologi Bandung (2019)
- Bachelor of Statistics, Universitas Gadjah Mada (2012)

Professional Experience

- Acting Head of Risk Management Division of PT Kliring Berjangka Indonesia (2025 - Present)
- Member of BPJS Ketenagakerjaan Committee of Risk Management, Investment, and Services (2023 - 2025)
- Analyst for Education and Training Implementation and Evaluation of Ministry of Investment and Downstreaming / BKPM (2022 - 2023)
- Business Risk Manager of Haji Financial Management Agency of the Republic of Indonesia (BPKH) (2018 - 2021)
- Assistant Manager of Commercial Banking of PT Bank Syariah Indonesia Tbk (formerly PT Bank BRI Syariah Tbk) (2013 - 2018)
- Sharia Officer Development Program (SODP) of PT Bank Syariah Indonesia Tbk (formerly PT Bank BRI Syariah Tbk) (2012 - 2013)

Training and/or Education in the Financial Year

- Risk Maturity Management Assessment for SOEs
- Business Continuity Management Certified Professional (BCMCP)
- Refreshment & Recertification on Risk Management Level 5
- Environmental, Social & Governance (ESG) Report



Anton Pranowo Medianto

Kepala Divisi SDM, Pengadaan & Umum-

Head of HR, Procurement & General Affairs Division

Warga Negara Indonesia
Indonesian

57 Tahun Years old
Jakarta

Periode Menjabat

8 Agustus 2025 - Saat ini

Dasar Hukum

06/Per-K-KBI/VIII/2025

Riwayat Pendidikan

- S2 Management System (Strategic HR) - The University of Waikato, NZ (2001)
- PG Diploma Organizational Development - The University of Waikato, NZ (1999)
- S1 Teknologi Pendidikan - Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jakarta, Jakarta (1995)
- D2 Aircraft Technician - Pendidikan & Pelatihan Penerbangan Curug, Tangerang (1989)

Pengalaman Kerja

- Kepala Divisi SDM, Pengadaan & Umum - PT Kliring Berjangka Indonesia (2025 - Saat ini)
- VP Procurement & General Affair - PT Angkasa Pura Support (2021 - 2025)
- VP Human Capital Management - PT Angkasa Pura Support (2015 - 2020)
- GM HRGA - PT Indonesian Air Transport (2013 - 2015)
- Division Head People - PT Air Asia Indonesia (2010 - 2013)
- VP Human Capital Division - PT Citilink Indonesia (2008 - 2010)
- GM Human Resource Management - PT Garuda Indonesia (2001 - 2006)
- Training Manager - PT Garuda Indonesia (1989 - 1998)

Pelatihan dan/atau Pendidikan pada Tahun Buku

-

Term of Office

August 8, 2025 - Present

Legal Basis of Appointment

06/Per-K-KBI/VIII/2025

Educational Background

- Master's Degree in Management Systems (Strategic HR), University of Waikato, New Zealand (2001)
- Postgraduate Diploma in Organizational Development, University of Waikato, New Zealand (1999)
- Bachelor's Degree in Educational Technology, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jakarta (1995)
- Diploma in Aircraft Technology, Curug Aviation Training & Education, Tangerang (1989)

Professional Experience

- Head of Human Resources, Procurement & General Affairs Division of PT Kliring Berjangka Indonesia (2025 - Present)
- Vice President of Procurement & General Affairs of PT Angkasa Pura Support (2021 - 2025)
- Vice President of Human Capital Management of PT Angkasa Pura Support (2015 - 2020)
- General Manager of HR & General Affairs of PT Indonesian Air Transport (2013 - 2015)
- Division Head of People of PT Air Asia Indonesia (2010 - 2013)
- Vice President of Human Capital Division of PT Citilink Indonesia (2008 - 2010)
- General Manager of Human Resource Management of PT Garuda Indonesia (2001 - 2006)
- Training Manager of PT Garuda Indonesia (1989 - 1998)

Training and/or Education in the Financial Year

-

Periode Menjabat

18 September 2023 – Saat ini

Dasar Hukum

SK Direksi No. 37/K-KBI/SDM/IX/2025 tanggal 15 September 2025

Riwayat Pendidikan

- S1 Teknik Telekomunikasi - Telkom University (2001)

Pengalaman Kerja

- Plt. Kepala Divisi Teknologi Informasi - PT Kliring Berjangka Indonesia (2023 - Saat ini)
- *Technical Director* - Hakuodo Digital Indonesia (2017 - 2023)
- *Senior Project Manager* (Group Head) - Ecomindo (2013 - 2027)
- *Technical Project Manager* - PT Bank Danamon Tbk (2012 - 2013)
- *Senior Engineer* - PT Bank Danamon Tbk (2010 - 2012)
- *Engineer* - PT Bank Danamon Tbk (2008 - 2010)
- *Support Engineer* - PT Indosat Tbk (2003 - 2008)

Pelatihan dan/atau Pendidikan pada Tahun Buku
Pelatihan IT Disaster Recovery Plan (IT DRP)

Term of Office

September 18, 2023 - Present

Legal Basis of Appointment

Decree of the Board of Directors No. 37/K-KBI/SDM/IX/2025 dated September 15, 2025

Educational Background

- Bachelor's Degree in Telecommunication Engineering – Telkom University (2001)

Professional Experience

- Acting Head of Information & Technology Division of PT Kliring Berjangka Indonesia (2023 - Present)
- Technical Director of Hakuodo Digital Indonesia (2017 - 2023)
- Senior Project Manager (Group Head) of Ecomindo (2013 - 2027)
- Technical Project Manager of PT Bank Danamon Tbk (2012 - 2013)
- Senior Engineer of PT Bank Danamon Tbk (2010 - 2012)
- Engineer of PT Bank Danamon Tbk (2008 - 2010)
- Support Engineer of PT Indosat Tbk (2003 - 2008)

Training and/or Education in the Financial Year
Training on IT Disaster Recovery Plan (IT DRP)



Oki Marsetiawan

Plt. Kepala Divisi Teknologi Informasi
Acting Head of Information & Technology Division

Warga Negara Indonesia

Indonesian

48 Tahun Years old
Jakarta

Periode Menjabat

5 Agustus 2025 – Saat ini

Dasar Hukum

- Plt. Kepala Divisi Operasional dan Pengembangan Bisnis PFK: SK Direksi Nomor 20/K-KBI/SDM/VIII/2025 tanggal 05 Agustus 2025
- Plt. Kepala Divisi Operasional dan Pengembangan Bisnis PBK dan Aset Digital: SK Direksi Nomor 22/K-KBI/SDM/VIII/2025 tanggal 05 Agustus 2025

Riwayat Pendidikan

- S2 Manajemen - Sekolah Tinggi PPM Manajemen (2024)
- S1 Manajemen Informatika - Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Bina Mulya (2002)

Pengalaman Kerja

- Plt. Kepala Divisi Teknologi Informasi - PT Kliring Berjangka Indonesia (2023 – Saat ini)
- Plt. Kepala Divisi Operasional dan Pengembangan Bisnis PBK dan Aset Digital - PT Kliring Berjangka Indonesia (2025 – Saat ini)
- Plt. Kepala Divisi Operasional - PT Kliring Berjangka Indonesia (2023 - 2025)
- Kepala Sub Divisi Pengelolaan Risiko - PT Kliring Berjangka Indonesia (2021 - 2023)
- Kepala Sub Divisi SDM - PT Kliring Berjangka Indonesia (2020 - 2020)
- Kepala Sub Divisi Satuan Pengawas Internal dan Kepatuhan - PT Kliring Berjangka Indonesia (2019 - 2021)
- Kepala Sub Divisi Operasional - PT Kliring Berjangka Indonesia (2018 - 2019)

Pelatihan dan/atau Pendidikan pada Tahun Buku
Spectra Specialist Training

Term of Office

August 5, 2025 – Present

Legal Basis of Appointment

- Acting Head of Operations and PFK Business Development: Decree of the Board of Directors No. 20/K-KBI/SDM/VIII/2025, dated August 5, 2025
- Acting Head of Operations and PBK Business Development Division and Digital Assets: Decree of the Board of Directors No. 22/K-KBI/SDM/VIII/2025, dated August 5, 2025

Educational Background

- Master's Degree in Management - Sekolah Tinggi PPM Manajemen (2024)
- Bachelor's Degree in Informatics Management - Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Bina Mulya (2002)

Professional Experience

- Acting Head of Information & Technology Division of PT Kliring Berjangka Indonesia (2023 - Present)
- Acting Head of Operations Business Development Division (Commodities Futures Trading & Digital Assets) of PT Kliring Berjangka Indonesia (2025 - Present)
- Acting Head of Operations of PT Kliring Berjangka Indonesia (2023 - 2025)
- Head of Risk Management Sub-Division of PT Kliring Berjangka Indonesia (2021 - 2023)
- Head of Human Resources Sub-Division of PT Kliring Berjangka Indonesia (2020 - 2020)
- Head of Internal Audit and Compliance Sub-Division of PT Kliring Berjangka Indonesia (2019 - 2021)
- Head of Operations Sub-Division of PT Kliring Berjangka Indonesia (2018 - 2019)

Training and/or Education in the Financial Year
Spectra Specialist Training



Juventus Deka Aditama

Plt. Kepala Divisi Operasional dan Pengembangan Bisnis PFK
Plt. Kepala Divisi Operasional dan Pengembangan Bisnis PBK dan Aset Digital

Acting Head of Operations PFK
(Physical Market Commodity)
Business Development
Acting Head of Operations and PBK
(Commodity Futures Trading) Business
Development & Digital Assets

Warga Negara Indonesia

Indonesian

46 Tahun Years old
Jakarta

**PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF** Profile of Executive Officers**Gatot Eko Nugrahanto****Plt. Kepala Divisi Operasional
& Pengembangan Bisnis SRG**Acting Head of Operations and Business
Development (Warehouse Receipt System)**Warga Negara Indonesia**
Indonesian**42 Tahun** Years old
Jakarta**Periode Menjabat**

5 Agustus 2025 – Saat ini

Dasar Hukum

SK Direksi KBI No. 021/K-KBI/SDM/VIII/2025

Riwayat PendidikanS1 Sistem Informasi -
Universitas Budi Luhur (2010)**Pengalaman Kerja**

- Plt. Kepala Divisi Operasional dan Pengembangan Bisnis SRG - PT Kliring Berjangka Indonesia (2025 - Saat ini)
- Plt. Kepala Divisi Pengembangan Bisnis - PT Kliring Berjangka Indonesia (2023 - 2025)
- Specialist Business Development & Change Management - PT Danareksa (Persero) (2016 - 2019)
- Director - PT Garuda Nusantara Capital (2011 - 2016)
- Supervisor - PT Bank Danamon Indonesia (2006 - 2011)
- Customer Assistant Representative - PT Aplikasi Lintasarta (2002 - 2006)

Pelatihan dan/atau Pendidikan pada Tahun Buku

Certified Risk Management Professional (CRMP)

Term of Office

August 5, 2025 – Present

Legal Basis of Appointment

Decree of the Board of Directors of KBI No. 021/K-KBI/SDM/VIII/2025

Educational BackgroundBachelor's Degree in Information Systems -
Universitas Budi Luhur (2010)**Professional Experience**

- Acting Head of Operations and Business Development (Warehouse Receipt System), PT Kliring Berjangka Indonesia (2025 – Present)
- Acting Head of Business Development Division of PT Kliring Berjangka Indonesia (2023 – 2025)
- Business Development & Change Management Specialist of PT Danareksa (Persero) (2016 – 2019)
- Director of PT Garuda Nusantara Capital (2011 – 2016)
- Supervisor at PT Bank Danamon Indonesia (2006 – 2011)
- Customer Assistant Representative of PT Aplikasi Lintasarta (2002 – 2006)

Training and/or Education in the Financial Year

Certified Risk Management Professional (CRMP)

**PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS
DAN DIREKSI****Change in the Composition of the Board of Commissioners
and the Board of Directors**

Hingga akhir tahun 2025, Perusahaan tidak mengalami perubahan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Hernawan Bekt Sasongko
- Komisaris Independen : Fajar Massadiyah Egy
- Komisaris Independen : Irman Sahroni Ahmad

Direksi

- Direktur Utama : Budi Susanto
- Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Adiyasa Suhadibroto
- Direktur Pengembangan Bisnis dan Operasional : Saidu Solihin

As of the end of 2025, the Company had not undergone changes in the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors, resulting in the following structure:

Board of Commissioners

- President Commissioner : Hernawan Bekt Sasongko
- Independent Commissioner : Fajar Massadiyah Egy
- Independent Commissioner : Irman Sahroni Ahmad

Board of Directors

- President Director : Budi Susanto
- Director of Finance and Risk Management : Adiyasa Suhadibroto
- Director of Business Development and Operations : Saidu Solihin

DAFTAR ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI, DAN VENTURA BERSAMA

Subsidiaries, Associates and Joint Ventures

Entitas Anak Subsidiaries

Nama Perusahaan Company Name	Bidang Usaha Line of Business	Komposisi Pemegang Saham Shareholding Composition	Jumlah Aset (Dalam Rupiah) Total Assets (In Rupiah)	Status Operasi Operational Status
PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia	Perdagangan dan Pengelolaan Gudang Komoditas Commodity Trading and Warehouse Management	- PT Kliring Berjangka Indonesia 98,08% - BRI Danareksa 1,92%	Rp238 miliar IDR238 billion	Beroperasi Operating

INFORMASI ANAK PERUSAHAAN

Information on Subsidiaries

PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia

Bidang Usaha

PT Kliring Berjangka Indonesia memiliki entitas Perusahaan yang bernama "PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia". Perusahaan ini melaksanakan bidang usahanya berdasarkan Anggaran Dasar perusahaan No. 24 tanggal 15 September 2025, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak.
Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (*makelar*) pelelangan, dan perdagangan besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri maupun luar negeri atas nama pihak lain;
2. Pergudangan dan Penyimpanan.
Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil;
3. Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang.
Kelompok ini mencakup usaha kegiatan pengelolaan gudang yang menyediakan Gudang Sistem Resi Gudang (G-SRG) meliputi penyimpanan, pemeliharaan dan penerbitan resi gudang atas barang yang disimpan di gudang sistem resi gudang oleh pemilik/ pihak lain;

Line of Business

PT Kliring Berjangka Indonesia owns a subsidiary named "PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia". The Company conducts its business activities based on the Articles of Association No. 24 dated September 15, 2025, which can be outlined as follows:

1. Wholesale Trade on a Fee or Contract Basis.

This category includes agencies that earn commissions, brokers, auction intermediaries, and other wholesale businesses that trade goods domestically or internationally on behalf of third parties;
2. Warehousing and Storage.
This category covers businesses engaged in temporarily storing goods before delivery to their final destination for commercial purposes;
3. Warehouse Receipt System (SRG) Management.
This includes businesses that operate warehouses providing the Warehouse Receipt System (SRG), including storage, maintenance, and issuance of warehouse receipts for goods stored by owners or third parties;



4. Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya YTDL, bukan Asuransi dan Dana Pensiun.

Kelompok ini mencakup kegiatan jasa keuangan lainnya selain fasilitas pembiayaan, penjaminan, dan/ atau asuransi dalam ekspor nasional, kegiatan usaha pembiayaan sekunder perumahan yang ditugaskan oleh pemerintah;

5. Pengelola Tempat Penyimpanan Fisik Komoditas.

Kelompok ini mencakup kegiatan pengelolaan tempat penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan dan/ atau penyerahan komoditas yang telah ditetapkan sebagai komoditas yang dapat ditransaksikan melalui pasar fisik di bursa berjangka;

6. Aktivitas Penunjang Perdagangan Berjangka Komoditi Lainnya.

Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penunjang dan/ atau kegiatan untuk memperoleh manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dari industri perdagangan berjangka komoditi dan/ atau perdagangan fisik komoditas yang tidak diklasifikasikan di tempat lain;

7. Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka.

Kelompok ini mencakup kegiatan badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/ atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan berjangka;

8. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economist pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur;

9. Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya.

Kelompok ini mencakup kegiatan penyedia jasa penunjang usaha lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa laporan pengadilan dan catatan stenotype dan jasa stenografi untuk umum, jasa siaran langsung televisi untuk acara rapat dan konferensi, jasa pengalamatan *barcode*, jasa pencetakan *barcode*, jasa organisasi pengumpulan dana atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa sortir surat, jasa penyimpanan, jasa pungutan parkir yang menggunakan *meter coin*,

4. Other Financial Services Activities Excluding Insurance and Pensions (YTDL).

This category covers financial services activities other than financing, guarantees, and/or insurance in national export activities, as well as secondary housing financing assigned by the government;

5. Physical Commodity Storage Management.

This includes activities related to managing storage facilities, maintaining, supervising, and/or transferring commodities designated as tradable through the physical market commodity in the futures exchange;

6. Other Supporting Activities for Commodity Futures Trading.

This category covers supporting activities and/or activities that directly or indirectly benefit the commodity futures trading industry and/or physical commodity trading not classified elsewhere;

7. Clearing and Guarantee Institutions for Futures.

This includes business entities that provide systems and/ or facilities for clearing and guaranteeing settlement of futures trading transactions;

8. Other Management Consulting Activities.

This includes advisory services, guidance, and operational support for organizational and management matters, such as strategic and organizational planning; financial decisions; marketing objectives and policies; human resources planning, practices, and policies; production scheduling and control. Services may include advice, guidance, and operational support across management functions, agronomy and agricultural economics consulting, design of accounting methods and procedures, cost accounting programs, budget control procedures, and advice for business and public service operations in planning, organizing, efficiency, and supervision, including management information services and infrastructure investment studies;

9. Other Supporting Business Services.

This includes other supporting services not classified elsewhere, such as court reporting and stenography services, live broadcast services for meetings and conferences, barcode addressing and printing, fundraising organization services on a fee or contract basis, mail sorting services, storage, coin-operated parking collection, independent auctions, loyalty

kegiatan pelelangan independen, administrasi program loyalitas, dan kegiatan penunjang lain yang disediakan untuk usaha yang tidak diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk kegiatan pusat registrasi sistem resi gudang;

10. Menjalankan usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penyimpanan, Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Kliring Penyimpanan, Penjaminan dan Penyelesaian;
11. Menjalankan usaha lain yang berkaitan dengan pengembangan jasa kliring dan/atau penjaminan transaksi Perdagangan Berjangka, Pasar Fisik Komoditas, dan Sistem Resi Gudang serta melaksanakan usaha penjaminan untuk usaha dan perdagangan komoditas termasuk faktor pendukungnya;
12. Melaksanakan layanan jasa untuk mendukung usaha penjaminan dan perdagangan serta layanan pada umumnya; dan
13. Melaksanakan kegiatan penjaminan untuk usaha perdagangan komoditas dan kebutuhan pokok lainnya namun tidak terbatas termasuk faktor pendukungnya serta melaksanakan layanan jasa lainnya secara luas untuk mendukung usaha penjaminan dan perdagangan serta layanan pada umumnya.

Status Operasi

Tahun 2013:

Telah didirikan Perusahaan Anak dengan nama PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia (PT KPBI) sesuai dengan Akta Notaris N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H, MKn di Jakarta No. 43 tanggal 16 Juli 2013 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-40266.AH.01.01. tahun 2013.

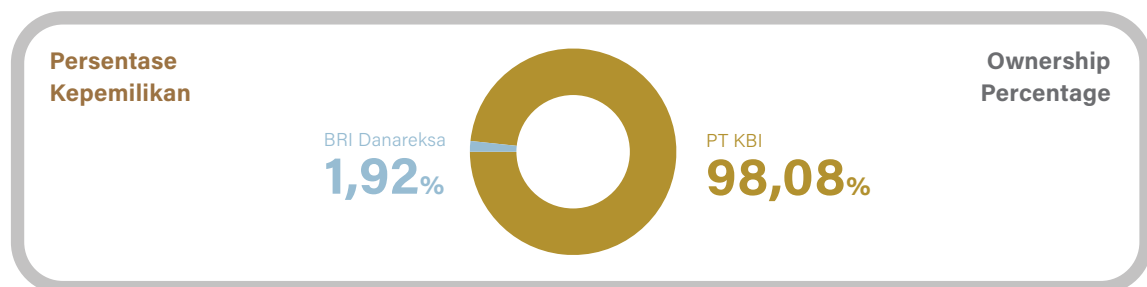
program administration, and other supporting activities for businesses not classified elsewhere. This also includes warehouse receipt system registration center activities;

10. Operating as Clearing and Storage Institutions, Clearing and Guarantee Institutions, and Clearing, Storage, Guarantee, and Settlement Institutions;
11. Engaging in other activities related to the development of clearing and/or guarantee services for Futures Trading, Physical Market Commodity, and Warehouse Receipt Systems, including guarantee services for commodity businesses and trade, as well as supporting factors;
12. Providing services to support guarantee and trading activities, as well as general business services; and
13. Conducting guarantee activities for commodity trading and other essential goods, including supporting factors, and providing broad service activities to support guarantee and trading businesses as well as general business services.

Operational Status

2013:

The subsidiary, PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia (PT KPBI), was established based on Notarial Deed No. 43 dated July 16, 2013 before Notary N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn in Jakarta, and approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under Decree No. AHU-40266.AH.01.01.2013.



11 Desember 2013:

Telah dilakukan penyeteroran modal ke Perusahaan Anak sebesar Rp51.000.000.000 dari Perusahaan Induk (PT KBI) dan sebesar Rp1.000.000.000 dari PT Danareksa Sekuritas, sehingga total modal setor PT KPBI sebesar Rp52.000.000.000.

December 11, 2013:

Capital injection was made to the subsidiary amounting to IDR51,000,000,000 from the parent company (PT KBI) and IDR1,000,000,000 from PT Danareksa Sekuritas, bringing the total paid-up capital of PT KPBI to IDR52,000,000,000.

**27 Desember 2018:**

Telah dilakukan Pengesahan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar beserta Perubahan Direksi dan Komisaris PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia (PT KPBI) di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Notaris No. 66 yang dibuat oleh Masjuki, S.H., sebagai Pengganti dari Notaris Mochamad Nova Faisal, SH., M.Kn di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0032885.AH.01.02.Tahun 2018.

9 April 2019:

Telah dilakukan Pengesahan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia (PT KPBI) di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Notaris No. 04 yang dibuat oleh Notaris Mochamad Nova Faisal, S.H., M.KN di Jakarta Selatan dan telah disahkan dan disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0019456.AH.01.02.TAHUN 2019.

15 September 2025:

Telah dilakukan Pengesahan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia (PT KPBI) di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Notaris No. 24 yang dibuat oleh Notaris Hadijah, SH. di Jakarta Pusat dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0062499.AH.01.02.Tahun 2025.

Manajemen Perusahaan

Komisaris Utama : Agung Rihayanto
 Komisaris Independen : Frono Djiwo
 Komisaris : Angga Arie Saputra
 Direktur Utama : Fajar Hari Utomo
 Direktur : Yose Skundarisa

Total Aset

Hingga 31 Desember 2025, total aset PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia adalah sebesar Rp238 miliar.

December 27, 2018:

Approval was granted for amendments to the Articles of Association and changes to the Board of Directors and Board of Commissioners of PT KPBI, based on Notarial Deed No. 66 made by Masjuki, S.H., substitute for Notary Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn in South Jakarta, and approved by the Ministry of Law and Human Rights under Decree No. AHU-0032885.AH.01.02.2018.

April 9, 2019:

Approval was granted for the Statement of Circular Resolutions of Shareholders of PT KPBI based on Notarial Deed No. 04 made by Notary Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn in South Jakarta, and approved by the Minister of Law and Human Rights under Decree No. AHU-0019456.AH.01.02.2019.

September 15, 2025:

The amendment to the Articles of Association of PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia (PT KPBI) was officially approved in Central Jakarta, based on Notarial Deed No. 24 by Notary Hadijah, SH in Central Jakarta, and ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under Decree No. AHU-0062499.AH.01.02.Year 2025.

Company Management

President Commissioner : Agung Rihayanto
 Independent Commissioner : Frono Djiwo
 Commissioner : Angga Arie Saputra
 President Director : Fajar Hari Utomo
 Director : Yose Skundarisa

Total Assets

As of December 31, 2025, the total assets of PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia amounted to IDR238 billion.

ALAMAT KANTOR OPERASIONAL & JARINGAN USAHA

Office Address and Business Network

Nama Entitas Anak Subsidiary Name	PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia
Alamat Address	Menara Danareksa Lt. 6 Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta 10110
Telepon Telephone	+62 21-35280000
Faksimili Fax	+62 21-35282000
Surel Email	kpbi@ptkbi.com

KRONOLOGI PENCATATAN SAHAM

Chronology of Share Listing

Hingga akhir tahun 2025, Perusahaan tidak mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, karena PT KBI merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan klasifikasi saham sebagai berikut:

- Saham Seri A (Dwi Warna) sebanyak 1 lembar saham dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.
- Saham Seri B (dapat dimiliki masyarakat dan/atau Negara) sebanyak 499.999 lembar saham yang dimiliki oleh PT Danareksa (Persero) sebagai holding.

Oleh karena itu, informasi mengenai kronologi pencatatan saham tidak disajikan dalam buku laporan tahunan 2025.

As of the end of 2025, the Company has not listed its shares on the Indonesia Stock Exchange, as PT KBI is a State-Owned Enterprise (SOE) with the following share classification:

- Series A Shares (Dwiwarna): 1 share owned by the Government of the Republic of Indonesia.
- Series B Shares (may be owned by the public and/or the State): 499,999 shares owned by PT Danareksa (Persero) as the holding company.

Therefore, information regarding the chronology of share listing is not presented in the 2025 annual report.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Shareholding Composition

Struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perusahaan hingga tahun 2025 mencerminkan statusnya sebagai entitas anggota Holding PT Danareksa (Persero). Perubahan klasifikasi saham ini merujuk pada landasan hukum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan (Persero) PT Danareksa, serta Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor S-791/MBU/09/2020 tanggal 30 September 2020 mengenai Perubahan Jenis Saham dan Perubahan Anggaran Dasar.

Berdasarkan regulasi tersebut, konfigurasi kepemilikan saham PT KBI saat ini adalah sebagai berikut:

- Saham Seri A (Dwi Warna): Berjumlah 1 (satu) lembar saham yang hak kepemilikannya dipegang penuh oleh Negara Republik Indonesia.
- Saham Seri B: Berjumlah 499.999 lembar saham yang dikuasai oleh PT Danareksa (Persero) selaku induk usaha (holding), di mana klasifikasi saham ini dapat dimiliki oleh Negara maupun masyarakat.

Legitimasi hukum atas perubahan tersebut telah dituangkan dalam Akta Notaris Hadijah, S.H., Nomor 33 tertanggal 18 Juli 2022. Akta ini pun telah memperoleh pengesahan resmi dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0050029.AH.01.02.TAHUN 2022.

The Company's capital structure and shareholder composition up to 2025 reflect its status as a member of PT Danareksa (Persero) Holding. This change in share classification refers to the legal basis stipulated in Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 7 of 2022 concerning Additional State Capital Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of PT Danareksa (Persero), as well as the Decree of the Minister of SOEs No. S-791/MBU/09/2020 dated September 30, 2020 regarding Amendments to Share Types and Amendments to the Articles of Association.

Based on these regulations, the current share ownership structure of PT KBI is as follows:

- Series A (Dwi Warna) Share: Consisting of 1 (one) share, wholly owned by the Government of the Republic of Indonesia.
- Series B Shares: Consisting of 499,999 shares, held by PT Danareksa (Persero) as the parent company (holding), which may be owned either by the State or the public.

The legal legitimacy of these changes has been stipulated in Notarial Deed of Hadijah, S.H., No. 33 dated July 18, 2022. The deed has been officially approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0050029.AH.01.02.TAHUN 2022.

Informasi Pemegang Saham Utama/Pengendali
Information on Majority/Controlling Shareholders

Nama Pemegang Saham Shareholders	Kepemilikan Saham Ownership
PT Danareksa (Persero)	499.999 lembar shares
Negara Republik Indonesia	1 lembar share

Jumlah Pemegang Saham Berdasarkan Status Kepemilikan
Number of Shareholders by Ownership Status

Nama Name	2025				2024			
	Jumlah Investor Number of Investors	Jumlah Saham (Lembar Saham) Number of Shares	Jumlah Nominal Nominal	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)	Jumlah Investor Number of Investors	Jumlah Saham (Lembar Saham) Number of Shares	Jumlah Nominal Total Nominal	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
Pemodal Nasional National Investors								
Individual	0	0	-	0	0	0	-	0
Institusi Institution	2	500.000	500.000.000.000	100	2	500.000	500.000.000.000	100
Subtotal	2	500.000	500.000.000.000	100	2	500.000	500.000.000.000	100
Pemodal Asing Foreign Investors								
Individual	0	0	0	0	0	0	0	0
Institusi Institution	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi baik secara Langsung maupun tidak langsung
Direct and Indirect Share Ownership by the Board of Commissioners and the Board of Directors

Sampai akhir tahun 2025, Perusahaan tidak melakukan pencatatan saham di bursa efek mana pun. Oleh karena itu, seluruh jajaran anggota Dewan Komisaris maupun Direksi tercatat tidak memiliki porsi saham di PT Kliring Berjangka Indonesia.

As of the end of 2025, the Company did not list its shares on any stock exchange. Accordingly, all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors are recorded as holding no shares in PT Kliring Berjangka Indonesia.

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Saham Share Ownership
Hernawan B. Sasongko	Komisaris Utama President Commissioner	Nihil None
Fajar Massadiah Egy	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil None
Irman Sahroni Ahmad	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil None

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Saham Share Ownership
Budi Susanto	Direktur Utama President Director	Nihil None
Adiyasa Suhadibroto	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	Nihil None
Saidu Solihin	Direktur Pengembangan Bisnis dan Operasional Director of Business Development and Operations	Nihil None

Kronologis Efek Lainnya

Chronology of Other Securities

Sampai akhir tahun 2025, Perusahaan tidak menunjukkan adanya aktivitas penerbitan efek yang diperdagangkan, baik berupa surat utang maupun instrumen lainnya. Mengacu pada kondisi tersebut, seluruh komponen informasi yang lazim menyertai penerbitan efek, seperti tingkat bunga/ imbalan, nilai penawaran, tanggal jatuh tempo, tahun penerbitan, hingga peringkat dan nama bursa pencatatan, dinyatakan nihil atau tidak relevan untuk disajikan.

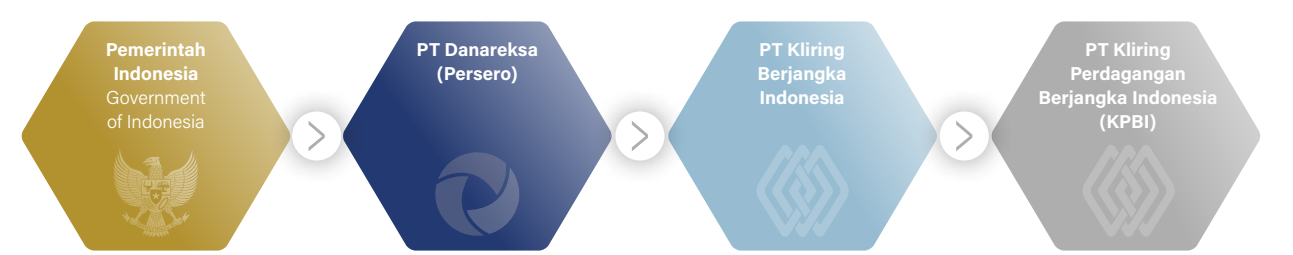
Until the end of 2025, the Company did not record any issuance of tradable securities, whether in the form of debt instruments or other financial instruments. In view of this condition, all information components that typically accompany a securities issuance, such as interest/coupon rate, offering value, maturity date, year of issuance, as well as rating and listing exchange, are deemed nil or not relevant for presentation.

STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN

Group Structure

Struktur Grup Perusahaan terdiri atas beberapa entitas yang saling terintegrasi dalam mendukung fungsi dan mandat Perusahaan. Adapun rincian Struktur grup Perusahaan dapat diuraikan melalui info grafis berikut:

The Company's Group Structure consists of several entities that are integrated with one another in supporting the Company's functions and mandate. The details of the Group Structure can be illustrated through the following infographic:



LEMBAGA PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Capital Market Supporting Professional Institutions

Informasi mengenai lembaga profesi penunjang beserta bentuk jasa pada Perusahaan dapat diuraikan melalui tabel berikut:

Information regarding the capital market supporting professional institutions and the types of services provided to the Company is presented in the following table:

Nama Name	Alamat Address	Jenis dan Bentuk Jasa Type and Service	Biaya Fee	Periode Penugasan Appointment Period
Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf (RSM Indonesia) Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf (RSM Indonesia)	Plaza Asia, Level 10, Jl. Jenderal Sudirman No.59, RT.5/RW.3, Senayan, Jakarta Selatan, Jakarta 12190	Jasa Audit Laporan keuangan dan lainnya Audit of Financial Statements and Others	Rp515.000.000	2025
Notaris Hadijah Notary Hadijah	Wisma Aria Lantai 1, Jl. HOS. Cokroaminoto No.81, Menteng, Kota Jakarta Pusat	Jasa pembuatan Akta Notaris Preparing Notarial Deeds	Rp15.000.000	2025



Nama Name	Alamat Address	Jenis dan Bentuk Jasa Type and Service	Biaya Fee	Periode Penugasan Appointment Period
KAP Amir Abadi Jusuf Mawar, Aryanto, Mawar & Rekan Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf Mawar, Aryanto, Mawar & Partner	Plaza Asia Level 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta 12190 Telp: (021) 5140 1340 www.rsm.id	Melakukan audit secara independen atas Laporan Keuangan Tahunan (LKT) PT Kliring Berjangka Indonesia untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023, meliputi laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Jasa non audit: Tidak ada jasa non audit yang diberikan. Conducting an independent audit of the Annual Financial Statements of PT Kliring Berjangka Indonesia for the years ended December 31, 2024 and 2023, covering the statements of comprehensive income, changes in equity, and cash flows. Non-audit services: No non-audit services were provided.	Rp483.000.000	2024
Notaris Hadijah Notary Hadijah	Wisma Aria Lantai 1, Jl. HOS. Cokroaminoto No.81, Menteng, Kota Jakarta Pusat	Pembuatan Akta RUPS, Akta Perubahan. Preparing GMS Deeds and Amendment Deeds.	Rp37.500.000	2024
KAP Amir Abadi Jusuf Mawar, Aryanto, Mawar & Rekan Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf Mawar, Aryanto, Mawar & Partner	Plaza Asia Level 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta 12190 Telp: (021) 5140 1340 www.rsm.id	Melakukan audit secara independen atas Laporan Keuangan Tahunan (LKT) PT Kliring Berjangka Indonesia untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022, meliputi laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Jasa non audit: Tidak ada jasa non audit yang diberikan. Conducting an independent audit of the Annual Financial Statements of PT Kliring Berjangka Indonesia for the years ended December 31, 2023 and 2022, covering the statements of comprehensive income, changes in equity, and cash flows. Non-audit services: No non-audit services were provided.	Rp415.000.000	2023
Notaris Hadijah Notary Hadijah	Wisma Aria Lantai 1, Jl. HOS. Cokroaminoto No.81, Menteng, Kota Jakarta Pusat	Jasa pembuatan Akta Notaris. Preparing Notarial Deeds.	Rp19.000.000	2023

INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN

Information on Company Website

Kepatuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.4/2015 tanggal 25 Juni 2015 menjadi landasan utama Perusahaan dalam mengelola saluran komunikasi publik. Melalui *website* resmi yang dikelola secara profesional, Perusahaan menyediakan akses informasi yang komprehensif dan transparan bagi masyarakat umum serta pemangku kepentingan (*stakeholders*). Substansi materi yang disajikan dalam laman tersebut telah memenuhi standar kewajiban keterbukaan informasi, yang meliputi:

- Informasi Umum Perusahaan Publik;
- Informasi bagi Pemodal atau Investor;
- Informasi Tata Kelola Perusahaan; dan
- Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat dapat memperoleh informasi tentang PT KBI, melalui situs web www.ptkbi.com, adapun informasi rincian mengenai isi situs web ialah sebagai berikut:

Compliance with the Financial Services Authority Regulation No. 8/POJK.04/2015 dated June 25, 2015 serves as the Company's primary foundation in managing its public communication channels. Through its professionally maintained official website, the Company provides comprehensive and transparent information to the general public and relevant stakeholders. The content presented on the website adheres to the standard requirements for information disclosure, which include:

- General Information on Public Company;
- Information for Investors;
- Corporate Governance Information; and
- Corporate Social Responsibility Information.

All stakeholders and members of the public may obtain information about PT KBI through the website www.ptkbi.com. The detailed information available on the website includes:

1. Tentang kami

Mencakup informasi mengenai Profil Perusahaan (sejarah, budaya korporasi, struktur organisasi, hingga filosofi logo) serta Profil Manajemen yang menjabarkan rekam jejak Dewan Komisaris, Direksi, hingga jajaran Kepala Divisi.

2. Bisnis Kami

Memuat informasi mengenai lini usaha Perdagangan Berjangka Komoditi, pengelolaan Sistem Resi Gudang, serta penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditas.

3. Tata Kelola

Laporan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan mekanisme tata kelola yang dijalankan oleh PT KBI dipublikasikan melalui menu.

4. Anggota & Mitra

Berisikan peta ekosistem bisnis Perusahaan yang mencakup data terkait perdagangan berjangka komoditi, anggota kliring, pusat registrasi resi gudang, kepesertaan emas digital, bank penyimpanan dana margin hingga daftar akuntan publik independen yang menjadi mitra.

5. Regulasi

Memuat informasi tentang aturan regulasi (berjangka komoditas, SRG, pasar fisik), laporan resmi Perusahaan, publikasi berita, perolehan penghargaan, kegiatan tanggung jawab sosial, dan galeri korporasi.

6. Keanggotaan & Kepesertaan

Merincikan informasi mengenai persyaratan dan mekanisme partisipasi bagi pihak yang ingin terlibat dalam perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, maupun Pasar Fisik Komoditas.

7. PPID (Profil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

Menampilkan informasi layanan publik serta prosedur alur pengajuan permohonan informasi.

1. About Us

This section contains information on the Company Profile (history, corporate culture, organizational structure, and logo philosophy), as well as Management Profiles outlining the backgrounds of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Division Heads.

2. Our Business

This menu provides information regarding the Company's business lines, including Commodity Futures Trading, the management of the Warehouse Receipt System, and the facilitation of the Physical Market Commodity.

3. Governance

Reports on the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles and governance mechanisms observed by PT KBI are published under this section.

4. Members & Partners

This section contains a map of the Company's business ecosystem, including data on commodity futures trading, clearing members, warehouse receipt registration centers, digital gold participation, margin fund custodian banks and the list of independent public accountants partnered with the Company.

5. Regulations

This page provides information on applicable regulatory frameworks (commodity futures, SRG, and physical markets), official company reports, news publications, awards received, corporate social responsibility activities, and corporate gallery.

6. Membership & Participation

This section details the requirements and procedures for parties seeking to participate in commodity futures trading, the warehouse receipt system, or the physical market commodity.

7. PPID (Profile of Information and Documentation Management Officer)

This section displays information on public services and the procedures for submitting information requests.

Uraian Description	Ketersediaan Availability	Keterangan Description
Informasi Pemegang Saham Shareholder Information	✓	Sudah terdapat pada situs web Perusahaan Available on the Company's website
Isi Kode Etik Code of Conduct Content	✓	
Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan Information on the General Meeting of Shareholders (GMS) shall include, at a minimum, the materials of the agenda items discussed in the GMS, a summary of the GMS minutes, and key dates, namely the announcement date of the GMS, the invitation date of the GMS, the date of the GMS, and the date the summary of GMS minutes is announced	✓	
Laporan Keuangan Tahunan (5 tahun terakhir) Annual Financial Statements (last 5 years)	✓	
Profil Dewan Komisaris dan Direksi Profile of the Board of Commissioners and the Board of Directors	✓	
Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal Charters of the Board of Commissioners, the Board of Directors, Committees, and the Internal Audit Unit	✓	

SUMBER DAYA MANUSIA

Human Resources

Data kepegawaian Perusahaan per tanggal hingga akhir tahun 2025 menunjukkan total tenaga kerja sebanyak 58 orang. Angka ini merefleksikan pertumbuhan sebesar 1,75% jika dibandingkan dengan posisi tahun 2024 yang berjumlah 57 orang. Selisih kenaikan sebanyak 1 orang tersebut dikarenakan adanya penambahan pegawai.

The Company's employee data as of the end of 2025 shows a total workforce of 58 employees. This figure reflects a 1.75% increase compared to the 2024 position, which recorded 57 employees. The difference of 1 employee is attributable to a new employee.

Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Level Jabatan

Employee Composition by Position Level

Uraian Description	2025				2024			
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Persentase Percentage	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Persentase Percentage
EVP	-	-	-	-	-	-	-	-
Division Head/ Vlce Manager	8	3	11	19%	10	2	12	21%
Department Head/Manager	3	2	5	9%	2	3	5	9%
Section Head/ Lead Specialist	2	2	4	7%	5	1	6	10%
Specialist	5	4	9	15%	5	5	10	18%
Officer	7	11	18	31%	6	10	16	28%
Staff	4	4	8	14%	1	2	3	5%
Non-Class	3	0	3	5%	0	5	5	9%
Jumlah Total	32	26	58	100%	29	28	57	100%

Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Employee Composition by Employment Status

Uraian Description	2025				2024			
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Persentase Percentage	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Persentase Percentage
Pegawai Tetap Permanent Employee	26	22	47	81%	26	19	45	79%
Pegawai Kontrak Contract Employee	6	4	10	9%	8	4	12	21%
Jumlah Total	32	26	58	100%	34	23	57	100%

Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Employee Composition by Education Level

Uraian Description	2025				2024			
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Persentase Percentage	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Persentase Percentage
S2 dan S3 Master's Degree and Doctorate	7	3	10	17%	8	2	10	17%
S1 Bachelor's Degree	17	19	36	62%	19	18	37	65%
D3 Diploma	2	2	4	7%	2	1	3	6%
SMA dan Sederajat Senior High School and Equivalent	6	2	8	14%	5	2	7	13%
Jumlah Total	32	26	58	100%	34	23	57	100%



Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Rentang Usia Employee Composition by Age Range

Uraian Description	2025				2024			
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Persentase Percentage	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Persentase Percentage
> 55 Tahun Years	1	0	1	2%	1	0	1	2%
45- 55 Tahun Years	10	0	10	17%	11	0	11	19%
35-44 Tahun Years	8	5	13	22%	12	5	17	30%
25-34 Tahun Years	10	17	27	47%	9	15	24	42%
18-24 Tahun Years	3	4	7	12%	1	3	4	7%
Jumlah Total	32	26	58	100%	34	23	57	100%

Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Employee Composition by Gender

Uraian Description	2025		2024	
	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage
Laki-laki Male	32	55%	34	60%
Perempuan Female	26	45%	23	40%
Jumlah Total	58	100%	57	100%

Pengembangan Kompetensi Pegawai

Fokus utama Perusahaan tertuju pada peningkatan kapabilitas individu agar tetap relevan dan responsif terhadap lanskap bisnis yang semakin kompetitif. Komitmen ini diwujudkan melalui dukungan penuh terhadap partisipasi pegawai dalam berbagai spektrum pengembangan diri, mulai dari pendidikan formal, *training*, sertifikasi, hingga seminar. Program-program tersebut, baik yang diselenggarakan secara internal maupun melibatkan pihak eksternal, diposisikan sebagai elemen vital untuk mengakselerasi kapasitas pegawai dalam rangka merealisasikan visi dan misi korporasi.

Kebijakan Pengembangan Kompetensi

Perusahaan menjamin adanya akses dan kesempatan yang setara bagi seluruh entitas pegawai untuk meningkatkan kualifikasinya, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan gender maupun tingkatan jabatan.

Tujuan Pengembangan Kompetensi

Penyelenggaraan program pengembangan kompetensi ini didasarkan pada orientasi strategis untuk mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak hanya andal, tetapi juga memegang teguh tata nilai Perusahaan. Internalisasi nilai ini diharapkan menjadi kompas dalam setiap proses pengambilan keputusan operasional, sehingga bermuara pada optimalisasi kinerja SDM yang selaras dengan pencapaian aspirasi, visi, dan misi PT KBI.

Employee Competency Development

The Company's primary focus lies in enhancing individual capabilities to remain relevant and responsive within an increasingly competitive business landscape. This commitment is manifested through full support for employee participation in various forms of professional development, ranging from formal education, training programs, certifications, to seminars. These programs, delivered both internally and in collaboration with external partners, are positioned as essential components in accelerating employee capacity in order to realize the Company's corporate vision and mission.

Competency Development Policy

The Company ensures equal access and opportunities for all employees to enhance their qualifications, without any discrimination based on gender or position level.

Competency Development Objective

The implementation of this competency development program is based on a strategic orientation to cultivate Human Resources (HR) who are not only highly capable but also uphold the Company's core values. The internalization of these values is expected to serve as a compass in every operational decision-making process, thereby optimizing HR performance in alignment with PT KBI's aspirations, vision, and mission.

Program Pengembangan Kompetensi Pegawai Tahun 2025

Competency Development Programs in 2025

Program pengembangan kompetensi Perusahaan di tahun 2025, dapat diuraikan melalui tabel berikut:

The Company's competency development programs in 2025 are presented in the following table:

No.	Jadwal Pelatihan Training Schedule	Online/ Offline	Pelatihan Training	Divisi/ Unit Division	Lembaga Penyelenggara Organizing Institution
1	13 - 14 Januari 2025 January 13-14, 2025	Offline	Pelatihan Perpajakan PPh 21, Coretax Training on Income Tax, Coretax	SDM	PT Satukelas Adhyapana Nusantara
2	15 Januari 2025 January 15, 2025	Offline	Reputation Shield Effective Strategies for Crisis Management in Today's World	DSP	Danareksa Learning Institute
3	15 Januari 2025 January 15, 2025	Offline	Sertifikat Kompetensi Auditor Hukum Indonesia VIII (Upgrading) Indonesian Legal Auditor Competency Certificate VIII (Upgrading)	DSP	Jimly School of Law and Government
4	22 - 23 Januari 2025 January 22-23, 2025	Offline	Seminar Nasional & Pengukuhan Gelar Kompetensi Auditor Internal National Seminar & Inauguration of Internal Auditor Competency Certification	BOD	PAI-BK
5	23 Januari 2025 January 23, 2025	Offline	Memahami konsep Governance, Risk and Compliance (GRC) Terintegrasi di Era Kepatuhan Modern Understanding the Concept of Integrated Governance, Risk, and Compliance (GRC) in the Era of Modern Compliance	DSP	HukumOnline.com / PT Justika Siar Publika
6	4 Februari 2025 February 4, 2025	Offline	Health, Safety and Environment	PT KBI	Tim Building Danareksa
7	17 - 18 Februari 2025 February 17 - 18, 2025	Online	Risk Maturity Management Assessment for BUMN	DMR	CRMS Indonesia
8	20 Februari 2025 February 20, 2025	Offline	Sharing Session Peran, Tugas & Fungsi Lembaga Kliring di Perdagangan Berjangka Komoditi Sharing Session on the Roles, Duties, and Functions of Clearing Institutions in Commodity Futures Trading	PT KBI	Kementerian Koordinator Bid. Pangan RI
9	21 - 22 Februari 2025 February 21 - 22, 2025	Offline	Workshop Komunikasi: Komunikasi Media Sosial Melalui Optimasi AI Communication Workshop: Social Media Communication through AI Optimization	DSP	KBUMN (Vendor: Rezeki Nikmat Bersahabat)
10	26 - 27 Februari 2025 February 26 - 27, 2025	Offline	Onboarding Commissioners Program Angkatan 9 Tahun 2025 Onboarding Commissioners Program Batch 9 of 2025	BOC	BUMN School of Excellence
11	17 - 19 Maret 2025 March 17 - 19, 2025	Online	Certified Risk Management Officer (CRMO)	DMR	LSPMR
12	9 - 13 April 2025 April 9 - 13, 2025	Online	Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Hukum Legal Auditor Training and Certification	DSP	Justitia Training Center
13	14 - 17 April 2025 April 14 - 17, 2025	Online	Certified Risk Management Professional (CRMP)	DMR	RAP LSPMR
14	15 - 16 April 2025 April 15 - 16, 2025	Offline	Aspek Hukum dalam Pengelolaan Korporasi BUMN Legal Aspect in SOE Cooperative Management	BOC DSP	TICMI (The Indonesia Capital Market Institut)
15	21 - 25 April 2025 April 21 - 25, 2025	Hybrid	Sertifikasi Profesi Auditor Forensik dengan gelar Certified Forensic Auditor (CFrA) Forensic Auditor Professional Certification, conferring the title of Certified Forensic Auditor (CFrA)	DA	Asosiasi Auditor Forensik Indonesia

No.	Jadwal Pelatihan Training Schedule	Online/ Offline	Pelatihan Training	Divisi/ Unit Division	Lembaga Penyelenggara Organizing Institution
16	23 - 25 April 2025 April 23 - 25, 2025	Offline	Training Community Development in CSR	DSP	Shared Value Indonesia
17	3 - 4 Juli 2025 July 3 - 4, 2025	Offline	Mitigasi Risiko Dalam Transformasi Digital Risk Mitigation in Digital Transformation	BOD BOD - KPBI	LSP Manajemen Risiko
18	10 Juli 2025 July 10, 2025	Offline	Seminar OPR: Internal Control for Risk Governance Excellence	DMR DKA DPB DSP DTI DOP DA SDM DPU	Danareksa Learning Institut
19	23 - 24 Juli 2025 July 23 - 24, 2025	Offline	Thinklab: Design Thinking, Creativity & Innovation	DA DPU DSP	Didik & Co (Danareksa Learning Institut)
20	17-18 Juli 2025 July 17 - 18, 2025	Offline	Tata Bahasa Dalam Aksi - Menulis dan Berbicara Profesional Grammar in Practice - Professional Writing and Speaking	DSP	Narabahasa (Danareksa Learning Institut)
21	24 Juli 2025 July 24, 2025	Online	Menilik Wewenang dan Tanggung Jawab Likuidator dalam Likuidasi Authorities and Responsibilities of Liquidators in Corporate Dissolution	DSP	Prof. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.L.I
22	4-7 Agustus 2025 August 4 - 7, 2025	Online	Business Continuity Management Certified Professional (BCMCP)	DMR	RAP
23	19-20 Agustus 2025 August 19 - 20, 2025	Online	Company Culture Bootcamp	SDM	PT Teknologi Cendekia Nusantara
24	21 - 22 Agustus 2025 August 21 - 22, 2025	Offline	Resilience to sustainability: Leading Through GRC in The Post Digital Era	BOC BOD	CRMS
25	22 Agustus 2025 August 22, 2025	Online	Update PSAK 118: Penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Update on PSAK 118: Presentation and Disclosure of Financial Statements	KPBI DKA	DLI
26	22 Agustus 2025 August 22, 2025	Online	GRC Webinar "Navigating Uncertainty : Building Resilience Through Strategic Business Continuity Management"	DTI DKA	PT GRC Tangguh Management
27	2 - 4 September 2025 September 2 - 4, 2025	Offline	Workshop Simulasi Penanganan Insiden Siger Workshop on Siger Incident Response Simulation	DTI	Badan Siber Sandi Negara (BSSN)
28	3 - 4 September 2025 September 3 - 4, 2025	Offline	Seminar Nasional - Bincang SPI 2025, dengan mengusung tema utama "Menjaga Profesionalisme Direksi dalam Bingkai Governance, Risk & Compliance (GRC) dan Business Judgement Rule terhadap UU No. 1 Tahun 2025 National Seminar - IAU Talk 2025, with the main theme: 'Maintaining Board Professionalism within the Framework of Governance, Risk & Compliance (GRC) and the Business Judgment Rule under Law No. 1 of 2025	BOD DA	FKSPI (Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern)

No.	Jadwal Pelatihan Training Schedule	Online/ Offline	Pelatihan Training	Divisi/ Unit Division	Lembaga Penyelenggara Organizing Institution
29	08 - 13 September 2025 September 8 - 13, 2025	Online	Sertifikasi Qualified Internal Auditor - Tingkat lanjutan Qualified Internal Auditor Certification – Advanced Level	DA	Yayasan Pendidikan Internal Audit
30	09 - 10 September 2025 September 9 - 10, 2025	Online	Certified Risk Governance Profesional (CRGP)	BOD	PT RAP Indonesia
31	20 September 2025 September 20, 2025	Offline	Craft a Flowing Story	DSP	T&DON
32	10 - 27 September 2025 September 10 - 27, 2025	Online	Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang & Jasa Training and Competency Certification in Goods and Services Procurement	DSPU	Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional
33	13 - 30 Oktober 2025 October 13 - 30, 2025	Online	Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang & Jasa Training and Competency Certification in Goods and Services Procurement	DSPU	Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional
34	22 - 23 September 2025 September 22 - 23, 2025	Offline	Risk Based Decision Making	DKA	PT Cipta Raya Mekar Sahitya
35	22 - 26 September 2025 September 22 - 26, 2025	Online	Certified Practitioner of Internal Audit (CPIA)	DA	CPIA
36	24 - 26 September 2025 September 24 - 26, 2025	Online	Cashflow and Treasury Management	DKA	Ikatan Akuntansi Indonesia
37	25 - 26 September 2025 September 25 - 26, 2025	Offline	Corporate Secretary for Sustainability Governance	DSP	Infobank Media Group
38	29 - 30 September 2025 September 29 - 30, 2025	Offline	COBIT 2019 Foundation - An ISACA Accredited Course + Exam	DTI	Andalan Teknologi Inovasi
39	2 - 3 Oktober 2025 October 2 - 3, 2025	Offline	Pelatihan Manajemen Aset Terpadu Integrated Asset Management Training	DSPU	Platindo Pusat Pelatihan
40	2 - 3 Oktober 2025 October 2 - 3, 2025	Offline	Fundamental IT Auditor for Internal Auditor	DTI	Andalan Teknologi Inovasi
41	07 Oktober 2025 October 7, 2025	Online	Mengenal Karbon Pajak dan Green Tax Policy Understanding Carbon Tax and Green Tax Policy	DSP	Justitia Training Center
42	8 - 9 Oktober 2025 October 8 - 9, 2025	Offline	Training General Affair (GA) Professional	DSPU	Value Consult
43	6 - 11 Oktober 2025 October 6 - 11, 2025	Online	Qualified Internal Auditor (QIA) Tingkat Lanjutan Qualified Internal Auditor (QIA) – Advanced Level	DMR	YPIA
44	14 Oktober 2025 October 14, 2025	Offline	Merancang Klausul Hukum untuk Exit Strategy dan Risiko Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis Drafting Legal Clauses for Exit Strategies and Default Risks in Business Contracts	DSP	Hukum Online.Com
45	16 Oktober 2025 October 16, 2025	Online	Peran Digital Forensik dalam Penanganan dan Pengungkapan Kejahatan Keuangan The Role of Digital Forensics in Handling and Disclosing Financial Crimes	DSP	Otoritas Jasa Keuangan

No.	Jadwal Pelatihan Training Schedule	Online/ Offline	Pelatihan Training	Divisi/ Unit Division	Lembaga Penyelenggara Organizing Institution
46	16 - 17 Oktober 2025 October 16 - 17, 2025	Offline	Effective Communication Essential	DA DOP&PB PBK DOP&PB PFK DTI DMR DSPU KPBI DSP	Danareksa Learning Institute
47	14 - 15 Oktober 2025 October 14 - 15, 2025	Offline	Implikasi Akuntansi, Aktuaria dan Pajak atas Penerapan Imbalan Kerja sesuai PSAK 219 Accounting, Actuarial, and Tax Implications of Employee Benefits Implementation under PSAK 219	DKA DSPU	Ikatan Akuntansi Indonesia
48	7 Oktober - Desember 2025 October 7 - December, 2025	Online	Ielts Private Program	DSP	PT Karya Cendekia Indonesia (IELTSpreso)
49	20 - 22 Oktober 2025 October 20 - 22, 2025	Online	Sertifikasi Nasional Certified Risk Management Officer Anamrot Certified Risk Management Officer Anamrot	DOP & PB SRG DOP & PB PBK DMR	PT RAP Indonesia
50	21 - 22 Oktober 2025 October 21 - 22, 2025	Online	Refreshment & Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 Risk Management Level 5 - Refreshment and Recertification	DMR	Muamalat Institute
51	24 Oktober 2025 October 24, 2025	Offline	Workshop Sustainability Reporting: Standards and Implementation + Upgrade Terkini Standar PSPK 1 & 2	DKA	Ikatan Akuntansi Indonesia
52	6 - 7 November 2025 November 6 - 7, 2025	Online	Environmental, Social & Governance (ESG) Report	DMR	PT Cipta Raya Mekar Sahitya
53	10 - 11 November 2025 November 10 - 11, 2025	Offline	Seminar Amandemen UU BUMN Danantara Seminar on the Amendment of the State-Owned Enterprises Law	BOD DSP DOP & PB PBK	Intrinsics (Indonesian Training Institute & Consulting Services)
54	19 - 20 November 2025 November 19 - 20, 2025	Offline	Perlindungan data pribadi ROPA-DPIA Data flow dan Data Transfer Personal Data Protection ROPA-DPIA, Data Flow, and Data Transfer	DSP	PT Justika Siar Publika
55	24 November 2025 November 24, 2025	Online	Certified Risk Management Officer (CRMO)	DA	LSPMR
56	24 November 2025 November 24, 2025	Online	Pelatihan IT Disaster Recovery Plan (IT DRP) IT Disaster Recovery Plan (IT DRP) Training	DTI	Danareksa Learning Institute
57	24 - 27 November 2025 November 24 - 27, 2025	Online	Certified Risk Management Professional (CRMP)	DOP & PB SRG	RAP LSPMR

No.	Jadwal Pelatihan Training Schedule	Online/ Offline	Pelatihan Training	Divisi/ Unit Division	Lembaga Penyelenggara Organizing Institution
58	26 - 27 November 2025 November 26 - 27, 2025	Offline	Mastering Cybersecurity: Risks and Controls	DTI	PT Andalan Teknologi Inovasi
59	25 - 26 November 2025 November 25 - 26, 2025	Offline	Bimbingan Teknis & Sertifikasi HR BNSP Batch 13 - Supervisor SDM Technical Guidance & HR Certification by BNSP Batch 13 - HR Supervisor	SDM	Universitas Pelita Harapan
60	26 - 28 November 2025 November 26 - 28, 2025	Offline	Pelatihan & Sertifikasi Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan Bersertifikat BNSP Social and Environmental Responsibility Training & Certification, BNSP-Certified	DSP	Social Impact.id
61	27 - 28 November 2025 November 27 - 28, 2025	Offline	Toward Golden Indonesia 2045: Risk Management As A Competitive Edge in a Complex World	DKA	LSP Manajemen Risiko
62	27 - 28 November 2025 November 27 - 28, 2025	Online	Toward Golden Indonesia 2045: Risk Management As A Competitive Edge in a Complex World	DTI	LSP Manajemen Risiko
63	November 2025 - April 2026 November 2025 - April 2026	Online	English First Program	DSP DMR	EF Efecta
64	1 - 6 Desember 2025 December 1 - 6, 2025	Online	Sertifikasi Qualified Internal Auditor - Tingkat lanjutan Qualified Internal Auditor Certification - Advanced Level	DA	Yayasan Pendidikan Internal Audit
65	4 - 5 Desember 2025 December 4 - 5, 2025	Offline	Risk Beyond	BOD	PT Cipta Raya Mekar Sahitya
66	9 - 10 Desember 2025 December 9 - 10, 2025	Online	Workshop Cara Mudah Menentukan Tingkat Pencadangan Risiko Bagi Perusahaan Workshop on Simple Methods for Determining Corporate Risk Reserve Levels	DTI DKA	PT GRC Tangguh Manajemen PT GRC Tangguh Manajemen
67	15 - 16 Desember 2025 December 15 - 16, 2025	Offline	Hotel Santika Kuta Bali	DOP & PB PFK	Spectra Specialist Training
68	15 - 17 Desember 2025 December 15 - 17, 2025	Online	Certified Risk Management Officer (CRMO)	DSP	PT RAP Indonesia
69	17 - 23 Desember 2025 December 17 - 23, 2025	Online	Certified Risk Management Officer (CRMO)	DOP & PB PFK	PT RAP Indonesia
70	20 Desember 2025 December 20, 2025	Offline	Sertifikasi IELTS Academic IELTS Academic Certification	DSP	British Council

No.	Jadwal Pelatihan Training Schedule	Online/ Offline	Pelatihan Training	Divisi/ Unit Division	Lembaga Penyelenggara Organizing Institution
71	8 Agustus 2025 - 28 Februari 2026 August 8, 2025 – February 28, 2026	Online & Offline	Good Managers Program	DSP	Danareksa Learning Institute
72	23 - 24 Desember 2025 December 23-24, 2025	Online	Certified Enterprise Compliance Professional (CECP)	DSP	Arga Buana Consulting
73	23 - 24 Desember 2025 December 23 - 24, 2025	Online	Certified Enterprise Compliance Auditor (CECA)	DA	Arga Buana Consulting
	18 - 19 Desember 2025 December 18 - 19, 2025	Offline	Risk Awareness	DA DKA DMR DOP & PB PBK DOP & PB PFK DOP & PB SRG DSPU DSP DST DTI KPBI	PT RAP Indonesia

04.

TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS

Business Support Overview





SUMBER DAYA MANUSIA

Human Resources

Komitmen untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan strategi bisnisnya, PT KBI menempatkan pengembangan manusia sebagai faktor kunci yang menopang keberhasilan organisasi. Pendekatan ini diwujudkan melalui sistem pengelolaan SDM yang dirancang secara komprehensif untuk mendukung pencapaian kinerja yang berkelanjutan sekaligus memperkuat keunggulan perusahaan. Seluruh siklus pengelolaan SDM dijalankan dengan prinsip tata kelola yang baik, mencakup pelaksanaan rekrutmen yang objektif dan bertanggung jawab, pengelolaan jenjang karier yang terarah, peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai, serta penyediaan skema remunerasi dan kesejahteraan yang kompetitif.

Program Rekrutmen Karyawan

Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di PT KBI dirancang secara sistematis dengan mempertimbangkan berbagai aspek strategis, mulai dari tingkat produktivitas, perencanaan kebutuhan SDM jangka menengah dan panjang, kesiapan kapasitas serta kapabilitas organisasi, hingga dinamika pasar dan arah ekspansi usaha. Untuk memastikan kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan perusahaan, PT KBI mengutamakan pemanfaatan potensi internal yang tersedia sekaligus membuka ruang bagi perekrutan tenaga profesional dari luar. Pelaksanaan seleksi dikoordinasikan oleh Divisi SDM melalui mekanisme penjangkaran kandidat baik dari internal maupun eksternal, dengan dukungan konsultan SDM independen guna menjaga objektivitas proses.

Sejalan dengan itu, PT KBI secara berkala melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap sistem rekrutmen, seleksi, dan proses orientasi karyawan baru, termasuk peningkatan kapabilitas tim perekrut agar adaptif terhadap perkembangan industri. Sepanjang tahun 2025, PT KBI mencatat penambahan sebanyak 8 karyawan baru yang direkrut melalui proses yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta menjunjung tinggi prinsip ketenagakerjaan yang bertanggung jawab dengan meniadakan praktik pekerja anak dan kerja paksa.

Commitment to Enhancing Human Capital Quality

In executing its business strategy, PT KBI places human capital development at the core of organizational success. This commitment is reflected in a comprehensive human resource management system designed to support sustainable performance while strengthening the Company's competitive advantage. The entire HR management cycle is implemented in accordance with good governance principles, encompassing objective and accountable recruitment practices, structured career path management, continuous capacity and competency development, as well as competitive remuneration and employee welfare schemes.

Employee Recruitment

Workforce planning at PT KBI is carried out systematically by considering a range of strategic considerations, including productivity levels, medium- and long-term human capital planning, organizational capacity and capability readiness, market dynamics, and business expansion strategies. To ensure alignment between competencies and organizational needs, PT KBI prioritizes the utilization of internal talent while remaining open to recruiting external professionals when required. The recruitment is coordinated by the Human Resources Division through structured internal and external candidate sourcing mechanisms, supported by independent HR consultants to ensure objectivity.

In parallel, PT KBI continuously evaluates and enhances its recruitment, selection, and onboarding systems, including strengthening recruiter capabilities to remain adaptive to industry developments. Throughout 2025, PT KBI recruited 8 new employees through processes fully compliant with prevailing Indonesian labor regulations and in line with responsible employment principles, including the strict prohibition of child labor and forced labor.

Kebijakan dan Strategi Pengelolaan SDM

Dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, PT KBI senantiasa berpedoman pada ketentuan hukum dan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku, antara lain sebagai berikut:

1. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Perjanjian Kerja Bersama antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja tahun 2021;
5. Keputusan Direksi PT Kliring Berjangka Indonesia No. 12/K-KBI/LGL/IV/2024 tentang Pedoman Manajemen Karier dan Manajemen Talenta bagi Pegawai PT Kliring Berjangka Indonesia;
6. Keputusan Direksi PT Kliring Berjangka Indonesia No. 12/K-KBI/VI/2025 tentang Struktur Organisasi PT Kliring Berjangka Indonesia;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
8. Keputusan Direksi PT Kliring Berjangka Indonesia No. 10/K-KBI/LGL/IV/2024 tentang Pedoman Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia PT Kliring Berjangka Indonesia;
9. Keputusan Direksi PT Kliring Berjangka Indonesia No. 11/K-KBI/LGL/IV/2024 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja PT Kliring Berjangka Indonesia; dan
10. Keputusan Direksi PT Kliring Berjangka Indonesia No. 41/K-KBI/LGL/XII/2023 tentang Standar Kompetensi Jabatan Perusahaan Pada PT Kliring Berjangka Indonesia.

Program-Program bagi Pegawai PT KBI

PT KBI menempatkan pemenuhan kesejahteraan karyawan sebagai bagian integral dari strategi pengelolaan SDM untuk mendorong kinerja yang optimal dan berkelanjutan. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyediaan paket kompensasi dan manfaat yang komprehensif, meliputi kepesertaan BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan tambahan di luar BPJS, pemberian bonus, hak cuti tahunan dan cuti besar, program wisata religi, serta kepesertaan dalam program pensiun iuran pasti dan BPJS Ketenagakerjaan. Di samping aspek kesejahteraan finansial dan sosial, PT KBI secara berkelanjutan memperkuat kualitas SDM melalui berbagai program pengembangan kompetensi, seperti pelatihan, sertifikasi, lokakarya, seminar, hingga kegiatan

Human Resource Management Policy and Strategy

PT KBI's human resource management practices consistently adhere to applicable labor laws and regulations, including but not limited to:

1. Law No. 6 of 2023 on Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law;
2. Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises;
3. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies;
4. Collective Labor Agreement between the Company and the Labor Union (2021);
5. Decree of the Board of Directors of PT Kliring Berjangka Indonesia No. 12/K-KBI/LGL/IV/2024 on Career Management and Talent Management Guidelines of PT Kliring Berjangka Indonesia;
6. Decree of the Board of Directors of PT Kliring Berjangka Indonesia No. 12/K-KBI/VI/2025 on Organizational Structure of PT Kliring Berjangka Indonesia;
7. Government Regulation No. 35 of 2021 on Fixed-Term Employment Agreements, Outsourcing, Working Hours, Rest Periods, and Termination of Employment;
8. Decree of the Board of Directors of PT Kliring Berjangka Indonesia No. 10/K-KBI/LGL/IV/2024 on Human Resource Management Policies of PT Kliring Berjangka Indonesia;
9. Decree of the Board of Directors of PT Kliring Berjangka Indonesia No. 11/K-KBI/LGL/IV/2024 on Performance Management Systems; and
10. Decree of the Board of Directors of PT Kliring Berjangka Indonesia No. 41/K-KBI/LGL/XII/2023 on Corporate Position Competency Standards of PT Kliring Berjangka Indonesia.

Employee Programs at PT KBI

Employee welfare is an integral component of PT KBI's human capital strategy to drive optimal and sustainable performance. This commitment is realized through comprehensive compensation and benefit packages, including BPJS Health coverage, additional healthcare benefits beyond BPJS, performance bonuses, annual and extended leave entitlements, religious tourism programs, defined contribution pension schemes, and BPJS Employment participation. In addition to financial and social welfare, PT KBI continuously enhances workforce quality through competency development programs such as training, certification, workshops, seminars, and employee engagement activities aimed at strengthening collaboration



kebersamaan karyawan guna meningkatkan keterlibatan dan pemberdayaan pegawai. Hingga 31 Desember 2025, PT KBI memiliki program pensiun dan mencatat sebanyak 1 karyawan yang memasuki masa purnabakti sepanjang tahun 2025.

Jenjang Karier

Pengelolaan dan pengembangan jenjang karier di PT KBI dilaksanakan secara sistematis dengan mengacu pada ketentuan regulasi yang berlaku di lingkungan BUMN. Kesempatan pengembangan karier diberikan secara setara kepada seluruh pegawai, mulai dari level staf hingga Kepala Divisi, sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-14/MBU/10/2014, sementara pengaturan karier pada tingkat Direksi mengikuti Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015. Program ini dirancang tidak hanya untuk memastikan keberlanjutan kepemimpinan perusahaan, tetapi juga untuk memperkuat kapasitas dan kompetensi individu pegawai.

Dalam rangka mengakselerasi efektivitas pengembangan karier, PT KBI mengimplementasikan sistem manajemen kinerja sebagai instrumen utama pengelolaan SDM. Melalui sistem tersebut, potensi dan kapabilitas pegawai dipetakan secara terstruktur melalui proses penilaian, penguatan karakter, serta pembentukan budaya kepemimpinan, sehingga mampu meningkatkan kualitas peran pimpinan di setiap unit kerja. Seiring dengan dinamika industri perdagangan berjangka, PT KBI secara berkelanjutan menyempurnakan indikator kinerja utama (*Key Performance Indicator/KPI*) bagi pejabat struktural agar selaras dengan kebutuhan bisnis terkini. Integrasi antara aspek potensi dan pencapaian KPI menjadi dasar yang komprehensif dalam pengelolaan kinerja serta perencanaan suksesi jabatan. Selain itu, PT KBI secara berkala menyelenggarakan survei keterikatan karyawan (*employee engagement*) yang dilaksanakan oleh lembaga independen sebagai dasar penyusunan program tindak lanjut untuk meningkatkan tingkat keterlibatan seluruh pegawai.

Kesetaraan Hak Karyawan

Melalui penerapan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, PT KBI berkomitmen menjunjung tinggi pemenuhan hak karyawan secara setara dengan mengedepankan transparansi, objektivitas, dan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan. Komitmen tersebut diwujudkan dengan penerapan kebijakan yang menjamin tidak adanya pembedaan perlakuan terhadap pegawai, baik secara eksplisit maupun implisit, atas dasar latar belakang ras, agama, etnis, warna kulit, gender, maupun kondisi sosial apa pun dalam seluruh aktivitas dan interaksi kerja di lingkungan PT KBI.

and empowerment. As of December 31, 2025, PT KBI operated pension programs and recorded 1 employee entering retirement during the reporting year.

Career Path Development

Career development and management at PT KBI are implemented systematically in accordance with SOE regulations. Equal career advancement opportunities are provided to all employees, from staff level to Division Heads, based on Minister of SOE Regulation No. PER-14/MBU/10/2014, while career arrangements at the Board of Directors level follow Regulation No. PER-03/MBU/02/2015. This framework is designed not only to ensure leadership continuity but also to strengthen individual competencies and organizational capacity.

To accelerate effective career development, PT KBI applies a performance management system as a key HR instrument. Through structured assessments, character development, and leadership culture building, employee potential and capabilities are mapped comprehensively to enhance leadership quality across all units. In response to the evolving futures trading industry, PT KBI continuously refines Key Performance Indicators (KPIs) for structural positions to remain aligned with current business needs. The integration of potential assessment and KPI achievement forms a strong basis for performance management and succession planning. In addition, PT KBI regularly conducts employee engagement surveys through independent institutions, and use the results as a foundation for targeted improvement initiatives to strengthen employee engagement across the organization.

Equal Employee Rights

Through the implementation of its Human Resource Management System, PT KBI is firmly committed to upholding equal employee rights by promoting transparency, objectivity, and a work environment free from any pressure or discrimination. This commitment is demonstrated in policies that ensure no differential treatment, explicit or implicit, based on race, religion, ethnicity, skin color, gender, or any social background in all workplace activities and interactions within PT KBI.

TEKNOLOGI INFORMASI

Information Technology



Perubahan lanskap usaha yang berlangsung cepat mendorong perusahaan untuk mengadopsi transformasi digital sebagai bagian dari strategi penguatan daya saing. Dalam konteks tersebut, pemanfaatan Teknologi Informasi berperan krusial sebagai *enabler* peningkatan efektivitas operasional, efisiensi proses, serta perluasan skala dan cakupan bisnis. Lebih dari sekadar fungsi pendukung, TI menjadi fondasi dalam perumusan arah strategis dan pengambilan keputusan berbasis data yang akurat, sehingga mampu menopang pencapaian kinerja Perusahaan yang berkelanjutan.

Pengembangan dan Penerapan Sistem TI

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan melaksanakan pengembangan dan penerapan sistem TI di antaranya:

1. Pengadaan Konsultan *Assessment* Aplikasi ISWARE
2. Pengembangan Aplikasi ISWARE yang diawasi oleh Konsultan *Assessment*
3. Penambahan modul OTP pada Tinmarket untuk meningkatkan keamanan sistem
4. Pengembangan Aplikasi Emas *Off Revamp*
5. Penanganan *change request* Pengembangan Aplikasi SKD untuk bursa IKB (SKD -IX)
6. Implementasi *Systems, Applications, and Products in Data Processing* (SAP)

The rapidly evolving business has encouraged the Company to adopt digital transformation as a key strategy to strengthen its competitiveness. In this context, the utilization of Information Technology (IT) plays a critical role as an enabler of improved operational effectiveness, process efficiency, and the expansion of business scale and scope. Beyond its function as a support system, IT has become a fundamental pillar in shaping strategic direction and enabling accurate, data-driven decision-making, thereby supporting the achievement of the Company's sustainable performance objectives.

IT System Development and Implementation

Throughout 2025, the Company undertook various IT system development and implementation initiatives as follows:

1. Procurement of an application assessment consultant for ISWARE
2. Development of the ISWARE application under the supervision of the assessment consultant
3. Addition of an OTP module to Tinmarket to enhance system security
4. Revamp and enhancement of the Emas Off application
5. Handling of change requests for the development of the SKD application for the IKB Exchange (SKD-IX)
6. Implementation of Systems, Applications, and Products in Data Processing (SAP)



7. Pengembangan Aplikasi Tata Naskah
8. Penanganan *change request* pengembangan SKD untuk produk multilateral
9. Penerapan *Staging* untuk pertukaran data tradefeed SKD dengan BBJ
10. Persiapan Go Live SKD Nextgen (SKD 2.0)

7. Development of the Electronic Correspondence Management Application
8. Handling of change requests for SKD development for multilateral products
9. Implementation of staging for SKD tradefeed data exchange with BBJ
10. Preparation for the Go-Live of SKD Next Generation (SKD 2.0)

Proyek Pengembangan dan Implementasi Infrastruktur

Sepanjang tahun 2025, PT KBI mengarahkan pengembangan dan implementasi Infrastruktur Teknologi Informasi sebagai bagian integral dari strategi transformasi dan penguatan kapabilitas perusahaan. Inisiatif ini difokuskan pada penyediaan infrastruktur TI yang andal, aman, dan terintegrasi guna mendukung kelancaran proses bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, serta memastikan ketersediaan sistem yang optimal. Melalui pelaksanaan proyek infrastruktur TI yang terencana dan berorientasi jangka panjang, PT KBI berupaya memperkuat fondasi digital perusahaan dalam menunjang pengambilan keputusan yang akurat, peningkatan kualitas layanan, dan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Adapun proyek pengembangan dan implementasi infrastruktur TI yang dilakukan sepanjang 2025 di antaranya:

1. DRC Drill Tahap I & II
2. Instalasi server dan *storage* baru pada DC dan DRC
3. Peningkatan kapasitas koneksi pada DRC
4. Migrasi Data Center menjadi *Data Recovery Center*
5. *Recovery* data pasca serangan *ransomware*
6. *Upgrade Bandwidth* Internet pada *head office* PT Kliring Berjangka Indonesia
7. Audit forensik pasca serangan *ransomware*
8. Perpanjangan layanan Email Security Sophos
9. Implementasi *monitoring tools* Zabbix
10. Uji coba *backup restore*
11. Pengadaan Ms. Office 365
12. Perpanjangan Jasa *Maintenance Local Support* VMWare
13. Pengadaan Lisensi VMWare vSphere Foundation 8
14. Pengadaan Lisensi dan Local Support Sistem Replikasi Veeam
15. *Upgrade* versi *operating system* dan DBMS pada server SKD
16. Implementasi *Wide Area Network* (WAN) Danareksa

Infrastructure Development and Implementation

Throughout 2025, PT KBI directed the development and implementation of Information Technology infrastructure as an integral part of its transformation strategy and efforts to strengthen corporate capabilities. These initiatives focused on providing reliable, secure, and integrated IT infrastructure to support business continuity, enhance operational efficiency, and ensure optimal system availability. Through well-planned, long-term infrastructure projects, PT KBI aims to reinforce its digital foundation to support accurate decision-making, improve service quality, and drive sustainable business growth. Key IT infrastructure development and implementation projects carried out during 2025 included:

1. Disaster Recovery Center (DRC) Drills Phase I & II
2. Installation of new servers and storage at the Data Center (DC) and DRC
3. Capacity enhancement of DRC connectivity
4. Migration of the Data Center into a Data Recovery Center
5. Data recovery following a ransomware attack
6. Internet bandwidth upgrade at the head office of PT Kliring Berjangka Indonesia
7. Forensic audit following the ransomware incident
8. Extension of Sophos Email Security services
9. Implementation of Zabbix monitoring tools
10. Backup and restore testing
11. Procurement of Microsoft Office 365
12. Extension of local maintenance support services for VMware
13. Procurement of VMware vSphere Foundation 8 licenses
14. Procurement of licenses and local support for the Veeam replication system
15. Upgrade of operating system and DBMS versions on the SKD server
16. Implementation of the Danareksa Wide Area Network (WAN)

Kegiatan IT Governance

Sepanjang tahun 2025, PT KBI memperkuat penerapan IT *Governance* sebagai kerangka pengelolaan Teknologi Informasi yang terarah, terukur, dan selaras dengan strategi

IT Governance

Throughout 2025, PT KBI strengthened the implementation of IT Governance as a structured, measurable framework aligned with the Company's business strategy. Through

bisnis Perusahaan. Melalui tata kelola TI yang konsisten, PT KBI memastikan pengelolaan risiko, kepatuhan, serta optimalisasi pemanfaatan TI berjalan efektif dalam mendukung kinerja dan keberlanjutan usaha.

Adapun kegiatan yang dijalankan IT Governance sepanjang tahun 2025 di antaranya:

1. Audit IT KAP
2. Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Instruksi Kerja (IK)
3. Audit Internal Sistem Manajemen Integrasi dan mempersiapkan Surveillance ISO 27001:2022 dengan auditor eksternal
4. Audit Eksternal Sistem Manajemen Integrasi yang sekaligus pelaksanaan Surveillance ISO 27001:2022
5. Audit Internal Divisi Teknologi Informasi
6. Pembaruan Kebijakan Tata Kelola dan SMKI

Kegiatan Operasional Divisi Teknologi dan Informasi

Perusahaan melakukan aktivitas operasional Teknologi Informasi sepanjang 2025 mencakup pengelolaan dan pemeliharaan berbagai fasilitas TI esensial, seperti konektivitas jaringan, layanan surat elektronik, dan pengelolaan data, serta pengoperasian sistem aplikasi perusahaan. Seluruh aktivitas tersebut dijalankan melalui fungsi pengawasan berkelanjutan, pemeliharaan rutin, penanganan gangguan, dan pemberian bantuan teknis kepada pengguna, baik dari lingkungan internal maupun pihak eksternal yang terkait di antaranya:

1. Penambahan dan perbaikan fitur-fitur pada layanan aplikasi yang berjalan secara otomatis untuk mendukung kegiatan operasional;
2. Dukungan terhadap sistem ISWARE Next Gen kepada para user dan stakeholder;
3. *Support Management System* dan *Data Profile* bagi sistem IS-Ware Resi Gudang (pendampingan, *problem solving* dan kebutuhan administrasi lainnya kepada para user);
4. Pengujian *mock-up trading* dengan PT Indo Bursa;
5. Dukungan Lainnya, DTI memberikan layanan untuk aplikasi-aplikasi lain seperti SKD, Sistem Perdagangan Timah, Dana Jaminan, dan lain-lain;
6. DTI juga memberikan dukungan lain untuk memastikan operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik seperti *desktop support*, perawatan, dan lain-lain.

consistent IT governance practices, PT KBI ensures effective risk management, regulatory compliance, and optimal utilization of information technology in supporting business performance and long-term sustainability.

Key IT Governance activities carried out during 2025 included:

1. External IT audit conducted by a Public Accounting Firm
2. Updates to Standard Operating Procedures (SOPs) and Work Instructions
3. Internal audit of the Integrated Management System and preparation for ISO 27001:2022 surveillance by an external auditor
4. External audit of the Integrated Management System, including ISO 27001:2022 surveillance
5. Internal audit of the Information Technology Division
6. Updates to IT Governance and Information Security Management System policies

Operational Activities of the Technology and Information Division

Throughout 2025, the Company carried out Information Technology operational activities encompassing the management and maintenance of essential IT facilities, including network connectivity, email services, data management, and the operation of corporate application systems. These activities were conducted through continuous monitoring, regular maintenance, incident handling, and technical support provided to both internal users and relevant external stakeholders. The operational activities included:

1. Enhancement and refinement of features in existing application services operating automatically to support business operations;
2. Support for the ISWARE Next Generation system for users and stakeholders;
3. Management system and data profile support for the IS-Ware Warehouse Receipt System, including user assistance, problem-solving, and administrative support;
4. Mock-up trading testing with PT Indo Bursa;
5. Additional support for other applications such as SKD, the Tin Trading System, Guarantee Fund System, and others;
6. Provision of additional support to ensure smooth company operations, including desktop support, system maintenance, and related services.

Realisasi Program Kerja Divisi Teknologi dan Informasi 2026

Realization of Work Program of Technology and Information Division in 2025

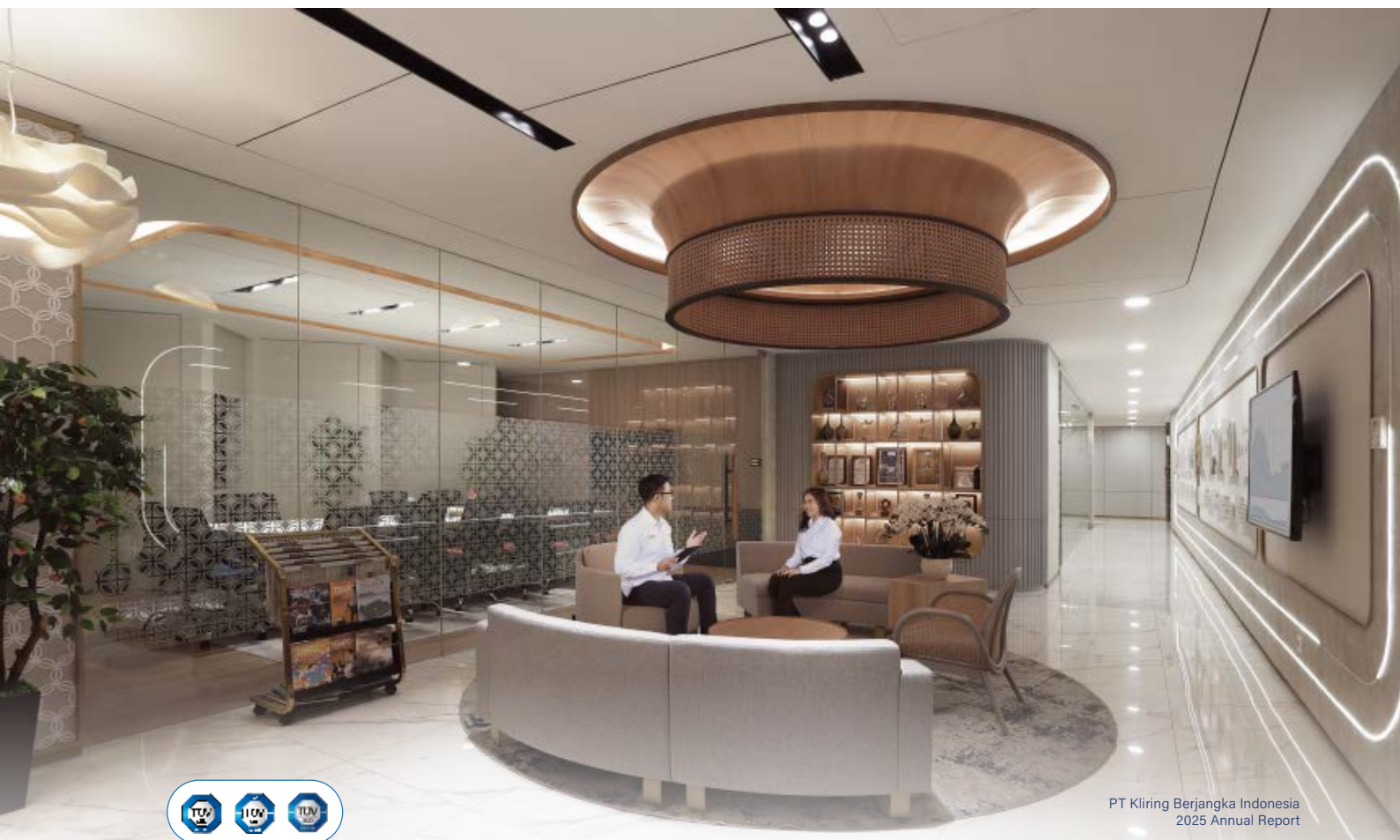
No.	Sasaran Strategi Strategy Target	Program Kerja Work Program	Target KPI KPI Target	Target Pelaksanaan Implementation Target	Status
1.	Peningkatan Layanan Service Quality Enhancement	Pengadaan Konsultan dan Assessment ISWARE Procurement of ISWARE Consultant and Assessment Services	Pengadaan konsultan untuk melakukan <i>assessment</i> terkait bisnis proses aplikasi ISWARE agar memastikan bahwa langkah yang diambil memberikan manfaat optimal bagi organisasi dan selaras dengan tujuan bisnis. Procurement of a consultant to conduct an assessment of the ISWARE application's business processes, to ensure that the actions taken deliver optimal value to the organization and are aligned with its business objectives.	Q2 2025	100%
2.	Peningkatan Layanan Service Quality Enhancement	Pengembangan ISWARE NextGen Development of ISWARE NextGen	Pengembangan aplikasi ISWARE Nextgen untuk memenuhi rencana implementasi Resi Gudang sesuai dengan hasil <i>assessment</i> yang telah dilakukan. Development of the ISWARE NextGen application to support the targeted implementation of the Warehouse Receipt System, in accordance with the outcomes of the assessment conducted.	Q4 2025	100%
3.	Peningkatan <i>Security</i> dan Layanan Security and Service Quality Enhancement	Pengembangan <i>Upgrade</i> Infrastruktur dan Jaringan Development of Infrastructure and Network Upgrade	Pengembangan infrastruktur dan jaringan ini difokuskan untuk mempersiapkan <i>backup</i> perangkat <i>antispam</i> dari perangkat aktif saat ini. Sehingga pada saat diperlukan ada <i>maintenance</i> atau terdapat gangguan perangkat, layanan <i>email</i> perusahaan dapat tetap berjalan dengan baik. Hal pengembangan kedua adalah pengamanan jaringan sebagai persiapan penempatan kantor pada Menara Danareksa yaitu dengan menyediakan perangkat keamanan yaitu <i>firewall</i> . Hal pengembangan ketiga adalah peningkatan kapasitas koneksi pada DRC Cimanggis yang berkaitan dengan proses migrasi infrastruktur utama (DC) ke <i>site</i> DRC. Pengembangan lainnya meliputi implementasi <i>server</i> dan <i>storage</i> , <i>upgrade</i> Windows Server ke versi terbaru, <i>upgrade</i> VMware untuk meningkatkan efisiensi virtualisasi, pembangunan jaringan WAN untuk meningkatkan konektivitas, dan implementasi Infrastruktur <i>Monitoring Tools</i> . The development of infrastructure and network capabilities was focused on preparing backup anti-spam systems to support the existing active devices. This ensures that corporate email services remain fully operational during maintenance activities or in the event of system disruptions. The second area of development involved strengthening network security in preparation for the relocation of the office to Menara Danareksa, including the provision of firewall security devices. The third initiative centered on increasing connection capacity at the Cimanggis Disaster Recovery Center (DRC) to support the migration of the primary infrastructure from the Data Center (DC) to the DRC site. Additional developments included the implementation of new servers and storage systems, upgrading Windows Server to the latest version, upgrading VMware to enhance virtualization efficiency, establishing a Wide Area Network (WAN) to improve connectivity, and implementing infrastructure monitoring tools to ensure system reliability and performance.	Q4 2025	93%

No.	Sasaran Strategi Strategy Target	Program Kerja Work Program	Target KPI KPI Target	Target Pelaksanaan Implementation Target	Status
4.	Peningkatan Layanan Service Quality Enhancement	Uji coba DRC Drill DRC Drill Testing	Uji coba DRC untuk melihat keandalan sistem PT KBI, ujicoba dilakukan dengan melakukan <i>crossing datacenter</i> dari DC ke DRC atau sebaliknya. A DRC drill was conducted to assess the reliability of PT KBI's systems. The test involved switching operations between the primary DC and the DRC, and vice versa, to ensure system readiness and continuity in the event of disruptions.	Q2 & Q4 2025	100%
5.	Peningkatan Layanan Service Quality Enhancement	Pengembangan fitur Aplikasi Internal Development of Internal Application features	Pengembangan fitur seluruh aplikasi internal sesuai dengan kebutuhan internal. Enhancement of features across all internal applications in line with the Company's operational needs.	Q4 2025	100%
6.	Peningkatan Layanan Service Quality Enhancement	Pengembangan Sistem Kliring Derivatif Development of Derivative Clearing System	Pengembangan aplikasi Sistem Kliring Derivatif fase 1 ini untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan juga untuk efisiensi kegiatan operasional perusahaan. The Phase 1 development of the Derivatives Clearing System was undertaken to meet business requirements while enhancing the efficiency of the Company's operational activities.	Q2 2025	70%
7.	Peningkatan Keandalan Layanan Service Reliability Enhancement	<i>Testing Mockup Trading</i> IKB	Pengujian <i>mockup</i> sistem trading IKB. Mock-up testing of the IKB trading system.	Q1 2025	100%
8.	Peningkatan Layanan Service Quality Enhancement	Pengembangan Sistem Pasar Fisik Digital (EmasOff dan Tinmarket) Development of the EmasOff and Tinmarket	Pengembangan aplikasi Sistem Emas off dan Tinmarket ini untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan juga untuk efisiensi kegiatan operasional perusahaan kaitannya dengan transaksi pasar fisik digital. The development of the EmasOff and Tinmarket applications is intended to meet business needs while enhancing the efficiency of the Company's operational activities, particularly in relation to digital physical market transactions.	Q4 2025	80%
9.	Peningkatan Layanan Service Quality Enhancement	Pengembangan Sistem terintegrasi Bursa Kliring dengan Perbankan Development of the Digital Physical Market System (EmasOff and Tinmarket)	Pengembangan PBK dengan membuat suatu <i>dashboard</i> bersama dengan Bursa bagi Anggota Kliring sehingga <i>dashboard</i> bisa menjadi <i>One Stop Service</i> bagi seluruh Anggota Kliring. The development of PBK is carried out through the creation of a joint dashboard in collaboration with the Exchange for Clearing Members, enabling the dashboard to function as a One-Stop Service platform for all Clearing Members.	Q4 2025	0%
10.	Peningkatan Layanan Service Quality Enhancement	Pengembangan SPT-SPA Development of SPT-SPA	Pengembangan SPT-SPA sebagai bagian dari tindakan lanjut perubahan Peraturan Undang-Undang yang diterbitkan oleh BAPPEBTI di tahun mendatang. The development of the SPT-SPA system is undertaken as a follow-up to amendments to laws and regulations issued by BAPPEBTI that are expected to take effect in the coming year.	Q4 2025	0%



No.	Sasaran Strategi Strategy Target	Program Kerja Work Program	Target KPI KPI Target	Target Pelaksanaan Implementation Target	Status
11.	Peningkatan Layanan Service Quality Enhancement	Upgrade Microsoft Office ke Microsoft 365 E3 Microsoft Office Upgrade to Microsoft 365	Upgrade Microsoft Office menuju Microsoft 365 E3 sehingga setiap ada <i>update</i> versi Microsoft, PT KBI tidak perlu untuk memperbaharui <i>lisensi office</i> yang baru. Office 365 juga sudah ditambahkan fitur untuk melakukan kolaborasi versi file. The upgrade from Microsoft Office to Microsoft 365 E3 ensures that PT KBI automatically receives the latest Microsoft updates without the need to purchase new Office licenses. In addition, Microsoft 365 introduces enhanced file collaboration features, enabling more efficient and seamless teamwork.	Q4 2025	100%
12.	Peningkatan Keandalan Layanan Service Quality Enhancement	Pembebanan <i>Cloud Service Production</i> Charging of Production Cloud Services	<i>Cloud Service Production</i> ini ditunjukkan untuk server-server produksi yang saat ini melayani kegiatan operasional, sehingga layanan sistem dapat meningkat keandalannya. Untuk proses migrasi direncanakan pada server – server yang memiliki ketergantungan tinggi. The Production Cloud Service is designated for production servers that currently support core operational activities, with the objective of enhancing overall system reliability. The migration process is planned to prioritize servers with high dependency levels to ensure service continuity and operational stability.	Q4 2025	0%
13.	Peningkatan Layanan Service Quality Enhancement	Pengembangan Sistem PLK Development of PLK System	Pengadaan Konsultan, Pelaksanaan <i>Assesment</i>, dan Pengembangan Sistem (Pasar Lelang Komoditi) PLK. Arahan dari BAPPEBTI, untuk PLK akan menggunakan system dari KPBN. The Company engaged a consultant, conducted an assessment, and carried out system development for the Commodity Auction Market (PLK). In accordance with guidance from BAPPEBTI, the PLK will adopt the system provided by KPBN.	Q4 2025	0%
14.	Peningkatan Layanan Service Quality Enhancement	Pengembangan Aplikasi SID Development of SID Application	Pengembangan aplikasi SID untuk operasional Perdagangan Berjangka Komoditi. Development of the SID application to support the operational activities of Commodity Futures Trading.	Q4 2025	0%
15.	Peningkatan Layanan Service Quality Enhancement	Integrasi ERP Anggota Holding ke ERP Danareksa Integration of Holding Members' ERP Systems into the Danareksa ERP	Implementasi <i>Systems, Applications, and Products in Data Processing</i> (SAP). Implementation of Systems, Applications, and Products in Data Processing (SAP).	Q2 2025	70%

No.	Sasaran Strategi Strategy Target	Program Kerja Work Program	Target KPI KPI Target	Target Pelaksanaan Implementation Target	Status
16.	IT Governance	Audit Teknologi Informasi Information Technology Audit	Audit untuk memastikan kepatuhan dan keandalan infrastruktur dan sistem IT yang meliputi Audit Infrastruktur dan Sistem IT, <i>Maturity Level</i> , INDI 4.0, IKAS (Instrumen Penilaian Kematangan Keamanan Siber), dan KAP. Audits were conducted to ensure the compliance and reliability of IT infrastructure and systems, covering IT Infrastructure and Systems Audits, <i>Maturity Level Assessment</i> , INDI 4.0, IKAS (Cybersecurity Maturity Assessment Instrument), and audits by the Public Accounting Firm (KAP).	Q4 2025	50%
17.	IT Governance	Sertifikasi ISO 27001:2022 ISO 27001:2022 Certification	Melaksanakan <i>surveillance</i> ISO 27001:2022. Conducted ISO 27001:2022 surveillance.	Q2 2025	100%
18.	IT Governance	Penerapan <i>Shared Service Center</i> Holding Danareksa Implementation of <i>Shared Service Center</i> Holding Danareksa	Implementasi <i>Shared Service Center</i> (SSC) Holding Danareksa Tower IT. Implementation of the Shared Service Center (SSC) at the Danareksa Tower IT facility.	Q2 2025	100%
19.	IT Governance	Review Standar Operasional Prosedur (SOP) Standard Operational Procedure (SOP) Review	Penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan kondisi terkini dan regulasi yang berlaku. Adjustment of Standard Operating Procedures (SOP) to align with current conditions and applicable regulations.	Q2 2025	100%



05.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management Discussion and Analysis





TINJAUAN EKONOMI

Economic Review

Sepanjang tahun 2025, ekonomi global berada dalam fase transisi yang menantang namun tetap menunjukkan resiliensi. Berdasarkan laporan *World Economic Outlook* dari *International Monetary Fund* (IMF), pertumbuhan ekonomi dunia diprediksi stabil di angka 3,2%, meski diwarnai oleh kebijakan moneter ketat dari *Federal Reserve* (*The Fed*) dan Bank Sentral Eropa guna menekan sisa-sisa inflasi. Ketegangan geopolitik di beberapa kawasan utama masih memicu volatilitas harga komoditas energi dan pangan global. Bagi pasar perdagangan berjangka, kondisi ini menciptakan kebutuhan yang lebih tinggi terhadap mekanisme lindung nilai (*hedging*), seiring dengan upaya pelaku pasar dalam memitigasi risiko fluktuasi harga komoditas internasional yang tidak menentu.

Di tingkat domestik, Indonesia mencatatkan kinerja ekonomi yang impresif di tengah ketidakpastian global. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi nasional diproyeksikan tetap terjaga pada kisaran 4,7% hingga 5,5% (YoY) pada tahun 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh kuatnya permintaan domestik serta keberlanjutan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan hilirisasi industri mineral yang terus memperkuat struktur ekspor. Inflasi yang terkendali dalam sasaran target memberikan ruang bagi stabilitas daya beli masyarakat, yang pada gilirannya menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan aktivitas transaksi di bursa komoditas dan pasar fisik.

Sejalan dengan dinamika tersebut, industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) di Indonesia mengalami penguatan peran yang signifikan. Laporan tahunan BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) menunjukkan adanya peningkatan volume transaksi, khususnya pada kontrak-kontrak multilateral dan pasar fisik emas digital. Penguatan regulasi dan pengawasan pasar yang dilakukan otoritas terkait berhasil meningkatkan tingkat kepercayaan investor ritel maupun institusi. Hal ini membuktikan bahwa ekosistem perdagangan berjangka nasional telah menjadi instrumen investasi alternatif yang semakin diminati dan mampu beradaptasi dengan perubahan lanskap ekonomi digital.

Throughout 2025, the global economy entered a challenging transition phase, yet continued to demonstrate resilience. According to the *World Economic Outlook* report by the *International Monetary Fund* (IMF), global economic growth was projected to remain stable at 3.2%, despite tight monetary policies implemented by the *The Fed* and the *European Central Bank* to curb lingering inflation. Geopolitical tensions in several key regions have continued to trigger volatility in global energy and food commodity prices. For the futures trading market, these conditions have increased the demand for hedging mechanisms, as market participants seek to mitigate the risks associated with unpredictable international commodity price fluctuations.

On the domestic front, Indonesia recorded an impressive economic performance amidst global uncertainty. Data from *Statistics Indonesia* (BPS) and *Bank Indonesia* indicate that national economic growth was projected to remain within the range of 4.7% to 5.5% (YoY) in 2025. This growth was driven by robust domestic demand, the continued implementation of the *National Strategic Projects* (PSN), and the downstream development of the mineral industry, which strengthened the structure of exports. Controlled inflation within the target range has provided room for stability in consumer purchasing power, which, in turn, has created a conducive environment for the growth of trading activity in both commodity exchanges and the physical market.

In line with these dynamics, Indonesia's *Commodity Futures Trading* (PBK) industry has seen a significant strengthening of its role. The annual report from *BAPPEBTI* (*Commodity Futures Trading Regulatory Agency*) highlights an increase in transaction volumes, particularly in multilateral contracts and the digital gold physical market. Enhanced regulations and market supervision by the relevant authorities have successfully improved confidence among both retail and institutional investors. This demonstrates that the national futures trading ecosystem has evolved into an increasingly attractive alternative investment instrument, capable of adapting to shifts in the digital economic landscape.



TINJAUAN INDUSTRI

Industry Review

Industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) di Indonesia sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif meskipun dihadapkan pada volatilitas ekonomi global. Berdasarkan data BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), volume transaksi multilateral dan bilateral terus mengalami peningkatan signifikan, yang didorong oleh tingginya kesadaran pelaku usaha terhadap instrumen lindung nilai (*hedging*). Sebagai lembaga kliring, PT KBI memainkan peran sentral dalam memastikan seluruh penyelesaian transaksi berjalan secara efisien, aman, dan transparan, guna menjaga integritas pasar di tengah dinamika harga komoditas global.

Lanskap industri tahun ini juga ditandai dengan penguatan regulasi melalui implementasi lanjutan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Penataan struktur pasar dan pengawasan yang lebih ketat oleh otoritas bertujuan untuk meningkatkan perlindungan nasabah serta menciptakan ekosistem investasi yang lebih kredibel. Sinergi antara lembaga kliring, bursa, dan pengelola sentral menjadi kunci utama dalam memitigasi risiko sistemik. Kondisi regulasi yang semakin matang ini memberikan landasan yang kokoh bagi PT KBI untuk memperluas cakupan layanan kliring dan penjaminan pada berbagai kelas aset baru yang muncul di pasar.

Selain itu, transformasi digital menjadi katalisator utama dalam akselerasi industri PBK, di mana adopsi

Indonesia's Commodity Futures Trading (PBK) industry demonstrated a positive growth trend throughout 2025, despite the backdrop of global economic volatility. According to data from BAPPEBTI (Commodity Futures Trading Regulatory Agency), both multilateral and bilateral transaction volumes continued to increase significantly, driven by heightened awareness among market participants regarding hedging instruments. As a clearing institution, PT KBI plays a central role in ensuring that all transaction settlements are conducted efficiently, securely, and transparently, thereby maintaining market integrity amid global commodity price fluctuations.

The industry landscape this year was also marked by strengthened regulations through the continued implementation of the Financial Sector Development and Strengthening Act (UU P2SK). Market structure reforms and tighter supervision by authorities aim to enhance customer protection and create a more credible investment ecosystem. The synergy between clearing institutions, exchanges, and central managers has remained key to mitigating systemic risk. This increasingly mature regulatory environment has provided a solid foundation for PT KBI to expand its clearing and guarantee services across emerging asset classes in the market.

Digital transformation has become a key driver of growth in the PBK industry, with emerging technologies such as



teknologi *blockchain* dan kecerdasan buatan mulai diintegrasikan dalam sistem perdagangan dan pelaporan. PT KBI telah merespons tren ini dengan melakukan modernisasi infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung transaksi *real-time* dan meningkatkan akurasi data kliring. Menurut laporan Kementerian Komunikasi dan Digital, pertumbuhan ekonomi digital yang pesat di Indonesia turut mendorong inklusi keuangan di sektor komoditas, memungkinkan akses yang lebih luas bagi investor ritel melalui platform digital yang terverifikasi dan aman.

Di sektor riil, optimalisasi Sistem Resi Gudang (SRG) menjadi pilar penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani/produsen komoditas. Berdasarkan tinjauan Kementerian Pertanian, pemanfaatan SRG sebagai instrumen pembiayaan menunjukkan tren kenaikan, di mana PT KBI berperan sebagai pusat registrasi yang melakukan penatausahaan resi gudang, sebagai instrumen yang dapat di agunkan. Penguatan ekosistem SRG ini tidak hanya membantu stabilitas harga pangan domestik, tetapi juga meningkatkan nilai tawar komoditas unggulan Indonesia di pasar internasional melalui standarisasi mutu yang lebih baik.

blockchain and artificial intelligence increasingly integrated into trading and reporting systems. In response, PT KBI has modernized its IT infrastructure to enable real-time transaction processing and enhance the accuracy of clearing data. Reports from the Ministry of Communication and Digital Affairs indicate that Indonesia's rapidly expanding digital economy has further advanced financial inclusion within the commodities sector, providing retail investors with broader access through secure, verified digital platforms.

In the real sector, the optimization of the Warehouse Receipt System (SRG) has become a critical pillar in supporting national food security and the welfare of farmers and commodity producers. Based on reviews from the Ministry of Agriculture, the use of SRG as a financing instrument has shown an upward trend, with PT KBI serving as the central registry to manage warehouse receipt administration as a collateralizable instrument. The reinforcement of the SRG ecosystem has not only helped stabilize domestic food prices but also has enhanced the competitiveness of Indonesia's premium commodities in international markets through improved quality standardization.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

Operational Review by Business Segment

Beroperasi sebagai lembaga kliring dan penjaminan di sektor perdagangan berjangka serta pasar fisik, PT KBI juga memperluas portofolionya melalui jasa penunjang usaha dan investasi strategis pada berbagai entitas bisnis. Dalam menjalankan roda organisasinya, Perusahaan mengklasifikasikan segmen usaha berdasarkan spesialisasi operasional guna memastikan setiap lini bisnis mampu memberikan layanan prima secara konsisten dan berkelanjutan.

Penjelasan Segmen Usaha

Adapun jenis Transaksi Kliring Berjangka terdiri dari:

1. Kliring penjaminan dan penyelesaian transaksi kontrak berjangka di Bursa atau *Exchange Trades Derivatives*; dan
2. Kliring penjaminan dan penyelesaian transaksi luar Bursa atau *Over the Counter Derivatives* (OTC-D).

Fungsi penjaminan penyelesaian kontrak berjangka dan instrumen derivatif menjadi sangat krusial dalam ekosistem pasar yang terorganisir, terutama sebagai mitigasi risiko terhadap potensi cedera janji seperti gagal bayar atau gagal serah. Sebagai otoritas kliring, PT KBI menjalankan

As a clearing and guarantee institution in the futures trading and physical market commodities, PT KBI has also expanded its portfolio through supporting business services and strategic investments across various business entities. In managing its operations, the Company classifies its business segments according to operational specialization to ensure that each line consistently delivers high-quality services in a sustainable manner.

Business Segment Review

The following are types of Futures Clearing Transactions:

1. Exchange Trades Derivatives; and
2. Over the Counter Derivatives (OTC-D).

The function of guaranteeing futures contracts and derivative settlements is critical in an organized market ecosystem, particularly as a risk mitigation measure against potential default or delivery failures. As the clearing authority, PT KBI implements strict risk management

manajemen risiko yang ketat melalui pengawasan penyelesaian transaksi, pelaporan hak serta kewajiban anggota, dan penyediaan informasi strategis lainnya. Seluruh rangkaian proses ini dilakukan guna menjamin kepastian transaksi serta menjaga integritas finansial pasar. Sebagai Lembaga Kliring Berjangka, PT KBI menyediakan layanan kliring penjaminan dan penyelesaian yang menjadi kebutuhan utama bagi Pialang serta Pedagang Berjangka dalam melakukan transaksi multilateral maupun bilateral di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ). Atas layanan tersebut, lembaga kliring memperoleh imbal jasa (*fee*) yang dihitung berdasarkan volume transaksi per lot pada setiap sisi.

Secara lebih rinci, layanan Lembaga Kliring dijabarkan sebagai berikut:

1. Pendaftaran Kontrak

Setiap kontrak berjangka di Bursa serta kontrak derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) yang telah berstatus *matched* (sepadan) akan diteruskan secara elektronik ke Lembaga Kliring. Melalui jaringan pendukung yang terintegrasi, PT KBI melakukan verifikasi komprehensif atas kelengkapan data kontrak tersebut. Proses validasi mencakup pengecekan kode Anggota Kliring, Anggota Bursa Non-Anggota Kliring, identitas nasabah, jenis produk, hingga detail transaksi seperti periode kontrak, volume (lot), dan harga. Melalui sistem otomatis ini, Lembaga Kliring secara akurat mengidentifikasi posisi setiap Anggota Kliring, baik sebagai pihak pembeli maupun penjual.

2. Fungsi Substitusi

Melalui proses novasi atau substitusi, Lembaga Kliring bertindak sebagai jembatan yang menjamin seluruh hak dan kewajiban dari setiap transaksi kontrak berjangka dan derivatif yang didaftarkan. Mekanisme ini memastikan bahwa setiap Anggota Kliring Penjual dan Pembeli mendapatkan kepastian atas pemenuhan kewajiban pihak lawan, di mana Lembaga Kliring mengambil peran sebagai penjamin utama guna memelihara stabilitas dan kepercayaan di pasar berjangka.

3. Perhitungan Hak dan Kewajiban Anggota Kliring

Lembaga Kliring secara berkala melakukan rekonsiliasi serta penghitungan laba dan rugi atas setiap posisi kontrak terbuka yang terdaftar. Proses ini mengacu pada harga penyelesaian (*settlement price*) yang ditetapkan secara resmi oleh Bursa pada setiap akhir hari perdagangan. Mekanisme ini memastikan bahwa seluruh kewajiban finansial dari setiap kontrak aktif dapat terukur secara transparan dan akurat.

through transaction settlement monitoring, reporting of members' rights and obligations, and the provision of other strategic information. These processes ensure transaction certainty and uphold the financial integrity of the market. As a Futures Clearing Institution, PT KBI provides clearing, guarantee, and settlement services that are essential for brokers and traders conducting multilateral or bilateral transactions on the Jakarta Futures Exchange (BBJ). Fees for these services are calculated based on transaction volume per lot on each side.

Clearing House services are elaborated as follows:

1. Contract Registration

All exchange-traded futures contracts and derivative contracts in the Alternative Trading System (SPA) that have achieved a matched status are electronically forwarded to the Clearing Institution. Through its integrated network, PT KBI conducts comprehensive verification of contract data, including clearing member codes, non-clearing exchange members, client identification, product type, contract period, volume (lots), and price. The automated system accurately identifies each clearing member's positions as either buyer or seller.

2. Substitution Function

Through novation or substitution processes, the Clearing House acts as a central counterparty, guaranteeing all rights and obligations for each registered futures and derivative contract. This mechanism ensures that both Selling and Buying Clearing Members have certainty that their counterparties will fulfill their obligations, thereby maintaining market stability and confidence.

3. Calculation of Members' Rights and Obligations

The Clearing House regularly reconciles and calculates profits and losses on all open contract positions based on officially determined settlement prices at the close of each trading day. This mechanism ensures that all financial obligations of active contracts are measurable transparently and accurately.



4. Penyelesaian Transaksi

Terdapat 4 (empat) jenis penyelesaian yang dapat dilakukan untuk menutup posisi, yaitu:

- Penyelesaian transaksi secara likuiditas/*offset*
- Penyelesaian transaksi secara penyerahan fisik
- Penyelesaian transaksi secara tunai
- Transaksi secara tukar fisik berjangka

5. Rekonsiliasi dengan Bank Penyimpan

Lembaga Kliring melaksanakan prosedur rekonsiliasi saldo rekening Anggota Kliring dengan Bank Penyimpan secara periodik, baik harian maupun bulanan, guna menjamin akurasi data finansial. Proses ini dilakukan dengan menyandingkan laporan Bank Penyimpan terhadap data dari Sistem Kliring Derivatif (SKD). Untuk pos iuran bulanan dan biaya layanan jasa lainnya yang dikelola dalam rekening tidak terpisah, rekonsiliasi dilakukan setiap bulan. Sementara itu, untuk transaksi yang memiliki urgensi tinggi seperti penerimaan dan pembayaran margin, serta pengelolaan dana jaminan dan dana kliring, rekonsiliasi dilakukan secara harian pada rekening terpisah guna memastikan keamanan dan ketersediaan dana jaminan pasar.

6. Laporan Posisi Terbuka dan Keuangan

Lembaga Kliring berkewajiban menyediakan informasi posisi perdagangan (beli/jual) serta laporan keuangan komprehensif bagi setiap Anggota Kliring setiap pagi sebelum jam perdagangan dimulai. Dalam hal posisi keuangan Anggota Kliring menunjukkan kekurangan *margin*, kewajiban pembayaran harus dipenuhi selambat-lambatnya sebelum pembukaan pasar pada hari yang sama melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Perusahaan. Sebaliknya, apabila terdapat kelebihan dana, Anggota Kliring berhak melakukan penarikan dengan mengajukan surat permohonan resmi. Selain itu, PT KBI memiliki kewenangan untuk melakukan mekanisme *netting* atau perjumpaan utang, yaitu menutup kewajiban Anggota Kliring kepada Lembaga Kliring dengan jumlah yang menjadi kewajiban Lembaga Kliring kepada Anggota tersebut.

7. Pengelolaan Risiko

Dalam melakukan pengelolaan risiko, Lembaga Kliring menerapkan beberapa cara yaitu:

- Pembinaan dan pengawasan kondisi keuangan Anggota Kliring

4. Transaction Settlement

Positions may be closed through 4 (four) types of settlement:

- Liquidity/*offset* settlement
- Physical delivery
- Cash settlement
- Futures physical swap

5. Reconciliation with Depository Banks

The Clearing House performs periodic reconciliation of clearing members' account balances with depository banks, either daily or monthly, to ensure financial data accuracy. For monthly fees and service charges in non-segregated accounts, reconciliation is performed monthly. This process is conducted by reconciling reports from the Margin Deposit Bank against data from the Derivative Clearing System (SKD). For monthly membership fees and other service fee items managed in non-segregated accounts, reconciliation is performed on a monthly basis. Meanwhile, for high-priority transactions such as margin receipts and payments, as well as the management of guarantee funds and clearing funds, reconciliation is conducted daily in segregated accounts to ensure the security and availability of market guarantee funds.

6. Open Positions and Financial Reporting

The Clearing House provides comprehensive trading position (buy/sell) and financial statements to each clearing member every morning before the market opens. If a clearing member's financial position shows a margin deficit, payment obligations must be fulfilled before market opening through mechanisms set by the Company. Conversely, in the case of excess funds, clearing members may request withdrawals via official letters. PT KBI also has the authority to perform netting, offsetting members' obligations to the Clearing House with amounts owed by the Clearing House to the member.

7. Risk Management

The Clearing House applies several measures in risk management, as follows:

- Monitor and supervise clearing members' financial conditions

- b. Pemungutan dan pengelolaan margin
- c. Penyesuaian harga harian
- d. Pemisahan dana Anggota Kliring dalam rekening terpisah
- e. Dana kliring
- f. Penanggulangan cedera janji

8. Pengelolaan Agunan

Guna memberikan fleksibilitas serta memfasilitasi aktivitas di pasar Perdagangan Berjangka dan Derivatif lainnya, Lembaga Kliring dapat menerima instrumen margin awal dalam bentuk non-tunai selain mata uang Rupiah maupun Dolar AS, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan secara periodik. Pengelolaan agunan non-tunai ini dilakukan dengan standar keamanan tinggi, di mana PT KBI berkomitmen menjaga transparansi melalui penyampaian laporan pengelolaan agunan secara berkala kepada setiap Anggota Kliring.

9. Teknologi Informasi

Sebagai Lembaga Kliring Berjangka (LKB), PT KBI menyediakan infrastruktur sistem informasi terpadu yang berfungsi sebagai kanal komunikasi dan pelaporan transaksi bagi seluruh Anggota Kliring. Operasional perusahaan bertumpu pada arsitektur teknologi informasi yang andal, aman, dan terintegrasi, yang dirancang untuk memberikan layanan prima secara efisien bagi pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Sebagai wujud transparansi, PT KBI menghadirkan SITNa (Sistem Informasi Transaksi Nasabah), sebuah platform strategis yang memungkinkan nasabah dari Anggota Kliring untuk memantau detail transaksi mereka secara langsung dan mandiri.

- b. Collect and manage margins
- c. Adjust daily prices
- d. Segregate clearing members' funds into separate accounts
- e. Manage clearing funds
- f. Mitigate defaults and enforce obligations

8. Collateral Management

To provide flexibility and facilitate activity in the futures and derivatives market, the Clearing House may accept initial margin instruments in non-cash form, beyond Indonesian Rupiah or USD, according to periodically established regulations. Non-cash collateral is managed with high-security standards, and PT KBI maintains transparency by providing periodic collateral management reports to each clearing member.

9. Information Technology

As a Futures Clearing House (LKB), PT KBI provides an integrated IT infrastructure serving as a communication and reporting channel for all clearing members. Operations rely on a robust, secure, and integrated IT architecture designed to deliver high-quality services efficiently to both internal and external stakeholders. In line with transparency, PT KBI offers SITNa (Client Transaction Information System), a strategic platform allowing clients of clearing members to independently monitor detailed transaction information in real-time.

PUSAT REGISTRASI SISTEM RESI GUDANG

Warehouse Receipt System Registration Center

Dalam kapasitasnya sebagai Pusat Registrasi Sistem Resi Gudang, PT KBI memegang tanggung jawab strategis dalam melakukan penatausahaan Resi Gudang serta Derivatif Resi Gudang secara akurat dan transparan. Ruang lingkup tanggung jawab tersebut meliputi:

1. Pencatatan;
2. Penyimpanan;
3. Pemindahbukuan kepemilikan;
4. Pembebanan hak jaminan;
5. Pelaporan; dan
6. Penyediaan sistem dan jaringan informasi.

In its capacity as the Warehouse Receipt System Registration Center, PT KBI holds a strategic responsibility to manage both Warehouse Receipts and Warehouse Receipt Derivatives accurately and transparently. The scope of these responsibilities includes:

1. Recording;
2. Storage;
3. Ownership transfer;
4. Collateral encumbrance;
5. Reporting; and
6. Provision of systems and information networks.





Penatausahaan yang dijalankan oleh Pusat Registrasi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas pencatatan, pengalihan, serta pembebanan hak jaminan atas Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang, dapat dipantau secara sistematis. Memanfaatkan sistem dengan pemanfaatan teknologi terkini, menjamin data dan informasi terlindungi secara maksimal. Untuk dapat dijadikan sumber data dan informasi bagi pemangku kepentingan dalam ekosistem Resi Gudang, sesuai dengan kewenangan masing-masing.

The administration conducted by the Registration Center ensures that every activity related to recording, transferring, and encumbering collateral rights on Warehouse Receipts and Warehouse Receipt Derivatives can be monitored systematically. By leveraging systems that utilize the latest technology, we ensure that data and information are protected with maximum security. This serves as a reliable source of data and information for stakeholders within the Warehouse Receipt ecosystem, in accordance with their respective authorities.

PENJAMINAN DAN PENYELESAIAN PASAR FISIK KOMODITAS

Guaranteeing and Settling the Physical Market Commodity

Pada segmen Pasar Fisik Komoditas, penjaminan dan penyelesaian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Registrasi

PT KBI secara akurat menatausahakan dan meregistrasikan setiap transaksi yang terbentuk di Pasar *Spot* maupun Pasar *Forward* yang dilakukan oleh para anggotanya. Dokumentasi setiap kontrak mencakup rincian identitas anggota, spesifikasi komoditas, jenis dan kualitas produk, volume, serta standar kemasan. Selain itu, sistem pencatatan PT KBI juga mengamankan data mengenai harga satuan, nilai transaksi keseluruhan, rincian logistik terkait tempat dan waktu penyerahan, hingga pengelolaan dana jaminan guna memastikan pemenuhan kewajiban setiap pihak.

2. Fungsi dan Penyelesaian Penjaminan

Sebagai lembaga penjaminan dan penyelesaian transaksi di Pasar *Spot* serta *Forward*, PT KBI memegang peran krusial dalam memastikan pemenuhan hak dan kewajiban setiap peserta serta pedagang, khususnya sebagai mitigasi risiko jika terjadi wanprestasi atau cedera janji. Guna mendukung fungsi tersebut, PT KBI menyediakan infrastruktur sistem informasi penjaminan yang terkoneksi secara *real-time* dengan Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), Pedagang Fisik Komoditas, Perantara, hingga pengelola Tempat Penyimpanan. Seluruh kalkulasi hak dan kewajiban Anggota Kliring dilakukan berdasarkan transaksi bursa dan dilaporkan secara periodik melalui sistem terintegrasi. Lebih lanjut, pada layanan Pasar Fisik Komoditas Timah Murni Batangan, PT KBI menyelenggarakan fungsi kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi untuk tujuan ekspor, guna memperkuat posisi Indonesia di pasar timah global.

In the Physical Market Commodity segment, guaranteeing and settlement are carried out through the following stages:

1. Registration

PT KBI accurately manages and registers every transaction conducted by its members in both the Spot and Forward Markets. Each contract is documented with detailed information including member identities, commodity specifications, product type and quality, volume, and packaging standards. PT KBI's registration system also secures data on unit prices, total transaction value, logistics details such as delivery time and location, and the management of guarantee funds to ensure the fulfillment of each party's obligations.

2. Guarantee and Settlement Functions

As the institution responsible for guaranteeing and settling transactions in the Spot and Forward Markets, PT KBI plays a key role in ensuring that all participants and traders fulfill their rights and obligations, particularly as a risk mitigation measure against default or non-performance. To support this function, PT KBI provides a guarantee information system infrastructure connected in real-time with the Jakarta Futures Exchange (BBJ), Physical Commodity Traders, Intermediaries, and Storage Managers. All calculations of clearing members' rights and obligations are based on exchange transactions and reported periodically through the integrated system. Furthermore, for the Tin Physical Market Commodity segment, PT KBI conducts clearing and settlement guarantee functions specifically for export transactions, reinforcing Indonesia's position in the global tin market.

PRODUKTIVITAS DAN PROFITABILITAS SEGMENT USAHA

Business Segment Productivity and Profitability

Perdagangan Berjangka dan Derivatif Futures and Derivatives Trading

Kontrak Contract	2025 (lot)	2024 (lot)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (lot)	Persentase Percentage
Primer	1.590.076,00	1.166.731,00	423.345,00	36,28%
Currency	695.571,19	821.141,72	(125.570,53)	-15,29%
Index	174.734,76	293.009,38	(118.274,62)	-40,37%
Single Stock	364.993,00	206.021,00	158.972,00	77,16%
Loco & Komoditi SPA	7.542.552,86	5.261.655,39	2.280.897,47	43,35%
PALN	988.384,95	905.592,20	82.792,75	9,14%
Total	11.357.139,96	8.654.150,69	2.702.162,07	31,22%

Pada tahun 2025, total volume kontrak tercatat 11.357.139,96 lot, meningkat 31,22% YoY dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 8.654.150,69 lot.

In 2025, the total contract volume was recorded at 11,357,139.96 lots, an increase of 31.22% YoY compared to 2024 which was recorded at 8,654,150.69 lots.

(Dalam Ribuan) (in Thousands)

Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) Commodity Futures Trading	2025		2024		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Realisasi Realization (lot)	Target (lot)	Realisasi Realization (lot)	Target (lot)	Nominal (lot)	Persentase Percentage
Multilateral	1.590,07	1.176	1.166,73	1.384	423,34	36,28%
Bilateral	8.777,85	6.376	6.581,83	6.947	2.196,02	33,36%
PALN	988,38	989	905,59	249	82,79	9,14%

Adapun volume transaksi Multilateral sebesar 1.590,07 ribu lot atau mencapai 135,21% dari target RKAP PT KBI yang sebesar 1.176 ribu lot. Sementara itu volume transaksi Bilateral sebesar 8.777,85 ribu lot atau mencapai 137,67% dari target RKAP PT KBI yang sebesar 6.376 ribu lot. Untuk volume transaksi PALN sebesar 988,38 ribu lot atau mencapai 99,94% dari target RKAP PT KBI yang sebesar 989 ribu lot. Berdasarkan kinerja operasional tersebut, PT KBI mencatatkan fee efektif di tahun 2025 sebesar Rp26.250.062.741 atau mencapai 123% dari target RKAP sebesar Rp21.257.884.720.

The Multilateral transaction volume was 1,590.07 thousand lots or reached 135,21% of the PT KBI RKAP target of 1,176 thousand lots. Meanwhile, the Bilateral transaction volume was 8,777.85 thousand lots or reached 137,67% of the PT KBI RKAP target of 6,376 thousand lots. For the PALN transaction volume of 988.38 thousand lots or reached 99,94% of the PT KBI RKAP target of 989 thousand lots. Based on this operational performance, PT KBI recorded an effective fee in 2025 of IDR26,250,062,741 or reached 123% of the RKAP target of IDR21,257,884,720.

Jenis Kontrak

1. Kontrak Berjangka Komoditas Primer

Pada tahun 2025, PT KBI berhasil membukukan kontrak berjangka komoditas primer sebesar 1.590.076 lot, meningkat 423.345 lot atau sekitar 36,28% dari tahun sebelumnya yang mencapai 1.166.731 lot.

Contract Types

1. Primary Commodity Futures Contracts

In 2025, PT KBI recorded a total of 1,590,076 lots of primary commodity futures contracts, representing an increase of 423,345 lots, or approximately 36.28% compared to the previous year, which totaled 1,166.731 lots.





2. Kontrak Derivatif Sistem Perdagangan Alternatif (SPA)

Selaras dengan Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 88/BAPPEBTI/Per/01/2011, tentang Sistem Pengawasan Tunggal (*Supervisory System*) dan Sistem Perdagangan dalam Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif, PT KBI ditunjuk sebagai Administrator SPT-SPA.

Pada tahun 2025, kinerja kontrak derivatif SPA secara year-on-year (YoY) menunjukkan peningkatan pada kontrak *Single Stock* sebesar 158.972 lot atau 77,16%. Sementara itu, kontrak Loco & Komoditi SPA juga mengalami kenaikan sebesar 2.280.897,47 lot atau 43,35% YoY.

Di sisi lain, kontrak *Currency* mengalami penurunan sebesar 125.570,53 lot atau 15,29%, sedangkan kontrak *Index* mencatat penurunan yang lebih signifikan, yaitu sebesar 118.274,42 lot atau 40,37% YoY.

3. Kontrak Penyalur Amanat Nasabah Luar Negeri (PALN)

Pada tahun 2025, volume kontrak PALN tercatat 988.384,95 lot, meningkat 82.792,75 lot atau 9,14% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 905.592,20 lot. Peningkatan tersebut menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil pada transaksi nasabah luar negeri.

4. Pengelolaan Risiko

Selaras dengan mandat yang tertuang dalam Surat Edaran No. 07/SE-KBI/IV/2015 beserta perubahannya, PT KBI berkomitmen mengelola risiko secara berkelanjutan guna memastikan pemenuhan kewajiban keuangan seluruh Anggota Kliring. Dalam upaya memitigasi risiko operasional dan pasar, PT KBI bersinergi dengan PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) untuk melaksanakan audit kepatuhan, baik yang bersifat rutin maupun audit khusus terhadap Anggota Kliring yang memerlukan pembinaan intensif. Di level makro, PT KBI mendukung koordinasi strategis BAPPEBTI bersama OJK, PPATK, Polri, dan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri melalui Satuan Tugas (Satgas) penanganan transaksi ilegal guna menjaga integritas industri.

Pusat Registrasi Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang

Pada tahun 2025, Sistem Pusat Registrasi PT KBI dapat mendukung 27 (dua puluh tujuh) jenis komoditas unggulan dalam skema Sistem Resi Gudang (SRG). Komoditas tersebut meliputi sektor pangan, perkebunan, hingga pertambangan, yang terdiri dari: gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra, timah, bawang merah, ikan, pala, ayam karkas beku, gula kristal putih, kedelai, tembakau, kayu manis, agar, karagenan, mocaf, pinang dan tapioka. Seluruh jenis komoditas tersebut

2. Alternative Trading System (SPA) Derivative Contracts

In accordance with Regulation of the Head of BAPPEBTI No. 88/BAPPEBTI/Per/01/2011, regarding Single Supervisory System (SPT) and Trading System in Alternative Trading System (SPA) transactions, PT KBI has been appointed as the SPT-SPA Administrator.

In 2025, the year-on-year (YoY) performance of SPA derivative contracts showed an increase in Single Stock contracts by 158,972 lots or 77.16%. Meanwhile, SPA Loco & Commodity contracts also recorded an increase of 2,280,897.47 lots or 43.35% YoY.

Conversely, Currency contracts experienced a decline of 125,570.53 lots or 15.29%, on the other hand, currency contracts decreased by 125,570.53 lots or 15.29%, while Index contracts recorded a more significant decline of 118,274.42 lots or 40.37% YoY.

3. Foreign Customer Mandate Channeling Contract (PALN)

In 2025, the volume of PALN contracts was recorded at 988,384.95 lots, an increase of 82,792.75 lots, or 9.14%, compared to 905,592.20 lots in 2024. This increase indicates relatively stable growth in foreign customer transactions.

4. Risk Management

In line with the mandate stipulated in Circular Letter No. 07/SE-KBI/IV/2015 and its amendments, PT KBI is committed to sustainable risk management to ensure the fulfillment of all financial obligations of clearing members. To mitigate operational and market risks, PT KBI collaborates with PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) to conduct both regular and special compliance audits for clearing members requiring intensive supervision. At a macro level, PT KBI supports strategic coordination between BAPPEBTI, the OJK, PPATK, the Indonesian National Police, and the Directorate General of Domestic Trade through a Task Force addressing illegal transactions, thereby safeguarding industry integrity.

Warehouse Receipt and Warehouse Receipt Derivative Registration Center

In 2025, the PT KBI Registration Center System supported the administration of 27 (twenty-seven) leading commodities under the Warehouse Receipt System (SRG) scheme. These commodities span the food, plantation, and mining sectors, including: paddy, rice, corn, coffee, cocoa, pepper, rubber, seaweed, rattan, salt, gambier, tea, copra, tin, shallots, fish, nutmeg, frozen chicken carcass, white crystal sugar, soybeans, tobacco, and cinnamon, agar, carrageenan, mocaf, areca nut, and tapioca. All commodities have met the qualifications

telah memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dalam Permendag Nomor 24 Tahun 2023. Perluasan cakupan komoditas ini merupakan langkah strategis PT KBI dalam mendukung program prioritas Pemerintah yang berfokus pada penguatan ketahanan pangan nasional dan stabilitas harga komoditas strategis di tingkat produsen.

Perkembangan Resi Gudang

Di tahun 2025, segmen usaha Sistem Resi Gudang yang dijalankan oleh PT KBI mengalami penurunan dari 1.058 resi menjadi 546 resi di 2025. Sementara total nilai transaksi di tahun 2025 tercatat mengalami penurunan menjadi Rp1,9 triliun dibandingkan dengan tahun lalu yang tercatat sebesar Rp2,8 triliun. Total nilai transaksi pada tahun 2025 merupakan komoditas pangan, perkebunan dan hasil laut, yang menunjukkan pertumbuhan 3% dibandingkan tahun sebelumnya, untuk jenis komoditas yang sama.

Realisasi penerbitan resi gudang dalam 5 (lima) tahun terakhir dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Tahun Year	Resi Gudang Terbit Warehouse Receipt Issuance	Berat (Kg) Weight (Kg)	Nilai Transaksi (Rp) Transaction Value (IDR)
2025	546	93.377.052	1.912.258.311.300
2024	1.058	75.913.593	2.871.984.518.117
2023	483	61.558.792	971.951.609.000
2022	660	67.056.102	1.276.135.955.661
2021	634	13.912.421	517.264.877.931

Penjaminan Pasar Fisik Komoditas

Berlandaskan izin operasional dari BAPPEBTI yang diterbitkan sejak Agustus 2019, PT KBI aktif menyelenggarakan layanan kliring dan penjaminan untuk perdagangan fisik timah murni batangan di bursa. Sinergi dengan PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) memungkinkan PT KBI untuk memberikan kepastian penyelesaian transaksi bagi para pelaku pasar timah nasional. Selama kurun waktu sejak 2019 hingga saat ini, Perusahaan terus melakukan penguatan dan pengembangan kegiatan operasional di pasar fisik timah guna mendukung transparansi serta efisiensi perdagangan komoditas strategis Indonesia di pasar internasional. Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut, pada tahun 2025 PT KBI mencatatkan transaksi Pasar Fisik Timah Murni Batangan untuk luar negeri mencapai 49.606,27 ton, dengan nilai USD1.672.396.607,24 dan untuk transaksi timah dalam negeri sebesar 2.320,62 ton dengan nilai Rp1.258.973.294.165,16. Atas catatan tersebut, fee transaksi timah yang diperoleh PT KBI adalah sebesar Rp19.745.520.634,39.

required under Minister of Trade Regulation No. 24 of 2023. The expansion of the commodity scope represents a strategic step by PT KBI to supporting the Government's priority programs focused on strengthening national food security and stabilizing the prices of strategic commodities at the producer level.

Warehouse Receipt Developments

In 2025, PT KBI's Warehouse Receipt System business segment experienced a decrease from 1,058 receipts to 546 receipts. Meanwhile, the total transaction value in 2025 fell to IDR1.9 trillion, compared to IDR2.8 trillion in the previous year. The total transaction value in 2025 was driven by food, plantation, and marine commodities, representing a 3% growth compared to the previous year for the same commodity types.

A summary of warehouse receipt issuance over the past 5 (five) years is presented in the table below:

Physical Market Commodity Guarantee

Based on the operational license issued by BAPPEBTI, since August 2019, PT KBI has been actively providing clearing and guarantee services for the trading of pure tin ingots on the exchange. Through its synergy with PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), PT KBI ensures settlement certainty for participants in the national tin market. Since 2019, the Company has continuously strengthened and developed its operations in the physical tin market to support transparency and efficiency in trading Indonesia's strategic commodities in the international market. In 2025, PT KBI recorded overseas transactions of pure tin ingots totaling 49,606.27 tons, with a value of US\$ 1,672,396,607.24, while domestic tin transactions amounted to 2,320.62 tons, valued at IDR1,258,973,294,165.16. Based on these records, PT KBI earned transaction fees from tin trading amounting to IDR19,745,520,634.39.

KINERJA KEUANGAN KOMPREHENSIF

Comprehensive Financial Performance

Laporan Posisi Keuangan

Analisis dan pembahasan kinerja keuangan dalam Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Kliring Berjangka Indonesia dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember

Statement of Financial Position

The analysis and discussion of financial performance in this Annual Report have been prepared based on the Consolidated Financial Statements of PT Kliring Berjangka Indonesia and its Subsidiary for the periods



2025 serta 31 Desember 2024. Laporan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf (RSM Indonesia) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam semua hal yang material. Seluruh penyajian dan pengungkapan laporan keuangan ini telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia, mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI).

ending December 31, 2025 and December 31, 2024. The financial statements have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf (RSM Indonesia), which issued an Unqualified Opinion on all material matters. All presentation and disclosure of these financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK), including the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and the Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board – Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI).

(dalam jutaan Rupiah) (in millions of Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	Persentase Percentage
Aset Assets				
Aset Lancar Current Assets	3.075.467	2.500.018	575.448	23%
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	43.067	43.078	(12)	(0,03)%
Jumlah Aset Total Assets	3.118.533	2.543.096	575.437	23%
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity				
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	2.353.061	1.835.369	517.692	28%
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	18.249	14.420	3.829	26,5%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	2.371.310	1.849.789	521.521	28%
Jumlah Ekuitas Total Equity	747.223	693.307	53.916	8%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	3.118.533	2.543.096	575.437	23%

Aset

Per 31 Desember 2025, PT KBI membukukan jumlah aset sebesar Rp3,1 triliun, meningkat 23% atau sekitar Rp575 miliar dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp2,54 triliun. Peningkatan jumlah aset ini terutama disebabkan oleh penempatan dana anggota kliring dan penempatan transaksi aset digital.

Aset Lancar

Per 31 Desember 2025, PT KBI membukukan nilai aset lancar sebesar Rp3 Triliun yang mencerminkan kenaikan sebesar Rp575 miliar atau sekitar 23% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp2,50 triliun. Kenaikan aset lancar ini terutama didorong oleh penempatan dana anggota kliring dan penempatan transaksi aset digital.

Aset Tidak Lancar

PT KBI mencatatkan penurunan aset tidak lancar 0,03% menjadi Rp43,06 miliar dari sebelumnya Rp43,07 miliar. Perubahan aset tidak lancar ini dipengaruhi oleh Aset tetap-bersih.

Assets

As of December 31, 2025, PT KBI recorded total assets of IDR3.1 trillion, increasing by 23% or approximately IDR 575 billion from the previous year's figure of IDR2.54 trillion. The asset growth was largely driven by the placements of clearing member funds and digital asset transactions.

Current Assets

As of December 31, 2025, PT KBI recorded current assets of IDR3 trillion, demonstrating an increase of IDR575 billion or approximately 23% compared to the previous year's figure of IDR2.50 trillion. This increase in current assets was largely driven by the placements of clearing member funds and digital asset transactions.

Non-Current Assets

PT KBI's non-current assets were recorded to have decreased by 0.03% at IDR43.06 billion from IDR43.07 billion in the previous year. This fluctuation in non-current assets was primarily influenced by net fixed assets.



Liabilitas

Perusahaan mencatatkan total liabilitas sebesar Rp2,37 Triliun pada 31 Desember 2025, mengalami peningkatan sebesar Rp521 miliar atau sekitar 28% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp1,85 triliun. Kenaikan liabilitas ini terutama disebabkan oleh saldo dana anggota kliring dan transaksi aset digital.

Liabilitas Jangka Pendek Tidak Berbunga

Per 31 Desember 2025, jumlah liabilitas jangka pendek tidak berbunga Perusahaan mencatatkan kenaikan sebesar Rp517 miliar atau tumbuh 28% menjadi Rp2,35 triliun, dibandingkan posisi per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp1,83 triliun. Peningkatan ini merupakan dampak langsung dari saldo dana anggota kliring dan transaksi aset digital.

Liabilitas Jangka Panjang

Per 31 Desember 2025, PT KBI membukukan peningkatan pada jumlah liabilitas jangka panjang tidak berbunga sebesar Rp3,8 miliar menjadi Rp18,25 miliar, dibandingkan posisi per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp14,42 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh liabilitas imbalan kerja dan cadangan penjaminan kliring.

Ekuitas

Perusahaan membukukan total ekuitas sebesar Rp747,22 miliar pada tahun 2025, naik dari catatan tahun sebelumnya sebesar Rp693,30 miliar. Pertumbuhan sebesar 8% atau sekitar Rp53 miliar.

Liabilities

The Company recorded total liabilities of IDR2.37 trillion as of December 31, 2025, representing an increase of IDR521 billion or approximately 28% compared to IDR1.85 trillion recorded in 2024. This increase in liabilities mainly resulted from clearing member fund balances and digital asset transactions.

Non-Interest-Bearing Current Liabilities

As of December 31, 2025, the Company's non-interest bearing current liabilities recorded an increase of IDR517 billion, or a 28% growth to IDR2.35 trillion, compared to IDR1.83 trillion as of December 31, 2024. This increase was a direct result of clearing member fund balances and digital asset transactions.

Non-Current Liabilities

As of December 31, 2025, PT KBI recorded an increase in non-interest bearing non-current liabilities of IDR3.8 billion, reaching IDR18.25 billion, compared to IDR14.42 billion as of December 31, 2024. This increase was primarily driven by employee benefit liabilities and clearing guarantee reserves.

Equity

The Company's total equity was recorded at IDR747.22 billion in 2025, an increase from the previous year's figure of IDR 693.30 billion. This represented a 8% growth, or approximately IDR53 billion.

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Statement of Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

(dalam jutaan Rupiah) (in millions of Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	Persentase Percentage
Pendapatan Operasional Operating Income	209.097	187.466	21.630	11,5%
Beban Operasional Operating Expenses	135.779	91.395	44.383	48,5%
Laba Operasional Operating Profit	73.318	96.070	(22.753)	(24)%
Pendapatan (Beban) Non Operasional Non-Operating Income (Expenses)	2.769	2.249	519	23%
Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan Profit Before Final Tax and Income Tax	76.086	98.320	(22.234)	(23)%
Beban Pajak Final Final Tax Expenses	21.164	17.791	3.373	19%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	54.922	80.529	(25.607)	(32)%
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	55.341	73.856	(18.516)	(25)%
Pendapatan Komprehensif Lainnya Other Comprehensive Income	1.425	463	962	208%
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Profit for the Year	53.916	73.393	(19.478)	(26,5)%



Pendapatan

Perusahaan membukukan kenaikan pendapatan sebesar 11,5% menjadi Rp209,10 miliar di tahun 2025, naik dari posisi tahun sebelumnya yang sebesar Rp187,47 miliar. Pertumbuhan nilai pendapatan ini dipicu secara utama oleh fee kliring dan pendapatan aset digital.

Beban Operasional

Perusahaan mencatatkan beban operasional Perusahaan sebesar Rp135,7 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp44,3 miliar atau sekitar 48,5% dari tahun sebelumnya sebesar Rp91,39 miliar. Peningkatan beban operasional ini dipicu secara utama oleh beban penurunan nilai aset sebesar Rp34,77 miliar atau sekitar 8.769,56%, beban umum & administrasi sebesar Rp4,50 miliar atau sekitar 9,2%, dan beban manajemen & pegawai sebesar Rp4,99 miliar atau sekitar 11,07%.

Laba Tahun Berjalan

Perusahaan mencatatkan kinerja profitabilitas yang solid dengan membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp55 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025. Perolehan ini mencerminkan penurunan sebesar Rp18,5 miliar atau turun 25% dibandingkan pencapaian tahun 2024 yang sebesar Rp73,86 miliar. Penurunan laba yang signifikan ini didorong oleh beban operasional.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

PT KBI menutup tahun buku 2025 dengan performa laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp53,9 miliar, turun dari angka Rp73,39 miliar pada periode sebelumnya. Penurunan senilai Rp19 miliar atau sekitar 26,5% ini secara fundamental dipicu oleh beban operasional.

Laporan Arus Kas Konsolidasian
Consolidated Statement of Cash Flows

Uraian Description	2025	2024	(dalam jutaan Rupiah) (in millions of Rupiah)	
			Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	Persentase Percentage
Kas Bersih Diperoleh dari Kegiatan Operasi Net Cash from Operating Activities	110.482	90.552	19.930	22%
Kas Bersih Digunakan untuk Kegiatan Investasi Net Cash Used in Investing Activities	(44.195)	(172.380)	128.185	74%
Kas Bersih Digunakan untuk Kegiatan Pendanaan Net Cash Used in Financing Activities	(21.480)	(20.996)	(484)	2,3%
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year	22.043	124.870	(102.827)	(82)%
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at End of Year	66.850	22.046	44.804	203
Jumlah yang Dilaporkan pada Laporan Posisi Keuangan Amounts Reported in the Statement of Financial Position	66.834	22.043	44.791	203

Income

The Company recorded an 11.5% increase in revenue to IDR209.10 billion in 2025, up from IDR187.47 billion recorded in the previous year. This growth was primarily driven by clearing fees and digital asset revenue.

Operating Expenses

The Company recorded operating expenses of IDR135.7 billion, representing an increase of IDR44.3 billion or approximately 48.5% from the previous year's figure of IDR91.39 billion. The rise in operating expenses was primarily driven by impairment of assets losses of IDR34.77 billion, representing a significant surge of approximately 8,769.56%. Additionally, general and administrative expenses increased by IDR4.50 billion or 9.2%, while management and employee expenses rose by IDR4.99 billion or approximately 11.07%.

Profit for the Year

The Company recorded a solid profitability performance, posting a profit for the year of IDR55 billion for the year ended December 31, 2025. This figure decreased by IDR18.5 billion, or 25%, compared to the 2024 achievement of IDR73.86 billion. This significant decline in profit was driven by higher operating expenses.

Comprehensive Income for the Year

PT KBI closed the 2025 fiscal year with total comprehensive income of IDR53.9 billion, down from IDR73.39 billion in the previous period. This decline of IDR19 billion, or approximately 26.5%, was fundamentally driven by higher operating expenses.

Kas Bersih dari Kegiatan Operasi

Hingga akhir tahun 2025, Perusahaan mencatatkan arus kas bersih dari kegiatan operasi sebesar Rp110,5 miliar. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatatkan arus kas bersih dari kegiatan operasi sebesar Rp90,55 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh Pendapatan Fee, Resi Gudang, dan Pasar Lelang.

Kas Bersih untuk Kegiatan Investasi

Perusahaan mencatatkan arus kas bersih untuk kegiatan investasi sepanjang tahun 2025 sebesar Rp44 miliar, menurun 74% atau sekitar Rp128 miliar jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencatatkan arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi sebesar Rp172,38 miliar. Penurunan arus Kas bersih untuk kegiatan investasi ini dipicu oleh penerimaan piutang lainnya pihak afiliasi dan pencairan efek masing-masing sebesar Rp50 miliar dan Rp27 miliar.

Kas Bersih untuk Kegiatan Pendanaan

Jumlah arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan pendanaan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp21,5, meningkat 2,3% atau sekitar Rp476 juta jika dibandingkan dengan arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan pendanaan pada tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp21,00 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pembayaran pinjaman bank.

Net Cash from Operating Activities

As of the end of 2025, the Company recorded net cash flows from operating activities of IDR110.5 billion. This figure increased compared to the previous year, which recorded net cash flows from operating activities of IDR90.55 billion. The increase was driven by fee-based income, warehouse receipt activities, and auction market operations.

Net Cash Used in Investing Activities

The Company recorded net cash flows from investing activities of IDR44 billion in 2025, a decrease of 74% or approximately IDR128 billion compared to 2024, which recorded net cash flows used in investing activities of IDR172.38 billion. The decrease in net cash flows from investing activities was driven by the receipt of other receivables from affiliated parties and the liquidation of securities, amounting to Rp50 billion and Rp27 billion, respectively.

Net Cash Used in Financing Activities

The total net cash used in financing activities in 2025 was recorded at IDR21.5 billion, an increase of 2.3% or approximately IDR476 million compared to IDR21.00 billion in 2024. This increase was primarily driven by bank loan repayments.

RASIO KEUANGAN

Financial Ratios

Rasio Profitabilitas

Perusahaan menghitung rasio-rasio keuangan dasar berikut ini untuk mengukur tingkat kesehatan dan kinerja Perusahaan. Berikut merupakan perbandingan rasio keuangan Perusahaan untuk posisi yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024, antara lain adalah:

Profitability

The Company calculates the following key financial ratios to assess its financial soundness and operational performance. The table below presents a comparison of the Company's financial ratios for the periods ended December 31, 2025 and December 31, 2024, including but not limited to:

Uraian Description	2025	2024
Laba Tahun Berjalan terhadap Pendapatan Profit for the Year to Income	26%	39,40%
Laba Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset Profit for the Year to Total Assets	1,8%	2,90%
Laba Tahun Berjalan terhadap Jumlah Ekuitas Profit for the Year to Total Equity	7,4%	10,65%



KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Ability to Pay Debt

Kemampuan Membayar Utang

Perusahaan memantau kesehatan finansial dan komitmen pemenuhan kewajibannya melalui instrumen rasio likuiditas dan solvabilitas. Rasio likuiditas digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancar, sedangkan rasio solvabilitas memberikan gambaran komprehensif mengenai kekuatan aset PT KBI dalam menjamin seluruh kewajibannya dalam jangka panjang.

Rasio Likuiditas Liquidity Ratios

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan dalam bentuk lain) (in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	Persentase Percentage
Aset Lancar Current Assets	3.075.467	2.500.018	575.448	23%
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	2.353.061	1.835.369	517.692	28%
Rasio Likuiditas (x) Liquidity Ratio (x)	1,31	1,36	(0,05)	(3,7%)

Rasio likuiditas mencerminkan kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimiliki. Rasio ini menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kesehatan keuangan serta efektivitas pengelolaan modal kerja. Sepanjang tahun 2025, Perusahaan senantiasa menjaga tingkat likuiditas yang sehat melalui pengelolaan kas yang hati-hati, optimalisasi piutang, serta pengendalian kewajiban lancar, guna memastikan ketersediaan dana yang memadai untuk mendukung kelancaran operasional dan pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Per 31 Desember 2025, rasio likuiditas dari hasil rasio lancar Perusahaan sebesar 1,31, menurun 0,05 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 1,36x. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan liabilitas jangka pendek.

Ability to Pay Debt

The Company monitors its financial soundness and commitment to fulfilling obligations through liquidity and solvency ratios. Liquidity ratios serve as indicators of the Company's ability to meet its current liabilities, while solvency ratios provide a comprehensive view of PT KBI's asset strength in supporting the fulfillment of all its long-term obligations.

Liquidity Ratios reflect the Company's ability to meet its short-term obligations using its current assets. This ratio serves as a key indicator in assessing financial soundness and the effectiveness of working capital management. Throughout 2025, the Company maintained a soundness level of liquidity through careful cash management, optimization of receivables, and control of current liabilities, ensuring sufficient funds to support smooth operations and sustainable business growth. As of December 31, 2025, the Company's liquidity ratio, as measured by the current ratio, stood at 1.31, declining 0.05 from 1.36x in the previous year. This decrease was attributable to an increase in current liabilities.

Rasio Solvabilitas Solvency Ratios

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan dalam bentuk lain) (in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	Persentase Percentage
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	2.371.310	1.849.789	521.521	28%
Ekuitas Equity	747.223	693.307	53.916	7%
Jumlah Aset Total Assets	3.118.533	2.543.096	575.437	23%
Rasio Utang terhadap Ekuitas (DER) (x) Debt-to-Equity Ratio (DER) (x)	3,17	2,67	0,5	19%
Rasio Utang terhadap Aset (DAR) (x) Debt-to-Asset Ratio (DAR) (x)	0,76	0,73	0,03	4,1%



Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban jangka panjangnya dengan menggunakan seluruh aset yang dimiliki. Rasio ini mencerminkan tingkat *leverage* dan struktur pendanaan perusahaan, serta menunjukkan sejauh mana aktivitas operasional dibiayai oleh utang dibandingkan dengan modal sendiri. Sepanjang tahun 2025, Perusahaan senantiasa menjaga tingkat solvabilitas yang sehat melalui pengelolaan struktur modal yang optimal, pengendalian liabilitas, serta pemanfaatan sumber pendanaan yang efisien guna mendukung stabilitas keuangan dan keberlanjutan usaha. Per 31 Desember 2025, Perseroan mencatatkan DER sebesar 3,17x dan DAR 0,76x. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni DER sebesar 2,67x dan DAR 0,73x. Peningkatan ini disebabkan oleh pemenuhan atas liabilitas pada PT KBI semakin baik dikarenakan peningkatan ekuitas dan jumlah aset.

Solvency Ratios are used to measure the Company's ability to meet all its long-term obligations using total assets. These ratios reflect the Company's leverage and capital structure, as well as the extent to which operational activities are financed by debt versus equity. Throughout 2025, the Company maintained a sound level of solvency through optimal capital structure management, liability control, and efficient use of funding sources to support financial stability and business sustainability. As of December 31, 2025, the Company recorded a DER of 1.9% and a DAR of 4.1%. These figures decreased compared to the previous year, where the DER stood at 2.67x and the DAR at 0.73x. This improvement was driven by PT KBI's enhanced ability to meet its liabilities, resulting from an increase in both equity and total assets.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Capital Structure and Management Policy on Capital Structure

Rincian Struktur Modal

Dalam pengelolaan struktur modal, PT KBI menerapkan strategi integrasi yang optimal antara modal sendiri yakni ekuitas dan liabilitas. Perusahaan memiliki kebijakan internal yang komprehensif untuk memaksimalkan efisiensi struktur modal, yakni melalui optimalisasi biaya modal rata-rata tertimbang (*Weighted Average Cost of Capital*) pada tingkat minimum. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan pendanaan yang mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Adapun rincian komposisi struktur modal PT KBI selama 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Capital Structure Details

In managing its capital structure, PT KBI implements an optimal integration strategy between equity and liabilities. The Company has a comprehensive internal policy aimed at maximizing capital structure efficiency, primarily through the optimization of the Weighted Average Cost of Capital at a minimum level. This approach is designed to create a balanced funding structure that supports sustainable business growth. The composition of PT KBI's capital structure over the past 2 (two) years is as follows:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan dalam bentuk lain) (in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	Persentase Percentage
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	2.353.061	1.835.369	517.692	28%
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	18.249	14.420	3.829	27%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	2.371.310	1.849.789	521.521	28%
Ekuitas Equity	747.223	693.307	53.916	7%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	3.118.533	2.543.096	575.437	23%



Jumlah Liabilitas dan ekuitas per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3,1 Triliun naik 23% atau setara dengan Rp575 miliar dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp2,54 triliun.

Total liabilities and equity as of December 31, 2025, amounted to IDR3.1 trillion, increasing by 23% or equivalent to IDR575 billion from IDR2.54 trillion recorded in the previous year.

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Sebagai bentuk tanggung jawab dan upaya memberikan nilai tambah bagi pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya, PT KBI senantiasa mengelola aspek permodalan melalui penelaahan struktur modal secara berkala dan berkesinambungan. Proses pemantauan rutin ini dilakukan guna memastikan bahwa struktur permodalan perusahaan tetap berada pada level optimal untuk mendukung pertumbuhan bisnis serta menjaga stabilitas keuangan jangka panjang.

Management Policy on Capital Structure

As part of its commitment to creating value for shareholders and other stakeholders, PT KBI continuously manages its capital structure through periodic and ongoing reviews. This regular monitoring process ensures that the Company's capital structure remains at an optimal level to support business growth and maintain long-term financial stability.

Dasar Pemilihan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024, manajemen tidak melakukan penyesuaian atas pendekatan pengelolaan struktur permodalan. Kerangka kerja yang diterapkan, termasuk sasaran, prinsip, dan proses pengelolaan modal, tetap dijalankan secara berkesinambungan. Pendekatan tersebut diarahkan untuk memastikan kesinambungan operasional Perusahaan serta meningkatkan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Rationale for Management Policy on Capital Structure

During the fiscal years ended December 31, 2025 and December 31, 2024, management did not make adjustments to its capital structure management approach. The framework applied, including objectives, principles, and capital management processes, was maintained on an ongoing basis. This approach is designed to ensure the continuity of the Company's operations while enhancing long-term value for shareholders and other stakeholders.

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Commitment to Capital Goods Investment

Sampai dengan penutupan tahun buku 2025, Perusahaan tidak memiliki komitmen ikatan material yang berkaitan dengan pengadaan maupun investasi atas aset tetap atau barang modal.

As of the closing of the fiscal year 2025, the Company does not have any material commitments related to the acquisition or investment in fixed assets or capital goods.

REALISASI INVESTASI BARANG MODAL

Realization of Capital Goods Investment

Sampai dengan akhir tahun 2025, PT KBI telah merealisasikan investasi barang modal yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

As of the end of 2025, PT KBI had realized capital goods investments, which are presented in the table below:

Uraian Description	2025		Tujuan Investasi Investment Purpose	Persentase Realisasi terhadap Anggaran (%) Realization to Budget Percentage (%)
	Realisasi Realization	Anggaran Budget		
Aset Tetap Fixed Assets				
Perangkat Lunak Aplikasi Application Software	4.336.224.489	13.100.000.000	Mendukung Kegiatan Operasional Bisnis Supporting Business Operations	33%
Perangkat Keras Hardware	649.275.000	900.000.000	Mendukung Kegiatan Operasional Bisnis Supporting Business Operations	72%
Inventaris Kantor Inventories	174.854.167	650.000.000	Mendukung Kegiatan Operasional Bisnis Supporting Business Operations	27%
Kendaraan Bermotor Motor Vehicle	414.218.125	400.000.000	Mendukung Kegiatan Operasional Bisnis Supporting Business Operations	104%
Jumlah Total	5.574.571.780	15.050.000.000	Mendukung Kegiatan Operasional Bisnis Supporting Business Operations	37%

Pada tahun 2025, PT KBI merealisasikan investasi barang modal dengan catatan sebesar Rp5,6 miliar, atau mengalami penurunan hingga 29% dari periode sebelumnya yang tercatat sebesar Rp7,9 miliar. Penurunan realisasi investasi barang modal ini terutama disebabkan oleh realisasi inventaris kantor di tahun 2025 yang hanya mencapai 27% dari yang telah dianggarkan.

In 2025, PT KBI realized capital goods investments amounting to IDR5.6 billion, representing a decrease of 29% compared to the previous period, which recorded IDR7.9 billion. The decrease in capital expenditure realization was primarily due to the office inventory in 2025 reaching only 27% of the allocated budget.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Material Information and Facts After the Accountant's Report Date

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan tidak mencatat adanya informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan.

Throughout 2025, the Company did not record any material information or facts arising after the date of the accountant's report.

INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG
KEJADIAN YANG BERSIFAT LUAR BIASA DAN
JARANG TERJADI

Financial Information Containing Extraordinary or Infrequent Events

Tidak terdapat informasi keuangan yang luar biasa atau jarang terjadi sepanjang tahun 2025, semua transaksi keuangan yang terjadi merupakan transaksi yang wajar dalam kegiatan operasional, investasi, maupun pendanaan.

There were no financial events that were extraordinary or infrequent during 2025. All financial transactions conducted during the year were ordinary and related to operational, investment, or financing activities.

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI 2025
DAN TARGET RKAP 2026

Comparison of 2025 Realization and 2026 RKAP Targets

Dalam menjalankan arah strategisnya, Perusahaan menetapkan perencanaan kerja dan alokasi anggaran sebagai panduan utama kegiatan operasional setiap tahun. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2025 disusun sebagai pedoman pelaksanaan aktivitas usaha di seluruh lini, dengan persetujuan bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris. Proses penyusunannya dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi internal, dinamika eksternal, serta prospek dan tantangan yang berpotensi memengaruhi keberlangsungan dan kinerja usaha Perusahaan.

In pursuing its strategic direction, the Company establishes work plans and budget allocations as the primary guidelines for annual operational activities. The 2025 Company Work Plan and Budget (RKAP) was prepared as a framework for business activities across all operational lines, with joint approval from the Board of Directors and the Board of Commissioners. The preparation process was conducted comprehensively, taking into account internal conditions, external dynamics, as well as prospects and challenges that could potentially affect the Company's business continuity and performance.

Uraian Description	Target dalam RKAP 2025 2025 RKAP Target	Realisasi 2025 2025 Realization		Target RKAP 2026 2026 RKAP Target
		Nominal	Pemenuhan (%) Achievement (%)	
Pendapatan Operasional Operating Income	229.689.952.980	209.096.789.780	91%	242.819.010.459
Beban Operasional Operating Expenses	115.983.634.541	135.778.797.510	117%	125.922.440.313
Laba Operasional Operating Profit	113.706.318.439	73.317.992.270	64%	116.896.570.146
Pendapatan Neto Non Operasional Non-Operating Income – Net	(912.600.000)	2.768.513.416	403%	(469.800.000)
Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan Profit Before Final Tax and Income Tax	112.793.718.439	76.086.505.686	67%	116.426.770.146
Beban Pajak Final Final Tax Expenses	17.746.569.863	21.164.315.566	119%	21.270.850.530
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	95.047.148.576	54.922.190.120	58%	95.155.919.616

Uraian Description	Target dalam RKAP 2025 2025 RKAP Target	Realisasi 2025 2025 Realization		Target RKAP 2026 2026 RKAP Target
		Nominal	Pemenuhan (%) Achievement (%)	
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Income Tax Benefit (Expenses)	13.113.907.699	418.692.382	3%	8.242.313.023
Laba Bersih Tahun Berjalan Net Profit for the Year	81.933.240.877	55.340.882.502	67%	86.913.606.592
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	(399.475.170)	(1.425.175.449)	357%	165.297.789
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Profit for the Year	81.533.765.706	53.915.707.053	66%	86.748.308.803
Struktur Modal Capital Structure	760.739.738.000	765.472.380.293	101	793.353.145.989

PROSPEK USAHA Business Outlook

Sebagai lembaga kliring dan penjaminan transaksi derivatif, PT KBI memiliki prospek usaha yang positif seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan sistem pengelolaan risiko yang andal di pasar keuangan dan komoditas. Volatilitas harga global, perkembangan instrumen derivatif, serta kebutuhan pelaku usaha terhadap mekanisme lindung nilai (*hedging*) mendorong peran strategis PT KBI dalam menjamin penyelesaian transaksi yang tertib, aman, dan transparan. Kondisi ini membuka peluang pertumbuhan volume transaksi yang dikliringkan, baik dari pasar berjangka komoditas maupun derivatif keuangan.

Di sisi lain, dukungan regulasi dan penguatan ekosistem pasar derivatif nasional menjadi faktor pendorong utama keberlanjutan usaha Perusahaan. Upaya pemerintah dan regulator dalam memperluas inklusi pasar berjangka, meningkatkan literasi pelaku pasar, serta mendorong pendalaman pasar keuangan domestik berpotensi memperluas basis pengguna jasa kliring. Selain itu, kolaborasi dengan bursa, lembaga keuangan, dan pelaku industri terkait akan semakin memperkuat posisi PT KBI sebagai infrastruktur pasar yang krusial dalam menjaga stabilitas sistem perdagangan derivatif di Indonesia.

As a clearing and guarantee institution for derivative transactions, PT KBI has a positive business outlook, driven by the growing demand for reliable risk management systems in financial and commodity markets. Global price volatility, the development of derivative instruments, and market participants' need for hedging mechanisms reinforce PT KBI's strategic role in ensuring orderly, secure, and transparent transaction settlements. This environment creates opportunities for growth in the volume of cleared transactions, both in commodity futures and financial derivatives markets.

On the other hand, regulatory support and the strengthening of the national derivatives market ecosystem are key drivers for the Company's business sustainability. Government and regulatory efforts to expand futures market inclusion, enhance market participants' literacy, and deepen the domestic financial market have the potential to broaden the user base for clearing services. Furthermore, collaboration with exchanges, financial institutions, and industry participants will further strengthen PT KBI's position as a critical market infrastructure, maintaining stability in Indonesia's derivatives trading system.



ASPEK PEMASARAN

Marketing Aspect

Strategi Pemasaran

Sebagai entitas yang berada dalam naungan Holding BUMN Danareksa, PT KBI merumuskan strategi pemasaran yang terarah guna mendorong pertumbuhan usaha yang berkesinambungan sekaligus memperkuat ekspansi dan pengembangan bisnis Perusahaan pada periode mendatang. Sejalan dengan arah tersebut, Perusahaan menetapkan sejumlah target pemasaran yang akan dicapai sepanjang tahun 2025 sebagai berikut:

1. Mempertahankan dan Meningkatkan Posisi sebagai *Market Leader* Industri PBK di Indonesia;
2. Meningkatkan Loyalitas dan Kepuasan Pelanggan lebih baik dari Tahun Sebelumnya;
3. Meningkatkan skor *Good Corporate Governance* (GCG) minimal lebih besar dari pencapaian tahun sebelumnya;
4. Meningkatkan Jumlah Registrasi Resi Gudang;
5. Mencapai Tingkat Kesehatan Perusahaan dengan Kategori Sehat.

1. Maintain and Enhance Its Position as the Market Leader in the PBK Industry in Indonesia;
2. Increase Customer Loyalty and Satisfaction beyond the Previous Year;
3. Increase the Good Corporate Governance (GCG) score to at least a higher level than the previous year's achievement;
4. Increase the Number of Warehouse Receipt Registrations;
5. Achieve a Healthy Corporate Health Level.

Pangsa Pasar

PT KBI memegang posisi strategis sebagai entitas dominan dalam ekosistem perdagangan berjangka dan komoditas nasional. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjalankan fungsi *Central Counterparty*, PT KBI memiliki pangsa pasar yang eksklusif dalam layanan kliring penjaminan transaksi kontrak berjangka serta peran tunggal sebagai Pusat Registrasi Sistem Resi Gudang (SRG). Cakupan pasarnya semakin luas dengan pengelolaan registrasi atas 27 jenis komoditas unggulan dalam skema SRG, mulai dari sektor pangan, perkebunan, hingga pertambangan. Kedudukan ini menegaskan peran vital Perusahaan sebagai tulang punggung infrastruktur pasar keuangan yang menjaga stabilitas rantai pasok dan integrasi data komoditas di seluruh Indonesia.

Di segmen pasar fisik, pangsa pasar PT KBI semakin kokoh melalui perannya dalam kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Pasar Fisik Timah Murni Batangan untuk tujuan ekspor. Mengingat posisi Indonesia sebagai

Marketing Strategy

As an entity under the Danareksa State-Owned Enterprise Holding, PT KBI formulates a targeted marketing strategy to drive sustainable business growth while strengthening the Company's expansion and business development in the coming periods. In line with this direction, the Company set several marketing targets to be achieved throughout 2025, as follows:

Untuk mewujudkan target-target tersebut, PT KBI telah menyusun sejumlah strategi pemasaran, antara lain:

1. Peningkatan volume transaksi PBK atau multilateral, PFK, dan SRG melalui:
 - Pengembangan Pasar Fisik Emas Digital;
 - Penambahan Mitra Konvensional atau Digital dalam Sinergi BUMN atau BUMD atau Swasta;
 - Mendukung Pengembangan Produk Multilateral;
 - Menciptakan price reference bersama PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ).
2. Mendukung Pelayanan kepada Mitra dan *Stakeholder*;
3. Optimalisasi Layanan Penjaminan dan Penyelesaian melalui Pengembangan Sistem maupun Layanan;
4. Optimalisasi Sinergi PT KBI dan BAPPEBTI untuk Mengevaluasi Proses Penerbitan dan Administrasi RG (Pusreg RG).

To achieve these targets, PT KBI has formulated several marketing strategies, including:

1. Increasing transaction volumes for PBK (Multilateral), PFK, and SRG through:
 - Development of the Digital Physical Gold Market;
 - Expansion of Conventional and Digital Partnerships through Synergies with SOEs (BUMN), ROEs (BUMD), and the Private Sector;
 - Support for the Development of Multilateral Products;
 - Establishment of a Price Reference in collaboration with the Jakarta Futures Exchange (BBJ/JFX).
2. Enhancing Service Excellence for Partners and Stakeholders;
3. Optimizing Guarantee and Settlement Services through System and Service Enhancements;
4. Optimizing Synergy between PT KBI and BAPPEBTI to Evaluate the Issuance and Administration Processes of Warehouse Receipts (Warehouse Receipt Registration Center/Pusreg RG).

Market Share

PT KBI holds a strategic position as a leading entity within Indonesia's national futures and commodities trading ecosystem. As a State-Owned Enterprise (SOE) functioning as a Central Counterparty, PT KBI has an exclusive market share in clearing and guaranteeing futures contract transactions, as well as a unique role as the Warehouse Receipt System (SRG) Registration Center. Its market coverage extends further through the management of registrations for 27 key commodities under the SRG scheme, spanning sectors such as food, plantations, and mining. This position underscores the Company's vital role as a backbone of financial market infrastructure, maintaining supply chain stability and commodity data integration across Indonesia.

In the physical market segment, PT KBI's market share is further strengthened through its role in clearing and guaranteeing the settlement of Pure Tin Bar Physical Market transactions for export purposes. Considering

salah satu pemain utama dalam rantai pasok timah global, layanan ini memberikan kontribusi signifikan terhadap volume transaksi yang dikelola Perusahaan dan memastikan devisa ekspor tercatat secara transparan. Selain itu, mandat sebagai Administrator Sistem Pengawasan Tunggal dalam Sistem Perdagangan Alternatif (SPT-SPA) memperluas jangkauan pengawasan PT KBI terhadap transaksi derivatif di luar bursa, menjadikannya pilar utama yang tak tergantikan dalam menjamin integritas, likuiditas, dan kepastian hukum di pasar komoditas tanah air.

Indonesia's position as a major player in the global tin supply chain, this service significantly contributes to the volume of transactions managed by the Company and ensures that export earnings are recorded transparently. Furthermore, PT KBI's mandate as the Administrator of Single Supervisory System (SPT) in the Alternative Trading System (SPA) expands its oversight of over-the-counter derivative transactions, establishing the Company as an indispensable pillar in safeguarding integrity, liquidity, and legal certainty in the domestic commodities market.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Dividend Policy

Kebijakan Pembagian Dividen

PT Kliring Berjangka Indonesia berkomitmen untuk senantiasa memberikan nilai imbal hasil yang optimal bagi pemegang saham melalui pemenuhan hak dividen, dengan tetap menjaga stabilitas kondisi keuangan dan prioritas pertumbuhan usaha di masa depan. Selaras dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen tunai ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). PT KBI memastikan kepastian distribusi dividen kepada pemegang saham yang berhak, selambat-lambatnya 30 hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS. Prosedur ini dilaksanakan melalui usulan Direksi yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris guna menjamin pengelolaan modal yang *prudent*.

Dividend Distribution Policy

PT Kliring Berjangka Indonesia is committed to delivering optimal returns to shareholders through the fulfillment of dividend rights, while maintaining financial stability and prioritizing future business growth. In accordance with Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, cash dividend distribution is determined based on the resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS). PT KBI ensures the timely distribution of dividends to eligible shareholders, no later than 30 days after the announcement of the GMS minutes summary. This procedure is carried out based on a proposal from the Board of Directors, which has received approval from the Board of Commissioners, ensuring prudent capital management.

Pembagian Dividen

Sejalan dengan hasil ketetapan RUPS 2025, PT KBI merealisasikan pembagian dividen sebagai bentuk apresiasi atas performa Perusahaan di tahun buku 2024. Perbandingan data pembagian dividen untuk periode 2024 serta proyeksi periode 2025 tersaji dalam tabel berikut sebagai bentuk transparansi bagi para investor:

Dividend Distribution

In line with the GMS resolutions 2025, PT KBI distributed dividends as a form of appreciation for the Company's performance in the fiscal year 2024. A comparison of dividend distributions for the 2024 period and the projected 2025 period is presented in the table below, demonstrating transparency for investors:

Dividen Saham Share Dividend	2025 (untuk Dividen Saham Tahun Buku 2024) (for Dividends for the 2024 Fiscal Year)	2024 (untuk Dividen Saham Tahun Buku 2023) (for Dividends for the 2023 Fiscal Year)
Total Dividen Total Dividend	0	27,865,782.670
Tanggal Pembayaran Dividen Date of Dividend Payment	Tidak terdapat pembayaran dividen pada tahun 2025	6 Desember 2024 December 6, 2024
Dividend Payout Ratio	0	45,90%





REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Realization of Proceeds from Public Offerings

Hingga periode yang berakhir pada 31 Desember 2025, PT KBI sepenuhnya merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan tidak mencatatkan maupun memperdagangkan sahamnya di bursa efek mana pun. Sejalan dengan struktur kepemilikan tersebut, PT KBI tidak melakukan aksi korporasi berupa penawaran umum perdana saham, sehingga tidak terdapat informasi mengenai realisasi dana hasil penawaran umum yang perlu disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

As of the period ended December 31, 2025, PT KBI remains a State-Owned Enterprise (SOE) and does not list or trade its shares on any stock exchange. In line with this ownership structure, PT KBI has not conducted an initial public offering (IPO), and therefore, there is no information regarding the use of proceeds from public offerings to present in this Annual Report.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/ PELEBURAN USAHA, AKUISISI, RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

Material Information Regarding Investments, Expansion, Divestment, Mergers/Acquisitions, and Debt/Capital Restructuring

Sebagai entitas anak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berstatus non-publik, PT Kliring Berjangka Indonesia tidak melakukan aksi korporasi yang bersifat material di sepanjang tahun pelaporan. Dengan demikian, informasi mengenai investasi strategis, ekspansi, divestasi, penggabungan, peleburan, akuisisi, maupun restrukturisasi utang dan modal dinyatakan tidak tersedia untuk disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

As a non-public subsidiary of a State-Owned Enterprise (SOE), PT Kliring Berjangka Indonesia did not engage in any material corporate actions during the reporting year. Accordingly, information regarding strategic investments, business expansion, divestment, mergers, acquisitions, or debt and capital restructuring is not available for disclosure in this Annual Report.

TRANSAKSI MATERIAL, TRANSAKSI AFILIASI, DAN TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Material Transactions, Affiliated Transactions, and Transactions with Potential Conflicts of Interest

Kebijakan Mekanisme Review atas Transaksi dan Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

PT KBI menerapkan kebijakan khusus dalam mengelola transaksi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan maupun transaksi dengan pihak berelasi. Seluruh transaksi afiliasi yang dilakukan Perusahaan telah mematuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 42/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan serta PSAK No. 7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan praktik usaha yang sehat. Selain itu, Perusahaan memastikan setiap transaksi afiliasi dijalankan melalui prosedur yang memadai dan sesuai dengan prinsip kewajaran (*arm's length principle*). Untuk menjamin kepatuhan tersebut, PT KBI melakukan mekanisme penelaahan melalui proses audit oleh Komite Audit, yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

Kebijakan tentang Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor, antara lain sebagai berikut:

1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - c. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
 - b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama) yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya;

Policy on Review Mechanisms and Compliance with Applicable Regulations

PT KBI implements a specific policy to manage transactions that may involve conflicts of interest or related-party transactions. All affiliated transactions conducted by the Company comply with Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions, as well as PSAK No. 7 regarding Related Party Disclosures, while upholding prudence and sound business practices. Furthermore, the Company ensures that all affiliated transactions are executed through adequate procedures and in accordance with the arm's length principle. To guarantee compliance, PT KBI conducts a review mechanism through audits by the Audit Committee, which are subsequently reported to the Board of Commissioners.

Related-Party Policy

Related parties are individuals or entities that have a connection with the reporting entity, as follows:

1. Individuals or close family members are considered related to the reporting entity if they:
 - a. Have control or joint control over the reporting entity;
 - b. Have significant influence over the reporting entity; or
 - c. Are key management personnel of the reporting entity or its parent entity.
2. Entities are considered related to the reporting entity if any of the following conditions are met:
 - a. The entity and the reporting entity are members of the same group (parent, subsidiaries, and other subsidiaries related to another entity);
 - b. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate/joint venture that is a member of a group to which the other entity belongs);

- c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
- d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
- e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga terkait dengan entitas pelapor;
- f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka (1);
- g. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (1) (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas);
- h. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

- c. Both entities are joint ventures of the same third party;
- d. One entity is a joint venture of a third entity, and the other entity is an associate of the same third entity;
- e. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is the sponsoring entity of the plan, the sponsor is also considered related;
- f. The entity is controlled or jointly controlled by an individual identified in point (1);
- g. An individual identified in (1)(a) has significant influence over the entity or is key management personnel of the entity (or of the parent of the entity);
- h. The entity, or a member of the group to which the entity belongs, provides key management personnel services to the reporting entity or its parent entity.

Entitas Berelasi dengan Pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini didefinisikan dalam ruang lingkup Kementerian BUMN yang merupakan Pemegang Saham dari entitas.

Entities Related to the Government are entities that are controlled, jointly controlled, or significantly influenced by the Government. In this context, "Government" refers to the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs), which acts as the shareholder of the entity.

Tabel Nama Pihak Berelasi, Sifat Hubungan, dan Sifat Transaksi Afiliasi
Table of Related Parties, Nature of Relationship and Nature of Transaction

Pihak-Pihak Berelasi Related Party	Sifat Relasi dengan Perusahaan Nature of Relationship with the Company	Transaksi Transaction
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Badan Usaha Milik Negara State-Owned Enterprise	Rekening Giro dan Deposito Current Accounts and Time Deposits
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Badan Usaha Milik Negara State-Owned Enterprise	Rekening Giro dan Deposito Current Accounts and Time Deposits
PT Danareksa (Persero)	Badan Usaha Milik Negara dan Pemegang Saham Induk/ State-Owned Enterprise and Controlling Shareholder	Piutang Lain-lain dan Management Fee Other Receivables and Management Fee
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Badan Usaha Milik Negara State-Owned Enterprise	Rekening Giro dan Deposito Current Accounts and Time Deposits
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Badan Usaha Milik Negara State-Owned Enterprise	Rekening Giro dan Deposito Current Accounts and Time Deposits
PT Perusahaan Pengelola Aset	Entitas di Bawah Pengendalian yang Sama Entity Under Common Control	Beban Operasional Operating Expenses
PT Danareksa Capital	Entitas di Bawah Pengendalian yang Sama Entity Under Common Control	Beban Operasional Operating Expenses
PT Danareksa Finance	Entitas di Bawah Pengendalian yang Sama Entity Under Common Control	Beban Operasional Operating Expenses
PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	Entitas di Bawah Pengendalian yang Sama Entity Under Common Control	Beban Operasional Operating Expenses

Pihak-Pihak Berelasi Related Party	Sifat Relasi dengan Perusahaan Nature of Relationship with the Company	Transaksi Transaction
PT Kawasan Industri Medan	Entitas di Bawah Pengendalian yang Sama Entity Under Common Control	Beban Operasional Operating Expenses
PT Kawasan Berikat Nusantara	Entitas di Bawah Pengendalian yang Sama Entity Under Common Control	Beban Operasional Operating Expenses
PT Jalin Pembayaran Nusantara	Entitas di Bawah Pengendalian yang Sama Entity Under Common Control	Beban Operasional Operating Expenses
PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	Entitas di Bawah Pengendalian yang Sama Entity Under Common Control	Beban Operasional Operating Expenses
PT Kawasan Industri Makassar	Entitas di Bawah Pengendalian yang Sama Entity Under Common Control	Beban Operasional Operating Expenses
PT Nindya Karya	Entitas di Bawah Pengendalian yang Sama Entity Under Common Control	Beban Operasional Operating Expenses
PT Kawasan Industri Wijayakusuma	Entitas di Bawah Pengendalian yang Sama Entity Under Common Control	Beban Operasional Operating Expenses

Tujuan Transaksi Pihak Berelasi Purpose of Related-Party Transactions

Uraian Description	2025	2024
Saldo Balance		
Rekening Dana Jaminan Collateral Fund Account		
Deposito Time Deposits		
Rupiah	737.773.375.474	662.194.475.874
Dolar Amerika Serikat US Dollars	43.633.200.000	42.008.200.000
Jumlah Total	781.406.575.474	1.043.408.860.699
Rekening Pasar Fisik Timah Physical Tin Market Account		
Jumlah Total	58.639.481.062	121.736.225.142
Saldo Rekening Aset Digital Digital Aset Account Balance		
Giro Current Account		
Rupiah	10.819.809	14.558.160
Piutang Pihak Berelasi Related-Party Receivables	125.000.000.000	175.000.000.000
Pendapatan Operasional Operating Income	9.069.861.109	7.721.227.429
Beban Operasional Operating Expenses	139.920.041	493.676.289

PERUBAHAN KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH
SIGNIFIKAN

Significant Changes in Laws and Regulations

Sepanjang tahun 2025, terdapat kebijakan yang dikeluarkan, baik oleh regulator maupun otoritas lainnya yang mempengaruhi kinerja keuangan Perusahaan.

Throughout 2025, there were policies issued by regulators or other authorities that materially affected the Company's financial performance.

Perubahan Peraturan/Perundang-undangan Changes in Laws and Regulations	Dampak Signifikan terhadap PT KBI Significant Impact on PT KBI
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara 1. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut: a. Seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau b. Terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia. 2. Modal negara pada BUMN yang berasal dari penyertaan modal baik dalam rangka pendirian BUMN maupun perubahan, merupakan kekayaan BUMN yang menjadi milik dan tanggung jawab BUMN. 3. Anak Usaha BUMN adalah anak perusahaan BUMN dan turunannya yang didirikan oleh BUMN dalam rangka memenuhi kepentingan usaha BUMN. Law Number 1 of 2025 concerning the Third Amendment to Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises 1. State-Owned Enterprises, hereinafter abbreviated as SOEs, are business entities that meet at least one of the following provisions: a. All or the majority of its capital is owned by the State of the Republic of Indonesia through direct investment; or b. There are special rights held by the State of the Republic of Indonesia. 2. State capital in SOEs originating from capital participation, both in the framework of the establishment of an SOE or its amendment, constitutes SOE assets that are owned by and the responsibility of the SOE. 3. SOE Subsidiaries are subsidiaries of SOEs and their derivatives established by SOEs in the framework of fulfilling the business interests of the SOE.	1. PT Kliring Berjangka Indonesia (PT KBI) memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 1 huruf b yaitu terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia (Saham Seri A Dwiwarna). 2. Terkait hal tersebut akan ada perubahan susunan pemegang saham PT KBI. 3. PT Kliring Pedagangan Berjangka Indonesia (KPBI) masuk ke dalam kategori anak usaha BUMN. 4. PT KPBI perlu menyesuaikan dengan PerBUMN Nomor 1, 2 dan 3 Tahun 2023. 1. PT Kliring Berjangka Indonesia (PT KBI) meets the provisions of Article 1, No. 1, letter b, namely that there are special rights held by the State of the Republic of Indonesia (Series A Dwiwarna Share). 2. In relation to this, there will be changes to the shareholding structure of PT KBI. 3. PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia (KPBI) falls into the category of an SOE Subsidiary. 4. PT KPBI needs to comply with SOE Ministerial Regulations (PerBUMN) No. 1, 2, and 3 of 2023.

Perubahan Peraturan/Perundang-undangan Changes in Laws and Regulations	Dampak Signifikan terhadap PT KBI Significant Impact on PT KBI
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Derivatif Keuangan Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Efek. Financial Services Authority Regulation No. 1 of 2025 concerning Financial Derivatives with Securities as Underlying Assets.	- Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-120/PM.02/2025 tanggal 14 Maret 2025 hal: Persetujuan Prinsip Penyelenggara Infrastruktur Pasar Derivatif Keuangan sebagai Penyelenggara Sarana Kliring, Penjaminan, dan Penyelesaian Transaksi Derivatif Keuangan kepada PT Kliring Berjangka Indonesia. - Kewajiban Pelaporan (per-10 Januari 2025): - Harian – Laporan Margin Pialang - Bulanan - Laporan <i>Cash Settlement</i> (<i>Recap</i>) - Triwulan - Tahunan (Laporan Keuangan Tahunan Audited dan Laporan Kegiatan Tahunan) - Semua laporan yang disampaikan kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) (termasuk Laporan Manajemen Triwulanan) disampaikan juga kepada OJK. - Financial Services Authority (OJK) Letter No. S-120/PM.02/2025 dated March 14, 2025, regarding: Principle Approval for Financial Derivative Market Infrastructure Providers as Providers of Clearing, Guarantee, and Settlement Facilities for Financial Derivative Transactions to PT Kliring Berjangka Indonesia. - Reporting Obligations (effective as of January 10, 2025): - Daily – Broker Margin Report - Monthly – Cash Settlement Report (Recap) - Quarterly - Annually (Audited Annual Financial Statements and Annual Activity Report) - All reports submitted to the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI) (including Quarterly Management Reports) must also be submitted to OJK.
Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perdagangan Pasar Fisik Emas Secara Digital Di Bursa Berjangka. Commodity Futures Trading Regulatory Agency Regulation No. 3 of 2025 on Procedures for the Implementation of Digital Physical Gold Market Trading on the Futures Exchange.	- Kriteria Sistem Teknologi. - Kewajiban Lembaga Kliring Emas Digital. - Maksimal 20% (dua puluh persen) dari 20.000 gr (dua puluh ribu gram) Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau setara kas yang ditempatkan pada Lembaga Kliring Emas Digital. - Ketentuan Khusus Mengenai Dana Cadangan - Technology System Criteria. - Obligations of the Digital Gold Clearing House. - A maximum of 20% (twenty percent) of the 20,000 g (twenty thousand grams) of Gold as referred to in paragraph (1) may be in the form of cash or cash equivalents placed at the Digital Gold Clearing House. - Special Provisions Concerning Reserve Funds.
Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Persetujuan sebagai Pusat Registrasi di Bidang Sistem Resi Gudang. Commodity Futures Trading Regulatory Agency Regulation No. 4 of 2025 on Technical Guidelines for the Approval Procedures of a Registration Center within the Warehouse Receipt System.	Multi lembaga Pusat Registrasi. Multi-Registration Center System.


Perubahan Peraturan/Perundang-undangan
Changes in Laws and Regulations

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

1. Nomenklatur Kelembagaan
Sebelumnya Kementerian BUMN menjadi Badan.
2. Pengaturan BUMN(BP BUMN)Fungsi Kelembagaan
Sebelumnya Fungsi pengawasan/regulasi dan operasional/pengelolaan berada dalam satu lembaga (Kementerian BUMN) menjadi Pemisahan Fungsi antara pengawasan/regulasi oleh BP BUMN dan operasional/pengelolaan oleh Badan dan Holding dan Direksi BUMN.
3. Kepemilikan Saham Holding
Sebelumnya Seluruh saham Holding Operasional dan/atau Holding Investasi dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan Badan menjadi Seluruh saham Holding Operasional dan/atau Holding Investasi dimiliki oleh Badan.
4. Kepemilikan Saham BUMN
Sebelumnya Negara Republik Indonesia memiliki saham seri A Dwiwarna pada BUMN melalui Menteri menjadi Negara Republik Indonesia memiliki saham 1% (satu persen) pada BUMN yang merupakan saham seri A Dwiwarna melalui kepala BP BUMN dan 99% (sembilan puluh sembilan persen) pada BUMN yang merupakan saham seri B melalui Badan.
5. Hak Istimewa seri A Dwiwarna sebelumnya tidak diatur menjadi:
 - a. hak untuk menyetujui dalam RUPS;
 - b. hak untuk mengusulkan agenda RUPS;
 - c. hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen
 - d. perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. hak untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris atas persetujuan Presiden; dan hak lain yang ditetapkan; dalam anggaran dasar.
6. Organ BUMN (Komisaris)
Sebelumnya Komisaris utama Holding Investasi dan/atau Holding Operasional merupakan perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN menjadi Dihapus.
7. Penyelenggara Negara
Sebelumnya:
 - a. Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara;
 - b. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara;
 - c. Karyawan BUMN bukan merupakan penyelenggara negara menjadi Organ dan pegawai Badan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai; dan
 - d. tata kelola pemerintahan dan bisnis yang baik.
8. Kewenangan Pemeriksaan Keuangan
Sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Rangkap Jabatan
Sebelumnya tidak diatur menjadi Larangan rangkap jabatan menteri dan wakil menteri sebagai organ BUMN.

Dampak Signifikan terhadap PT KBI
Significant Impact on PT KBI

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada kepemilikan saham dan Hak Istimewa seri A Dwiwarna.

Amendments to the Company's Articles of Association, including but not limited to share ownership and Series A Dwiwarna Special Rights.

Perubahan Peraturan/Perundang-undangan
Changes in Laws and Regulations

Dampak Signifikan terhadap PT KBI
Significant Impact on PT KBI

Law No. 16 of 2025 on the Fourth Amendment to Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises.

1. Institutional Nomenclature
Former Kementerian BUMN (Ministry of SOEs) became Badan Pengaturan BUMN/ BP BUMN (SOE Regulatory Agency).
2. Institutional Functions
Previously, supervisory/regulatory and operational/management functions were combined within one institution (Ministry of SOEs), but currently there is a separation of Functions between supervision/regulation by BP BUMN and operations/management by the Agency, Holdings, and SOE Boards of Directors.
3. Holding Share Ownership
Previously, all shares of the Operational Holding and/or Investment Holding were owned by the State of the Republic of Indonesia and the Agency, now, all shares of the Operational Holding and/or Investment Holding are owned by the Agency.
4. SOE Share Ownership
Previously, the State of the Republic of Indonesia held Series A Dwiwarna shares in SOEs through the Minister. Whereas currently the State of the Republic of Indonesia holds 1% (one percent) of SOE shares as Series A Dwiwarna shares through the Head of BP BUMN and 99% (ninety-nine percent) as Series B shares through the Agency.
5. Series A Dwiwarna Special Rights
Previously not regulated. Currently has the following:
 - a. The right to grant approval in the GMS (General Meeting of Shareholders);
 - b. The right to propose GMS agendas;
 - c. The right to request and access corporate data and documents in accordance with the provisions of laws and regulations;
 - d. The right to appoint and dismiss the Board of Directors and Board of Commissioners subject to the President's approval; and
 - e. Other rights stipulated in the Articles of Association.
6. SOE Organs (Commissioners)
Previously, the President Commissioner of an Investment Holding and/or Operational Holding was a representative of the ministry administering government affairs in the field of SOEs. The position has been deleted.
7. State Officials
Previously:
 - a. Agency organs and employees were not considered state officials;
 - b. Members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of SOEs were not considered state officials;
 - c. SOE employees were not considered state officials. Currently; and
 - d. Agency organs and employees are subject to the laws and regulations governing good governance and business practices.
8. Financial Audit Authority
Previously, the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) was authorized to perform audits with specific objectives on SOEs in accordance with the provisions of laws and regulations. Whereas now the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) is authorized to perform audits on SOEs in accordance with the provisions of laws and regulations.
9. Concurrent Positions
Previously not regulated.
Currently, Ministers and Deputy Ministers are prohibited from holding concurrent positions as SOE organs.



Perubahan Peraturan/Perundang-undangan Changes in Laws and Regulations

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 26 Tahun 2025 tentang Derivatif Keuangan dengan Aset yang Mendasari berupa Produk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan PADG BI 26/2025 sebagai berikut:

1. Objek pengaturan PADG BI 26/2025 meliputi:
 - a. Derivatif PUVA yang ditransaksikan di Bursa Derivatif PUVA;
 - b. Derivatif PUVA yang ditransaksikan di SPA; dan
 - c. Derivatif PUVA yang ditransaksikan melalui mekanisme PALN.
 2. Sehubungan dengan izin prinsip yang telah didapatkan oleh PT KBI, PT KBI perlu meningkatkan perizinan sebagaimana dimaksud menjadi izin usaha Lembaga Kliring Derivatif PUVA.
 3. Pelaku dan penyelenggara infrastruktur mulai masa persiapan internal, termasuk kewajiban Lembaga Kliring Derivatif PUVA menyusun dan memberlakukan ketentuan dan prosedur (*rule book*) untuk transaksi Derivatif PUVA sebagaimana diamanatkan oleh PADG BI 26/2025.
 4. Kewajiban pelaporan Lembaga Kliring Derivatif PUVA berlaku efektif tanggal 2 Februari 2026 meliputi:
 - a. Kegiatan Penyelesaian Transaksi;
 - b. Persentase Penempatan Margin;
 - c. Posisi Keuangan;
 - d. Laba Rugi Komprehensif;
 - e. Perubahan Ekuitas;
 - f. Arus Kas;
 - g. CALK;
 - h. Rincian Rekening Dana Jaminan;
 - i. Rincian Rekening Penampungan (Escrow Account);
 - j. Keuangan Audited (pdf dan csv);
 - k. Kegiatan Tahunan;
 - l. Laporan insidental.
 5. Hal-hal teknis mengenai pelaksanaan kewajiban pelaporan akan disampaikan dalam sosialisasi berikutnya oleh BI sebelum kewajiban pelaporan berlaku efektif.
 6. Selain itu, PADG BI 26/2025 mengamanatkan bursa untuk melakukan penyesuaian kontrak berjangka sesuai dengan jenis dan spesifikasi kontrak Derivatif PUVA yang diatur dalam PADG BI 26/2025. Hal tersebut wajib menjadi perhatian PT KBI sebagai Lembaga Kliring Derivatif PUVA.
- Regulation of the Members of the Board of Governors of Bank Indonesia
 No. 26 of 2025 on Financial Derivatives with Money Market and Foreign
 Exchange Market Products as Underlying Assets.

The following are the matters that need to be considered in connection with PADG BI 26/2025:

1. The regulatory objects of PADG BI 26/2025 include:
 - a. Foreign Exchange (PUVA) Derivatives traded on the PUVA Derivatives Exchange;
 - b. PUVA Derivatives traded on the SPA (Alternative Trading System); and
 - c. PUVA Derivatives traded through the PALN (Off-Exchange Transactions) mechanism.
2. In connection with the principle permit obtained by PT KBI, PT KBI needs to upgrade the aforementioned permit into a business license for a PUVA Derivatives Clearing House.
3. Market participants and infrastructure providers shall begin the internal preparation period, including the obligation of the PUVA Derivatives Clearing House to draft and implement regulations and procedures (*rule book*) for PUVA Derivative transactions as mandated by PADG BI 26/2025.
4. Reporting obligations for the PUVA Derivatives Clearing House become effective on February 2, 2026, covering:
 - a. Transaction Settlement Activities;
 - b. Margin Placement Percentage;
 - c. Financial Position;
 - d. Comprehensive Income;
 - e. Changes in Equity;
 - f. Cash Flow;
 - g. Notes to Financial Statements (CALK);
 - h. Details of the Guarantee Fund Account;
 - i. Details of the Escrow Account;
 - j. Audited Financial Statements (PDF and CSV);
 - k. Annual Activities;
 - l. Incidental Reports.
5. Technical matters regarding the implementation of reporting obligations will be presented in a subsequent socialization session by BI before the reporting obligations take effect.
6. Furthermore, PADG BI 26/2025 mandates the exchange to adjust futures contracts in accordance with the types and specifications of PUVA Derivative contracts regulated under PADG BI 26/2025. This must be taken into account by PT KBI as a PUVA Derivatives Clearing House.

Dampak Signifikan terhadap PT KBI Significant Impact on PT KBI

1. Peningkatan izin prinsip menjadi izin usaha;
 2. Penyusunan *rule book*;
 3. Koordinasi dengan bursa sehubungan dengan penyesuaian jenis dan spesifikasi kontrak;
 4. Kewajiban Pelaporan Berkala berlaku efektif tanggal 2 Februari 2026;
 5. Penyesuaian TI (pelaporan KKS) dan MR (MR TI, MR BCM).
1. Upgrading principle approval to business license;
 2. Drafting of the rulebook;
 3. Coordination with the exchange regarding adjustments to contract types and specifications;
 4. Periodic Reporting Obligations effective as of February 2, 2026;
 5. IT Adjustments (KKS reporting) and RM (IT RM, BCM RM).

Perubahan Peraturan/Perundang-undangan Changes in Laws and Regulations

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Commodity Futures Trading Regulatory Agency Regulation No. 5 of 2025 on Procedures for the Imposition of Administrative Sanctions in the Field of Commodity Futures Trading.

Dampak Signifikan terhadap PT KBI Significant Impact on PT KBI

Dasar Pengenaan Sanksi dari segi Keuangan:

1. Pemenuhan penempatan margin 70:30;
2. Pemenuhan modal disetor;
3. Pemenuhan ekuitas; dan
4. Penyampaian laporan keuangan harian, bulanan, dan triwulan melalui e-reporting.

Jenis sanksi:

1. Bertahap (peringatan tertulis 3x, pembatasan kegiatan, pembekuan 90 hari dan 360 hari, serta pencabutan); dan
2. Tidak bertahap.

Basis for Financial-Related Sanctions:

1. Compliance with the 70:30 margin placement requirement;
2. Fulfillment of paid-up capital requirements;
3. Fulfillment of equity requirements; and
4. Submission of daily, monthly, and quarterly financial reports via e-reporting.

Types of Sanctions:

1. Graduated Sanctions (3x written warnings, business activity restrictions, 90-day and 360-day suspensions, and license revocation); and
2. Non-Graduated Sanctions.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI Changes in Accounting Policy

Tidak terdapat penerapan dari standar dan interpretasi baru/revisi, yang relevan dengan operasional Perusahaan, yang telah diterbitkan dan efektif sejak tanggal 1 Januari 2025.

Hingga akhir tahun 2025, tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan Perusahaan.

There were no applications of new or revised standards and interpretations relevant to the Company's operations, which have been issued and were effective as of January 1, 2025.

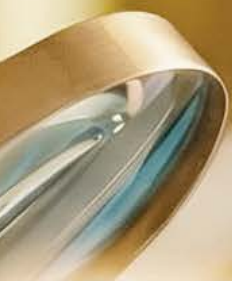
As of the end of 2025, there were no changes in accounting policies that had a significant impact on the Company's financial performance.



06.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance





KOMITMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Commitment to Corporate Governance

Dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap seluruh regulasi dan ketentuan hukum yang berlaku, PT KBI secara konsisten mengintegrasikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) ke dalam setiap aspek pengelolaan usaha, mencakup dimensi keuangan maupun operasional. Penerapan standar tata kelola tersebut diarahkan untuk membangun sistem pengambilan keputusan dan pengendalian yang efektif, sehingga kinerja Perusahaan dapat dicapai secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui kerangka tata kelola yang kokoh, PT KBI berupaya menghasilkan manfaat berkelanjutan bagi pemegang saham serta seluruh pemangku kepentingan, dengan tetap menjaga keseimbangan kepentingan di antara para *stakeholders*.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Adapun 6 (enam) aspek untuk menilai kualitas inisiatif Perusahaan di dalam proses penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola di PT KBI, di antaranya sebagai berikut:

1. Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan;
2. Pemegang Saham dan RUPS;
3. Dewan Komisaris;
4. Direksi;
5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi; dan
6. Aspek/Faktor Lainnya.

Tujuan Penerapan GCG

Sejalan dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023, penerapan prinsip-prinsip GCG yang dijalankan PT KBI dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki beberapa tujuan, antara lain:

1. Mengoptimalkan nilai PT KBI agar berdaya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan PT KBI;
2. Mendorong pengelolaan PT KBI secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perusahaan;
3. Mendorong agar Organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial PT KBI terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PT KBI;

In order to be fully compliant with all applicable regulations and legal requirements, PT KBI consistently integrates the principles of Good Corporate Governance (GCG) into every aspect of its business management, encompassing both financial and operational dimensions. The implementation of these governance standards is aimed at establishing an effective decision-making and control system, thereby enabling the Company to achieve optimal performance that is both measurable and accountable. Through a strong governance framework, PT KBI seeks to deliver sustainable value to shareholders and all stakeholders, while maintaining a balanced alignment of interests among its stakeholders.

Implementation of Corporate Governance

The Company's initiatives in implementing the principles of Corporate Governance at PT KBI are assessed based on 6 (six) key aspects, as follows:

1. Commitment to the Sustainable Implementation of Corporate Governance;
2. Shareholders and GMS;
3. Board of Commissioners;
4. Board of Directors;
5. Information Disclosure and Transparency; and
6. Other Aspects/Factors.

Objectives of GCG Implementation

In line with the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023, the implementation of GCG principles at PT KBI in the conduct of its business activities is intended to achieve several objectives, including:

1. To optimize PT KBI's value in order to enhance its competitiveness at both national and international levels, thereby enabling the Company to sustain its existence and ensure long-term continuity in achieving PT KBI's purposes and objectives;
2. To promote the professional, efficient, and effective management of PT KBI, while strengthening organizational functions and enhancing the independence of the Company's governing bodies;
3. To encourage the Company's governing bodies, in making decisions and taking actions, to be guided by high moral values, compliance with prevailing laws and regulations, and an awareness of PT KBI's social responsibility toward stakeholders as well as environmental sustainability in the areas surrounding PT KBI;

4. Meningkatkan kontribusi PT KBI dalam perekonomian nasional; dan
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Pemegang Saham dan Informasi tentang Pemegang Saham Utama/Pengendali Hingga Entitas Pemilik Akhir

PT KBI secara resmi tergabung dalam Holding PT Danareksa (Persero) setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 mengenai penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham PT Danareksa (Persero). Penggabungan tersebut dituangkan lebih lanjut dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Kliring Berjangka Indonesia Nomor 31 tertanggal 24 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, serta telah memperoleh pengesahan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0043799.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 27 Juni 2022. Sejalan dengan ketentuan tersebut, struktur kepemilikan saham PT KBI terdiri atas 1 (satu) lembar Saham Seri A (Dwi Warna) yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan 499.999 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar Saham Seri B atau sebesar 99,99% yang dimiliki oleh PT Danareksa (Persero).

4. To increase PT KBI's contribution to the national economy; and
5. To foster a conducive environment for the growth of national investment.

Shareholders and Majority/Controlling Shareholders up to the Ultimate Beneficial Owner

PT KBI officially became part of the PT Danareksa (Persero) Holding following the enactment of Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 7 of 2022 concerning the increase in state capital participation in the share capital of PT Danareksa (Persero). This integration was further formalized through the Deed of Shareholders' Resolutions of PT Kliring Berjangka Indonesia No. 31 dated June 24, 2022, drawn up before Hadijah, S.H., a Notary in Jakarta, and has obtained approval pursuant to the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0043799.AH.01.02 of 2022 dated June 27, 2022. In accordance with these provisions, PT KBI's shareholding structure consists of 1 (one) Series A Share (Dwiwarna) held by the Government of the Republic of Indonesia and 499,999 (four hundred and ninety-nine thousand nine hundred and ninety-nine) Series B Shares, representing 99.99% of the total issued and paid-up capital, held by PT Danareksa (Persero).

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

General Meeting of Shareholders

RUPS 2025

Perusahaan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham sebanyak 1 kali yang terdiri atas 1 kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dengan rincian sebagai berikut:

2025 GMS

The Company convened one General Meeting of Shareholders, comprising one Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), with the details as follows:

Informasi RUPST 2025 2025 AGMS

Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Rabu, 25 Juni 2025 Wednesday, June 25, 2025
Pukul Time	14.53 WIB
Lokasi Location	Kantor PT KBI PT KBI Head Office
Kehadiran secara fisik In-Person Attendance	Dewan Komisaris Board of Commissioners - Hernawan B. Sasongko (kuasa kepada Egy Massadiah/ Authorization granted to Egy Massadiah) - Egy Massadiah - Irman Sahroni Ahmad Direksi Board of Directors - Budi Susanto - Adiyasa Suhadibroto - Saidu Solihin
Kehadiran secara Daring Online Attendance	-
Perhitungan Suara Pihak Independen Independent Party Vote Counting	-



Keputusan dan Realisasi RUPST 2025
2025 AGMS Resolution and Realization

Mata Acara Agenda	Hasil Pemungutan Suara Voting Result	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024, serta Pengesahan Laporan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2024 Approval of the Company's Annual Report and Ratification of the Consolidated Financial Statements, Approval of the Board of Commissioners' Supervisory Report for the Fiscal Year 2024, and Ratification of the Implementation Report of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the Fiscal Year 2024, along with the Granting of Full Discharge and Release of Responsibility (<i>volledig acquit et de charge</i>) to the Board of Directors for the Company's Management Actions and to the Board of Commissioners for the Company's Supervisory Actions Carried Out During the Fiscal Year 2024	Abstain: 0 lembar saham mewakili 0% suara Tidak Setuju: 0 lembar saham mewakili 0% suara Setuju: 500.000 lembar suara mewakili 100% suara Abstain: 0 shares representing 0% of the votes Dissenting: 0 shares representing 0% of the votes Consenting: 500,000 shares representing 100 % of the votes	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada 31 Desember 2024. 2. Mengesahkan: a. Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai laporannya Nomor: 00266/2.1030/AU.1/09/1154-2/1/III/2025 tanggal 14 Maret 2025 dengan opini "wajar dalam semua hal yang material". b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang menjadi bagian dari Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai laporannya Nomor: 00948/2.1030/AU.2/12/1154-2/0/VI/2025 tanggal 4 Juni 2025 dengan opininya "wajar dalam semua hal yang material". 3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku, dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan". 1. Approved the Company's Annual Report, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the fiscal year 2024 ending December 31, 2024. 2. Ratified: a. The Consolidated Financial Statements for the fiscal year 2024 ending December 31, 2024, which had been audited by the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan under report No. 00266/2.1030/AU.1/09/1154-2/1/III/2025 dated March 14, 2025, with an unqualified opinion ("fair in all material respects"). b. The Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the fiscal year 2024 ending December 31, 2024, which formed part of the Company's Social and Environmental Responsibility Report, and had been audited by Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan under report No. 00948/2.1030/AU.2/12/1154-2/0/VI/2025 dated June 4, 2025, with an unqualified opinion ("fair in all material respects"). 3. Upon approval of the Company's Annual Report, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and ratification of the Consolidated Financial Statements and the PUMK Financial Statements for the fiscal year 2024 ending December 31, 2024, the AGMS granted full discharge and release of responsibility (<i>volledig acquit et de charge</i>) to all members of the Board of Directors for the management actions of the Company and to all members of the Board of Commissioners for the supervisory actions carried out during the fiscal year 2024 ending December 31, 2024, provided that such actions did not constitute criminal acts and/or violations of prevailing laws, regulations, and legal procedures, as reflected in the Company's books and records.	Telah terlaksana Implemented

Mata Acara Agenda	Hasil Pemungutan Suara Voting Result	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
Usulan Penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024	Abstain: 0 lembar saham mewakili 0% suara.	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024, akan dilakukan secara tersendiri oleh PT Kliring Berjangka Indonesia selaku pemegang saham mayoritas.	Telah terlaksana Implemented
Proposal of Appropriation of the Company's Consolidated Net Profit for the Fiscal Year 2024	Tidak Setuju: 0 lembar saham mewakili 0% suara Setuju: 500.000 lembar suara mewakili 100% suara Abstain: 0 shares representing 0% of the votes Dissenting: 0 shares representing 0% of the votes Consenting: 500,000 shares representing 100 % of the votes	The appropriation of the Company's Net Profit for the Fiscal Year 2024 was determined separately by PT Kliring Berjangka Indonesia as the majority shareholder.	
Penetapan Gaji Untuk Direksi dan Honorarium Untuk Dewan Komisaris Berikut Fasilitas Dan Tunjangan Lainnya Untuk Tahun 2025 serta Penetapan Tantiem Untuk Direksi Dan Dewan Komisaris Atas Kinerja Tahun Buku 2024	Abstain: 0 lembar saham mewakili 0% suara. Tidak Setuju: 0 lembar saham mewakili 0% suara Setuju: 500.000 lembar suara mewakili 100% suara Abstain: 0 shares representing 0% of the votes Dissenting: 0 shares representing 0% of the votes Consenting: 500,000 shares representing 100% of the votes	Penetapan Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus Tahun Buku 2024, Gaji untuk Direksi dan Honorarium untuk Dewan Komisaris berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun 2025, akan ditetapkan secara tersendiri oleh PT Kliring Berjangka Indonesia selaku pemegang saham mayoritas.	Telah terlaksana Implemented
Determination of Salaries for the Board of Directors and Honoraria for the Board of Commissioners, Including Other Facilities and Allowances for 2025, as well as the Determination of Bonuses for the Board of Directors and Board of Commissioners for Their Performance in the Fiscal Year 2024		The determination of bonuses/special performance incentives for the 2024 fiscal year, as well as salaries for the Board of Directors and honoraria for the Board of Commissioners, including other facilities and allowances for 2025, was made separately by PT Kliring Berjangka Indonesia as the majority shareholder.	



Mata Acara Agenda	Hasil Pemungutan Suara Voting Result	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025	Abstain: 0 lembar saham mewakili 0% suara Tidak Setuju: 0 lembar saham mewakili 0% suara Setuju: 500.000 lembar suara mewakili 100% suara Abstain: 0 shares representing 0% of the votes Dissenting: 0 shares representing 0% of the votes Consenting: 500,000 shares representing 100% of the votes	Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka melaksanakan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), serta laporan lainnya pada Tahun Buku 2025, akan ditetapkan secara tersendiri oleh PT Kliring Berjangka Indonesia selaku pemegang saham mayoritas berdasarkan usulan Dewan Komisaris. The appointment of a Public Accounting Firm to conduct the audit of the Company's Consolidated Financial Statements, the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK), and other reports for the Fiscal Year 2025 was determined separately by PT Kliring Berjangka Indonesia, as the majority shareholder, based on the recommendation of the Board of Commissioners.	Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025 Appointment of a Public Accounting Firm to Audit the Company's Consolidated Financial Statements and the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the Fiscal Year 2025

Pelaksanaan RUPS Tahun Sebelumnya

GMS Implementation in the Previous Year

RUPS 2024 2024 GMS

Tanggal RUPS Date	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
RUPSLB 4 Maret 2024 EGMS on March 4, 2024	1. Mengubah Nomenklatur Jabatan Anggota Direksi Perseroan; 2. Mengalihkan Penugasan Anggota-anggota Direksi Perseroan 1. Changed the nomenclature of the positions of the Company's Board of Directors; 2. Reassigned the duties of the members of the Company's Board of Directors.	Sudah terealisasi Implemented
RUPSLB 18 Maret 2024 EGMS on March 18, 2024	1. Mengukuhkan Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Wahab Talaohu sebagai Komisaris Independen Perseroan; 2. Mengangkat Saudara Edy Massadih sebagai Komisaris Independen Perseroan. 1. Confirmed the honorable dismissal of Mr. Wahab Talaohu as the Company's Independent Commissioner; 2. Appointed Mr. Edy Massadih as the Company's Independent Commissioner.	Sudah terealisasi Implemented
RUPSLB 25 April 2024 EGMS on April 25, 2024	Mengangkat Anggota Dewan Komisaris PT Kliring Berjangka Indonesia. Appointed a Member of the Board of Commissioners of PT Kliring Berjangka Indonesia.	Sudah terealisasi Implemented
RUPST 28 Juni 2024 AGMS on June 28, 2024	1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023, serta Pengesahan Laporan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2023; 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023; 3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024 serta tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja Tahun Buku 2023; dan 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024. 1. Approved the Company's Annual Report and ratified the Company's Consolidated Financial Statements, approved the Board of Commissioners' Supervisory Report for the fiscal year 2023, and ratified the Report on the Implementation of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the Fiscal Year 2023, as well as granted full release and discharge (<i>volledig acquit et de charge</i>) to the Board of Directors for management actions and to the Board of Commissioners for supervisory actions carried out during the Fiscal Year 2023; 2. Determined appropriation of the Company's net profit for the Fiscal Year 2023; 3. Determined salaries/honoraria along with facilities and other allowances for the Board of Directors and the Board of Commissioners for the Fiscal Year 2024, as well as tantiem for the Board of Directors and the Board of Commissioners based on performance in the Fiscal Year 2023; and 4. Appointed a Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements and the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the Fiscal Year 2024.	Sudah terealisasi Implemented
RUPSLB 20 Agustus 2024 EGMS on August 20, 2024	Menyetujui Perubahan pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha untuk Disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Approved the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning Purposes and Objectives as well as Business Activities, in order to align them with the 2020 Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) and Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector.	Sudah terealisasi Implemented
RUPSLB 25 November 2024 EGMS on November 25, 2024	Menetapkan Penggunaan Laba Bersih yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk PT Kliring Berjangka Indonesia Tahun Buku 2023. Determined the appropriation of net profit attributable to the owners of the parent entity of PT Kliring Berjangka Indonesia for the Fiscal Year 2023.	Sudah terealisasi Implemented



DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha PT KBI serta memberikan nasihat dan arahan kepada Direksi dalam penyelenggaraan pengurusan Perusahaan. Selain itu, Dewan Komisaris melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) di lingkungan PT KBI sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Proses pengangkatan anggota Dewan Komisaris PT KBI dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 96/BAPPEBTI/PER/06/2012 tanggal 26 Juni 2012, melalui mekanisme pengusulan oleh pemegang saham yang didahului dengan pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan.

Kriteria dan Prosedur Pengangkatan Dewan Komisaris

Dalam rangka memperkuat efektivitas fungsi pengawasan Perusahaan, penetapan anggota Dewan Komisaris PT KBI dilaksanakan berdasarkan kebijakan persyaratan yang mengatur kriteria, tahapan, serta mekanisme pengangkatan Dewan Komisaris, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Pengangkatan dilakukan dari calon yang diusulkan oleh pemegang saham setelah dilakukan uji kepatutan dan kelayakan oleh BAPPEBTI berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
2. Orang perseorangan yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit, atau menjadi Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun sebelum pengangkatannya. Selain itu, yang bersangkutan tidak pernah dihukum, tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau peradilan akibat melakukan tindak pidana di bidang ekonomi, antara lain perdagangan, industri, pertanian, keuangan, perbankan; dan

The Board of Commissioners performs its supervisory function over the implementation of PT KBI's business activities and provides advice and direction to the Board of Directors in the management of the Company. In addition, the Board of Commissioners evaluates the effectiveness of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles within PT KBI, as stipulated in the Articles of Association. The appointment of members of PT KBI's Board of Commissioners is carried out in accordance with the Head of BAPPEBTI Regulation No. 96/BAPPEBTI/PER/06/2012 dated June 26, 2012, through a nomination by the shareholders, which is preceded by the implementation of a fit and proper test.

Criteria and Procedures for the Appointment of the Board of Commissioners

In order to enhance the effectiveness of the Company's supervisory function, the members of PT KBI's Board of Commissioners are appointed based on a policy framework governing the requirements, criteria, stages, and mechanisms for the appointment of the Board of Commissioners, including:

1. Appointments are made from candidates proposed by the shareholders after the candidates have undergone a fit and proper test conducted by BAPPEBTI, taking into consideration integrity, dedication, an understanding of the Company management issues related to at least one management function, adequate knowledge of the Company's line of business, and the ability to allocate sufficient time to perform their duties;
2. Individuals eligible to be appointed as members of the Board of Commissioners must have full legal capacity and must never have been declared bankrupt, or have served as a member of the Board of Directors or Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt, or have been convicted of a criminal offense resulting in losses to state finances within a period of 10 (ten) years prior to their appointment. In addition, such individuals must not have been convicted of, nor be under investigation or judicial proceedings for, criminal offenses in the economic sector, including but not limited to trade, industry, agriculture, finance, and banking; and

3. Antara para Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).

Adapun pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

1. Calon anggota Dewan Komisaris melakukan *fit and proper test* oleh Pemegang Saham dan diangkat oleh Pemegang Saham, kemudian diajukan kepada BAPPEBTI untuk dilakukan *fit and proper test* sesuai Peraturan Kepala BAPPEBTI; dan
2. Calon anggota Dewan Komisaris diajukan kepada BAPPEBTI untuk dilakukan *fit and proper test* dan yang dinyatakan memenuhi persyaratan diangkat oleh Pemegang Saham. Pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan secara transparan melalui *fit and proper test* sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan oleh RUPS. Selanjutnya, profil Dewan Komisaris yang terpilih dipublikasikan pada media informasi yang dimiliki oleh PT KBI, salah satunya situs web PT KBI.

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan selama lima tahun dan dapat diperpanjang satu kali periode berikutnya. Ketentuan tersebut tidak membatasi kewenangan RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris kapan pun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berhak melakukan pengunduran diri atau dapat diberhentikan dengan sejumlah syarat, antara lain:

1. RUPS berhak sewaktu-waktu memberhentikan Dewan Komisaris dengan alasan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku dan/atau Anggaran Dasar;
2. BAPPEBTI dapat memberikan pertimbangan kepada RUPS untuk memberhentikan Dewan Komisaris dengan alasan tertentu terkait dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Seseorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh RUPS jika mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi perusahaan; dan

3. There must be no familial relationship by blood up to the third degree, either in a direct or collateral line, or by marriage (including in-law relationships), among the Commissioners or between members of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

The appointment of the Board of Commissioners may be conducted through 2 (two) mechanisms, as follows:

1. Candidates for the Board of Commissioners undergo a fit and proper test conducted by the shareholders and are appointed by the shareholders, after which the candidates are submitted to BAPPEBTI to undergo a fit and proper test in accordance with the Regulation of the Head of BAPPEBTI; and
2. Candidates for the Board of Commissioners are submitted to BAPPEBTI to undergo a fit and proper test, and candidates who are declared to have met the requirements are subsequently appointed by the shareholders. The appointment of the Board of Commissioners is carried out transparently through a fit and proper test in accordance with the system established by the GMS. Furthermore, the profiles of the appointed members of the Board of Commissioners are published through PT KBI's information media, including PT KBI's official website.

Term of Office of the Board of Commissioners

The term of office of members of the Board of Commissioners is determined to be five years and may be extended for one subsequent term. This provision does not limit the authority of the GMS to dismiss members of the Board of Commissioners at any time in accordance with applicable regulations.

Resignation and Dismissal of the Board of Commissioners

Members of the Board of Commissioners may resign or be dismissed subject to certain conditions, including the following:

1. GMS has the authority to dismiss members of the Board of Commissioners at any time for specific reasons in accordance with applicable laws and regulations and/or the Articles of Association;
2. BAPPEBTI may submit a recommendation to the GMS to dismiss members of the Board of Commissioners for specific reasons related to violations of applicable laws and regulations;
3. One or more members of the Board of Commissioners may be temporarily suspended by the GMS if they act in contravention of the Articles of Association, fail to perform their obligations, or if there are urgent reasons for the Company; and

4. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir, maka kepada yang bersangkutan tetap dimintakan pertanggungjawaban atas tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS.

Anggota Dewan Komisaris yang dikenai pemberhentian sementara wajib memperoleh pemberitahuan tertulis yang memuat alasan tindakan tersebut. Selanjutnya, RUPS paling lambat dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal pemberhentian sementara harus menetapkan keputusan apakah yang bersangkutan diberhentikan secara permanen atau dikembalikan pada jabatannya. Dalam proses tersebut, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberikan hak untuk menyampaikan pembelaan diri. Apabila RUPS tidak diselenggarakan dalam batas waktu dimaksud, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi tidak sah secara hukum. RUPS yang membahas hal tersebut dipimpin oleh salah satu pemegang saham yang dipilih dari dan oleh peserta rapat.

Susunan Anggota Dewan Komisaris

Dalam menetapkan struktur Dewan Komisaris, Pemegang Saham PT KBI memperhatikan keseimbangan dan kecukupan jumlah anggota, dengan ketentuan paling sedikit dua orang dan paling banyak tujuh orang, di mana salah satunya ditunjuk sebagai Komisaris Utama. Setiap calon anggota Dewan Komisaris diwajibkan mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Pemegang Saham sebelum pengangkatan dilakukan. Mekanisme tersebut diterapkan untuk memastikan terpenuhinya standar integritas, kompetensi, reputasi, independensi, serta pengalaman yang relevan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Adapun susunan Dewan Komisaris PT KBI per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period	Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment
Hernawan B. Sasongko	Komisaris Utama President Commissioner	11 Agustus 2023 - RUPS 2028 August 11, 2023 – GMS 2028	Ke-1 First	Hernawan B. Sasongko diangkat sebagai Komisaris Utama PT Kliring Berjangka Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan (Persero) PT Danareksa Selaku Para Pemegang Saham PT Kliring Berjangka Indonesia Nomor: SK-198/MBU/07/2023 dan Nomor: KPPS 47/014/DNRK tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama PT Kliring Berjangka Indonesia tanggal 18 Juli 2023. Hernawan B. Sasongko was appointed as President Commissioner of PT Kliring Berjangka Indonesia pursuant to the Joint Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the President Director of PT Danareksa (Persero), in their capacity as the shareholders of PT Kliring Berjangka Indonesia, No. SK-198/MBU/07/2023 and No. KPPS 47/014/DNRK, concerning Dismissal and Appointment of the President Commissioner of PT Kliring Berjangka Indonesia, dated July 18, 2023.



4. Members of the Board of Commissioners who resign either before or after the expiration of their term of office remain accountable for their actions for which accountability has not yet been accepted by the GMS.

Members of the Board of Commissioners who are subject to temporary suspension must receive written notification stating the reasons for such action. Furthermore, the GMS must, no later than thirty days from the date of the temporary suspension, determine whether the relevant member is to be permanently dismissed or reinstated to their position. In this process, the affected member of the Board of Commissioners is entitled to present a defense. Should the GMS not be convened within the time limit, the temporary suspension shall be deemed legally invalid. The GMS convened to deliberate on such matter shall be chaired by one of the shareholders elected from and by the meeting participants.

Composition of the Board of Commissioners

In determining the composition of the Board of Commissioners, PT KBI's shareholders take into account the balance and adequacy of the number of members, with a minimum of two and a maximum of seven members, one of whom is appointed as President Commissioner. Each candidate for membership of the Board of Commissioners is required to undergo a fit and proper test conducted by the shareholders prior to appointment. This mechanism is implemented to ensure compliance with standards of integrity, competence, reputation, independence, and relevant experience in the performance of the supervisory function. The composition of PT KBI's Board of Commissioners as of December 31, 2025 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period	Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment
Fajar Massadiah Egy	Komisaris Independen Independent Commissioner	4 Maret 2024 - RUPS 2029 March 4, 2024 –GMS 2029	Ke-1 First	Fajar Massadiah Egy diangkat sebagai Komisaris Independen PT Kliring Berjangka Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan (Persero) PT Danareksa Selaku Para Pemegang Saham PT Kliring Berjangka Indonesia Nomor: SK-55/MBU/03/2024 dan Nomor: KPPS-5/DR/DIRUT/03/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Kliring Berjangka Indonesia tanggal 4 Maret 2024. Fajar Massadiah Egy was appointed as Independent Commissioner of PT Kliring Berjangka Indonesia pursuant to the Joint Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the President Director of PT Danareksa (Persero), in their capacity as the shareholders of PT Kliring Berjangka Indonesia, No. SK-55/MBU/03/2024 and No. KPPS-5/DR/DIRUT/03/2024, concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Kliring Berjangka Indonesia, dated March 4, 2024.
Irman Sahroni Ahmad	Komisaris Independen Independent Commissioner	19 April 2024 - RUPS 2029 April 19, 2024 – GMS 2029	Ke-1 First	Irman Sahroni Ahmad diangkat sebagai Komisaris Independen PT Kliring Berjangka Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan (Persero) PT Danareksa Selaku Para Pemegang Saham PT Kliring Berjangka Indonesia Nomor: SK-100/MBU/04/2024 dan Nomor: KPPS-7/DR/DIRUT/04/2024 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Kliring Berjangka Indonesia tanggal 19 April 2024. Irman Sahroni Ahmad was appointed as Independent Commissioner of PT Kliring Berjangka Indonesia pursuant to the Joint Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the President Director of PT Danareksa (Persero), in their capacity as the shareholders of PT Kliring Berjangka Indonesia, No. SK-100/MBU/04/2024 and No. KPPS-7/DR/DIRUT/04/2024, concerning Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Kliring Berjangka Indonesia, dated April 19, 2024.

Adapun profil seluruh anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

The profiles of all members of the Board of Commissioners are presented in the Company Profile Chapter of this Annual Report.

Independensi Dewan Komisaris

Setiap anggota Dewan Komisaris PT KBI menjalankan tugasnya secara mandiri tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun. Untuk menjaga independensi tersebut, anggota Dewan Komisaris tidak memiliki keterkaitan dalam bentuk hubungan kepengurusan, kepemilikan saham, maupun hubungan lain dengan sesama anggota Dewan Komisaris, pemegang saham, ataupun dengan PT KBI yang berpotensi mengganggu objektivitas dalam pengambilan keputusan. Susunan Dewan Komisaris PT KBI juga telah disesuaikan dengan ketentuan yang mensyaratkan keberadaan Komisaris

Independence of the Board of Commissioners

Each member of PT KBI's Board of Commissioners performs their duties independently, free from any influence or pressure from any party. To safeguard such independence, members of the Board of Commissioners have no affiliations in the form of management roles, share ownership, or other relationships with other members of the Board of Commissioners, shareholders, or with PT KBI that could potentially compromise objectivity in decision-making. The composition of PT KBI's Board of Commissioners has also been aligned with the requirement for the presence of Independent Commissioners of at least one person or





Independen sekurang-kurangnya satu orang atau paling sedikit 20% dari total anggota Dewan Komisaris, dengan kriteria yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak menjabat sebagai Direksi di perusahaan terafiliasi;
2. Tidak bekerja pada Pemerintah termasuk di departemen, lembaga dan kemiliteran dalam kurun waktu tiga tahun terakhir;
3. Tidak bekerja di Perusahaan atau afiliasinya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir;
4. Tidak mempunyai keterikatan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan atau perusahaan lainnya yang menyediakan jasa dan produk kepada Perusahaan dan afiliasinya;
5. Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang menghalangi atau mengganggu kemampuan Dewan Komisaris yang berasal dari kalangan di luar Perusahaan untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup Perusahaan; dan
6. Tidak berasal dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa PT KBI yang menimbulkan pertentangan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung.

Tugas dan Tanggung Jawab

Pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dilakukan secara kolektif dengan koordinasi berada di bawah pimpinan Komisaris Utama. Dalam menjalankan perannya, Dewan Komisaris berpedoman pada Anggaran Dasar PT KBI, *Board Manual*, Pedoman Perilaku PT KBI, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, efektivitas, transparansi, independensi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kewajaran. Guna memastikan kelancaran pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisaris Utama selaku Ketua Dewan Komisaris menetapkan pembagian tugas dan area pengawasan kepada masing-masing anggota sesuai peran dan kewenangannya. Secara umum, ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris PT KBI meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat atau masukan kepada Direksi dalam mengelola PT KBI;
2. Memantau pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Kebijakan yang ditetapkan RUPS, serta ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku;
3. Melakukan pemeriksaan dan penelaahan atas Laporan Periodik dan Laporan Tahunan yang disusun oleh Direksi;
4. Memastikan agar sistem pengendalian internal, sistem pengelolaan informasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dijalankan secara efektif;

not less than 20% of the total members of the Board of Commissioners, with the following criteria:

1. Does not serve as a member of the Board of Directors in an affiliated company;
2. Has not been employed by the Government, including ministries, institutions, or the military, within the past three years;
3. Has not been employed by the Company or its affiliates within the past three years;
4. Does not have any financial relationships, whether directly or indirectly, with the Company or other companies that provide services or products to the Company and its affiliates;
5. Is free from interests, business activities, or other relationships that may impede or interfere with the ability of a member of the Board of Commissioners from outside the Company to act or think independently within the Company; and
6. Does not originate from companies that utilize PT KBI's services, which could cause conflicts of interest, either directly or indirectly.

Duties and Responsibilities

The Board of Commissioners executes its functions collectively, with coordination carried out under the leadership of the President Commissioner. In carrying out its role, the Board of Commissioners is guided by PT KBI's Articles of Association, the Board Manual, PT KBI's Code of Conduct, and applicable laws and regulations, while upholding the principles of professionalism, effectiveness, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness. To ensure the effective performance of its supervisory function, the President Commissioner, in his capacity as Chairman of the Board of Commissioners, determines the allocation of duties and areas of supervision to each member in accordance with their respective roles and authorities. In general, the scope of duties and responsibilities of PT KBI's Board of Commissioners includes the following:

1. Supervise and provide advice or input to the Board of Directors in managing PT KBI;
2. Monitor the implementation of the Company's Work Plan and Budget, policies determined by the General Meeting of Shareholders, and compliance with applicable laws and regulations;
3. Examine and review Periodic Reports and the Annual Report prepared by the Board of Directors;
4. Ensure that internal control systems, information management systems, and compliance with applicable laws and regulations are implemented effectively;

5. Memantau pelaksanaan praktik *good corporate governance* yang ditetapkan PT KBI agar berjalan secara efektif;
6. Memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal; dan
7. Melakukan evaluasi dan menilai secara berkala, serta memberikan rekomendasi sehubungan dengan risiko usaha.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Dalam rangka memperkuat efektivitas fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Manajemen, Dewan Komisaris PT KBI menetapkan Piagam Dewan Komisaris yang telah disahkan dan ditandatangani oleh seluruh anggota pada 17 Agustus 2024. Selain itu, PT KBI juga memberlakukan Pedoman Kerja (*Board Manual*) yang ditandatangani bersama oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada 24 November 2024, sebagai rujukan utama dalam proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing organ. *Board Manual* tersebut disusun melalui pengintegrasian ketentuan peraturan perundang-undangan, praktik terbaik tata kelola perusahaan, prinsip hukum korporasi, arahan Pemegang Saham, serta Anggaran Dasar PT KBI yang mengatur tata kerja Dewan Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris PT KBI menyelenggarakan rapat secara berkala dengan frekuensi paling sedikit satu kali dalam setiap bulan, sebagaimana diprasyaratkan dalam Anggaran Dasar PT KBI. Pelaksanaan rapat tersebut difasilitasi oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang bertanggung jawab membantu kelancaran rapat sekaligus menyiapkan agenda pembahasan. Penjadwalan rapat Dewan Komisaris mengacu pada kalender kerja dasar yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan penentuan akhir mengenai waktu, tempat, dan tanggal rapat disampaikan kepada seluruh anggota paling lambat tujuh hari sebelum rapat dilaksanakan. Agenda umum rapat Dewan Komisaris selanjutnya diinformasikan dan terdokumentasi dalam *event calendar* PT KBI sebagai sarana koordinasi dan referensi bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.

5. Monitor the implementation of good corporate governance practices adopted by PT KBI to ensure their effective execution;
6. Ensure the effectiveness of the external auditor's duties; and
7. Conduct periodic evaluations and assessments, as well as provide recommendations to business risks.

Board Manual of the Board of Commissioners

In order to strengthen the effectiveness of its supervisory and advisory functions to Management, the Board of Commissioners of PT KBI established a Board of Commissioners Charter, which was approved and signed by all members on August 17, 2024. In addition, PT KBI has implemented a Board Manual, jointly signed by the Board of Directors and the Board of Commissioners on November 24, 2024, serving as the primary reference for decision-making processes as well as the execution of the duties and authorities of each corporate organ. The Board Manual was developed through the integration of applicable laws and regulations, corporate governance best practices, principles of corporate law, directions from the shareholders, and PT KBI's Articles of Association governing the working procedures of the Board of Commissioners.

Meeting of the Board of Commissioners

To support the performance of its supervisory function, PT KBI's Board of Commissioners holds regular meetings with a frequency of at least once a month, as required under PT KBI's Articles of Association. Such meetings are facilitated by the Secretary of the Board of Commissioners, who is responsible for ensuring the smooth execution of the meetings as well as preparing the meeting topics. The meeting scheduling refers to a basic work calendar that has been determined in advance, with final confirmation of the time, venue, and date of each meeting communicated to all members no later than seven days prior to the meeting. The general agenda of the Board of Commissioners meetings is subsequently communicated and documented in PT KBI's event calendar as a means of coordination and reference for all members of the Board of Commissioners.

Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun buku 2025, Dewan Komisaris melaksanakan rapat internal sebanyak 12 (dua belas) kali serta mengadakan 12 (dua belas) kali rapat bersama Direksi. Rincian jumlah rapat serta tingkat kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris diuraikan sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Hernawan B. Sasongko	Komisaris Utama President Commissioner	12	12	100%
Fajar Massadiyah Egy	Komisaris Independen Independent Commissioner	12	12	100%
Irman Sahroni Ahmad	Komisaris Independen Independent Commissioner	12	12	100%

Adapun agenda Rapat Dewan Komisaris sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Implementation of the Meeting of the Board of Commissioners

In the fiscal year 2025, the Board of Commissioners held a total of 12 (twelve) internal meetings and 12 (twelve) joint meetings with the Board of Directors. Details of the number of meetings and the attendance rate of each member of the Board of Commissioners are presented as follows:

The following are the meeting agendas and participants of the Board of Commissioners throughout 2025:

Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participant
15 Januari 2025 January 15, 2025	1. Laporan Kinerja PT KBI Tahun 2024; 2. Pembahasan RKAP PT KBI Tahun 2025; 3. Pembahasan Usulan dari Bursa Berjangka Jakarta terkait Perubahan Mekanisme Pembagian Pendapatan. 1. Performance Report of PT KBI for 2024; 2. Discussion of PT KBI's 2025 Work Plan and Budget (RKAP) 3. Discussion of proposals from the Jakarta Futures Exchange regarding changes to the income-sharing mechanism.	Dewan Komisaris dan Direksi PT KBI PT KBI's Board of Commissioners and Board of Directors
28 Februari 2025 February 28, 2025	1. Laporan Kinerja Perusahaan PT KBI bulan Januari 2025; 2. <i>Update</i> Pengadaan Auditor Forensik Independen; 3. Isu Strategis Lainnya. 1. Performance Report of PT KBI for January 2025; 2. Update on the procurement of an Independent Forensic Auditor; 3. Other strategic issues.	Dewan Komisaris dan Direksi PT KBI PT KBI's Board of Commissioners and Board of Directors
21 Maret 2025 March 21, 2025	1. Laporan Kinerja PT KBI bulan Februari 2025; 2. <i>Update</i> Kerja Sama PT KBI dengan Bursa CPO; 3. <i>Update</i> Pengadaan Auditor Forensik di PT KPBI; 4. Pembahasan Perubahan Struktur PT KBI; 5. Agenda Strategis Lainnya. 1. Performance Report of PT KBI for February 2025; 2. Update on PT KBI's cooperation with the CPO Exchange; 3. Update on the procurement of a Forensic Auditor at PT KPBI; 4. Discussion on changes to PT KBI's corporate structure; 5. Other strategic agenda items.	Dewan Komisaris dan Direksi PT KBI PT KBI's Board of Commissioners and Board of Directors
28 April 2025 April 28, 2025	1. Laporan Kinerja PT KBI bulan Maret 2025; 2. <i>Update</i> Kerja Sama PT KBI dengan Bursa CPO; 3. <i>Update</i> Pengadaan Auditor Forensik di PT KPBI; 4. Pembahasan Perubahan Struktur PT KBI; 5. Agenda Strategis Lainnya. 1. Performance Report of PT KBI for March 2025; 2. Update on PT KBI's cooperation with the CPO Exchange; 3. Update on the procurement of a Forensic Auditor at PT KPBI; 4. Discussion on changes to PT KBI's corporate structure; 5. Other strategic agenda items.	Dewan Komisaris dan Direksi PT KBI PT KBI's Board of Commissioners and Board of Directors

Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participant
26 Mei 2025 May 26, 2025	1. Laporan Kinerja Keuangan PT KBI s.d. April 2025; 2. <i>Update</i> Kerja Sama PT KBI dengan Bursa CPO; 3. <i>Update</i> Audit Forensik di PT KPBI; 4. Isu strategis lainnya.	Dewan Komisaris dan Direksi PT KBI PT KBI's Board of Commissioners and Board of Directors
25 Juni 2025 June 25, 2025	1. Laporan Kinerja PT KBI s.d Mei 2025; 2. <i>Update Progress</i> Kerja Sama PT KBI dengan Bursa CPO; 3. <i>Update Progress</i> Emas Digital; 4. Isu strategis lainnya.	Dewan Komisaris dan Direksi PT KBI PT KBI's Board of Commissioners and Board of Directors
30 Juli 2025 July 30, 2025	1. Laporan Kinerja PT KBI s.d. Juni 2025; 2. <i>Update Progress</i> Kerja Sama PT KBI dengan Bursa CPO; 3. <i>Update Progress</i> Emas Digital; 4. Isu strategis lainnya.	Dewan Komisaris dan Direksi PT KBI PT KBI's Board of Commissioners and Board of Directors
28 Agustus 2025 August 28, 2025	1. Tindak lanjut rapat sebelumnya; 2. Laporan Kinerja PT KBI s.d. Juli 2025; 3. <i>Update Progress</i> Kerja Sama PT KBI dengan Bursa CPO; 4. <i>Update Progress</i> Emas Digital; 5. <i>Update Progress</i> rencana PT KBI sebagai Lembaga Kliring Perdagangan Aset Kripto; 6. Isu strategis lainnya.	Dewan Komisaris dan Direksi PT KBI PT KBI's Board of Commissioners and Board of Directors
24 September 2025 September 24, 2025	1. Tindak lanjut rapat sebelumnya; 2. Laporan Kinerja Perusahaan s.d. bulan Agustus 2025; 3. <i>Update Progress</i> kerjasama PT KBI dengan Bursa CPO; 4. <i>Update Progress</i> emas digital; 5. <i>Update Progress</i> rencana PT KBI sebagai Lembaga Kliring Perdagangan Aset Kripto; 6. <i>Update Progress</i> capaian KPI Direksi terkait implementasi sinergi pada Holding Danareksa; 7. Isu strategis lainnya.	Dewan Komisaris dan Direksi PT KBI PT KBI's Board of Commissioners and Board of Directors

Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participant
31 Oktober 2025 October 31, 2025	1. Tindak lanjut rapat sebelumnya; 2. Laporan Kinerja Perusahaan s.d bulan September 2025; 3. Laporan Manajemen Risiko s.d bulan September 2025; 4. <i>Update Progress</i> kerjasama PT KBI dengan Bursa CPO; 5. <i>Update Progress</i> capaian KPI Direksi terkait implementasi sinergi pada Holding Danareksa; 6. Isu strategis lainnya. 1. Follow-up on the previous meeting; 2. Performance Report of the Company up to September 2025; 3. Risk Management Report up to September 2025; 4. Update on the progress of PT KBI's cooperation with the CPO Exchange; 5. Update on the achievement of Directors' KPIs related to the implementation of synergy within the Danareksa Holding; 6. Other strategic issues.	Dewan Komisaris dan Direksi PT KBI PT KBI's Board of Commissioners and Board of Directors
26 November 2025 November 26, 2025	1. Tindak lanjut rapat sebelumnya; 2. Laporan Kinerja Perusahaan sampai dengan bulan Oktober 2025; 3. Laporan Manajemen Risiko sampai dengan bulan Oktober 2025; 4. <i>Update Progress</i> capaian KPI Direksi terkait implementasi sinergi pada Holding Danareksa; 5. <i>Update Progress</i> Pembayaran dari Mitra PT KPBI; 6. Isu strategis lainnya. 1. Follow-up on the previous meeting; 2. Performance Report of the Company up to October 2025; 3. Risk Management Report up to October 2025; 4. Update on the achievement of Directors' KPIs related to the implementation of synergy within the Danareksa Holding; 5. Update on payment progress from PT KPBI partners; 6. Other strategic issues.	Dewan Komisaris dan Direksi PT KBI PT KBI's Board of Commissioners and Board of Directors
19 Desember 2025 December 19, 2025	1. Tindak lanjut rapat sebelumnya; 2. Laporan Kinerja Perusahaan sampai dengan bulan November 2025; 3. Laporan Manajemen Risiko sampai dengan bulan November 2025; 4. <i>Update Progress</i> capaian KPI Direksi terkait implementasi sinergi pada Holding Danareksa; 5. <i>Update Progress</i> Pembayaran dari Mitra PT KPBI; 6. Isu strategis lainnya. 1. Follow-up on the previous meeting; 2. Performance Report of the Company up to November 2025; 3. Risk Management Report up to November 2025; 4. Update on the achievement of Directors' KPIs related to the implementation of synergy within the Danareksa Holding; 5. Update on payment progress from PT KPBI partners; 6. Other strategic issues.	Dewan Komisaris dan Direksi PT KBI PT KBI's Board of Commissioners and Board of Directors

Sedangkan agenda rapat dan frekuensi rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan yang Baik di bagian Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi di dalam Laporan Tahunan ini.

Meanwhile, the agendas and frequency of the joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors are presented in the Good Corporate Governance chapter, under the section on Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors, in this Annual Report.

Program Pengenalan bagi Dewan Komisaris

Sesuai dengan ketentuan dalam *Board Manual*, PT KBI menyelenggarakan program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai PT KBI kepada anggota Dewan Komisaris baru, sehingga mereka memiliki landasan pengetahuan yang memadai terkait kondisi, kegiatan, dan tata kelola Perusahaan. Pembekalan awal tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas serta kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2025, PT KBI tidak melakukan pergantian dan penambahan anggota Dewan Komisaris, sehingga tidak terdapat program pengenalan Perusahaan bagi Dewan Komisaris.

Pelatihan atau Peningkatan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris

Kebijakan terkait pelatihan bagi Dewan Komisaris diatur dalam S-29/DKU.MBU/06/2023 tertanggal 9 Juni 2023. Informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan jenis pelatihan yang diikuti oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris disajikan dalam Bab Profil Perusahaan, khususnya pada bagian Profil Dewan Komisaris, dalam Laporan Tahunan ini.

Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki keterkaitan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham, maupun hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan/atau pemegang saham, serta tidak memiliki hubungan apa pun dengan PT KBI yang berpotensi mengganggu independensinya dalam menjalankan tugas sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG). Penunjukan Komisaris Independen bertujuan untuk memastikan terciptanya pengawasan yang objektif dan tidak memihak, sekaligus menjaga prinsip kewajaran serta menyeimbangkan kepentingan pemegang saham pengendali dengan perlindungan terhadap hak pemegang saham minoritas, termasuk pemegang saham publik dan para pemangku kepentingan lainnya.

Komposisi Komisaris Independen

Pada tahun 2025, PT KBI memiliki 2 (dua) orang Komisaris Independen, yaitu Bapak Fajar Massadiah Egy yang diangkat pada 4 Maret 2024 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Para Pemegang Saham Nomor SK-55/MBU/03/2024 serta Keputusan Direktur Utama Perusahaan (Persero) PT Danareksa Nomor KPPS-5/DR/DIRUT/03/2024, dan Bapak Irman Sahroni Ahmad yang menjabat sejak 19 April

Induction Program for the Board of Commissioners

In accordance with the provisions stipulated in the Board Manual, PT KBI organizes an induction program for newly appointed members of the Board of Commissioners. This program is intended to provide new members of the Board of Commissioners with a comprehensive understanding of PT KBI, thereby equipping them with adequate knowledge of the Company's condition, operations, and governance practices. Such initial induction serves as an important factor in supporting the effectiveness and smooth performance of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners. In 2025, PT KBI did not carry out any changes or appointments to the members of the Board of Commissioners; therefore, no induction program for the Board of Commissioners was conducted during the year.

Training and Competency Development Programs for the Board of Commissioners

Policies related to training for the Board of Commissioners are stipulated in Letter No. S-29/DKU.MBU/06/2023 dated June 9, 2023. Further information on the implementation and types of training attended by each member of the Board of Commissioners is presented in the Company Profile Chapter, specifically in the Profile of the Board of Commissioners section, of this Annual Report.

Independent Commissioners

An Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who has no financial relationship, management relationship, share ownership, or familial relationship with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or shareholders, and who has no relationship of any kind with PT KBI that could potentially impair their independence in performing their duties in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG). The appointment of Independent Commissioners is intended to ensure the establishment of objective and impartial oversight, while upholding the principle of fairness and balancing the interests of controlling shareholders with the protection of the rights of minority shareholders, including public shareholders and other stakeholders.

Composition of Independent Commissioners

In 2025, PT KBI had two Independent Commissioners, namely Mr. Fajar Massadiah Egy, who was appointed on March 4, 2024 pursuant to the Deed of Shareholders' Resolutions of the Minister of State-Owned Enterprises in his capacity as Shareholder No. SK-55/MBU/03/2024 and the Decree of the President Director of PT Danareksa (Persero) No. KPPS-5/DR/DIRUT/03/2024, and Mr. Irman Sahroni Ahmad, who has served since April 19, 2024



2024 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Para Pemegang Saham Nomor SK-100/MBU/04/2024 serta Keputusan Direktur Utama Perusahaan (Persero) PT Danareksa Nomor KPPS-7/DR/DIRUT/04/2024. Komposisi Komisaris Independen PT KBI tersebut telah memenuhi ketentuan jumlah minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 mengenai Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.

Kriteria Komisaris Independen

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 120, Komisaris Independen didefinisikan sebagai pihak yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi, maupun anggota Dewan Komisaris lainnya. Tanggung jawab utama Komisaris Independen antara lain mendorong penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di PT KBI melalui penguatan peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi secara efektif, serta berkontribusi dalam penciptaan nilai tambah bagi PT KBI. Dalam menjalankan perannya, Komisaris Independen PT KBI wajib memenuhi sejumlah kriteria independensi sebagai berikut:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham;
2. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya;
3. Tidak memiliki hubungan dengan anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BUMN yang bersangkutan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

PT KBI menunjuk Fajar Massadiyah Egy dan Irman Sahroni Ahmad sebagai Komisaris Independen. Beliau merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi maupun pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan PT KBI.

pursuant to the Deed of Shareholders' Resolutions of the Minister of State-Owned Enterprises in his capacity as Shareholder No. SK-100/MBU/04/2024 and the Decree of the President Director of PT Danareksa (Persero) No. KPPS-7/DR/DIRUT/04/2024. The composition of PT KBI's Independent Commissioners is compliant with the minimum requirements as stipulated in the of the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 dated March 24, 2023 concerning Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

Criteria for Independent Commissioners

Referring to Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, particularly Article 120, an Independent Commissioner is defined as a party who is not affiliated with the controlling shareholders, members of the Board of Directors, or other members of the Board of Commissioners. The primary responsibilities of Independent Commissioners include promoting the implementation of Good Corporate Governance principles at PT KBI by strengthening the role of the Board of Commissioners in effectively performing its supervisory and advisory functions to the Board of Directors, as well as contributing to the creation of added value for PT KBI. In the execution of their roles, PT KBI's Independent Commissioners are required to meet the following independence criteria:

1. Have no financial, management, or share ownership relationships;
2. Have no familial relationships with other members of the Board of Commissioners or Supervisory Board; and
3. Have no relationship with members of the Board of Directors and/or controlling shareholders, or with the relevant State-Owned Enterprise, that could affect their ability to act independently.

PT KBI has appointed Fajar Massadiyah Egy and Irman Sahroni Ahmad as Independent Commissioners. They are members of the Board of Commissioners who are not affiliated with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or controlling shareholders, and are free from business relationships or any other relationships that could influence their ability to act independently or solely in the interests of PT KBI.

DIREKSI

Board of Directors

Sebagai Organ Perusahaan yang menjalankan fungsi manajerial, Direksi memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab sepenuhnya dalam mengelola dan mengurus kepentingan PT KBI sesuai dengan visi, misi, serta tujuan pendirian PT KBI. Selain itu, Direksi bertindak atas nama PT KBI baik dalam hubungan hukum di dalam maupun di luar proses peradilan, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT KBI. Susunan Direksi PT KBI ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional perusahaan serta tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kriteria dan Prosedur Pengangkatan Direksi

Proses penetapan Direksi diawali dengan pengajuan calon oleh Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan pengangkatan Direksi selanjutnya ditetapkan dalam RUPS, setelah calon yang bersangkutan dinyatakan memenuhi persyaratan melalui pelaksanaan *fit and proper test* yang mencakup penilaian kompetensi, integritas, dan kesesuaian terhadap kebutuhan organisasi PT KBI.

Uji Kelayakan dan Kepatutan Direksi

Sebagai otoritas pengawas, BAPPEBTI berperan dalam pelaksanaan proses penilaian kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi, yang dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi serta dukungan Pemegang Saham. Penilaian tersebut mencakup berbagai kriteria, antara lain kompetensi profesional, integritas pribadi, kapasitas kepemimpinan, rekam jejak pengalaman, etika, perilaku, kecakapan bertindak secara hukum, serta komitmen untuk berkontribusi secara optimal dalam pengembangan dan pertumbuhan PT KBI. Calon Direksi yang telah memenuhi seluruh persyaratan uji kelayakan dan kepatutan diwajibkan untuk menandatangani kontrak manajemen sebagai bentuk komitmen dalam menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), sebelum pengangkatan resminya ditetapkan sebagai anggota Direksi PT KBI.

Masa Jabatan Direksi

Direksi diangkat untuk periode jabatan selama lima tahun dan dapat diberikan perpanjangan satu kali masa jabatan. Ketentuan tersebut tidak membatasi kewenangan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi setiap saat, dengan disertai alasan yang jelas sesuai ketentuan yang berlaku.

As a corporate organ performing managerial functions, the Board of Directors holds full authority and responsibility for managing and administering PT KBI's interests in accordance with PT KBI's vision, mission, and objectives of establishment. In addition, the Board of Directors represents PT KBI, both within and outside judicial proceedings, as stipulated in PT KBI's Articles of Association. The composition of PT KBI's Board of Directors is determined by taking into account the Company's operational needs, while remaining in compliance with applicable laws and regulations.

Criteria and Procedures for the Appointment of the Board of Directors

The appointment of members of the Board of Directors begins with the nomination of candidates by the Board of Commissioners to the Shareholders, in accordance with applicable laws and regulations. The appointment of the Board of Directors is then approved at the GMS, after the candidate has been declared to meet the requirements through a fit and proper test, which includes an assessment of competence, integrity, and alignment with the needs of PT KBI's organization.

Fit and Proper Test for the Board of Directors

As the supervisory authority, BAPPEBTI plays a role in conducting the fit and proper assessment of prospective members of the Board of Directors, taking into account the recommendations and support of the Shareholders. The assessment covers various criteria, including professional competence, personal integrity, leadership capacity, track record, ethics, behavior, legal capability, and commitment to contribute optimally to the development and growth of PT KBI. Candidates who meet all the requirements of the fit and proper assessment are required to sign a management contract as a commitment to implement and uphold the principles of Good Corporate Governance (GCG) before their official appointment as members of PT KBI's Board of Directors.

Term of Office of the Board of Directors

Members of the Board of Directors are appointed for a term of five years and may be granted a one-time extension. This provision does not limit the authority of the GMS to dismiss members of the Board of Directors at any time, provided that clear reasons are given in accordance with applicable regulations.



Susunan Anggota Direksi

Direksi PT KBI terdiri atas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang. Penetapan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kebutuhan organisasi, tingkat kompleksitas kegiatan usaha, serta arah dan rencana strategis Perusahaan, dengan salah satu anggota ditunjuk sebagai Direktur Utama. Komposisi Direksi disusun sedemikian rupa agar mendukung proses pengambilan keputusan yang efektif, responsif, dan profesional, serta menjamin independensi dalam pelaksanaan tugas. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-54/MBU/03/2024 dan Surat Keputusan Direktur Utama PT Danareksa (Persero) Nomor KPPS-4/DR/Dirut/03/2024, struktur dan susunan Direksi PT KBI pada tahun 2025 mengalami penyesuaian sebagaimana diuraikan berikut ini:

Composition of the Board of Directors

PT KBI's Board of Directors consists of a minimum of 2 (two) and a maximum of 7 (seven) members. The determination of the number of Board members takes into account organizational needs, the complexity of business activities, and the Company's strategic direction and plans, with one member appointed as President Director. The composition of the Board of Directors is structured to support effective, responsive, and professional decision-making processes, while ensuring independence in the performance of duties. Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-54/MBU/03/2024 and the Decree of the President Director of PT Danareksa (Persero) No. KPPS-4/DR/Dirut/03/2024, the structure and composition of PT KBI's Board of Directors in 2025 were adjusted as described below:

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period	Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment
Budi Susanto	Direktur Utama President Director	26 Agustus 2022 - RUPS 2027 August 26, 2022 – GMS 2027	Ke-1 First	Budi Susanto diangkat sebagai Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan (Persero) PT Danareksa Selaku Para Pemegang Saham PT Kliring Berjangka Indonesia Nomor: SK-238/MBU/08/2023 dan Nomor: KPPS-47/018/DNRK tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Kliring Berjangka Indonesia tanggal 14 Agustus 2023. Budi Susanto was appointed as President Director of PT Kliring Berjangka Indonesia pursuant to the Joint Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the President Director of PT Danareksa (Persero), in their capacity as the shareholders of PT Kliring Berjangka Indonesia, No. SK-238/MBU/08/2023 and No. KPPS-47/018/DNRK, concerning Dismissal, Change of Job Nomenclature, Reassignment of Duties, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Kliring Berjangka Indonesia, dated August 14, 2023.
Adiyasa Suhadibroto	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	22 Agustus 2023 - RUPS 2028 August 22, 2023 – GMS 2028	Ke-1 First	Adiyasa Suhadibroto diangkat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Kliring Berjangka Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan (Persero) PT Danareksa Selaku Para Pemegang Saham PT Kliring Berjangka Indonesia Nomor: SK-238/MBU/08/2023 dan Nomor: KPPS-47/018/DNRK tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota Anggota Direksi PT Kliring Berjangka Indonesia tanggal 14 Agustus 2023. Adiyasa Suhadibroto was appointed as Director of Finance and Risk Management of PT Kliring Berjangka Indonesia pursuant to the Joint Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the President Director of PT Danareksa (Persero), in their capacity as the shareholders of PT Kliring Berjangka Indonesia, No. SK-238/MBU/08/2023 and No. KPPS-47/018/DNRK, concerning Dismissal, Change of Job Nomenclature, Reassignment of Duties, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Kliring Berjangka Indonesia, dated August 14, 2023.



Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period	Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment
Saidu Solihin	Direktur Pengembangan Bisnis dan Operasional Director of Business Development and Operations	22 Agustus 2023 - RUPS 2028 August 22, 2023 – GMS 2028	Ke-1 First	Saidu Solihin diangkat sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan Operasional PT Kliring Berjangka Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan (Persero) PT Danareksa Selaku Para Pemegang Saham PT Kliring Berjangka Indonesia Nomor: SK-238/ MBU/08/2023 dan Nomor: KPPS-47/018/DNRK tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota Anggota Direksi PT Kliring Berjangka Indonesia tanggal 14 Agustus 2023. Saidu Solihin was appointed as Director of Business Development and Operations of PT Kliring Berjangka Indonesia pursuant to the Joint Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the President Director of PT Danareksa (Persero), in their capacity as the shareholders of PT Kliring Berjangka Indonesia, No. SK-238/MBU/08/2023 and No. KPPS-47/018/DNRK, concerning Dismissal, Change of Job Nomenclature, Reassignment of Duties, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Kliring Berjangka Indonesia, dated August 14, 2023.

Proses penilaian kelayakan atas seluruh anggota Direksi PT KBI telah diselesaikan dan disetujui oleh BAPPEBTI, sebagaimana dibuktikan melalui surat resmi Nomor BP.00.00/261/BAPPEBTI/SD/09/2023 tertanggal 8 September 2023 yang memuat hasil evaluasi dan persetujuan calon Direksi PT Kliring Berjangka Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya, jajaran Direksi PT KBI tidak memiliki keterkaitan kepentingan atau hubungan keluarga hingga derajat kedua, baik antar anggota Direksi maupun dengan Dewan Komisaris. Uraian lengkap mengenai latar belakang dan kompetensi masing-masing anggota Direksi disampaikan pada bagian Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam kapasitasnya sebagai pihak yang memimpin dan mengendalikan pengelolaan Perusahaan, Direksi menjalankan kewenangannya dengan menjunjung tinggi profesionalisme, kehati-hatian, konsistensi, serta akuntabilitas, dengan senantiasa memperhatikan berbagai faktor yang relevan demi kepentingan PT KBI. Pelaksanaan fungsi tersebut mencakup pengambilan keputusan dan pengelolaan kegiatan usaha maupun aspek lain yang berkaitan dengan PT KBI. Adapun ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Direksi PT KBI, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi hal-hal sebagai berikut:

The fit and proper assessment of all members of PT KBI's Board of Directors has been completed and approved by BAPPEBTI, as evidenced by the official letter No. BP.00.00/261/BAPPEBTI/SD/09/2023 dated September 8, 2023, which contains the evaluation results and approval of the candidates for the Board of Directors of PT Kliring Berjangka Indonesia. In carrying out their functions, PT KBI's Board of Directors has no conflicts of interest or familial relationships up to the second degree, either among Board members or with the Board of Commissioners. Detailed information on the background and competencies of each member of the Board of Directors is presented in the Company Profile section of this Annual Report.

Duties and Responsibilities

In their capacity as the body leading and managing the Company, the Board of Directors exercises its authority by upholding professionalism, prudence, consistency, and accountability, while taking into account all relevant factors in the best interest of PT KBI. The exercise of this function includes decision-making and management of business activities as well as other matters related to PT KBI. The scope of duties and responsibilities of PT KBI's Board of Directors, as stipulated in the Articles of Association and applicable laws and regulations, includes the following:



1. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan PT KBI untuk kepentingan PT KBI dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
2. Mewakili PT KBI di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian, dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan PT KBI;
4. Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar PT KBI dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran;
5. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PT KBI dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan lalai atau melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha PT KBI, kecuali apabila anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:
 - a. Kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT KBI;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian; serta
7. Tindak tanduk yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan.

Pembagian Tugas Direksi

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-54/MBU/03/2024 serta Surat Keputusan Direktur Utama PT Danareksa (Persero) Nomor KPPS-4/DR/Dirut/03/2024, struktur dan formasi Direksi PT KBI pada tahun 2025 mengalami penyesuaian. Perubahan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Carry out all actions related to the management of PT KBI for the benefit of PT KBI and in accordance with the Company's objectives;
2. Represent PT KBI, both inside and outside of court, in all matters and events, subject to the limitations stipulated in laws and regulations, the Articles of Association, and/or the resolutions of the General Meeting of Shareholders;
3. The Board of Directors is required to devote their full energy, attention, diligence, and commitment to the duties, obligations, and achievement of PT KBI's objectives;
4. The Board of Directors must comply with PT KBI's Articles of Association and applicable laws and regulations, and must uphold the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness;
5. Each member of the Board of Directors is required, in good faith and with full responsibility, to perform their duties for the benefit and business of PT KBI in accordance with applicable laws and regulations;
6. Each member of the Board of Directors is personally responsible if they are negligent or commit an error in carrying out their duties for the benefit and business of PT KBI, except if the member can demonstrate that:
 - a. The loss has not been caused by their error or negligence;
 - b. They act in good faith and with due care for the benefit and in accordance with the objectives of PT KBI;
 - c. They have no direct or indirect conflict of interest in the management actions resulting in the loss; and
 - d. They have taken action to prevent the loss from occurring or continuing; and
7. Actions taken by members of the Board of Directors outside the decisions made in Board meetings are the personal responsibility of the member concerned.

Separation of Duties of the Board of Directors

Pursuant to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-54/MBU/03/2024 and the Decree of the President Director of PT Danareksa (Persero) No. KPPS-4/DR/Dirut/03/2024, the structure and composition of PT KBI's Board of Directors were adjusted in 2025. The changes are described as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Tugas Duty
Budi Susanto	Direktur Utama President Director	Selain yang diatur dalam Anggaran Dasar, Direktur Utama memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban khusus untuk memimpin Direktorat Utama, mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai maksud dan tujuan perusahaan melalui pengelolaan dan penyelenggaraan kebijakan, memastikan tercapainya visi dan misi Perusahaan melalui pengelolaan dan penyelenggaraan kebijakan Perusahaan termasuk di dalamnya audit, manajemen sumber daya manusia, kesekretariatan, dan tanggung jawab sosial guna meningkatkan nilai dan mencapai sasaran Perusahaan sesuai dengan strategi dan rencana jangka pendek maupun rencana jangka panjang, ketetapan Rapat Umum Pemegang Saham dan Anggaran Dasar dengan tetap memperhatikan risiko yang terkontrol. Dalam penyelenggaraan perusahaan, Direktur Utama bertanggung jawab terhadap pengelolaan anggota Direksi yang lain dan Divisi dalam Direktorat Utama yang melapor langsung kepadanya. In addition to the duties stipulated in the Articles of Association, the President Director has specific responsibilities, authorities, and obligations to lead the President Directorate, ensure and guarantee the implementation of the Company's business and activities in accordance with its objectives through policy management and administration, and ensure the achievement of the Company's vision and mission. This includes supervising policy management and administration within the Company, encompassing audit, human resource management, secretarial functions, and social responsibility initiatives to enhance value and achieve the Company's targets in line with its short-term and long-term plans, resolutions of the General Meeting of Shareholders, and the Articles of Association, while maintaining controlled risk levels. In carrying out the Company's operations, the President Director is also responsible for the management of other members of the Board of Directors and the divisions within the President Directorate that report directly to him.
Adiyasa Suhadibroto	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	Selain yang diatur dalam Anggaran Dasar, memimpin Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko, memastikan tercapainya sasaran perusahaan, daya saing perusahaan dan kepuasan pelanggan melalui pengelolaan dan penyelenggaraan kebijakan aspek keuangan dan akuntansi, pengadaan dan umum, manajemen kualitas dan manajemen risiko perusahaan yang efektif dan efisien sesuai dengan strategi dan rencana jangka pendek maupun rencana jangka panjang perusahaan, ketetapan Rapat Umum Pemegang Saham dan Anggaran Dasar dengan memperhatikan risiko yang terkontrol. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dibantu oleh Divisi dalam Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko yang melapor langsung kepadanya. In addition to the duties stipulated in the Articles of Association, the Director of Finance and Risk Management leads the Finance and Risk Management Directorate and ensures the achievement of the Company's objectives, competitiveness, and customer satisfaction through the management and implementation of policies in financial and accounting aspects, procurement and general affairs, quality management, and effective and efficient corporate risk management. This is carried out in accordance with the Company's short-term and long-term strategies and plans, resolutions of the General Meeting of Shareholders, and the Articles of Association, while taking into account controlled risk levels. In performing these duties and responsibilities, the Director of Finance and Risk Management is assisted by divisions within the Finance and Risk Management Directorate that report directly to him.



Nama Name	Jabatan Position	Tugas Duty
Saidu Solihin	Direktur Pengembangan Bisnis dan Operasional Director of Business Development and Operations	Selain yang diatur dalam Anggaran Dasar, Direktur Pengembangan Bisnis dan Operasional memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban khusus untuk memimpin Direktorat Pengembangan Bisnis dan Operasional, memastikan tercapainya peningkatan pendapatan dan sasaran Perusahaan yang telah ditetapkan, daya saing Perusahaan dan kepuasan pelanggan melalui pengelolaan dan penyelenggaraan kebijakan perencanaan dan pengembangan bisnis, pengelolaan kinerja perusahaan, kebijakan pengelolaan jasa, layanan pelanggan dan pengelolaan teknologi informasi yang efektif dan efisien sesuai dengan strategi dan rencana jangka pendek maupun rencana jangka panjang Perusahaan. Serta kinerja anak Perusahaan secara efektif dan efisien sesuai dengan strategi dan rencana jangka pendek maupun rencana jangka panjang Perusahaan, ketetapan Rapat Umum Pemegang Saham dan Anggaran Dasar dengan memperhatikan risiko yang terkontrol. Direktur Pengembangan Bisnis dan Operasional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dibantu oleh Divisi dalam Direktorat Pengembangan Bisnis dan Operasional. Direktur Pengembangan Bisnis bertanggung jawab terhadap pengelolaan divisi dalam Direktorat Pengembangan Bisnis dan Operasional yang melapor langsung kepadanya. In addition to the duties stipulated in the Articles of Association, the Director of Business Development and Operations has specific responsibilities, authorities, and obligations to lead the Business Development and Operations Directorate, ensuring the achievement of the Company's revenue growth and established targets, competitiveness, and customer satisfaction. This is accomplished through the management and implementation of policies related to business planning and development, corporate performance management, service management, customer service, and information technology management in an effective and efficient manner, in line with the Company's short-term and long-term strategies and plans. The Director is also responsible for supervising the performance of subsidiaries in accordance with the Company's strategies, short-term and long-term plans, resolutions of the General Meeting of Shareholders, and the Articles of Association, while taking into account controlled risk levels. In carrying out these duties and responsibilities, the Director of Business Development and Operations is assisted by divisions within the Business Development and Operations Directorate. The Director is accountable for managing these divisions, which report directly to him.

Pedoman Kerja Direksi

Pedoman kerja Direksi PT KBI ditetapkan melalui *Board Manual* yang disahkan bersama oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada 4 Desember 2017. Dokumen tersebut menjadi acuan operasional bagi Direksi dalam menjalankan fungsi, kewenangan, serta tanggung jawabnya di PT KBI. Seluruh aktivitas Direksi diselenggarakan dengan berlandaskan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) PT KBI, yang disusun melalui pengintegrasian berbagai ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku serta diselaraskan dengan dinamika praktik terbaik tata kelola perusahaan. Keberadaan pedoman ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas pengelolaan Perusahaan dalam mendukung pencapaian visi dan misi PT KBI.

Board Manual of the Board of Directors

PT KBI's Board of Directors' work guidelines are established through the Board Manual, which was jointly approved by the Board of Commissioners and the Board of Directors on December 4, 2017. This document serves as an operational reference for the Board of Directors in carrying out its functions, authorities, and responsibilities at PT KBI. All activities of the Board of Directors are conducted based on PT KBI's Code of Corporate Governance, which has been developed by integrating applicable laws and regulations and aligning them with evolving best practices in corporate governance. The availability of this manual is intended to strengthen the effectiveness of the Company's management in supporting the achievement of PT KBI's vision and mission.

Rapat Direksi

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT KBI, Direksi diwajibkan menyelenggarakan rapat secara rutin dengan frekuensi paling sedikit satu kali dalam setiap bulan. Penjadwalan rapat mengacu pada kalender dasar yang telah disusun sebelumnya, kemudian ditetapkan secara lebih rinci mengenai tanggal, lokasi, dan waktu pelaksanaan paling lambat tujuh hari sebelum rapat dilangsungkan. Informasi mengenai agenda umum rapat Direksi selanjutnya disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan dituangkan dalam kalender kegiatan (*event calendar*) PT KBI. Selain ketentuan tersebut, terdapat kebijakan lain yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan rapat Direksi, antara lain sebagai berikut:

1. Direksi dapat mengadakan rapat setiap kali apabila dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau Pemegang Saham dengan menyebutkan hal yang akan dibicarakan.
2. Direksi harus menetapkan tata tertib Rapat Direksi dan mencantulkannya dengan jelas dalam risalah Rapat Direksi di mana tata tertib tersebut ditetapkan.
3. Rapat Direksi dilaksanakan sesuai dengan tata tertib yang telah ditetapkan dan diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat kegiatan usaha Perusahaan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi.
4. Di dalam setiap rapat Direksi dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya.
5. Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perusahaan dan disampaikan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak. Dalam panggilan rapat tersebut harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
6. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya.

Pimpinan rapat Direksi berada di bawah kewenangan Direktur Utama. Apabila Direktur Utama tidak dapat menghadiri atau berhalangan menjalankan tugas tersebut, tanggung jawab memimpin rapat dialihkan kepada salah satu anggota Direksi yang ditunjuk secara khusus.

Meeting of the Board of Directors

In accordance with PT KBI's Articles of Association, the Board of Directors is required to hold regular meetings at least once a month. Meeting scheduling refers to a pre-established basic calendar, with detailed determination of the date, location, and time of the meeting communicated no later than seven days prior to the meeting. General meeting agendas are then communicated to all members of the Board of Directors and recorded in PT KBI's event calendar. In addition to these provisions, other policies guide the conduct of Board meetings, as follows:

1. The Board of Directors may hold a meeting at any time if deemed necessary by one or more members of the Board or upon a written request from one or more members of the Board of Commissioners or Shareholders, specifying the matters to be discussed.
2. The Board of Directors must establish meeting procedures and clearly include them in the minutes of the meeting.
3. Meetings of the Board of Directors are conducted in accordance with the established procedures and are held at the Company's headquarters, at a Company business location, or at any other location within the Republic of Indonesia designated by the Board of Directors.
4. Each Board meeting includes an evaluation of the implementation of decisions from previous meetings.
5. Board meeting invitations are issued in writing by the member of the Board authorized to represent the Company and must be delivered at least 3 (three) days prior to the meeting, or in a shorter period if urgent. The invitation must specify the agenda, date, time, and location of the meeting.
6. Meeting of the Board of Directors is valid and authorized to make binding decisions if attended by more than $\frac{1}{2}$ (one-half) of the total number of Board members or their representatives.

The meeting is chaired by the President Director. If the President Director is unable to attend or perform this duty, the responsibility to lead the meeting is delegated to a specifically appointed member of the Board of Directors.

Pelaksanaan Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2025, Direksi PT KBI telah menyelenggarakan rapat sebanyak 15 (lima belas) kali dengan rincian pelaksanaan rapat sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Budi Susanto	Direktur Utama President Director	15	15	100
Adiyasa Suhadibroto	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	15	15	100%
Saidu Solihin	Direktur Pengembangan Bisnis dan Operasional Director of Business Development and Operations	15	15	100%

Implementation of the Meeting of the Board of Directors

Throughout 2025, PT KBI's Board of Directors held 15 (fifteen) meetings, with the details of the meetings as follows:

Adapun agenda Rapat Direksi sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:
The meeting agendas of the Board of Directors throughout 2025 are as follows:

Tanggal Date	Agenda	Peserta Participant
7 Januari 2025 January 7, 2025	Rapat Direksi Meeting of the Board of Directors	Direksi dan Kepala Divisi Board of Directors and Division Heads
11 Februari 2025 February 11, 2025	Rapat Direksi Meeting of the Board of Directors	Direksi dan Kepala Divisi Board of Directors and Division Heads
24 April 2025 April 24, 2025	Rapat Direksi Meeting of the Board of Directors	Direksi dan Kepala Divisi Board of Directors and Division Heads
21 & 22 Mei 2025 May 21 & 22, 2025	Rapat Direksi Meeting of the Board of Directors	Direksi dan Kepala Divisi Board of Directors and Division Heads
11 & 19 Juni 2025 June 11 & 19, 2025	Rapat Direksi Meeting of the Board of Directors	Direksi dan Kepala Divisi Board of Directors and Division Heads
17 & 29 Juli 2025 July 17 & 29, 2025	Rapat Direksi Meeting of the Board of Directors	Direksi dan Kepala Divisi Board of Directors and Division Heads
27 Agustus 2025 August 27, 2025	Rapat Direksi Meeting of the Board of Directors	Direksi dan Kepala Divisi Board of Directors and Division Heads
17 September 2025 September 17, 2025	Rapat Direksi Meeting of the Board of Directors	Direksi dan Kepala Divisi Board of Directors and Division Heads
9 Oktober 2025 October 9, 2025	Rapat Direksi Meeting of the Board of Directors	Direksi dan Kepala Divisi Board of Directors and Division Heads
13 November 2025 November 13, 2025	Rapat Direksi Meeting of the Board of Directors	Direksi dan Kepala Divisi Board of Directors and Division Heads
3 & 23 Desember 2025 December 3 & 23, 2025	Rapat Direksi Meeting of the Board of Directors	Direksi dan Kepala Divisi Board of Directors and Division Heads
7 Januari 2025 January 7, 2025	Rapat Direksi Meeting of the Board of Directors	Direksi dan Kepala Divisi Board of Directors and Division Heads
11 Februari 2025 February 11, 2025	Rapat Direksi Meeting of the Board of Directors	Direksi dan Kepala Divisi Board of Directors and Division Heads
24 April 2025 April 24, 2025	Rapat Direksi Meeting of the Board of Directors	Direksi dan Kepala Divisi Board of Directors and Division Heads
21 & 22 Mei 2025 May 21 & 22, 2025	Rapat Direksi Meeting of the Board of Directors	Direksi dan Kepala Divisi Board of Directors and Division Heads

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Selama tahun 2025, Dewan Komisaris bersama Direksi PT KBI menyelenggarakan rapat gabungan sebanyak 14 (empat belas) kali. Tingkat kehadiran masing-masing anggota dalam rapat tersebut disajikan sebagai berikut:

Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Throughout 2025, PT KBI's Board of Commissioners and Board of Directors held 14 (fourteen) joint meetings. The attendance of each member in these meetings is presented as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Dewan Komisaris Board of Commissioners				
Hernawan B. Sasongko	Komisaris Utama President Commissioner	14	14	100%
Fajar Massadiah Egy	Komisaris Independen Independent Commissioner	14	14	100%
Irman Sahroni Ahmad	Komisaris Independen Independent Commissioner	14	14	100%
Direksi Board of Directors				
Budi Susanto	Direktur Utama President Director	13	13	99%
Adiyasa Suhadibroto	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	14	14	100%
Saidu Solihin	Direktur Pengembangan Bisnis dan Operasional Director of Business Development and Operations	14	14	100%

Agenda rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

The agendas of the joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors throughout 2025 are as follows:

Tanggal Date	Agenda	Peserta Participant
15 Januari 2025 January 15, 2025	Rapat Gabungan Joint Meeting	Dewan Komisaris, Komite, Direksi dan Kepala Divisi Board of Commissioners, Committees, Board of Directors and Division Heads
28 Februari 2025 February 28, 2025	Rapat Gabungan Joint Meeting	Dewan Komisaris, Komite, Direksi dan Kepala Divisi Board of Commissioners, Committees, Board of Directors and Division Heads
21 Maret 2025 March 21, 2025	Rapat Gabungan Joint Meeting	Dewan Komisaris, Komite, Direksi dan Kepala Divisi Board of Commissioners, Committees, Board of Directors and Division Heads
28 April 2025 April 28, 2025	Rapat Gabungan Joint Meeting	Dewan Komisaris, Komite, Direksi dan Kepala Divisi Board of Commissioners, Committees, Board of Directors and Division Heads
26 Mei 2025 May 26, 2025	Rapat Gabungan Joint Meeting	Dewan Komisaris, Komite, Direksi dan Kepala Divisi Board of Commissioners, Committees, Board of Directors and Division Heads
13 & 25 Juni 2025 June 13 & 25, 2025	Rapat Gabungan Joint Meeting	Dewan Komisaris, Komite, Direksi dan Kepala Divisi Board of Commissioners, Committees, Board of Directors and Division Heads
30 Juli 2025 July 30, 2025	Rapat Gabungan Joint Meeting	Dewan Komisaris, Komite, Direksi dan Kepala Divisi Board of Commissioners, Committees, Board of Directors and Division Heads
4 & 28 Agustus 2025 August 4 & 28, 2025	Rapat Gabungan Joint Meeting	Dewan Komisaris, Komite, Direksi dan Kepala Divisi Board of Commissioners, Committees, Board of Directors and Division Heads
24 September 2025 September 24, 2025	Rapat Gabungan Joint Meeting	Dewan Komisaris, Komite, Direksi dan Kepala Divisi Board of Commissioners, Committees, Board of Directors and Division Heads
31 Oktober 2025 October 31, 2025	Rapat Gabungan Joint Meeting	Dewan Komisaris, Komite, Direksi dan Kepala Divisi Board of Commissioners, Committees, Board of Directors and Division Heads
26 November 2025 November 26, 2025	Rapat Gabungan Joint Meeting	Dewan Komisaris, Komite, Direksi dan Kepala Divisi Board of Commissioners, Committees, Board of Directors and Division Heads
19 Desember 2025 December 19, 2025	Rapat Gabungan Joint Meeting	Dewan Komisaris, Komite, Direksi dan Kepala Divisi Board of Commissioners, Committees, Board of Directors and Division Heads
15 Januari 2025 January 15, 2025	Rapat Gabungan Joint Meeting	Dewan Komisaris, Komite, Direksi dan Kepala Divisi Board of Commissioners, Committees, Board of Directors and Division Heads
28 Februari 2025 February 27, 2025	Rapat Gabungan Joint Meeting	Dewan Komisaris, Komite, Direksi dan Kepala Divisi Board of Commissioners, Committees, Board of Directors and Division Heads



Program Pengenalan bagi Direksi Baru

Mengacu pada ketentuan *Board Manual*, PT KBI mewajibkan penyelenggaraan program orientasi setiap kali terdapat pengangkatan anggota Direksi baru. Program ini dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai PT KBI agar anggota Direksi yang baru memperoleh pemahaman awal yang memadai. Bekal pengetahuan tersebut menjadi fondasi penting dalam mendukung pelaksanaan tugas, tanggung jawab, serta pengambilan keputusan secara efektif sejak awal masa jabatan.

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan tidak memiliki direksi baru sehingga PT KBI tidak melaksanakan program pengenalan bagi Direksi baru.

Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Direksi

Kebijakan Pelatihan

Sebagai induk usaha BUMN PT KBI, PT Danareksa (Persero) menetapkan Modul Kompetensi sebagai kerangka penguatan program pengembangan kapabilitas dan pembelajaran bagi anggota Direksi PT KBI. Inisiatif pelatihan tersebut diarahkan untuk memperdalam pemahaman Direksi atas fungsi strategis dan tanggung jawabnya dalam mendorong pertumbuhan berkelanjutan PT KBI. Adapun pelaksanaan kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi anggota Direksi PT KBI sepanjang tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

Pelatihan atau Peningkatan Kompetensi yang Diikuti Anggota Direksi

Informasi pelatihan Anggota Direksi dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan pada bagian Profil Direksi di dalam Laporan Tahunan ini.

Pelaksanaan Tugas Direksi

Selama tahun 2025, Direksi PT KBI menetapkan sejumlah kebijakan strategis dan operasional yang mencakup aspek operasional, keuangan, serta fungsi pendukung lainnya, yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Direksi. Rincian pelaksanaan kewenangan Direksi tersebut selama tahun berjalan disajikan dalam tabel berikut:

Induction Program for the Board of Directors

In accordance with the provisions of the Board Manual, PT KBI requires the implementation of an induction program whenever new members of the Board of Directors are appointed. This program is designed to provide a comprehensive overview of PT KBI so that new Directors gain an adequate initial understanding. This foundational knowledge supports the effective execution of their duties, responsibilities, and decision-making from the outset of their tenure.

Throughout 2025, the Company did not have new Directors; therefore, PT KBI did not conduct an orientation program for new members of the Board of Directors.

Training and Competency Development Programs for the Board of Directors

Training Policy

As PT KBI's parent SOE, PT Danareksa (Persero) has established a Competency Module as the framework for strengthening capability development and learning programs for PT KBI's Board of Directors. These training initiatives are aimed at deepening the Directors' understanding of their strategic roles and responsibilities in driving PT KBI's sustainable growth. The implementation of training and competency development activities for PT KBI's Board of Directors throughout 2025 is described as follows:

Training or Competency Development Programs Attended by Board Members

Information on the training attended by members of the Board of Directors is presented in the Company Profile section, under the Profile of the Board of Directors, in this Annual Report.

Duty Implementation of the Board of Directors

Throughout 2025, PT KBI's Board of Directors established a number of strategic and operational policies covering operational, financial, and other supporting functions, formalized in the form of Decrees of the Board of Directors. The details of the exercise of the Board's authorities during the year are presented in the following table:

Surat Keputusan Direksi PT KBI Decrees of PT KBI's Board of Directors

Nomor SK Decree Number	Tanggal Date	Tentang About
02/K-KBI/I/2025	16-01-2025	Kebijakan Perjalanan Dinas Official Travel Policy
05/K-KBI/II/2025	07-02-2025	Fasilitas Operasional Pegawai PT Kliring Berjangka Indonesia Operational Facilities for Employees of PT Kliring Berjangka Indonesia
06/K-KBI/II/2025	07-02-2025	Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa PT Kliring Berjangka Indonesia Procurement System and Procedures for Goods and Services at PT Kliring Berjangka Indonesia
10/K-KBI/III/2025	07-03-2025	Pedoman Perhitungan dan Evaluasi Margin pada PT Kliring Berjangka Indonesia Guidelines for Margin Calculation and Evaluation at PT Kliring Berjangka Indonesia
15/K-KBI/VI/2025	16-06-2025	Pedoman Sistem Manajemen Terintegrasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, ISO/IEC 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan Integrated Management System Guidelines, comprising ISO 9001:2015 on Quality Management System, ISO/IEC 27001:2022 on Information Security Management System and ISO 37001:2016 on Anti-Bribery Management System
16.1/ K-KBI/VI/2025	30-06-2025	Kebijakan Tata Kelola Hubungan Induk Perusahaan dan Anak Perusahaan PT Kliring Berjangka Indonesia Corporate Governance Policy on Parent-Subsidiary Relations at PT Kliring Berjangka Indonesia
20/K-KBI/VIII/2025	19-08-2025	Pendelegasian Kewenangan di Lingkungan PT Kliring Berjangka Indonesia Delegation of Authority within PT Kliring Berjangka Indonesia
21/K-KBI/VIII/2025	19-08-2025	Kebijakan Penatakelolaan Anggota Holding BUMN Danareksa pada PT Kliring Berjangka Indonesia Policy on Managing Holding Danareksa Members at PT Kliring Berjangka Indonesia
23/K-KBI/IX/2025	08-09-2025	Kebijakan Strategis Berkelanjutan (<i>Environment, social & Governance</i>) PT Kliring Berjangka Indonesia Sustainable Strategic Policy (Environment, Social & Governance) at PT Kliring Berjangka Indonesia
24/K-KBI/IX/2025	09-09-2025	Pedoman Pembentukan Peraturan Perusahaan PT Kliring Berjangka Indonesia Guidelines for the Formation of Company Regulations at PT Kliring Berjangka Indonesia
27/K-KBI/IX/2025	29-09-2025	Penatausahaan Dokumen PT Kliring Berjangka Indonesia Document Administration Policy at PT Kliring Berjangka Indonesia
29/K-KBI/X/2025	15-10-2025	Pedoman <i>Risk Based Audit</i> Risk-Based Audit Guidelines
30/K-KBI/XI/2025	05-11-2025	Kebijakan Manajemen Risiko PT Kliring Berjangka Indonesia Risk Management Policy at PT Kliring Berjangka Indonesia

Komite yang Mendukung Tugas Direksi

Komite Kliring

Dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan, Direksi PT KBI memperoleh dukungan dari Komite Kliring yang bersifat independen. Komite ini berperan sebagai organ pendukung yang memberikan masukan dan rekomendasi kepada Direksi, khususnya terkait aspek keanggotaan, manajemen risiko, serta penanganan isu-isu khusus. Keberadaan Komite Kliring sekaligus mencerminkan komitmen PT KBI dalam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan Komite Kliring

Masa tugas Komite Kliring ditetapkan selama dua tahun, dengan kewenangan pengangkatan dan pemberhentian

Committees Supporting the Board of Directors

Clearing Committee

In carrying out its duties and decision-making, PT KBI's Board of Directors receives support from the independent Clearing Committee. This committee serves as a supporting body that provides input and recommendations to the Board of Directors, particularly regarding membership, risk management, and the handling of special issues. The existence of the Clearing Committee also reflects PT KBI's commitment to ensuring compliance with the applicable laws and regulations.

Composition of the Clearing Committee

The term of office of the Clearing Committee is set for two years, with the authority to appoint and dismiss members



berada pada Direksi. Pembentukan serta perubahan komposisi pengurus Komite Kliring dilakukan berdasarkan Keputusan Direksi PT KBI, yaitu Keputusan Nomor 08/K-KBI/LGL/IV/2024 mengenai pengangkatan pengurus untuk periode 2024–2026, serta Keputusan Nomor 25/K-KBI/LGL/IX/2024 yang mengatur penyesuaian susunan pengurus pada periode yang sama.

Susunan kepengurusan Komite Kliring terdiri atas:

1. 5 (lima) orang dari Anggota Kliring di mana salah seorang menjadi Ketua Komite;
2. 1 (satu) orang pejabat Bursa setingkat di bawah Direksi Bursa; dan
3. 1 (satu) orang pejabat Lembaga Kliring Berjangka setingkat di bawah Direksi Lembaga Kliring Berjangka.
4. 2 (dua) orang karyawan Lembaga Kliring Berjangka sebagai sekretaris komite kliring.

No.	Nama Name	Jabatan Position	Perwakilan Kliring Clearing Representative
1.	Ofik Taufiqurrahman	Ketua Chairman	PT Mentari Mulia Berjangka
2.	Wawan Kuswandi	Anggota Member	PT Mahadana Asta Berjangka
3.	Freddy Chandra	Anggota Member	PT Internasional Mitra Futures
4.	Muhamad Barkah	Anggota Member	PT Rifan Financindo Berjangka
5.	Irawan Tjindana	Anggota Member	PT Harta International Investama
6.	Nina Motiva Hanna Ali	Anggota Member	PT Bursa Berjangka Jakarta
7.	Juventus Deka Aditama	Anggota Member	PT Kliring Berjangka Indonesia
8.	Karina Legiani	Anggota Member	PT Kliring Berjangka Indonesia
9.	Dinda Ayu Nabila	Anggota Member	PT Kliring Berjangka Indonesia

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kliring

Tugas dan tanggung jawab Pengurus Komite Kliring Periode Tahun 2024 - 2026 PT KBI adalah sebagai berikut:

1. Merekomendasikan tata cara yang harus diikuti oleh pemohon keanggotaan kliring;
2. Menyampaikan rekomendasi kepada Direksi mengenai permohonan keanggotaan kliring;
3. Memberi saran kepada Direksi mengenai penetapan tingkat margin, dana jaminan kliring, dana kliring dan perubahannya;
4. Menyampaikan rekomendasi kepada Direksi mengenai batas posisi neto yang boleh dikuasai oleh Anggota Kliring;

resting with the Board of Directors. The formation and changes in the composition of the committee's management are based on decrees of PT KBI's Board of Directors, namely Decree No. 08/K-KBI/LGL/IV/2024 regarding the appointment of members for the 2024–2026 period, and Decree No. 25/K-KBI/LGL/IX/2024 regulating adjustments to the committee's composition during the same period.

The management structure of the Clearing Committee consists of:

1. 5 (Five) Clearing Members, one of whom serves as the Committee Chairman;
2. 1 (One) exchange official at a level below the Exchange Director;
3. 1 (One) official from the Futures Clearing Institution at a level below the Clearing Director; and
4. 2 (Two) employees of the Futures Clearing Institution serving as committee secretaries.

Duties and Responsibilities of the Clearing Committee

The duties and responsibilities of the Clearing Committee for the 2024–2026 term at PT KBI are as follows:

1. Recommend procedures to be followed by applicants for clearing membership;
2. Submit recommendations to the Board of Directors regarding clearing membership applications;
3. Advise the Board of Directors on the determination of margin levels, clearing guarantee funds, clearing funds, and any changes thereto;
4. Recommend to the Board of Directors the net position limits that may be held by Clearing Members;

5. Memberikan nasihat dan merekomendasikan berbagai langkah yang akan diambil oleh Direksi pada keadaan darurat yang membahayakan integritas keuangan Lembaga Kliring dan/atau Anggota Kliring;
6. Merekomendasikan tindakan yang harus dilakukan terhadap Anggota Kliring yang cedera janji sehubungan dengan posisi terbuka, dana yang ditempatkan dan hak-hak istimewa Anggota Kliring tersebut;
7. Tindakan yang disarankan untuk dilakukan di antaranya berupa pembekuan terhadap kelebihan uang atau surat berharga yang ada pada Lembaga Kliring. Pembekuan tersebut dilakukan sampai pemeriksaan dan keputusan atas cedera janji telah diselesaikan sesuai dengan Peraturan;
8. Menetapkan besarnya kerugian dan/atau kerusakan akibat cedera janji dan merekomendasikan sanksi yang akan diberikan;
9. Merekomendasikan kepada Direksi, langkah-langkah yang diambil sehubungan dengan tindakan khusus sebagaimana dimaksud dalam Bab 11 Peraturan dan Tata Tertib PT Kliring Berjangka Indonesia; dan
10. Komite Kliring berwenang meminta kepada Bursa dan/atau Lembaga Kliring untuk memperoleh semua dokumen dan informasi yang diperlukan, dalam rangka penyelesaian masalah kliring dan penyelesaian serta penjaminan. Dokumen dan informasi tersebut bersifat rahasia, setiap Anggota Komite Kliring dilarang untuk mempergunakan dan/atau menyebarkan informasi tersebut kepada perusahaannya maupun pihak-pihak lain yang bukan Anggota Komite Kliring.

5. Provide advice and recommendations to the Board of Directors on measures to be taken in emergency situations that may threaten the financial integrity of the Clearing Institution and/ or its Clearing Members;
6. Recommend actions to be taken against Clearing Members that default on their obligations with respect to open positions, funds deposited, and the rights of the Clearing Member;
7. Suggested actions may include freezing excess cash or securities held by the Clearing Institution. Such freezing is implemented until the default issue is reviewed and resolved in accordance with regulations;
8. Determine the amount of loss and/or damage resulting from defaults and recommend the appropriate sanctions;
9. Recommend to the Board of Directors steps to be taken in connection with special actions as outlined in Chapter 11 of the Rules and Regulations of PT Kliring Berjangka Indonesia; and
10. The Clearing Committee has the authority to request from the Exchange and/or the Clearing Institution all documents and information necessary for clearing resolution, settlement, and guarantees. These documents and information are confidential, and Committee Members are prohibited from using and/or disclosing them to their companies or any parties outside the Clearing Committee.

Rapat Komite Kliring

Hingga 31 Desember 2025, Komite Kliring telah melaksanakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:

Meetings of the Clearing Committee

As of December 31, 2025, the Clearing Committee held 3 (three) meetings, with the details as follows:

Tanggal Date	Pialang/Pedagang Broker/Trader	Agenda
6 Maret 2025 March 6, 2025	-	Rapat Pembahasan Usulan Penyesuaian Margin Meeting on the Proposed Margin Adjustments
17 September 2025 September 17, 2025	PT Trading Pro Internasional Berjangka (TradingPro)	Rapat Hearing Komite Kliring PT Trading Pro Internasional Berjangka Hearing Meeting of the Clearing Committee of PT Trading Pro Internasional Berjangka
15 Oktober 2025 October 15, 2025	PT Financia Investama Berjangka	Rapat Hearing Calon Anggota Kliring PT Financia Investama Berjangka Hearing Meeting for Prospective Clearing Member of PT Financia Investama Berjangka



Komite Human Capital dan Talenta

Komite Human Capital dan Talenta (*Human Capital and Talent Committee*) atau Komite HC dibentuk sebagai organ pendukung Direksi dalam pengelolaan sumber daya manusia di PT KBI. Komite ini memiliki mandat khusus untuk merumuskan serta menetapkan arah kebijakan strategis dan operasional yang berkaitan dengan pengembangan *human capital* dan pemetaan talenta selama menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya di Perusahaan.

Susunan Komite HC

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Kliring Berjangka Indonesia Nomor 01.1/K-KBI/I/2025 tentang Komite Human Capital dan Talenta (*Human Capital and Talent Committee*) pada PT KBI ditetapkan sebagai berikut:

Ketua Merangkap Anggota

- Direktur Utama atau Pelaksana Tugas Direktur Utama.

Anggota

- Anggota Direksi,
- Pejabat BOD-1 yang membawahi Sumber Daya Manusia,
- Pejabat BOD-1 yang membawahi Keuangan dan Akuntansi.

Sekretaris

- Membawahi Fungsi Kepatuhan pada Departemen Hukum dan Kepatuhan.

Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Komite HC

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite HC PT KBI di antaranya:

1. Bidang Kebijakan dan Perencanaan Human Capital:
 - a. Menetapkan prioritas strategi pengembangan, arah kebijakan dan peningkatan kualitas human capital PT KBI dengan mengacu pada RKAP dan RJPP Perusahaan;
 - b. Menetapkan kebijakan strategis, manajemen karier, dan *corporate culture* di bidang human capital;
 - c. Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak;
 - d. Menetapkan perencanaan jumlah formasi jabatan dan strategi pemenuhan formasi jabatan; dan
 - e. Menetapkan penilaian kinerja Pegawai.

Human Capital and Talent Committee

The Human Capital and Talent Committee (HC Committee) was established as a supporting body to the Board of Directors in managing human resources at PT KBI. The Committee has a specific mandate to formulate and set strategic and operational policies related to human capital development and talent mapping while performing its functions and responsibilities within the Company.

Composition of the HC Committee

Based on the Decree of the Board of Directors of PT Kliring Berjangka Indonesia No. 01.1/K-KBI/I/2025 concerning Human Capital and Talent Committee of PT KBI is as follows:

Chairman, Concurrently as Member

- President Director or Acting President Director

Members

- Members of the Board of Directors,
- BOD-1 officials overseeing for Human Resources,
- BOD-1 officials overseeing for Finance and Accounting.

Secretary

- Oversees the Compliance Function within the Legal and Compliance Department.

Duties, Authorities, and Responsibilities of the HC Committee

The duties, authorities and responsibilities of PT KBI's HC Committee are as follows:

1. Human Capital Policy and Planning:
 - a. Establish priorities for development strategies, policy directions, and the enhancement of PT KBI's human capital quality, referring to the Company's Annual Work Plan and Budget (RKAP) and Long-Term Strategic Plan (RJPP);
 - b. Set strategic policies, career management, and corporate culture in the human capital field;
 - c. Determine the remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors of Subsidiaries;
 - d. Plan the number of position formations and strategies to fulfill these formations; and
 - e. Establish employee performance evaluation systems.

2. Bidang *Talent Mapping*:
- Menetapkan pengembangan karier Pegawai;
 - Menetapkan kepengurusan Perusahaan Anak; dan
 - Menetapkan Talent dan penentuan program pengembangan yang diberikan kepada termasuk pengembangan karier Talent.

2. Talent Mapping:
- Set employee career development programs;
 - Determine the management structure of Subsidiaries; and
 - Identify talent and define development programs, including career development initiatives for identified talent.

Rapat Komite HC

hingga 31 Desember 2025, Komite HC telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian sebagai berikut:

Meetings of the HC Committee

As of December 31, 2025, the HC Committee held 6 (six) meetings, with details as follows:

No.	Tanggal Date	Agenda
1.	07 Januari 2025 January 7, 2025	- Pengunduran Diri Pegawai PT KBI - Permohonan Penguatan SDM PT KPBI <i>Headcount 2024</i> - Resignation of PT KBI Employees - Request for HR Strengthening at PT KPBI 2024 Headcount
2.	31 Januari 2025 January 31, 2025	- Rotasi Pegawai ke TJSL (Divisi Sekretaris Perusahaan) - Penerimaan pegawai magang menjadi PKWT - Employee rotations to CSR (Corporate Secretary Division). - Interns were recruited and converted to fixed-term contracts (PKWT)
3.	27 Februari 2025 February 27, 2025	- Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan - Pengunduran Diri Pegawai <i>Headcount 2025</i> - Penguatan Organisasi PT KPBI - Changes in the organizational structure of the Company - Employee Resignations 2025 Headcounts - Organizational strengthening initiatives for PT KPBI
4.	24 September 2025 September 24, 2025	- Status Kepegawaian <i>Manpower Planning 2025-2026</i> <i>Step Challenge Program</i> - Lain-Lain - Employment Status - Manpower Planning for 2025-2026 - Step Challenge Program - Other Matters
5.	28 Oktober 2025 October 28, 2025	- Usulan Perubahan Ketentuan terkait Sakit Berkepanjangan - Pembayaran Ekses Klaim Rawat Inap Pegawai - Posisi Kepala Departemen dan Kepala Unit/Fungsi - Percepatan Assessment untuk Plt. Kepala Divisi & Plt. Kepala Departemen <i>Key Performance Indicator (KPI) Direksi</i> - Proposal of long-term sick leave policy changes - Payment of excess inpatient claims for employees - Positions for Department Heads and Unit/Function Heads - Accelerated assessments for Acting Division Heads and Acting Department Heads - Key Performance Indicators (KPIs) for the Board of Directors
6.	08 Desember 2025 December 8, 2025	- Penataan Ulang <i>Person Grade vs Job Grade</i> - Usulan THR (2x gaji dasar) - Kegiatan akhir tahun 2025 - Donasi Sumatra - Realignment of Person Grade and Job Grade - Proposal for Religious Holiday Allowance (THR) (equivalent to two times basic salary) - Year-End Activities for 2025 - Donation for Sumatra



PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS & DIREKSI

Performance Assessment of the Board of Commissioners & the Board of Directors

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Prosedur Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara rutin, yaitu satu kali dalam satu tahun atau pada setiap akhir periode pembukuan. Proses penilaian dilaksanakan melalui pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) oleh Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham, dengan *Key Performance Indicator* (KPI) sebagai dasar evaluasi kinerja. Elemen KPI disusun berdasarkan tugas dan fungsi utama PT KBI dengan total bobot penilaian hingga 100%. Dewan Komisaris melakukan evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana kerja secara mandiri (*self-assessment*), yang selanjutnya ditelaah dan dinilai oleh Pemegang Saham dalam RUPS tahunan. Indikator kinerja yang digunakan untuk penilaian kinerja Dewan Komisaris, baik secara kolektif maupun individual, ditetapkan secara bersama oleh Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Indikator-indikator penilaian kinerja Dewan Komisaris meliputi:

1. Aspek Perencanaan
2. Aspek Pengawasan dan Nasihat
3. Aspek Pelaporan
4. Aspek Dinamis

Berdasarkan indikator-indikator yang telah diterapkan, kinerja Dewan Komisaris sampai dengan akhir tahun 2025 memperoleh skor 100. Tabel berikut menunjukkan rincian penilaian kinerja Dewan Komisaris di tahun 2025:

Performance Assessment of the Board of Commissioners

Performance Assessment Procedure

The performance of the Board of Commissioners is assessed regularly, conducted once a year or at the end of each financial period. The evaluation process is carried out through the submission of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) by the Board of Commissioners to the Shareholders, using Key Performance Indicators (KPIs) as the basis for performance assessment. KPI elements are structured according to the primary duties and functions of PT KBI, with a total weighting of up to 100%. The Board of Commissioners conducts a self-assessment of performance in implementing the work plan, which is subsequently reviewed and evaluated by the Shareholders during the annual GMS. Performance indicators used to evaluate the Board of Commissioners, both collectively and individually, are jointly determined by the Board of Commissioners and the Shareholders.

Performance Assessment Criteria of the Board of Commissioners

The performance assessment indicators for the Board of Commissioners include:

1. Planning Aspect
2. Supervisory and Advisory Aspect
3. Reporting Aspect
4. Dynamic Aspect

Based on the applied indicators, the performance of the Board of Commissioners up to the end of 2025 received a score of 100. The following table presents the detailed performance evaluation of the Board of Commissioners for 2025:

No.	Program Kerja Work Program	Periode Period	Satuan Output Output Unit	Rencana Output Output Plan	Bobot Weight	Realisasi Realization	Skor Score
I. Aspek Perencanaan Planning Aspect							
1.	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta KPI Dewan Komisaris 2026 Preparing the 2026 Work Plan, Budget, and KPIs of the Board of Commissioners	Tahunan Annual	Dokumen Document	1	10	1	10
Sub Total I				1	10	1	10
II. Aspek Pengawasan dan Nasihat Supervisory and Advisory Aspect							
1.	Memberikan tanggapan/rekomendasi kepada Pemegang Saham terhadap: Providing Responses/Recommendations to Shareholders Regarding:						
	a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan The Company's Work Plan and Budget (RKAP)	Tahunan Annual	Surat Letter	1	5	1	5
	b. Laporan Tahunan Annual Report	Tahunan Annual	Surat Letter	1	6	1	6
	c. Laporan Manajemen Triwulanan Quarterly Management Report	Triwulanan Quarterly	Surat Letter	3	5	3	5
2.	Memberikan nasihat kepada Direksi sesuai bidang tugas Dewan Komisaris Providing advice to the Board of Directors in accordance with the duties of the Board of Commissioners	Setahun Over the Year	Surat/ Risalah Letter/ Meeting Minutes	12	12	12	12
3.	Rapat Dewan Komisaris Meeting of the Board of Commissioners	Setahun Over the Year	Surat/ Risalah Letter/ Meeting Minutes	12	12	12	12
	a. Jumlah Rapat Number of Meetings	Bulanan Monthly	Kali Times	12	9	12	9
	b. Kehadiran Rapat Meeting Attendance	Setahun Over the Year	%	100	5	100	5
	c. Risalah Rapat Meeting Minutes	Tahunan Annual	Risalah Meeting Minutes	12	5	12	5
4.	Rapat Komite Dewan Komisaris dengan Unit Terkait (Komite Audit dan NR) Meetings of the Board of Commissioners' Committees with Related Units (Audit Committee and Nomination & Remuneration Committee)	Bulanan Monthly	Risalah Meeting Minutes	12	6	12	6
5.	Rapat Komisaris dengan Komite Tata Kelola Terintegrasi di lingkup Holding Danareksa Meetings of the Board of Commissioners with the Integrated Governance Committee within the Danareksa Holding Group	Triwulanan Quarterly	Triwulanan Quarterly	4	4	4	4
6.	Realisasi Rencana Kerja Komite Dewan Komisaris Realization of the Board of Commissioners' Committees' Work Plan	Setahun Over the Year	%	100	3	100	3

No.	Program Kerja Work Program	Periode Period	Satuan Output Output Unit	Rencana Output Output Plan	Bobot Weight	Realisasi Realization	Skor Score
Sub Total II					60		60
III.	Aspek Pelaporan Reporting Aspect						
1.	Laporan realisasi pelaksanaan KPI Dewan Komisaris Report on the Realization of the Board of Commissioners' KPI Implementation	Triwulanan Quarterly	Laporan Report	4	5	4	5
2.	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahunan Annual Supervisory Report of the Board of Commissioners	Triwulanan Quarterly	Laporan Report	4	10	4	10
Sub Total III					15		15
IV.	Aspek Dinamis Dynamic Aspect						
1.	Evaluasi Kinerja Eksternal Auditor kepada Pemegang Saham External Auditor Performance Evaluation for Shareholders	Tahunan Annual	Surat Letter	1	3	1	3
2.	Peningkatan Kompetensi melalui Seminar, Workshop, dll. Competency Enhancement through Seminars, Workshops, etc.	Setahun Over the Year	Kali Times	2	4	2	2
	Hasil Asesmen GCG Dewan Komisaris (Self Assessment Konsultan Independen) Results of the GCG Self-Assessment for the Board of Commissioners (Independent Consultant Assessment)	Tahunan Annual	Skor Score	27	4	27	4
3.	Tanggapan terhadap Tindak Lanjut Temuan Auditor BPK/KAP Responses to Follow-Up on Findings from the State Auditor (BPK) / Public Accounting Firm (KAP)	Setahun Over the Year	Surat Letter	1	4	1	4
Sub Total IV					15		15
Total					100		100

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi pengawasan serta pemberian nasihat dan arahan kepada Direksi, baik melalui keterlibatan langsung maupun secara tidak langsung. Selama tahun 2025, Dewan Komisaris menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis kepada Direksi, antara lain sebagai berikut:

Duty Implementation of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners has carried out its supervisory functions, as well as providing advice and guidance to the Board of Directors, both through direct and indirect involvement. During 2025, the Board of Commissioners delivered a number of strategic recommendations to the Board of Directors, including the following:

No.	Rekomendasi Recommendation
1.	Direksi perlu memastikan inisiatif-inisiatif strategis, sasaran strategis dan rencana program kerja 2025 dapat tercapai terutama terkait dengan, optimalisasi ekosistem Resi Gudang untuk pembiayaan baik melalui PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia (KPBI) maupun kerja sama dengan Lembaga keuangan terkait dan pengembangan Lembaga kliring untuk Bursa CPO, yang merupakan aspek utama untuk pertumbuhan PT KBI. Terkait dengan bursa berjangka yang merupakan sumber pemasukan rutin PT KBI, Direksi perlu memastikan agar transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dapat berjalan dengan lancar sebagaimana biasanya dan juga menjamin keamanan dan integritas keuangan transaksi tersebut. The Board of Commissioners recommended that the Board of Directors ensure that strategic initiatives, objectives, and the 2025 work program were fully achieved, particularly in relation to optimizing the Resi Gudang ecosystem for financing, both through PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia (KPBI) and in collaboration with relevant financial institutions, and developing clearing services for the CPO Exchange, which are key to PT KBI's growth. Additionally, the Board emphasized the importance of maintaining smooth operations in Commodity Futures Trading (PBK) as a regular source of revenue, while ensuring the security and integrity of all financial transactions.
2.	Lebih detail terkait dengan transaksi Bursa CPO yang dalam waktu dekat diharapkan sudah mulai berjalan efektif, Direksi diharapkan terus memonitor perkembangan Bursa CPO tersebut dengan memastikan kesiapan operasional dari sisi PT KBI, sehingga ketika pada saatnya Bursa beroperasi kegiatan kliring dapat berjalan dengan lancar. The Board of Commissioners recommended that the Board of Directors closely monitor the upcoming CPO Exchange transactions to ensure operational readiness on PT KBI's side, so that clearing activities can run smoothly once the Exchange becomes fully operational.
3.	Terkait dengan bisnis penjaminan resi gudang di mana pada satu sisi ditargetkan semakin tinggi, namun di sisi lain sedang dilakukan pembenahan model bisnis, agar kolaborasi antara PT KPBI dan PT KBI sebagai induk terus diperkuat sehingga dapat menyediakan dukungan dan fondasi untuk menyokong perkembangan PT KPBI, tidak hanya dari sisi permodalan dan <i>network</i> tapi juga penguatan model bisnis yang <i>prudent</i> dari sisi internal. Dari sisi eksternal, Direksi perlu memperkuat jaringan kerja sama untuk pengembangan ekosistem Resi Gudang dan merealisasikan kerja sama tersebut baik dari sisi regulator seperti Kementerian dan Pemerintah Daerah, dari sisi pelaku pasar yang berkepentingan agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan efisien dan kebutuhan keuangan tercukupi seperti kerja sama dengan Perusahaan timah maupun gula, maupun dari sisi investor baik lembaga keuangan seperti Perbankan, maupun institusi lainnya sebagai pendukung agar ekosistem tersebut dapat berjalan dengan baik. Regarding the warehouse receipt guarantee business, which is targeted for growth while undergoing a business model restructuring, the Board advised strengthening collaboration between PT KPBI and PT KBI as the parent company. This collaboration should provide robust support for PT KPBI's development, not only in terms of capital and network, but also through the reinforcement of a prudent internal business model. Externally, the Board recommended that the Directors enhance cooperation networks to develop the Warehouse Receipt ecosystem and realize these partnerships. This includes working with regulators such as ministries and local governments, market participants to ensure efficient market mechanisms and adequate financing (e.g., partnerships with the tin and sugar sectors), and investors, including banks and other institutions, to ensure that the ecosystem functions effectively.
4.	Terkait dengan bursa maupun pasar lelang komoditas lain, Direksi perlu terus menggali dan mendorong berbagai komoditas yang berpotensi untuk diperdagangkan melalui mekanisme bursa maupun pasar lelang. Dengan demikian dari sisi PT KBI akan mendapatkan tambahan penghasilan dan juga dari sisi pelaku pasar dapat menikmati nilai tambah yang optimal dari pasar yang semakin efisien melalui bursa atau pasar lelang tersebut. The Board of Commissioners recommended that the Board of Directors continue exploring and promoting commodities with potential for trading through the Exchange or other commodity auction markets. This initiative aims to generate additional revenue for PT KBI while enabling market participants to enjoy optimal value from increasingly efficient market mechanisms.
5.	Terkait dengan kegiatan pengelolaan dana baik dana penyelesaian transaksi maupun <i>treasury</i> agar kinerja yang sudah baik, Direksi perlu untuk terus menjaga bahkan meningkatkannya dengan menerapkan strategi investasi yang optimal. Terkait dengan usulan kebijakan investasi yang ditolak oleh <i>holding</i> agar dapat dikaji pengaruhnya terhadap pencapaian RKAP, mitigasi yang dapat dilakukan, dan jika memang diperlukan penyesuaian RKAP jika memang dampaknya cukup besar dan mengancam pencapaian RKAP tersebut. Regarding the management of funds, both for transaction settlement and treasury activities, the Board recommended that the Board of Directors maintain and enhance current performance by implementing optimal investment strategies. For investment policy proposals rejected by the holding company, the Board of Directors should assess their impact on RKAP achievement, identify possible mitigations, and, if necessary, adjust RKAP targets when the potential impact is significant.
6.	Terkait pendapatan pasar lelang emas digital, Direksi perlu untuk terus meningkatkan transaksinya baik bersama mitra yang telah bekerja sama saat ini (Pluang) maupun pencarian mitra-mitra potensial lainnya untuk mengembangkan ekosistem pasar lelang emas ini. For digital gold auction market revenues, the Board advised the Board of Directors to continue increasing transaction volumes, both with current partners (e.g., Pluang) and by seeking additional potential partners to expand the ecosystem of the digital gold auction market.



No.	Rekomendasi Recommendation
7.	Direksi perlu memastikan agar seluruh kebijakan dan operasional Perusahaan dalam mencapai target kinerja operasional dan keuangan diformulasi dan dilaksanakan dengan selalu menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang andal, serta mematuhi dan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. The Board of Directors must ensure that all company policies and operational activities aimed at achieving operational and financial performance targets are formulated and executed in accordance with sound corporate governance principles, reliable internal control systems, robust risk management, and compliance with applicable laws and regulations.
8.	Terkait dengan bursa berjangka yang merupakan sumber pemasukan rutin PT KBI, Direksi perlu memastikan agar transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dapat berjalan dengan lancar sebagaimana biasanya dan juga menjamin keamanan dan integritas keuangan transaksi tersebut. Concerning the commodity futures exchange, a consistent source of PT KBI's revenue, the Board recommended that the Directors ensure smooth operations of Commodity Futures Trading (PBK) and guarantee the security and integrity of financial transactions.
9.	Terkait dengan bisnis penjaminan resi gudang di mana pada satu sisi ditargetkan semakin tinggi, namun di sisi lain sedang dilakukan pembenahan model bisnis, agar kolaborasi antara PT KPBI dan PT KBI sebagai induk terus diperkuat sehingga dapat menyediakan dukungan dan fondasi untuk menyokong perkembangan PT KPBI, tidak hanya dari sisi permodalan dan network tapi juga penguatan model bisnis yang prudent dari sisi internal. Regarding the warehouse receipt guarantee business, which is targeted for growth while undergoing a business model restructuring, the Board advised reinforcing collaboration between PT KPBI and PT KBI as the parent company. This collaboration should provide strong support for PT KPBI's development, not only in terms of capital and network but also through the strengthening of an internally prudent business model.
10.	Direksi perlu memperkuat jaringan kerja sama untuk pengembangan ekosistem Resi Gudang dan merealisasikan kerja sama tersebut baik dari sisi regulator seperti Kementerian dan Pemerintah Daerah, dari sisi pelaku pasar yang berkepentingan agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan efisien dan kebutuhan keuangan tercukupi seperti kerja sama dengan Perusahaan timah maupun gula, maupun dari sisi investor baik lembaga keuangan seperti Perbankan, maupun institusi lainnya sebagai pendukung agar ekosistem tersebut dapat berjalan dengan baik. The Board recommended that the Directors strengthen cooperation networks to develop the Warehouse Receipt ecosystem and realize these partnerships. This includes engagement with regulators such as ministries and local governments, market participants to ensure efficient market mechanisms and sufficient financing (e.g., partnerships with tin and sugar companies), and investors, including banks and other institutions, to support the ecosystem's sustainable development.
11.	Terkait dengan bursa maupun pasar lelang komoditas lain, Direksi perlu terus menggali dan mendorong berbagai komoditas yang berpotensi untuk diperdagangkan melalui mekanisme bursa maupun pasar lelang. Dengan demikian dari sisi PT KBI akan mendapatkan tambahan penghasilan dan juga dari sisi pelaku pasar dapat menikmati nilai tambah yang optimal dari pasar yang semakin efisien melalui bursa atau pasar lelang tersebut. Regarding the exchange and other commodity auction markets, the Board of Commissioners recommended that the Board of Directors continue to identify and promote commodities with potential for trading through exchange mechanisms or auction markets. This approach is expected to generate additional revenue for PT KBI while enabling market participants to derive optimal value from an increasingly efficient market.
12.	Terkait pendapatan pasar lelang emas digital, Direksi perlu untuk terus meningkatkan transaksinya baik bersama mitra yang telah bekerja sama saat ini maupun pencarian mitra-mitra potensial lainnya untuk mengembangkan ekosistem pasar lelang emas digital. Regarding income from the digital gold auction market, the Board of Directors shall continuously increase transactions through both current partnerships and the pursuit of other potential partners to further develop the digital gold auction market ecosystem.
13.	Terkait dengan budaya organisasi, Direksi dan Kepala Divisi secara berkala dan informal perlu memberikan update atas kendala-kendala yang dihadapi di lapangan (aturan, regulasi, undang-undang yang berpotensi bertabrakan) guna dicarikan solusi sehingga penyelesaian kendala di lapangan lebih cepat dan dinamika yang berkembang. Concerning organizational culture, the Board recommended that the Directors and Division Heads provide periodic and informal updates on challenges in the field (e.g., conflicting regulations or laws) to expedite resolution and manage dynamic developments effectively.
14.	Direksi perlu memberi perhatian pada pengembangan sistem agar lebih optimal yaitu SITNa, IS-Ware Nextgen, Tin Market, dashboard Emas Digital, dan sistem SAP karena merupakan bagian penting dari respon dan adaptasi PT KBI pada ekosistem bisnis yang semakin kompetitif. Selain itu, Direksi juga perlu senantiasa memperhatikan pengembangan infrastruktur IT yang saat ini berjalan agar kinerjanya dapat optimal dan menunjang bisnis proses di PT KBI. The Board advised the Directors to prioritize the optimization of key systems, including SITNa, IS-Ware Nextgen, Tin Market, Digital Gold dashboard, and SAP, as these systems are essential for PT KBI's responsiveness and adaptation in a competitive business ecosystem. Continuous monitoring and development of IT infrastructure are also recommended to ensure optimal performance supporting business processes.
15.	Direksi agar memastikan penerapan SOP dan manajemen risiko yang ketat dalam proses registrasi Resi Gudang melalui IS-Ware Nextgen terutama terkait kepatuhan atas manajemen tata kelola gudang dan barang. The Directors shall enforce strict SOP and risk management compliance in warehouse receipt registration via IS-Ware Nextgen, especially regarding governance and asset management in storage facilities.

No.	Rekomendasi Recommendation
16.	Direksi perlu memastikan agar seluruh inisiatif strategis, sasaran strategis dan rencana program kerja Tahun 2025 dapat tercapai terutama terkait dengan tindak optimalisasi ekosistem Resi Gudang untuk pembiayaan baik melalui PT KPBI maupun kerja sama dengan lembaga keuangan terkait serta pengembangan lembaga kliring untuk Bursa CPO, yang merupakan aspek utama untuk pertumbuhan bisnis PT KBI. The Board recommended that the Directors ensure all strategic initiatives, objectives, and work plans for 2025 are achieved, particularly regarding the optimization of the Warehouse Receipt ecosystem for financing through PT KPBI or other financial institutions, and the development of clearing for the CPO Exchange, which is key for PT KBI's business growth.
17.	Direksi perlu membangun komunikasi kualitatif untuk realisasi sinergi dengan anggota <i>holding</i> Danareksa terkait pemanfaatan gudang kawasan industri agar masuk ke ekosistem Resi Gudang. The Directors shall build qualitative communication channels to realize synergies with Danareksa Holding members, especially regarding the utilization of industrial area warehouses in the Warehouse Receipt ecosystem.
18.	Direksi perlu terus melakukan monitoring secara berkala terkait implementasi kebijakan manajemen risiko sesuai yang telah tertuang dalam matriks strategi risiko dan penerapan <i>Risk-Based Budgeting</i> dalam penyusunan anggaran perusahaan. The Board of Directors shall continue to conduct regular monitoring regarding the implementation of risk management policies, as outlined in the risk strategy matrix and the application of Risk-Based Budgeting in the preparation of the Company's budget.
19.	Direksi perlu memperhatikan dengan seksama dan mengambil langkah-langkah strategis dalam optimalisasi kinerja PT KPBI terutama dalam hal kinerja pembiayaan dengan Mitra dan rencana pengembangan bisnis PT KPBI agar dapat berkontribusi secara optimal. The Board of Directors shall take strategic steps to optimize PT KPBI's performance, especially in financing activities with partners and business development plans, to ensure maximum contribution.
20.	Dari aspek manajemen risiko, Direksi tetap melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang masih dapat disempurnakan dari 101 kriteria yang belum terpenuhi berdasarkan hasil penilaian Risk Maturity Index (RMI) Tahun Buku 2024. From a risk management perspective, the Directors shall continue evaluating areas for improvement based on the 101 criteria not yet met in the Risk Maturity Index (RMI) assessment for the fiscal year 2024.
21.	Direksi perlu mendorong optimalisasi ekosistem Resi Gudang untuk pembiayaan baik melalui PT KPBI maupun kerja sama dengan lembaga keuangan terkait serta mengoptimalkan implementasi transaksi Bursa CPO, untuk mendukung pertumbuhan bisnis PT KPBI. The Board advised the Directors to drive the optimization of the Warehouse Receipt ecosystem for financing through PT KPBI and financial institutions and to maximize the implementation of CPO Exchange transactions to support PT KPBI's business growth.
22.	Direksi agar mempertimbangkan untuk menyediakan skema sistem resi gudang hybrid yang bersifat fleksibel baik dari sisi tonase, jenis, waktu dan dukungan pendanaan seperti resi gudang pasir timah dengan terlebih dahulu melakukan kajian secara komprehensif untuk feasibilitasnya. The Board of Directors shall consider implementing a hybrid warehouse receipt system that is flexible in terms of tonnage, type, timing, and funding support, such as tin sand warehouse receipts, following a comprehensive feasibility study.

Penilaian Dewan Komisaris terhadap Kinerja Komite

- **Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja**
Penilaian Kinerja Komite berdasarkan capaian Program Kerja bagi Komite Dewan Komisaris.
- **Kriteria yang Digunakan**
Indikator KPI meliputi aspek operasional, aspek pelaporan, dan aspek dinamis.
- **Pihak yang Melakukan Penilaian**
Pihak yang melakukan penilaian Komite adalah Dewan Komisaris.
- **Hasil Penilaian**
Pada tahun 2025, hasil penilaian Komite Dewan Komisaris adalah 100%.

Performance Assessment of the Committees by the Board of Commissioners

- **Performance Assessment Procedure**
The performance of Committees is assessed based on the achievement of their respective Work Program objectives.
- **Criteria Used**
KPI indicators include operational aspects, reporting aspects, and dynamic aspects.
- **Assessor**
The Board of Commissioners is responsible for conducting the Committee performance evaluation.
- **Assessment Results**
In 2025, the performance evaluation of the Board of Commissioners' Committees yielded a score of 100%.



Penilaian Kinerja Direksi Performance

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi didasarkan pada *Key Performance Indicator* (KPI) yang dirumuskan sesuai dengan tugas dan mandat utama PT KBI, dengan pembobotan keseluruhan sebesar 100%. KPI tersebut ditetapkan dan disahkan oleh Pemegang Saham sebagai dasar evaluasi kinerja Direksi. Selanjutnya, Dewan Komisaris melakukan pemantauan atas realisasi pencapaian KPI secara berkala setiap triwulan sepanjang tahun berjalan.

Kriteria yang Digunakan untuk Pencapaian Kinerja Direksi

Dalam melakukan penilaian kinerja Direksi PT KBI, terdapat kriteria yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- 1. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia;
- 2. Inovasi Model Bisnis;
- 3. Kepemimpinan Teknologi;
- 4. Peningkatan Investasi; dan
- 5. Pengembangan Talenta.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Dewan Komisaris melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi secara individual maupun secara kolegal dengan mengacu pada unsur-unsur evaluasi kinerja yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi atas kinerja Direksi tersebut selanjutnya dilaporkan dan disampaikan kepada RUPS. Adapun hasil penilaian kinerja Direksi PT KBI untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Hasil Penilaian Kinerja Direksi

Results of the Board of Directors' Performance Assesment

No.	Kategori KPI KPI Category	Bobot Weight (%)	Satuan Unit	Target 2025 2025 Target	Realisasi KPI 2025 (Des 2025) KPI Realization in 2025 (Dec 2025)	Nilai Pencapaian KPI (Des 2025) KPI Achievement (Dec 2025)
A	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia Economic and Social Value for Indonesia	55				41,40
	Finansial Financial	18				
A.1.1	EBITDA	9	Rp Miliar IDR Billion	121	86,931	6,50
A.1.2	ROIC ≥ WACC	9	%	719%	5,02%	6,28
	Operasional Operational	27				
A.2.1	Pertumbuhan Pendapatan dari Kegiatan Operasi Revenue Growth from Operating Activities	9	%	20%	8,52%	3,83

Performance Assessment of the Board of Directors

Pocedure for Performance Assessment of the Board of Directors

The performance evaluation of the Board of Directors is based on Key Performance Indicators (KPIs) formulated in accordance with the primary duties and mandate of PT KBI, with a total weighting of 100%. These KPIs are established and ratified by the Shareholders as the basis for evaluating the Directors' performance. The Board of Commissioners then monitors the realization of KPI achievements on a quarterly basis throughout the year.

Criteria Used for Evaluating the Board of Directors' Performance

The evaluation of PT KBI's Board of Directors is conducted based on the following criteria:

- 1. Economic and Social Value for Indonesia;
- 2. Business Model Innovation;
- 3. Technological Leadership;
- 4. Investment Growth; and
- 5. Talent Development.

Assessor

The Board of Commissioners evaluates the performance of the Board of Directors both individually and collectively, referring to the established performance evaluation criteria. The results of this evaluation are subsequently reported and submitted to the GMS. The results of the performance assessment of the Board of Directors of PT KBI for the year 2025 are as follows:



No.	Kategori KPI KPI Category	Bobot Weight (%)	Satuan Unit	Target 2025 2025 Target	Realisasi KPI 2025 (Des 2025) KPI Realization in 2025 (Dec 2025)	Nilai Pencapaian KPI (Des 2025) KPI Achievement (Dec 2025)
A.2.2	Kontribusi Pendapatan dari Bisnis Baru Revenue Contribution from New Business	6	%	10%	2,60%	1,56
A.2.3	Penguatan Kapabilitas dan Tata Kelola Strengthening Capabilities and Governance	7	Kuartal Quarter	Q2	Q2	7,00
A.2.4	Ketetapan Kinerja Operasional Bisnis Utama Core Business Operational Performance Provisions	5	%	100%	107%	5,35
Sosial Social		10				
A.3.1	Kegiatan Literasi/Edukasi PBK, Resi Gudang, Pasar Fisik PBK Literacy/Education Activities, Warehouse Receipt, Physical Market	5	Kali Times	40	43	5,38
A.3.2	Jumlah Penerima Manfaat Resi Gudang Number of Warehouse Receipt Beneficiaries	5	NIK	3000	3386	5,50
B	Inovasi Model Bisnis Business Model Innovation	15				16,50
B.1	Implementasi Sinergi pada Holding Danareksa Implementation of Synergy within the Danareksa Holding	8	Perjanjian Kerja Sama Cooperation Agreement	3	4	8,80
B.2	Pengembangan Alternatif Bisnis Baru KBI Development of New Business Alternatives for KBI	7	Produk/ Layanan Baru New Products/ Services	2	3	7,70
C	Kepemimpinan Teknologi Technological Leadership	10				10,00
C.1	Implementasi TI Aman & Terintegrasi + SSC Secure & Integrated IT Implementation + SSC	10	%	100%	100%	10,00
D	Peningkatan Investasi Investment Growth	15				8,31
D.1	Realisasi Penyerapan Investasi Realization of Investment	8	%	70%	37%	4,23
D.2	Optimalisasi <i>Treasury</i> melalui Sinergi Danareksa Treasury Optimization through Danareksa Synergy	7	Rp Miliar IDR Billion	300	175	4,08
E	Pengembangan Talenta Talent Development	5				5,50
E.1	<i>Talent Diversity (Millennials, Women)</i>	5	%	16%	33%	5,50
Total KPI						81,71



Analisis atas Kinerja PT KBI

Pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) PT Kliring Berjangka Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang bervariasi di setiap perspektif. Secara keseluruhan, Perusahaan berhasil membukukan skor total sebesar 81,71 dari 100, yang mencerminkan capaian kinerja yang cukup solid meskipun masih terdapat beberapa area yang perlu dioptimalkan.

Pada Kategori A: Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia, kinerja finansial menunjukkan bahwa realisasi EBITDA mencapai Rp86,93 miliar dari target Rp121 miliar dengan skor 6,50, sementara ROIC sebesar 5,02% masih berada di bawah target 7,19% dengan skor 6,28. Dari sisi operasional, pertumbuhan pendapatan tercatat sebesar 8,5% dari target 20%, yakni dengan skor 3,83, dan kontribusi pendapatan dari bisnis baru sebesar 2,6% dari target 10% dengan skor 1,56, yang mengindikasikan perlunya percepatan ekspansi bisnis.

Meski demikian, penguatan kapabilitas dan tata kelola telah berjalan sesuai target dengan skor maksimal 7,00, dan kinerja operasional bisnis utama bahkan melampaui target dengan realisasi 107% dengan skor 5,35. Dari aspek sosial, perusahaan menunjukkan kinerja positif melalui realisasi 43 kegiatan literasi (melebihi target 40 kegiatan) serta peningkatan jumlah penerima manfaat Resi Gudang menjadi 3.386 NIK dari target 3.000 NIK, masing-masing menghasilkan skor 5,38 dan 5,50.

Analysis of PT KBI Performance

The *Key Performance Indicators* (KPI) achievement of PT Kliring Berjangka Indonesia for 2025 demonstrates varied performance across all perspectives. Overall, the Company recorded a total score of 81.71 out of 100, reflecting a solid performance despite several areas that require further optimization.

In Category A: In terms of Economic and Social Value for Indonesia, the financial performance shows that EBITDA realization reached IDR86.93 billion of the IDR121 billion target with a score of 6.50, while ROIC at 5.02% remained below the target of 7.19% with a score of 6.28. From an operational standpoint, revenue growth was recorded at 8.5% of the 20% target, yielding a score of 3.83, and revenue contribution from new businesses stood at 2.6% from a target of 10% with a score of 1.56, indicating a need for accelerated business expansion.

Nevertheless, the strengthening of capabilities and governance proceeded in line with targets, achieving a maximum score of 7.00, while core business operational performance even exceeded targets with a realization of 107% and a score of 5.35. From a social perspective, the company demonstrated positive performance through the realization of 43 literacy activities (exceeding the target of 40 activities) and an increase in the number of Warehouse Receipt beneficiaries to 3,386 individuals from a target of 3,000, yielding scores of 5.38 and 5.50, respectively.

Pada Kategori B: Inovasi Model Bisnis, perusahaan mencatat kinerja yang sangat baik. Implementasi sinergi dalam Holding Danareksa melampaui target dengan realisasi empat perjanjian kerja sama dengan skor 8,80, sementara pengembangan alternatif bisnis baru juga berhasil melampaui target dengan tiga produk atau layanan baru dengan skor 7,70.

Selanjutnya, pada Kategori C: Kepemimpinan Teknologi, implementasi teknologi informasi yang aman dan terintegrasi, termasuk pengembangan Share Service Center sebagai pusat keunggulan operasional, telah terealisasi sepenuhnya sesuai target dengan skor maksimal 10,00.

Pada Kategori D: Peningkatan Investasi, kinerja masih perlu ditingkatkan. Realisasi penyerapan investasi baru mencapai 37% dari target 70% dengan skor 4,23, sementara optimalisasi pengelolaan *treasury* melalui sinergi Holding Danareksa terealisasi sebesar Rp175 miliar dari target Rp300 miliar dengan skor 4,08.

Terakhir, pada Kategori E: Pengembangan Talenta, perusahaan menunjukkan capaian yang sangat baik dalam aspek keberagaman talenta. Realisasi komposisi talenta dari kalangan milenial dan perempuan mencapai 33%, jauh melampaui target 16%, dengan skor 5,50.

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan fondasi kinerja yang kuat, terutama dalam aspek inovasi, teknologi, dan sosial, meskipun optimalisasi pada sisi pertumbuhan bisnis dan investasi masih menjadi fokus perbaikan ke depan.

In Category B: For Business Model Innovation, the company recorded excellent performance. The implementation of synergies within the Danareksa Holding exceeded targets with the realization of four cooperation agreements and a score of 8.80, while the development of new business alternatives also successfully surpassed targets with three new products or services and a score of 7.70.

Furthermore, in Category C: In terms of Technology Leadership, the implementation of secure and integrated information technology, including the development of the Shared Service Center as an operational center of excellence, was fully realized in accordance with the set targets, achieving a maximum score of 10.00.

In Category D: In terms of Investment Growth, the performance still required improvement. New investment absorption realization reached 37% of the 70% target with a score of 4.23, while the optimization of treasury management through Danareksa Holding synergies was realized at IDR 175 billion of the IDR300 billion target, with a score of 4.08.

Lastly, in Category E: Regarding Talent Development, the company demonstrated exceptional achievements in the aspect of talent diversity. The realization of talent composition from millennial and female groups reached 33%, far exceeding the 16% target, with a score of 5.50.

Overall, these achievements indicate a strong performance foundation, particularly in the aspects of innovation, technology, and social impact, although optimization of business growth and investment remains a focus for future improvement.



KEBIJAKAN NOMINASI DAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Nomination and Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Kebijakan Nominasi

Kebijakan nominasi Dewan Komisaris dan Direksi PT KBI telah sesuai dengan Peraturan Menteri Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/ MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara tanggal 20 Maret 2023.

Proses Nominasi

Manajemen Talenta dilaksanakan melalui proses:

1. Penjaringan dan pemilihan talenta;
2. Penilaian talenta;
3. Pengklasifikasian talenta;
4. Pengembangan talenta; dan
5. Perputaran talenta.

Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi PT KBI telah mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara tanggal 20 Maret 2023. Penerapan remunerasi di PT KBI didasarkan pada evaluasi kinerja individu melalui pendekatan *Rewards and Consequences* (RnC), yaitu mekanisme pemberian imbalan maupun konsekuensi atau sanksi yang dikaitkan dengan capaian kinerja fungsi, kinerja personal, serta tingkat efektivitas kepemimpinan dalam periode satu tahun.

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan dengan menggunakan sejumlah kriteria, yaitu:

1. Internal Dewan Komisaris;
2. Dewan Komisaris dengan Direksi; dan
3. Dewan Komisaris dengan RUPS.

Sedangkan penilaian kinerja Direksi dilaksanakan dengan menggunakan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Keuangan;
2. Operasional; dan
3. Pengembangan bisnis dan kepuasan konsumen.

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan oleh Pemegang Saham melalui RUPS.

Nomination Policy

The nomination policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT KBI has been implemented in accordance with the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organization and Human Resources of State-Owned Enterprises, dated March 20, 2023.

Nomination Process

Talent Management is carried out through the following processes:

1. Talent sourcing and selection;
2. Talent assessment;
3. Talent classification;
4. Talent development; and
5. Talent rotation.

Remuneration Policy

The remuneration policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT KBI refers to the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organization and Human Resources of State-Owned Enterprises, dated March 20, 2023. Remuneration at PT KBI is implemented based on individual performance evaluations using a *Rewards and Consequences* (RnC) approach, a mechanism that links rewards or consequences to the achievement of functional performance, personal performance, and leadership effectiveness over a one-year period.

The performance of the Board of Commissioners is evaluated using the following criteria:

1. Internal performance of the Board of Commissioners;
2. Performance of the Board of Commissioners in coordination with the Board of Directors; and
3. Performance of the Board of Commissioners in relation to GMS.

The performance of the Board of Directors is evaluated based on the following criteria:

1. Financial performance;
2. Operational performance; and
3. Business development and customer satisfaction.

The assessment of both the Board of Commissioners and the Board of Directors is conducted by the Shareholders GMS.

Prosedur dan Penetapan Remunerasi

Prosedur penetapan remunerasi melalui tahapan- tahapan yang melibatkan dari Pemegang Saham dan pejabat berwenang PT KBI, seperti:

1. Dewan Komisaris melakukan kajian dan menyusun rekomendasi kepada Pemegang Saham untuk menentukan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Dewan Komisaris bersama Direksi menyampaikan kepada Pemegang Saham untuk menyelenggarakan RUPS; dan
3. RUPS menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT KBI.

Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa berkomitmen untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, antara lain dengan tidak meminta, menerima, maupun memperoleh manfaat pribadi dalam bentuk apa pun selain remunerasi dan fasilitas lain yang telah ditetapkan melalui RUPS.

Struktur Remunerasi

Komponen remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari:

1. Honorarium/Gaji;
2. Tunjangan;
3. Fasilitas;
4. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus; dan
5. Insentif Jangka Panjang.

Besarnya Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Pada tahun 2025, Dewan Komisaris dan Direksi PT KBI memperoleh paket remunerasi yang mencakup gaji/honorarium, Tunjangan Hari Raya (THR), asuransi purnajabatan, tunjangan transportasi, tunjangan perumahan, fasilitas kendaraan, fasilitas kesehatan, bantuan hukum. Adapun perincian remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi PT KBI selama tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Remuneration Procedure and Determination

The process for determining remuneration involves several stages with the participation of the Shareholders and authorized PT KBI officials, as follows:

1. The Board of Commissioners conducts a review and prepares recommendations to the Shareholders regarding the amount of remuneration for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors;
2. The Board of Commissioners, together with the Board of Directors, submits the recommendations to the Shareholders for approval through the GMS; and
3. The GMS formally determines the remuneration for the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT KBI.

The Board of Commissioners and the Board of Directors remain committed to ensuring the implementation of good corporate governance principles, including refraining from requesting, receiving, or obtaining any personal benefit beyond the remuneration and other facilities approved by the GMS.

Remuneration Structure

The remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors consists of the following components:

1. Honorarium/Salary;
2. Allowances;
3. Facilities;
4. Tantiem/Performance Incentives / Special Incentives; and
5. Long-Term Incentives.

Remuneration Amount for the Board of Commissioners and the Board of Directors

In 2025, the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT KBI received a remuneration package that included salary/honorarium, holiday allowance (THR), post-employment insurance, transportation allowance, housing allowance, vehicle facilities, healthcare benefits, and legal assistance. The details of the remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT KBI in 2025 are presented in the following table:



Jenis Penghasilan Types of Remuneration	Besaran Maksimum Maximum Amount	
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Honorarium/Gaji Honorarium/Salary	- Honorarium Komisaris Utama sebesar 45% dari Gaji Direktur Utama. - Honorarium Anggota Dewan Komisaris sebesar 90% dan Honorarium Komisaris Utama. 1. The honorarium of the President Commissioner is set at 45% of the President Director's salary. 2. The honorarium of Members of the Board of Commissioners is set at 90% of the President Commissioner's honorarium.	Gaji anggota Direksi sebesar 85% dari Gaji Direktur Utama. The salary of members of the Board of Directors is set at 85% (of the President Director's salary.
Tunjangan Allowance	1 (satu) kali Once	1 (satu) kali Once
Asuransi Purnajabatan Post-Employment Insurance	Ketentuan mengenai asuransi purnajabatan anggota Direksi mutatis mutandis berlaku bagi penetapan asuransi purnajabatan anggota Dewan Komisaris. The provisions governing post-employment insurance for members of the Board of Directors shall apply <i>mutatis mutandis</i> to the determination of post-employment insurance for members of the Board of Commissioners.	- Asuransi purnajabatan, termasuk program jaminan yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, diberikan selama menjabat; - Premi yang ditanggung oleh PT KBI paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari Gaji dalam 1 (satu) tahun; - Pemilihan program untuk asuransi purnajabatan ditetapkan oleh masing-masing anggota Direksi; dan - Pemberian premi, iuran atau istilah lain yang relevan untuk asuransi purnajabatan, sudah termasuk di dalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan jiwa. 1. Post-employment insurance, including social security programs administered by the Social Security Administering Body for Employment (<i>BPJS Ketenagakerjaan</i>), shall be provided during the term of office; 2. Premiums borne by PT KBI shall not exceed 25% of the annual salary in 1 (one) year; 3. The selection of post-employment insurance programs shall be determined by each member of the Board of Directors individually; 4. The payment of premiums, contributions, or other relevant terms for post-employment insurance shall include coverage for work-related accident insurance and life insurance.
Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	Tunjangan transportasi diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Honorarium masing-masing anggota Dewan Komisaris. Transportation allowance shall be granted in the amount of 20% of the honorarium of each member of the Board of Commissioners.	-
Tunjangan Perumahan Housing Allowance	-	- Tunjangan perumahan termasuk biaya utilitas diberikan secara bulanan yang besarnya ditetapkan oleh Menteri. - Besarnya Tunjangan perumahan dapat disesuaikan berdasarkan Keputusan Menteri. 1. The housing allowance, including utility costs, shall be provided on a monthly basis, with the amount determined by the Minister. 2. The amount of the housing allowance may be adjusted based on a Ministerial Decree.

Jenis Penghasilan Types of Remuneration	Besaran Maksimum Maximum Amount	
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Fasilitas Kendaraan Vehicle Facility	-	1. Anggota Direksi hanya berhak atas 1 (satu) unit Fasilitas kendaraan dari PT KBI; 2. Fasilitas kendaraan termasuk di dalamnya biaya pemeliharaan dan operasional yang diberikan dengan memperhatikan kondisi keuangan PT KBI; 3. Spesifikasi dan standar kendaraan ditetapkan oleh RUPS/Menteri; dan 4. Dalam hal anggota Direksi tidak lagi menjabat maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tidak menjabat harus mengembalikan kendaraan tersebut kepada PT KBI. 1. Members of the Board of Directors are entitled to only 1 (one) unit of vehicle facility provided by PT KBI; 2. The vehicle facility includes maintenance and operational costs, which are granted with due consideration to PT KBI's financial condition; 3. The specifications and standards of the vehicle are determined by the GMS/the Minister; 4. In the event that a member of the Board of Directors no longer holds office, the vehicle must be returned to PT KBI no later than 30 (thirty) days after the end of the term of office.
Fasilitas Kesehatan Healthcare Facility	Ketentuan mengenai Fasilitas kesehatan Direksi, mutatis mutandis berlaku bagi Fasilitas kesehatan Dewan Komisaris. The provisions governing healthcare facilities for members of the Board of Directors shall apply mutatis mutandis to the determination of healthcare facilities for members of the Board of Commissioners.	1. Fasilitas kesehatan diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan. 2. Fasilitas kesehatan diberikan dalam bentuk: a. Program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; b. Rawat jalan dan obat; c. Rawat inap dan obat; dan d. Pemeriksaan kesehatan secara medis (<i>medical checkup</i>). 1. Healthcare facilities are provided in the form of health insurance coverage or medical expense reimbursement. 2. Healthcare facilities are provided in the form of: a. Health insurance programs administered by BPJS; b. Outpatient care and medication; c. Inpatient care and medication; and d. Medical check-ups.
Bantuan Hukum Legal Assistance	Ketentuan mengenai Fasilitas bantuan hukum Direksi, mutatis mutandis berlaku bagi Fasilitas bantuan hukum bagi anggota Dewan Komisaris serta mantan anggota Dewan Komisaris. The provisions governing legal assistance for members of the Board of Directors shall apply mutatis mutandis to the determination of legal assistance for members of the Board of Commissioners.	Fasilitas bantuan hukum diberikan dalam bentuk: 1. Pembiayaan jasa hukum yang meliputi proses pemberian keterangan, pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut; 2. Pembiayaan jasa hukum sebagai saksi atau tergugat dalam sengketa hukum di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut; dan 3. Biaya transportasi dan akomodasi sehubungan dengan proses hukum tersebut. Legal assistance facilities are provided in the form of: 1. Coverage of legal service fees, including legal representation and assistance in providing statements, examinations as a witness, suspect, or defendant before judicial authorities, up to the issuance of a final and legally binding court decision, as well as the preparation of relevant supporting documents related to such proceedings; 2. Coverage of legal service fees for individuals acting as a witness or defendant in legal disputes before judicial authorities, up to the issuance of a final and legally binding court decision, including the preparation of related supporting documents; and 3. Coverage of transportation and accommodation costs incurred in connection with the aforementioned legal proceedings.



Jenis Penghasilan Types of Remuneration	Besaran Maksimum Maximum Amount	
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Tantiem/Insentif Kerja Tantiem/Incentive	PT KBI dapat memberikan Tantiem atau Insentif Kinerja kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan penetapan RUPS/Menteri dalam pengesahan laporan tahunan apabila: 1. Opini yang diterbitkan oleh auditor adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); 2. Realisasi tingkat kesehatan paling rendah sama dengan peringkat BBB tanpa memperhitungkan beban/ keuntungan akibat tindakan Direksi sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direksi; 3. Capaian KPI paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen) tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi; dan 4. Kondisi PT KBI tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk Perusahaan dalam kondisi rugi, atau Perusahaan tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi. PT KBI may grant tantiem or performance-based incentives to members of the Board of Directors and the Board of Commissioners based on the resolution of the GMS/Minister upon approval of the Annual Report, provided that: 1. The audit opinion issued by the external auditor is Unqualified; 2. The Company's financial soundness rating is at least BBB, excluding the impact of charges or gains arising from actions taken by prior Boards of Directors and/or factors beyond the control of the current Board of Directors; 3. KPI achievement reaches at least 80%, excluding factors beyond the control of the Board of Directors; and 4. The condition of PT KBI shall not incur a greater loss than the previous year for a Company in a loss position, or the Company shall not transition into a loss from a previous profit position, excluding factors beyond the control of the Board of Directors.	PT KBI dapat memberikan Tantiem atau Insentif Kinerja kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan penetapan RUPS/Menteri dalam pengesahan laporan tahunan apabila: 1. Opini yang diterbitkan oleh auditor adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); 2. Realisasi tingkat kesehatan paling rendah sama dengan peringkat BBB tanpa memperhitungkan beban/keuntungan akibat tindakan Direksi sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direksi; 3. Capaian KPI paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen) tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi; dan 4. Kondisi PT KBI tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk Perusahaan dalam kondisi rugi, atau Perusahaan tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi. PT KBI may grant tantiem or performance-based incentives to members of the Board of Directors and the Board of Commissioners based on the resolution of the GMS/Minister upon approval of the Annual Report, provided that: 1. The audit opinion issued by the auditor is Unqualified; 2. The Company's financial soundness rating is at least BBB, excluding expenses or gains arising from actions of previous Boards of Directors and/or factors beyond the control of the current Board of Directors; 3. KPI achievement is at least 80%, excluding factors beyond the control of the Board of Directors; and 4. The condition of PT KBI shall not deteriorate in terms of losses compared to the previous year for a Company in a loss position, or the Company shall not incur a loss after previously being in a profit position, excluding factors beyond the control of the Board of Directors.

Jenis Penghasilan Types of Remuneration	Besaran Maksimum Maximum Amount	
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Insentif Khusus Special Incentive	Dalam hal PT KBI tidak memenuhi seluruh syarat yang tercantum dalam Pasal 102 PER-3/MBU/03-2023, dapat dipertimbangkan pemberian Insentif Khusus kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dengan memenuhi syarat: - Menjalankan fungsi kewajiban pelayanan publik (<i>public service obligation</i>), Proyek Strategis Nasional, atau restrukturisasi/ penyesuaian BUMN, dengan ketentuan: - Opini yang diterbitkan oleh auditor paling rendah Wajar Dengan Pengecualian (WDP); dan - Capaian KPI paling rendah sebesar 70% (tujuh puluh persen); atau - Adanya keadaan kahar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah dengan ketentuan: - Opini yang diterbitkan oleh auditor paling rendah Wajar Dengan Pengecualian (WDP); dan - Capaian KPI paling rendah sebesar 70% (tujuh puluh persen). If PT KBI does not fully meet all requirements as stipulated in Article 102 of PER-3/MBU/03-2023, the granting of a Special Incentive to members of the Board of Directors and the Board of Commissioners may be considered, subject to the following conditions: - Implementation of public service obligations (PSO), National Strategic Projects, or SOE restructuring/ turnaround programs, provided that: - The audit opinion issued by the auditor is at least Qualified; and - KPI achievement is at least 70%; or - The occurrence of force majeure circumstances as determined by the central or regional government, provided that: - The audit opinion issued by the auditor is at least Qualified; and - KPI achievement is at least 70%.	Dalam hal PT KBI tidak memenuhi seluruh syarat yang tercantum dalam Pasal 102 PER-3/MBU/03-2023, dapat dipertimbangkan pemberian Insentif Khusus kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dengan memenuhi syarat: - Menjalankan fungsi kewajiban pelayanan publik (<i>public service obligation</i>), Proyek Strategis Nasional, atau restrukturisasi/ penyesuaian BUMN, dengan ketentuan: - Opini yang diterbitkan oleh auditor paling rendah Wajar Dengan Pengecualian (WDP); dan - Capaian KPI paling rendah sebesar 70% (tujuh puluh persen); atau - Adanya keadaan kahar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah dengan ketentuan: - Opini yang diterbitkan oleh auditor paling rendah Wajar Dengan Pengecualian (WDP); dan - Capaian KPI paling rendah sebesar 70% (tujuh puluh persen). Where PT KBI does not fully meet all requirements as stipulated in Article 102 of PER-3/MBU/03-2023, the granting of a Special Incentive to members of the Board of Directors and the Board of Commissioners may be considered, subject to the following conditions: - Performance of public service obligations (Public Service Obligation/PSO), National Strategic Projects, or SOE restructuring/turnaround programs, provided that: - The audit opinion issued by the auditor is at least Qualified; and - KPI achievement is at least 70%; or - The occurrence of force majeure circumstances as determined by the central government or regional government, provided that: - The audit opinion issued by the auditor is at least Qualified; and - KPI achievement is at least 70%.

Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2025

Remuneration Amount for the Board of Commissioners and the Board of Directors in 2025

Uraian Description	Jumlah Total
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris Remuneration for the Board of Commissioners	Rp2,39 miliar IDR2.39 billion
Jumlah Remunerasi Direksi Remuneration for the Board of Commissioners	Rp5,33 miliar IDR5.33 billion
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2025 Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors in 2025	Rp7,72 miliar IDR7.72 billion

HUBUNGAN AFILIASI

Affiliation

Seluruh pejabat di lingkungan PT KBI tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham utama dan/atau pengendali. Kondisi tersebut dapat dilihat sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

All officers within PT KBI are not affiliated with members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or the controlling and/or majority shareholders. This condition is disclosed in the table below:

Nama Name	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Jumlah Orang Number of People	Pemegang Saham Utama/ Pengendali Controlling/Majority Shareholders
Hernawan B. Sasongko	x	x	x
Budi Susanto	x	x	x
Adiyasa Suhadibroto	x	x	x
Saidu Solihin	x	x	x

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Secretary of the Board of Commissioners

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris berwenang menunjuk seorang Sekretaris Dewan Komisaris. Penunjukan tersebut dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi Pemegang Saham melalui RUPS.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

PT KBI menunjuk Sekretaris Dewan Komisaris sebagai unsur pendukung untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris di lingkungan Perusahaan. Sejak 8 Agustus 2025, jabatan Sekretaris Dewan Komisaris PT KBI diemban oleh Yudithya Aristy Primaditta berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 07/DK-KBI/VIII/2025 tanggal 8 Agustus 2025.

To support the performance of its duties and responsibilities, the Board of Commissioners is authorized to appoint a Secretary of the Board of Commissioners. Such appointment may be made based on a recommendation from the Shareholders through the GMS.

Profile of the Secretary of the Board of Commissioners

PT KBI has appointed a Secretary of the Board of Commissioners as a supporting organ to assist the Board in performing its duties and functions within the Company. Since August 8, 2025, the position of Secretary of the Board of Commissioners of PT KBI has been held by Yudithya Aristy Primaditta, based on the Decree of the Board of Commissioners No. 07/DK-KBI/VIII/2025 dated August 8, 2025.

Yuditha Aristy Primaditta

Sekretaris Dewan Komisaris | Secretary of the Board of Commissioners

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia Indonesian
Usia Age	34 tahun years old
Domisili Domicile	Jakarta
Periode Jabatan Term of Office	8 Agustus 2025 – Saat ini August 8, 2025 - Present
Riwayat Pendidikan Educational Background	- Magister Hukum dari Universitas Indonesia Master's Degree in Law from Universitas Indonesia - Sarjana Hukum dari Universitas Padjajaran Bachelor's Degree in Law from Universitas Padjadjaran
Pengalaman Kerja Professional Experience	- Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Pertama, Asisten Deputy Bidang Peraturan Perundang-Undangan - Badan Pengaturan BUMN (2025 – Saat ini) - Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Pertama, Asisten Deputy Bidang Peraturan Perundang-Undangan - Kementerian BUMN (2022 – 2025) - Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Pertama, Asisten Deputy Bidang Hukum Korporasi, Kementerian BUMN (2020 – 2022) - Analisis Hukum, Asisten Deputy Bidang Layanan Hukum - Kementerian BUMN (2017 - 2020) - Compliance Officer - PT Bank ICBC Indonesia (Januari 2017 – Desember 2017) - Compliance Officer - PT Bank ICBC Indonesia (Januari 2013 – Desember 2014) - First Expert State-Owned Enterprise Governance Officer, Assistant Deputy for Legislative and Regulatory Affairs of Badan Pengaturan BUMN (2025 – Present) - First Expert State-Owned Enterprise Governance Officer, Assistant Deputy for Legislative and Regulatory Affairs of Kementerian BUMN (2022 – 2025) - First Expert State-Owned Enterprise Governance Officer, Assistant Deputy for Corporate Legal Affairs of Kementerian BUMN (2020 – 2022) - Legal Analyst, Assistant Deputy for Legal Services of Kementerian BUMN (2017 – 2020) - Compliance Officer of PT Bank ICBC Indonesia (January 2017 – December 2017) - Compliance Officer of PT Bank ICBC Indonesia (January 2013 – December 2014)

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab, mencakup hal-hal berikut ini:

1. Mengagendakan Rapat Dewan Komisaris dan menyusun alternatif agenda rapat;
2. Memiliki uraian tugas yang menjelaskan tentang uraian tugas pokok dan fungsi Sekretaris Dewan Komisaris yang ditetapkan Komisaris Utama;
3. Mempunyai fasilitas penyimpanan dokumen Dewan Komisaris agar dapat mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris dengan tertib; dan
4. Menyiapkan undangan rapat, menghadiri rapat Dewan Komisaris serta menyiapkan risalah rapat Dewan Komisaris yang mencerminkan dinamika rapat.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris

Selama tahun 2025, Sekretaris Dewan Komisaris PT KBI tidak menjalankan program pengembangan kompetensi.

Duties and Responsibilities of the Secretary of the Board of Commissioners

The Secretary of the Board of Commissioners has the following duties and responsibilities:

1. Schedule meetings of the Board of Commissioners and prepare alternative meeting agendas;
2. Have a defined job description outlining the main duties and functions of the Secretary to the Board of Commissioners, as stipulated by the President Commissioner;
3. Maintain adequate facilities for the storage of Board of Commissioners' documents to ensure orderly administration of such documents; and
4. Prepare meeting invitations, attend meetings of the Board of Commissioners, and prepare minutes of meetings that accurately reflect the proceedings and dynamics of the meetings.

Competency Development Programs for the Secretary of the Board of Commissioners

During 2025, the Secretary of the PT KBI Board of Commissioners did not carry out competency development programs.



Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris

Committees Under the Board of Commissioners

Komite Audit, Pemantau Risiko, dan Tata Kelola Terintegrasi

PT KBI membentuk Komite Audit, Pemantau Risiko, dan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris PT KBI Nomor SK-06/DK- KBI/VII/2025 tertanggal 30 Juli 2025 mengenai perubahan komposisi keanggotaan komite tersebut:

Audit, Risk Monitoring, and Integrated Governance Committee

PT KBI established the Audit, Risk Oversight, and Integrated Governance Committee as stipulated in the Decree of the Board of Commissioners of PT KBI No. SK-06/DK- KBI/ VII/2025 dated July 30, 2025, concerning amendments to the composition of the committee's membership:

Jabatan Position	Nama Name	Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period
Ketua Chairman	Fajar Massadiah Egy (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Keputusan Dewan Komisaris PT KBI Nomor SK-09/DK-KBI/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 Decree of the Board of Commissioners of PT KBI No. SK-09/DK-KBI/V/2024 dated May 31, 2024	3 tahun years	Pertama First
Anggota Member	Hernawan B. Sasongko (Komisaris Utama) (President Commissioner)	Keputusan Dewan Komisaris PT KBI Nomor SK-09/DK-KBI/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 Decree of the Board of Commissioners of PT KBI No. SK-09/DK-KBI/V/2024 dated May 31, 2024	3 tahun years	Pertama First
Anggota Member	Irman Sahroni Ahmad (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Keputusan Dewan Komisaris PT KBI Nomor SK-09/DK-KBI/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 Decree of the Board of Commissioners of PT KBI No. SK-09/DK-KBI/V/2024 dated May 31, 2024	3 tahun years	Pertama First
Anggota Member	Dating Palembangan	Keputusan Dewan Komisaris PT KBI Nomor Nomor SK-05/DK-KBI/VII/2024 tanggal 28 Juli 2025 Decree of the Board of Commissioners of PT KBI No. SK-05/DK-KBI/VII/2024 dated July 28, 2025	3 tahun years	Pertama First
Anggota Member	Toto Zurianto	Keputusan Dewan Komisaris PT KBI Nomor SK-09/DK-KBI/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 Decree of the Board of Commissioners of PT KBI No. SK-09/DK-KBI/V/2024 dated May 31, 2024	3 tahun years	Pertama First

Profil Komite Audit, Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi

Profile of the Audit, Risk Monitoring and Integrated Governance Committee

Fajar Massadiah Egy

Ketua | Chairman

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia Indonesian
Usia Age	59 tahun years old
Domisili Domicile	Jakarta
Periode Jabatan Term of Office	Periode jabatan pertama First period
Riwayat Pendidikan Educational Background	- Magister Ilmu Komunikasi dari Universitas Paramadina (2016) - Sarjana Ilmu Administrasi dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (2004) - Master's Degree in Communication Studies, Paramadina University (2016) - Bachelor's Degree in Administrative Sciences, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (2004)
Sertifikasi Certification	<i>Certified Governance Oversight Professional</i>
Pengalaman Kerja Professional Experience	- Komisaris Independen - PT Kliring Berjangka Indonesia (2024 - Saat ini) - Tim Media Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat - PPAD (2021 - Saat ini) - Komisaris Utama - PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) (2020 - 2024) - Tenaga Ahli Badan Nasional Penanggulangan Bencana/ Satgas Covid (2019 - 2021) - Wartawan/Redaktur Senior - Tabloid Wanita Indonesia (1989 - 1992) - Independent Commissioner of PT Kliring Berjangka Indonesia (2024 - Present) - Media Team Member of Indonesian Army Retirees Association (PPAD) (2021 - Present) - President Commissioner of PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) (2020 - 2024) - Expert Staff of National Disaster Management Agency / COVID-19 Task Force (2019 - 2021) - Journalist / Senior Editor of <i>Tabloid Wanita Indonesia</i> (1989 - 1992)

Hernawan B. Sasongko

Anggota | Member

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia Indonesian
Usia Age	63 tahun years old
Domisili Domicile	Jakarta
Periode Jabatan Term of Office	Periode jabatan pertama First period
Riwayat Pendidikan Educational Background	- Magister of Business Administration dari Royal Melbourne Institute of Technology, Australia (1995) - Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Kristen Indonesia (1986) - Master of Business Administration, Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), Australia (1995) - Magister of Business Administration from Royal Melbourne Institute of Technology, Australia (1995) - Bachelor's Degree in Economics (Management), from Universitas Kristen Indonesia (1986) - Master of Business Administration from Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), Australia (1995)
Sertifikasi Certification	<i>Certified Governance Oversight Professional</i> <i>Special Directorship</i>
Pengalaman Kerja Professional Experience	- Komisaris Utama - PT Kliring Berjangka Indonesia (2023 - Saat ini) - Deputi Komisioner Internasional dan Riset - Otoritas Jasa Keuangan (2020 - 2022) - Advisor Senior/Deputi Komisioner Strategic Committee - Otoritas Jasa Keuangan (2017 - 2020) - Deputi Komisioner Manajemen Strategis (Bidang Organisasi/SDM dan Hukum) - Otoritas Jasa Keuangan (2016 - 2017) - President Commissioner of PT Kliring Berjangka Indonesia (2023 - Present) - Deputy Commissioner for International Affairs and Research of Financial Services Authority (OJK) (2020 - 2022) - Senior Advisor/Deputy Commissioner, Strategic Committee of Financial Services Authority (OJK) (2017 - 2020) - Deputy Commissioner for Strategic Management (Organization/HR and Legal) of Financial Services Authority (OJK) (2016 - 2017)

Irman Sahroni Ahmad

Anggota | Member

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia Indonesian
Usia Age	43 tahun years old
Domisili Domicile	Tangerang
Periode Jabatan Term of Office	Periode jabatan pertama First period
Riwayat Pendidikan Educational Background	- Sarjana Manajemen Informatika dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer Jayakarta (2007) - Bachelor's Degree in Information Management from Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer Jayakarta (2007)
Sertifikasi Certification	Certified Governance Oversight Professional
Pengalaman Kerja Professional Experience	- Komisaris Independen - PT Kliring Berjangka Indonesia (2024 - Saat ini) - Direktur - PT Paser Bumi Jaya (2020 - Saat ini) - Manajer Pemasaran - PT Pertiwi Anugerah Rinjani (2009 - 2020) - Staf Collection Secured - PT Bank Bumiputera (2006 - 2009) - Staf Manajemen Risiko - PT Bank Bumiputera (2005 - 2006) - Independent Commissioner of PT Kliring Berjangka Indonesia (2024 – Present) - Director of PT Paser Bumi Jaya (2020 – Present) - Marketing Manager of PT Pertiwi Anugerah Rinjani (2009 – 2020) - Secured Collection Staff of PT Bank Bumiputera (2006 – 2009) - Risk Management Staff of PT Bank Bumiputera (2005 – 2006)

Dating Palembangan

Anggota | Member

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia Indonesian
Usia Age	57 tahun years old
Domisili Domicile	Bekasi
Periode Jabatan Term of Office	Periode jabatan pertama First period
Riwayat Pendidikan Educational Background	- Program Magister STIE, IPWI Jakarta - Sarjana Ekonomi, Universitas Hasanudin Makassar - Master's Program from STIE IPWI Jakarta - Bachelor's Degree in Economics, Universitas Hasanuddin Makassar
Sertifikasi Certification	-
Pengalaman Kerja Professional Experience	- Direktorat Jenderal Pajak - Kementerian Keuangan (1998 - 2025) - Directorate General of Taxes of Ministry of Finance – Indonesia (1998 – 2025)



Toto Zurianto

Anggota | Member

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia Indonesian
Usia Age	65 tahun years old
Domisili Domicile	Depok
Periode Jabatan Term of Office	Periode jabatan pertama First period
Riwayat Pendidikan Educational Background	- Magister Business Administration - Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia - Sarjana Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi - Universitas Sumatera Utara, Medan - Sarjana Muda Akuntansi (SMAK) Fakultas Ekonomi - Universitas Sumatera Utara, Medan - Master of Business Administration - Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia - Bachelor's Degree in Economics and Development Studies, Faculty of Economics, Universitas Sumatera Utara, Medan - Associate Degree in Accounting (SMAK), Faculty of Economics - Universitas Sumatera Utara, Medan
Sertifikasi Certification	Certified Governance Oversight Professional
Pengalaman Kerja Professional Experience	- Human Capital Advisor - Otoritas Jasa Keuangan (2019 - 2020) - Advisor/Supervision Coordination For Financial Institution In Indonesian Eastern Area - Otoritas Jasa Keuangan (2017 - 2018) - Department Head For Learning And Assessment Center - Otoritas Jasa Keuangan (2016 - 2017) - Human Capital Advisor, Financial Services Authority (2019 - 2020) - Advisor / Supervision Coordination for Financial Institutions in Eastern Indonesia of Financial Services Authority (2017 - 2018) - Head of Learning and Assessment Center Department of Financial Services Authority (2016 - 2017)

Pernyataan Independensi Komite Audit, Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi

Statement of Independence of the Audit, Risk Monitoring, and Integrated Governance Committee

No.	Pernyataan Independensi Komite Audit, Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Statement of Independence of the Audit, Risk Monitoring, and Integrated Governance Committee	Fajar Massadiyah Egy	Hernawan B Sasongko	Irman Sahroni Ahmad	Rizky Luxianto	Toto Zurianto
1.	Tidak memiliki kepentingan/keterikatan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap BUMN yang bersangkutan Does not have any personal interests or relationships that could give rise to adverse impacts or conflicts of interest with the relevant SOEs.	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan PT KBI, Direksi dan Dewan Komisaris Not affiliated with PT KBI, its Board of Directors, or Board of Commissioners.	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT KBI Does not have direct or indirect business relationships related to PT KBI's business activities.	✓	✓	✓	✓	✓

Rapat Komite Audit, Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi

Komite Audit, Pemantau Risiko, dan Tata Kelola Terintegrasi menyelenggarakan rapat sesuai kebutuhan guna membahas isu-isu strategis dan hal-hal material yang berpotensi memengaruhi kegiatan operasional PT KBI. Sepanjang tahun 2025, komite tersebut telah melaksanakan rapat sebanyak 12 kali, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Frekuensi Kehadiran Meeting Frequency	Persentase Kehadiran Meeting Attendance
Fajar Massadih Egry	Ketua Chairman	12	12	100%
Hernawan B. Sasongko	Anggota Member	12	12	100%
Irman Sahroni Ahmad	Anggota Member	12	12	100%
Dating Palembangan	Anggota Member	12	12	100%
Toto Zurianto	Anggota Member	12	12	100%

Tugas Komite Audit, Pemantau Risiko, dan Tata Kelola Terintegrasi

Tugas Komite Audit, Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Audit:
- a. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern, sistem teknologi informasi dan efektivitas pelaksanaan tugas Divisi Audit dan Eksternal Auditor;

b. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Divisi Audit maupun auditor eksternal;

c. Memberikan rekomendasi mengenai atas kebijakan manajemen risiko serta pelaksanaannya;

d. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang wajar dan memadai terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan; dan

e. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.

Meetings of the Audit, Risk Monitoring, and Integrated Governance Committee

The Audit, Risk Monitoring, and Integrated Governance Committee convenes meetings as needed to discuss strategic issues and material matters that may affect PT KBI's operational activities. Throughout 2025, the committee held 12 meetings, with the details as follows:

Duties of the Audit, Risk Monitoring, and Integrated Governance Committee

The duties of the Audit, Risk Monitoring, and Integrated Governance Committee are as follows:

1. Audit Function:
- a. Assist the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of internal control systems, information technology systems, and the execution of duties by the Audit Division and External Auditors;

b. Evaluate the implementation of activities and audit results conducted by the Audit Division and external auditors;

c. Provide recommendations regarding risk management policies and their implementation;

d. Ensure there are reasonable and adequate evaluation procedures for all information released by the Company; and

e. Identify matters requiring the attention of the Board of Commissioners and other responsibilities of the Board.

2. Fungsi Pemantau Risiko:

- Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko;
- Melakukan pemantauan risiko dengan mengikuti tahapan-tahapan proses manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Direksi bersama seluruh jajaran Divisi atau Unit Kerja, meliputi identifikasi, pengukuran, penanganan, mitigasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pengungkapan risiko serta penetapan batas waktu/limit risiko sehingga Dewan Komisaris mempunyai alat ukur dalam pengawasan kebijakan Direksi dan tugas pengurusan;
- Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi terkait mitigasi risiko tentang aksi korporasi Perusahaan yang membutuhkan tanggapan dan atau persetujuan dari Dewan Komisaris;
- Mengidentifikasi hal-hal terkait manajemen risiko yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris; dan
- Memberikan rekomendasi tentang penyempurnaan sistem pengelolaan manajemen risiko serta pelaksanaannya.

3. Fungsi Tata Kelola Terintegrasi:

- Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi;
- Melaporkan hasil pemantauan dan memberi masukan kepada Dewan Komisaris atas hal-hal terkait dengan kepatuhan PT Kliring Berjangka Indonesia dan Entitas Anak terhadap peraturan internal dan eksternal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris; dan
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menyempurnakan sistem Tata Kelola Terintegrasi serta pelaksanaannya sesuai kebutuhan

Pelaksanaan Tugas Komite Audit, Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi

Pelaksanaan kegiatan Komite Audit, Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi di antaranya:

- Review atas usulan RKAP Tahun 2026
- Review Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) SPI Tahun 2026
- Review Rencana Auditor Independen
- Monitoring Pelaksanaan SPI
- Monitoring Pelaksanaan Audit oleh KAP Tahun Buku 2025

2. Risk Monitoring Function:

- Assist the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of risk management implementation;
- Monitor risks by following the stages of the risk management process carried out by the Board of Directors along with all Divisions or Work Units, including risk identification, measurement, handling, mitigation, monitoring, evaluation, reporting and disclosure, and setting risk limits so that the Board of Commissioners has measurable tools for supervising the Board of Directors' policies and management duties;
- Evaluate and provide recommendations on risk mitigation regarding corporate actions requiring responses or approval from the Board of Commissioners;
- Identify risk management matters that require the attention of the Board of Commissioners; and
- Provide recommendations for improving the risk management system and its implementation.

3. Integrated Governance Function:

- Evaluate the implementation of Integrated Governance at least through the assessment of the adequacy of internal controls and the integrated execution of compliance functions;
- Report monitoring results and provide input to the Board of Commissioners on matters related to the compliance of PT Kliring Berjangka Indonesia and its subsidiaries with internal and external regulations that require the Board's attention; and
- Provide recommendations to the Board of Commissioners to improve the Integrated Governance system and its implementation as needed.

Duty Implementation of the Audit, Risk Monitoring, and Integrated Governance Committee

The implementation of the committee's activities includes the following:

- Reviewed proposals for the 2026 Work Plan and Budget (RKAP)
- Reviewed the 2026 Annual Audit Program (PKAT) of the Internal Audit Unit (IAU)
- Reviewed plans of the Independent Auditor
- Monitored the implementation of IAU activities
- Monitored audits conducted by the Public Accounting Firm (KAP) for the fiscal year 2025

6. Mengikuti Kunjungan Kerja Lapangan Dewan Komisaris

7. Review Laporan Bulanan, Rapat komite & Rapat Dekom

8. Review Laporan Triwulanan Tahun 2026

9. Review atas Laporan Auditor Independen Tahun Buku 2025

10. Review atas Laporan Tahunan 2025

11. Review dan memberi masukan terkait penerapan GCG

12. Review Tahunan Sistem Manajemen Risiko
6. Participated in field visits organized by the Board of Commissioners

7. Reviewed monthly reports, committee meetings, and Board of Commissioners meetings

8. Reviewed quarterly reports for 2026

9. Reviewed the Independent Auditor's report for the fiscal year 2025

10. Reviewed the 2025 Annual Report

11. Reviewed and provided input on the implementation of Good Corporate Governance (GCG)

12. Reviewed the annual Risk Management System

Komite Nominasi dan Remunerasi

PT KBI membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT KBI Nomor SK-02/DK-KBI/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi. Dalam komite tersebut, Dewan Komisaris PT KBI menetapkan Hernawan B. Sasongko selaku Komisaris Utama sebagai Ketua, dengan Gafur Djali sebagai Anggota.

Nomination and Remuneration Committee

PT KBI established the Nomination and Remuneration Committee based on the Decree of the Board of Commissioners of PT KBI No. SK-02/DK-KBI/III/2024 dated March 18, 2024, concerning Establishment of the Nomination and Remuneration Committee. Within the committee, the Board of Commissioners of PT KBI appointed Hernawan B. Sasongko as the Chairman and Gafur Djali as a Member.

Jabatan Position	Nama Name	Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period
Ketua Chairman	Hernawan B. Sasongko	SK Dewan Komisaris PT KBI Nomor SK-02/DK-KBI/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi. Decree of the Board of Commissioners of PT KBI No. SK-02/DK-KBI/III/2024 dated March 18, 2024 concerning Establishment of the Nomination and Remuneration Committee.	3 tahun years	Pertama First
Anggota Member	Gafur Djali	SK Dewan Komisaris PT KBI Nomor SK-02/DK-KBI/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi. Masa Jabatan Sdr. Gafur Djali meneruskan sisa masa jabatan sesuai Keputusan Dewan Komisaris PT Kliring Berjangka Indonesia Nomor SK-02/DKKBI/V/2023 tanggal 22 Mei 2023. Decree of the Board of Commissioners of PT KBI No. SK-02/DK-KBI/III/2024 dated March 18, 2024 concerning Establishment of the Nomination and Remuneration Committee. Mr. Gafur Djali serves the remaining term of office in accordance with the Board of Commissioners Decree of PT Kliring Berjangka Indonesia No. SK-02/DK-KBI/V/2023 dated May 22, 2023.	3 tahun years	Pertama First



Profil Komite Nominasi dan Remunerasi

Profile of the Nomination and Remuneration Committee

Hernawan B. Sasongko

Ketua | Chairman

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia Indonesian
Usia Age	63 tahun years old
Domisili Domicile	Jakarta
Periode Jabatan Term of Office	Periode jabatan pertama First period
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Magister of Business Administration dari Royal Melbourne Institute of Technology, Australia (1995) • Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Kristen Indonesia (1986) • Master of Business Administration, Royal Melbourne Institute of Technology, Australia (1995) • Bachelor's Degree in Economics (Management), Universitas Kristen Indonesia (1986)
Sertifikasi Certification	• <i>Certified Governance Oversight Professional</i> • <i>Special Directorship</i>
Pengalaman Kerja Professional Experience	• Komisaris Utama - PT Kliring Berjangka Indonesia (2023 - Saat ini) • Deputy Komisioner Internasional dan Riset - Otoritas Jasa Keuangan (2020 - 2022) • Advisor Senior/Deputy Komisioner Strategic Committee - Otoritas Jasa Keuangan (2017 - 2020) • Deputy Komisioner Manajemen Strategis (Bidang Organisasi/SDM dan Hukum) Otoritas Jasa Keuangan (2016 - 2017) • President Commissioner of PT Kliring Berjangka Indonesia (2023 - Present) • Deputy Commissioner for International Affairs and Research of Financial Services Authority (2020 - 2022) • Senior Advisor / Deputy Commissioner, Strategic Committee of Financial Services Authority (2017 - 2020) • Deputy Commissioner for Strategic Management (Organization/Human Capital and Legal Affairs) of Financial Services Authority (2016 - 2017)

Gafur Djali

Anggota | Member

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia Indonesian
Usia Age	41 tahun years old
Domisili Domicile	Jakarta
Periode Jabatan Term of Office	Periode jabatan pertama First period
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Hubungan Internasional dari Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (2012) • Bachelor's Degree in International Relations, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (2012)
Sertifikasi Certification	• <i>Certified Risk Professional</i> • <i>Certified Governance Oversight Professional</i>
Pengalaman Kerja Professional Experience	• Sekretaris - Koperasi Persaudaraan Sembilan Delapan (Jan 2025 - Saat ini) • Direktur Analisis Kebijakan Publik, Media dan Survey - PT Arah Indonesia Media & Konsultan (2018 - 2026) • Peneliti - Institute of Resource Governance and Social Change (2015 - 2024) • Secretary, Koperasi Persaudaraan Sembilan Delapan (2025 - Present) • Director of Public Policy Analysis, Media, and Survey, PT Arah Indonesia Media & Konsultan (2018 - 2026) • Researcher of Institute of Resource Governance and Social Change (2015 - 2024)

Pernyataan Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Statement of Independence of the Nomination and Remuneration Committee

No.	Pernyataan Independensi Komite Audit, Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Statement of Independence of the Nomination and Remuneration Committee	Hernawan B Sasongko	Gafur Djali
1.	Tidak memiliki kepentingan/keterikatan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap BUMN yang bersangkutan. Does not have any personal interests or relationships that could give rise to adverse impacts or conflicts of interest with the relevant SOEs.	v	v
2.	Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan PT KBI, Direksi dan Dewan Komisaris. Not affiliated with PT KBI, its Board of Directors, or Board of Commissioners.	v	v
3.	Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT KBI. Does not have direct or indirect business relationships related to PT KBI's business activities.	v	v

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan remunerasi menyelenggarakan rapat sesuai kebutuhan guna membahas isu-isu strategis dan hal-hal material yang berpotensi memengaruhi kegiatan operasional PT KBI. Sepanjang tahun 2025, komite tersebut telah melaksanakan rapat sebanyak 12 kali, dengan rincian sebagai berikut:

Meetings of the Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee holds meetings as needed to discuss strategic issues and material matters that may potentially affect PT KBI's operational activities. Throughout 2025, the committee held 12 meetings, with the details as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Frekuensi Kehadiran Meeting Frequency	Persentase Kehadiran Meeting Attendance
Hernawan B. Sasongko	Ketua Chairman	12	12	100%
Gafur Djali	Anggota Member	12	12	100%

Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi

Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan Fungsi Nominasi:
- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Komposisi jabatan anggota Direksi;
 - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi;
 - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi;

b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi;

Duties of the Nomination and Remuneration Committee

The duties of the Nomination and Remuneration Committee are as follows:

1. Related to Nomination Function:
- a. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:
 - Composition of the members of the Board of Directors;
 - Policies and criteria required in the nomination process;
 - Performance evaluation policies for members of the Board of Directors;
 - Assist the Board of Commissioners in evaluating the performance of the Board of Directors based on established benchmarks for evaluation purposes.

b. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding programs for developing the capabilities of the Board of Directors members;

- c. Memberikan usulan/rekomendasi calon anggota Direksi yang memenuhi syarat (*top talent*) kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; dan
- d. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Terkait dengan Fungsi Remunerasi:

- a. Melakukan evaluasi terhadap sistem/kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, sasaran, dan strategi jangka panjang Perusahaan dan potensi pendapatan Perusahaan di masa yang akan datang;
- b. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Struktur remunerasi;
 - Kebijakan remunerasi; dan
 - Besaran remunerasi.

Struktur kebijakan dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas dievaluasi oleh Komite Nominasi, Remunerasi, dan Tata Kelola sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

- c. Menyampaikan hasil evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi; dan
 - Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi; dan
- e. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi

Pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi di Perusahaan sepanjang tahun 2025 di antaranya:

1. Review Laporan Bulanan, Rapat Komite & Rapat Dekom
2. Melakukan evaluasi Kinerja Direksi Tahun 2024

- c. Propose/recommend qualified candidates (top talent) for the Board of Directors to the Board of Commissioners for submission to the General Meeting of Shareholders; and
- d. Develop and provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the system and procedures for the selection and/or replacement of the Board of Directors for submission to the General Meeting of Shareholders.

2. Related to Remuneration Function:

- a. Evaluate the remuneration system/policy based on performance, risk, targets, long-term company strategy, and potential future company revenues;
- b. Develop and provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:
 - Remuneration structure;
 - Remuneration policy; and
 - Remuneration amounts.

The structure, policy, and amounts of remuneration for the Board of Commissioners and Directors are evaluated by the Nomination, Remuneration, and Governance Committee at least once a year.

- c. Present the evaluation results and provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:
 - Remuneration policy for the Board of Directors and Board of Commissioners for submission to the General Meeting of Shareholders;
 - Remuneration policy for executive officials and employees as a whole for submission to the Board of Directors; and
 - Ensure that remuneration policies comply with applicable regulations.
- d. Conduct periodic evaluations of the implementation of remuneration policies; and
- e. Assist the Board of Commissioners in evaluating performance in relation to the remuneration received by each member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners.

Duty Implementation of the Nomination and Remuneration Committee

The implementation of the activities of the Nomination and Remuneration Committee at the Company throughout 2025 includes:

1. Reviewed monthly reports, committee meetings, and Board of Commissioners meetings
2. Conducted the evaluation of the Board of Directors' performance for the fiscal year 2024





3. Review Usulan *Top Talent* dari PT KBI
4. Review Sistem Evaluasi Kinerja Pegawai PT KBI
5. Review Tahunan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris berbasis kinerja, risiko, sasaran dan strategi jangka panjang Perusahaan, serta potensi pendapatan
6. Review Sistem Remunerasi Pegawai PT KBI

3. Reviewed proposals for Top Talent at PT KBI
4. Reviewed the employee performance evaluation system at PT KBI
5. Conducted the annual review of remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners, considering performance, risk, company goals and long-term strategy, as well as potential revenue
6. Reviewed the employee remuneration system at PT KBI

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Corporate Secretary

Dalam kerangka penerapan GCG di PT KBI, Sekretaris Perusahaan berfungsi sebagai perangkat pendukung yang bertanggung jawab menyediakan informasi yang terkini, baik kepada pihak internal maupun eksternal. Selain itu, Sekretaris Perusahaan bertindak sebagai perwakilan PT KBI dalam menjalin dan memelihara hubungan yang konstruktif dengan seluruh pemangku kepentingan, dengan tetap mengacu pada ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Profil Sekretaris Perusahaan

Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dilakukan oleh Direktur Utama melalui mekanisme internal PT KBI dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. PT KBI menetapkan Dedi Sopyan sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT KBI Nomor 019/K-KBI/SDM/VIII/2025 tanggal 05 Agustus 2025. Profil Dedi Sopyan telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan, khususnya pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Selaku penghubung antara PT KBI dengan pemangku kepentingan, Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab yang mencakup hal-hal berikut:

1. Memastikan kepatuhan PT KBI terhadap peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*;
2. Memberikan informasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan apabila sewaktu-waktu diminta; dan
3. Membangun hubungan kerja sama strategis dengan para pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan dengan PT KBI, berdasarkan prinsip kepercayaan dan integritas tinggi untuk memelihara reputasi PT KBI serta meningkatkan citra positif PT KBI di mata para pemangku kepentingan.

Within the framework of GCG implementation at PT KBI, the Corporate Secretary functions as a supporting organ responsible for providing up-to-date information to both internal and external parties. Additionally, the Corporate Secretary acts as PT KBI's representative in establishing and maintaining constructive relationships with all stakeholders, while ensuring compliance with prevailing regulations and statutory provisions.

Profile of the Corporate Secretary

The appointment and dismissal of the Corporate Secretary are carried out by the President Director through PT KBI's internal mechanism, with prior approval from the Board of Commissioners. PT KBI appointed Dedi Sopyan as Corporate Secretary based on the Decree of PT KBI's Board of Directors No. 019/K-KBI/SDM/VIII/2025 dated 05 August 2025. The profile of Dedi Sopyan has been presented in the Company Profile section, specifically under Profile of the Executive Officials, in this Annual Report.

Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary

As the liaison between PT KBI and its stakeholders, the Corporate Secretary has the following duties and responsibilities:

1. Ensure PT KBI's compliance with regulations regarding disclosure requirements in line with the implementation of Good Corporate Governance principles;
2. Provide information to the Board of Directors and the Board of Commissioners on a regular basis and whenever requested; and
3. Develop strategic collaborative relationships with stakeholders or parties with an interest in PT KBI, based on trust and high integrity, to maintain PT KBI's reputation and enhance its positive image among stakeholders.

Pelatihan Sekretaris Perusahaan

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, PT KBI berkomitmen untuk meningkatkan kapabilitas Sekretaris Perusahaan melalui partisipasi dalam berbagai program pengembangan, antara lain pelatihan, lokakarya, seminar, dan kegiatan sejenis. Sepanjang tahun 2025, Sekretaris Perusahaan PT KBI telah mengikuti sejumlah program peningkatan kompetensi sebagai berikut:

Training Programs for the Corporate Secretary

To support the effective performance of its duties and responsibilities, PT KBI is committed to enhancing the capabilities of the Corporate Secretary through participation in various development programs, including training sessions, workshops, seminars, and similar activities. Throughout 2025, PT KBI's Corporate Secretary participated in the following competency development programs:

Tanggal Date	Jenis Pelatihan Training	Nama Pelatihan Training Topic
22 - 23 Januari 2025 January 22-23, 2025	Offline	Seminar Nasional & Pengukuhan Gelar Kompetensi Auditor Internal National Seminar & Certification of Internal Auditor Competency
25-26 September 2025 September 25-26, 2025	Offline	Corporate Secretary for Sustainability Governance

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan

Hingga 31 Desember 2025, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melalui sejumlah kegiatan, meliputi:

- Perencanaan, Pengembangan serta Pemantauan Rencana Kerja dan Sistem:
 - Bertindak sebagai pengelola fungsi Kesekretarian Perusahaan untuk memastikan terselenggaranya kegiatan Perusahaan yang *prudent*, memenuhi standar *good corporate governance*, tercipta hubungan kerja sama yang strategis dengan para *stakeholders*, melaksanakan fungsi hukum perusahaan;
 - Terlibat secara aktif dalam rapat koordinasi penyusunan rencana kerja dan sistem terkait;
 - Melakukan sosialisasi rencana kerja dan hasil pengembangan sistem yang telah disahkan ke bagiannya atau area lain sesuai kewenangan yang diberikan;
 - Memantau penerapan rencana kerja dan sistem terkait di bagiannya masing-masing atau area lain sesuai dengan kewenangan yang diberikan; dan
 - Melakukan tinjauan terhadap penerapan rencana kerja dan sistem sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

Duty Implementation of the Corporate Secretary

As of December 31, 2025, the Corporate Secretary carried out their duties and responsibilities through various activities, as follows:

- Planning, Development, and Monitoring of Work Plans and Systems:
 - Acted as the manager of the Corporate Secretariat function to ensure the Company's activities were conducted prudently, complied with good corporate governance standards, maintained strategic relationships with stakeholders, and carried out corporate legal functions;
 - Actively participated in coordination meetings related to the preparation of work plans and system development;
 - Conducted socialization of approved work plans and system development results to respective divisions or other areas according to delegated authority;
 - Monitored the implementation of work plans and related systems within their division or other areas according to delegated authority; and
 - Reviewed the implementation of work plans and systems within the scope of delegated authority.



2. Pengelolaan dan Pemantauan Kegiatan Divisi Sekretaris Perusahaan:

- a. Mengatur dan memantau kegiatan dan kinerja Divisi Sekretaris Perusahaan;
- b. Di dalam setiap kegiatan bertugas untuk mengingatkan Direksi mengenai hal-hal yang berkenaan dengan PT KBI, anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Perusahaan agar menjadi perhatian atau pengambilan keputusan oleh Direksi;
- c. Memastikan penyelenggaraan RUPS, mulai dan persiapan rapat teknis, laporan tahunan distribusi hasil RUPS dan tindak lanjut hasil RUPS yang harus diperhatikan oleh Direksi;
- d. Memastikan koordinasi dan organisasi rapat Direksi sejak dari perencanaan sampai pelaksanaan rapat meliputi penyusunan agenda, undangan, penyiapan materi bahan rapat, notulen serta mengingatkan Direksi atas tindak lanjut yang harus dilakukan;
- e. Memastikan koordinasi dan organisasi rapat kerja internal sejak dari perencanaan sampai pelaksanaan rapat meliputi penyusunan agenda rapat, undangan, penyiapan material dan bahan rapat, risalah rapat serta mengingatkan Direksi atas tindak lanjut yang harus dilakukan; dan
- f. Memastikan tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Direksi dan seluruh Kepala Divisi terhadap keputusan rapat yang telah ditetapkan dilakukan.

3. Pengelolaan dan Pemantauan Kegiatan Komunikasi Perusahaan:

- a. Memastikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan komunikasi Perusahaan (*corporate communication*) kepada para *stakeholders* agar pesan yang disampaikan oleh Perusahaan dapat dilaksanakan dengan konsisten dan terpadu dalam rangka membangun citra Perusahaan (*corporate image*);
- b. Memastikan dan mengkoordinasikan semua materi komunikasi kepada masyarakat disajikan secara layak merepresentasikan Perusahaan dan memenuhi ketentuan penyampaian informasi kepada masyarakat;
- c. Memastikan dan mengawasi pelaksanaan fungsi Komunikasi

2. Management and Monitoring of Corporate Secretary Division Activities:

- a. Organized and monitored the activities and performance of the Corporate Secretary Division;
- b. In all activities, reminded the Board of Directors of matters related to PT KBI, the Articles of Association, and applicable laws and regulations that require attention or decision-making by the Board of Directors;
- c. Ensured the proper organization of GMS, including preparation, technical arrangements, distribution of annual reports, and follow-up of GMS resolutions for Board consideration;
- d. Oversaw the coordination and organization of Board meetings from planning to execution, including agenda preparation, invitations, materials, minutes, and reminders regarding follow-up actions;
- e. Oversaw the coordination and organization of internal work meetings from planning to execution, including agenda preparation, invitations, materials, minutes, and reminders regarding follow-up actions; and
- f. Ensured follow-up actions by the Board and all Division Heads on decisions made during meetings were implemented.

3. Management and Monitoring of Corporate Communication Activities:

- a. Ensured and coordinated corporate communication activities to stakeholders so that the Company's messages are delivered consistently and cohesively, supporting the building of corporate image;
- b. Ensured all communication materials presented to the public appropriately represented the Company and complied with information disclosure regulations;
- c. Supervised the effective execution of corporate communication functions

Perusahaan yang dijalankan dengan efektif, baik dan sesuai rencana oleh Kepala Departemen Komunikasi dan staf Komunikasi Eksternal dan Internal Perusahaan;

- d. Menjalin komunikasi dan menjaga hubungan baik sekaligus penghubung antara Perusahaan dengan Pihak Regulator *Stakeholder* (sebagai *Liaison Officer* Perusahaan);
- e. Menghadiri undangan kegiatan dari eksternal yang berkaitan dengan kepentingan Perusahaan; dan
- f. Membangun dan membina hubungan kelembagaan dengan para pelaku kepentingan terkait antara lain Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa, Anggota Kliring, Komite Kliring dan Bank Penyimpan Dana Margin (BPDM) secara teratur dan terjadwal.

4. Pengelolaan dan Pemantauan Kegiatan Hukum & Kepatuhan:

- a. Memastikan dan mengawasi pelaksanaan fungsi Kepatuhan Korporasi dijalankan dengan efektif, baik dan sesuai ketentuan regulator dan per Undang-Undang oleh Kepala Departemen Hukum & Kepatuhan;
- b. Memantau perubahan peraturan yang berhubungan dengan kegiatan operasional Perusahaan yang dilakukan oleh Kepala Departemen Hukum & Kepatuhan dan Staf Departemen Hukum & Kepatuhan;
- c. Menunjuk Kepala Departemen Hukum & Kepatuhan menjadi bagian Tim Perumus perubahan peraturan yang berhubungan dengan bursa, pialang atau regulator dan *stakeholder* lainnya; dan
- d. Menunjuk Kepala Departemen Hukum & Kepatuhan dan Staf Departemen Hukum & Kepatuhan dalam memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian (sebagai *counterpart*).
- e. Memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam menerapkan sanksi kepada Anggota Kliring yang tidak mematuhi Peraturan dan Tata Tertib dan sanksi yang berkaitan dengan para pengguna jasa Pusat Registrasi; dan

by the Head of Communications Department and staff, both internally and externally;

- d. Maintained communication and strong relationships with regulators and stakeholders as the Company's *Liaison Officer*;
- e. Attended external events related to the Company's interests; and
- f. Established and maintained institutional relationships with relevant stakeholders, including the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI), Bank Indonesia, the Financial Services Authority (OJK), Exchanges, Clearing Members, the Clearing Committee, and Margin Fund Custodian Banks (BPDM) on a regular and scheduled basis.

4. Management and Monitoring of Legal & Compliance Activities:

- a. Ensured and supervised the effective execution of corporate compliance functions by the Head of Legal & Compliance Department;
- b. Monitored regulatory changes related to operational activities through the Head and Staff of Legal & Compliance Department;
- c. Appointed the Head of Legal & Compliance to participate in regulatory drafting teams related to exchanges, brokers, and other stakeholders;
- d. Assigned the Head and Staff of Legal & Compliance to provide information to police investigators as counterparts;
- e. Provided recommendations to the Board of Directors regarding sanctions for Clearing Members violating rules and regulations and sanctions related to users of the Registration Center; and



- f. Mengawasi jalannya pembinaan terhadap Anggota Kliring yang meliputi penilaian kinerja Anggota Kliring, penerimaan pengaduan/komplain Anggota Kliring, dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan antar Anggota Kliring.

5. Pengelolaan Hubungan Investor dan Regulator:

- a. Membangun dan membina hubungan kelembagaan dengan para pemangku kepentingan terkait antara lain Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa, Anggota Kliring, Komite Kliring dan Bank Penyimpan Dana Margin (BPDM) secara teratur dan terjadwal;
- b. Mengawasi jalannya pembinaan terhadap Anggota Kliring yang meliputi penilaian kinerja Anggota Kliring, penerimaan pengaduan/komplain Anggota Kliring dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan antar Anggota Kliring; dan
- c. Memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam menerapkan sanksi kepada Anggota Kliring yang tidak mematuhi Peraturan dan Tata Tertib dan sanksi yang berkaitan dengan para pengguna jasa Pusat Registrasi.

- f. Supervised the development of Clearing Members, including performance assessments, complaints handling, and facilitating problem resolution among Clearing Members.

5. Management of Investor and Regulator Relations:

- a. Built and maintained regular institutional relationships with relevant stakeholders, including the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI), Bank Indonesia, the Financial Services Authority (OJK), the Exchange, Clearing Members, the Clearing Committee, and Margin Depositary Banks (BPDM), on a regular and scheduled basis;
- b. Supervised the development of Clearing Members, including performance assessments, complaints handling, and facilitation of dispute resolution among Clearing Members; and
- c. Provided recommendations to the Board of Directors regarding sanctions for Clearing Members violating rules and regulations, as well as sanctions related to users of the Registration Center.

SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Internal Audit Unit

Satuan Pengawas Internal (SPI) atau lebih dikenal di Perusahaan sebagai Divisi Audit berperan sebagai unit pendukung Direksi yang menjalankan fungsi pemberian *assurance* dan konsultasi secara independen serta objektif, guna mendorong peningkatan nilai tambah dan perbaikan kinerja operasional Perusahaan. Pelaksanaan fungsi SPI dilakukan melalui penerapan pendekatan yang terstruktur dan metodologis dalam kegiatan audit, evaluasi, dan penelaahan untuk menilai kecukupan serta efektivitas manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola perusahaan.

Komposisi Divisi Audit

Hingga 31 Desember 2025, jumlah personil Divisi Audit di Perusahaan tercatat sebanyak 4 (empat) orang. Perusahaan menunjuk Ibu Sheila Avirolanda sebagai Plt. Kepala Divisi Audit. Adapun Profil Plt. Kepala Divisi Audit Sheila Avirolanda telah disajikan pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Kepala Divisi Audit di dalam Laporan Tahunan ini.

The Internal Audit Unit (IAU), also known within the Company as the Audit Division, serves as a supporting unit to the Board of Directors by providing independent and objective assurance and consulting services. Its role is to drive value creation and improve the operational performance of the Company. The IAU carries out its functions using a structured and methodical approach in auditing, evaluation, and review activities to assess the adequacy and effectiveness of risk management, internal control systems, and corporate governance implementation.

Composition of the Audit Division

As of December 31, 2025, the Audit Division of the Company comprised 4 (four) personnel. The Company has appointed Mrs. Sheila Avirolanda as the Acting Head of Audit Division. The profile of the Acting Head of Audit Division, Mrs. Sheila Avirolanda, is presented in the Company Profile section, under the Profile of Audit Division Head, in this Annual Report.



Nama Name	Jabatan Position	Pendidikan Education	Sertifikasi Certification
Sheila Avirolanda	Plt. Kepala Divisi Audit Acting Head of Audit Division	Sarjana Akuntansi Bachelor's Degree in Accounting	1. <i>Qualified Internal Auditor</i> (QIA) – YPIA 2. <i>Qualified Risk Management Professional</i> (QRMP) - LSP MKS 3. Seminar Nasional Internal Audit "<i>Cultural Transformation: Integrating ESG, Cybersecurity dan Innovative Risk Management</i>" – YPIA 4. "SPI sebagai Organ Pengelola Risiko: Tantangan & Realita dalam Mencapai Kinerja Optimal Perusahaan"- FKSPI 5. Peran Teknologi Digital Dalam Meningkatkan Praktik Akuntansi – OJK 6. <i>Driving Corporate Performance Through Artificial Intelligence</i> – OJK 7. Sertifikasi PQIA (Profesional Qualified Internal Auditor) 8. Certified Enterprise Compliance Auditor (CECA) 1. <i>Qualified Internal Auditor</i> (QIA) – YPIA 2. <i>Qualified Risk Management Professional</i> (QRMP) – LSP MKS 3. National Internal Audit Seminar: "<i>Cultural Transformation: Integrating ESG, Cybersecurity, and Innovative Risk Management</i>" – YPIA 4. "IAU as a Risk Management Organ: Challenges and Realities in Achieving Optimal Corporate Performance" – FKSPI 5. The Role of Digital Technology in Enhancing Accounting Practices – OJK 6. <i>Driving Corporate Performance Through Artificial Intelligence</i> – OJK 7. PQIA (Professional Qualified Internal Auditor) Certification 8. Certified Enterprise Compliance Auditor (CECA)
Mochamad Imam	Associate Auditor Departemen Audit Internal Associate Auditor of Internal Audit Department	1. MBA, Universitas Gadjah Mada (UGM) <i>Concentration Human Resource & Organization</i>, MBA Program, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, (2012) 2. Sarjana Ekonomi, Universitas Trisakti, Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan (2000) 1. Master of Business Administration (MBA), Universitas Gadjah Mada (UGM), <i>Concentration in Human Resource & Organization</i>, Faculty of Economics and Business (2012) 2. Bachelor of Economics, Universitas Trisakti, Department of Development Economics (2000)	1. Analisis Manajemen Risiko Organisasi Terintegrasi (CRMO (LSPMR)) 2. Menyusun <i>Financial Contingency Plan</i> (GRC Management) 3. <i>How To Mitigate Transition and Physical Risk in the Finansial Sector</i> (OJK) 4. Peluang dan Tantangan Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi di Era Digital (OJK) 5. Sertifikasi PQIA (Profesional Qualified Internal Auditor) 6. Certified Enterprise Compliance Auditor (CECA) 1. Integrated Organizational Risk Management Analyst (CRMO – LSPMR) 2. Development of a Financial Contingency Plan (GRC Management) 3. Mitigating Transition and Physical Risks in the Financial Sector (OJK) 4. Opportunities and Challenges of Personal Data Protection in Transactions in the Digital Era (OJK) 5. PQIA (Professional Qualified Internal Auditor) Certification 6. Certified Enterprise Compliance Auditor (CECA)
Pirdaus	Specialist Audit Eksternal External Audit Specialist	Diploma Teknik Komputer Computer Engineering Diploma	1. <i>Environmental, Social and Good Governance</i> (ESG) <i>Fundamentals & Awareness</i> 2. <i>Business Continuity Management Certified Professional</i> (BCMCP) 3. FKSPI Pelatihan <i>Risk Maturity</i> Indeks Kementerian BUMN 4. Certified Enterprise Compliance Auditor (CECA) 1. Environmental, Social, and Governance (ESG) <i>Fundamentals & Awareness</i> 2. <i>Business Continuity Management Certified Professional</i> (BCMCP) 3. FKSPI Training on Risk Maturity Index – Ministry of State-Owned Enterprises 4. Certified Enterprise Compliance Auditor (CECA)

Nama Name	Jabatan Position	Pendidikan Education	Sertifikasi Certification
Muhamad Sendik Darmawan	Specialist Audit Internal Internal Audit Specialist	Sarjana Sistem Informasi Bachelor's Degree in Information System	1. <i>Certified IT Audit</i> 2. <i>Certified Risk Manajemen Risiko Professional</i> 3. <i>Certified Information Security Professional</i> 4. <i>Ethical Hacking Essential</i> 5. COBIT 2019 6. Seminar Nasional Internal Audit "<i>Cultural Transformation: Integrating ESG, Cybersecurity dan Innovative Risk Management</i>" - YPIA 7. Peran Teknologi Digital Dalam Meningkatkan Praktik Akuntansi – OJK 8. <i>Driving Corporate Performance Through Artificial Intelligence - OJK Risk Conference Risk Modeling, Technology, and Databases</i> 9. Certified Forensic Auditor (CFrA) 10. Certified Enterprise Compliance Auditor (CECA) 1. Certified IT Auditor 2. Certified Risk Management Professional 3. Certified Information Security Professional 4. Ethical Hacking Essentials 5. COBIT 2019 6. National Internal Audit Seminar: "<i>Cultural Transformation: Integrating ESG, Cybersecurity, and Innovative Risk Management</i>" – YPIA 7. The Role of Digital Technology in Enhancing Accounting Practices – OJK 8. Driving Corporate Performance Through Artificial Intelligence – OJK Risk Conference: Risk Modeling, Technology, and Databases 9. Certified Forensic Auditor (CFrA) 10. Certified Enterprise Compliance Auditor (CECA)

Pelatihan Divisi Audit

Training Programs for the Audit Division

No.	Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Date	Pelatihan Training	Jenis Pelatihan Type of Training
1.	Sheila Aviolanda	Plt. Kepala Divisi Audit Acting Head of Audit Division	23 - 24 Juli 2025 July 23-24, 2025	Thinklab: Design Thinking, Creativity & Innovation	Offline
			03-04 September 2025 September 3-4, 2025	Seminar Nasional - Bincang SPI 2025, dengan mengusung tema utama "Menjaga Profesionalisme Direksi dalam Bingkai Governance, Risk & Compliance (GRC) dan Business Judgement Rule terhadap UU No. 1 Tahun 2025 National Seminar - IAU Talk 2025, with the main theme: "Maintaining Directors' Professionalism within the Framework of Governance, Risk & Compliance (GRC) and Business Judgment Rule under Law No. 1 of 2025."	Offline
			22-26 September 2025 September 22-26, 2025	Certified Practitioner of Internal Audit (CPIA)	Online
			23 - 24 Desember 2025 December 23-24, 2025	Certified Enterprise Compliance Auditor (CECA)	Online
2.	Mochamad Imam	Associate Auditor Departemen Audit Internal Associate Auditor of Internal Audit Department	21 - 25 April 2025 April 21-25, 2025	Sertifikasi Profesi Auditor Forensik dengan gelar Certified Forensic Auditor (CFrA) Professional Certification in Forensic Auditing, awarded the title Certified Forensic Auditor (CFrA)	Hybrid
			22-26 September 2025 September 22-26, 2025	Certified Practitioner of Internal Audit (CPIA)	Online
			16-17 Oktober 2025 October 16-17, 2025	Effective Communication Essential	Offline
			01-06 Desember 2025 December 1-6, 2025	Sertifikasi Qualified Internal Auditor - Tingkat lanjutan Qualified Internal Auditor Certification - Advanced Level	Online
			18-19 Desember 2025 December 18-19, 2025	Risk Awareness	Offline
			23 - 24 Desember 2025 December 23-24, 2025	Certified Enterprise Compliance Auditor (CECA)	Online

No.	Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Date	Pelatihan Training	Jenis Pelatihan Type of Training
3.	Pirdaus	Specialist Audit Eksternal External Auditor Specialist	08-13 September 2025 September 8-13, 2025	Sertifikasi Tingkat lanjutan Qualified Internal Auditor Certification - Advanced Level	Online
			16-17 Oktober 2025 October 16-17, 2025	Effective Communication Essential	Offline
			24 November 2025 November 24, 2025	Certified Risk Management Officer (CRMO)	Online
			18-19 Desember 2025 December 18-19, 2025	Risk Awareness	Offline
			23 - 24 Desember 2025 December 23-24, 2025	Certified Enterprise Compliance Auditor (CECA)	Online
4.	Muhamad Sendik Darmawan	Specialist Audit Eksternal External Auditor Specialist	21 - 25 April 2025 April 21-25, 2025	Sertifikasi Profesi Auditor Forensik dengan gelar Certified Forensic Auditor (CFrA) Professional Certification in Forensic Auditing, awarded the title Certified Forensic Auditor (CFrA)	Hybrid
			10 Juli 2025 July 10, 2025	Seminar OPR: Internal Control for Risk Governance Excellence	Offline
			01-06 Desember 2025 December 1-6, 2025	Sertifikasi Tingkat lanjutan Qualified Internal Auditor Certification - Advanced Level	Online
			18-19 Desember 2025 December 18-19, 2025	Risk Awareness	Offline
			23 - 24 Desember 2025 December 23-24, 2025	Certified Enterprise Compliance Auditor (CECA)	Online

Struktur dan Kedudukan Divisi Audit

Dalam struktur organisasi Perusahaan, Divisi Audit berada langsung di bawah koordinasi Direktur Utama. Pengangkatan Kepala Divisi Audit dilakukan oleh Direktur Utama dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, sedangkan pemberhentian pejabat tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Adapun susunan organisasi Divisi Audit meliputi Departemen Audit Internal dan Departemen Audit Eksternal.

Structure and Position of the Audit Division

In the Company's organizational structure, the Audit Division reports directly to the President Director. The Head of Audit Division is appointed by the President Director with prior approval from the Board of Commissioners, while the dismissal of the official is determined by the Board of Directors after obtaining approval from the Board of Commissioners. The Audit Division's organizational structure consists of the Internal Audit Department and the External Audit Department.

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit

Divisi Audit menjalankan fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab untuk memastikan pencapaian tujuan Perusahaan serta meningkatkan efektivitas pengelolaan usaha. Pelaksanaan fungsi tersebut dilakukan melalui penyusunan strategi, penetapan kebijakan, serta pelaksanaan dan pengawasan kegiatan audit internal dan audit eksternal atas seluruh aktivitas operasional Perusahaan. Divisi Audit melaksanakan pemeriksaan, penilaian, evaluasi, serta memberikan pendampingan kepada Direksi dan seluruh unit kerja dalam rangka mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional Perusahaan, dengan pendekatan *risk-based* audit yang selaras dengan strategi Perusahaan serta rencana jangka pendek dan jangka panjang, dengan tetap memperhatikan pengendalian risiko secara memadai.

Piagam Divisi Audit

PT KBI telah menetapkan Piagam Divisi Audit sebagai acuan utama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan internal. Piagam tersebut disusun dengan mengacu pada standar profesional Audit Internal yang berlaku, termasuk Standar Internal Audit yang diterbitkan oleh The Institute of Internal Auditors Inc. sebagaimana direkomendasikan oleh Dewan Sertifikasi *Qualified Internal Auditor*, Kode Etik The Institute of Internal Auditors (IIA), serta berbagai rujukan profesional lainnya.

Independensi dan Objektivitas Divisi Audit

Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya, Auditor Internal PT KBI senantiasa menjunjung tinggi prinsip independensi guna memastikan terciptanya lingkungan usaha yang sehat serta terbebas dari potensi benturan kepentingan. Di samping itu, Auditor Internal PT KBI berkomitmen untuk menjaga objektivitas dan integritas atas setiap hasil pemeriksaan, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan Perusahaan secara optimal.

Pelaksanaan Tugas Divisi Audit

Selama tahun 2025, Divisi Audit merealisasikan 4 (empat) kegiatan audit internal serta melaksanakan 25 (dua puluh lima) audit eksternal terhadap 3 (tiga) Pedagang penyelenggara dan 22 (dua puluh dua) Pialang Berjangka serta tidak ada program kerja tambahan yang meliputi audit khusus.

Duties and Responsibilities of the Audit Division

The Audit Division carries out functions, authorities, and responsibilities to ensure the achievement of the Company's objectives and enhance the effectiveness of business management. These functions are executed through the formulation of strategies, establishment of policies, and implementation and supervision of internal and external audit activities across all operational areas of the Company. The Audit Division conducts examinations, assessments, and evaluations, while providing guidance to the Board of Directors and all work units to promote operational efficiency and effectiveness. This is carried out using a risk-based audit approach that aligns with the Company's strategy and both short-term and long-term plans, while ensuring adequate risk control measures are maintained.

Audit Division Charter

PT KBI has established the Audit Division Charter as the primary reference for the execution of internal audit functions. This charter is developed in accordance with applicable professional Internal Audit standards, including the Internal Audit Standards issued by The Institute of Internal Auditors (IIA) as recommended by the Qualified Internal Auditor Certification Board, the IIA Code of Conduct, and other relevant professional references.

Independence and Objectivity of the Audit Division

In carrying out its functions and authorities, PT KBI's Internal Audit maintains a strict adherence to the principle of independence to ensure a healthy business environment, free from potential conflicts of interest. Additionally, the Internal Audit is committed to upholding objectivity and integrity in all audit findings, thereby supporting the optimal achievement of the Company's objectives.

Duty Implementation of the Audit Division

Throughout 2025, the Audit Division carried out 4 (four) internal audits and conducted 25 (twenty-five) external audits covering 3 (three) Clearing Members and 22 (twenty-two) Futures Brokers. There were no additional work programs involving special audits during this period.

AKUNTAN PUBLIK

Public Accountant

Pengawasan independen atas aspek keuangan PT KBI dilaksanakan secara berkelanjutan melalui kegiatan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai Auditor Eksternal. Penunjukan Auditor Eksternal dimaksudkan untuk memastikan objektivitas serta mutu hasil audit yang dihasilkan. Auditor Eksternal yang melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan PT KBI ditetapkan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris dan Komite Audit, dengan proses pemilihan yang mengacu pada ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Pada tahun 2025, PT KBI telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf (RSM Indonesia) untuk melaksanakan audit atas Perusahaan. Manajemen secara konsisten memprioritaskan penyelesaian tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan, baik yang berasal dari auditor internal maupun auditor eksternal, serta melakukan pemantauan tindak lanjut tersebut secara berkesinambungan.

Mekanisme Penunjukan Kantor Akuntan Publik

Pada tahun 2025, PT KBI menetapkan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf (RSM Indonesia) sebagai Auditor Eksternal untuk melaksanakan audit independen atas Laporan Keuangan Tahunan PT Kliring Berjangka Indonesia untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024. Audit tersebut mencakup laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, serta laporan arus kas. Penunjukan KAP dimaksud dilakukan berdasarkan arahan Pemegang Saham agar Perusahaan menggunakan jasa KAP dengan klasifikasi *Big 10*, sehingga KAP RSM dipilih untuk menjalankan penugasan tersebut.

Independent audit of PT KBI's financial aspects is conducted continuously through audits carried out by a Public Accounting Firm (KAP) as the External Auditor. The appointment of the External Auditor aims to ensure the objectivity and quality of the audit results. The External Auditor responsible for auditing PT KBI's Financial Statements is appointed through the AGMS based on recommendations from the Board of Commissioners and the Audit Committee, following applicable procurement regulations. In 2025, PT KBI appointed the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf (RSM Indonesia) to conduct the Company's audit. Management consistently prioritizes the resolution of findings and recommendations arising from both internal and external audits and continuously monitors the implementation of these follow-ups.

Appointment of the Public Accounting Firm

In 2025, PT KBI appointed the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf (RSM Indonesia) as the External Auditor to conduct an independent audit of PT Kliring Berjangka Indonesia's Annual Financial Statements for the fiscal years ending December 31, 2025, and 2024. The audit covered the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows. The appointment of the Public Accounting Firm was made based on the Shareholders' directive to engage a firm classified within the Big 10, resulting in the selection of the Public Accounting Firm RSM to carry out the assignment.

Informasi Kantor Akuntan Publik dan Jasa yang Diberikan

Public Accounting Firm and Services Provided

Tahun Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Periode KAP Period	Auditor	Periode Auditor Auditor Period	Biaya Fee
2025	KAP Amir Abadi Jusuf Mawar, Aryanto, Mawar & Partners	6	Dewi Novita Sari	3	Rp515 juta IDR515 million
2024	KAP Amir Abadi Jusuf Mawar, Aryanto, Mawar & Partners	5	Dewi Novita Sari	2	Rp483 juta IDR483 million
2023	KAP Amir Abadi Jusuf Mawar, Aryanto, Mawar & Partners	4	Dewi Novita Sari	1	Rp415 juta IDR415 million
2022	KAP Amir Abadi Jusuf Mawar, Aryanto, Mawar & Partners	3	Benny Andria	3	Rp400 juta IDR400 million
2021	KAP Amir Abadi Jusuf Mawar, Aryanto, Mawar & Partners	2	Benny Andria	2	Rp415 juta IDR415 million



SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Internal Control System

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan rangkaian proses yang dijalankan dan dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen, serta seluruh anggota organisasi, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tujuan Perusahaan. SPI mencakup: (i) efektivitas dan efisiensi operasional, (ii) keandalan pelaporan keuangan, dan (iii) kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Sistem ini diterapkan secara menyeluruh di seluruh struktur organisasi, mulai dari induk perusahaan, divisi, hingga unit fungsi dan proses bisnis, termasuk pengendalian operasional yang efektif dan efisien. Selain itu, SPI juga mencakup Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (*Internal Control for Financial Reporting*), yaitu pengendalian yang dirancang secara khusus untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disusun adalah andal dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Sistem Pengendalian Operasional dan Keuangan

Pengendalian operasional diarahkan untuk memastikan pencapaian kinerja keuntungan yang berkelanjutan bagi PT KBI melalui penerapan efisiensi dan efektivitas biaya secara konsisten. Pengelolaan keuangan dijalankan berdasarkan prinsip tata kelola yang *prudent* guna menekan potensi pemborosan dan penyimpangan, sekaligus memaksimalkan perolehan pendapatan. Di samping itu, pengelolaan keuangan ditopang oleh sistem informasi keuangan yang andal sehingga mampu menyajikan data dan laporan yang akurat serta tepat waktu, sebagai dasar bagi pengambilan keputusan manajerial yang lebih optimal.

Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal dengan Kerangka COSO

Kesesuaian pengendalian internal pada PT KBI dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor 2 Tahun 2023. Kerangka kerja yang kami gunakan sebagai basis penilaian adalah kerangka kerja mengenai Pengendalian Internal yang diterbitkan oleh *Committee of Sponsoring Organization* (COSO) Tahun 2013. *Internal Control Framework* COSO tahun 2013 merupakan *framework* yang secara umum dijadikan rujukan banyak seluruh perusahaan di dunia.

Framework pengendalian internal ini kemudian menjadi dasar pengelolaan BUMN sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor 2 Tahun 2023. Untuk dapat membentuk pengendalian internal yang efektif dan memadai maka penerapan pengendalian internal meliputi sejumlah komponen antara lain:

The Internal Control System (ICS) is a series of processes implemented and influenced by the Board of Commissioners, the Board of Directors, management, and all members of the organization, designed to provide reasonable assurance in achieving the Company's objectives. The ICS encompasses: (i) operational effectiveness and efficiency, (ii) reliability of financial reporting, and (iii) compliance with applicable regulations. This system is applied comprehensively across the organizational structure, from the parent company to divisions, functional units, and business processes, including effective and efficient operational controls. Additionally, the ICS includes Internal Control over Financial Reporting (ICFR), which is specifically designed to provide assurance that the financial statements are reliable and prepared in accordance with applicable financial accounting standards.

Operational and Financial Control System

Operational controls are designed to ensure the achievement of sustainable profitability for PT KBI through the consistent implementation of cost efficiency and effectiveness. Financial management is conducted based on prudent governance principles to minimize potential waste and irregularities while maximizing revenue generation. In addition, financial management is supported by a reliable financial information system, capable of providing accurate and timely data and reports, serving as a foundation for more informed and optimal managerial decision-making.

Alignment of the Internal Control System with the COSO Framework

Compliance of internal controls at PT KBI is conducted in accordance with the Minister of SOE Regulation No. 2 of 2023. The framework used as the basis for our assessment is the Internal Control Framework issued by the Committee of Sponsoring Organizations (COSO) in 2013. The 2013 COSO Internal Control Framework is the standard reference adopted by companies worldwide.

This internal control framework serves as the foundation for SOE management under the Minister of SOE Regulation No. 2 of 2023. To establish effective and adequate internal controls, the implementation encompasses several components, including:





- Lingkungan Pengendalian;
- Penilaian;
- Aktivitas Pengendalian;
- Informasi dan Komunikasi; dan
- Pemantauan.

Komponen pengendalian ini kemudian didetailkan melalui sejumlah prinsip dan juga *Point of Focus*. Penilaian Efektivitas pengendalian internal dilakukan berdasarkan penilaian pada tingkat prinsip untuk kemudian membentuk simpulan pada tingkat komponen dan keseluruhan.

Evaluasi dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Divisi Audit PT Kliring Berjangka Indonesia pada tahun 2025 melaksanakan penilaian Efektivitas Pengendalian Internal atas kegiatan PT KBI. Penilaian dilakukan secara mandiri. Fokus Pengujian adalah atas penyelenggaraan pengelolaan kegiatan Perusahaan selama tahun 2025. Hasil pengujian Kualitas Efektivitas Pengendalian Internal diinterpretasikan dalam infrastruktur dokumentasi dan kelembagaan PT KBI secara konsep pengendalian internal telah memadai (*present*).

Pernyataan Direksi atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

PT KBI telah menerapkan sistem pengendalian intern yang dirancang secara memadai dan berjalan efektif untuk mengelola berbagai risiko yang melekat pada kegiatan usaha, dengan tetap berada dalam batas toleransi risiko (*risk appetite*) yang telah ditetapkan. Penerapan sistem tersebut mendukung pencapaian tujuan Perusahaan, yang tercermin dari terlaksananya kegiatan operasional secara optimal dan efisien, tersusunnya laporan keuangan yang andal dan akurat, terjaganya keamanan aset Perusahaan, serta terpenuhinya kepatuhan terhadap seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Control Environment;
- Risk Assessment;
- Control Activities;
- Information and Communication; and
- Monitoring Activities.

These control components are further elaborated through a set of principles and Points of Focus. The assessment of internal control effectiveness is conducted at the principle level to subsequently form conclusions at both the component and entity-wide levels.

Internal Control System Assessment and Effectiveness

In 2025, the Audit Division of PT Kliring Berjangka Indonesia conducted an Internal Control Effectiveness Assessment of the operations of PT KBI. The assessment was executed through a self-assessment mechanism, which focused on the management of corporate activities throughout 2025. The results of the Internal Control Effectiveness Quality testing indicate that PT KBI's documentation and institutional infrastructure are conceptually adequate (*present*).

Statement of the Board of Directors and the Board of Commissioners on the Adequacy of the Internal Control System

PT KBI has implemented an internal control system that is adequately designed and operates effectively to manage the inherent risks associated with its business activities, while remaining within the established risk appetite. The implementation of this system supports the achievement of the Company's objectives, as reflected in the optimal and efficient execution of operational activities, the preparation of reliable and accurate financial statements, the safeguarding of the Company's assets, as well as compliance with all applicable laws and regulations.

SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Risk Management System

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT KBI menempatkan pengelolaan risiko sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola perusahaan. Setiap risiko yang melekat pada aktivitas operasional dipandang sebagai aspek yang perlu diantisipasi dan dikelola secara sistematis agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, Perusahaan membangun kerangka manajemen risiko yang terintegrasi, yang diterapkan secara konsisten di seluruh unit kerja dengan melibatkan seluruh Insan PT KBI.

In conducting its business activities, PT KBI considers risk management as an integral part of corporate governance. Every risk inherent in operational activities is regarded as an aspect that must be anticipated and managed systematically to ensure business continuity. To this end, the Company has established an integrated risk management framework, consistently applied across all units and involving all PT KBI personnel.

Pendekatan tersebut memungkinkan PT KBI untuk memastikan bahwa proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, serta pemantauan risiko dilakukan secara terstruktur dan berkesinambungan. Tanggung jawab pengelolaan risiko tidak hanya berada pada fungsi tertentu, melainkan menjadi kewajiban bersama yang melekat pada setiap lini organisasi. Dalam menjalankan kerangka ini, PT KBI mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023 yang mengatur tata kelola dan kegiatan korporasi signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Sepanjang tahun buku 2025, PT KBI mencermati sejumlah faktor eksternal dan internal yang berpotensi memengaruhi kelangsungan usaha. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- Dinamika ekonomi domestik akibat tren penurunan suku bunga;
- Ketidakpastian ekonomi global akibat eskalasi tarif dan trade shock;
- Ancaman gelombang serangan siber pada layanan bisnis kritikal;
- Kurangnya kesadaran atas penerapan tata kelola yang baik pada ekosistem Resi Gudang.

Untuk merespons kondisi tersebut, PT KBI memperkuat penerapan *Enterprise Risk Management* (ERM) sebagai instrumen utama pengendalian risiko Perusahaan. ERM diterapkan mulai dari penetapan sasaran strategis, perumusan *risk appetite* dan *risk tolerance* oleh manajemen senior, pelaksanaan penilaian risiko pada tingkat korporasi dan proses bisnis, hingga pengawasan atas efektivitas pengendalian yang telah ditetapkan. Seluruh rangkaian tersebut diselaraskan dengan standar ISO 31000:2018.

Dalam mendukung efektivitas penerapan ERM, PT KBI menerapkan *three lines* model yang membagi peran dan tanggung jawab secara jelas. Unit kerja sebagai pemilik risiko bertindak sebagai lini pertama, Divisi Manajemen Risiko menjalankan fungsi pengawasan sebagai lini kedua, sementara Divisi Audit berperan sebagai lini ketiga yang memberikan penilaian independen. Sejalan dengan regulasi yang berlaku, PT KBI telah memenuhi kebutuhan struktur dan jumlah organ pengelola risiko sebagaimana diprasyarkan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor 2 Tahun 2023.

Dari aspek kompetensi, hingga tahun 2025 seluruh organ pengelola risiko PT KBI telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan. Dengan pemenuhan tersebut, PT KBI memiliki fondasi pengelolaan risiko yang memadai untuk mendukung pencapaian tujuan Perusahaan secara berkelanjutan.

This approach enables PT KBI to ensure that the risk identification, measurement, control, and monitoring are conducted in a structured and continuous manner. Responsibility for risk management is not confined to a specific function but is a shared obligation across all levels of the organization. In implementing this framework, PT KBI refers to the provisions of the Minister of State-Owned Enterprises Regulation PER-2/MBU/03/2023, on governance and significant corporate activities of state-owned enterprises.

Throughout the fiscal year 2025, PT KBI monitored a range of external and internal factors that could potentially affect business continuity, including :

- Domestic economic dynamics due to the trend of declining interest rates;
- Global economic uncertainty caused by escalating tariffs and trade shocks;
- Threat of cyberattack waves targeting critical business services;
- Lack of awareness regarding the implementation of good governance within the Warehouse Receipt ecosystem.

In response to these conditions, PT KBI has strengthened the implementation of Enterprise Risk Management (ERM) as the primary tool for corporate risk control. ERM is applied from the setting of strategic objectives, formulation of risk appetite and risk tolerance by senior management, execution of risk assessments at both corporate and business process levels, to the supervision of the effectiveness of established controls. All these activities are aligned with ISO 31000:2018 standards.

To support the effectiveness of ERM implementation, PT KBI applies a three lines of defense model that clearly delineates roles and responsibilities. Business units, as risk owners, act as the first line, the Risk Management Division carries out oversight functions as the second line, and the Audit Division functions as the third line, providing independent assessment. In line with applicable regulations, PT KBI has fulfilled the required structure and number of risk management organs as stipulated in Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. 2 of 2023.

From a competency perspective, as of 2025, all PT KBI risk management personnel met the established qualifications. With these requirements fulfilled, PT KBI has a solid foundation for risk management to support the sustainable achievement of the Company's objectives.



Profil dan Mitigasi Risiko

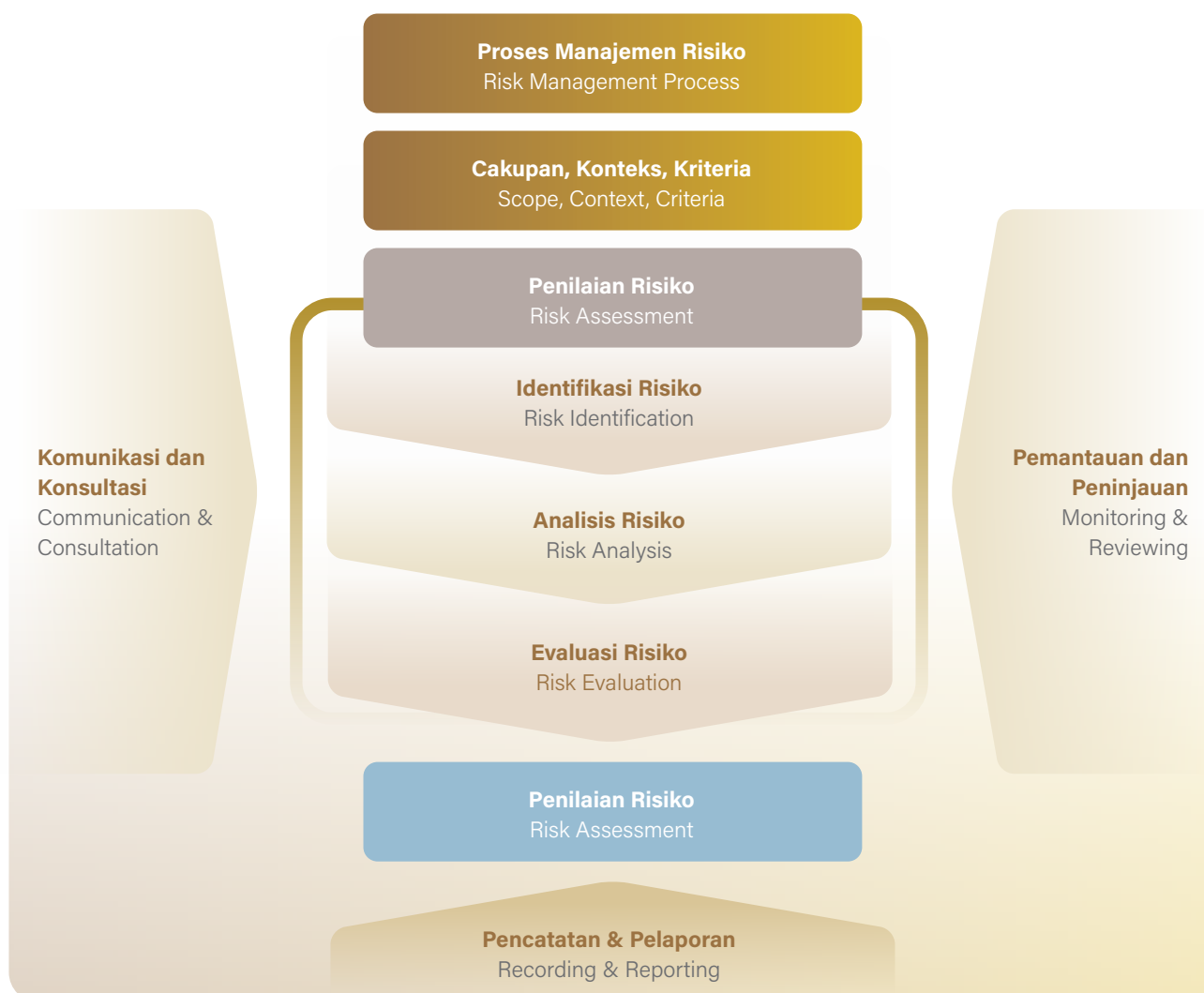
Manajemen Risiko di PT KBI dilaksanakan berdasarkan Kebijakan Manajemen Risiko yang ditetapkan oleh Direksi dan berlaku bagi seluruh Insan PT KBI. Kebijakan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pedoman Umum Manajemen Risiko sebagai acuan operasional bagi Divisi Manajemen Risiko.

Sebagai entitas bisnis, PT KBI menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap aktivitas usaha. Oleh karena itu, Perusahaan berfokus pada upaya mitigasi terhadap risiko-risiko yang berpotensi memberikan dampak material terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perusahaan. Penerapan Manajemen Risiko di PT KBI mengacu pada standar ISO 31000:2018, yang mencakup proses identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, serta pemantauan risiko secara berkelanjutan. Alur proses Manajemen Risiko tersebut disajikan dalam info grafis berikut:

Risk Profile and Mitigation

Risk management at PT KBI is implemented in accordance with the Risk Management Policy established by the Board of Directors and applies to all PT KBI personnel. This policy is further detailed in the General Risk Management Guidelines, which serve as an operational reference for the Risk Management Division.

As a business entity, PT KBI recognizes that risk is an inherent part of every business activity. Therefore, the Company focuses on mitigating risks that could have a material impact on its financial position and operational performance. PT KBI's risk management practices adhere to ISO 31000:2018 standards, encompassing the continuous processes of risk identification, analysis, evaluation, control, and monitoring.



Pengelolaan Risiko

Tahun 2025, PT KBI mengidentifikasi 83 (delapan puluh tiga) peristiwa risiko yang relevan dengan sasaran strategis, KPI, dan proses bisnis Perusahaan. Peristiwa risiko yang diidentifikasi terdiri dari 73 (tujuh puluh tiga) risiko proses dan 10 (sepuluh) risiko utama.

Risiko-risiko utama tersebut menjadi prioritas pemantauan yang dilakukan oleh Perusahaan melalui Divisi Manajemen Risiko. Taksonomi risiko utama meliputi risiko strategis, keuangan, makro/geopolitik dan pasar, hukum dan kepatuhan, operasional, teknologi informasi, serta reputasi dan keberlanjutan.

Hingga Triwulan I 2025, terdapat 10 (sepuluh) risiko yang dilaporkan, dengan 4 risiko sudah mengalami progres yang baik dibuktikan dengan penurunan level risiko, namun masih terdapat 6 risiko yang masih berada pada level yang sama dengan risiko inheren nya.

Sementara sampai dengan Triwulan II 2025, terdapat 9 (sembilan) risiko telah berhasil dikelola hingga level risiko sama dengan target. Adapun 1 (satu) risiko masih belum mencapai level risiko sesuai dengan targetnya.

Kemudian pada Triwulan III 2025, terdapat 9 (sembilan) risiko telah berhasil dikelola hingga level risiko sama dengan target. Adapun 1 (satu) risiko masih belum mencapai level risiko sesuai dengan targetnya.

Pada Triwulan IV 2025, dilakukan evaluasi kembali atas level risiko dan dampak kuantitatif risiko sehingga diperoleh hasil 10 (sepuluh) risiko telah berhasil diturunkan hingga sesuai dengan *risk appetite* maupun target level risiko yang ditetapkan.

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Tingkat keberhasilan pengelolaan risiko diukur melalui efektivitas mitigasi yang mampu menurunkan risiko melekat (*inherent risk*) ke tingkat risiko residu yang berada dalam batas toleransi risiko yang dapat diterima Perusahaan.

Risk Mitigation

In 2025, PT KBI identified 83 (eighty-three) risk events relevant to the Company's strategic objectives, KPIs, and business processes. The identified risk events consist of 73 (seventy-three) process risks and 10 (ten) key risks.

These key risks are the monitoring priorities for the Company, managed through the Risk Management Division. The key risk taxonomy includes strategic, financial, macro/geopolitical and market, legal and compliance, operational, information technology, as well as reputation and sustainability risks.

By the first quarter of 2025, 10 (ten) risks were reported, with 4 risks showing good progress as evidenced by a reduction in their risk levels, while 6 risks remained at the same level as their inherent risk.

By the second quarter of 2025, 9 (nine) risks had been successfully managed to a level consistent with their target, while 1 (one) risk had not yet reached the target risk level.

Similarly, by the third quarter of 2025, 9 (nine) risks were managed successfully to meet their target levels, with 1 (one) risk still not achieving the target.

In the fourth quarter of 2025, a re-evaluation of risk levels and quantitative risk impacts was conducted, resulting in all 10 (ten) risks being successfully reduced to align with the risk appetite and target risk levels set by the Company.

Risk Management System Review and Effectiveness

The effectiveness of risk management is measured by the success of mitigation efforts in reducing inherent risks to residual risk levels that fall within the Company's acceptable risk tolerance.



Asesmen Manajemen

Adapun asesmen terhadap manajemen risiko meliputi hal-hal berikut ini:

1. Melakukan identifikasi terhadap hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan berdasarkan sasaran, dengan menentukan KPI, aktivitas risiko, peristiwa risikonya, penyebab risikonya, dampak dari risiko dan penjelasan atas dampak tersebut;
2. Analisa risiko dilakukan dengan mengukur risiko inheren (risiko yang melekat di awal), analisa dampak dan probabilitas dari risiko;
3. Evaluasi dan penanganan risiko meliputi penyusunan rencana penanganan, upaya penanganan yang telah dilakukan, output dari penanganan risiko, batas waktu pelaksanaan (*timeline*), biaya penanganan, dampak, dan probabilitas atas risiko tersebut. Berdasarkan evaluasi dan penanganan risiko yang dilakukan terhadap risiko awal, diperoleh nilai eksposur risiko residual yang dapat dijadikan salah satu parameter dalam penilaian keberhasilan penanganan risiko.

Di sisi lain, asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan asesmen menggunakan asumsi makro yang ditetapkan oleh Pemerintah, kriteria dampak dan probabilitas yang ditetapkan Kementerian BUMN dan asumsi pasar spesifik yang mengacu pada Kementerian Perdagangan dan perhitungan bersama dengan Bursa Berjangka.

Perkara Direksi atau Dewan Komisaris atau Komite Audit atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Manajemen risiko di PT KBI diterapkan secara menyeluruh dan melekat pada seluruh proses bisnis Perusahaan. Direksi menetapkan kebijakan, pedoman, dan prosedur manajemen risiko yang terintegrasi dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor 2 Tahun 2023 sebagai dasar penerapannya. Risiko menjadi salah satu faktor utama dalam setiap pengambilan keputusan, baik operasional maupun strategis. Penerapan manajemen risiko dievaluasi secara berkala untuk memastikan independensi, efektivitas, serta efisiensinya bagi seluruh pemangku kepentingan.

Management Assessment

The risk management assessment encompasses the following activities:

1. Identifying factors that could significantly impact the Company's business continuity based on objectives, by determining KPIs, risk activities, risk events, risk causes, potential impacts, and explanations of these impacts;
2. Assessing inherent risk (initially existing risk) by analyzing its potential impact and probability;
3. Risk evaluation and mitigation include the formulation of mitigation plans, efforts undertaken, mitigation outputs, implementation timelines, mitigation costs, impacts, and risk probability. Based on the evaluation and mitigation of the inherent risks, the residual risk exposure values are obtained, which serve as a parameter for assessing the success of risk mitigation efforts.

In conducting these assessments, management applies macroeconomic assumptions established by the Government, impact and probability criteria set by the Ministry of State-Owned Enterprises, and market-specific assumptions in reference to the Ministry of Trade and in coordination with the Futures Exchange.

Statement of the Board of Directors, Board of Commissioners, or Audit Committee on the Adequacy of the Risk Management System

Risk management at PT KBI is implemented comprehensively and is embedded in all business processes across the Company. The Board of Directors establishes policies, guidelines, and procedures for integrated risk management, referring to Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. 2 of 2023 as the basis for its implementation. Risk is considered a key factor in all decision-making, both operational and strategic. The implementation of risk management is evaluated periodically to ensure its independence, effectiveness, and efficiency for all stakeholders.

PERKARA HUKUM YANG BERDAMPAK MATERIAL

Material Legal Cases

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan tidak mengalami perkara hukum yang dihadapi oleh Perusahaan.

Throughout 2025, the Company did not experience any legal cases involving the Company.

SANKSI ADMINISTRATIF

Administrative Sanctions

Hingga tahun 2025, Perusahaan tidak menghadapi sanksi administratif material yang mempengaruhi kelangsungan usaha Perusahaan dan serta tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris.

As of 2025, the Company did not face any material administrative sanctions affecting the continuity of the Company's operations, and there were no administrative sanctions imposed on members of the Board of Directors or the Board of Commissioners.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Access to Company Information and Data

Sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi dalam GCG, PT KBI secara konsisten mengelola keterbukaan informasi guna membangun nilai dan memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan. Akses informasi disediakan bagi pihak internal maupun eksternal sebagai sarana pemenuhan hak publik serta pendukung pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan PT KBI, sesuai ketentuan internal pengelolaan informasi. Selain itu, PT KBI membuka kanal penyampaian informasi bagi para pemangku kepentingan melalui kontak langsung ke kantor PT KBI pada alamat berikut:

As part of implementing the transparency principle in GCG, PT KBI consistently manages information disclosure to create value and strengthen stakeholder trust. Information access is provided to both internal and external parties as a means of fulfilling public rights and supporting oversight of PT KBI's operations, in accordance with internal information management provisions. In addition, PT KBI provides channels for stakeholders to submit information requests directly to the PT KBI office at the following address:

PT Kliring Berjangka Indonesia

Menara Danareksa Lt. 6
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14 Jakarta Pusat, 10110
Telpon Telephone : +62 21 35280000
Surel E-mail : info@ptkbi.com
Situs Web Website : www.ptkbi.com

Media Sosial

Social Media
Instagram : [@kliringberjangkaindonesia](https://www.instagram.com/kliringberjangkaindonesia)
Youtube : Kliring Berjangka Indonesia
Tiktok : [kliringberjangka.id](https://www.tiktok.com/kliringberjangka.id)

Publikasi dan Pemberitaan Perusahaan

Sepanjang tahun 2025, PT KBI secara aktif menyampaikan informasi kinerja dan aksi korporasi melalui publikasi *press release*. Tercatat sebanyak 20 *press release* yang menghasilkan 279 liputan media. Rincian publikasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Company Publications and Media Coverage

Throughout 2025, PT KBI actively disseminated information on corporate performance and actions through press releases. A total of 20 press releases were issued, resulting in 279 media coverage. Details of these publications are presented in the following table:



No.	Tanggal Rilis Release Date	Judul Berita News Title
1.	21 Januari 2025 January 21, 2025	PT KBI Kuatkan Program Ketahanan Pangan Nasional Melalui Optimalisasi Lumbung Padi di Jombang, Jawa Timur PT KBI Strengthens National Food Security Program Through Optimization of Rice Warehouses in Jombang, East Jawa
2.	24 Januari 2025 January 24, 2025	PT Kliring Berjangka Indonesia Raih Penghargaan Public Relations Terbaik dalam Indonesia Public Relation Award 2025 PT Kliring Berjangka Indonesia Wins Best Public Relations Award at the Indonesia Public Relations Award 2025
3.	14 Februari 2025 February 14, 2025	PT KBI Raih Penghargaan Indonesia Top Digital Innovation Award 2025 PT KBI Receives Indonesia Top Digital Innovation Award 2025
4.	20 Maret 2025 March 20, 2025	PT KBI Ajak untuk Sebarkan Kebaikan Lewat Kampanye "Ramadan Bergerak 2025" PT KBI Encourages Spreading Kindness Through the "Ramadan in Action 2025" Campaign
5.	10 April 2025 April 10, 2025	Kliring Berjangka Indonesia Perkuat Stabilitas Pasar Berjangka Hadapi Eskalasi Perang Dagang Tahun 2025 Kliring Berjangka Indonesia Strengthens Futures Market Stability Amid Trade War Escalation in 2025
6.	21 April 2025 April 21, 2025	Siaran Live 'Squawk Box' CNBC Indonesia bersama Direktur Utama PT KBI Live Broadcast on CNBC Indonesia "Squawk Box" with the President Director of PT KBI
7.	22 April 2025 April 22, 2025	PT Tanam Biji Kopi Bantu Reforestasi Classic Beans Bersama Yayasan Tanah Air Semesta di Garut PT Tanam Biji Kopi Supports Reforestation of Classic Beans with Yayasan Tanah Air Semesta in Garut
8.	25 Juni 2025 June 25, 2025	PT KBI sukses gelar RUPS, Tingkatkan Pusat Registrasi RG PT KBI successfully holds Annual General Meeting, Enhances RG Registration Center
9.	26 Juni 2025 June 26, 2025	Muamalat & PT KBI Perkuat Ekosistem Perdagangan Fisik Emas Secara Digital Muamalat & PT KBI Strengthen Digital Physical Gold Trading Ecosystem
10.	31 Juli 2025 July 31, 2025	57,6 Ton Kopi Subang Tembus Pasar Tiongkok, PT KBI Buktikan Sistem Resi Gudang Bantu Pacu Ekspor Petani Indonesia 57.6 Tons of Subang Coffee Reach Chinese Market: PT KBI Demonstrates How the Warehouse Receipt System Supports the Growth of Indonesian Farmers' Exports
11.	29 Agustus 2025 August 29, 2025	FX & PT KBI Gelar Seminar Mini Brent Crude Oil Futures Perkuat Literasi Perdagangan Energi Global FX & PT KBI Hold Mini Seminar on Brent Crude Oil Futures to Strengthen Global Energy Trading Literacy
12.	02 September 2025 September 2, 2025	Sinergi PT KBI dan Universitas Jakarta Bantu Kembangkan SDM Unggul PT KBI and Universitas Jakarta Collaborate to Develop Superior Human Capital
13.	18 September 2025 September 18, 2025	Mendag Buka Bulan Literasi PBK 2025, PT KBI: Transaksi Tembus 5.5 Juta Lot Minister of Trade Opens PBK Literacy Month 2025, PT KBI: Transactions Reach 5.5 Million Lots
14.	15 Oktober 2025 October 15, 2025	Sinergi JFX dan PT KBI dalam Perdagangan Komoditas Pertambangan JFX and PT KBI Collaborate in Mining Commodity Trading
15.	16 Oktober 2025 October 16, 2025	Eksistensi JFX dan PT KBI di Minerba Convex 2025 JFX and PT KBI at Minerba Convex 2025
16.	17 Oktober 2025 October 17, 2025	PT KBI Inisiasi Kolaborasi Strategis Holding BUMN Danareksa PT KBI Initiates Strategic Collaboration with Danareksa State-Owned Enterprise Holding
17.	18 Oktober 2025 October 18, 2025	PT KBI sebagai Pionir Pusat Registrasi Resi Gudang, Sinergi Ekosistem Resi Gudang di Trade Expo Indonesia 2025 PT KBI as Pioneer of Warehouse Receipt Registration Center, Strengthens Warehouse Receipt Ecosystem at Trade Expo Indonesia 2025
18.	21 Oktober 2025 October 21, 2025	PT KBI Dorong Sinergi Pasar Lelang Komoditas Bersama KPBN, Lelang Perdana 20 Ton Kopi Berjalan Sukses PT KBI Promotes Commodity Auction Market Synergy with KPBN, Successfully Conducts First 20 Tons Coffee Auction
19.	27 Oktober 2025 October 27, 2025	PT KBI Perluas Peran di Pasar Global, Dukung Akses Investor Indonesia ke Bursa Amerika PT KBI Expands Role in the Global Market, Supporting Indonesian Investor Access to U.S. Exchanges
20.	18 Desember 2025 December 18, 2025	PT KBI Perkuat Program Prioritas TJSL, Dorong Produktivitas Komoditas Resi Gudang, Pemberdayaan Petani, dan Dukungan Sosial PT KBI Strengthens Priority CSR Programs, Enhances Warehouse Receipt Commodity Productivity, Empowers Farmers, and Provides Social Support

KODE ETIK PERUSAHAAN

Code of Conduct

PT KBI menetapkan Kode Etik sebagai pedoman perilaku bagi seluruh Insan PT KBI dalam menjalankan kegiatan usaha secara beretika dan berintegritas. Kode Etik ini berfungsi sebagai acuan teknis penerapan prinsip GCG yang mengatur Etika Kerja dan Etika Usaha agar konsisten diterapkan di seluruh lingkungan Perusahaan.

Pokok-Pokok Kode Etik

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Perusahaan, PT KBI memandang bahwa terciptanya lingkungan usaha yang sehat dan berkelanjutan tidak terlepas dari peran nilai-nilai inti yang dianut dan dijalankan di lingkungan PT KBI. Nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi landasan dalam membangun motivasi serta akuntabilitas Insan PT KBI terhadap pencapaian sasaran Perusahaan, tetapi juga berfungsi sebagai perekat yang menyelaraskan pemahaman dan sikap dalam berinteraksi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Penyebarluasan Kode Etik

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha, PT KBI menegaskan komitmennya untuk senantiasa menaati seluruh ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku, serta menjalankan praktik bisnis secara profesional sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, setiap Insan PT KBI diwajibkan untuk mematuhi seluruh kebijakan, tata tertib, dan peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat internal Perusahaan, nasional, maupun ketentuan khusus yang berkaitan dengan bidang usaha PT KBI sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Sebagai bagian dari penguatan kepatuhan, PT KBI secara berkelanjutan menyelenggarakan sosialisasi atas regulasi dan kebijakan terbaru kepada seluruh Insan PT KBI sesuai lingkup tugasnya. Melalui upaya tersebut, Insan PT KBI juga diharapkan bersikap kooperatif serta bersedia memberikan informasi yang relevan apabila diperlukan oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya.

PT KBI has established a Code of Conduct as a behavioral guideline for all PT KBI personnel in conducting business activities ethically and with integrity. This Code of Conduct serves as a technical reference for implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG), regulating both Work Ethics and Business Ethics to ensure consistent application throughout the Company's environment.

Code of Conduct Key Principles

In order to realize the Company's vision and mission, PT KBI considers that creating a healthy and sustainable business environment is inseparable from the core values upheld and practiced within PT KBI. These values not only serve as the foundation for building the motivation and accountability of PT KBI personnel toward achieving the Company's objectives, but also function as a unifying framework that aligns understanding and behavior in interactions with all stakeholders.

Code of Conduct Socialization

In conducting its business activities, PT KBI emphasizes its commitment to being compliant with all applicable laws and regulations, as well as to conducting business professionally in accordance with established standards. In line with this commitment, all PT KBI personnel are required to adhere to all company policies, internal rules, national regulations, and any specific provisions related to PT KBI's line of business, in accordance with their respective responsibilities.

As part of strengthening compliance, PT KBI continuously organizes socialization programs on the latest regulations and policies for all personnel according to their scope of duties. Through these efforts, PT KBI personnel are also expected to act cooperatively and provide relevant information when required by law enforcement authorities in the exercise of their duties.



Pelanggaran Ringan dan Sanksi

1. Jenis Pelanggaran Ringan

- a. Pelanggaran terhadap jam kerja:
 - Datang terlambat 5 (lima) kali atau lebih, atau meninggalkan waktu kerja selama jam kerja tanpa ijin 5 (lima) kali atau lebih, atau pulang lebih awal tanpa ijin 5 (lima) kali atau lebih, atau gabungan ketiganya 5 (lima) kali atau lebih, dalam kurun waktu 1 (satu) bulan;
 - Atasan yang memberi ijin kepada 1 (satu) orang bawahan untuk meninggalkan kantor pada jam kerja 5 (lima) kali dalam 1 (satu) bulan kecuali untuk kepentingan dinas;
 - Bawahan yang meminta ijin meninggalkan kantor pada jam kerja 5 (lima) kali dalam 1 (satu) bulan kecuali untuk kepentingan dinas; dan
 - Tidak hadir bekerja tanpa alasan yang bisa diterima atau terlebih dahulu mendapat ijin dari atasan berwenang selama 1 (satu) hari.
- b. Pelanggaran terhadap kebersihan dan lingkungan: Dengan sengaja menciptakan atau membantu menciptakan atau membantu menciptakan keadaan, kondisi atau lingkungan kerja yang kotor dan tidak sehat.
- c. Pelanggaran terhadap disiplin kerja:
 - Tidak memakai pakaian kerja pada saat masuk dan selama melakukan pekerjaan di dalam Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Tidur di kantor pada jam kerja;
 - Membawa peralatan kerja, data/dokumen, atau harta lain milik Perusahaan ke luar lingkungan Perusahaan kecuali telah mendapat ijin dari pejabat berwenang; dan
 - Tidak menaati peraturan tentang keselamatan dan kesejahteraan kerja di Perusahaan.

2. Sanksi atas Pelanggaran Ringan

- a. Pegawai yang melakukan pelanggaran ringan tersebut di atas akan diberikan teguran lisan tercatat yang berlaku selama 3 (tiga) bulan;
- b. Apabila masa teguran lisan tercatat masih berlaku dan yang bersangkutan melakukan pelanggaran yang sama atau yang lainnya sebagaimana dimaksud pasal ini, maka Pegawai bersangkutan diberikan Surat Peringatan I (pertama) yang berlaku selama 6 (enam) bulan;

Minor Violations and Sanctions

1. Types of Minor Violations

- a. Violations related to working hours:
 - Arriving late 5 (five) times or more, leaving work during working hours without permission 5 (five) times or more, leaving early without permission 5 (five) times or more, or any combination of the three occurring 5 (five) times or more within a period of 1 (one) month;
 - A supervisor who grants permission to 1 (one) subordinate to leave the office during working hours 5 (five) times within 1 (one) month, except for official duties;
 - A subordinate who requests permission to leave the office during working hours 5 (five) times within 1 (one) month, except for official duties; and
 - Absence from work without an acceptable reason or without prior approval from an authorized supervisor for 1 (one) day.
- b. Violations related to cleanliness and the work environment: Deliberately creating or helping to create a dirty or unhealthy work environment or conditions.
- c. Violations of work discipline:
 - Not wearing work attire when entering or during work hours in accordance with applicable regulations;
 - Sleeping at the office during working hours;
 - Taking work equipment, data/documents, or other company property outside the Company's premises without permission from an authorized official; and
 - Failing to comply with occupational health and safety regulations within the Company.

2. Sanctions for Minor Violations

- a. Employees who commit the minor violations mentioned above will receive a recorded verbal warning valid for 3 (three) months;
- b. If the recorded verbal warning is still in effect and the employee commits the same or another violation as stipulated in this article, the employee will be issued a First Written Warning (SP I) valid for 6 (six) months;



- c. Apabila Surat Peringatan I (pertama) masih berlaku dan yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran yang sama atau lainnya sebagaimana dimaksud pasal ini, maka Pegawai bersangkutan diberikan Surat Peringatan II (kedua) yang berlaku selama 5 (lima) bulan;
- d. Apabila Surat Peringatan II (kedua) masih berlaku dan yang bersangkutan melakukan pelanggaran yang sama atau lainnya sebagaimana dimaksud pasal ini, maka Pegawai bersangkutan dikenakan sanksi pelanggaran sedang; dan
- e. Khusus pelanggaran pada Pasal 14 ayat 6, 7 dan 8 kepada karyawan yang tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan peringatan lisan.
- c. If SP I is still in effect and the employee continues to commit the same or another violation, the employee will be issued a Second Written Warning (SP II) valid for 5 (five) months;
- d. If SP II is still in effect and the employee commits the same or another violation, the employee will be subject to moderate violation sanctions; and
- e. Specifically for violations referred to in Articles 14 paragraphs 6, 7, and 8, employees who fail to fulfill their obligations will receive a verbal warning.

Pelanggaran Sedang & Sanksi

1. Jenis Pelanggaran Sedang

- a. Dengan sengaja dan tidak semestinya mencatatkan kehadiran Pegawai lain;
- b. Melakukan pekerjaan lain di luar kepentingan Perusahaan pada jam kerja;
- c. Membuat, membawa atau menyebarkan pengumuman; brosur, selebaran atau informasi lainnya yang dilarang oleh Perusahaan atau yang dapat menimbulkan keresahan, pertentangan atau rasa permusuhan di antara Pegawai;
- d. Atasan yang memberikan izin dan bawahan yang meminta izin untuk tidak masuk kerja 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan terkecuali izin pada pasal 65 tentang

Moderate Violations and Sanctions

1. Types of Moderate Violations

- a. Intentionally and improperly recording the attendance of another employee;
- b. Performing work unrelated to the Company's interests during working hours;
- c. Creating, carrying, or distributing announcements, brochures, leaflets, or other information prohibited by the Company or that could cause unrest, conflict, or hostility among employees;
- d. A supervisor granting permission and a subordinate requesting permission to be absent from work 3 (three) times in 1 (one) month, except for permissions



izin meninggalkan pekerjaan dan izin pertimbangan-pertimbangan tertentu, seperti anak sakit;

- e. Tidak hadir tanpa alasan yang dapat diterima atau tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari atasan berwenang selama 3 (tiga) hari kerja berturut-turut kecuali izin pada pasal 65 tentang izin meninggalkan pekerjaan dan izin pertimbangan tertentu, seperti anak sakit;
- f. Menyalahgunakan kesempatan berobat dan fasilitas pengobatan;
- g. Mencemarkan nama baik Perusahaan;
- h. Pelanggaran pada Pasal 16 ayat 5; dan
- i. Membuat keonaran/kerusuhan dalam lingkungan Perusahaan.

2. Sanksi atas Pelanggaran Sedang

- a. Pegawai melakukan pelanggaran sedang diberikan sanksi berupa Surat Peringatan I (pertama) untuk jangka waktu 6 (enam) bulan;
- b. Apabila Surat Peringatan I (pertama) masih berlaku dan yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran yang sama atau lainnya yang setara sebagaimana dimaksud pasal ini, maka kepada pegawai bersangkutan diberikan Surat Peringatan II (kedua) yang berlaku selama 5 (lima) bulan; dan
- c. Apabila Surat Peringatan II (kedua) masih berlaku, dan pegawai mengulangi pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi hukuman sedang, maka kepadanya dikenakan sanksi pelanggaran berat.

Pelanggaran Berat & Sanksi

1. Jenis Pelanggaran Berat

- a. Berjudi atau menyelenggarakan permainan judi di lingkungan Perusahaan;
- b. Membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau barang-barang berbahaya lainnya, yang tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan di lingkungan Perusahaan;
- c. Membuka rahasia Perusahaan;
- d. Membujuk atasan atau bawahan rekan kerja, anggota keluarga atau pihak lainnya untuk melakukan pekerjaan yang melanggar hukum dan kesusilaan; dan
- e. Pegawai yang melakukan pelanggaran pada Pasal 16 ayat 10 dan Pasal 17.

under Article 65 regarding leaving work and other special considerations, such as a sick child;

- e. Being absent without an acceptable reason or without prior approval from an authorized supervisor for 3 (three) consecutive working days, except for permissions under Article 65 regarding leaving work and other special considerations, such as a sick child;
- f. Misusing medical leave or medical facilities;
- g. Defaming the Company;
- h. Violations as referred to in Article 16 paragraph 5; and
- i. Causing disorder or unrest within the Company environment.

2. Sanctions for Moderate Violations

- a. Employees committing moderate violations will receive a First Written Warning (SP I) valid for 6 (six) months;
- b. If SP I is still in effect and the employee commits the same or another violation of equivalent severity as referred to in this article, the employee will be issued a Second Written Warning (SP II) valid for 5 (five) months; and
- c. If SP II is still in effect and the employee repeats a violation that qualifies as a moderate offense, the employee will be subject to serious violation sanctions.

Serious Violations and Sanctions

1. Types of Serious Violations

- a. Gambling or organizing gambling activities within the Company environment;
- b. Carrying firearms, sharp weapons, explosives, or other dangerous items that are unrelated to work within the Company;
- c. Disclosing the Company secrets;
- d. Persuading supervisors, subordinates, colleagues, family members, or other parties to perform actions that violate laws or moral standards; and
- e. Employees committing violations referred to in Article 16 paragraph 10 and Article 17.

2. Sanksi atas Pelanggaran Berat

- Pemotongan atas penghasilan;
- Penurunan golongan/pangkat atau jabatan (demosi);
- Skorsing (pemberhentian untuk sementara waktu) paling lama 9 (sembilan) bulan berturut-turut dan dibebaskan dari jabatan struktural/fungsional bagi Pegawai yang memegang jabatan; dan
- Pemutusan Hubungan Kerja dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pialang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sanksi atas pelanggaran berat tersebut bukan merupakan tahapan namun hanya petunjuk mengenai jenis sanksi.

Pelaksanaan Pedoman Perilaku

Implementasi Pedoman Perilaku bagi seluruh Insan PT KBI dilakukan melalui penandatanganan surat pernyataan komitmen untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan tersebut secara konsisten dan bertanggung jawab. Pernyataan komitmen ini dapat diperbarui sewaktu-waktu apabila diperlukan. PT KBI memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada Insan PT KBI yang terbukti tidak mematuhi atau melanggar Pedoman Perilaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan serta keputusan RUPS. Sementara itu, pelanggaran Pedoman Perilaku oleh Insan PT KBI dikenakan sanksi berdasarkan Keputusan Direksi mengenai Peraturan Disiplin Pegawai, serta ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama dan regulasi internal lainnya yang berlaku di PT KBI.

Dalam proses penegakan disiplin, PT KBI tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dengan memberikan kesempatan kepada pihak yang diduga melakukan pelanggaran untuk menyampaikan pembelaan dan klarifikasi sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan sanksi. Bentuk sanksi atas pelanggaran *Code of Conduct* dapat berupa teguran tertulis, surat peringatan, penurunan golongan upah, hingga pemutusan hubungan kerja.

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat pelanggaran Kode Etik di lingkungan PT KBI.

2. Sanctions for Serious Violations

- Reduction of salary or income;
- Demotion in rank, grade, or position;
- Suspension (temporary dismissal) for a maximum of 9 (nine) consecutive months and removal from structural/functional positions for employees holding such positions; and
- Termination of employment, which may be carried out following a court ruling that has obtained permanent legal force.

Sanctions for serious violations are not staged steps but serve as guidance on the types of penalties that may be applied.

Code of Conduct Implementation

The implementation of the Code of Conduct for all PT KBI personnel is carried out through the signing of a commitment statement to comply with and consistently uphold its provisions responsibly. This commitment statement may be updated as needed. PT KBI holds the authority to impose sanctions on personnel who are proven to violate or fail to comply with the Code of Conduct in accordance with applicable regulations.

Sanctions for violations committed by members of the Board of Commissioners and the Board of Directors refer to the Company's Articles of Association and GMS resolutions. Meanwhile, violations of the Code of Conduct by PT KBI personnel are subject to sanctions based on the Decrees of the Board of Directors on Employee Discipline Regulations, as well as provisions in the Collective Labor Agreement and other internal regulations in effect at PT KBI.

In the disciplinary process, PT KBI upholds the principle of fairness by providing the alleged violator an opportunity to present a defense and clarification, which will be considered before imposing sanctions. Sanctions for violations of the Code of Conduct may include written warnings, official reprimands, salary grade reductions, up to termination of employment.

Throughout 2025, there were not any Code of Conduct violations within PT KBI.



KEBIJAKAN PEMBERIAN KOMPENSASI JANGKA PANJANG BERBASIS KINERJA KEPADA MANAJEMEN DAN/ATAU KARYAWAN [MSOP/ESOP]

Employee and Management Stock Ownership Program [ESOP/MSOP]

Sampai dengan akhir tahun buku 2025, PT KBI belum menerapkan kebijakan kepemilikan saham Perusahaan bagi pegawai (*Employee Stock Ownership Program/ESOP*) maupun manajemen (*Management Stock Ownership Program/MSOP*). Oleh karena itu, tidak terdapat program kepemilikan saham pegawai dan manajemen yang dapat diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini.

As of the end of the fiscal year 2025, PT KBI did not implement an Employee Stock Ownership Program (ESOP) or Management Stock Ownership Program (MSOP). Therefore, there are no employee or management share ownership programs to be disclosed in this Annual Report.

KEBIJAKAN ANTIKORUPSI DAN ANTIGRATIFIKASI

Anti-Corruption and Anti-Gratification Policy

Program dan Prosedur Antikorupsi

Sebagai bagian dari upaya membangun praktik usaha yang berintegritas, PT KBI menempatkan kebijakan antikorupsi sebagai fondasi utama dalam seluruh aktivitas bisnis. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerapan berbagai langkah pencegahan yang terintegrasi untuk menekan potensi terjadinya korupsi dan suap, baik di lingkungan internal maupun dalam hubungan bisnis Perusahaan.

Kerangka kebijakan antikorupsi PT KBI dituangkan dalam Pedoman Perilaku Perusahaan (*Code of Conduct*) yang wajib dipatuhi oleh seluruh pegawai. Selain itu, setiap pegawai diwajibkan menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk pernyataan komitmen terhadap nilai-nilai integritas dan transparansi. PT KBI juga menerapkan kebijakan khusus terkait larangan pemberian dan penerimaan hadiah maupun gratifikasi yang diawasi melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) serta didukung oleh *Whistleblowing System* (WBS).

Untuk memperkuat sistem pencegahan, PT KBI mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang mengacu pada standar internasional ISO 37001:2016. Penerapan sistem ini bertujuan menanamkan budaya anti suap sekaligus memperkuat mekanisme pengendalian guna mendeteksi dan mencegah praktik penyuapan secara dini.

Anti-Corruption Program and Procedure

As part of its efforts to establish business practices based on integrity, PT KBI positions its anti-corruption policy as a core foundation in all business activities. This commitment is realized through the implementation of integrated preventive measures aimed at minimizing the risk of corruption and bribery, both within the Company and in its business relationships.

PT KBI's anti-corruption framework is embedded in the Company's Code of Conduct, which is mandatory for all employees. Additionally, every employee is required to sign an Integrity Pact as a formal declaration of commitment to the values of integrity and transparency. PT KBI also enforces specific policies prohibiting the giving and receiving of gifts or gratuities, which are monitored by the Gratification Control Unit (UPG) and supported by the Whistleblowing System (WBS).

To further strengthen preventive measures, PT KBI has implemented an Anti-Bribery Management System (ABMS) in accordance with the international standard ISO 37001:2016. This system is designed to cultivate an anti-bribery culture while enhancing control mechanisms to detect and prevent bribery at an early stage.

Sepanjang periode pelaporan, tidak terdapat pengaduan maupun laporan terkait praktik korupsi dan suap di lingkungan PT KBI. Dengan demikian, tidak terdapat tindakan korektif yang perlu diambil, termasuk pemutusan hubungan kerja atau penghentian kerja sama dengan pihak ketiga, yang mencerminkan konsistensi komitmen PT KBI dalam menerapkan prinsip antikorupsi.

Pelatihan Antikorupsi

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan melakukan pelatihan dan sosialisasi antikorupsi pada tanggal 9 Desember 2025 ke Internal PT KBI.

During the reporting period, no complaints or reports related to corruption or bribery were received within PT KBI. Consequently, no corrective actions, including termination of employment or cessation of cooperation with third parties, were required, reflecting PT KBI's consistent commitment to implementing anti-corruption principles.

Anti-Corruption Training

Throughout 2025, the Company conducted anti-corruption training and awareness sessions on December 9, 2025 for PT KBI's internal stakeholders.

KEBIJAKAN BENTURAN KEPENTINGAN

Conflict of Interest

PT KBI menetapkan kebijakan benturan kepentingan melalui Keputusan Direksi Nomor 31/K-KBI/LGL/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024. Kebijakan ini mengatur kewajiban seluruh pengurus dan pegawai untuk menjaga independensi, menghindari potensi konflik kepentingan, serta memastikan setiap keputusan dan tindakan dijalankan secara objektif sesuai prinsip GCG. Setiap indikasi konflik kepentingan wajib dilaporkan, dan Insan PT KBI dilarang memanfaatkan jabatan, aset, atau informasi Perusahaan, termasuk dalam bentuk suap, hadiah, atau sumbangan, untuk kepentingan pribadi.

PT KBI has established a Conflict of Interest Policy through Decree of the Board of Directors No. 31/K-KBI/LGL/X/2024 dated October 14, 2024. This policy regulates the obligation of all management and employees to maintain independence, avoid potential conflicts of interest, and ensure that every decision and action is carried out objectively in accordance with the GCG principles. Any indication of a conflict of interest must be reported, and PT KBI personnel are prohibited from exploiting their positions, assets, or the Company's information, including in the form of bribes, gifts, or donations, for personal gain.

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA

NEGARA (LKHPN)

State Officials' Wealth Report (LKHPN)

Sebagai bagian dari penguatan penerapan GCG, PT KBI mewajibkan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban ini mengacu pada UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan KPK No. 07 Tahun 2016 mengenai tata cara pelaporan dan pemeriksaan LHKPN. Secara internal, ketentuan tersebut diatur dalam Pedoman Pelaksanaan LHKPN berdasarkan SK No. 37/K-KBI/XII/2017 tanggal 7 Desember 2017.

As part of strengthening the GCG implementation, PT KBI requires the submission of the State Officials' Wealth Report (LHKPN) as a form of compliance with prevailing laws and regulations. This obligation refers to Law No. 30 of 2002 concerning Corruption Eradication Commission (KPK), Law No. 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes, and KPK Regulation No. 07 of 2016 regarding the procedures for reporting and reviewing LHKPN. Internally, these provisions are regulated in the LHKPN Implementation Guidelines based on Decree No. 37/K-KBI/XII/2017 dated December 7, 2017.



Transparansi LHKPN Pejabat Perusahaan

LHKPN merupakan daftar harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dilaporkan melalui formulir yang ditetapkan oleh KPK sesuai Keputusan KPK No. KEP-07/KPK/02/2005. Sejalan dengan komitmen terhadap kepatuhan regulasi dan pencegahan korupsi, PT KBI mewajibkan penyampaian LHKPN sebagai bagian dari upaya menjaga integritas dan transparansi. Adapun keterbukaan pelaporan LHKPN pejabat PT KBI tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

No.	Unit Kerja Work Unit	Wajib Lapori Required to Report	Sudah Lapori Reported	Belum Lapori Not Yet Reported	Tepat Waktu On Time
1.	Dewan Komisaris Board of Commissioners	3	3	0	3
2.	Direksi Board of Directors	3	3	0	3



KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI
Composition Diversity

PT KBI menempatkan prinsip keberagaman sebagai dasar dalam penyusunan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi, mencakup aspek gender, latar belakang pendidikan, pengalaman profesional, dan rentang usia. Komposisi tersebut disusun secara selaras dengan nilai profesionalisme serta kompetensi yang relevan dengan pengelolaan kegiatan komoditas berjangka sesuai bidang usaha PT KBI.

Transparency of Company Officials' Asset Declarations (LHKPN)

The LHKPN is a list of the wealth of State Officials, reported using the form stipulated by the KPK in accordance with KPK Decree No. KEP-07/KPK/02/2005. In line with its commitment to regulatory compliance and corruption prevention, PT KBI mandates the submission of LHKPN as part of efforts to maintain integrity and transparency. The disclosure of LHKPN reports by PT KBI officials for the year 2025 is presented in the following table:

PT KBI places the principle of diversity as a foundation in composing the Board of Commissioners and the Board of Directors, covering aspects such as gender, educational background, professional experience, and age range. The composition is structured in alignment with professionalism and competencies relevant to managing futures commodity activities in PT KBI's line of business.

KEBIJAKAN PENGUNGKAPAN INFORMASI MENGENAI KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS BAIK SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG

Information Disclosure on Share Ownership of the Board of Directors and the Board of Commissioners, Either Direct or Indirect

Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris PT KBI tidak memiliki kepemilikan saham di Perusahaan. Oleh karenanya, tidak terdapat informasi kepemilikan saham Direksi dan Dewan Komisaris yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini.

Share Ownership by the Board of Directors and the Board of Commissioners

The Board of Directors and the Board of Commissioners of PT KBI do not hold any shares in the Company. Therefore, there is no information on share ownership of the Directors and Commissioners disclosed in this Annual Report.

Kebijakan Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris

Sehubungan dengan pengungkapan kepemilikan saham, PT KBI tidak menetapkan kebijakan khusus terkait kepemilikan saham Perusahaan oleh Direksi maupun Dewan Komisaris.

Policy on Share Ownership by the Board of Directors and the Board of Commissioners

Regarding the disclosure of share ownership, PT KBI does not establish a specific policy concerning the ownership of Company shares by the Board of Directors or the Board of Commissioners.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing System

Sebagai bagian dari upaya penanganan pengaduan dan pengungkapan dugaan pelanggaran hukum maupun perilaku tidak etis, PT KBI secara berkelanjutan memperkuat penerapan *Whistleblowing System* (WBS). Sistem ini difokuskan pada pelaporan tindakan yang bertentangan dengan etika dan ketentuan *Code of Conduct*, sekaligus menjadi instrumen pendukung dalam memperkuat penerapan prinsip *Good Corporate Governance* di lingkungan PT KBI. Penerapan WBS di PT KBI telah diformalkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 37/K-KBI/LGL/XI/2024 tentang Penetapan Tim *Whistleblowing System* (WBS), Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), dan *Respectful Workplace Policy* (RWP).

As part of its efforts to handle complaints and report suspected violations of law or unethical behavior, PT KBI continuously strengthens the implementation of the *Whistleblowing System* (WBS). This system focuses on reporting actions that contradict the Code of Conduct and serves as a supporting instrument to reinforce the application of Good Corporate Governance principles within PT KBI. The implementation of the WBS at PT KBI has been formalized through Decree of the Board of Directors No. 37/K-KBI/LGL/XI/2024 concerning establishment of the *Whistleblowing System* (WBS) Team, Gratification Control Unit (UPG), and *Respectful Workplace Policy* (RWP).





Cara Penyampaian Laporan Pelanggaran

Mekanisme penyampaian pelaporan terhadap penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh insan PT KBI adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan Penyimpangan atau Pelanggaran oleh Pegawai

Disampaikan secara tertulis ditujukan kepada Tim *Whistleblowing System* dengan cara:

- Melalui email: whistleblowing@ptkbi.com;
- Melalui *Whatsapp (message & call)* ke nomor 081181296999;
- Melalui pos/kurir ke alamat: Tim *Whistleblowing System*
PT Kliring Berjangka Indonesia
Menara Danareksa Lantai 6, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta Pusat 10110
(surat tersebut hanya boleh dibuka oleh Tim *Whistleblowing System*); dan
- Laporan dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagai bukti adanya penyimpangan atau pelanggaran.

2. Pelaporan Penyimpangan atau Pelanggaran oleh Tim *WhistleBlowing System*

Disampaikan secara tertulis ditujukan kepada Direktur Utama dengan cara:

- Mengirimkan laporan melalui pos/kurir ke alamat: Direktur Utama
PT Kliring Berjangka Indonesia
Menara Danareksa Lantai 6, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta Pusat 10110
(surat tersebut hanya boleh dibuka oleh Direktur Utama); dan
- Laporan dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagai bukti adanya penyimpangan atau pelanggaran.

Whistleblowing Mechanism

The mechanism for reporting fraud or violations by PT KBI Personnel is as follows:

1. Reporting by Employees

Employees may submit reports of fraud or violations in writing to the Whistleblowing System Team through the following channels:

- Via email: whistleblowing@ptkbi.com;
- Via WhatsApp (message or call): 081181296999;
- Via postal mail/courier to:
Whistleblowing System Team
PT Kliring Berjangka Indonesia
Menara Danareksa, 6th floor, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta Pusat 10110
(*letters may only be opened by the Whistleblowing System Team*); and
- Reports must include valid supporting documents as evidence of the deviation or violation.

2. Reporting by the Whistleblowing System Team

Reports must be submitted in writing to the President Director via:

- Postal/Courier Mail:
President Director
PT Kliring Berjangka Indonesia
Menara Danareksa, 6th floor, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta Pusat 10110
(*letters may only be opened by the President Director*); and
- Reports must include valid supporting documents as evidence of the deviation or violation.

3. Pelaporan Penyimpangan atau Pelanggaran oleh Direksi

Disampaikan secara tertulis ditujukan kepada Komisaris Utama dengan cara:

- Mengirimkan laporan melalui pos/kurir yang ditujukan kepada:
Komisaris Utama
PT Kliring Berjangka Indonesia
Menara Danareksa Lantai 6, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta Pusat 10110
(surat tersebut hanya boleh dibuka oleh Komisaris Utama); dan
- Laporan dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagai bukti adanya penyimpangan atau pelanggaran.

4. Pelaporan Penyimpangan atau Pelanggaran oleh Dewan Komisaris

Disampaikan secara tertulis ditujukan kepada Whistleblowing System Kementerian BUMN dengan cara:

- Mengirimkan laporan melalui situs web Whistleblowing System Kementerian BUMN yang dapat diakses melalui alamat <https://wbs.bumn.go.id/>; dan
- Laporan dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagai bukti adanya penyimpangan atau pelanggaran.

5. Pelapor Dapat Mengirimkan Laporan Secara Anonymous (Tanpa Menyertakan Identitas)

Bagi pelapor yang menyertakan identitas dalam laporannya Tim WBS berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan identitas Pelapor serta PT KBI akan menerapkan hal sebagai berikut:

- Setiap pelapor yang melaporkan secara sah mendapatkan hak perlindungan hukum dari PT KBI;
- Perusahaan memberikan perlindungan kepada setiap pelapor yang mempunyai itikad baik;
- Itikad baik pelapor dibuktikan dengan pelaporan yang disampaikan sesuai dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi;
- Perlindungan diberikan kepada pelapor terhadap tekanan, gugatan hukum, harta benda, tindakan fisik kepada pelapor; dan
- Hak perlindungan pelapor dicabut apabila pelapor terbukti melakukan pelaporan palsu.

3. Reporting by the Board of Directors

Reports must be submitted in writing to the President Commissioner via:

- Postal/Courier Mail:
President Commissioner
PT Kliring Berjangka Indonesia
Menara Danareksa, 6th Floor, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14 Jakarta Pusat 10110
(*letters may only be opened by the President Commissioner*); and
- Reports must include valid supporting documents as evidence of the fraud or violation.

4. Reporting by the Board of Commissioners

Reports must be submitted in writing to the Whistleblowing System of the Ministry of State-Owned Enterprises (SOE) via:

- Website: <https://wbs.bumn.go.id/>; and
- Reports must include valid supporting documents as evidence of the fraud or violation.

5. Whistleblowers May Submit Reports Anonymously (Without Disclosing Their Identity)

For whistleblowers who provide their identity in the report, the WBS Team is obligated to maintain the confidentiality of the reporter's identity. PT KBI will implement the following measures:

- Every whistleblower who submits a legitimate report is entitled to legal protection from PT KBI;
- The Company provides protection to all whistleblowers who act in good faith;
- Good faith is demonstrated when the report is submitted in accordance with the procedures stipulated in the Decree of the Board of Directors;
- Protection includes safeguarding the whistleblower from coercion, lawsuits, property claims, and physical harm; and
- Whistleblower protection will be revoked if the report is proven to be false or malicious.



Kriteria Pelanggaran

Kriteria pelanggaran yang dapat dilaporkan ke dalam WBS, yaitu:

1. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh pegawai maka laporan pelanggaran tersebut diserahkan langsung kepada Direktur Utama;
2. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh anggota Direksi maka laporan pelanggaran disampaikan kepada Komisaris Utama; dan
3. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, organ pendukungnya, dan Dewan Pengawas Syariah maka laporan pelanggaran diserahkan kepada Direktur Utama, untuk disampaikan ke Pemegang Saham.

Perlindungan Pelapor

1. Setiap pelapor yang melaporkan secara sah mendapatkan hak perlindungan hukum dan keamanan dari Perusahaan dan kerahasiaan data/informasi diri pribadi pelapor;
2. Perusahaan memberikan perlindungan kepada setiap pelapor yang mempunyai itikad baik yang dibuktikan dengan pelaporan yang disampaikan sesuai dengan cara-cara sebagaimana diatur di Keputusan Direksi ini;
3. Hak perlindungan pelapor dicabut oleh Perusahaan apabila pelapor terbukti melakukan pelaporan palsu;
4. Perlindungan hukum dan keamanan diberikan kepada pelapor terhadap tekanan, ancaman jiwa, fisik, diskriminasi, dan gugatan hukum serta harta benda kepada pelapor;
5. Dalam hal pelapor adalah pegawai Perusahaan, perlindungan juga meliputi kemungkinan adanya penundaan kepangkatan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); dan
6. Insan PT KBI yang melakukan tekanan kepada pelapor sebagaimana ketentuan Pasal 7 Surat Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Violation Criteria

The criteria for violations that can be reported through the WBS are as follows:

1. If the violation is committed by an employee, the report must be submitted directly to the President Director;
2. If the violation is committed by a member of the Board of Directors, the report must be submitted to the President Commissioner; and
3. If the violation is committed by a member of the Board of Commissioners, its supporting organs, or the Sharia Supervisory Board, the report must be submitted to the President Director, who will forward it to the Shareholders.

Whistleblower Protection

1. Legal and personal protection: Any whistleblower who submits a valid report is entitled to legal protection, personal safety, and confidentiality of their personal data and information;
2. The Company provides protection to whistleblowers who act in good faith, evidenced by reports submitted according to the procedures outlined in the decree of the Board of Directors;
3. Protection will be revoked if it is proven that the whistleblower submitted a false report;
4. Protection includes defense against pressure, threats to life, physical harm, discrimination, legal claims, and threats to the whistleblower's assets;
5. If the whistleblower is an employee of the Company, protection also covers potential issues related to promotion delays or termination of employment (PHK); and
6. Any PT KBI personnel who exert pressure or intimidate the whistleblower, as stipulated in Article 7 of the decree of the Board of Directors, will face sanctions in accordance with applicable laws and regulations.

Penanganan Pengaduan

1. Perusahaan harus menerima setiap pelaporan penyimpangan atau pelanggaran yang ditujukan secara tertulis, yang dilengkapi dokumen yang sah;
2. Perusahaan dapat menolak menerima pelaporan penyimpangan atau pelanggaran yang ditujukan secara tertulis, yang tidak dilengkapi dokumen yang sah;
3. Pelapor diperbolehkan melaporkan penyimpangan atau pelanggaran secara anonim (tanpa nama atau identitas);
4. Kerahasiaan identitas pelapor dijamin Perusahaan dan Perusahaan akan memberikan sanksi tegas bagi yang melanggar prinsip kerahasiaan tersebut;
5. Setiap pelaporan diseleksi berdasarkan pihak yang diduga melakukan pelanggaran;
6. Setiap pelaporan akan dilakukan verifikasi yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi. Verifikasi didasarkan pada kejelasan laporan yang memuat pokok masalah yang diadukan, pihak-pihak yang terlibat, waktu dan lokasi kejadian, kronologis kasus serta dokumen atau bukti pendukung;
7. Tim *Whistleblowing System* melakukan verifikasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan pegawai. Direksi dapat membentuk Tim Ad Hoc untuk melakukan verifikasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Tim *Whistleblowing System*. Dewan Komisaris dapat membentuk Tim Ad Hoc untuk melakukan verifikasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Direksi. Pembentukan Tim Ad Hoc sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan;
8. Direksi menetapkan apakah suatu laporan yang menyangkut dugaan pelanggaran oleh pegawai atau Tim *Whistleblowing System* layak untuk diinvestigasi;
9. Dewan Komisaris menetapkan apakah suatu laporan yang menyangkut dugaan pelanggaran oleh Direksi layak untuk diinvestigasi;
10. Proses investigasi, hasil investigasi dan tindak lanjut yang dilakukan oleh Tim *Whistleblowing System* dilaporkan kepada Direksi dalam bentuk laporan dan rekomendasi;

Complaint Handling

1. The Company must accept all written reports of irregularities or violations that are accompanied by valid supporting documents;
2. Reports submitted without valid supporting documents may be rejected by the Company;
3. Whistleblowers may submit reports anonymously (without disclosing their name or identity);
4. The Company guarantees the confidentiality of the whistleblower's identity and will impose strict sanctions on anyone who violates this principle;
5. Each report is screened according to the alleged offender (the party suspected of the violation);
6. Reports are verified and documented in a Verification Report, based on clarity of the report, involved parties, time and location of the incident, chronology of the case, and supporting documents or evidence;
7. The Whistleblowing System Team verifies allegations involving employees. The Board of Directors can form an Ad Hoc Team to verify allegations against the Whistleblowing System Team. The Board of Commissioners can form an Ad Hoc Team to verify allegations against the Board of Directors. The formation of Ad Hoc Teams must comply with Company regulations;
8. The Board of Directors determines whether a report concerning alleged violations by employees or the Whistleblowing System Team should be investigated;
9. The Board of Commissioners determines whether a report concerning alleged violations by Directors should be investigated;
10. Investigation process, findings, and follow-up actions by the Whistleblowing System Team are reported to the Board of Directors with recommendations;



11. Proses investigasi, hasil investigasi dan tindak lanjut yang dilakukan oleh Tim Ad Hoc yang dibentuk Direksi atas dugaan Penyimpangan dan Pelanggaran yang dilakukan oleh Tim *Whistleblowing* System dilaporkan kepada Direksi dalam bentuk laporan dan rekomendasi;
12. Proses investigasi, hasil investigasi dan tindak lanjut yang dilakukan oleh Tim Ad Hoc yang di bentuk Dewan Komisaris atas dugaan Penyimpangan dan Pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi dilaporkan kepada Direksi dalam bentuk laporan dan rekomendasi; dan
13. Penanganan pengaduan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengaduan dinyatakan lengkap dan memenuhi kriteria dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Pihak yang Mengelola Pengaduan

PT KBI membentuk Tim *Whistleblowing System* (WBS) & Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) bersifat independen dari operasional sehari-hari PT KBI dan bertanggung jawab secara langsung kepada Direksi. Pembentukan Tim Pengelola WBS bertujuan mengelola laporan atas indikasi pelanggaran terjadi.

Bagi pihak pelapor dapat menyampaikan pengaduan pelanggaran melalui sejumlah media berikut:

1. Surat:
Tim *Whistleblowing System*
Menara Danareksa Lantai 6, Jl. Medan Merdeka Selatan
No. 14, Jakarta Pusat 10110
2. Email: whistleblowing@ptkbi.com
3. Telepon: 021-35280000
4. SMS/Whatsapp: 081181296999
5. Kotak WBS

Laporan Pelanggaran

Laporan pelanggaran yang masuk melalui kanal WBS PT KBI tahun 2024 dan 2025 ditampilkan dalam tabel berikut:

11. Investigation, results, and follow-up by the Ad Hoc Team formed by the Board of Directors on allegations involving the Whistleblowing System Team are reported to the Board of Directors with recommendations;
12. Investigation, results, and follow-up by the Ad Hoc Team formed by the Board of Commissioners on allegations involving the Board of Directors are reported to the Board of Directors with recommendations; and
13. Complaints must be resolved within 30 (thirty) working days from the date the report is deemed complete and eligible for follow-up in accordance with regulations.

Party Managing Complaints

PT KBI has established an independent Whistleblowing System (WBS) Team and Gratification Control Unit (UPG), which operate independently from day-to-day operations and report directly to the Board of Directors. The WBS Team is responsible for managing reports of alleged violations or misconduct.

Whistleblowers can submit reports of violations through the following channels:

1. Mail:
Whistleblowing System Team Menara
Danareksa, 6th Floor. Jl. Medan Merdeka Selatan
No. 14
Jakarta Pusat 10110, Indonesia
2. Email: whistleblowing@ptkbi.com
3. Telephone: 021-35280000
4. SMS/WhatsApp: 081181296999
5. WBS Submission Box

Violation Reporting

Reports of violations submitted through PT KBI's WBS channels in 2024 and 2025 are presented in the table below:

Uraian Description	2025	2024
Jumlah Pengaduan yang Masuk Number of Incoming Complaints	Nihil Nil	Nihil Nil
Jumlah Pengaduan yang Diproses Number of In-Process Complaints	Nihil Nil	Nihil Nil
Komposisi Pengaduan yang Masuk dan yang Diproses Composition of the Incoming and In-Process Complaints	Nihil Nil	Nihil Nil

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Whistleblowing System

PT KBI memastikan penerapan *Whistleblowing System* berjalan secara efektif melalui pemantauan yang dilakukan secara berkesinambungan. Selain itu, Satuan Pengawasan Internal secara periodik melakukan evaluasi atas implementasi WBS sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun guna menyempurnakan kualitas sistem beserta perangkat pendukungnya. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Direktur Utama sebagai bahan tindak lanjut.

Whistleblowing System Monitoring and Evaluation

PT KBI ensures that the implementation of the Whistleblowing System operates effectively through continuous monitoring. In addition, the Internal Audit Unit periodically evaluates the implementation of the WBS at least once a year to improve the quality of the system and its supporting tools. The results of these evaluations are subsequently reported to the President Director as a basis for follow-up actions.

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Development of the Implementation of Good Corporate Governance

Roadmap Penerapan GCG di Lingkup Perusahaan

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola perusahaan, PT KBI menetapkan *roadmap* GCG sebagai instrumen strategis yang berfungsi mengoordinasikan pemanfaatan seluruh sumber daya Perusahaan. Melalui kerangka ini, penerapan prinsip-prinsip GCG dijalankan secara terukur dan berkesinambungan, sehingga mendukung pencapaian keunggulan kompetitif jangka panjang yang selaras dengan arah strategis Perusahaan.

GCG Implementation Roadmap

As part of strengthening corporate governance, PT KBI has established a GCG roadmap as a strategic instrument to coordinate the utilization of all Company resources. Through this framework, the implementation of GCG principles is carried out in a measured and continuous manner, thereby supporting the achievement of long-term competitive excellence in alignment with the Company's strategic direction.



Pencapaian dan Perkembangan Penerapan GCG

Dalam praktiknya, PT KBI secara berkelanjutan melakukan penilaian atas penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan perbaikan berkelanjutan. *Assessment* ini dilaksanakan setiap tahun untuk mengukur tingkat kepatuhan, efektivitas, serta konsistensi penerapan GCG di seluruh aktivitas operasional, sekaligus menilai kesesuaian pelaksanaannya dengan *roadmap* GCG yang telah disusun oleh Perusahaan.

Namun demikian, pada tahun 2025 pelaksanaan penilaian dan evaluasi GCG PT KBI tidak dilaksanakan. Berdasarkan Pasal 44 (1) Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-2/MBU/03/2023 di mana BUMN wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam bentuk penilaian (*assessment*) yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BUMN melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BUMN yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun. Adapun pelaksanaan *assessment* GCG BUMN di masa transisi sebelum terbitnya Petunjuk Teknis, BUMN diberikan kebebasan untuk menggunakan indikator/parameter penilaian dan evaluasi penerapan tata kelola perusahaan yang baik, sesuai dengan kebutuhan masing-masing BUMN sebagaimana surat Kementerian BUMN Nomor S-52/DKU.MBU/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024 hal: Pelaksanaan *Assessment* GCG BUMN Tahun 2023.

Hal ini sejalan dengan diterbitkannya Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SK-12/S.MBU/08/2023 tentang Pencabutan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2023 mengenai indikator dan parameter penilaian penerapan GCG pada BUMN. Dengan dicabutnya ketentuan tersebut, SK-16 tidak lagi digunakan sebagai acuan penilaian GCG di lingkungan BUMN, sehingga pelaksanaan *assessment* GCG PT KBI untuk sementara waktu dihentikan hingga terbitnya kebijakan atau pedoman baru dari Kementerian BUMN.

Meskipun demikian, komitmen PT KBI terhadap penerapan GCG tetap berjalan secara konsisten. Sebagai gambaran atas kesinambungan kualitas tata kelola perusahaan, Perusahaan menyajikan capaian hasil *assessment* penerapan GCG dalam lima tahun terakhir, yang mencerminkan upaya berkelanjutan PT KBI dalam memperkuat praktik tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

GCG Achievement and Progress

PT KBI continuously conducts assessments on the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles as part of its control and continuous improvement mechanisms. These assessments are normally carried out annually to measure the level of compliance, effectiveness, and consistency of GCG implementation across all operational activities, while also evaluating alignment with the GCG roadmap established by the Company.

However, in 2025, the GCG assessment and evaluation at PT KBI was not conducted. Based on Article 44 (1) of the Guidelines on Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises (SOE) No. PER-2/MBU/03/2023, SOEs are required to measure the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in the form of an assessment program. This program aims to identify the execution of Good Corporate Governance within SOEs through the measurement of the implementation and application of GCG, conducted periodically every 2 (two) years. During the transitional period prior to the issuance of the Technical Guidelines, SOEs were given the flexibility to use their own indicators or assessment parameters to evaluate the implementation of good corporate governance, in accordance with the specific needs of each SOE, as stipulated in the Ministry of SOEs letter No. S-52/DKU.MBU/10/2024 dated October 15, 2024, regarding Implementation of SOE GCG Assessment for the Year 2023.

This aligns with the issuance of the Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. SK-12/S.MBU/08/2023, regarding the revocation of Secretary of the Decree of the Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2023 concerning indicators and parameters for assessing the implementation of GCG in SOEs. With the revocation of this regulation, SK-16 is no longer used as a reference for GCG assessments within SOEs, resulting in the temporary suspension of PT KBI's GCG assessment until new policies or guidelines are issued by the Ministry of SOEs.

Nevertheless, PT KBI's commitment to implementing GCG continues consistently. To illustrate the continuity of corporate governance quality, the Company presents the results of GCG assessments over the past five years, reflecting PT KBI's ongoing efforts to strengthen governance practices that are transparent, accountable, and uphold integrity.

78,32
2019

70,72
2020

84,02
2021

86,76
2022

**2025: akan dilakukan
pada tahun 2026
to be conducted in
2026**

Kondisi Penerapan GCG

Sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola perusahaan, PT KBI secara aktif membangun pemahaman yang menyeluruh mengenai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) kepada seluruh Insan PT KBI. Upaya ini dilakukan melalui kegiatan sosialisasi yang dirancang tidak hanya untuk mengenalkan ketentuan dan regulasi terkait GCG, tetapi juga untuk menjelaskan tujuan, manfaat, serta peran strategis GCG dalam mendukung keberlangsungan dan kinerja Perusahaan.

Melalui pendekatan tersebut, PT KBI mendorong keterlibatan aktif seluruh Insan PT KBI agar prinsip-prinsip GCG tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga diimplementasikan secara konsisten dalam setiap pengambilan keputusan serta pelaksanaan kegiatan operasional dan keuangan sehari-hari. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan berbagai kanal komunikasi internal yang tersedia, sehingga pesan dan nilai-nilai GCG dapat tersampaikan secara efektif dan merata di seluruh lingkungan kerja PT KBI.

GCG Implementation

To strengthen corporate governance, PT KBI actively fosters a comprehensive understanding of Good Corporate Governance (GCG) principles among all PT KBI personnel. This initiative is carried out through socialization activities designed not only to introduce the relevant regulations and provisions regarding GCG but also to explain the objectives, benefits, and strategic role of GCG in supporting the company's sustainability and performance.

Through this approach, PT KBI encourages active engagement from all personnel so that GCG principles are not only understood conceptually but also implemented consistently in every decision-making process as well as in daily operational and financial activities. These socialization activities are conducted continuously, utilizing various available internal communication channels to ensure that the messages and values of GCG are conveyed effectively and uniformly across the entire PT KBI work environment.



07.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL & LINGKUNGAN

Social & Environmental
Responsibility





TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Corporate Social and Environmental Responsibility

Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan sasaran strategis sekaligus memastikan kesinambungan kinerja usaha dalam jangka panjang, PT KBI mengadopsi prinsip *Triple Bottom Line* (TBL) dengan menegaskan komitmen Perusahaan untuk menyeimbangkan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pendekatan ini diwujudkan melalui integrasi aspek *People*, *Profit*, dan *Planet* (3P) ke dalam kebijakan serta praktik korporasi, yang secara menyeluruh diterapkan melalui inisiatif-inisiatif berikut:

1. *People*
PT KBI senantiasa meningkatkan Sumber Daya Manusia guna mendukung perkembangan perekonomian Indonesia.
2. *Planet*
PT KBI mengutamakan lingkungan dan masyarakat, serta turut mengembangkan potensi sumber daya untuk dapat memberikan nilai tambah.
3. *Profit*
PT KBI terus mengembangkan bisnis melalui inovasi dan strategi bisnisnya tanpa meninggalkan kewajiban sosial masyarakat.

Implementasi komitmen tersebut direalisasikan melalui berbagai inisiatif Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang menjadi elemen strategis dalam membangun hubungan yang selaras antara PT KBI, lingkungan sekitar, komunitas, serta para pemangku kepentingan. Program TJSL dirancang tidak hanya sebagai bentuk kepedulian, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong kemandirian dan peningkatan kapasitas masyarakat dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

Agar pelaksanaannya memberikan dampak yang optimal, PT KBI mengintegrasikan seluruh dimensi TJSL secara terpadu dengan penetapan sasaran yang terukur dan relevan, serta pengelolaan program yang berorientasi pada efektivitas. Dalam proses perancangannya, program TJSL PT KBI mempertimbangkan berbagai aspek utama, mencakup kebutuhan pelanggan, arah strategi bisnis, aktivitas operasional dan perdagangan, pengelolaan risiko, pengembangan sumber daya manusia, hingga kontribusi terhadap penguatan komunitas.

Social and Environmental Responsibility Commitment and Policy

As part of our initiatives to achieve strategic objectives while ensuring long-term business sustainability, PT KBI adopt the Triple Bottom Line (TBL) principle by reaffirming the Company's commitment to balancing social, economic, and environmental dimensions. This approach is implemented through the integration of the People, Profit, and Planet (3P) aspects into corporate policies and practices, which are comprehensively reflected through the following initiatives:

1. *People*
PT KBI consistently enhances its human resources to support the development of Indonesia's economy.
2. *Planet*
PT KBI prioritizes environmental protection and community welfare, while also developing resource potential to create added value.
3. *Profit*
PT KBI continues to grow its business through innovation and sound business strategies without neglecting its social responsibilities to the community.

The implementation of this commitment is carried out through various Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives, which serve as a strategic element in fostering harmonious relationships between PT KBI, the surrounding environment, local communities, and other stakeholders. CSR programs are designed not merely as acts of social concern, but as instruments to promote community independence and capacity building by leveraging local potential and resources, while also safeguarding environmental sustainability.

To ensure optimal impact, PT KBI integrates all CSR aspects in a cohesive manner by establishing measurable and relevant targets and managing programs with a strong focus on effectiveness. In designing its CSR programs, PT KBI takes into account key aspects such as customer needs, business strategy direction, operational and trading activities, risk management, human resource development, and contributions to community empowerment.

Prinsip Dasar Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Dalam pelaksanaan TJSL, PT KBI menekankan penguatan hubungan yang saling memberi manfaat dengan masyarakat, khususnya yang berada di sekitar wilayah operasional Perusahaan, serta menjalin kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Selain berpedoman pada ISO 26000, perumusan dan implementasi program TJSL BUMN juga didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental yang mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas Pasal 74;
3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah (PP) No.47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab dan Lingkungan;
5. Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN pasal 17;
6. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN pasal 94;
7. Keputusan Menteri nomor SK-277/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Piutang dan/atau Pembiayaan Syariah Bermasalah Pada Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil di BUMN; dan
8. Surat Keputusan Direksi PT KBI No. 38/K-KB/LGL/XI/2023 tentang Pembentukan Tim Unit TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) pada PT KBI.

Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

TJSL mencakup pemenuhan kewajiban Perusahaan sekaligus inisiatif yang melampaui standar tanggung jawab minimum, sejalan dengan tujuan utama penerapan TJSL secara berkesinambungan, yang antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan, maupun pembangunan hukum dan tata kelola bagi Perusahaan;
2. Berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi Perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel; dan
3. Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri, serta bagi masyarakat di sekitar Perusahaan.

Fundamental Principles for the Implementation of Corporate Social Responsibility

In implementing CSR, PT KBI emphasizes the strengthening of mutually beneficial relationships with communities, particularly those located around the Company's operational areas, and fosters collaboration with various stakeholders, including government institutions, non-governmental organizations, and other relevant parties. In addition to referring to ISO 26000, the formulation and implementation of CSR programs at state-owned enterprises refer to fundamental principles stipulated under the following regulations:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 1999 on Consumer Protection;
2. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, Article 74;
3. Law No. 6 of 2023 on Enactment of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law;
4. Government Regulation No. 47 of 2012 on Corporate Social and Environmental Responsibility;
5. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-1/MBU/03/2023 on Special Assignments and Corporate Social and Environmental Responsibility Programs of SOEs, Article 17;
6. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs, Article 94;
7. Decree of the Minister No. SK-277/2023 on Guidelines for the Settlement of Non-Performing Receivables and/or Sharia Financing under the Micro and Small Business Funding Program at SOEs; and
8. Decree of PT KBI's Board of Directors No. 38/K-KB/LGL/XI/2023 on Establishment of Corporate Social and Environmental Responsibility (CSR) Unit Team at PT KBI.

Scope of Corporate Social and Environmental Responsibility

CSR encompasses the fulfillment of the Company's obligations as well as initiatives that go beyond minimum responsibility standards, in line with the overarching objective of sustainable CSR implementation, which includes the following:

1. Delivering benefits to economic, social, environmental, legal, and governance development for the Company;
2. Contributing to value creation for the Company through integrated, well-directed, measurable, and accountable principles; and
3. Fostering the resilience and independence of micro and small enterprises, as well as communities surrounding the Company's operations.





PT KBI juga memastikan komitmennya dalam menjalankan TJSL senantiasa berpedoman kepada ISO 26000, yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial;
2. Hak Asasi Manusia;
3. Ketenagakerjaan;
4. Lingkungan Hidup;
5. Operasi yang Adil;
6. Pemenuhan Kepentingan Pelanggan; dan
7. Kemasyarakatan.

PT KBI also ensures that its commitment to CSR implementation consistently refers to ISO 26000, which covers the following core subjects:

1. Social Responsibility Governance;
2. Human Rights;
3. Employment;
4. Environmental Protection;
5. Fair Operating Practices;
6. Consumer Interests; and
7. Community Engagement.

Respect for the Human Rights

Transparency

Ethics

Responsibility

Respect for International Standards

Respect for the State

Respect for Stakeholders

Strategi dan Program Kerja terkait Isu sosial, Ekonomi dan Lingkungan

Selama periode pelaporan 2025, PT KBI melaksanakan rangkaian kegiatan TJSL yang disusun berdasarkan RKA TJSL Tahun 2025 dengan menetapkan tiga fokus utama, yaitu penguatan sosial, peningkatan ekonomi, dan pelestarian lingkungan. Di luar program mandiri, Perusahaan juga berpartisipasi aktif dalam inisiatif TJSL bersama BUMN lain melalui program SEMAR BUMN Holding Danareksa. Seluruh pelaksanaan TJSL PT KBI tahun 2025 dirancang agar selaras dengan pilar TJSL serta dikaitkan langsung dengan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya pada aspek *Community Involvement and Development* (CID), sebagaimana diuraikan pada bagian berikut:

1. Pilar Sosial

Pada pilar sosial, TJSL PT KBI sepanjang tahun 2025 berfokus pada program:

- a. Program beasiswa untuk mahasiswa/i berprestasi diberikan kepada mahasiswa/i Universitas Jakarta (UNIJ);
- b. Program beasiswa bersama "Danareksa Bestari" 2025 kolaborasi bersama Holding Danareksa;
- c. Kegiatan Kontribusi Alumni Paskibra SMAN 3 Bekasi;
- d. Kegiatan acara literasi untuk siswa/i ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) SLBN 02 Jakarta;
- e. Kegiatan Festival Edukasi SD Unggulan Al-Amin Kab. Bandung Barat;

Strategies and Work Programs Related to Social, Economic, and Environmental Issues

Throughout the 2025 reporting period, PT KBI implemented a series of Corporate Social Responsibility (CSR) activities prepared under the 2025 CSR Work Plan and Budget (RKA TJSL), with three main areas of focus, namely social empowerment, economic enhancement, and environmental preservation. In addition to its independently managed programs, the Company also actively participated in joint CSR initiatives with other state-owned enterprises through the SEMAR Program of the Danareksa Holding. All CSR activities carried out by PT KBI in 2025 were designed to align with the CSR pillars and were directly linked to the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly under the Community Involvement and Development (CID) aspect, as elaborated below:

1. Social Pillar

Under the social pillar, PT KBI's CSR initiatives throughout 2025 focused on the following programs:

- a. Scholarship programs for outstanding students at Universitas Jakarta (UNIJ);
- b. The 2025 "Danareksa Bestari" joint scholarship program in collaboration with Danareksa Holding;
- c. Contribution activities activities for the Alumni of Paskibra SMAN 3 Bekasi;
- d. Literacy programs for students with special needs at SLBN 02 Jakarta;
- e. Educational Festival activities at SD Unggulan Al-Amin, West Bandung Regency;

- f. Kegiatan Kontribusi Festival Media Creative Institut Kesehatan dan Rajawali Media Creative Bandung;
- g. Kegiatan Kolaborasi "Danareksa Bestari" bersama Holding Danareksa- Revitalisasi Sekolah;
- h. Program Ramadan Kolaborasi dengan Holding Danareksa Tahun 2025 berbagi 1000 Al-Qur'an;
- i. Program Mudik Aman Sampai Tujuan BUMN 2025 dengan 100 pemudik (2 bus) yang berlokasi di Jakarta Pusat;
- j. Program Ramadan bersama PT KBI - Pembagian paket sembako kepada 100 anak yatim di Yayasan As-Shofiani Ahmadi Babelan Bekasi;
- k. Pemberian bantuan ramadan di Yayasan Alunjiva Indonesia (Priok, Jakarta Utara) yang berkolaborasi dengan Holding Danareksa;
- l. Kegiatan bersama Serikat Pekerja PT KBI, Bantuan paket ramadan dan santunan yatim piatu Yayasan Al-Kahfi di Duren Sawit, Jakarta Timur dan Yayasan Yatim Piatu Rasulullah SAW, Jakarta Pusat;
- m. Kegiatan Iduladha (Kurban) Tahun 1446 Hijriyah/2025 Masehi di lingkungan Kementerian Perdagangan dan kolaborasi dengan Holding Danareksa yang berlokasi di Jakarta Pusat dan Makassar;
- n. Kegiatan Program Donor Darah dilingkungan Holding BUMN Danareksa;
- o. Kegiatan keagamaan dalam memperingati Maulid Nabi SAW di Majelis Nurul Islam, Bekasi;
- p. Memperingati Hari Disabilitas Internasional Tahun 2025 - Partisipasi Program Bhakti Sosial Pemberian Alat Bantu Gerak bagi anggota Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia (PPDFI) pusat, Cijantung, Jakarta Timur;
- q. Program Bantuan Bakti Sosial pengobatan gratis lansia Kegiatan Kesehatan Masyarakat di lingkungan RW 07 Kampung Baru, Kayuputih - Jakarta Timur (TJSL).

2. Pilar Ekonomi

Pada pilar ekonomi, pelaksanaan TJSL meliputi:

- a. Program Kemandirian Pangan Batch III 2025 yang dilaksanakan di Kabupaten Sukoharjo dan Klaten melibatkan 73 petani dengan luas lahan 10 ha (Program Rolling Fund Kedelai);
- b. Program Sarana dan Prasarana Petani Rumput Laut (Mesin Perahu) di Pantai Lontar, Serang;

- f. Contribution activities of the Media Creative Festival at the Health Institute and Rajawali Media Creative Bandung;
- g. "Danareksa Bestari" collaboration with Danareksa Holding for school revitalization;
- h. The 2025 Ramadan collaboration program with Danareksa Holding, including the distribution of 1,000 copies of the Holy Qur'an;
- i. The 2025 SOE "Safe Homecoming Program" (Mudik Aman Sampai Tujuan) for 100 participants (two buses) departing from Central Jakarta;
- j. PT KBI Ramadan program involving the distribution of basic food packages to 100 orphans at the As-Shofiani Ahmadi Foundation, Babelan, Bekasi;
- k. Ramadan assistance provided to the Alunjiva Indonesia Foundation (Priok, North Jakarta) in collaboration with Danareksa Holding;
- l. Joint activities with the PT KBI Labor Union, including Ramadan aid packages and donations for orphans at the Al-Kahfi Foundation, Duren Sawit, East Jakarta, and the Rasulullah SAW Orphanage Foundation, Central Jakarta;
- m. Eid al-Adha (Qurban) activities for the year 1446 Hijri / 2025 CE in the Ministry of Trade area and in collaboration with Danareksa Holding in Central Jakarta and Makassar;
- n. Blood donation programs within the Danareksa SOE Holding environment;
- o. Religious activities commemorating the Prophet Muhammad's Birthday (Maulid Nabi SAW) at Majelis Nurul Islam, Bekasi;
- p. Commemoration of International Day of Persons with Disabilities 2025 by participating in a social service program providing mobility aids to members of the Indonesian Physical Disability Association (PPDFI) Central Chapter, Cijantung, East Jakarta;
- q. Social service assistance programs, including free medical treatment for the elderly as part of community health activities in RW 07 Kampung Baru, Kayuputih, East Jakarta (CSR).

2. Economic Pillar

Under the economic pillar, CSR implementation included the following initiatives:

- a. The 2025 Food Self-Sufficiency Program Batch III, implemented in Sukoharjo and Klaten Regencies, involving 73 farmers across 10 hectares of land (Soybean Rolling Fund Program);
- b. Provision of facilities and infrastructure for seaweed farmers, including boat engines, at Lontar Beach, Serang;





- c. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatkan produksi kopi, kegiatan Reforestasi Tanaman Komoditi Kopi Kab. Garut *Batch* I dan II dalam periode 1 tahun; dan
- d. Bantuan kerja sama kemitraan domba dan pertanian hortikultura Kelompok Tani Sedyo Manunggal 1 Bantul, Jawa Tengah.

3. Pilar Lingkungan

Sementara pada pilar ekonomi di tahun 2025, PT KBI menyelenggarakan program-program berikut:

- a. Program Penyediaan Sarana Air Bersih serta kebutuhan masyarakat lainnya di SMA Negeri 1 Warungkiara, Kabupaten Sukabumi;
- b. Bantuan Kemanusiaan Partisipasi Penggalangan Dana Kemanusiaan Dukungan Akses Air Bersih untuk korban bencana alam banjir di Aceh Tamiang berkolaborasi dengan Industri Perdagangan Berjangka Komoditi, PT Bursa Berjangka Jakarta;
- c. Bantuan 5 ton beras dan sembako untuk korban banjir Sumatra berkolaborasi dengan Holding BUMN Danareksa;
- d. Bantuan Kemanusiaan Kebutuhan mendesak bayi/balita korban terdampak banjir Bali; dan
- e. Program SEMAR Lingkungan Tanam Pohon berkolaborasi dengan Holding Danareksa yang diadakan di BUMN Kawasan Industri, Jakarta Timur.

Sedangkan untuk program Non-CID terutama pilar Hukum dan Tata Kelola pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Pengawasan ISO 9001:2015;
- b. Pelaksanaan Pengawasan ISO 27001:2022; dan
- c. Pelaksanaan Penilaian dan pengesahan ISO 9001:2015.

Anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Total dana yang dikeluarkan Perusahaan untuk pelaksanaan program TJSL PT KBI sepanjang tahun 2025 tercatat sebesar Rp890.738.979. Alokasi penggunaan anggaran tersebut dirinci ke dalam program-program TJSL sebagai berikut:

- c. Community empowerment programs to increase coffee production through coffee commodity reforestation activities in Garut Regency, Batch I and II, conducted over a one-year period; and
- d. Partnership assistance programs for sheep farming and horticultural agriculture with the Sedyo Manunggal 1 Farmer Group, Bantul, Central Java.

3. Environmental Pillar

Meanwhile, under the environmental pillar in 2025, PT KBI carried out the following programs:

- a. Provision of clean water facilities and other community necessities at SMA Negeri 1 Warungkiara, Sukabumi Regency;
- b. Humanitarian assistance through fundraising participation to support clean water access for flood disaster victims in Aceh Tamiang, in collaboration with the Commodity Futures Trading Industry and PT Bursa Berjangka Jakarta;
- c. Distribution of 5 tons of rice and basic food supplies for flood victims in Sumatra in collaboration with Danareksa SOE Holding;
- d. Humanitarian assistance for urgent baby and toddler needs for flood-affected victims in Bali; and
- e. The SEMAR Environmental Program involving tree planting activities in collaboration with Danareksa Holding, conducted in the SOE Industrial Estate area, East Jakarta.

Non-CID programs, particularly under the Legal and Governance pillar, were implemented as follows:

- a. ISO 9001:2015 Surveillance Audits;
- b. ISO 27001:2022 Surveillance Audits; and
- c. ISO 9001:2015 Assessment and Certification.

Corporate Social Responsibility Budget

The total funds allocated by the Company for the implementation of PT KBI's CSR programs throughout 2025 amounted to IDR890,738,979. The allocation of this budget was distributed across CSR programs as follows:

No.	TPB / SDGs SDGs	RKA Tahun 2025 (Rp) 2025 RKA (IDR)	Realisasi Tahun 2025 (Rp) Realization in 2025 (IDR)	% RKA terhadap Prognosa 2025 RKA to the 2025 Projection
A	Pilar Sosial Social Pillar	410.000.000	347.142.529	84,67%
B	Pilar Ekonomi Economic Pillar	360.000.000	259.645.083	72,12%
C	Pilar Lingkungan Environmental Pillar	180.000.000	140.951.367	78,31%
Total CID		950.000.000	747.738.979	78,71%
D	Pilar Hukum dan Tata Kelola Legal and Governance Pillar	350.000.000	143.000.000	41%
Total Non CID		350.000.000	143.000.000	41%
Total CID dan Non CID Total CID and Non-CID		1.300.000.000	890.738.979	68,52%





Pelaksanaan Program Prioritas TJSL

Hingga akhir periode pelaporan per 31 Desember 2025, nilai pelaksanaan program prioritas TJSL PT KBI tercatat mencapai Rp747.738.979 atau 78,71% dari RKA 2025 yaitu Rp950.000.000.

Implementation of Priority CSR Programs

As of the end of the reporting period on December 31, 2025, the realization of PT KBI's priority CSR programs amounted to IDR747,738,979, representing 78.71% of the 2025 RKA allocation of IDR950,000,000.

PROGRAM UNGGULAN Priority Programs

Fokus Prioritas Pendidikan

Priority Focus on Education

No.	Program Pilar (TPB) Pillar Program (SDGs)	RKA 2025 2025 RKA	Realisasi RKA 2025 2025 RKA Realization	% Realisasi terhadap RKA RKA Realization
1	Pendidikan Berkualitas Quality Education	Rp30.000.000	Rp20.795.455	69,3%
	1. Pelatihan, literasi, dan edukasi bidang komoditas unggulan daerah (Resi Gudang dan Pasar Lelang Fisik), lingkungan, kesehatan dan bidang umum lainnya; Training, literacy programs, and education in priority regional commodities (Warehouse Receipt System and Physical Market Commodity), as well as in environmental, health, and other general fields;			
	2. Pemberian Fasilitas dan Sarana penunjang pendidikan untuk sekolah umum atau sekolah berkebutuhan khusus; Educational facilities and supporting infrastructure for public schools and schools for children with special needs;	Rp40.000.000	Rp16.000.000	40%
	3. Beasiswa atau bantuan peningkatan kualitas pendidikan lainnya; dan Scholarships and other forms of assistance aimed at improving the quality of education; and	Rp40.000.000	Rp18.352.000	45,9%
	4. Program kolaborasi BUMN dukungan peningkatan sarana prasarana pendidikan (SEMAR Edukasi-Sekolah Hijau Danareksa) melalui renovasi sekolah konsep <i>green building</i> . Collaborative SOE programs supporting the enhancement of educational facilities and infrastructure (SEMAR Education - Danareksa Green Schools) through school renovations based on green building concepts.	Rp95.000.000	Rp95.000.000	100%
Total Fokus Prioritas Pendidikan Total Priority Focus on Education		Rp205.000.000	Rp150.147.455	73,2%



Fokus Prioritas Sosial

Priority Focus on Social

No.	Program Pilar (TPB) Pillar Program (SDGs)	RKA 2025 2025 RKA	Realisasi RKA 2025 2025 RKA Realization	% Realisasi terhadap RKA RKA Realization Percentage
1.	Kehidupan Sehat dan Sejahtera Good Health and Well-Being	Rp40.000.000	Rp35.951.824	89,9%
	a. Peningkatan penganekaragaman, keamanan, gizi dan kualitas pangan (produk olahan dan pangan unggulan lokal); dan Bantuan sarana kesehatan yang berkualitas untuk kesejahteraan Enhancement of food diversification, safety, nutritional value, and quality, including processed products and local flagship food commodities, as well as providing quality healthcare facilities to support community well-being			
	b. Program dukungan lingkungan kemasyarakatan untuk menunjang Jaminan kecelakaan kerja Community-based environmental support programs to strengthen occupational accident insurance coverage	Rp30.000.000	Rp26.043.250	86,8%
2.	Program dukungan lingkungan kemasyarakatan dan keagamaan untuk menunjang kegiatan kesejahteraan Community and Religious Environment Support Programs to Promote Social Welfare	Rp135.000.000	Rp135.000.000	100%
Total Fokus Prioritas Sosial Total Priority Focus on Social		Rp205.000.000	Rp196.995.074	96,1%

Fokus Prioritas Lingkungan

Priority Focus on Environment

No.	Program Pilar (TPB) Pillar Program (SDGs)	RKA 2025 2025 RKA	Realisasi RKA 2025 2025 RKA Realization	% Realisasi terhadap RKA RKA Realization Percentage
1.	Akses Air Bersih dan Sanitasi Layak: Peningkatan sanitasi dan kebersihan air serta kebutuhan masyarakat lainnya. Access to Clean Water and Proper Sanitation: Improving sanitation and water quality, as well as the fulfilling other essential community needs.	Rp45.000.000	Rp.45.000.000	100%
2.	Penanganan Perubahan Iklim:	Rp95.000.000	Rp55.951.367	58,9%
	1. Penanganan lingkungan dari pencemaran melalui program kolaborasi BUMN (SEMAR Lingkungan-Holding Danareksa Olah Sampah) melalui pengolahan sampah (bank sampah di lingkungan kawasan industri); Environmental pollution management through collaborative SOE programs (SEMAR Environment – Danareksa Holding Waste Management), including waste processing initiatives such as waste banks in industrial areas;			
	2. Pemulihan lingkungan dan masyarakat dampak bencana alam dan musibah lainnya; dan Environmental and community recovery efforts in response to natural disasters and other emergencies; and			
	3. Penanganan lingkungan dan masyarakat dampak kerusakan fungsi dan kerusakan alam (penghijauan, irigasi, sumber daya alam dan penataan lainnya). Environmental and community interventions to address ecosystem degradation and environmental damage, including reforestation, irrigation improvements, natural resource management, and other restoration activities.	Rp40.000.000	Rp40.000.000	100%
Total Fokus Prioritas Lingkungan Total Priority Focus on Environment		Rp385.000.000	Rp337.946.441	87,8%



Fokus Prioritas Ekonomi

Priority Focus on Economy

No.	Program Pilar (TPB) Pillar Program (SDGs)	RKA 2025 2025 RKA	Realisasi RKA 2025 2025 RKA Realization	% Realisasi terhadap RKA RKA Realization Percentage
1.	Energi Bersih dan Terjangkau: Program penanganan pemulihan lingkungan melalui sumber energi terbarukan (biogas dan energi terbarukan lainnya). Affordable and Clean Energy: Environmental restoration programs through the utilization of renewable energy sources, including biogas and other renewable energy solutions.	-	-	-
2.	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi: 1. Program kolaborasi BUMN (SEMAR Ekonomi-Integrasi UMK Berdaya) melalui <i>e-catalog</i> dan <i>UMK Week</i> Collaborative SOE programs (SEMAR Economy - Empowered MSME Integration) implemented through e-catalog platforms and SME Week	Rp95.000.000	Rp49.625.083	52,2%
	2. Program <i>Integrated Farming System</i> (IFS): a. Pengelolaan dan pendampingan terintegrasi (komoditas pangan lokal dan industri) yang terpadu; b. Pengoptimalisasian sumber daya untuk peningkatan perekonomian masyarakat lokal; dan c. Menciptakan sistem tata niaga untuk pengembangan ekonomi. Integrated Farming System (IFS) programs, including: a. Integrated management and assistance for local food commodities and industrial activities; b. Optimization of resources to enhance the local community's economic capacity; and c. Development of structured trading and market systems to support sustainable economic growth.	Rp160.000.000	Rp136.510.000	85,3%
3.	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur Industry, Innovation, and Infrastructure	Rp105.000.000	Rp73.510.000	70%
Total Fokus Prioritas Ekonomi Total Priority Focus on Economy		Rp360.000.000	Rp259.645.083	72,1%



Catatan Kegiatan

Activity Notes

No.	Nama Kegiatan Activity	Waktu Pelaksanaan Date
1.	Program Mudik Aman Sampai Tujuan BUMN 2025 dengan 100 pemudik (2 bus) yang berlokasi di Jakarta Pusat The 2025 SOE "Safe Homecoming Program" (<i>Mudik Aman Sampai Tujuan</i>) for 100 participants (two buses) departing from Central Jakarta	Maret 2025 March 2025
2.	Program Ramadan bersama PT KBI - Pembagian paket sembako kepada 100 anak yatim di Yayasan As-Shofiani Ahmadi Babelan Bekasi PT KBI Ramadan program involving the distribution of basic food packages to 100 orphans at the As-Shofiani Ahmadi Foundation, Babelan, Bekasi	Maret 2025 March 2025
3.	Program Mudik Aman Sampai Tujuan BUMN 2025 dengan 100 pemudik (2 bus) yang berlokasi di Jakarta Pusat The 2025 SOE "Safe Homecoming Program" (<i>Mudik Aman Sampai Tujuan</i>) for 100 participants (two buses) departing from Central Jakarta	Maret 2025 March 2025
4.	Ramadan bersama Holding BUMN Danareksa Pembagian 1000 paket sembako kepada Yayasan Alunjiva - Jakarta Utara Ramadan Program in collaboration with Danareksa SOE Holding, involving the distribution of 1,000 basic food packages to the Alunjiva Foundation, North Jakarta.	April 2025 April 2025
5.	Reforestasi Tanaman Kopi di Garut Coffee Tree Reforestation in Garut	April 2025 April 2025
6.	Penandatanganan PKS dengan Unija untuk program beasiswa mahasiswa/i berprestasi. Signing of a Cooperation Agreement with Unija for an outstanding student scholarship program.	Mei 2025 May 2025
7.	Program Kemandirian Pangan Batch III 2025 yang dilaksanakan di Kabupaten Sukoharjo dan Klaten melibatkan 73 petani dengan luas lahan 10 ha (Program <i>Rolling Fund</i> Kedelai) The 2025 Food Self-Sufficiency Program Batch III, implemented in Sukoharjo and Klaten Regencies, involving 73 farmers across 10 hectares of land (Soybean Rolling Fund Program)	Juli 2025 July 2025
8.	Kegiatan bersama Serikat Pekerja PT KBI, Bantuan paket ramadan dan santunan yatim piatu Yayasan Al-Kahfi di Duren Sawit, Jakarta Timur dan Yayasan Yatim Piatu Rasulullah SAW, Jakarta Pusat Joint activities with the PT KBI Labor Union, including Ramadan aid packages and donations for orphans at the Al-Kahfi Foundation, Duren Sawit, East Jakarta, and the Rasulullah SAW Orphanage Foundation, Central Jakarta	Juli 2025 July 2025
9.	Program Penyediaan Sarana Air Bersih serta kebutuhan masyarakat lainnya di SMA Negeri 1 Warungkiara, Kabupaten Sukabumi Provision of clean water facilities and other community necessities at SMA Negeri 1 Warungkiara, Sukabumi Regency	Juli 2025 July 2025
10.	Kegiatan keagamaan dalam memperingati Maulid Nabi SAW di Majelis Nurul Islam, Bekasi Religious activities commemorating the Prophet Muhammad's Birthday (Maulid Nabi SAW) at Majelis Nurul Islam, Bekasi	September 2025 September 2025
11.	Bantuan Kemanusiaan Kebutuhan mendesak bayi/balita korban terdampak banjir Bali Humanitarian assistance for urgent baby and toddler needs for flood-affected victims in Bali	September 2025 September 2025
12.	Memperingati Hari Disabilitas Internasional Tahun 2025 - Partisipasi Program Bhakti Sosial Pemberian Alat Bantu Gerak bagi anggota Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia (PPDFI) pusat, cijantung, jakarta timur Commemoration of International Day of Persons with Disabilities 2025 by participating in a social service program providing mobility aids to members of the Indonesian Physical Disability Association (PPDFI) Central Chapter, Cijantung, East Jakarta	November 2025 November 2025
13.	Program Bantuan Baksos pengobatan gratis lansia Kegiatan Kesehatan Masyarakat di lingkungan RW 07 Kampung Baru, Kayuputih - Jakarta Timur (TJSL) Social Assistance Program - Free Medical Services for the Elderly, as part of a community health initiative in RW 07, Kampung Baru, Kayuputih, East Jakarta (CSR)	November 2025 November 2025
14.	Program Sarana dan Prasarana Petani Rumput Laut (Mesin Perahu) di Pantai Lontar, Serang Provision of facilities and infrastructure for seaweed farmers, including boat engines, at Lontar Beach, Serang	November 2025 November 2025
15.	Program pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatkan produksi kopi, kegiatan Reforestasi Tanaman Komoditi Kopi Kab. Garut <i>Batch</i> I dan II dalam periode 1 tahun Community empowerment programs to increase coffee production through coffee commodity reforestation activities in Garut Regency, Batch I and II, conducted over a one-year period	April dan November 2025 April and November 2025
16.	Bantuan kerja sama kemitraan domba dan pertanian hortikultura Kelompok Tani Sedyo Manunggal 1 Bantul, Jawa Tengah Partnership assistance programs for sheep farming and horticultural agriculture with the Sedyo Manunggal 1 Farmer Group, Bantul, Central Java	November 2025 November 2025
17.	Bantuan Kemanusiaan Partisipasi Penggalangan Dana Kemanusiaan Dukungan Akses Air Bersih untuk korban bencana alam banjir di Aceh Tamiang berkolaborasi dengan Industri Perdagangan Berjangka Komoditi, PT Bursa Berjangka Jakarta Humanitarian assistance through fundraising participation to support clean water access for flood disaster victims in Aceh Tamiang, in collaboration with the Commodity Futures Trading Industry and PT Bursa Berjangka Jakarta	November 2025 November 2025
18.	Program SEMAR Lingkungan Tanam Pohon berkolaborasi dengan Holding Danareksa yang diadakan di BUMN Kawasan Industri, Jakarta Timur The SEMAR Environmental Program involving tree planting activities in collaboration with Danareksa Holding, conducted in the SOE Industrial Estate area, East Jakarta	November 2025 November 2025
19.	Bantuan 5 ton beras dan sembako untuk korban banjir Sumatra berkolaborasi dengan Holding BUMN Danareksa Distribution of 5 tons of rice and basic food supplies for flood victims in Sumatra in collaboration with Danareksa SOE Holding	Desember 2025 December 2025

08.

LAPORAN KEUANGAN

Financial Report



Laporan Auditor Independen PT Kliring Berjangka Indonesia Entitas Anak Laporan Keuangan Konsolidasian

Consolidated Financial Statements
and Subsidiary



2025

Tanggal 31 Desember dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
As of December 31 and for The Year Ended

Daftar Isi	Halaman/ <u>Page</u>	Table of Contents
Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun- tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024		<i>Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2025 and 2024</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	<i>Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	<i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4	<i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5	<i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>
Informasi Tambahan		<i>Supplementary Information</i>
Laporan Posisi Keuangan (Entitas Induk)	I	<i>Statements of Financial Position (Parent Entity)</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (Entitas Induk)	II	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (Parent Entity)</i>
Laporan Perubahan Ekuitas (Entitas Induk)	III	<i>Statements of Changes in Equity (Parent Entity)</i>
Laporan Arus Kas (Entitas Induk)	IV	<i>Statements of Cash Flows (Parent Entity)</i>
Pengungkapan Lainnya (Entitas Induk)	V	<i>Others Disclosures (Parent Entity)</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER RELATING TO
THE RESPONSIBILITY ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2025 AND 2024
PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

We the undersigned :

1. Nama/ <i>Name</i> Alamat Kantor/ <i>Office Address</i> Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/ <i>Domicile as stated in ID Card</i> Nomor Telepon/ <i>Phone Number</i> Jabatan/ <i>Position</i>	: Budi Susanto : Menara Danareksa Lt. 6 Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14 Jakarta Pusat 10110 : Jl. Bangka I C No. 9 A Mampang Prapatan Jakarta Selatan 12720 : 021-39833066 : Direktur Utama/ <i>President Director</i>

Menyatakan bahwa:

Stated that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Kliring Berjangka Indonesia;	1. <i>We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Kliring Berjangka Indonesia;</i>
2. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; dan a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar; b. Laporan keuangan konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material;	2. <i>The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standard in Indonesia;</i> a. <i>All information contained in the consolidated financial statements in complete and correct;</i> b. <i>The consolidated financial statements do not contain misleading material information or fact and do not omit material informations and fact;</i>
3. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan entitas anak.	3. <i>We are responsible for the Company's and subsidiaries' internal control system.</i>

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

The statement letter is made truthfully.

Atas nama Direksi/ *For and on behalf of Directors:*
Jakarta, 31 Maret 2026/ *March 31, 2026*

Direktur Utama/ *President Director*


Budi Susanto

**Laporan Auditor Independen/
Independent Auditor's Report**

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Shareholders, Board of Commissioners, and Directors

PT Kliring Berjangka Indonesia**Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Kliring Berjangka Indonesia dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup sesuai dengan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Kliring Berjangka Indonesia and its subsidiary ("Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at December 31, 2025 and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at December 31, 2025, and their consolidated financial performance and consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IAPI"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with Code of Ethics for Public Accountants established by IAPI, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal Lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan PT Kliring Berjangka Indonesia (Entitas Induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut

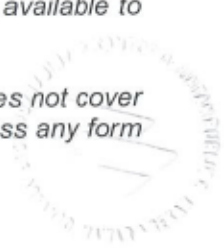
Other Matter

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of the Group as at December 31, 2025, and for the year then ended, were performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of PT Kliring Berjangka Indonesia (Parent Entity), which comprises the statement of financial position as at December 31, 2025, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by IAPI. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.



Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations or Standards on Auditing established by the IAPI.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.



Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, tetapi bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*



- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the Group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Dewi Novita Sari

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1154/
Public Accountant License Number: AP.1154

Jakarta, 31 Maret 2026/March 31, 2026



**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION**
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan Setara Kas	4	66,833,667,350	22,043,296,016	Cash and Cash Equivalents
Penempatan Dana				Placement of Clearing
Anggota Kliring	5	2,239,573,720,466	1,667,312,244,047	Member's Fund
Penempatan Dana				Placement of Commodity
Pasar Fisik Komoditas	6	58,654,373,241	121,783,906,226	Physical Market
Penempatan Transaksi				Placement of Transactions
Aset Digital	7	22,918,605,768	2,303,378,063	Digital Asset
Efek-Efek	8	20,000,000,000	46,365,886,698	Marketable Securities
Investasi Jangka Pendek	9	316,334,676,728	187,285,393,533	Short-term Investment
Piutang Penjaminan	11	207,396,256,319	255,631,229,230	Guarantee Receivables
Piutang Lain-lain	12	3,466,261,005	1,009,901,726	Other Receivables
Piutang Pihak Berelasi	35	124,996,392,547	174,975,888,368	Account Receivables Related Party
Persediaan Emas	13	—	712,707,181	Gold Inventories
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	14	12,056,517,274	18,816,335,721	Accrued Revenues
Biaya Dibayar Dimuka	15	2,848,324,755	1,221,439,328	Prepaid Expenses
Pajak Dibayar Dimuka	16.a	388,009,491	556,270,070	Prepaid Taxes
JUMLAH ASET LANCAR		3,075,466,804,945	2,500,017,876,207	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Aset Tetap - Bersih	17	17,889,968,008	22,839,054,047	Fixed Assets - Net
Aset Takberwujud - Bersih	18	5,580,173,741	2,332,110,597	Intangible Assets - Net
Aset Pajak Tangguhan	16.d	12,276,932,034	3,826,550,536	Deferred Tax Assets
Uang Jaminan	19	76,091,898	76,091,898	Security Deposits
Investasi Saham	21	3,500,000,000	3,500,000,000	Investment in Shares
Aset Hak Guna - Bersih	22.a	3,743,430,487	10,504,593,319	Right-of-Use-Assets - Net
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		43,066,596,168	43,078,400,397	TOTAL NON-CURRENT ASSETS
JUMLAH ASET		3,118,533,401,113	2,543,096,276,604	TOTAL ASSETS

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (Continued)
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Liabilitas Jangka Pendek Tidak Berbunga				Non-Interest Bearing Current Liabilities
Saldo Dana Anggota Kliring	5	2,239,573,720,466	1,667,312,244,047	Clearing's Member Fund Balance
Saldo Dana Transaksi Pasar Fisik Komoditas	6	58,654,373,241	121,783,906,226	Physical Commodities Market Transaction Fund Balance
Saldo Dana Transaksi Aset Digital	7	22,918,605,768	2,303,378,063	Digital Asset Transaction Fund Balance
Beban Akrua	23	22,053,095,542	17,001,939,411	Accruals
Liabilitas Lain-lain	24	4,519,893,384	817,281,667	Other Liabilities
Utang Pajak	16.b	5,341,332,418	5,213,960,096	Taxes Payable
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Tidak Berbunga		2,353,061,020,820	1,814,432,709,510	Total Non-Interest Bearing Current Liabilities
Liabilitas Jangka Pendek Berbunga				Non-Interest Bearing Current Liabilities
Utang Bank	25	--	14,175,000,000	Bank Loan
Liabilitas Sewa	22.b	--	6,761,162,832	Lease Liabilities
Total Liabilitas Jangka Pendek Berbunga		--	20,936,162,832	Total Non-Interest Bearing Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas Jangka Panjang Tidak Berbunga				Non-Interest Bearing Non-Current Liabilities
Liabilitas Imbalan Kerja	26	9,627,897,650	6,455,078,501	Liabilities for Employee Benefits
Cadangan Penjaminan Kliring	27	8,621,218,452	7,964,768,622	Clearing Guarantee Reserves
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Tidak Berbunga		18,249,116,102	14,419,847,123	Total Non-Interest Bearing Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		2,371,310,136,922	1,849,788,719,465	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk				Equity Attributable to The Owner of the Parent Entity
Modal Saham				Share Capital
Nominal Rp1.000.000 per saham				Nominal Value Rp1,000,000 per share
Modal Dasar Pada 31 Desember 2025 dan 2024				Authorized Capital as of December 31, 2025
Sebesar 2.000.000				and 2024 amounting to 2,000,000
Modal Ditempatkan dan Disetor				Issued and Fully Paid
Pada 31 Desember 2025 dan 2024				As of December 31, 2025 and 2024
Sebesar 500.000	28.a	500,000,000,000	500,000,000,000	amounting to 500,000
Saldo Laba	28.b	246,974,717,152	191,200,462,491	Retained Earnings
Kerugian Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti		(1,397,094,481)	28,080,967	Loss on Remeasurement of Defined Benefit Plan
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		745,577,622,672	691,228,543,460	Total equity attributable to the owner of parent entity
Kepentingan Nonpengendali		1,645,641,519	2,079,013,679	Non-Controlling Interest
JUMLAH EKUITAS		747,223,264,191	693,307,557,139	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		3,118,533,401,113	2,543,096,276,604	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATION STATEMENTS
OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp	
PENDAPATAN OPERASIONAL				OPERATING REVENUES
Fee Kliring	29	26,250,062,741	21,239,730,398	Clearing Fee
Pasar Fisik Komoditas	29	21,353,298,832	16,685,099,799	Comodity Physical Market Revenue
Resi Gudang	29	31,119,991,334	35,920,953,990	Receipts of Warehouse
Iuran Anggota	29	8,318,596,499	8,604,600,500	Membership Fee
Pendapatan Dana Penyelesaian Transaksi	29	82,829,290,761	74,834,616,888	Settlement Fund Revenue
Pendapatan Aset Digital	29	5,428,484,617	2,548,347,861	Digital Asset Revenue
Pendapatan Kegiatan <i>Treasury</i>				Treasury Revenue
Bunga Dana Perusahaan	29	23,998,978,208	16,075,426,040	Interest from Corporate Fund
Pendapatan Reksadana	29	9,798,086,788	11,557,101,122	Mutual Fund Investment Revenue
Jumlah Pendapatan Operasional		209,096,789,780	187,465,876,598	Total Operating Revenue
BEBAN OPERASIONAL				OPERATING EXPENSES
Umum dan Administrasi	30.b	49,817,200,984	45,322,784,851	General and Administrative
Manajemen dan Pegawai	30.a	50,137,144,707	45,139,320,104	Management and Employee
Pembentukan Cadangan Dana Jaminan	30.c	656,449,830	532,371,172	Provision of Guarantee Reserves
Beban (Pemulihan) Penurunan Nilai	30.d	35,168,001,989	401,023,746	Impairment Expense (Recovery)
Jumlah Beban Operasional		135,778,797,510	91,395,499,873	Total Operating Expenses
LABA OPERASIONAL		73,317,992,270	96,070,376,726	OPERATING PROFIT
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL				NON-OPERATING REVENUE (EXPENSES)
Pendapatan Non Operasional	31.a	3,883,632,831	3,491,218,176	Non-Operating Revenue
Beban Non Operasional	31.b	(1,115,119,415)	(1,242,089,635)	Non-Operating Expenses
Jumlah Pendapatan Bukan Operasional		2,768,513,416	2,249,128,541	Total Non-Operating Revenue
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN				PROFIT BEFORE FINAL TAXES AND INCOME TAXES
BEBAN PAJAK FINAL		76,086,505,686	98,319,505,265	FINAL TAXES
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		21,164,315,566	17,790,884,873	PROFIT BEFORE INCOME TAXES
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		54,922,190,120	80,528,620,392	INCOME (EXPENSES) TAXES
Kini	16.c	(7,629,716,552)	(7,106,996,564)	Current
Tangguhan	16.d	8,048,408,934	434,575,850	Deferred
Jumlah		418,692,382	(6,672,420,715)	Total
LABA TAHUN BERJALAN		55,340,882,502	73,856,199,678	PROFIT FOR THE YEAR
Penghasilan Komprehensif Lainnya				Others Comprehensive Income
Keuntungan (Kerugian) Pengukuran				Gain (loss) on Remeasurement
Kembali Program Imbalan Pasti - Setelah Pajak	26	(1,827,148,011)	(593,918,638)	of Defined Benefit Plan - Net of Tax
Pajak Penghasilan Komprehensif	16.d	401,972,562	130,662,100	Comprehensive Income Tax
		(1,425,175,449)	(463,256,537)	
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		53,915,707,053	73,392,943,141	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				PROFIT FOR THE YEAR ATRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		55,774,254,662	73,718,052,394	The Owner of the Parent Entity
Kepentingan Nonpengendali		(433,372,160)	138,147,284	Non-Controlling Interest
Jumlah		55,340,882,502	73,856,199,678	Total
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		54,349,079,213	73,254,795,857	The Owner of the Parent Entity
Kepentingan Nonpengendali		(433,372,160)	138,147,284	Non-Controlling Interest
Jumlah		53,915,707,053	73,392,943,141	Total

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk/ Equity Attributable to the Owner of the Parent Entity									
Catatan/ Notes	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued And Fully Paid-Up Capital	Saldo Laba / Retained Earning		Keuntungan (Kerugian)		Jumlah/ Total	Kepentingan Non Pengendali/ Non-Controlling Interest	Jumlah Ekuitas/ Total equity	
		Ditentukan Penggunaanya/ Appropriated	Belum Ditetapkan Penggunaannya/ Unappropriated	Pengukuran kembali program imbalan pasti/ Gain (loss) from remeasurement of defined benefit plan					
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
SALDO 1 JANUARI 2024	500,000,000,000	84,770,404,360	60,577,788,409	491,337,505	645,839,530,273	1,940,866,395	647,780,396,667		BALANCE AS OF JANUARY 1, 2024
Pembentukan cadangan	--	15,229,595,640	(15,229,595,640)	--	--	--	--	--	Appropriation for reserves
Dividen	--	--	(27,865,782,669)	--	(27,865,782,669)	--	(27,865,782,669)	--	Dividends
Laba tahun berjalan	--	--	73,718,052,394	--	73,718,052,394	138,147,284	73,856,199,678		Profit for the year
Keuntungan (Kerugian) pengukuran kembali program	--	--	--	--	--	--	--	--	Gain (loss) on remeasurement of defined benefit plan - net of tax
imbalan pasti - setelah pajak	--	--	--	(463,256,537)	(463,256,537)	--	(463,256,537)		
SALDO 31 DESEMBER 2024	500,000,000,000	100,000,000,000	91,200,462,491	28,080,967	691,228,543,460	2,079,013,679	693,307,557,139		BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2024
Laba tahun berjalan	--	--	55,774,254,661	--	55,774,254,661	(433,372,160)	55,340,882,501		Profit for the year
Keuntungan (Kerugian) pengukuran kembali program	--	--	--	--	--	--	--	--	Gain (loss) on remeasurement of defined benefit plan - net of tax
imbalan pasti - setelah pajak	--	--	--	(1,425,175,449)	(1,425,175,449)	--	(1,425,175,449)		
SALDO 31 DESEMBER 2025	500,000,000,000	100,000,000,000	146,974,717,152	(1,397,094,481)	745,577,622,672	1,645,641,519	747,223,264,191		BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2025

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these
consolidated financial statements

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS**
For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp	
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI				OPERATING ACTIVITIES
Pendapatan Fee, Resi Gudang dan Pasar Lelang	29	65,300,312,812	54,857,064,764	Fee Income, Warehouse and Physical Auction Market
Pendapatan Uang Iuran Anggota	29	8,318,596,499	8,604,600,500	Membership Revenues
Pendapatan Bunga	29	84,234,582,581	89,752,915,689	Interest Income
Pendapatan Lainnya	29	27,056,996,890	11,992,153,375	Other Revenues
Beban Administrasi dan Umum	30	(30,229,101,464)	(25,678,794,417)	General and Administrative Expenses
Beban Kepegawaian	30	(44,073,002,161)	(39,340,836,291)	Employee's Expenses
Beban Lainnya	30	(1,561,801,433)	(1,242,089,635)	Other Expenses
Pajak Penghasilan		(428,207,559)	(8,439,192,038)	Income Tax
Pembayaran Piutang Lainnya - Bersih		(1,804,194,772)	(159,000,581)	Payment for Other Receivables
Penerimaan Utang Jangka Pendek Lainnya - Bersih		3,668,148,625	205,432,426	Receipt of Other Short Term Liabilities - Net
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		110,482,330,019	90,552,253,792	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS INVESTASI				INVESTING ACTIVITIES
Pengurangan Investasi Jangka Pendek	9	(129,049,283,195)	(68,500,000,000)	Disposal Sale of Short-Term Investment
Pemberian Piutang Lainnya Pihak Berelasi	35	--	(50,000,000,000)	Payment of Other Receivables Related Party
Penerimaan Piutang Lainnya Pihak Berelasi	35	50,000,000,000	--	Receipt of Other Receivables Related Party
Pembiayaan dari Piutang Penjaminan	11	--	(84,396,441,423)	Financing of Guarantee Receivables
Penerimaan Piutang Penjaminan		13,408,612,476	--	Receipt of Guarantee Receivables
Pencairan Efek - Efek		27,000,000,000	38,300,000,000	Proceeds from sale of securities
Penjualan Aset Tetap	17	160,787,028	109,338,351	Sale of Fixed Assets
Penambahan Aset Tetap	17	(1,242,722,292)	(7,676,929,839)	Additional of Fixed Assets
Penambahan Aset TakBerwujud	18	(4,472,724,489)	(216,326,531)	Additional of Intangible Assets
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(44,195,330,473)	(172,380,359,442)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS PENDANAAN				FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran Liabilitas Sewa	22.b	(7,305,436,440)	(7,305,436,440)	Lease Liabilities Payment
Pembayaran Dividen	28.b	--	(27,865,782,669)	Dividend Payment
Penerimaan Pinjaman Bank	25	--	14,175,000,000	Bank Loan Received
Pembayaran Pinjaman Bank	25	(14,175,000,000)	--	Bank Loan Payment
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan		(21,480,436,440)	(20,996,219,109)	Net Cash Used in Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS				NET INCREASE (DECREASE) OF CASH AND CASH EQUIVALENTS
		44,806,563,106	(102,824,324,760)	
Dampak Selisih Kurs atas Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun		44,978	50,782	Effect of Foreign Exchange on Cash and Cash Equivalent at end of the Year
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN				CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
		22,043,296,016	124,869,807,188	
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN				CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR
	4	66,849,904,101	22,045,533,209	
Rekonsiliasi Jumlah Kas dan Setara Kas				Reconciliation of Total Cash and Cash Equivalents
Jumlah yang dilaporkan pada laporan arus kas		66,849,904,101	22,045,533,209	Amount as reported in statement of cash flow
Cadangan penyisihan kerugian penurunan nilai kas dan setara kas		(16,236,750)	(2,237,193)	Allowance for Impairment Losses of cash and cash equivalent
Jumlah yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan		66,833,667,350	22,043,296,016	Amount as reported in statement of financial position

Informasi tambahan terkait arus kas disajikan pada Catatan 36

Additional Information Related to Cash Flows are presented in Note 36

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum

1.a. Pendirian dan Informasi Lainnya

PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) ("Perusahaan") semula bernama PT (Persero) Kliring dan Jaminan Bursa Komoditi yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 80 tahun 1982 tentang Pendirian dan Pokok-pokok Organisasi Bursa Komoditi dan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1984 tentang Pendirian Persero di Bidang Kliring dan Jaminan Bursa Komoditi. Pendirian tersebut telah dibuatkan Akta Notaris Imas Fatimah, SH No. 185 tanggal 25 Agustus 1984 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman melalui Surat Keputusan No. C2- 6612-HT 0101 tahun 1985 tanggal 15 Oktober 1985. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan Akta Notaris No. 32 tanggal 19 Oktober 2020 dibuat oleh Hadijah, S.H. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09.0026421 tanggal 27 Juni 2022 tentang Persetujuan Atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan berjangka dan/atau perdagangan komoditi (fisik) dan/atau perdagangan derivatif lainnya, serta pengembangannya untuk mendukung terciptanya transaksi kontrak berjangka dan/atau komoditi dan/atau derivatif lainnya secara teratur, wajar, efisien dan efektif.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kliring dan penjaminan serta pengembangan perdagangan berjangka, perdagangan komoditi (fisik) dan perdagangan derivatif.

1.b. Maksud dan Tujuan

- Menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Perdagangan Berjangka;

1. General

1.a. Establishment and Other Information

PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) (the "Company"), previously called Clearing House and Commodity Exchange Guarantee, was established under the Decree of the President of the Republic of Indonesia No. 80 of 1982 regarding the Establishment and Principles of Commodity Exchange Organization and Government Regulation No. 6 of 1984 regarding the Establishment of Limited Liability Company in Clearing and Commodity Exchange Guarantee. The Company was established under Notarial Deed No. 185 dated August 25, 1984 of Imas Fatimah SH, a public notary in Jakarta and authorized by the Minister of Justice under the Decree No. C2- 6612-HT 0101 of 1985 dated October 15, 1985. The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed No 32 dated October 19, 2020 made Notary Hadijah, S.H. This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-AH.01.09.0026421 dated June 27, 2022, regarding the Approval of Amendments to the Articles of Association of the Limited Liability Company.

The Company's purpose and objective is to engage and to support Government economic policy and development program, especially in clearing and settlement guarantee for futures trading transactions and or physical commodity trading and/or other derivatives trading, furthermore to support the development of all the trading to become proper, fair, efficient and effectively both in futures, physical commodity and derivatives exchange and other general clearing activities.

In achieving such purposes and objectives, the Company shall undertake the activities related to clearing, giving guarantee and futures trading development, physical commodity tradings and derivative tradings.

1.b. Purpose and Objective

- Organizing and providing systems and/or facilities for clearing and guarantee of the settlement of Futures Trading transactions;

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

- Menjalankan usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penyimpanan, Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Kliring Penyimpanan, Penjaminan dan Penyelesaian;
 - Melaksanakan layanan jasa penjaminan perdagangan komoditi namun, tidak terbatas pada faktor pendukungnya serta melaksanakan layanan jasa lainnya secara luas untuk mendukung usaha penjaminan dan layanan pada umumnya;
 - Melakukan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuhan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan dan/atau Pasar Derivatif lainnya;
 - Melaksanakan kegiatan penjaminan untuk usaha perdagangan komoditas dan kebutuhan pokok lainnya, namun tidak terbatas termasuk faktor pendukungnya serta melaksanakan layanan jasa lainnya secara luas untuk mendukung usaha penjaminan dan perdagangan serta layanan pada umumnya;
 - Melakukan pengembangan untuk mendukung peningkatan kegiatan Perusahaan dengan tidak terbatas pada pengembangan sistem informasi maupun sumber daya lainnya;
 - Mendirikan atau turut serta berinvestasi dalam badan-badan lain dalam bentuk penyertaan modal pada Perusahaan/perseroan-perseroan;
 - Menyediakan sistem kliring dan penjaminan penyelesaian atas transaksi yang terjadi di Bursa Berjangka dan/atau *Forward* dan/atau Pasar Derivatif, untuk menjamin penyelesaian keuangan yang berkaitan dengan kontrak berjangka dan/atau perdagangan komoditi (fisik) dan/atau perdagangan derivatif lainnya;
 - Melaksanakan kliring dan penjaminan penyelesaian atas semua transaksi yang terjadi di Bursa Berjangka dan/atau Bursa Komoditi dan/atau Pasar Komoditas *Spot* dan/atau perdagangan derivatif lainnya;
 - Menjalankan usaha lain yang berkaitan dengan pengembangan jasa kliring dan/atau penjaminan atas transaksi Perdagangan Berjangka, Pasar Fisik Komoditas, Resi Gudang, melaksanakan usaha penjaminan dan investasi kepada pihak lain serta perdagangan komoditi yaitu semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan
- *Conducting business as a Clearing and Custodian Institution, Clearing and Guarantee Institution, as well as Clearing, Custodian, Guarantee and Settlement Institution;*
 - *Carrying out commodity trading guarantee services, but not limited to its supporting factors, and carrying out other services extensively to support the guarantee business and services in general;*
 - *Administering Warehouse Receipts and Derivatives of Warehouse Receipts which covers recording, storage, transfer of ownership, encumber of security rights, reporting and/or other Derivative Markets;*
 - *Carrying out guarantee activities for the commodity trading business and other basic needs, but not limited to its supporting factors carrying out other services extensively to support the guarantee business and services in general;*
 - *Carrying out development to increase the Company's activities, not limited to the development of information systems and other resources;*
 - *Establishing or participating in investing in other bodies in the form of placement of capital in other Companies/ corporates;*
 - *Serving the clearing and settlement guarantee system for all of the transactions in Futures Exchange and/or-and/or Forward and/or Derivative Market, to guarantee financial settlement related to futures contracts and/or physical commodity trades and/or other derivative trading;*
 - *Implementing clearing and transactions settlement guarantee in the futures exchange and/or commodity exchange and/or spot or forward commodity market and/or other derivatives trading;*
 - *Carrying out other activities related to development of clearing and/or guarantee for transactions in Future Exchange, Physical Commodity Market, Warehouse Receipts, implementing guarantee and investment activities in other party, as well as commodity trades of goods, services, rights, and other interests, and any*

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

setiap derivatif dari Komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka. Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya termasuk faktor pendukungnya.

Berdasarkan Surat Kementerian Perdagangan Republik Indonesia No: 01/BAPPEBTI/SP-LKBAK/07/2023 tanggal 17 Juli 2023 menyatakan bahwa Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Perusahaan mendapat persetujuan sebagai Lembaga Kliring Berjangka Untuk Penjaminan dan Penyelesaian Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat beralamat di Menara Danareksa Lantai 6, Jl. Medan Merdeka No. 14 Gambir, Jakarta Pusat.

1.c. Organisasi

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris Independen
Komisaris Independen

Direksi

Direktur Utama
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Direktur Pengembangan Bisnis dan Operasional

Susunan Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2025 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK- 100/MBU/04/2024 : KPPS 7/DR/DIRUT/04/2024 tanggal 19 April 2024 yang didokumentasikan dalam Akta Notaris No. 43 dari Notaris Hadijah, S.H., di Jakarta. Perubahan pengurus telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Data perseroan No. AHU-AH.01.09-00167690 tanggal 29 April 2024.

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

derivatives of the Commodity that can be traded and are subject to a Futures Contract. Sharia Derivative Contract, and/or other Derivative Contracts including their supporting factors.

Based on the Letter from the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia, No: 01/BAPPEBTI/SP-LKBAK/07/2023 dated July 17, 2023, it is stated that the Commodity Futures Trading Supervisory Board, the Company has been approved as a Futures Clearing Institution for Guaranteeing and Settling the Trading of Crypto Asset Physical Market based on the Law Number 32 of 1997 concerning Commodity Futures Trading.

The company is domiciled in Jakarta, with its headquarters located at Menara Danareksa, 6th Floor, Jl. Medan Merdeka No. 14, Gambir, Central Jakarta.

1.c. Organization

The composition of the Company's Board of Commissioners and Directors as of December 31, 2025 and 2024 is as follows:

2025 dan/ and 2024

Hernawan Bakti Sasongko
Egy Massadiah
Irman Sahroni

Budi Susanto
Adiyasa Suhadibroto
Saidu Solihin

Board of Commissioners

President Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner

Directors

President Director
Finance and Risk Management Director
Business Development and Operational Director

Board of Commissioners as of December 31, 2025 was appointed pursuant to the Decrees of State Minister of State-Owned Enterprises Number: SK- 100/MBU/04/2024: KPPS 7/DR/DIRUT/04/2024 dated April 19, 2024 which was documented in Notarial Deed No. 43, of Hadijah, S.H., a Notary in Jakarta. The changes in the management have been approved and noted in the database of Corporation Administration System of Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia under the Letter of Approval for Changes in the company's data No. AHU AH.01.09-00167690 dated April 29, 2024.

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Susunan Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-54/MBU/03/2024 : KPPS-4/DR/DIRUT/03/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang didokumentasikan dalam Akta Notaris No. 29 dari Notaris Hadijah, S.H., di Jakarta. Perubahan pengurus telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Data perseroan No. AHU-AH.01.09-0110832 tanggal 20 Maret 2024.

Berdasarkan Akta Notaris No. 29 tanggal 18 Maret 2024 tentang perubahan nomenklatur jabatan dan pengalihan tugas anggota-anggota Direksi PT Kliring Berjangka Indonesia yang menunjuk Budi Susanto sebagai Direktur Utama, Adiyasa Suhadibroto sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, dan Saidu Solihin sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan Operasional PT Kliring Berjangka Indonesia terhitung sejak tanggal 4 Maret 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Danareksa (Persero) No. SK-54/MBU/03/2025 dan 4/DR/DIRUT/03/2024 dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Data perseroan No. AHU-AH.01.09-0110832 tanggal 20 Maret 2024.

Pegawai Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yakni 58 dan 45 orang (tidak diaudit).

1.d. Struktur Entitas Anak

Pada tanggal 24 Juli 2013, Perusahaan memiliki penyertaan saham pada entitas anak yaitu PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia ("KPBI") sebesar 98,08%. Entitas anak ini merupakan spin off salah satu aktivitas bisnis Perusahaan yaitu melakukan usaha di bidang kliring dan penjamin penyelesaian transaksi perdagangan berjangka dan/atau perdagangan derivatif lainnya.

Anggaran Dasar KPBI berubah sesuai Akta Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn., No. 66 tanggal 27 Desember 2018 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

Board of Commissioners as of December 31, 2025 and December 31, 2024 was appointed pursuant to the Decrees of State Minister of State-Owned Enterprises Number: SK-54/MBU/03/2024:KPPS-4/DR/DIRUT/03/2024 dated March 04, 2024 which was documented in Notarial Deed No. 29, of Hadijah, S.H., a Notary in Jakarta. The changes in the management have been approved and noted in the database of Corporation Administration System of Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia under the Letter of Approval for Changes in the company's data No. AHU-AH.01.09-0110832 dated March 20, 2024.

Based on Notarial Deed No. 29 dated March 18, 2024, regarding changes in job nomenclature and the reassignment of duties of the Board of Directors of PT Kliring Berjangka Indonesia, Budi Susanto was appointed as President Director, Adiyasa Suhadibroto as Director of Finance and Risk Management, and Saidu Solihin as Director of Business Development and Operations of PT Kliring Berjangka Indonesia, effective as of March 4, 2024 in accordance with the Decree of the Minister of BUMN and the President Director of PT Danareksa (Persero) No. SK-54/MBU/03/2025 and KPPS-4/DR/DIRUT/03/2024, and noted in the database of Corporation Administration System of Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia under the Letter of Approval for Changes in the company's data No. AHU-AH.01.09-0110832 dated 20 Maret 2024.

The Company's employees as of December 31, 2025 and 2024 are 58 and 45 person (unaudited).

1.d. Subsidiary's Structure

As of July 24, 2013, the Company's investment shares in subsidiary, namely PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia ("KPBI"), is amounting to 98.08%. This subsidiary is a result of spin off of one of the Company's business activities, which is conducting business in clearing and settlement guarantee of futures and/or other derivatives trading.

KPBI's Articles of Association were amended in accordance with Notarial Deed of M. Nova Faisal, S.H., M.Kn., No. 66 dated December 27, 2018 and was ratified under the Decree of

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0032885.AH.01.02 tanggal 28 Desember 2018 tentang Persetujuan Atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Anggaran Dasar telah mengalami beberapa perubahan. Perubahan terakhir sesuai dengan Akta Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn., No. 04 tanggal 9 April 2019 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0019456.AH.01.02 tanggal 9 April 2019.

Menjalankan usaha perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain dan segala jenis perdagangan lainnya.

Entitas Anak/ Subsidiary	Jenis Usaha/ Business Activities	Tahun Operasi Komersil/ Year of Commercial	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	31 Desember/ December 31, 2025		31 Desember/ December 31, 2024	
				Jumlah Aset/ Total Assets	Laba (Rugi) Bersih/ Net Profit (Loss)	Jumlah Aset/ Total Assets	Laba (Rugi) Bersih/ Net Profit (Loss)
			%	(Rp Juta)/ (Rp Million)	(Rp Juta)/ (Rp Million)	(Rp Juta)/ (Rp Million)	(Rp Juta)/ (Rp Million)
PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia	Sektor Keuangan Lainnya	2013	98.08%	221,929	(22,571)	281,928	7,195

Dalam laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan entitas anak secara Bersama-sama disebut sebagai "Grup".

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0032885.AH.01.02 dated December 28, 2018 regarding the Approval of Amendment to the Articles of Association of the Limited Liability Company. The latest amendment is in accordance with Notary Deed of M. Nova Faisal, S.H., M.Kn., No. 04 dated April 9, 2019 and certified under the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0019456.AH.01.02. dated April 9, 2019.

Conducting wholesale businesses on the basis of fees or contracts that trade goods domestically and abroad on behalf of other parties, and other types of trades.

In these consolidated financial statements, the Company and its subsidiary are collectively referred as "the Group".

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material

2.a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI).

2.b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya

2. Material Accounting Policies Information

2.a. Compliance with the Financial Accounting Standards (SAK)

The consolidated financial statements of the Group have been prepared and presented in accordance Indonesian Financial Accounting Standards (SAK), which comprise the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK), issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants (DSAK–IAI).

2.b. Basis of Measurement and Preparation of the Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been prepared and presented based on going concern assumption and accrual basis of accounting, except for the consolidated statements of cash flows. Basis of measurement in preparation of these

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam perolehan aset.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Grup. Setiap entitas di dalam Grup menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

2.c. Standar Akuntansi Baru dan Amendemen yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Berikut adalah standar baru dan amendemen dan penyesuaian atas standar akuntansi keuangan (SAK) yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, yaitu:

- PSAK 117: Kontrak Asuransi;
- Amendemen PSAK 117: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 117 dan PSAK 109 – Informasi Komparatif; dan
- Amendemen PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing tentang Kekurangan Ketertukaran.

Beberapa PSAK juga diamendemen yang merupakan amendemen konsekuensial karena berlakunya PSAK 117: Kontrak Asuransi, yaitu:

- PSAK 103: Kombinasi Bisnis;
- PSAK 105: Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan;
- PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan;
- PSAK 109: Instrumen Keuangan;
- PSAK 115: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan;
- PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan;
- PSAK 207: Laporan Arus Kas;
- PSAK 216: Aset Tetap;

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

consolidated financial statements is the historical costs concept, except for certain accounts which have been prepared on the basis of other measurements as described in their respective policies. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for assets.

The consolidated statements of cash flows are presented using the direct method by classifying cash flows into operating, investing, and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah, which is the functional currency of the Group. Each entity in the Group determines its own functional currency and items included in the financial statements of each entity are measured using that functional currency.

2.c. New Standards and Amendment of Financial Accounting Effective in the Current Year

The following are new standards and amendments of financial accounting standards (SAK) which effective for periods beginning on or after January 1, 2025, are as follows:

- *PSAK 117: Insurance Contract;*
- *Amendments PSAK 117: Insurance Contract regarding Initial Application of PSAK 117 and PSAK 109 Comparative Information; and*
- *Amendments PSAK 221: Foreign Exchange Rate regarding Lack of Exchangeability.*

Several PSAKs were also amended which were consequential amendments due to the enactment of PSAK 117: Insurance Contracts, as follows:

- *PSAK 103: Business Combinations;*
- *PSAK 105: Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations;*
- *PSAK 107: Financial Instruments: Disclosures;*
- *PSAK 109: Financial Instruments;*
- *PSAK 115: Income from Contracts with Customers;*
- *PSAK 201: Presentation of Financial Statements;*
- *PSAK 207: Statement of Cash Flows;*
- *PSAK 216: Fixed Assets;*

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

- PSAK 219: Imbalan Kerja;
- PSAK 228: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- PSAK 232: Instrumen Keuangan: Penyajian;
- PSAK 236: Penurunan Nilai Aset;
- PSAK 237: Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi;
- PSAK 238: Aset Takberwujud; dan
- PSAK 240: Properti Investasi.

Implementasi standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

2.d. Prinsip-prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Grup seperti disebutkan pada Catatan 1.d.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan, yakni Perusahaan terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas *investee*).

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Perusahaan memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Perusahaan mengendalikan entitas lain.

Laporan keuangan Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset, dan liabilitas dari Grup dan seluruh entitas anak yang, secara langsung dan tidak langsung, dikendalikan oleh Grup. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Perusahaan secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

Grup menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha dieliminasi secara penuh.

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

- PSAK 219: Employee Benefits;
- PSAK 228: Investment in Associated Entities and Joint Ventures;
- PSAK 232: Financial Instruments: Presentation;
- PSAK 236: Impairment of Assets;
- PSAK 237: Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets;
- PSAK 238: Intangible Assets; and
- PSAK 240: Investment Property.

The implementation of the above standards had no material effect on the amounts reported for the current year or prior financial year.

2.d. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements consist of the financial statements of the Group as described in Note 1.d.

A subsidiary is an entity controlled by the Company, ie the Company is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its current ability to direct the entity's relevant activities (power over the *investee*).

The existence and effect of substantive potential voting rights that the Company has the practical ability to exercise (ie substantive rights) are considered when assessing whether the Company controls another entity.

The Group's financial statements consist of the operating results, cash flows, assets, and liabilities of the Group and all of its directly and indirectly controlled subsidiaries. Subsidiaries are consolidated from the effective date of acquisition, which is the date on which the Company effectively obtains control of the acquired business, until that control ceases.

The Group prepares consolidated financial statements using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances. All intragroup transactions, balances, income, expenses and cash flows relating to transactions between entities of the group are eliminated in full.

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lainnya kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non-pengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan non-pengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas Grup yang ada.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan non-pengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah tercatat kepentingan non-pengendali yang disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

Jika Grup kehilangan pengendalian, maka Grup:

- a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan non-pengendali);
- c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
- e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak; dan

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

The Group attributed the profit and loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent and non-controlling interest even though this results in the non-controlling interests having a deficit balance. The Group presents non-controlling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the Group's equity there in.

Changes in the parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in loss of control are equity transactions (ie transactions with owners in their capacity as owners). When the proportion of equity held by non-controlling interest change, the Group adjusted the carrying amounts of the controlling interest and non-controlling interest to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognised directly in equity and attributed to the owners of the parent.

If the Group loses control, the Group:

- a) *Derecognise the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control is lost;*
- b) *Derecognise the carrying amount of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when control is lost (including any components of other comprehensive income attributable to them);*
- c) *Recognise the fair value of the consideration received, if any, from the transaction, event or circumstances that resulted in the loss of control;*
- d) *Recognise any investment retained in the former subsidiary at fair value at the date when control is lost;*
- e) *Reclassify to profit or loss, or transfer directly to retained earnings if required by other SAKs, the amount recognized in other comprehensive income in relation to the subsidiary; and*

- f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

- f) Recognise any resulting difference as a gain or loss attributable to the parent.

2.e. Transaksi dalam Mata Uang Asing

Grup menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang selain Rupiah dicatat dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, seluruh aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Laba atau rugi dari selisih kurs yang timbul dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui pada laporan laba rugi tahun berjalan.

Kurs yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 untuk menjabarkan mata uang asing adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp	
1 Dolar Amerika Serikat	16,782	16,157	1 United States Dollar

2.f. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari saldo kas dan bank, serta deposito berjangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya dan tidak dijaminakan juga tidak dibatasi penggunaannya.

2.e. Foreign Exchange Transaction

The Group maintain accounting records in Rupiah. Transactions in currencies other than Rupiah are recorded at the rates of exchange prevailing at the date of the transaction. At the reporting date, all monetary assets and liabilities in foreign currencies are translated into Rupiah at the middle exchange rates quoted by Bank Indonesia on those dates. Exchange gains or losses arising from translations of foreign currency monetary assets and liabilities are recognized in current year profit or loss.

Exchange rates used as of December 31, 2025 and 2024 to translate foreign currency are as follows:

2.f. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents consists of cash on hand and in banks and short term deposits with maturities of 3 (three) months or less since their placement and not pledged as collateral nor restricted.

2.g. Instrumen Keuangan

Aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

2.g. Financial Instruments

The Group's financial assets are classified into the following specified categories: financial assets at amortized costs, financial assets at fair value through other comprehensive income, and financial assets at fair value through profit or loss.

i. Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada Biaya Perolehan jika kondisi berikut terpenuhi:

- (1) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual saja; dan
- (2) persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas

i. Financial Assets Measured at Amortized Costs

Financial assets are measured at amortized costs if these conditions are met:

- (1) the objective of the Group's business model to hold the financial assets is only to collect contractual cash flows; and
- (2) the contractual cash flows of the financial asset give rise to payments on specified dates that are solely

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest* - SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan ini diukur pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan dikurangi dengan pembayaran pokok, kemudian dikurangi atau ditambah dengan jumlah amortisasi kumulatif atas perbedaan jumlah pengakuan awal dengan jumlah pada saat jatuh tempo, dan penurunan nilainya.

Pendapatan keuangan dihitung dengan metode menggunakan suku bunga efektif dan diakui di laba rugi. Perubahan pada nilai wajar diakui di laba rugi ketika aset dihentikan atau direklasifikasi.

Aset keuangan yang diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dapat dijual ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain ("FVTOCI")

- ii. Aset keuangan diukur pada FVTOCI jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
 - (1) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
 - (2) persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest* - SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, diakui pada laba rugi. Ketika aset keuangan tersebut dihentikan

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.

The financial asset is measured at the amount recognized at initial recognition minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization of any difference between that initial amount and the maturity amount, and any loss allowance.

Interest income is calculated using the effective interest method and is recognized in profit or loss. Changes in fair value are recognized in profit and loss when the asset is derecognized or reclassified.

Financial assets classified to amortized cost may be sold where there is an increase in credit risk. Disposals for other reasons are permitted but such sales should be insignificant in value or infrequent in nature.

Financial Assets Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income ("FVTOCI")

- ii. *The financial assets are measured at FVTOCI if these conditions are met:*
 - (1) the objective of the Group's business model to hold the financial assets is to collect contractual cash flows and to sell the assets; and*
 - (2) the contractual cash flows of the financial asset give rise to payments on specified dates that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.*

The financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized initially in other comprehensive income (OCI), except for impairment gains and losses, and a portion of foreign exchange gains and losses, are recognized in profit or loss. When the asset is derecognized

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

pengakuannya atau direklasifikasi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("FVTPL")

- iii. Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau untuk diukur FVTOCI.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

Aset keuangan berupa derivatif dan investasi pada instrumen ekuitas tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau kriteria untuk diukur pada FVTOCI, sehingga diukur pada FVTPL. Namun demikian, Grup dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas yang bukan untuk diperjualbelikan dalam waktu dekat (*held for trading*) untuk diukur pada FVTOCI. Penetapan ini menyebabkan semua keuntungan atau kerugian disajikan di penghasilan komprehensif lain, kecuali pendapatan dividen tetap diakui di laba rugi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke saldo laba tidak melalui laba rugi.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau,

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

or reclassified, changes in fair value previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity are reclassified from equity to profit and loss as a reclassification adjustment.

Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss ("FVTPL")

- iii. Financial assets measured at FVTPL are those which do not meet both for neither amortized costs nor FVTOCI.

After initial recognition, FVTPL financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized in profit or loss.

Financial assets in form of derivatives and investment in equity instrument are not eligible to meet both criteria for amortized costs or fair value through other comprehensive income FVTOCI. Hence, these are measured at fair value through profit or loss FVTPL. Nonetheless, the Group may irrevocably designated an investment in an equity instrument which is not held for trading in any time soon as FVTOCI. This designation result in gains and losses to be presented in other comprehensive income, except for dividend income on a qualifying investment which is recognized in profit or loss. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified to retained earnings, not to profit or loss.

Effective Interest Method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial instrument and of allocating interest income over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and other forms paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or, where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan.

Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari instrumen keuangan FVTPL.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Grup mengakui kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada FVTOCI.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Namun, jika risiko kredit instrumen keuangan tersebut tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka Grup mengakui sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

Grup menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

Grup menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pihak ketiga tidak mampu membayar kewajiban kreditnya kepada Grup secara penuh. Periode maksimum yang dipertimbangkan Ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak dimana Grup terekspos terhadap risiko kredit.

Penyisihan kerugian diakui sebagai pengurang jumlah tercatat aset keuangan. Sedangkan jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) diakui dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

Income is recognized on an effective interest basis for financial instruments.

The calculation includes all fees and points paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

Income is recognized on an effective interest basis for financial instruments other than those financial instruments at FVTPL.

Impairment of Financial Assets

The Group recognizes expected credit loss for its financial assets measured at amortized costs and financial assets measured at FVTOCI.

At the end of each reporting date, the Group calculates any impairment provision in financial instruments based on its lifetime expected credit loss, if the credit risk of the financial instruments has increased significantly since its initial recognition. However, if credit risk has not increased significantly since initial recognition, then 12 months expected credit loss is recognized.

The Group applied a simplified approach to measure such expected credit loss for trade receivables and contract assets without significant financing component.

The Group considers a financial asset to be in default when the counterparty is unlikely to pay its credit obligations to the Group in full. The maximum period considered when estimating expected credit loss is the maximum contractual period over which the Group is exposed to credit risk.

Impairment losses are recognized as a deduction from the carrying amount of financial assets. The expected credit loss (or recovery of credit loss) is recognized in profit or loss, as gains or losses of financial asset impairment.

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dilakukan dengan suatu cara yang mencerminkan:

jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi;

- i. nilai waktu uang; dan
- ii. informasi yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.
- iii. Aset keuangan dapat dianggap tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal jika aset keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Risiko kredit pada instrumen keuangan dianggap rendah Ketika aset keuangan tersebut memiliki risiko gagal bayar yang rendah, peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan memburuknya kondisi ekonomi dan bisnis dalam jangka waktu panjang mungkin, namun tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya. Untuk menentukan apakah aset keuangan memiliki risiko kredit rendah, Grup dapat menggunakan peringkat risiko kredit internal atau penilaian eksternal. Misal, aset keuangan dengan peringkat "investment grade" berdasarkan penilaian eksternal merupakan instrumen yang memiliki risiko kredit yang rendah, sehingga tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Grup mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Grup tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Grup mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

The expected credit loss of financial instruments are conducted by a means which reflect:

an unbiased and probability-weighted amount that reflects a range of possible outcomes;

- i. time value of money; and*
- ii. reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort about past events, current conditions and forecasts of future conditions.*
- iii. Financial assets may be considered to not having significant increase in credit risk since initial recognition if the financial assets have a low credit risk at the reporting date. Credit risk on financial instrument may be considered be low if there is a low risk of default, the borrower has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term and adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the borrower to fulfil its contractual cash flow obligations. To determine whether a financial asset has a low credit risk, the Group may use internal credit risk rating or external assessment. To illustrate, a financial asset with 'investment grade' according to external assessment has a low credit risk rating, thus it does not experience an increase in significant credit risk since initial recognition.*

Derecognition of Financial Assets

The Group derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when they transfer the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Group neither transfer nor retain substantially all the risks and rewards of ownership and continue to control the transferred asset, the Group recognize their retained interest in the asset and an associated liability for amounts they may have to pay. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset,

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

dibayar. Jika Grup memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Grup masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Saat penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi.

Saat penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya Ketika Grup masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Grup mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Grup mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali:

- Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas dimaksud, termasuk derivatif yang merupakan liabilitas, selanjutnya akan diukur pada nilai wajar.
- Liabilitas keuangan yang timbul saat pengalihan aset keuangan yang tidak

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

the Group continues to recognize the financial asset and also recognize a collateralized borrowing for the proceeds received.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the assets carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity is reclassified to profit or loss.

On derecognition of a financial asset other than in its entirety (e.g., when the Company retains an option to repurchase part of a transferred asset), the Group allocates the previous carrying amount of the financial asset between the part they continue to recognize under continuing involvement and the part they no longer recognize on the basis of the relative fair values of those parts on the date of the transfer. The difference between the carrying amount allocated to the part that is no longer recognized and the sum of the consideration received for the part no longer recognized and any cumulative gain or loss allocated to it that had been recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss. A cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income is allocated between the part that continues to be recognized and the part that is no longer recognized on the basis of the relative fair values of those parts.

Subsequent Measurement of Financial Liabilities

The Group shall classify all financial liabilities as subsequently measured at amortised cost, except for:

- Financial liabilities at fair value through profit or loss. Such liabilities, including derivatives that are liabilities, shall be subsequently measured at fair value.*
- Financial liabilities that arise when a transfer of a financial asset does not*

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan.

- (c) Kontrak jaminan keuangan dan komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga dibawah pasar. Setelah pengakuan awal, penerbit kontrak dan penerbit komitmen selanjutnya mengukur kontrak tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:
 - (i) jumlah penyisihan kerugian; dan
 - (ii) jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif dari penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip PSAK 115.
- (d) Imbalan kontijensi yang diakui oleh pihak pengakusisi dalam kombinasi bisnis ketika PSAK 103 diterapkan. Imbalan kontijensi selanjutnya diukur pada nilai wajar dan selisihnya dalam laba rugi.

Saat pengakuan awal Grup dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diizinkan oleh standar atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:

- (a) Mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "accounting mismatch") yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda beda; atau
- (b) Sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, dan informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci Grup.

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Grup telah dilepaskan, dibatalkan atau kedaluwarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

qualify for derecognition or when the continuing involvement approach applies.

- (c) Financial guarantee contracts and commitments to provide a loan at a below-market interest rate. After initial recognition, an issuer of such a contract and an issuer of such a commitment shall subsequently measure it at the higher of:
 - (i) the amount of the loss allowance; and
 - (ii) the amount initially recognized is reduced by, where appropriate, the cumulative amount of the income recognized in accordance with the principles of PSAK 115.
- (d) Contingent consideration recognized by an acquirer in a business combination to which PSAK 103 applies. Such contingent consideration shall subsequently be measured at fair value with changes recognised in profit or loss.

A Group may, at initial recognition, irrevocably designate a financial liability as measured at fair value through profit or loss when permitted by the standard or when doing so results in more relevant information, because either:

- (a) It eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency (sometimes referred to as "an accounting mismatch") that would otherwise arise from measuring assets or liabilities or recognizing the gains and losses on them on different bases; or
- (b) A group of financial liabilities or financial assets and financial liabilities is managed and its performance is evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the Group is provided internally on that basis to the Group's key management personnel.

Derecognition of Financial Liabilities

The Group derecognize financial liabilities, if and only if the Group's obligations are discharged, cancelled, or expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the considerations paid and payable is recognized in profit or loss.

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berintens untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hierarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

- Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran
- (Tahap 1);
- Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tahap 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Tahap 2);
- Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Tahap 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hirarki nilai wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

Netting a Financial Asset and a Financial Liability

A financial asset and financial liability shall be offset when and only when, the Group currently has a legally enforceable right to net off the recognized amount and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Fair values are categorized into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:

- *Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date*
- *(Level 1);*
- *Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2);*
- *Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3).*

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Group use market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Group use valuation techniques that are appropriate in the circumstances and maximize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognized by the Group at the end of the reporting period during which the change occurred.

2.h. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diperlukan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:

	Masa Manfaat/ Useful Lives	
Jenis Aset Tetap:		Type of Fixed Assets:
Kendaraan Bermotor	5 Tahun/ Years	Vehicles
Mesin Kantor	5 Tahun/ Years	Office Machinery
Inventaris	5 Tahun/ Years	Supplies

Akumulasi biaya perolehan yang akan dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap yang sesuai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak beroperasi.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

2.h. Fixed Assets

Fixed assets are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any cost directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

When applicable, the cost may also comprise the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period.

After initial recognition, fixed assets, except land, are carried at its cost less any accumulated depreciation, and any accumulated impairment losses.

Depreciation of fixed assets starts when they are available for use and it is computed using straight-line method based on the estimated useful lives of assets as follows:

The accumulated costs will be transferred to the respective fixed assets items at the time the asset is completed or ready for use and are depreciated since the operation.

The carrying amount of an item of fixed assets is derecognized on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal.

Any gain or loss arising from derecognition (determined as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item) is included in profit or loss when item is derecognized.

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

Pada akhir periode pelaporan, Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

At the end of each reporting period, the Group make regular review of the useful lives, residual values, depreciation method and residual life based on the technical conditions.

2.i. Aset Takberwujud

Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.

2.i. Intangible Assets

Intangible assets are measured on initial recognition at cost. After initial recognition, intangible assets are carried at cost less any accumulated amortization and any accumulated impairment loss.

Aset takberwujud merupakan perangkat lunak yang terdiri atas program komputer dan lisensi yang dibeli untuk penunjang kegiatan bisnis Grup.

Intangible assets represent software which consist of computer program and licenses purchased to support the Group's business operation.

Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas

Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi selama umur manfaat ekonomi dengan metode garis lurus. Amortisasi dihitung sebagai penghapusan biaya perolehan aset, dikurangi nilai residunya, atas umur ekonomisnya sebagai berikut:

Intangible assets with finite useful life

Intangible assets with finite life are amortized over the economic useful lives by using a straight-line method. Amortization is calculated so as to write off the cost of the asset, less its estimated residual value, over its useful economic lives as follows:

**Masa Manfaat/
Useful Lives**

Jenis Aset Takberwujud:
Perangkat Lunak

5 Tahun/ Years

Type of Intangible Asset:
Software Application

Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas ditelaah setidaknya setiap akhir periode buku.

The amortization period and the amortization method for an intangible asset with a finite useful life are reviewed at least at each financial period.

2.j. Sewa

Pada tanggal inisiasi suatu kontrak, Grup menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Untuk menilai apakah suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan suatu aset identifikasi, Grup menilai apakah:

2.j. Lease

At inception of a contract, the Group assesses whether a contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group assesses whether:

- a. Kontrak melibatkan penggunaan suatu aset identifikasi – ini dapat ditentukan secara eksplisit atau implisit dan secara fisik dapat dibedakan atau mewakili secara substantial seluruh kapasitas aset yang secara fisik dapat dibedakan. Jika pemasok memiliki hak substitusi substantif, maka aset tersebut tidak teridentifikasi;

- a. *The contract involves the use of an identified asset – this may be specified explicitly or implicitly and should be physically distinct or represent substantially all of the capacity of a physically distinct asset. If the supplier has the substantive substitution right, then the asset is not identified;*

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

- b. Grup memiliki hak untuk memperoleh secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset selama periode penggunaan; dan
- c. Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi. Grup memiliki hak ini ketika hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan. Dalam kondisi tertentu di mana semua keputusan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya, Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset tersebut jika:
 - Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
 - Grup mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan.

Grup sebagai Penyewa

Grup menerapkan satu pendekatan pengakuan dan pengukuran bagi seluruh sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Grup mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak guna yang merupakan hak untuk menggunakan aset pendasar.

Grup mengakui aset hak guna pada tanggal dimulainya sewa (yaitu tanggal aset tersedia untuk digunakan). Aset hak guna diukur pada harga perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung yang timbul diawal, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai dikurangi setiap insentif sewa yang diterima. Aset hak guna disusutkan dengan metode garis lurus selama periode yang lebih pendek antara sewa dan estimasi masa manfaat aset.

Jika kepemilikan aset sewa beralih ke Grup pada akhir masa sewa atau biaya perolehan mencerminkan pelaksanaan opsi beli, penyusutan dihitung dengan menggunakan estimasi masa manfaat aset.

Pada tanggal dimulainya sewa, Grup mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

- b. The Group has the right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and
- c. The Group has the right to direct the use of the identified asset. The Group has this right when it has the decisionmaking rights that are most relevant to changing how and for what purpose the asset is used. In certain circumstances where all the decisions about how and for what purpose the asset is used are predetermined, the Group has the right to direct the use of the asset if either:
 - The Group has the right to operate the asset; or
 - The Group designed the asset in a way that predetermines how and for what purpose the asset will be used.

The Group as Lessee

The Group applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. The Group recognizes lease liabilities to make lease payments and right of use assets representing the the right to use the underlying assets.

The Group recognizes right use of assets at the commencement date of the lease (i.e., the date underlying assets is available for use). Right of use assets are measure at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The cost of right of use assets includes the amount of lease liabilities recognized, intitial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received. Right of use assets are depreciated on a straght-line basis over the shorter period of the lease term and the estimated useful lives of the assets.

If ownership of the leased assets transfers to The Group at the end of the lease term or the cost reflects to exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the assets.

At the commencement date of the lease, The Group recognizes lease liabilities measured at the present value of lease payments to be

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

selama masa sewa. Pembayaran sewa mencakup pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau tarif, dan jumlah yang diharapkan akan dibayar dibawah jaminan nilai residu. Pembayaran sewa juga mencakup harga pelaksanaan dari opsi beli yang cukup pasti akan dilaksanakan oleh Grup, dan pembayaran denda untuk penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan Grup melaksanakan opsi untuk menghentikan sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tarif diakui sebagai beban (kecuali terjadi untuk menghasilkan persediaan) pada periode dimana peristiwa atau kondisi yang memicu terjadinya pembayaran.

Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental pada tanggal dimulainya sewa karena tingkat bunga implisit dalam sewa tidak dapat segera ditentukan. Setelah tanggal permulaan, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk merefleksikan penambahan bunga dan mengurangi pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika ada modifikasi, perubahan masa sewa, perubahan pembayaran sewa (misalnya, perubahan pembayaran masa depan akibat perubahan indeks atau kurs yang digunakan untuk pembayaran sewa) atau perubahan penilaian opsi untuk membeli aset pendasar.

Ketika liabilitas sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah tercatat aset hak guna, atau dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset hak guna telah berkurang menjadi nol.

Grup menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa bangunan (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang, dari tanggal permulaan dan tidak mengandung opsi beli). Hal ini juga berlaku untuk pengecualian pengakuan sewa aset bernilai rendah untuk sewa bangunan yang dianggap bernilai rendah. Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek dan sewa dari aset bernilai rendah diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

made over the lease term. The lease payments include fixed payments (including in-substance fixed payments) less any lease incentives receivable, variable lease payments that depend on an index or a rate, and amounts expected to be paid under residual value guarantees. The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by The Group and payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects The Group exercising the option to terminate. Variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognized as expenses (unless they are incurred to produce inventories) in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

In calculating the present value of lease payments, The Group uses its incremental borrowing rate at the lease commencement date because the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a modification, a change in the assessment of an option to purchase the underlying asset.

When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use assets or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

The Group applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases of buildings and infrastructures (i.e., those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). It also applies the lease of low-values assets recognition exemption to leases of buildings and infrastructures that are considered to be low value. Lease payments on short-term leases and leases of low-value assets are recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.

2.k. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Grup menerapkan PSAK 115 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan;
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak;
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut) pada suatu waktu tertentu atau sepanjang waktu.

Harga transaksi merupakan angka yang ditagihkan kepada pelanggan setelah mengeluarkan pajak pertambahan nilai.

Kriteria spesifik berikut ini juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui.

Pendapatan operasional lainnya merupakan pendapatan bunga dari simpanan margin yang disajikan sebelum dipotong pajak final serta dikurangi insentif kelebihan dana margin Anggota Kliring.

Perubahan ini dianggap lebih sesuai dengan kegiatan usaha Grup sebagai lembaga penyelenggara kliring dan penjaminan serta sesuai dengan praktik bisnis secara internasional.

Pendapatan bunga dari penempatan deposito, portofolio efek diakui ketika diperoleh berdasarkan basis akrual dan disajikan dalam jumlah sebelum dipotong pajak final.

2.k. Income and Expense Recognition

The Group applies PSAK 115, which requires revenue recognition to fulfill 5 steps of assessment:

- 1. Identify contracts with a customer;*
- 2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct;*
- 3. Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer;*
- 4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract;*
- 5. Recognise revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services) at certain time or all the time.*

The transaction price is based on the amount billed to customer excluding value added taxes.

The following specific recognition criteria must also be met before revenue is recognized.

Other operational income represents interest income from margin deposit which is presented gross before final tax and less excess of incentive margin fund of Clearing Member.

This change is deemed more appropriate with the Group's business activity to serve as clearing house and guarantee and in accordance with international business practices.

Interest Income from time deposit, marketable securities are recognized when earned on a accrual basis and represent in amount gross before final tax.

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Dengan dikeluarkannya ijin oleh BAPPEBTI pada tahun 2009, Grup dapat melakukan kegiatan Pasar Lelang Fisik (PLF) maka Grup dapat mengakui pendapatan PLF yang dikategorikan sebagai pendapatan operasional.

2.1. Administrasi Dana Anggota Kliring

Pengadministrasian Dana Anggota Kliring dilakukan terpisah dari pembukuan Grup tetapi Laporan Keuangannya digabungkan dengan Laporan Keuangan Grup yang pada dasarnya hanya mencatat mutasi aset dan liabilitas anggota kliring, yang terdiri dari:

1. Saldo Rekening Anggota Kliring, terdiri dari:

- Rekening Dana Margin merupakan rekening yang menampung setoran margin dan/ atau kelebihan dana sehubungan dengan transaksi kontrak berjangka.
- Rekening Dana Jaminan Kliring merupakan rekening yang menampung Dana Jaminan Anggota. Perusahaan menempatkan Dana Jaminan Kliring dalam bentuk deposito berjangka.
- Rekening Dana Kliring merupakan rekening yang menampung dana Kliring dari transaksi kontrak berjangka. Dana Kliring diakumulasi dari setiap transaksi yang merupakan *daytrade*, per lot per sisi.
- Rekening Dana *Escrow* merupakan rekening penampungan tersendiri yang khusus diperuntukkan untuk penyelesaian permasalahan Anggota Kliring dan/atau dalam rangka perlindungan nasabah.
- Setoran margin dalam bentuk surat berharga sebagai kolateral anggota kliring diperlakukan sebagai rekening administratif.

2. Liabilitas Pihak Ketiga/ Anggota Kliring terdiri dari:

- Simpanan Dana Margin merupakan perkiraan lawan dari Rekening Dana Margin.
- Simpanan Dana Jaminan merupakan perkiraan lawan dari Rekening Dana Jaminan.
- Simpanan Dana Kliring merupakan perkiraan lawan dari Rekening Dana Kliring.

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

With the permit approved by BAPPEBTI in 2009, the Group may perform Physical Auction Market (PLF) activities, and therefore the Group can recognize the revenue of PLF, which is categorized as operational income.

2.1. Clearing Members' Fund Administration

The administration of Clearing Members' fund is separated from the Group's records whilst for financial reporting, it is consolidated to the Group financial statement, which state the changes in Clearing Members assets and liabilities and consisting of the following:

1. Balance with Clearing Members, consisting of:

- *Margin Fund* represents an account which retains margin deposit and/ or excess funds and securities as collateral of Clearing members in connection with futures contract transaction.
- *Clearing Guarantee Fund* represents an account which retains Clearing members' security deposit. The Company deposit clearing members', fund in the bank in the form of time deposits.
- *Clearing Fund* represents an account which retains clearing funds of futures contracts transaction. This fund is accumulated from every overnight trade transaction per lot per side.
- *Escrow Fund Account* represents separate escrow account designed specifically to settle problems of Clearing Members and/or for customers protection.
- *Margin deposit in the form of securities as collateral of the clearing members are treated as off financial position.*

2. Third Party/ Clearing Members Liabilities consist of:

- *Margin Fund Deposit is a contra account of Margin Account.*
- *Guarantee Fund is a contra account of Security Account.*
- *Clearing Fund Deposit is a contra account of Clearing Fund Account.*

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

- Simpanan Dana *Escrow* merupakan perkiraan lawan dari Rekening Dana *Escrow*.

2.m. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode - periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihanannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang - undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset.

Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

- pengakuan awal *goodwill*; atau
- pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis; pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak); dan pada saat transaksi tidak menimbulkan perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama.

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

- *Escrow Fund Deposit* is a contra account of *Escrow Fund Account*.

2.m. Income Tax

Tax expense is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax. Current tax and deferred tax is recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.

Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognized as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognized as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Tax benefits relating to tax loss that can be carried back to recover current tax of a previous periods are recognized as asset.

Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

A deferred tax liability shall be recognized for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:

- *the initial recognition of goodwill; or*
- *the initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination; at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss); and at the time of the transaction do not give rise to taxable temporary differences and temporary differences can be offset in the same amount.*

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia, sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang:

- a) bukan kombinasi bisnis;
- b) pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak); dan pada saat transaksi, tidak menimbulkan perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

- Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
- Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
 - i. entitas kena pajak yang sama; atau
 - ii. entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Pajak Final

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

Deferred tax assets are recognized for all taxable temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against, which the temporary differences can be utilized to reduce the said profit. This is except in cases where deferred tax assets arise from the initial recognition of assets or liabilities in transactions that:

- a) are not business combinations;*
- b) at the time of the transaction, do not affect accounting profit or taxable profit (tax loss); and at the time of the transaction, do not give rise to taxable temporary differences, and taxable temporary differences can be offset in equal amounts.*

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period. The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

The Group offset deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:

- *The Group has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and*
- *The deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either:*
 - i. the same taxable entity; or*
 - ii. different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.*

Final Tax

Tax regulations in Indonesia regulate certain types of income subject to final tax. The final

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Mengacu pada PSAK 212, pajak final tersebut tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 212. Oleh karena itu, Grup memutuskan untuk menyajikan pajak final sehubungan dengan pendapatan operasional dan non operasional sebagai pos tersendiri.

2.n. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Imbalan pasca kerja

Imbalan pasca kerja seperti pensiun, uang pisah, dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Republik Indonesia.

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Grup mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

tax imposed on the gross value of the transaction still applies even when the transaction parties suffer a loss.

Referring to PSAK 212, the final tax is not included in the scope regulated by PSAK 212. Therefore, the Group decided to present the final tax of operating and non-operating incomes as a separate item.

2.n. Employee Benefits

Short term employee benefits

Short-term employee benefits are recognized when an employee has rendered service during accounting period, at the undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for that service.

Short term employee benefits include, among others, wages, salaries, bonus and incentive.

Post-employment benefit obligation

Post-employment benefits such as retirement, severance, and service payments are calculated based on Labor Law applied in Republic of Indonesia.

The Group recognizes the amount of the net defined benefit liability at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets which is calculated by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. Present value of benefit obligation is determined by discounting the benefit.

The Group account not only for its legal obligation under the formal terms of a defined benefit plan, but also for any constructive obligation that arises from the entity's informal practices.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interests on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit and loss.

The remeasurement of the net defined benefit liability (assets) comprises actuarial gains and losses, the return on plan assets, and any change in effect of the asset ceiling are recognized in other comprehensive income.

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Grup menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk sebagian karyawan yang berhak yang dikelola oleh PT Asuransi Jiwa IFG dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Beban kontribusi Grup dibebankan ke laporan laba rugi tahun berjalan. Program pensiun BPJS Ketenagakerjaan dihitung sebesar 1% dari upah pegawai.

2.o. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor.

- 1) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - c. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- 2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya);
 - b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitasosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya;
 - c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

The Group holds a defined benefit plan program for its entitled employees which is managed by PT Asuransi Jiwa IFG, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. The Group contribution for both of these expenses are recorded in the current year statement of comprehensive income. Benefit plan program from BPJS calculated as 1% from salary.

2.o. Related Parties Transactions and Balances

A related party is a person or entity related to the reporting entity.

- 1) A person or close member of the person's family is related to a reporting entity if that person:
 - a. Has control or joint control of the reporting entity;
 - b. Has significant influence over the reporting entity; or
 - c. Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- 2) An entity is related to reporting entity if any of the following conditions applies:
 - a. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
 - b. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
 - c. Both entities are joint ventures of the same third party;
 - d. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
 - e. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

- f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka (i);
- g. Orang yang diidentifikasi dalam angka (i) (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
- h. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas Berelasi dengan Pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini didefinisikan dalam ruang lingkup Kementerian BUMN yang merupakan Pemegang Saham dari entitas.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan yang relevan (Catatan 35).

2.p. Dividen

Pembagian dividen kepada Pemegang Saham Grup diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para Pemegang Saham Grup.

3. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

- f. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (i);
- g. A person identified in (i) (a) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); or
- h. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Related party to the Government entities are entities controlled, jointly controlled, or significantly influenced by the government. Government in this case is defined within the scope of the Ministry of State-Owned Enterprises, which are the Shareholder of the entity.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes (Note 35).

2.p. Dividend

Dividend distribution to the Group's Shareholders is recognized as a liability in the financial statements at the time the dividends are approved by the Shareholders of the Group.

3. Source of Estimation Uncertainty and Critical Accounting Judgment

The preparation of the Group consolidated financial statements requires the management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

The Group based their assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini.

Sumber Ketidakpastian Estimasi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber ketidakpastian estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

Rugi Penurunan Nilai pada Aset Keuangan yang diukur pada Biaya Perolehan yang Diamortisasi

Grup menilai penurunan nilai pada aset keuangan dengan biaya perolehan yang diamortisasi pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen harus mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh kas dan setara kas, piutang anggota kliring, piutang penjaminan, dan piutang lain-lain (Catatan 4,10,11 dan 12).

Estimasi dan Asumsi Pajak Penghasilan

Dalam situasi tertentu, Grup tidak dapat menentukan secara pasti jumlah liabilitas pajak mereka pada saat ini atau masa depan karena proses keberatan, dan pemeriksaan dari otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan.

Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Grup menerapkan pertimbangan yang sama yang akan mereka gunakan dalam

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimate uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below.

Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation uncertain at the end of the reporting period, which have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are discussed below:

Impairment Loss on Financial Asset measured at Amortized Cost

The Group assess their financial assets measured at amortized cost for impairment at each reporting date. In determining whether an impairment loss should be recorded in profit or loss, management makes a judgement as to whether there is reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort about past events, current conditions, and forecasts of future conditions. The Group applies simplified approach to measuring expected credit losses which uses a lifetime expected loss allowance for cash and equivalent, clearing member's receivables, guarantee receivables, and other receivables (Notes 4, 10, 11 and 12).

Estimates and Assumptions for Income Tax

In certain circumstances, the Group cannot determine the exact amount of their current and future tax liability on current of future because of the objection process, and examination of the tax authorities. Uncertainties arise concerning the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of the taxable income in the future.

In determining the amount to be recognized related to uncertain tax liabilities, the Group applied the same consideration that they will use in determining the amount of reserves

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK 237 "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi". Grup membuat analisa untuk semua posisi pajak terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan jika liabilitas pajak untuk beban yang belum diakui harus diakui.

Grup mencatat bunga dan denda untuk kekurangan pembayaran pajak penghasilan, jika ada, dalam Penghasilan (Beban) Lain-lain sebagai bagian dari "Lain-lain - bersih" dalam laporan laba rugi dan komprehensif lain konsolidasian.

Realisasi Aset Pajak Tangguhan

Grup melakukan penelaahan atas nilai tercatat aset pajak tangguhan pada setiap akhir periode pelaporan dan mengurangi nilai tersebut sampai sebesar kemungkinan aset tersebut tidak dapat direalisasikan, dimana penghasilan kena pajak yang tersedia memungkinkan untuk penggunaan seluruh atau sebagian dari aset pajak tangguhan tersebut.

Penelaahan Grup atas pengakuan aset pajak tangguhan untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan didasarkan atas tingkat dan waktu dari penghasilan kena pajak yang ditaksirkan untuk periode pelaporan berikutnya.

Taksiran ini berdasarkan hasil pencapaian Grup di masa lalu dan ekspektasi di masa terhadap pendapatan dan beban, sebagaimana juga dengan strategi perencanaan perpajakan di masa depan. Tetapi, tidak terdapat kepastian bahwa Grup dapat menghasilkan penghasilan kena pajak yang cukup untuk memungkinkan penggunaan sebagian atau seluruh bagian dari aset pajak tangguhan tersebut (Catatan 16.d).

Penyisihan Imbalan Kerja Karyawan

Penyisihan imbalan kerja karyawan ditentukan berdasarkan perhitungan dari aktuaria. Perhitungan aktuaria menggunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat pengembalian investasi, tingkat kenaikan gaji, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri dan lain-lain.

Dikarenakan kompleksitas dari penilaian, dasar asumsi dan periode jangka penilaian, dasar asumsi dan periode jangka panjang, kewajiban manfaat pasti sangat sensitif terhadap perubahan asumsi. Grup percaya bahwa asumsi mereka memadai dan tepat, perbedaan signifikan dalam pengalaman aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi dapat

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

that must be recognized in accordance with Statement of PSAK 237, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets". The Group made analysis to all tax positions related to income taxes to determine if the tax liability for unrecognized expenses should be recognized.

The Group recorded interest and penalties for the inter payment of income taxes, if any, in other Income (Expense) as part of the "Others - net" in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Realization of Deferred Tax Assets

The Group conducted a review of the carrying value of deferred tax assets at the end of each reporting period and reduced such amount to the value of the possibility of such assets can not be realized, where the amount of taxable income available allows for the use of all or part of the deferred tax assets.

The Group review for the recognition of deferred tax assets for deductible temporary differences is based on the level and timing of the taxable income estimated for the next reporting period.

These estimates are based on the Group past achievements and futures expectations on revenues and expenses, as well as tax planning strategies in the future. But, there is no assurance that the Group can generate sufficient taxable income to allow the use of all or part of the deferred tax assets (Note 16.d).

Provision for Employee Benefits

Provision for employee benefits is determined based on the calculation of the actuary. Actuarial calculations used assumptions such as discount rates, investment returns, salary increase rate, mortality rate, resignation rate and others.

Due to the complexity of the assessment, the basis of assumptions and assessment period, the basis of assumptions and long-term periods, defined benefit obligation is highly sensitive to changes in assumptions. The Group considers that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

mempengaruhi secara material beban dan penyisihan imbalan kerja karyawan. Semua asumsi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan (Catatan 26).

Estimasi Umur Manfaat

Grup melakukan penelaahan atas masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi atas perubahan estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor tersebut (Catatan 2.i dan 17).

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

changes in the assumptions can materially affect the expense and the provision for employee benefits. All assumptions are reviewed at each reporting date (Note 26).

Estimated Useful Lives

The Group review the useful lives of fixed assets based on several factors such as technical conditions and technology development in the future. Operating results in the future will be affected by the estimated changes of those factors (Notes 2.i and 17).

4. Kas dan Setara Kas

4. Cash and Cash Equivalents

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp
Kas	83,789,082	105,158,847
Rekening Giro		
Rupiah		
<u>Pihak Berelasi (Catatan 35)</u>		
Sub Jumlah	5,890,828,565	2,184,157,539
<u>Pihak Ketiga</u>		
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1,558,673,832	197,027,342
PT Bank MNC Internasional Tbk	1,124,201,138	150,960,037
PT Bank Central Asia Tbk	288,633,856	378,816,712
PT Bank Capital Tbk	191,356,887	6,046,848
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	73,929,400	3,621,159,324
PT Bank Permata Tbk	60,781,792	57,764,240
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	48,434,739	--
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	10,404,042	10,651,352
PT Bank Artha Graha Internasional Tbk	5,499,150	5,962,050
PT Bank KB Bukopin Tbk	--	9,648,801
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara	--	5,383,183
Sub Jumlah	3,361,914,836	4,443,419,889
Dolar Amerika Serikat		
<u>Pihak Berelasi (Catatan 35)</u>		
Sub Jumlah	343,934,000	148,700,141
<u>Pihak Ketiga</u>		
PT Bank Central Asia Tbk	169,437,617	164,096,793
Jumlah Rekening Giro	9,766,115,018	6,940,374,362
Deposito Berjangka		
Rupiah		
<u>Pihak Berelasi (Catatan 35)</u>		
Sub Jumlah	57,000,000,000	5,000,000,000
<u>Pihak Ketiga</u>		
PT Bank Capital Indonesia Tbk	--	10,000,000,000
Jumlah Deposito Berjangka	57,000,000,000	15,000,000,000
Jumlah	66,849,904,100	22,045,533,209
Dikurangi:		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(16,236,750)	(2,237,193)
Jumlah	66,833,667,350	22,043,296,016

**Cash on Hand
Current Accounts**

Rupiah
Related Parties (Note 35)
Sub Total

Third Parties
PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank MNC Internasional Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Capital Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah
Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Permata Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah
Jawa Timur
PT Bank China Construction
Bank Indonesia Tbk
PT Bank Artha Graha
Internasional Tbk
PT Bank KB Bukopin Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah
Sulawesi Utara

Sub Total

United States Dollar
Related Parties (Note 35)
Sub Total

Third Party
PT Bank Central Asia Tbk

Total Current accounts

Time Deposits

Rupiah
Related Parties (Note 35)
Sub Total

Third Parties
PT Bank Capital Indonesia Tbk

Total Time Deposits

Total

Less:

Allowance for Impairment Losses

Total

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 giro dalam Dolar Amerika Serikat masing-masing sebesar USD30.391 dan USD10.900.

As of December 31, 2025 and 2024 current account in United States Dollar is amounting to USD30,391 and USD10,900, respectively.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The movements of allowance for impairment losses are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp	
Saldo Awal	2,237,193	68,677,431	Beginning Balance
Penambahan (Catatan 30.d)	2,540,919	120,989	Additions (Note 30.d)
Pemulihan (Catatan 30.d)	(11,458,638)	(66,561,227)	Recovery (Note 30.d)
Saldo Akhir	16,236,750	2,237,193	Ending Balance

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai atas kas dan setara kas cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya kas dan setara kas tersebut.

Management believes that the allowance of impairment losses on cash and cash equivalents are adequate to cover possible losses on cash and cash equivalents.

5. Penempatan Dana Anggota Kliring

5. Placement of Clearing Member's Fund

Liabilitas Jangka Pendek Tidak Berbunga:

Non-Interest-Bearing Current Liabilities:

a. Berdasarkan Jenis

a. By Type

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp	
Dana Marjin	2,007,374,965,504	1,449,192,645,779	Margin Fund
Dana Jaminan	212,811,720,367	199,401,931,198	Guarantee Fund
Dana Escrow	19,212,398,894	18,544,673,517	Escrow Fund
Dana Kliring	174,635,701	172,993,553	Clearing Fund
Jumlah	2,239,573,720,466	1,667,312,244,047	Total

b. Berdasarkan Transaksi Pihak-pihak Tertentu

b. By Transaction with Certain Parties

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp	
Pihak Berelasi (Catatan 35)	1,503,592,641,057	1,043,408,860,699	Related Parties (Note 35)
Pihak Ketiga	735,981,079,409	623,903,383,348	Third Parties
Jumlah	2,239,573,720,466	1,667,312,244,047	Total

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

c. Berdasarkan Penempatan Dana

c. By Placement

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp	
Giro			Current Account
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
<u>Pihak Berelasi (Catatan 35)</u>			<u>Related Parties (Note 35)</u>
Sub Jumlah	674,800,323,117	321,734,815,460	Sub Total
<u>Pihak Ketiga</u>			<u>Third Parties</u>
PT Bank Central Asia Tbk	96,673,270,433	9,279,036,911	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	54,278,563,998	1,518,733,306	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Panin Tbk	736,336,787	1,160,132,350	PT Bank Panin Tbk
PT Bank Capital Indonesia Tbk	606,685,097	80,264,699,627	PT Bank Capital Indonesia Tbk
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	266,501,085	517,502,822	PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
PT Bank Artha Graha Internasional Tbk	24,245,391	23,605,391	PT Bank Artha Graha Internasional Tbk
PT Bank MNC Internasional Tbk	8,831,300	8,611,020	PT Bank MNC Internasional Tbk
PT Bank Ina Perdana Tbk	2,500,000	--	PT Bank Ina Perdana Tbk
PT Bank Victoria International Tbk	1,196,680	1,733,672	PT Bank Victoria International Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	675,000	--	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Sub Jumlah	152,598,805,771	92,774,055,099	Sub Total
Jumlah Rupiah	827,399,128,888	414,508,870,559	Total Rupiah
<u>Dolar Amerika Serikat</u>			<u>United States Dollar</u>
<u>Pihak Berelasi (Catatan 35)</u>			<u>Related Parties (Note 35)</u>
Sub Jumlah	47,385,742,466	17,471,369,365	Sub Total
<u>Pihak Ketiga</u>			<u>Third Parties</u>
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	164,121,319,530	100,050,831,544	PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	33,541,023,428	16,591,097,494	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	28,236,322,844	8,519,345,522	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Artha Graha Internasional Tbk	6,862,262,338	3,197,389,516	PT Bank Artha Graha Internasional Tbk
PT Bank Capital Indonesia Tbk	34,067,124	32,475,247	PT Bank Capital Indonesia Tbk
PT Bank Panin Tbk	--	11,284,857	PT Bank Panin Tbk
PT Bank Victoria International Tbk	1,678,200	1,615,700	PT Bank Victoria International Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	8,088,924	--	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Ina Perdana Tbk	1,678,200	--	PT Bank Ina Perdana Tbk
Sub Jumlah	232,806,440,589	128,404,039,880	Sub Total
Jumlah Dolar Amerika Serikat	280,192,183,055	145,875,409,245	Total United States Dollar
Sub Jumlah Giro	1,107,591,311,943	560,384,279,804	Sub Total Current Account

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp	
Deposito			Deposit
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
<u>Pihak Berelasi (Catatan 35)</u>			<u>Related Parties (Note 35)</u>
Sub Jumlah	737,773,375,474	662,194,475,874	Sub Total
<u>Pihak Ketiga</u>			<u>Third Parties</u>
PT Bank CIMB Niaga Tbk	122,498,187,592	120,740,305,085	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Capital Indonesia Tbk	69,000,000,000	68,000,000,000	PT Bank Capital Indonesia Tbk
PT Bank MNC Internasional Tbk	60,000,000,000	120,000,000,000	PT Bank MNC Internasional Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	41,411,794,765	54,991,485,781	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	37,665,850,692	28,993,497,503	PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
PT Bank Victoria International Tbk	20,000,000,000	10,000,000,000	PT Bank Victoria International Tbk
Sub Jumlah	350,575,833,049	402,725,288,369	Sub Total
Jumlah Rupiah	1,088,349,208,524	1,064,919,764,243	Total Rupiah
<u>Dolar Amerika Serikat</u>			<u>United States Dollar</u>
<u>Pihak Berelasi (Catatan 35)</u>			<u>Related Parties (Note 35)</u>
Jumlah Dolar Amerika Serikat	43,633,200,000	42,008,200,000	Total United States Dollar
Sub Jumlah Deposito	1,131,982,408,524	1,106,927,964,243	Sub Total Deposit
Dana Anggota Kliring	2,239,573,720,466	1,667,312,244,047	Clearing Members' Fund

d. Berdasarkan Keanggotaan

d. By Membership

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp
PT Bestprofit Futures	325,345,219,549	137,157,023,851
PT Valbury Asia Futures	183,645,292,717	92,167,890,715
PT Rifan Financindo Berjangka	167,867,098,953	184,644,960,443
PT Equityworld Futures	148,320,474,981	129,148,468,924
PT Jasa Mulia Forexindo	129,076,330,762	34,370,586,885
PT Kontak Perkasa Futures	111,621,037,521	115,425,800,328
PT Royal Assetindo	104,092,486,428	122,512,848,106
PT Deu Calion Futures	96,973,195,060	47,020,386,814
PT Trijaya Pratama Futures	95,103,007,833	104,290,897,410
PT Solid Gold Berjangka	94,368,156,448	97,904,144,332
PT Genesis Gemilang Futures	75,951,810,903	93,816,556,918
PT Mrg Mega Berjangka	63,132,201,183	32,833,129,392
PT Sagafx Sentra Berjangka	51,339,359,680	1,601,059,218
PT Maxco Futures	39,823,032,855	49,955,434,632
PT Finex Bisnis Solusi Futures	33,282,495,094	13,600,455,007
PT International Mitra Futures	30,084,074,832	14,966,487,203

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp
PT Inter Pan Pasifik Futures	27,950,878,333	27,622,431,548
PT Halim Mitradana International	27,434,159,811	16,082,051,580
PT RRFx Investasi Berjangka	25,558,331,740	1,051,697,915
PT Capital Megah Mandiri	25,187,407,703	11,734,079,829
PT Sands Capital Indonesia	23,984,586,294	12,632,236,709
PT Pruton Mega Berjangka	18,666,175,355	18,009,501,905
PT Pg Berjangka	16,145,560,818	11,954,655,250
PT Sentra Artha Maxima	15,934,479,695	10,091,615,530
PT Esandar Arthamas Berjangka	15,869,172,095	9,679,424,856
PT Inter Multiinvest Fortuna	15,552,035,284	11,517,995,141
PT Pan Emperor	14,669,508,487	16,021,017,636
PT Didi Max Berjangka	14,379,068,823	13,445,190,662
PT Global Buana Karya	14,324,992,566	10,565,687,356
PT Harta International Investama	13,179,107,944	12,513,756,338
PT Monex Investindo Futures	12,197,612,869	13,016,848,082
PT Gema Meraki Sukses	11,542,785,229	10,551,222,976
PT Century Investment Futures	11,463,141,708	4,096,958,030
PT Adhikarya Cipta Persada	9,681,674,339	9,467,209,606
PT Usaha Forexindo Indonesia	9,357,676,211	8,186,792,314
PT Realtime Forex Indonesia	9,217,479,783	10,225,340,357
PT Universal Futures	9,077,282,801	7,731,981,006
PT Surya Anugrah Mulya	9,048,114,693	9,378,505,868
PT Mega Semai Nusantara	8,778,192,456	769,908,701
PT Menara Mas Investindo	8,749,453,171	8,019,640,994
PT World Index Investment	8,128,446,419	8,008,960,843
PT Mega Menara Mas Berjangka	7,144,148,034	3,061,764,606
PT First State Futures	6,697,052,515	8,859,745,696
PT Phillip Futures	5,715,401,923	1,520,749,083
PT Menara Mas Futures	4,769,238,562	4,156,456,249
PT Cyber Futures	4,627,270,019	12,099,046,269
PT Invetra Teknologi Berjangka	4,317,315,918	1,834,153,204
PT International Business Futures	4,257,365,887	5,103,813,385
PT Mahadana Asta Berjangka	3,983,226,886	20,846,133,416
PT Global Intra Berjangka	3,969,201,609	1,067,547,079
PT Gatra Mega Berjangka	3,680,627,622	3,849,522,747
PT Mentari Mulia Berjangka	2,811,006,545	4,180,619,319
PT Premiere Equity Futures	2,719,529,648	3,499,531,272
PT Trive Invest Futures	2,669,451,742	2,782,174,811
PT Indosukses Futures	2,494,596,941	7,774,701,991
PT Central Capital Futures	2,487,019,968	2,783,634,686
Lainnya (dibawah Rp2.000.000.000)/ Others (below Rp2,000,000,000)	51,128,667,221	34,401,304,569
Jumlah/Total	2,239,573,720,466	1,667,312,244,047

Dana margin dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi pasal 1 ayat (24) bahwa dana margin adalah sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh Anggota Kliring kepada lembaga kliring berjangka untuk menjamin pelaksanaan transaksi kontrak berjangka.

Margin Deposits are established in compliance with Law Number 10 of 2011 regarding Amendment to article 1 (24) of Law No. 32 of 1997 regarding Trading of Futures which stipulates that margin funds are funds or securities which should be placed by Clearing Members to guarantee the operations of futures contract transactions.

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Dana Jaminan Kliring merupakan dana milik Anggota Kliring yang disetorkan ke Perusahaan dengan tujuan untuk memenuhi kewajiban apabila Anggota Kliring cedera janji. Dana Jaminan Kliring dibentuk berdasarkan Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan bab II paragraf 204.

Dana Kliring dibentuk berdasarkan Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan bab IV paragraf 400 huruf (b) dimana tertulis bahwa Dana Kliring bertujuan sebagai dana bersama dengan tujuan untuk mengganti kerugian Lembaga Kliring akibat timbulnya kegagalan penyelesaian Anggota Kliring. Dana Kliring ini tidak dipungut lagi mulai dari tahun 2003.

Simpanan Dana *Escrow* merupakan rekening penampungan tersendiri yang khusus diperuntukkan untuk penyelesaian permasalahan dan dalam rangka perlindungan nasabah. Dana *Escrow* dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala Bappebti No. 120/BAPPEBTI/PER/03/2015 pasal 7 ayat 4 tanggal 23 Maret 2015 tentang Pengelolaan Akun Dana Margin.

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

Clearing Guarantee Fund represents Clearing Members' funds deposited to the Company for the purpose of fulfilling their obligation if the Clearing Member is in default. The Guarantee fund was established based on chapter II paragraph 204 of the Company's Rules and Regulation.

Clearing Funds Deposit was established based on paragraph 400 (b) of chapter IV of the Company's Rules and Regulation, stipulating that Clearing Funds Deposit is used as common fund for compensating loss suffered by Clearing House in case of settlement default by Clearing Members. Since 2003 the Clearing Funds are no longer collected.

Escrow Fund Deposits represent a separated fund account designated specifically for settlement of issues and in order to protect customers. Escrow Fund was established pursuant to Article 7 paragraph 4 of the Decree of the Head of Commodity Futures Trading Regulatory Agency No. 120/BAPPEBTI/PER/03/2015, dated March 23, 2015 regarding Management of Segregated Fund Accounts.

6. Penempatan Dana Pasar Fisik Komoditas

Liabilitas Jangka Pendek Tidak Berbunga:

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp
Dana Timah	58,654,373,241

Berikut ini merupakan rincian atas Penempatan Dana Pasar Fisik Komoditas:

a. Berdasarkan Jenis

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp
Dana Timah <i>Deposit</i>	39,443,067,684
Dana Timah <i>Settlement</i>	19,211,305,557
Jumlah	58,654,373,241

6. Placement of Commodity Physical Market

Non-Interest-Bearing Current Liabilities:

	31 Desember/ December 31, 2024 Rp	
	121,783,906,226	<i>Tin Fund</i>

The following is a detail of the Placement of Commodity Physical Market:

a. By Type

	31 Desember/ December 31, 2024 Rp	
	26,680,916,927	<i>Tin Deposit Fund</i>
	95,102,989,299	<i>Tin Settlement Fund</i>
Total	121,783,906,226	Total

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

b. Berdasarkan Transaksi Pihak-pihak Tertentu

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp
Pihak Berelasi (Catatan 35)	58,639,481,062	121,755,447,448
Pihak Ketiga	14,892,179	28,458,778
Jumlah	58,654,373,241	121,783,906,226

*Related Party (Note 35)
Third Parties
Total*

b. By Transaction with Certain Parties

c. Berdasarkan Penempatan Dana

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp
Giro		
Dolar Amerika Serikat		
<u>Pihak Berelasi (Catatan 35):</u>		
Sub Jumlah	58,639,481,062	121,755,447,448
<u>Pihak Ketiga:</u>		
PT Bank Artha Graha		
International Tbk	14,892,179	14,725,328
PT Bank Central Asia Tbk	--	13,733,450
Sub Jumlah	14,892,179	28,458,778
Jumlah Dana Transaksi Pasar Fisik Timah	58,654,373,241	121,783,906,226

*Current Account
United States Doll
Related Party (Note 35):
Sub Total
Third Parties:
PT Bank Artha Graha
International Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
Sub Total
Transaction Amount
Tin Physical Market*

c. By Placement

d. Berdasarkan Keanggotaan

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp
PT Sinar Sejahtera Perkasa	24,226,445,348	--
Amalgamet Ltd	17,973,735,971	--
PT Timah Tbk	10,504,692,900	2,358,922,000
Pro Tin Trading Pte Ltd	2,013,840,168	1,938,840,162
Tiant Resources Pte Ltd	1,650,313,686	1,721,153,831
Glencore International AG	1,046,423,150	--
Ara Metals & Minerals Pte Ltd	543,588,615	188,288,669
Denare PTE Ltd	303,785,415	528,721,183
Black Ore Pte Ltd	194,494,486	--
PT Babel Surya Alam Lestari	--	105,493,778,923
PT Mitra Sukses Globalindo	--	7,707,419,014
Raffles Trading APAC Pte Ltd	--	1,707,533,964
Lainnya (dibawah Rp100.000.000)	197,053,502	139,248,480
Jumlah	58,654,373,241	121,783,906,226

*PT Sinar Sejahtera Perkasa
Amalgamet Lt
PT Timah Tb
Pro Tin Trading Pte Lt
Tiant Resources Pte Lt
Glencore International AG
Ara Metals & Minerals Pte Lt
Denare PTE Lt
Black Ore Pte Ltd
PT Babel Surya Alam Lesta
PT Mitra Sukses Globalind
Raffles Trading APAC Pte Lt
Others (below Rp100,000,000)
Total*

d. By Membership

Penempatan dana Transaksi Pasar Fisik Timah dibentuk berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 13/Per-KBI/VII/2019 dengan PT Bursa Berjangka Jakarta tentang penyelenggaraan pelelangan pasar fisik timah yang hak dan kewajiban kedua belah pihak diatur dalam perjanjian No. 003//PKS/BBJ-KBI//VIII/2019.

Placement of Commodity Physical Market was formed based on Cooperation Agreement No. 13/Per-KBI/VII/2019 with PT Bursa Berjangka Jakarta concerning the implementation of a physical tin market auction where the rights and obligations of both parties are regulated under agreement No.003//PKS/BBJ-KBI//VIII/2019.

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Penyimpanan, Pengelolaan, dan Penyerahan Timah telah diatur berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 16/PER-KBI/VIII/2019 dengan PT Bhandha Ghara Reksha (Persero) dan No. 21/PER-KBI/XI/2019 tanggal 4 November 2019 dengan PT Tantra Karya Sejahtera.

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

Tin Custody, Management and Delivery is managed under Cooperation Agreement No. 16/PER-KBI/VIII/2019 with PT Bhandha Ghara Reksha (Persero) and No. 21/PER-KBI/XI/2019 dated November 4, 2019 with Tantra Karya Sejahtera.

7. Penempatan Transaksi Aset Digital

Liabilitas Jangka Pendek Tidak Berbunga:

a. Berdasarkan Jenis

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp
Dana Emas Digital	22,863,397,075	2,250,263,001
Dana Registrasi Aset Digital	55,208,693	53,115,062
Jumlah	22,918,605,768	2,303,378,063

Gold Digital Fund
Digital Assets Registration Fund
Total

i. Dana Emas Digital

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp
PT Bumi Sentosa Cemerlang (Pluang)	22,863,397,075	2,250,263,001

PT Bumi Sentosa Cemerlang (Pluang)

ii. Dana Registrasi Aset Digital

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp
PT Indoforex Nasional Futures	55,208,693	53,115,062
Jumlah	55,208,693	53,115,062

PT Indoforex Nasional Futures
Total

b. Berdasarkan Transaksi Pihak-pihak Tertentu

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp
Pihak Berelasi (Catatan 35)	10,819,809	14,558,160
Pihak Ketiga	22,907,785,959	2,288,819,903
Jumlah	22,918,605,768	2,303,378,063

Related Parties (Note 35)
Thrid Parties
Total

7. Placement of Transactions Digital Asset

Non-Interest-Bearing Current Liabilities:

a. By Type

i. Gold Digital Fund

ii. Digital Assets Registration Fund

b. By Transaction with Certain Parties

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

c. Berdasarkan Penempatan Dana

c. By Placement

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp	
Giro			Current Account
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
<u>Pihak Berelasi (Catatan 35)</u>			<u>Related Parties (Note 35)</u>
Sub Jumlah	10,819,809	14,558,160	Sub Total
<u>Pihak Ketiga</u>			<u>Third Parties</u>
PT Bank Central Asia Tbk	18,750,878,059	2,032,586,046	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Capital Indonesia Tbk	4,034,357,346	17,148,008	PT Bank Capital Indonesia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	86,350,078	29,482,712	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank MNC Internasional Tbk	21,498,197	28,242,676	PT Bank MNC Internasional Tbk
PT Bank Artha Graha Internasional Tbk	1,760,000	181,315,808	PT Bank Artha Graha Internasional Tbk
PT Bank Victoria International Tbk	--	44,653	PT Bank Victoria International Tbk
Sub Jumlah	22,894,843,680	2,288,819,903	Sub Total
Jumlah Giro	22,905,663,489	2,303,378,063	Total Current Accounts
 <u>Rupiah</u>			 <u>Rupiah</u>
<u>Pihak Ketiga</u>			<u>Third Parties</u>
PT Bank CIMB Niaga Tbk	12,942,278	--	PT Bank MNC Internasional Tbk
Sub Jumlah	12,942,278	--	Sub Total
Jumlah Deposito Berjangka	12,942,278	--	Total Time Deposits
Jumlah Penempatan Dana Aset Digital	22,918,605,768	2,303,378,063	Total Placement of Digital Asset's Fund

8. Efek-Efek

8. Marketable Securities

a. Transaksi dengan Pihak tertentu

a. Transaction with certain party

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp	
Pihak Ketiga	20,000,000,000	47,000,000,000	Third Party

b. Berdasarkan Penerbit

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp
Korporasi		
PT Bahana TCW Investment Management	20,000,000,000	20,000,000,000
Star Asset Management	--	27,000,000,000
Jumlah	20,000,000,000	47,000,000,000

<i>Corporate</i>
<i>PT Bahana TCW Investment Management</i>
<i>Star Asset Management</i>
Total

c. Berdasarkan Jangka waktu

	Tarif/ Rate %	31 Desember/ December 31 2025 Nilai Nominal/ Tercatat Nominal Value/ Carrying Amount Rp
Biaya Perolehan Diamortisasi		
RDT Bahana Protected Fund 199	8.60%	20,000,000,000
Jumlah		20,000,000,000
Dikurangi:		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		--
Neto		20,000,000,000
	Tarif/ Rate %	31 Desember/ December 31 2024 Nilai Nominal/ Tercatat Nominal Value/ Carrying Amount Rp
Biaya Perolehan Diamortisasi		
RDT STAR Terproteksi XVI	7.35%	27,000,000,000
RDT Bahana Protected Fund 199	8.60%	20,000,000,000
Jumlah		47,000,000,000
Dikurangi:		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(634,113,302)
Jumlah		46,365,886,698

Amortized Cost
<i>RDT Bahana Protected Fund 199</i>
Total
Less:
<i>Allowance for Impairment Loss</i>
Nett

Amortized Cost
<i>RDT STAR Terproteksi XVI</i>
<i>RDT Bahana Protected Fund 199</i>
Total
Less:
<i>Allowance for Impairment Loss</i>
Total

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The movements of allowance for impairment losses are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp
Saldo Awal	634,113,302	1,306,881,542
Pemulihan (Catatan 30.d)	(634,113,302)	(672,768,240)
Saldo Akhir	--	634,113,302

<i>Beginning Balance</i>
<i>Recovery (Note 30.d)</i>
Ending Balance

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai atas efek-efek adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari aktivitas investasi (Catatan 27).

Management believes that the allowance of impairment losses on marketable securities is adequate to cover possible losses on investment activities (Note 27).

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

9. Investasi Jangka Pendek

9. Short-term Investment

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp	
Investasi Jangka Pendek			Short-term Investment
Deposito Berjangka			Time Deposits
<u>Pihak Ketiga</u>			<u>Third Parties</u>
PT Bank MNC Internasional Tbk	139,500,000,000	90,000,000,000	PT Bank MNC Internasional Tbk
PT Bank Capital Indonesia Tbk	138,000,000,000	30,000,000,000	PT Bank Capital Indonesia Tbk
PT Bank Victoria International Tbk	40,000,000,000	6,500,000,000	PT Bank Victoria International Tbk
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	--	61,000,000,000	PT Bank JTrust Indonesia Tbk
Jumlah Deposito Berjangka	317,500,000,000	187,500,000,000	Total Time Deposits
Dikurangi:			Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1,165,323,272)	(214,606,467)	Allowance for Impairment Losses
Neto	316,334,676,728	187,285,393,533	Nett
Tingkat Suku Bunga Per Periode	7,00% - 7,75%	7,56% - 7,75%	Interest Rate per Period
Periode Jatuh Tempo	Lebih dari 3 Bulan - Sampai 12 Bulan More than 3 Months Until 12 Months	Lebih dari 3 Bulan - Sampai 12 Bulan More than 3 Months Until 12 Months	Maturity Period

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai
adalah sebagai berikut:

*The movements of allowance for impairment
losses are as follows:*

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp	
Saldo Awal	214,606,467	390,660,503	Beginning Balance
Penambahan (Catatan 30.d)	950,716,805	--	Additions (Note 30.d)
Pemulihan (Catatan 30.d)	--	(176,054,036)	Recovery (Note 30.d)
Saldo Akhir	1,165,323,272	214,606,467	Ending Balance

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan
kerugian penurunan nilai atas investasi
jangka pendek adalah cukup untuk menutup
kerugian yang mungkin timbul dari aktivitas
investasi.

*Management believes that the allowance of
impairment losses on short-term investment is
adequate to cover possible losses on
investment activities.*

10. Piutang Anggota Kliring

10. Clearing Members' Receivable

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp	
PT Milenium Penata Futures			PT Milenium Penata Futures
Dana Talangan anggota Kliring	5,754,800,031	5,754,800,031	Member Default Receivable
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(5,754,800,031)	(5,754,800,031)	Less: Allowance for Impairment Losses
Jumlah	--	--	Total

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

11. Piutang Penjaminan

11. Guarantee Receivables

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp	
Entitas Anak			Subsidiary
Piutang Penjaminan Pokok			Principal Guarantee Receivables
PT Konsorsium Ekonomi Kerakyatan	66,810,601,000	66,810,601,000	PT Konsorsium Ekonomi Kerakyatan
PT Komoditi Kejayaan Indonesia (KKI)	49,999,250,000	49,999,250,000	PT Komoditi Kejayaan Indonesia (KKI)
PT Gemah Ripah Panganku	36,563,625,000	36,563,625,000	PT Gemah Ripah Panganku
PT Akselerasi Sinergi Usaha Pangan	31,500,000,000	31,500,000,000	PT Akselerasi Sinergi Usaha Pangan
PT Aditama Anugerah Abadi	24,997,350,000	27,013,350,000	PT Aditama Anugerah Abadi
PT Pangan Indonesia Unggul (Pinggul)	15,750,000,000	15,750,000,000	PT Pangan Indonesia Unggul (Pinggul)
KMP Sarana Agro Lestari	2,835,000,000	2,835,000,000	KMP Sarana Agro Lestari
PT Atma Mulya Jaya (AMJ)	1,675,229,829	1,675,229,829	PT Atma Mulya Jaya (AMJ)
PT Royal Java Preanger	--	21,595,000,000	PT Royal Java Preanger
PT Pangan Artha Makmur	--	6,100,500,000	PT Pangan Artha Makmur
Sub Jumlah	230,131,055,829	259,842,555,829	Sub Total
Piutang Bunga Penjaminan			Interest Guarantee Receivables
PT Aditama Anugerah Abadi	4,800,760,577	--	PT Aditama Anugerah Abadi
PT Komoditi Kejayaan Indonesia (KKI)	3,700,816,535	--	PT Komoditi Kejayaan Indonesia (KKI)
PT Gemah Ripah Panganku	2,563,416,931	--	PT Gemah Ripah Panganku
PT Akselerasi Sinergi Usaha Pangan	2,098,118,750	--	PT Akselerasi Sinergi Usaha Pangan
PT Konsorsium Ekonomi Kerakyatan	1,535,823,315	--	PT Konsorsium Ekonomi Kerakyatan
PT Pangan Indonesia Unggul (Pinggul)	1,119,343,750	--	PT Pangan Indonesia Unggul (Pinggul)
PT Pangan Artha Makmur	312,176,666	--	PT Pangan Artha Makmur
KMP Sarana Agro Lestari	172,431,000	--	KMP Sarana Agro Lestari
Sub Jumlah	16,302,887,524	--	Sub Total
Jumlah	246,433,943,353	259,842,555,829	Total
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(39,037,687,034)	(4,211,326,599)	Less: Allowance for impairment losses
Neto	207,396,256,319	255,631,229,230	Net

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai
adalah sebagai berikut:

The movements of allowance for impairment
losses are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp	
Saldo Awal	4,211,326,599	2,899,856,877	Beginning Balance
Penambahan (Catatan 30.d)	34,826,360,435	1,311,469,722	Additions (Note 30.d)
Saldo Akhir	39,037,687,034	4,211,326,599	Ending Balance

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan
kerugian penurunan nilai atas piutang usaha
dari pihak ketiga adalah cukup untuk menutup
kerugian yang mungkin timbul dari tidak
tertagihnya piutang tersebut.

Management believes that the allowance of
impairment losses on trade receivables from
third parties is adequate to cover possible
losses on collectible receivables.

Piutang Penjaminan dibentuk berdasarkan
Surat Permohonan Persetujuan SOP dan IK
No. 742/Sekr-KBI/III/2018 yang mengacu
pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-
03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja
Sama Badan Usaha Milik Negara Jo.
Peraturan Menteri BUMN No. PER-
04/MBU/09/2017 dan SOP No.SOP/BD/001
telah disetujui oleh Dewan Komisaris tanggal
5 Maret 2018.

Guarantee Receivables are formed based on
Application for SOP and IK No. 742/Sekr-
KBI/III/2018 which refers to the Regulation of
the Minister of SOE No. PER-
03/MBU/08/2017 regarding Guidelines for
Cooperation of State-Owned Enterprises in
conjunction with SOE Minister Regulation No.
PER-04/MBU/09/2017 and SOP
No.SOP/BD/001, which was approved by the
Board of Commissioners on March 5, 2018.

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

Tabel di bawah ini merupakan ringkasan perjanjian piutang penjaminan antara Perusahaan dengan Mitra:

The table below summarizes the guarantee receivables agreements between the Company and its Partners:

Mitra/ Partner	Komoditas/ Commodities	No. Perjanjian/ Agreement No.	Jangka Waktu/ Time Period
PT Gemah Ripah Panganku	Kopi/ Coffee	008/Per-KPBI/II/2024	20 Februari/ February 20, 2024 - 20 Februari/ February 20, 2025
PT Komoditi Kejayaan Indonesia	Beras/ Rice	010/Per-KPBI/II/2024	22 Februari/ February 22, 2024 - 22 Februari/ February 2, 2025
PT Konsorsium Ekonomi Kerakyatan	Beras/ Rice	039/Per-KPBI/ADD/IX/2024 177/Pks-PRO/KEK/IX/2024	10 September/ September 10, 2024 - 10 September/ September 10, 2025
PT Akselerasi Sinergi Usaha Pangan	Kopi/ Coffee	006/Per-KPBI/II/2024 10/PKS/ASUPAN/II/2024	22 Februari/ February 22, 2024 - 22 Februari/ February 22, 2025
PT Royal Java Preanger	Kopi/ Coffee	035/Per-KPBI/VIII/2024	6 Agustus/ August 6, 2024 - 6 Agustus/ August 6, 2025
PT Pangan Indonesia Unggul	Kopi/ Coffee	009/Per-KPBI/II/2024 25/PKS/PINGGUL/II/2024 024/Per KPBI/VII/2024 641/PKS/VII/2024	20 Februari/ February 20, 2024 - 20 Februari/ February 20, 2025 3 Juli/ July 3, 2024 - 3 Juli/ July 3, 2025
PT Pangan Artha Makmur	Beras/ Rice	Addendum: 05/Per-KPBI/Add/X/2024 642/PKS/X/2024	24 Oktober/ October 24, 2024 - 24 Oktober/ October 24, 2025
Koperasi Produsen Multi Pihak Sarana Agro Lestari	Beras dan Gabah Kering/ Rice and Dry Paddy	028/Per/KPBI/X/2023 005/PKs/SANTRI/X/2023	20 Oktober/ October 20, 2023 - 20 Oktober/ October 20, 2026
PT Aditama Anugerah Abadi	Kopi/ Coffee	043/Per-KPBI/IX/2024 218/PKS-PRO/AAA/IX/2024	24 September/ September 24, 2024 - 24 September/ September 24, 2027

Berdasarkan perjanjian yang disajikan pada tabel di atas, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa apabila jangka waktu perjanjian telah berakhir, maka selama kewajiban terkait masih diakui dan belum diselesaikan (masih tercatat dalam pembukuan), jangka waktu perjanjian tersebut secara otomatis diperpanjang atau disesuaikan hingga kewajiban dimaksud dilunasi (Catatan 33).

Based on the agreement presented in the table above, there is a condition stating that if the term of the agreement has expired, but the related obligation is still recognized and has not been settled (is still recorded in the books), the term of the agreement is automatically extended or adjusted until the obligation in question is settled (Note 33).

Piutang penjaminan tersebut mengalami kondisi wanprestasi, di mana mitra tidak melakukan pembayaran sesuai ketentuan. Selanjutnya, Perusahaan telah menindaklanjuti perkara ini ke pengadilan. Pada tanggal 30 Januari 2026, kondisi wanprestasi ini telah memasuki proses persidangan gugatan perdata dengan nomor perkara 68/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan penunjukan hakim mediator untuk pelaksanaan mediasi perdamaian antara KPBI dan pihak mitra.

The receivables from guarantees are in default, as the counterparty has failed to make the required payments. Subsequently, the company has pursued legal action in court. On January 30, 2026, this breach of contract condition entered the civil lawsuit proceedings with case number 68/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst at the Central Jakarta District Court, with the appointment of a mediator judge to carry out mediation for an amicable settlement between KPBI and the partner party.

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

12. Piutang Lain-Lain

12. Other Receivables

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp	
Pengelolaan Gudang	2,356,343,540	722,326,149	Warehouse Management
Lainnya	1,146,761,654	292,877,092	Others
Jumlah	3,503,105,194	1,015,203,241	Total
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(36,844,188)	(5,301,515)	Less: Allowance for impairment losses
Neto	3,466,261,005	1,009,901,726	Net

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai
adalah sebagai berikut:

*The movements of allowance for impairment
losses are as follows:*

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp	
Saldo Awal	5,301,515	9,588,597	Beginning Balance
Pemulihan (Catatan 30.d)	--	(4,287,082)	Recovery (Note 30.d)
Penambahan (Catatan 30.d)	31,542,673	--	Additions (Note 30.d)
Saldo Akhir	36,844,188	5,301,515	Ending Balance

13. Persediaan Emas

13. Gold Inventories

Persediaan Emas telah dijual sesuai dengan
Berita Acara Penjualan Stok Emas KEMAS
tanggal 09 Mei 2025.

*Gold Inventories as of are sold according to
Minutes of Sales of KEMAS Gold Stock dated
May 09, 2025.*

Persediaan Emas per 31 Desember 2025 dan
2024 sebesar Nihil dan Rp712.707.181, terdiri
dari emas batangan yang disimpan di Kluis
Perusahaan.

*Gold Inventories as of December 31, 2025
and 2024 are amounting to Nil and
Rp712,707,181, which are represent gold
bars that stored at the Company' safe-deposit
box.*

Harga mengacu pada harga emas Aneka
Tambang.

*The gold price refers to Aneka Tambang's
price.*

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

14. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

14. Accrued Revenues

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp	
Bunga Deposito	7,179,922,690	4,102,948,266	Interest on Time Deposit
Pasar Fisik Timah	4,876,594,584	11,615,439,725	Tin Physical Market
Penjaminan	--	3,097,947,730	Guarantee Fee
Jumlah	12,056,517,274	18,816,335,721	Total

15. Biaya Dibayar di Muka

15. Prepaid Expenses

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp	
Pemeliharaan Aplikasi	1,822,443,224	516,459,315	Software Maintenance
Asuransi	965,801,532	255,131,315	Insurances
Lainnya	60,079,999	449,848,698	Others
Jumlah	2,848,324,755	1,221,439,328	Total

16. Perpajakan

16. Taxation

a. Pajak Dibayar Dimuka

a. Prepaid Taxes

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp	
Perusahaan			The Company
Pajak Pertambahan Nilai	--	391,407,651	VAT in
Entitas Anak			Subsidiary
Pajak Pertambahan Nilai	388,009,491	164,862,419	VAT in
Jumlah	388,009,491	556,270,070	Total

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

b. Utang Pajak

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp
Perusahaan		
PPN Keluaran	193,557,995	--
PPN Wajib Pungut	473,886,437	848,410,250
PPH Pasal 4 Ayat 2	5,006,888	7,360,029
PPH Pasal 21	977,790,820	1,381,476,610
PPH Pasal 22	8,699,044	107,712,123
PPH Pasal 23	75,820,785	14,829,720
PPH Pasal 29	2,569,988,104	1,303,095,745
Sub jumlah	4,304,750,073	3,662,884,476
Entitas Anak		
PPH Pasal 4 Ayat 2	812,500	--
PPH Pasal 21	101,905,334	135,721,993
PPH Pasal 23	129,189,809	144,340,231
PPH Pasal 25	--	67,332,253
PPH Pasal 29	804,674,702	1,203,681,143
Sub jumlah	1,036,582,345	1,551,075,620
Jumlah	5,341,332,418	5,213,960,096

The Company
VAT Out
Tax Collector VAT
Income Tax Article 4, paragraph 2
Income Tax Article 21
Income Tax Article 22
Income Tax Article 23
Income Tax Article 29
Subtotal
Subsidiary
Income Tax Article 4, paragraph 2
Income Tax Article 21
Income Tax Article 23
Income Tax Article 25
Income Tax Article 29
Subtotal
Total

c. Pajak Penghasilan Badan

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp
Pajak Kini		
Perusahaan	6,426,609,497	5,154,291,018
Entitas Anak	1,203,107,055	1,952,705,546
Sub Jumlah	7,629,716,552	7,106,996,564
Manfaat Tangguhan		
Perusahaan	(387,363,884)	(145,295,185)
Entitas Anak	(7,661,045,050)	(289,280,665)
Sub Jumlah	(8,048,408,934)	(434,575,850)
Jumlah	(418,692,382)	6,672,420,715

Current Tax
The Company
Subsidiary
Sub Total
Defered Benefit
The Company
Subsidiary
Sub Total
Total

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laba rugi dengan laba dan fiskal yang dihitung oleh Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Reconciliation between profit before income tax as shown in the profit and loss and the estimated taxable income for the years ended December 31, 2025 and 2024 is as follows:

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp	
Laba Konsolidasi Sebelum Pajak Final	76,086,505,685	98,319,505,265	Consolidated Profit Before Final Tax
Laba (Rugi) Sebelum Pajak dari Entitas Anak	28,839,859,860	(9,195,701,317)	Profit (Loss) Before Tax of Subsidiary
Laba Sebelum Pajak Perusahaan	104,926,365,545	89,123,803,948	Profit Before Tax of the Company
Pendapatan Bunga Pajak Final			Final Tax
Deposito	(71,188,955,825)	(73,198,976,740)	Time Deposits
Giro	(36,554,576,990)	(16,026,948,977)	Current Accounts
Reksadana	(9,798,086,788)	(11,557,101,122)	Mutual Fund
	(12,615,254,057)	(11,659,222,890)	
Beda Waktu:			Timing Differences:
Liabilitas Sewa	(7,305,436,440)	(7,305,436,440)	Lease Liabilities
Penyisihan Kerugian			Allowance for
Penurunan Nilai	345,069,939	(913,888,364)	Impairment Losses
Amortisasi Perangkat Lunak Aplikasi	143,977,650	(53,949,447)	Amortization of Software
Aset Hak Guna	7,305,436,440	6,432,105,234	Right of Use
Manfaat Imbalan Kerja			Employee Service Entitlement
Karyawan	1,345,671,138	1,160,440,956	Benefits
Cadangan Penjaminan	656,449,830	532,371,172	Guarantee Reserve
Penyusutan Aset Tetap	445,436,931	64,159,376	Depreciation of Fixed Assets
Jumlah Beda Waktu	2,936,605,489	(84,197,513)	Total Timing Differences
Beda Permanen:			Permanent Differences:
Gaji Pegawai	11,692,662,567	11,998,818,886	Employee Salary
Gaji Direksi dan Komisaris	9,112,258,805	7,769,005,180	Director and Commissioner Salary
Pengembangan Produk	3,566,132,316	2,477,289,973	Product Development
Humas dan Representasi	3,447,530,345	1,949,552,532	Public Relations and Representations
Jasa Konsultasi	1,694,506,915	2,067,141,379	Consultation Fee
Pengembangan SDM	1,553,963,222	1,240,513,813	Development
Pemeliharaan	1,550,203,618	1,803,065,693	Maintenance
Perjalanan Dinas	1,543,043,945	1,553,172,964	Business Travel
Pembinaan Program Kemitraan			Partnership and Community
Bina Lingkungan	951,281,392	768,926,459	Development Program
Internet dan Leased Line	859,454,230	823,472,195	Internet and Leased Line
Transportasi	750,176,815	738,457,195	Transportation
Sewa	432,864,024	70,149,293	Rent
Pemasaran dan Promosi	368,645,707	428,780,931	Marketing and Promotions
Listrik, Telepon dan Air	145,955,114	147,026,553	Utilities
Berbagai Jamuan	139,676,845	150,652,131	Various Entertainment
Alat Kantor	71,161,043	173,957,458	Supplies
Subsidi	28,112,245	145,837,891	Subsidies
Lainnya	982,880,768	866,195,416	Other
Jumlah Beda Permanen	38,890,509,915	35,172,015,940	Total Permanent Differences
Laba Fiskal	29,211,861,346	23,428,595,537	Taxable Income
Beban Pajak Kini	6,426,609,497	5,154,291,018	Current Tax Expenses
Kredit Pajak PPh Pasal 23	3,856,621,393	3,851,195,273	Tax Credit Income Tax Article 23
Jumlah Kurang Bayar	(2,569,988,103)	(1,303,095,745)	Total Under Payment

Perhitungan pajak penghasilan saat ini didasarkan pada estimasi penghasilan kena pajak. Jumlahnya dapat disesuaikan ketika Pengembalian Pajak Tahunan diisi dengan kantor pajak.

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak menggunakan tarif yang berlaku adalah sebagai berikut:

Current income tax computation are based on estimated taxable income. The amount may be adjusted when the Annual Tax Returns are filled with the tax office.

Reconciliation between tax expenses and result of multiplication of accounting profit before tax using the prevailing rate are as follows:

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp	
Laba Sebelum Pajak yang Disajikan dalam Laporan Laba Rugi Konsolidasi Tahunan	76,086,505,685	98,319,505,265	Profit before Tax as Presented in Yearly Consolidated Statements of Profit or Loss
Dikurangi Rugi/ Laba Sebelum Pajak Entitas Anak	28,839,859,860	(9,195,701,317)	Less Loss/ Profit Before Tax of Subsidiary
Laba Sebelum Pajak - Perusahaan	104,926,365,545	89,123,803,948	Profit Before Tax - the Company
Menetapkan Tarif Pajak Efektif (31 Desember 2025 dan 2024; 22%)	23,083,800,420	19,607,236,869	Enacted Effective Tax Rate (December 31, 2025 and 2024; 22%)
Pengaruh Pajak dari Penyesuaian Pajak	(16,657,190,921)	(14,452,945,850)	Tax Effect of Tax Adjustments
Pajak Kini	6,426,609,499	5,154,291,019	Current Tax
Pajak Tangguhan	(387,363,884)	(145,295,184)	Deferred Tax
Beban Pajak Penghasilan - Perusahaan	6,039,245,614	5,008,995,834	Income Tax Expense - the Company
Anak Perusahaan			Subsidiary
Pajak Kini	1,203,107,055	1,952,705,546	Current Tax
Pajak Tangguhan	(7,661,045,050)	(289,280,665)	Deferred Tax
Beban Pajak Penghasilan			Income Tax Expense
Anak Perusahaan	(6,457,937,996)	1,663,424,881	Subsidiary
Beban Pajak Penghasilan Konsolidasian	(418,692,382)	6,672,420,715	Consolidated Income Tax Expense

d. Pajak Tangguhan

d. Deferred Tax

	31 Des 2024/ Dec 31, 2024 Rp	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi/ Credited (Charged) to Profit or Loss Rp	Dikreditkan (Dibebankan) ke Pendapatan Komprehensif/ Credited (Charged) to Statement of Comprehensive Income Rp	31 Des 2025/ Dec 31, 2025 Rp	
Perusahaan					The Company
Cadangan Penjaminan	1,752,249,097	144,418,963	--	1,896,668,059	Guarantee Reserves
Liabilitas Imbalan Kerja	1,420,117,270	296,047,650	401,972,562	2,118,137,483	Employee Benefits Liability
Cadangan Penyisihan Investasi	139,504,926	(139,504,926)	--	--	Allowance for Impairment Marketable Securities
Aset Tetap dan Perangkat Lunak Aplikasi	354,263,836	(125,716,352)	--	228,547,485	Fixed Assets and Software
Cadangan Penyisihan Penurunan Nilai Kas dan Setara Kas	47,240,040	209,690,082	--	256,930,122	Allowance for Impairment Losses Cash and Cash Equivalent
Aset Hak Guna	(2,311,010,530)	1,487,455,823	--	(823,554,707)	Right of Use
Liabilitas Sewa	1,487,455,823	(1,487,455,823)	--	--	Lease Liabilities
Cadangan Penyisihan Penurunan Nilai Piutang	6,470,892	2,428,469	--	8,899,361	Allowance for Impairment Losses Guarantee Reserves
Jumlah	2,896,291,356	387,363,884	401,972,562	3,685,627,803	Total
Entitas Anak					Subsidiary
Cadangan Penyisihan Penurunan Nilai	930,259,180	7,661,045,050	--	8,591,304,230	Allowance for Impairment Losses
Jumlah	3,826,550,536	8,048,408,934	401,972,562	12,276,932,034	Total

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Des 2023/ Dec 31, 2023 Rp	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi/ Credited (Charged) to Profit or Loss Rp	Dikreditkan (Dibebankan) ke Pendapatan Komprehensif/ Credited (Charged) to Statement of Comprehensive Income Rp	31 Des 2024/ Dec 31, 2024 Rp	
Perusahaan					The Company
Cadangan Penjaminan	1,635,127,439	117,121,658	--	1,752,249,097	Guarantee Reserves
Liabilitas Imbalan Kerja	1,073,416,520	216,038,650	130,662,100	1,420,117,270	Employee Benefits Liability
Cadangan Penyisihan					Allowance for Impairment
Investasi	287,513,939	(148,009,013)	--	139,504,926	Marketable Securities
Aset Tetap	267,522,136	86,741,700	--	354,263,836	Fixed Assets
Cadangan Penyisihan					Allowance for Impairment
Penurunan Nilai Kas dan Setara Kas	98,044,343	(50,804,303)	--	47,240,040	Losses Cash and Cash Equivalent
Aset Hak Guna	(3,726,073,682)	1,415,063,152	--	(2,311,010,530)	Right of Use
Liabilitas Sewa	2,979,372,120	(1,491,916,297)	--	1,487,455,823	Lease Liabilities
Cadangan Penyisihan					Allowance for Impairment
Penurunan Nilai Piutang	5,411,254	1,059,638	--	6,470,892	Losses Guarantee Reserves
Jumlah	2,620,334,069	145,295,185	130,662,100	2,896,291,356	Total
Entitas Anak					Subsidiary
Cadangan Penyisihan					Allowance for Impairment
Penurunan Nilai	640,978,515	289,280,665	--	930,259,180	Losses
Jumlah	3,261,312,584	434,575,850	130,662,100	3,826,550,536	Total

17. Aset Tetap

17. Fixed Assets

	31 Desember/ December 31, 2025				
	Saldo awal/ Beginning balance Rp	Penambahan/ Additions Rp	Pengurangan/ Deductions Rp	Saldo akhir/ Ending balance Rp	
Harga perolehan:					Acquisition cost:
Pemilikan Langsung:					Direct Acquisitions:
Kendaraan Bermotor	6,335,025,798	414,218,125	311,350,000	6,437,893,923	Vehicles
Mesin Kantor	30,413,525,222	649,275,000	499,353,366	30,563,446,856	Office Machinery
Mesin Kantor - PMN	1,702,650,000	--	--	1,702,650,000	Office Machinery - PMN
Inventaris Golongan I	15,716,762,670	174,854,167	--	15,891,616,837	Supplies Group I
Inventaris Golongan II	346,832,452	--	32,910,500	313,921,952	Supplies Group II
Jumlah	54,514,796,142	1,242,722,292	843,613,866	54,913,904,568	Total
Akumulasi penyusutan:					Accumulated depreciation:
Pemilikan Langsung:					Direct Acquisitions:
Kendaraan Bermotor	2,483,446,915	1,170,946,056	311,350,000	3,343,042,971	Vehicles
Mesin Kantor	20,648,949,281	2,588,804,634	478,990,874	22,758,763,041	Office Machinery
Mesin Kantor - PMN	1,702,650,000	--	--	1,702,650,000	Office Machinery - PMN
Inventaris Golongan I	6,487,866,844	2,409,545,145	--	8,897,411,989	Supplies Group I
Inventaris Golongan II	352,829,056	2,150,003	32,910,500	322,068,559	Supplies Group II
Jumlah	31,675,742,095	6,171,445,838	823,251,374	37,023,936,560	Total
Nilai Tercatat	22,839,054,047			17,889,968,008	Carrying Amount

	31 Desember/ December 31, 2024				
	Saldo awal/ Beginning balance Rp	Penambahan/ Additions Rp	Pengurangan/ Deductions Rp	Saldo akhir/ Ending balance Rp	
Harga perolehan:					Acquisition cost:
Pemilikan Langsung:					Direct Acquisitions:
Kendaraan Bermotor	6,271,287,966	351,634,309	287,896,477	6,335,025,798	Vehicles
Mesin Kantor	23,941,944,805	7,085,295,530	613,715,113	30,413,525,222	Office Machinery
Mesin Kantor - PMN	1,702,650,000	--	--	1,702,650,000	Office Machinery - PMN
Inventaris Golongan I	15,579,065,762	240,000,000	102,303,092	15,716,762,670	Supplies Group I
Inventaris Golongan II	413,251,752	--	66,419,300	346,832,452	Supplies Group II
Jumlah	47,908,200,285	7,676,929,839	1,070,333,982	54,514,796,142	Total
Akumulasi penyusutan:					Accumulated depreciation:
Pemilikan Langsung:					Direct Acquisitions:
Kendaraan Bermotor	1,628,539,355	1,142,804,037	287,896,477	2,483,446,915	Vehicles
Mesin Kantor	20,093,710,498	1,168,953,891	613,715,108	20,648,949,281	Office Machinery
Mesin Kantor - PMN	1,702,650,000	--	--	1,702,650,000	Office Machinery - PMN
Inventaris Golongan I	3,795,774,466	2,794,395,460	102,303,083	6,487,866,844	Supplies Group I
Inventaris Golongan II	416,665,021	2,583,333	66,419,299	352,829,056	Supplies Group II
Jumlah	27,637,339,340	5,108,736,722	1,070,333,967	31,675,742,095	Total
Nilai Tercatat	20,270,860,945			22,839,054,047	Carrying Amount

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

Beban penyusutan aset tetap untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 dialokasikan ke beban umum dan administrasi masing-masing sebesar Rp6.171.445.838 dan Rp5.108.736.721 (Catatan 30.b).

Depreciation expenses of fixed assets for the years ended December 31, 2025 and 2024 are allocated to general and administrative expenses amounted to Rp6,171,445,838 and Rp5,108,736,721 respectively (Note 30.b).

Rincian keuntungan atas pelepasan aset tetap adalah sebagai berikut:

Details of gains on disposal of fixed assets are as follow:

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp	
Harga Jual	160,787,028	109,338,351	Selling Price
Nilai Buku	(20,362,492)	15	Net Book Value
Keuntungan Penjualan	140,424,536	109,338,366	Gain of Sales

Perusahaan telah mengasuransikan aset tetap berupa kendaraan bermotor pada 31 Desember 2025 dan 2024 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp5.050.660.000 dan Rp5.655.100.000.

The Company has insured fixed assets in the form of motor vehicles as of December 31, 2025 and 2024 with coverage value amounting to Rp5,050,660,000 and Rp5,655,100,000.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap pada tanggal pelaporan.

Management believes there are no events or changes in circumstances which may indicate impairment of fixed assets as of the reporting date.

18. Aset Takberwujud

18. Intangible Assets

	31 Desember/ December 31, 2025				
	Saldo awal/ Beginning balance Rp	Penambahan/ Additions Rp	Pengurangan/ Deductions Rp	Saldo akhir/ Ending balance Rp	
Harga Perolehan: Perangkat Lunak	48,075,376,178	4,336,224,489	--	52,411,600,667	Acquisition cost: Software
Pekerjaan Dalam Penyelesaian	--	136,500,000	--	136,500,000	Construction in Progress
Akumulasi Amortisasi Perangkat Lunak	45,743,265,581	1,224,661,345	--	46,967,926,926	Accumulated Amortization Software
Nilai Tercatat	2,332,110,597			5,580,173,741	Carrying Amount
	31 Desember/ December 31, 2024				
	Saldo awal/ Beginning balance Rp	Penambahan/ Additions Rp	Pengurangan/ Deductions Rp	Saldo akhir/ Ending balance Rp	
Harga Perolehan: Perangkat Lunak	47,859,049,647	216,326,531	--	48,075,376,178	Acquisition cost: Software
Akumulasi Amortisasi Perangkat Lunak	44,364,139,149	1,379,126,432	--	45,743,265,581	Accumulated Amortization Software
Nilai Tercatat	6,399,236,066			2,332,110,597	Carrying Amount

Biaya amortisasi aset takberwujud untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dialokasikan ke beban umum dan administratif (Catatan 30.b) masing-masing sebesar Rp1.224.661.345 dan Rp1.379.126.432.

Amortization expenses of intangible assets for the years ended December 31, 2025 and 2024 are allocated to general and administrative expenses (Note 30.b) amounted to Rp1,224,661,345 and Rp1,379,126,432, respectively.

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat indikasi adanya penurunan nilai aset takberwujud.

Management believes that there is no impairment of intangible assets.

19. Uang Jaminan

19. Security Deposits

	31 Desember/ December 31, 2025 dan 2024	
	Rp	
Jaminan Sewa Gedung	75,591,898	<i>Building Rent Deposits</i>
Jaminan Taksi	500,000	<i>Taxi Deposits</i>
Jumlah	76,091,898	Total
Jaminan Sewa Gedung merupakan uang jaminan atas sewa ruangan di Menara Danareksa Lantai 6 antara Perusahaan dengan PT PP (Persero) berdasarkan Perjanjian PSM/MD/X/2022 dan No.06/ADD I-PSM/MD/III/2023 tanggal 27 Maret 2023.		
<i>Building Rent Deposit is security deposit for room rental at Danareksa Tower 6rd Floor between the Company and PT PP (Persero) based on Agreement PSM/MD/X/2022 and No.06/ADD I-PSM/MD/III/2023 dated March 27, 2023.</i>		
Jaminan Taksi merupakan uang jaminan untuk voucher taksi yang dibayarkan kepada Blue Bird.		
<i>Taxi Security is a security deposit for taxi vouchers that are paid to Blue Bird.</i>		
Jaminan Telepon merupakan uang jaminan untuk layanan hotline untuk pilar Perdagangan Berjangka Komoditi, Resi Gudang, dan Pasar Fisik Komoditas.		
<i>Telephone Guarantee is security deposit for hotline service pillars for Commodity Futures Trading, Warehouse Receipt, and Physical Commodity Market.</i>		

20. Aset Lainnya

20. Other Assets

	31 Desember/ December 31, 2025 dan 2024	
	Rp	
Piutang Talangan		<i>Member Default Receivable</i>
PT Danpac Futures	90,050,845,953	<i>PT Danpac Futures</i>
PT Sarana Karindo	670,927,092	<i>PT Sarana Karindo</i>
FAMNI	493,819,200	<i>FAMNI</i>
Jumlah	91,215,592,245	Total
Dikurangi - Cadangan Kerugian		<i>Less - Allowance for</i>
Penurunan Nilai	(91,215,592,245)	<i>Impairment Losses</i>
Neto	--	Net
Piutang Talangan kepada PT Danpac Futures ("DF") merupakan wanprestasi/gagal bayar transaksi DF atas kontrak terbuka berupa 214 lot buy kontrak GU1TF dan 126 lot buy kontrak KGEUSD tanggal 5 Juni 2013. Pada		
<i>Member Default Receivable from PT Danpac Futures ("DF") represents default against customer transaction over an open derivative contract comprising 214 buy lots under GU1TF contract and 126 buy lots under</i>		

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

tanggal 13 Juni 2017, Perusahaan telah menerima Putusan Mahkamah Agung Nomor 549/K/Pdt/2017 tentang pengajuan banding DF tanggal 4 Februari 2016 dengan putusan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 6 Juni 2016 No. 221/PDT/2016/PT.DKI (Catatan 33.b).

KGEUSD dated June 5, 2013. On June 13, 2017, the Company received Supreme Court Judgement number 549/K/Pdt/2017 regarding the submission of appeal to the Supreme Court by DF dated February 4, 2016 in which the verdict confirms the decision of the Jakarta High Court on June 6, 2016. No. 221/PDT/2016/PT.DKI (Note 33.b).

21. Investasi Saham

Investasi pada 31 Desember 2025 dan 2024 merupakan penyertaan saham pada PT Bursa Berjangka Jakarta sebesar Rp3.500.000.000.

21. Investment in Shares

Investment in Shares as of December 31, 2025 and 2024 represent placement of shares on PT Bursa Berjangka Jakarta amounting to Rp3,500,000,000.

22. Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa

22. Right-of-Use-Assets and Lease Liabilities

a. Aset Hak Guna

	31 Desember/ December 31, 2025				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Aset Sewa Guna Usaha					Leased Assets
Bangunan	20,324,038,265	--	--	20,324,038,265	Building
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	(9,819,444,946)	(6,761,162,832)	--	(16,580,607,778)	Building
Nilai Tercatat	<u>10,504,593,319</u>			<u>3,743,430,487</u>	Carrying Value
	31 Desember/ December 31, 2024				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Aset Sewa Guna Usaha					Leased Assets
Bangunan	20,324,038,265	--	--	20,324,038,265	Building
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	(3,387,339,712)	(6,432,105,234)	--	(9,819,444,946)	Building
Nilai Tercatat	<u>16,936,698,553</u>			<u>10,504,593,319</u>	Carrying Value

Beban penyusutan aset hak guna untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 dialokasikan ke beban umum dan administratif (Catatan 30.b) masing-masing sebesar Rp6.761.162.832 dan Rp6.432.105.234.

Depreciation expenses of right of use assets for the years ended December 31, 2025 and 2024 are allocated to general and administrative expenses (Note 30.b) amounted to Rp6,761,162,832 and Rp6,432,105,234, respectively.

b. Liabilitas Sewa

Berikut ini ringkasan komponen perubahan liabilitas yang timbul dari sewa:

b. Lease Liabilities

Here in below is the summary of components of change in liabilities arising from the lease:

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember 2025/ December 31, 2025 Rp	31 Desember 2024/ December 31, 2024 Rp	
Saldo Awal	6,761,162,832	13,542,600,547	Beginning Balance
Arus Kas	(7,305,436,440)	(7,305,436,440)	Cash Flows
Perubahan nonkas			Non-cash changes
- Penambahan	544,273,608	523,998,725	Additions -
Saldo Akhir	--	6,761,162,832	Ending Balance

Berikut ini ringkasan yang disajikan pada laporan laba rugi:

The following summarize the balances presented in statement of profit or loss:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025 Rp	31 Desember 2024/ December 31, 2024 Rp	
Beban terkait liabilitas sewa dengan aset bernilai rendah atau jangka pendek	433,971,572	157,746,800	Expenses relating to short-term or low value asset liabilities

23. Beban Akruai

23. Accruals

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp	
Jasa Produksi dan Tantiem	14,717,801,812	11,145,926,320	Production Service and Tantiem
Beban Umum dan Administrasi	7,335,293,730	5,856,013,091	General and Administrative Expenses
Jumlah	22,053,095,542	17,001,939,411	Total

24. Liabilitas Lain-lain

24. Other Liabilities

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp	
Pengadaan Vendor Perangkat Lunak	3,609,242,752	269,491,702	Procurement Software Vendor
PT Bursa Berjangka Jakarta	465,919,764	145,945,136	PT Jakarta Futures Exchange
Lain-lain	444,730,868	401,844,829	Other
Jumlah	4,519,893,384	817,281,667	Total

25. Utang Bank

25. Bank Loan

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp	
Rupiah			Rupiah
Pihak Ketiga			Third Parties
PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk	--	14,175,000,000	PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk
Jumlah	--	14,175,000,000	Total

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB)

Berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No.19/KKO-KO2/SPPK/2024, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja-revolving yang diperoleh dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dengan plafon sebesar Rp130.000.000.000 dengan suku bunga mengambang 9,50% p.a dengan jangka waktu sampai dengan 16 Mei 2025.

Pada tahun 2024, KPBI menerima pencairan dari BJB sebesar Rp14.175.000.000. Pada tanggal 16 April 2025, KPBI telah melunasi utang bank tersebut.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB)

Based on the Credit Offer Letter (SPPK) No. 19/KKO-KO2/SPPK/2024, dated May 16, 2024, KPBI, has obtained a revolving working capital credit facility from PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk with a ceiling 9,5% of Rp130,000,000,000 and a term until May 16, 2025.

In 2024, KPBI received loan disbursement from BJB amounting to Rp14,175,000,000. As of April 16, 2025, KPBI has fully repaid the bank loan.

26. Liabilitas Imbalan Kerja

26. Liabilities for Employee Benefits

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp	
Program Pesangon	8,715,183,438	6,126,637,574	Severance Plan
Cuti Besar	912,714,212	328,440,927	Service Leave
Jumlah	9,627,897,650	6,455,078,501	Total

Program Pensiun

Grup mempunyai program pensiun yang meliputi seluruh karyawan yang berhak. Program pensiun tersebut dikelola oleh PT Asuransi Jiwa IFG Life untuk karyawan yang masuk sebelum tahun 2007 dan DPLK BNI untuk karyawan yang masuk setelah tahun 2007.

Program pensiun iuran pasti

Program iuran pasti didanai dari kontribusi Grup sebesar 6,75% dan kontribusi karyawan sebesar 2,25% dari gaji pokok. Program pensiun BPJS Ketenagakerjaan dihitung sebesar 1% dari upah pegawai.

Program Pesangon

Grup diharuskan menyediakan imbalan pesangon minimum yang diatur dalam UU No. 6/2023 yang merupakan kewajiban imbalan pasti. Jika manfaat pensiun berdasarkan UU No. 6/2023 lebih besar, selisih tersebut diakui sebagai bagian dari liabilitas imbalan pensiun.

Kontribusi yang dibayarkan Grup diakui sebagai beban manajemen dan karyawan adalah sebesar Rp1.340.998.149 selama

Pension Plan

The Group has defined contribution pension plan covering substantially all of its eligible employees. This pension plan is managed by PT Asuransi Jiwa IFG Life for employees who joined before 2007 and DPLK BNI for employees who joined on and after 2007.

Defined contribution pension plan

The pension plan is funded by contribution from the Group at 6.75% and the employees at maximum of 2.25% of the basic salary. Benefit plan program from BPJS calculated 1% from salary.

Severance Program

The Group are required to provide minimum pension benefits as stipulated in the Law No. 6/2023 which represents an underlying defined benefit obligation. If the pension benefits under Law No. 6/2023 are higher, the difference is recorded as part of the overall pension benefits obligation.

The contributions paid by the Group recognized as management and employee expenses amounted to Rp1,340,998,149

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

tahun 2025 dan Rp178.447.090 selama tahun 2024.

during the year 2025, and were Rp178,447,090 during the year 2024.

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

The defined benefit pension plan typically exposes the Group to actuarial risks such as interest rate risk and salary risk.

Liabilitas imbalan kerja ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* dengan asumsi sebagai berikut:

The employee benefit liabilities were determined using the *Projected Unit Credit* method with the following assumptions:

	31 Desember/ December 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	
Tingkat Diskonto per Tahun	6.4%	6.9%	Discount Rate per Annum
Tingkat Kenaikan Gaji per Tahun	12%	12%	Salary Increase Rate per Annum
Tingkat Mortalita	TMI IV (2019)	TMI IV (2019)	Mortality Rate
Usia Pensiun	56 tahun/ years	56 tahun/ years	Retirement Age

Tabel berikut mengikhtisarkan komponen dari beban imbalan bersih yang diakui dalam laba rugi konsolidasian dan status pendanaan dan jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan untuk liabilitas imbalan kerja yang dihitung oleh V. Agus Basuki, aktuaris independen, untuk tahun 2025 dan 2024.

The following table summarizes the components of net benefits expenses recognized in the consolidated of profit and loss the funded status and amounts recognized in the balance sheets for the employee benefits obligation as calculated by an independent actuary, V. Agus Basuki for 2025 and 2024.

Liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Employment benefits liabilities as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

31 Desember/ December 31, 2025			
Rp			
Program Pensiun/ Pension Plan	Cuti Besar/ Service Leave	Jumlah/ Total	
Nilai Kini Liabilitas Imbalan Pasti	8,715,183,438	912,714,212	9,627,897,650
Liabilitas Bersih	8,715,183,438	912,714,212	9,627,897,650
Present Value of Defined Benefits Obligation Net Liabilities			
31 Desember/ December 31, 2024			
Rp			
Program Pensiun/ Pension Plan	Cuti Besar/ Service Leave	Jumlah/ Total	
Nilai Kini Liabilitas Imbalan Pasti	6,126,637,574	328,440,927	6,455,078,501
Liabilitas Bersih	6,126,637,574	328,440,927	6,455,078,501
Present Value of Defined Benefits Obligation Net Liabilities			

Mutasi nilai kini kewajiban pasti adalah sebagai berikut:

Movements in the present value of defined benefit obligation are as follows:

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

31 Desember/ December 31, 2025

	Rp			
	Program Pensiun/ Pension Plan	Cuti Besar/ Service Leave	Jumlah/ Total	
Saldo Awal Liabilitas	6,126,637,574	328,440,927	6,455,078,501	Beginning Balance of Liabilities
Biaya Jasa Kini	1,390,403,966	908,139,047	2,298,543,013	Current Service Cost
Biaya Bunga	376,855,641	11,270,633	388,126,274	Interest Expenses
Pembayaran Manfaat	(1,005,861,754)	(335,136,395)	(1,340,998,149)	Benefits Payments
Kerugian (Keuntungan) Bersih Aktuarial yang Diakui	1,827,148,011	--	1,827,148,011	Recognized Actuarial (Gain) Losses
Saldo Liabilitas Akhir	8,715,183,438	912,714,212	9,627,897,650	Ending Balance of Liabilities

31 Desember/ December 31, 2024

	Rp			
	Program Pensiun/ Pension Plan	Cuti Besar/ Service Leave	Jumlah/ Total	
Saldo Awal Liabilitas	3,887,299,266	991,866,732	4,879,165,998	Beginning Balance of Liabilities
Biaya Jasa Kini	927,917,536	34,927,302	962,844,838	Current Service Cost
Biaya Bunga	169,129,543	28,466,575	197,596,118	Interest Expenses
Pembayaran Manfaat	(178,447,090)	--	(178,447,090)	Benefits Payments
Kerugian (Keuntungan) Bersih Aktuarial yang Diakui	1,320,738,320	(726,819,682)	593,918,638	Recognized Actuarial (Gain) Losses
Saldo Liabilitas Akhir	6,126,637,574	328,440,927	6,455,078,501	Ending Balance of Liabilities

Rincian beban imbalan kerja yang diakui dalam laba rugi konsolidasian dan pengukuran kembali dari aset (liabilitas) yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

Details of employment benefits expense recognized in the consolidated profit or loss and remeasurement of assets (liabilities) recognized in the consolidated other comprehensive income are as follows:

31 Desember/ December 31, 2025

	Rp			
	Program Pensiun/ Pension Plan	Cuti Besar/ Service Leave	Jumlah/ Total	
Biaya Jasa Kini	1,390,403,966	908,139,047	2,298,543,013	Current Service Cost
Biaya Bunga	376,855,641	11,270,633	388,126,274	Interest Expenses
Beban Tahun Berjalan Diakui di Laba Rugi	1,767,259,607	919,409,680	2,686,669,287	Expense for the Year Recognized in Profit Loss
Kerugian (Keuntungan) Bersih Aktuarial yang Diakui	1,827,148,011	--	1,827,148,011	Recognized Actuarial (Gain) Losses
Beban (Penghasilan) Tahun Berjalan Diakui di Penghasilan Komprehensif Lain	1,827,148,011	--	1,827,148,011	Expense (Income) for the Year Recognized in Other Comprehensive Income

31 Desember/ December 31, 2024

	Rp			
	Program Pensiun/ Pension Plan	Cuti Besar/ Service Leave	Jumlah/ Total	
Biaya Jasa Kini	927,917,536	34,927,302	962,844,838	Current Service Cost
Biaya Bunga	169,129,543	28,466,575	197,596,118	Interest Expenses
Beban Tahun Berjalan Diakui di Laba Rugi	1,097,047,079	63,393,877	1,160,440,956	Expense for the Year Recognized in Profit Loss
Kerugian (Keuntungan) Bersih Aktuarial yang Diakui	1,320,738,320	(726,819,682)	593,918,638	Recognized Actuarial (Gain) Losses
Beban (Penghasilan) Tahun Berjalan Diakui di Penghasilan Komprehensif Lain	1,320,738,320	(726,819,682)	593,918,638	Expense (Income) for the Year Recognized in Other Comprehensive Income

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

Mutasi dari penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

Movement of the consolidated other comprehensive income are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp	
Saldo Awal	(557,879,084)	36,039,554	<i>Beginning Balance</i>
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan	(1,827,148,011)	(593,918,638)	<i>Other Comprehensive Income Current Year</i>
Saldo Akhir	(2,385,027,095)	(557,879,084)	<i>Ending Balance</i>

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Interest Risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Salary Risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

	Nilai Kewajiban Imbalan Kerja/ Present Value of Benefit Obligations		
	2025 Rp	2024 Rp	
Asumsi Tingkat Diskonto:			<i>Discount Rate Assumption:</i>
Tingkat Diskonto + 1%	7,896,415,145	5,521,624,731	<i>Discount Rate + 1%</i>
Tingkat Diskonto - 1%	9,651,877,760	6,821,169,320	<i>Discount Rate - 1%</i>
Asumsi Tingkat Kenaikan Gaji:			<i>Salary Increment Rate Assumption:</i>
Tingkat Kenaikan Gaji + 1%	9,584,678,420	6,906,869,860	<i>Salary Increment Rate + 1%</i>
Tingkat Kenaikan Gaji - 1%	7,936,165,223	5,429,985,734	<i>Salary Increment Rate - 1%</i>

27. Cadangan Penjaminan

27. Guarantee Reserves

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp	
Saldo awal	7,964,768,622	7,432,397,450	<i>Beginning Balance</i>
Pembentukan melalui Laba Rugi	656,449,830	532,371,172	<i>Provision through Profit or Loss</i>
Saldo Akhir	8,621,218,452	7,964,768,622	<i>Ending Balance</i>

Grup setiap bulan membentuk cadangan penjaminan sebesar 2,5% dari jumlah pendapatan neto kliring untuk mengantisipasi kerugian lembaga kliring akibat timbulnya kegagalan penyelesaian anggota kliring. Persentase cadangan penjaminan tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Direksi Nomor 44/K-KBI/LGL/XI/2024 tentang Kebijakan Umum Akuntansi PT Kliring Berjangka Indonesia.

The Group establishes in monthly basis a guarantee reserve of 2.5% of the total net income of the clearing house in anticipation of the loss of the clearing house due to the emergence of the settlement failure of the clearing members. The percentage of the guarantee reserve is based on the Board of Directors' Decree Number 44/K-KBI/LGL/XI/2024 on the General Accounting Policy of PT Kliring Berjangka Indonesia.

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

Beban penjaminan yang telah dibebankan pada laba rugi untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 dengan masing-masing sebesar Rp656.449.830 dan Rp532.371.172. (Catatan 30.c).

Guarantee expenses charged to profit or loss for the years ended December 31, 2025 and 2024 are Rp656,449,830 and Rp532,371,172, respectively (Note 30.c).

28. Modal Saham, Saldo Laba - Ditentukan Penggunaannya dan Dividen

a. Modal Saham

Komposisi pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2025 and 2024		
	Jumlah Saham/ Number of Shares	Presentasi Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah Modal Disetor/ Total Paid Up Capital
Pemegang Saham			
PT Danareksa (Persero)	499,999	99.9998%	499,999,000,000
Pemerintah Republik Indonesia	1	0.0002%	1,000,000
Jumlah	500,000	100%	500,000,000,000

Shareholders
PT Danareksa (Persero)
Pemerintah Republik Indonesia
Total

b. Saldo Laba

Atribusi Penggunaan Laba Bersih Tahun buku 2023

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 36 pada tanggal 18 Desember 2024 menyatakan penetapan penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada Perusahaan tahun buku 2023, sebagai berikut:

- Dividen tunai sebesar Rp27.865.782.669 untuk para pemegang saham; dan
- Cadangan wajib sebesar Rp15.229.595.640.

28. Share Capital, Retained Earnings - Appropriated and Dividend

a. Share Capital

The composition of shareholders as of December 31, 2025 and 2024, are as follows:

b. Retained Earnings

Attribution of Utilization of Net Income for the 2023 Fiscal Year

According to the Deed of Resolution of Shareholders Number 36 dated December 18, 2024, it states the determination of the utilization of net income attributable to the Company for the fiscal year 2023, as follows:

- Cash dividend is amounting to Rp27,865,782,669 for shareholders; and
- Mandatory reserves is amounting to Rp15,229,595,640.

29. Pendapatan Operasional

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp
Resi Gudang	31,119,991,334	35,920,953,990
Kliring	26,250,062,741	21,239,730,398
Pasar Fisik Komoditas	21,353,298,832	16,685,099,799
Iuran Anggota	8,318,596,499	8,604,600,500
Sub jumlah	87,041,949,406	82,450,384,687
Operasional Lainnya:		
Pendapatan Dana Penyelesaian Transaksi	82,829,290,761	74,834,616,888
Bunga Dana Perusahaan	23,998,978,208	16,075,426,040
Investasi Reksadana	9,798,086,788	11,557,101,122
Pendapatan Aset Digital	5,428,484,617	2,548,347,861
Sub jumlah	122,054,840,374	105,015,491,911
Jumlah	209,096,789,780	187,465,876,598

29. Operating Income

Warehouse Receipt Income
Clearing Fees
Commodity Physical Market
Membership Fee
Subtotal

Other Operating Income:
Settlement Fund Revenue
Interest from Corporate Fund
Mutual Fund Investment
Digital Asset Revenue
Subtotal
Total

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

30. Beban Operasional

a. Beban Manajemen dan Pegawai

	31 Desember/ December 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024
	Rp	Rp
Gaji dan Tunjangan Pegawai	26,498,396,548	23,562,805,263
Gaji dan Tunjangan Manajemen	20,952,078,872	20,416,073,886
Imbalan Kerja (Catatan 26)	2,686,669,287	1,160,440,956
Jumlah	50,137,144,707	45,139,320,104

*Employees Salaries and Allowance
Management Salaries and Allowance
Employee Benefits (Note 26)
Total*

b. Beban Umum dan Administrasi

	31 Desember/ December 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024
	Rp	Rp
Forum Kerjasama dan Pengembangan Produk	7,825,668,947	5,863,649,066
Penyusutan Aset Hak Guna (Catatan 22a)	6,761,162,832	6,432,105,234
Penyusutan Aset Tetap (Catatan 17)	6,171,445,838	5,108,736,721
Jasa Konsultan	4,929,221,630	5,269,242,661
Perjalanan Dinas	3,903,000,341	4,177,251,901
Beban Pengembangan SDM	3,792,305,875	3,001,046,689
Humas dan Representasi	3,535,498,188	2,087,389,573
Pemeliharaan	3,382,966,626	3,981,170,449
Transportasi dan Fasilitas Kendaraan	2,483,277,373	2,260,768,115
Internet dan Website	1,928,045,754	1,852,694,902
Amortisasi Aset Takberwujud (Catatan 18)	1,224,661,345	1,379,126,432
Biaya Manajemen Induk	1,042,244,955	1,125,000,000
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	951,281,392	768,926,459
Pemasaran dan Promosi	826,141,044	1,035,965,688
Sewa dan Fasilitas Kantor	433,971,572	157,746,800
Listrik, Telepon dan Air	327,087,792	330,622,980
Peralatan dan Perlengkapan Kantor	189,713,302	410,489,391
Lainnya	109,506,177	80,851,790
Jumlah	49,817,200,984	45,322,784,851

*Forum of Cooperation and Product Development
Depreciations of Right-of-Use of Asset (Note 22a)
Depreciation of Fixed Assets (Note 17)
Consultant Services Fee
Business Travelling
HR Development
Public Relation and Representations
Maintenance
Transportation and Car Facility
Internet and Website
Amortization of Intangible Assets (Note 18)
Management Fee Holding
Partnership and Community Development Program Expense
Marketing and Promotion
Office Building Rent and Facilities
Electricity, Telephone and Water
Office Supply
Others
Total*

c. Pembentukan Cadangan Dana Jaminan

	31 Desember/ December 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024
	Rp	Rp
Dana Jaminan (Catatan 27)	656,449,830	532,371,172

Guarantee Reserves (Note 27)

d. Beban (Pemulihan) Penurunan Nilai

	31 Desember/ December 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024
	Rp	Rp
Piutang Penjaminan (Catatan 11)	34,826,360,434	1,311,469,722
Investasi Jangka Pendek (Catatan 9)	950,716,805	(176,054,036)
Piutang Lainnya dan Pihak Berelasi	31,542,673	4,816,538
Kas dan Setara Kas (Catatan 4)	(8,917,719)	(66,440,238)
Efek-Efek (Catatan 8)	(634,113,302)	(672,768,240)
Jumlah	35,168,001,989	401,023,746

*Guarantee Receivable (Note 11)
Short-term Investment (Note 9)
Other Receivables and Related Party
Cash and Cash Equivalents (Note 4)
Marketable Securities (Note 8)
Total*

31. Pendapatan (Beban) Non Operasional

a. Pendapatan Non Operasional

	31 Desember/ December 31, 2024 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp
Lainnya	3,883,632,831	3,491,218,176
Jumlah	3,883,632,831	3,491,218,176

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, pendapatan lainnya merupakan pendapatan atas pembalik akrual yang dibentuk atas kegiatan pegawai dan penjualan aset.

b. Beban Non Operasional

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp
Beban Olahraga & Rekreasi	178,755,763	164,786,528
Beban Administrasi	150,547,336	180,224,694
Denda Pajak	128,577,565	9,764,040
Berbagai Jamuan	53,760,215	102,041,840
Rupa-Rupa Keperluan Dapur	39,923,200	51,984,740
Obat - Obatan	17,920,430	5,298,089
Bunga atas Liabilitas Sewa	544,273,608	523,998,725
Lain-Lain	1,361,298	203,990,979
Jumlah	1,115,119,415	1,242,089,635

31. Non-Operating Income (Expenses)

a. Non-Operating Income

	31 Desember/ December 31, 2024 Rp	
	3,491,218,176	Others
	3,491,218,176	Total

As of December 31, 2025, and 2024, other income consisted of income from the reversal of accruals formed for employee activities and asset sales.

b. Non-Operating Expenses

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp	
	164,786,528		Sports & Recreations
	180,224,694		Administrative Expenses
	9,764,040		Tax Penalty
	102,041,840		Entertainments
	51,984,740		Miscellaneous Pantry Expenses
	5,298,089		Medication
	523,998,725		Lease Liabilities Interest Expense
	203,990,979		Others
	1,242,089,635		Total

32. Perikatan dan Perjanjian

a. Perjanjian Kerjasama Perusahaan dengan Bank Penyimpanan Dana Segregated Fund
Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Perusahaan dengan beberapa Bank adalah untuk menyimpan dana dari anggota kliring dan memberikan layanan perbankan dalam melakukan pembayaran penyelesaian transaksi bursa. Beberapa Bank yang melakukan perjanjian kerjasama dengan Perusahaan adalah sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 14 Desember 2000, Perusahaan menunjuk PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai bank penyimpan dana margin dan lalu lintas pembayaran transaksi kontrak berjangka. Penunjukkan PT Bank CIMB Niaga Tbk tersebut telah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) No. 03/BAPPEBTI/SP/XII/2000 tanggal 8 Desember 2000 sebagaimana diatur

32. Contracts and Agreements

a. The Agreement between the Company and Bank for Segregated Fund Saving.

The agreements entered into between the Company and several Banks are for saving funds of clearing members and providing banking services in exchange settlement payments. The Banks which entered into the agreement with the Company are as follows:

- 1) On December 14, 2000, the Company assigned PT Bank CIMB Niaga Tbk as beneficiary bank for margin deposits and payments, and futures contract settlement. The assignment of PT CIMB Niaga Bank Tbk has been approved by the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti) under letter No. 03/BAPPEBTI/SP/XII/2000 dated December 8, 2000 as provided in Law No. 32 of 1997 Regarding Futures

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

dalam Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 2011.

Pada tanggal 4 Februari 2022, kerjasama ini telah diperpanjang sesuai dengan surat No: 01/Add/Per-KBI/II/2022 dan No: 001/PKS/FIG-NBFI/II/2022 yang berlaku 5 (tahun) sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2026.

- 2) Pada tanggal 19 Mei 2004, Perusahaan menunjuk PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") sebagai bank penyimpan dana margin dan lalu lintas pembayaran perdagangan berjangka berlaku selama 5 (lima) tahun sejak 1 Juni 2004 sampai dengan 31 Mei 2009.

Pada tanggal 28 Mei 2021, kerjasama ini telah diperpanjang sesuai dengan surat No: 04/Add/Per-KBI/V/2021 dan No: 006/PKS/DCM/2021 yang berlaku sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2026.

- 3) Pada tanggal 27 Agustus 2009, Perusahaan menunjuk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai bank penyimpan dana dan lalu lintas pembayaran perdagangan berjangka berlaku selama 4 (empat) tahun sesuai dengan perjanjian No: 14/Perj-KBI/VIII/2009 mulai tanggal 27 Agustus 2009 sampai dengan 27 Agustus 2013.

Pada tanggal 26 Januari 2022, Perusahaan menunjuk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai bank penyimpan dana dan lalu lintas pembayaran perdagangan berjangka berlaku selama 5 (lima) tahun sesuai dengan perjanjian No: 02/Add/Per-KBI/I/2022 mulai tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan 26 Agustus 2026.

- 4) Pada tanggal 14 Oktober 2009, Perusahaan menunjuk PT Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk d.h Bank Windu Kentjana International sebagai bank penyimpan dana dan lalu lintas pembayaran perdagangan berjangka berlaku selama 2 (dua) tahun mulai tanggal 14 Oktober 2009 sampai dengan 14 Oktober 2011. Kedua pihak

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

*For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)*

Trading, which was amended with Law No.10 of 2011.

On February 4, 2022, this agreement has been extended in accordance with letter No: 01/Add/Per-KBI/II/2022 and No: 001/PKS/FIG-NBFI/II/2022 which is valid for 5 (years) from December 14, 2021 to December 13, 2026.

- 2) *On May 19, 2004, the Company assigned and added PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") as beneficiary bank for margin deposits and payments and futures contract settlement, valid for 5 (five) years since June 1, 2004 up to May 31, 2009.*

On May 28, 2021, this cooperation was extended in accordance with letter No: 04/add/Per-KBI/V/2021 and No: 006/PKS/DCM/2021, valid since May 30, 2021 until May 29, 2026.

- 3) *On August 27, 2009, the Company appointed PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk as beneficiary bank for margin deposits and payments, valid for 4 (four) years according to Agreement Letter No: 14/Perj-KBI/VIII/2009 since August 27, 2009 until August 27, 2013.*

On January 26, 2022, the Company appointed PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk as beneficiary bank for margin deposits and payments valid for 5 (five) years in accordance with agreement No: 02/Add/Per-KBI/I/2022 from August 27, 2021 to August 26, 2026.

- 4) *On October 14, 2009, the Company assigned PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (formerly known as PT Bank Windu Kentjana International Tbk) as the custodian bank for margin deposits, payment transactions, and settlement of futures trading, valid for 2 (two) years from October 14, 2009 up to October 14, 2011. The agreement was*

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

telah menyepakati perpanjangan perjanjian dengan nomor 01/Add/Per-KBI/I/2022 dan No:006/PKS-LGL/CCBI/I/2022 terhitung sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan 30 Desember 2026.

Pada tanggal 26 Januari 2022, Perusahaan menunjuk PT Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk d.h Bank Windu Kentjana International sebagai bank penyimpanan dana dan lalu lintas pembayaran perdagangan berjangka berlaku selama 5 (lima) tahun mulai tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan 30 Desember 2026.

- 5) Pada tanggal 27 Juni 2014, Perusahaan menunjuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai bank penyimpanan dana dan lalu lintas pembayaran perdagangan berjangka berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan 27 Juni 2017.

Pada tanggal 26 Juni 2025, kerjasama ini telah diperpanjang sesuai dengan surat No: 07.A/P-KBI/VI/2025 SEVP.PKS/018/2025 yang berlaku sejak tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan tanggal 26 Juni 2030.

- 6) Pada tanggal 27 Februari 2019, Perusahaan menunjuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai bank penyimpanan dana dan lalu lintas pembayaran perdagangan berjangka berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai 27 Februari 2019 sampai 27 Februari 2022.

Berdasarkan perjanjian kerja sama nomor 07/Add/Per-KBI/VII/2022 dan 20/ADD/PKS/DIR/2022 kedua belah pihak telah bersepakat untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian yang dituangkan dalam Addendum Pasal 9 ayat (1) tentang masa berlakunya perjanjian diubah bahwa perjanjian berlaku selama 3 tahun sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025. Per 31 Desember 2025 masih dalam proses perpanjangan.

- 7) Pada tanggal 30 Maret 2020, Perusahaan menunjuk PT Bank Pan Indonesia Tbk sebagai bank penyimpanan dana dan lalu lintas pembayaran perdagangan

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

subsequently extended based on Agreement No. 01/Add/Per-KBI/I/2022 and No. 006/PKS-LGL/CCBI/I/2022, effective from December 30, 2021 up to December 30, 2026.

On January 26, 2022, the Company assigned PT Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk formerly known as Bank Windu Kentjana International Tbk as beneficiary bank for margin deposits and payments, and futures contract settlement, valid for 5 (five) years since December 31, 2021 up to December 31, 2026.

- 5) On June 27, 2014, the Company assigned PT Bank Mandiri (Persero), Tbk as beneficiary bank for margin deposits and payments, and futures contract settlement, valid for 3 (three) years since June 27, 2014 up to June 27, 2017.

On June 26, 2025 this cooperation was extended in accordance with letter No:07.A/P-KBI/VI/2025 SEVP.PKS/018/2025, valid since June 26, 2025 until June 26, 2030.

- 6) On February 27, 2019, the Company assigned PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk as beneficiary bank for margin deposits and payments, and futures contract settlement, valid for 3 (three) years since February 27, 2019 up to February 27, 2022.

Based on mutual agreement number 07/Add/Per-KBI/July/2022 and 20/ADD/PKS/DIR/2022, both parties have agreed to extend the term of the Agreement as stated in Addendum Article 9 paragraph (1), regarding the validity period of the agreement being amended to a term of 3 years from February 27, 2022, until February 26, 2025. As of December 31, 2025, the renewal process is ongoing.

- 7) On March 30, 2020, the Company assigned PT Bank Pan Indonesia Tbk as beneficiary bank for margin deposits and payments, and futures contract

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

berjangka berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai 30 Maret 2020 sampai 9 Januari 2023.

Berdasarkan perjanjian kerja sama nomor 09/Add/Per-KBI/XI/2022 dan 533/DIR/EXT/22 kedua belah pihak telah bersepakat untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian yang dituangkan dalam Addendum Pasal 9 ayat (1) tentang masa berlakunya perjanjian diubah bahwa perjanjian berlaku selama 3 tahun sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2026.

- 8) Pada tanggal 17 Februari 2021, Perusahaan menunjuk PT Bank Capital Indonesia Tbk sebagai bank penyimpanan dana dan lalu lintas pembayaran perdagangan berjangka berlaku selama 5 (lima) tahun mulai 17 Februari 2021 sampai 17 Februari 2026. Kedua pihak telah menyepakati perjanjian dengan nomor 03/Per-KBI/II/2021 terhitung sejak 17 Februari 2021 sampai dengan 17 Februari 2026.
- 9) Pada tanggal 30 September 2021, Perusahaan menunjuk PT Bank Artha Graha International Tbk sebagai bank penyimpanan dana dan lalu lintas pembayaran perdagangan berjangka berlaku selama 5 (lima) tahun mulai 30 September 2021 sampai 29 September 2026. Kedua pihak telah menyepakati perjanjian dengan nomor 003/Per-KBI/VIII/2021 dan No. PKS/010/DIRUT/IX/2021 terhitung sejak 30 September 2021 sampai dengan 29 September 2026.
- 10) Pada tanggal 18 Mei 2022, Perusahaan menunjuk PT Bank MNC International Tbk sebagai bank penyimpanan dana dan lalu lintas pembayaran perdagangan berjangka berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai 18 Mei 2022 sampai 18 Mei 2025. Kedua pihak telah menyepakati perjanjian dengan nomor 12/Per-KBI/V/2022 dan No. 041/MB-KBI/PKS/V/2022 terhitung sejak 18 Mei 2022 sampai dengan 18 Mei 2025. Per 31 Desember 2025 masih dalam proses perpanjangan.
- 11) Pada tanggal 2 Agustus 2023, PT Bank Victoria International menandatangani perjanjian kerjasama dengan Perusahaan sebagai Bank Penyimpan Margin, Dana

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

settlement, valid for 3 (three) years since March 30, 2020 up to January 9, 2023.

Based on mutual agreement number 09/Add/Per-KBI/Nov/2022 and 533/DIR/EXT/22, both parties have agreed to extend the term of the Agreement as stated in Addendum Article 9 paragraph (1), regarding the validity period of the agreement being amended so that the agreement is valid for a term of 3 years from January 9, 2023, until January 9, 2026.

- 8) On February 17, 2021, the Company assigned PT Bank Capital Indonesia Tbk as beneficiary bank for margin deposits and payments, and futures contract settlement, valid for 5 (five) years since February 17, 2021 up to February 17, 2026. Both parties agreed to the agreement with letters No: 03/Per-KBI/II/2021 since February 17, 2021 to February 17, 2026.
- 9) On September 30, 2021, the Company assigned PT Bank Artha Graha International Tbk as beneficiary bank for margin deposits and payments, and futures contract settlement, valid for 5 (five) years since September 30, 2021 up to September 29, 2026. Both parties agreed to the agreement with letters No: 003/Per-KBI/VIII/2021 since September 30, 2021 to September 29, 2026.
- 10) On May 18, 2022, the Company appointed PT Bank MNC International Tbk as as beneficiary bank for margin deposits and payments, and futures contract settlement, valid for 3 (three) years starting from May 18, 2022 to May 18, 2025. The two parties have agreed on agreements with numbers 12/Per-KBI/V/2022 and No. 041/MB-KBI/PKS/V/2022 starting from May 18, 2022 to May 18, 2025. As of December 31, 2025, the renewal process is ongoing.
- 11) On August 2, 2023, PT Bank Victoria International signed a cooperation agreement with the Company as the Margin Bank, Compensation Fund, and

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Kompensasi dan Dana Jaminan melalui Surat Perjanjian 36/Per-KBI/VIII/2023 dan 001/DIR-VICT/PKS/08/23. Serta mendapatkan persetujuan BAPPEBTI sebagai otoritas tertinggi perdagangan berjangka pada tanggal 17 Juli 2023 dengan nomor 01/BAPPEBTI/SP-BPDM/07/2023. Perjanjian ini berlaku sampai 2 Agustus 2026.

12) Pada tanggal 12 Februari 2024, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menandatangani perjanjian kerjasama dengan Perusahaan sebagai Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan melalui Surat Perjanjian No. 2/P-KBI/I/2024 dan B.5-FST/PRC/01/2024. Serta mendapatkan persetujuan BAPPEBTI sebagai otoritas tertinggi perdagangan berjangka pada tanggal 07 November 2023 dengan No: 02/BAPPEBTI/SP-BPDM/11/2023. Perjanjian ini berlaku sampai 19 November 2026.

13) Pada tanggal 7 Oktober 2024, PT Bank INA Perdana menandatangani perjanjian kerjasama dengan Perusahaan sebagai Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan melalui Surat Perjanjian No. 21/P-KBI/10/2024 dan BIP/DIR/361/1024. Serta mendapatkan persetujuan BAPPEBTI sebagai otoritas tertinggi perdagangan berjangka pada tanggal 16 Agustus 2024 dengan nomor 01/BAPPEBTI/SP-BPDM/08/2024. Perjanjian ini berlaku sampai 4 Oktober 2027.

14) Pada tanggal 22 November 2024, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk menandatangani perjanjian kerjasama dengan Perusahaan sebagai Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan melalui Surat Perjanjian No. 28/P-KBI/XI/2024 dan 146/PKS/DIR-IWB/2024. Serta mendapatkan persetujuan BAPPEBTI sebagai otoritas tertinggi perdagangan berjangka pada tanggal 24 Oktober 2024 dengan nomor 02/BAPPEBTI/SP BPDM/10/2024. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 22 November 2027.

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

Guarantee Fund through Agreement Letter 36/Per-KBI/VIII/2023 and 001/DIR-VICT/PKS/08/23. It also obtained approval from BAPPEBTI as the highest authority in futures trading on July 17, 2023, with the number 01/BAPPEBTI/SP-BPDM/07/2023. This agreement is valid until August 2, 2026.

12) On February 12, 2024 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk signed a cooperation agreement with the Company as the Margin Bank, Compensation Fund, and Guarantee Fund through Agreement Letter No. 2/P KBI/I/2024 and B.5 FST/PRC/01/2024. It also obtained approval from BAPPEBTI as the highest authority in futures trading on November 07, 2023 with the No: 02/BAPPEBTI/SP-BPDM/11/2023. This agreement is valid until November 19, 2026.

13) On October 7, 2024 PT Bank INA Perdana signed a cooperation agreement with the Company as the Margin Bank, Compensation Fund, and Guarantee Fund through Agreement Letter No. 21/P-KBI/10/2024 dan BIP/DIR/361/1024. It also obtained approval from BAPPEBTI as the highest authority in futures trading on August 16, 2024 with the number 01/BAPPEBTI/SP-BPDM/08/2024. This agreement is valid until October 4, 2027.

14) On November 22, 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk signed a cooperation agreement with the Company as the Margin Bank, Compensation Fund, and Guarantee Fund through Agreement Letter No. 28/P KBI/XI/2024 dan 146/PKS/DIR-IWB/2024. It also obtained approval from BAPPEBTI as the highest authority in futures trading on October 24, 2024 with the number 02/BAPPEBTI/SP-BPDM/10/2024. This agreement is valid until November 22, 2027.

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

- 15) Pada tanggal 26 Juni 2025, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menandatangani perjanjian dengan PT Kliring Berjangka Indonesia sebagai Bank sebagai Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan melalui Surat Perjanjian No.07/P-KBI/VI/2025 dan No.1223/BMI/PKS/VI/2025. Serta mendapatkan persetujuan BAPPEBTI sebagai otoritas tertinggi perdagangan berjangka pada tanggal 12 Februari 2025 dengan nomor 01/BAPPEBTI/SP BPDM/02/2025. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 26 Juni 2028.

Dana terpisah anggota kliring terdiri dari Dana Marjin, Dana Kliring, Dana Jaminan, Dana Escrow, dan Aset Digital.

Dana Marjin dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi pasal 1 (19) bahwa dana marjin adalah sejumlah dana atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh anggota kliring kepada lembaga kliring berjangka untuk menjamin pelaksanaan transaksi kontrak berjangka.

Dana Kliring dibentuk berdasarkan Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan bab IV pasal 400 huruf (b) dimana tertulis bahwa Dana Kliring diperlakukan sebagai dana bersama (*common fund*) dengan tujuan untuk mengganti kerugian lembaga kliring akibat timbulnya kegagalan penyelesaian anggota kliring. Dana Kliring ini tidak dipungut lagi mulai dari tahun 2003.

Dana Jaminan Kliring merupakan dana milik anggota kliring yang disetorkan ke Perusahaan dengan tujuan untuk memenuhi liabilitas apabila anggota kliring cedera janji. Dana jaminan Kliring dibentuk berdasarkan Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan bab II paragraf 204.

Dana Escrow merupakan rekening penampungan tersendiri yang khusus diperuntukkan untuk penyelesaian permasalahan dan dalam rangka perlindungan nasabah. Dana Escrow dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

- 15) On June 26, 2025 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk signed a cooperation agreement with PT Kliring Berjangka Indonesia as the Margin Bank, Compensation Fund, and Guarantee Fund through Agreement Letter No.07/P KBI/VI/2025 and No.1223/BMI/PKS/VI/2025. It also obtained approval from BAPPEBTI as the highest authority in futures trading on February 12, 2025 with the number 01/BAPPEBTI/SP BPDM/02/2025. This agreement is valid until June 26, 2028.

Segregated accounts of clearing members consist of Margins Deposit, Clearing Fund, Security Deposit, Escrow Fund, and Digital Assets.

Margin Deposits were established pursuant to Law Number 10 of 2011 regarding Amendment to Law No. 32 of 1997 regarding Commodity Futures Trading Article 1 (19), which stipulates that margin funds are funds or securities which should be placed by clearing members to guarantee execution of futures contract transactions.

Clearing funds were established under paragraph 400 (b) of chapter IV of the Regulations and Procedures of the Company, which states that clearing fund is a common fund for compensating loss suffered by Clearing House in case of settlement default by Clearing Members. Since 2003 the Clearing Funds are no longer collected.

Clearing Guarantee Fund represents Clearing Members' funds deposited to the Company for the purpose of fulfilling their obligation if the Clearing Member is in default. The Guarantee fund was established based on chapter II paragraph 204 of the Company's Rules and Regulation.

Escrow Fund represent a separated fund account designated specifically for settlement of issues and in order to protect customers. Escrow Fund was established pursuant to Article 7 paragraph 4 of the Decree of the Head of

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Bappebti No. 120/BAPPEBTI/PER/03/
2015 pasal 7 ayat 4 tentang Pengelolaan
Rekening Dana Terpisah.

**b. Perjanjian Kerjasama Perusahaan dengan
Badan Usaha terkait Registrasi Aset
Digital**

Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Perusahaan dengan Badan Usaha adalah untuk melakukan pencatatan dan penatausahaan dana atas transaksi aset digital. Beberapa Badan Usaha yang melakukan perjanjian kerjasama dengan Perusahaan adalah sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 28 Maret 2022, Perusahaan menandatangani surat perjanjian antara PT Jakarta Future Exchange dan Gotrade Technologies Pte. Ltd mengenai perjanjian Kerjasama penggunaan sistem transaksi berbasis aplikasi. Pengakhiran perjanjian mulai efektif pada 23 Oktober 2025. Perusahaan sudah tidak melakukan perpanjangan kontrak dengan PT Jakarta Future Exchange dan Gotrade Technologies Pte. Ltd.
- 2) Perusahaan menandatangani addendum perjanjian kerja sama terkait penyelenggaraan Pasar Fisik Timah Murni Batangan dengan PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) pada tanggal 1 Juli 2025. Perubahan tersebut mencakup penyesuaian atas pembagian biaya transaksi, khususnya untuk transaksi timah dengan tujuan perdagangan luar negeri, dengan persentase pembagian antara BBJ dan PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) masing-masing sebesar 0,09% dan 0,03% untuk peserta jual, 0,075% dan 0,025% untuk peserta beli, serta masing-masing 0,04% untuk peserta dengan tarif khusus.

**c. Perjanjian Kerjasama Perusahaan dengan
Badan Usaha terkait Kegiatan Kliring dan
Penjaminan Penyelesaian Transaksi di
Pasar Fisik Emas Digital**

Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Perusahaan dengan Badan Usaha adalah untuk melakukan kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi di pasar fisik emas digital. Beberapa Badan Usaha yang melakukan perjanjian kerjasama dengan Perusahaan adalah sebagai berikut:

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

Bappebti No. 120/BAPPEBTI/PER/03/
2015 regarding Management of
Segregated Fund Accounts.

**b. Cooperation Agreement between the
Company to Digital Asset Registration**

Cooperation agreement between the companies are to record and administer funds for digital asset transactions. Several Business Entity that enter into the cooperation agreements with the Company are as follows:

- 1) On March 28, 2022, the Company signed a memorandum of understanding between PT Jakarta Future Exchange and Gotrade Technologies Pte. Ltd regarding the cooperation agreement for the use of a transaction system based on the application. The termination of the agreement was effective as of Oktober 23, 2025. The Company has not renewed its contracts with PT Jakarta Futures Exchange and Gotrade Technologies Pte. Ltd.
- 2) The Company entered into an addendum to the cooperation agreement concerning the implementation of the Physical Market for Refined Tin Ingots with PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) on July 1, 2025. The amendment includes adjustments to the allocation of transaction fees, particularly for tin transactions intended for export purposes, whereby the fee sharing between BBJ and PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) is set at 0.09% and 0.03%, respectively, for selling participants; 0.075% and 0.025%, respectively, for buying participants; and 0.04% each for participants subject to special tariff arrangements.

**c. Company Cooperation Agreement with
Business Entities related to Clearing and
Guaranteeing Transaction Settlement
Activities in the Digital Gold Physical
Market**

Cooperation agreement between the companies are to carry out clearing and guarantee transaction settlement activities in the physical market of digital gold. Several Business Entity that enter into the cooperation agreements with the Company are as follows:

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

- 1) Berdasarkan sertifikat yang diberikan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Indonesia (BAPPEBTI) dengan nomor: 01/BAPPEBTI/SP-KBPF/11/2020, pada tanggal 11 November 2020 yang menegaskan Perusahaan mendapatkan persetujuan untuk melakukan kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi di pasar fisik emas digital.
- 2) Berdasarkan sertifikat yang diberikan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Indonesia (BAPPEBTI) dengan nomor: 01/BAPPEBTI/SP-PPPF/11/2020, pada tanggal 24 November 2020 yang menegaskan Perusahaan mendapatkan persetujuan pengelola tempat penyimpanan emas.
- 3) Berdasarkan Surat Kementerian Perdagangan Republik Indonesia No: 01/BAPPEBTI/SP-LKBAK/07/2023 tanggal 17 Juli 2023 menyatakan bahwa Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Perusahaan mendapat persetujuan sebagai Lembaga Kliring Berjangka Untuk Penjaminan dan Penyelesaian Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

d. Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Kantor dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero)

Perusahaan menandatangani perjanjian sewa menyewa ruangan kantor dengan PT PP selama 3 tahun terhitung sejak 1 Juli 2023 yang akan berakhir pada 30 Juni 2026. Sewa dan jasa pelayanan dibayar di muka dengan tahap 1 dengan jangka waktu sewa 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 1 Desember 2022 berakhir tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp100.780.800 belum termasuk PPN. Dilanjutkan dengan tahap 2 dengan jangka waktu sewa selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juli 2023 berakhir tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp5.171.990.400 belum termasuk PPN.

Pada tahun 2025, Perusahaan telah membayar sewa ruangan kantor pada tanggal 4 Juni 2025.

e. Perjanjian Sharing Cost dengan PT Danareksa (Persero)

Perusahaan menandatangani perjanjian pembagian biaya terkait proses transformasi bisnis dan penguatan sinergi dengan PT

- 1) Based on a certificate provided by Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Indonesia (BAPPEBTI) with number: 01/BAPPEBTI / SP-KBPF / 11/2020, on November 11, 2020 which confirms that the Company has obtained approval to carry out clearing and guarantee transaction settlement activities in the physical market of digital gold.
- 2) Based on the certificate provided by Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Indonesia (BAPPEBTI) with the number: 01/ BAPPEBTI / SP-PPPF / 11/2020, on November 24, 2020 which confirmed that the Company received approval from the gold storage.
- 3) Based on the Letter from the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia, No: 01/BAPPEBTI/SP-LKBAK/07/2023 dated July 17, 2023, it is stated that the Commodity Futures Trading Supervisory Board, the Company has been approved as a Futures Clearing Institution for Guaranteeing and Settling the Trading of Crypto Asset Physical Market based on the Law Number 32 of 1997 concerning Commodity Futures Trading.

d. Lease Agreement for Office Space with PT Pembangunan Perumahan (Persero)

The company entered into an office space rental agreement with PT PP for 3 years starting from July 1, 2023 which will end on June 30, 2026. Prepaid rental and services with stage 1 with a rental period of 7 (seven) months starting from December 1 2022 ends June 30, 2023 in the amount of Rp100,780,800 excluding VAT. Followed by stage 2 with a rental period of 36 (thirty six) months from July 1, 2023 ending June 30, 2026 in the amount of Rp5,171,990,400 excluding VAT.

In 2025, the Company made a payment for office space rental on June 4, 2025.

e. Cost Sharing Agreement with PT Danareksa (Persero)

The Company entered into a cost-sharing agreement related to the business transformation process and the enhancement

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Danareksa (Persero), selama berada dalam Holding Danareksa, yang berlaku efektif sejak 13 September 2024 selama 4 (empat) tahun.

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

of synergies with PT Danareksa (Persero), while under the Danareksa Holding, effective from September 13, 2024 for four (4) years.

33. Kontinjensi

a. PT Milenium Penata Futures (MPF)

Pada tanggal 1 Februari 2017, PT Milenium Penata Futures ("MPF") telah mengalami gagal bayar terkait dengan transaksi kontrak terbuka 202 lot *buy* atas kontrak GU1TF dan 161 lot *sell* atas kontrak KGEUSD dengan *underlying* transaksi berupa Gold USD kontrak tersebut memiliki kaitan dengan transaksi DF (Catatan 10, 20 dan 33.b).

MPF telah mengirim surat kepada Perusahaan tanggal 7 Februari 2017, mengenai Pemberitahuan Penutupan Posisi Terbuka Kontrak Berjangka KGEUSD dan GU1TF yang salah satu poinnya adalah untuk menghilangkan resiko kerugian dari pergerakan harga di pasar (*market*) yang tidak dapat dipenuhi, segala hak dan kewajiban yang timbul akibat dari penutupan posisi terbuka tersebut akan menjadi tanggung jawab MPF. Pada tanggal 14 Februari 2017, KBI menjawab dengan surat No.449/Sekr-KBI/II/2017 perihal Penutupan Posisi Kontrak Berjangka KGEUSD dan GU1TF MPF dimana Perusahaan menekankan bahwa penutupan kontrak terbuka tersebut menunggu adanya keputusan hukum yang berkekuatan tetap.

Pada tanggal 23 Agustus 2017, Perusahaan melakukan perjanjian dengan MPF No.0708/MPF/V yang berisikan: melakukan penutupan posisi terbuka dan penyelesaian pemenuhan kewajiban pembayaran MPF, dengan harga *settlement Price*/ USD sebesar \$1.250 per *troy ounce*.

Sampai dengan 31 Desember 2017, Perusahaan memutuskan menggunakan *Posisi Daily Financial Statement* (DFS) MPF tanggal 29 Desember 2017 dengan kurs USD sebesar Rp13.548 dan harga emas \$1,303,03 per *troy ounce* yang meliputi:

- Posisi saldo Dana *Segregated* Rp4.943.932.887 untuk *segregated* USD USD1.715.432,73; (Rp23.240.682.665);
- Posisi Dana *unsegregated* sebesar Rp233.570.416.

33. Contingencies

a. PT Milenium Penata Futures (MPF)

On February 1, 2017, PT Milenium Penata Futures ("MPF") defaulted on costumer transaction over open transaction comprising 201 buy lots under GU1TF contract and 161 sell lots under KGEUSD contract with *underlying* transaction in the form of Gold USD and the contracts are related to the transactions of DF (Notes 10, 20, and 33.b).

MPF sent a letter to the Company dated February 7, 2017, regarding "Closing Notice of Open Position of KGEUSD and GU1TF Futures Contracts", which one of the points is to eliminate the risk of loss from market movements that can not be met, all rights and obligations arising due to the closing of such open positions would be the responsibility of MPF. On February 14, 2017, the Company replied with letter No.449/Sekr-KBI/II/2017 regarding Closing of KGEUSD and GU1TF contract positions of MPF in which the Company emphasized that the closing of the open contracts is waiting for permanent legal decision.

On August 23, 2017, the Company entered into an agreement with MPF No.0708/MPF/V containing: closing of the open positions and completion of PT MPF payment obligations, with settlement price of USD1,250/troy ounce.

As of December 31, 2017, the Company decided to use MPF's *Daily Financial Statement* (DFS) position dated December 29, 2017 at USD rate of Rp13,548 and Gold price of \$1,303.03 per troy ounce which includes:

- *Segregated Fund Balance* on amounting to Rp4,943,932,887 and on United States Dollar amounting to USD1,715,432.73; (Rp23,240,682,665);
- *Unsegregated Fund Balance* on amounting to Rp233,570,416.

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Sehingga nilai Piutang MPF pada tanggal 31 Desember 2017, sebesar Rp18.530.320.194, atas piutang tersebut Perusahaan telah memutuskan membentuk cadangan kerugian penurunan nilai sebesar 100% atau Rp18.530.320.194.

Pada tanggal 28 Juni 2018, Perusahaan melakukan penutupan posisi terbuka KGEUSD dan GU1TF milik MPF dengan *settlement price* sebesar \$1,250, sedangkan harga pasar saat itu sebesar \$1,246,7 per *troy ounce*.

Pada bulan November 2018, Perusahaan melakukan konversi terhadap sisa saldo dana *segregated* Rupiah MPF menjadi USD untuk mengurangi *shortage* USD MPF kepada Perusahaan. Hal tersebut dilakukan setelah Perusahaan mengenakan status cedera janji kepada MPF karena statusnya yang dibekukan oleh Bappebti.

Posisi *Daily Financial Statement* (DFS) MPF per 31 Desember 2018 dengan kurs USD sebesar Rp14.481 yang meliputi:

- Posisi saldo Dana *Segregated* Rp0,49 untuk *segregated* USD USD467.464; (Rp6.769.350,715);
- Posisi Dana *Unsegregated* sebesar Rp5.589.332 setelah dikurang denda MPF.

Sehingga nilai Piutang MPF pada tanggal 31 Desember 2018, sebesar Rp6.754.800.031, atas piutang tersebut Perusahaan telah memutuskan membentuk cadangan kerugian penurunan nilai sebesar 100% atau Rp6.754.800.031.

Di samping itu MPF sebagai anggota kliring memiliki dana jaminan di Perusahaan sebesar Rp1.000.000.000.

Perusahaan meminta bantuan kepada Bappebti dalam penyelesaian kewajiban MPF kepada Perusahaan sebelum izin keanggotaannya dicabut.

Pada 25 Oktober 2019, Perusahaan telah melakukan somasi pertama melalui Kantor Hukum Rhaditya Putra Perdana & Partners sebagai kuasa hukum sesuai dengan Surat Keputusan No.044/KJS-S/X/2019.

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

Therefore, MPF Receivables Balance Position as of December 31, 2017, is amounting to Rp18,530,320,194. The Company has decided to establish allowance for 100% impairment loss or Rp18,530,320,194.

On June 28, 2018, the Company closed the open positions of KGEUSD and GU1TF belonging to MPF with a settlement price of \$1,250, meanwhile, the market price then was \$1,246.7 per troy ounce.

In November 2018, the Company converted the remaining balance of the MPF segregated Rupiah fund to USD in order to reduce the MPF USD shortage to the Company. This action was made after the Company imposed a default status to MPF due to its status being frozen by Bappebti.

MPF's *Daily Financial Statement* (DFS) position dated December 31, 2018 at USD rate of Rp14,481 which includes:

- Segregated Fund Balance on amounting to Rp0,49 and on United States Dollar amounting to USD467,464; (Rp6,769,350,715);
- Unsegregated Fund Balance on amounting to Rp5,589,332 net after penalty.

Therefore, MPF Receivables Balance Position as of December 31, 2018, is amounting to Rp6,754,800,031. The Company has decided to establish allowance for 100% impairment loss or Rp6,754,800,031, for such receivable.

In addition, MPF as a clearing member has a guarantee fund in the Company amounting to Rp1,000,000,000.

The Company requested assistance from Bappebti in resolving MPF's liabilities to the Company before its membership permit was revoked.

On October 25, 2019, the Company has given first warning through Rhaditya Putra Perdana & Partners as Decision Letter No: 044/KJS-S/X/2019.

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Pada 13 November 2019, Perusahaan telah melakukan somasi kedua melalui Kantor Hukum Rhaditya Putra Perdana & Partners sebagai kuasa hukum sesuai dengan Surat Keputusan No.058/KJS-S2/XI/2019.

Pada 25 November 2019, Perusahaan telah melakukan somasi ketiga melalui Kantor Hukum Rhaditya Putra Perdana & Partners sebagai kuasa hukum sesuai dengan Surat Keputusan No.060/KJS-S3/XI/2019.

Perusahaan telah menggunakan dana jaminan MPF sebesar USD70.274,07 atau setara dengan Rp1.000.000.000 sesuai dengan Surat Direksi KBI No. 0807/Sekr-KBI/IV/2019.

Perusahaan masih berupaya menagih kepada MPF untuk menyelesaikan kewajiban keuangannya. Perusahaan sudah mengirimkan 3 (tiga) kali somasi kepada MPF agar menyelesaikan kewajiban keuangannya kepada Perusahaan, karena somasi tersebut tidak ditanggapi oleh pihak MPF, Perusahaan sedang mempersiapkan upaya hukum berupa gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berdasarkan dari Surat Konsultan Hukum Perusahaan, Januardi Haribowo & Partners pada tanggal 22 Desember 2022, terdapat ada iktikad baik dari MPF untuk melakukan pembayaran utang dengan cara menyerahkan kepemilikan atas saham Soegoe sebagai jaminan sebesar 145.000.000 lembar saham kepada Perusahaan.

Atas upaya tersebut, Perusahaan tetap menginginkan adanya pembayaran atas utang yang berbentuk kas. Namun hingga saat ini belum ada pelaksanaan lebih lanjut atas hal-hal tersebut.

b. PT Danpac Futures (DF)

Pada tanggal 5 Juni 2013, PT Danpac Futures ("DF") telah mengalami gagal bayar atas suatu transaksi nasabah kontrak terbuka. Kontrak terbuka tersebut berupa 214 lot *buy* atas kontrak GU1TF dan 126 lot *buy* atas kontrak KGEUSD dengan *underlying* transaksi berupa *Gold* USD.

Atas kejadian gagal bayar ini, DF telah disuspensi sejak tanggal 28 Agustus 2014 untuk jangka waktu yang belum ditentukan.

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

On November 13, 2019, the Company has given Second Warning through Rhaditya Putra Perdana & Partners as Decision Letter No: 058/KJS-S2/X/2019.

On November 25, 2019, the Company has given Third warning through Rhaditya Putra Perdana & Partners as Decision Letter No: 060/KJS-S3/XI/2019.

The Company has used MPF guarantee funds in segregated accounts in the amount of USD70,274.07 or Rp1,000,000,000 in accordance with Decision Letter of Director No. 0807/Sekr-KBI/IV/2019.

The Company is still attempting to collect from MPF to settle its financial obligations. The Company has sent 3 (three) summonses to MPF to pay its financial obligation to the Company. Because MPF has not responded to the summons, the Company is preparing legal action in a civil suit to the Central Jakarta District Court.

Based on the Letter of Legal Consultant of the Company, Januardi Haribowo & Partners on December 22, 2022, there is good faith from MPF to make debt payments by handing over ownership of Soegoe shares as collateral of 145,000,000 shares to the Company.

For these efforts, the Company still insist payments on debts in the form of cash. However, until now there has been no further implementation of these matters.

b. PT Danpac Futures (DF)

On June 5, 2013, PT Danpac Futures ("DF") defaulted on customer transaction over an open derivative contract. The open contracts comprise 214 buy lots under GU1TF contract and 126 buy lots under KGEUSD contract with Gold USD as underlying transaction.

Considering the event of default, DF has been suspended since August 28, 2014 for an undetermined period of time. The

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Manajemen melakukan upaya pelunasan DF melalui mediasi dengan berbagai pihak di bursa termasuk melalui Bappebti, dan melalui jalur hukum atau litigasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Juli 2015, diantaranya mengabulkan gugatan Perusahaan.

Perusahaan telah melakukan pendekatan mediasi dengan melibatkan Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) serta BAKTI (Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi). Manajemen telah berketetapan untuk menggunakan penyelesaian melalui jalur hukum (gugatan perdata) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor registrasi gugatan 491/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 10 Oktober 2014.

Pada tanggal 15 Juli 2015, telah dilaksanakan sidang putusan atas gugatan dengan nomor registrasi 491/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 10 Oktober 2014, dengan putusan sebagai berikut: mengabulkan gugatan Perusahaan, menghukum DF untuk membayar biaya dan kerugian kepada Perusahaan berdasarkan DFS per tanggal 6 Oktober 2014 nilainya sebesar USD6.187.108 dan Rp1.457.236.32, membayar sanksi denda Rp100.000.000, perbulannya dihitung sejak bulan November 2014, membayar iuran bulanan sebesar Rp3.000.000, termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dan materai Rp6.000,-perbulan dihitung sejak bulan Oktober 2014, serta membayar bunga sebesar 6,00% pertahun atau 0,5% perbulan dari DFS tanggal 6 Oktober 2014.

Pada tanggal 4 Februari 2016, melalui Surat Pemberitahuan Banding dan Surat Penyerahan Memori Banding dengan nomor registrasi 142/Srt.Pdt.Dbg/2015/PN.JKT.PST menyatakan bahwa pada tanggal 23 Juli 2015 DF mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 15 Juli 2015 dengan Nomor registrasi 491/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST. Perusahaan melalui konsultan hukum Januardi Haribowo & Partners, telah menyiapkan berkas Kontra Memori Banding untuk disampaikan ke Pengadilan pada tanggal 3 Maret 2016.

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

Management had tried to settle the open position by undertaking the mediation process with respective parties on futures exchange and Bappebti, by taking litigation action at the District Court of Central Jakarta and based on the verdict of District Court of Central Jakarta on July 15, 2015, the court among others grant the claim of the Company.

The Company has taken a mediation approach by involving the Jakarta Futures Exchange (BBJ) and the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (Bappebti) and BAKTI (Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi). The management has determined to use a settlement through legal channels (civil lawsuit) at the Central Jakarta District Court with lawsuit registration number 491/Pdt.G/2014/PN. JKT. PST date October 10, 2014.

On July 15, 2015, a hearing was held for lawsuit with registration number 491/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST dated October 10, 2014, and the decisions are as follows: to grant the claim of the Company, to impose penalty to DF by paying the expenses and loss incurred by the Company based on DFS dated October 6, 2014 amounting to USD6,187,108 and Rp1,457,236,322, paying the penalty amounting to Rp100,000,000 per month since November 2014, paying the monthly membership fee amounting to Rp3,000,000, including the Value Added Tax and stamp duty amounting to Rp6,000 per month since October 2014, and paying the interest amounting to 6.00% per annum or 0.5% per month since October 6, 2014.

On February 4, 2016, through the Notice of Appeal and Submission of Letter of Appeal with registration number 142/Srt.Pdt.Dbg/2015/PN.JKT.PST it is claimed that on July 23, 2015 DF filed an appeal against the decision of the District Court of Central Jakarta on July 15, 2015 with the registration number 491/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST. The Company through its Legal consultant Januardi Haribowo & Partners prepared Counter Appeal Brief to be submitted to the Court on March 3, 2016.

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Pada tanggal 13 Juni 2017, Perusahaan telah menerima Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor:549/K/Pdt/2017 yang berisikan menguatkan keputusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Juli 2015 Nomor 491/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST.

Atas Putusan Mahkamah Agung sebagaimana disebutkan di atas, DF mengajukan Peninjauan Kembali pada 2 Maret 2018 dan Perusahaan melalui Kuasa Hukum Januardi Hariwibowo telah menyerahkan Kontra Memori PK kepada Mahkamah Agung pada tanggal 29 Maret 2018.

Pada tanggal 28 Juli 2018, Perusahaan telah menerima Putusan Mahkamah Agung Nomor: 499PK/Pdt/2018 yang berisikan Penolakan permohonan Peninjauan Kembali oleh DF sehingga menguatkan keputusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Juli 2015 Nomor 491/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST.

Perusahaan telah melakukan rapat koordinasi pertama dengan tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) membahas tentang konsep permohonan pengajuan aanmaning sesuai dengan Notulensi Rapat pada 27 November 2019 dan 15 Januari 2020.

Pada tanggal 30 September 2020, bersama BBJ dan PT MRG Mega Berjangka, Perusahaan melakukan penutupan posisi terbuka Jual 5 lot atas kontrak GU1TF milik DF dengan harga USD1,883 dengan ditransaksikan pada posisi Beli 5 lot dengan harga USD1,883 milik PT MRG Mega Berjangka.

Pada tanggal 13 November 2020, Tim JPN melakukan Permohonan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 419/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst, tanggal 15 Juli 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta DKI Jakarta No. 221/Pdt/2016/PT.DKI, tanggal 6 Juni 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 549/Pdt/2017 Jo. No. 499 PK/Pdt/2018 tanggal 24 Juli 2018, kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pada tanggal 26 Februari 2021, melalui Zoom meeting telah dilaksanakan rapat dan pelaksanaan penutupan posisi terbuka produk GU1TF DF melalui JaFeTS Now milik BBJ yang dilakukan oleh Perusahaan dan

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

On June 13, 2017, the Company received Supreme Court Judgment Number 549/K/Pdt/2017 which contains the confirmation of the Central Jakarta District Court decision dated July 15, 2015 No. 491/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST.

Based on the Supreme Court's decision as mentioned above, DF submitted a Reconsideration Review on March 2, 2018, and the Company through the Legal Counsel of Januardi Hariwibowo submitted the Counter Memory PK to the Supreme Court on March 29, 2018.

On July 28, 2018, the Company received the Supreme Court Decision Number: 499PK/Pdt/2018, which contains the rejection of the application for Reconsideration by DF to strengthen the decision of the Central Jakarta District Court dated July 15, 2015 Number 491/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST.

The Company has meeting with JPN team to discussed about requesting aanmannng concept as meeting records on November 27, 2019 and January 15, 2020.

On September 30, 2020, with BBJ and PT MRG Mega Berjangka, the Company closed an open position Sell for 5 lots of GU1TF contract owned by DF at USD1,883 by transacting on a Buy position 5 lots for USD1,883 of PT MRG Mega Berjangka.

On 13 November 2020, the JPN Team filed an Application for the Execution of the Central Jakarta District Court Decision No. 419/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst dated July 15, 2019 Jo. DKI Jakarta High Court Decision No. 221/Pdt/2016/PT.DKI, dated June 6, 2016 Jo. Supreme Court Decision No. 549/ Pdt/ 2017 Jo. No. 499 PK/Pdt/2018 dated July 24, 2018, to the Central Jakarta District Court's chairman.

On February 26, 2021, through the Zoom meeting, a meeting was held and the implementation of the closing of the open position of DF's GU1TF product through BBJ's JaFeTS Now conducted by the

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT MAB sebanyak 7 (tujuh) lot, sehingga posisi terbuka DF saat ini sudah nihil.

Sampai dengan laporan ini diterbitkan, Manajemen telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut: Membuat daftar aset DF yang bisa dieksekusi untuk melunasi kewajiban keuangan kepada Perusahaan; Meminta kepada kuasa hukum Perusahaan (Januardi Hariwibowo) untuk menghubungi Jaksa Pengacara Negara (JPN) agar dapat menagihkan kewajiban keuangan DF kepada Perusahaan. Saat ini, Perusahaan akan menunjuk Penasehat Hukum Independen untuk melakukan Legal Audit terkait kasus DF untuk mencegah terjadinya implikasi hukum lain yang mungkin terjadi terkait penutupan posisi terbuka DF.

Dalam surat Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) No:B-1115/G/Gp.2/12/2022 tanggal 22 Desember 2022 perihal Laporan Perkembangan Penanganan Perkara Perusahaan Sehubungan Dengan Eksekusi Putusan Nomor 419/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Juli 2015 Jo Putusan Nomor 221/Pdt/2016/PT DKI tanggal 6 Juni 2016 Jo Putusan Nomor 549/Pdt/2017 tanggal 13 Juni 2017 Jo Putusan Nomor 499/PK/PDT/2018 tanggal 24 Juli 2018, dengan kesimpulan bahwa:

- a. Putusan dalam perkara ini tidak ada amar tentang sita jaminan terhadap benda-benda milik Para Tergugat, namun berdasarkan penelusuran aset yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara ternyata tidak ditemukan aset atas nama Para Tergugat;
- b. Bahwa menurut MK, Piutang BUMN setelah berlakunya UU 1 Tahun 2000, UU BUMN serta UUPT adalah bukan lagi piutang Negara yang harus dilimpahkan penyelesaiannya ke PUPN sehingga perkara a quo tidak dapat diserahkan ke PUPN;
- c. Dengan demikian Jaksa Pengacara Negara pada Jamdatun telah selesai melaksanakan Surat Kuasa dari Perusahaan Kepada Jamdatun Nomor 2365/Sekr-KBI/11/2019 tanggal 8 November 2019 dan Surat Kuasa Subsitusi dari Jamdatun Nomor SK-069/G/Gph.2/11/2019 tanggal 15 November 2019; dan

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

Company and PT MAB as many as 7 (seven) lots, so that DF's open position is currently nil.

Until this report is published, Management has made the following efforts: Creating a list of execution able DF assets to settle financial obligations to the Company; Requesting the Legal Counsel of the Company (Januardi Hariwibowo) to contact the State Attorney Prosecutor (JPN) in order to collect the financial obligations of DF to the Company. The Company will appoint an Independent Legal Advisor to conduct Legal Audit related to DF case to prevent any other legal implications that may occur related to the closing of DF open position.

In the Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) letter No: B-1115/G/Gp.2/12/2022 dated 22 December 2022 regarding the Progress Report on the Case Handling of the Company in Relation to the Execution of Decision No:419/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst dated July 15, 2015 Jo Decision Number 221/Pdt/2016/PT DKI dated 6 June 2016 Jo Decision Number 549/Pdt/2017 dated 13 June 2017 Jo Decision Number 499/PK/PDT/2018 dated July 24, 2018, with the conclusion that:

- a. The verdict in this case did not contain a warning regarding the confiscation of collateral for the objects belonging to the Defendants, but based on an asset search conducted by the State Attorney's Prosecutor it turned out that no assets were found in the names of the Defendants;
- b. Whereas according to the Constitutional Court, BUMN receivables after the enactment of Law 1 of 2000, the BUMN Law and UUPT are no longer State receivables which must be transferred to PUPN so that the a quo case cannot be submitted to PUPN;
- c. Thus the State Attorney at Jamdatun has completed carrying out the Power of Attorney from the Company to Jamdatun Number 2365/Sekr-KBI/11/2019 dated November 8 2019 and Substitution Power of Attorney from Jamdatun Number SK-069/G/Gph.2/11/ 2019 dated November 15, 2019; and

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

d. Dalam hal Perusahaan di kemudian hari menemukan aset para tergugat dapat diajukan sita eksekusi dengan pendampingan hukum dari Jaksa Pengacara Negara.

c. PT Atma Mulya Jaya (AMJ)

Terdapat penyelesaian piutang penjaminan bermasalah yang diikat dengan Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Utang antara PT Kliring Berjangka Indonesia dengan No. 006/KPBI/IX/2021 dengan nilai piutang penjaminan sebesar Rp2.156.537.034. Piutang penjaminan ini disertai dengan jaminan kredit berupa sebidang tanah dengan SHM 00599 berada di Yogyakarta seluas 1.813 m² dengan nilai sebesar Rp888.000.000. Tanah ini berada di Kelurahan Girisekara, Kecamatan Panggang, Gunung Kidul.

Pada tanggal 10 Agustus 2021, anak usaha Perseroan yaitu PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia ("KPBI") mengetahui bahwa PT Atma Mulya Jaya ("AMJ") selaku Pengelola Gudang telah mengeluarkan barang dari gudang tanpa seizin sebagaimana Perjanjian No. 005/Per-KPBI/V/2021; 002/PKS-PRN/V/2021; 002/PKS-AMJ/V/2021 tertanggal 19 Mei 2021 tentang Penjaminan Resi Gudang Beras.

Atas peristiwa tersebut timbul Piutang dengan kolektabilitas Macet sebesar Rp2.156.537.034 dan AMJ sepakat bertanggung jawab untuk melakukan penyelesaian kewajiban dengan ditandatanganinya Berita Acara Penyelesaian Penjaminan Resi Gudang dan Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Hutang dengan No.006/KPBI/IX/2021.

AMJ tidak melaksanakan kewajiban pembayaran (wanprestasi), sehingga KPBI memberikan Surat Peringatan I (16 Maret 2021); Surat Peringatan II (22 Maret 2021); dan Surat Peringatan III (28 Maret 2021). Selanjutnya, KPBI melakukan penagihan kepada AMJ secara langsung pada bulan Mei tanggal 11, 20, 25, 28, dan 31 tahun 2022, namun tidak ada itikad baik dari AMJ.

KPBI meminta kepada otoritas (Bappebti) untuk memfasilitasi mediasi antara KPBI dan AMJ yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2021, 06 September 2021, 25 November 2022, dan 02 Desember 2022,

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

d. In the event that the Company later discovers the assets of the Defendants, it can be submitted for confiscation of execution with legal assistance from the State Attorney's Attorney.

c. PT Atma Mulya Jaya (AMJ)

There is a settlement of non-performing guarantee receivables that is tied to the Debt Settlement Agreement between PT Kliring Berjangka Indonesia No. 006/KPBI/IX/2021 with a guaranteed receivable value of Rp.2,156,537,034. This guarantee receivable is accompanied by a credit guarantee in the form of a plot of land with SHM 00599 located in Yogyakarta with an area of 1,813 m² with a value of Rp888,000,000. This land is located in Girisekara Village, Panggang District, Gunung Kidul.

On August 10, 2021, the Company's subsidiary, namely PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia ("KPBI") learned that PT Atma Mulya Jaya ("AMJ") as the Warehouse Manager had removed goods from the warehouse without KPBI's permission as per Agreement No.005/Per-KPBI/V/2021; 002/PKS-PRN/V/2021; 002/PKS-AMJ/V/2021 dated 19 May 2021 concerning Guarantee of Rice Warehouse Receipts.

Due to this incident, receivables with a bad collectability of Rp2,156,537,034 arose and AMJ agreed to be responsible for settling the obligations by signing the Warehouse Receipt Guarantee Settlement Minutes and Debt Obligation Settlement Agreement with No: 006/KPBI/IX/2021

AMJ did not carry out its payment obligations (default) so KPBI issued a Warning Letter I (16 March 2021); Warning Letter II (22 March 2021); and Warning Letter III (28 March 2021). Furthermore, KPBI billed AMJ directly on May 11, 20, 25, 28 and 31 2022, but there was no good faith from AMJ.

KPBI asked the authorities (Bappebti) to facilitate mediation between KPBI and AMJ which was carried out on 28 August 2021, 06 September 2021, 25 November 2022, and 02 December 2022, but there was no good faith

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

namun tidak ada itikad baik dari AMJ untuk menyelesaikan kewajibannya.

Atas hal tersebut, sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2024, KPBI telah membuat laporan pada Polres Purwakarta dengan dugaan Tidak Pidana Penipuan atau Penggelapan.

Pada tanggal 4 Oktober 2024, telah dilakukan lelang aset jaminan milik AMJ yang merupakan jaminan kredit berupa sebidang tanah dengan SHM 00599 berada di Yogyakarta seluas 1.813 m² dan sesuai salinan Risalah Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta Nomor 754/09.05/2024-01 dengan harga barang yang laku sebesar Rp538.461.000 setelah dipotong pajak dan biaya notaris sehingga dana yang diterima sebesar Rp481.307.205.

Nilai Piutang PT AMJ pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2025 sebesar Rp1.675.229.929, atas piutang tersebut Perusahaan membentuk cadangan kerugian penurunan nilai sebesar 100% dari nilai piutang.

Mitra dan Thara Jaya Niaga (TJN)

Terdapat penyelesaian piutang penjaminan bermasalah yang diikat dengan Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Utang antara KPBI dengan Mitra dan TJN dengan nilai piutang penjaminan pada 31 Desember 2025 sebesar Rp228.455.826.000 dan bunga biaya penjaminan sebesar Rp15.990.710.858.

Berikut dibawah ini adalah para mitra dan TJN dengan kondisi wanprestasi:

- PT Aditama Anugerah Abadi (PT AAA);
- PT Akselerasi Sinergi Usaha Pangan (PT ASUPAN);
- PT Gemah Ripah Panganku (PT GRP);
- PT Konsorsium Ekonomi Kerakyatan (PT KEK) – Komoditas Beras;
- PT Konsorsium Ekonomi Kerakyatan (PT KEK) – Komoditas Minyak Goreng (Non Resi Gudang);
- PT Komoditi Kejayaan Indonesia (PT KKI);
- PT Pangan Indonesia Unggul (PT PINGGUL);

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

from AMJ to complete its obligations.

Due to this, as of December 31 2023 and 2024, KPBI has made a report to the Purwakarta Police alleging a criminal act of fraud or embezzlement.

On October 4, 2024, an auction of collateral assets belonging to AMJ which is credit collateral in the form of a plot of land with SHM 00599 located in Yogyakarta covering an area of 1,813 sqm and according to the copy of the Minutes of Auction of the Yogyakarta State Wealth and Auction Service Office Number 754/09.05/2024-01 with the price of goods sold amounting to Rp538,461,000 after deducting taxes and notary fees so that the funds received amounted to Rp481,307,205.

The value of PT AMJ's receivables on 31 December 2024 and 2025 was Rp1,675,229,829, for these receivables the Company established an allowance for impairment losses of 100% of the value of the receivables.

The Partner and Thara Jaya Niaga (TJN)

The Company has resolved non-performing guarantee receivables through a Debt Settlement Agreement entered into between the KPBI, the Partner, and TJN. As of December 31, 2025, the outstanding balance of the guarantee receivables amounted to Rp228,455,826.000 and interest fee guarantee amounted to Rp15.990.710.858.

The following are partners of the Partner and TJN that are currently in a state of default:

- PT Aditama Anugerah Abadi (PT AAA);
- PT Akselerasi Sinergi Usaha Pangan (PT ASUPAN);
- PT Gemah Ripah Panganku (PT GRP);
- PT Konsorsium Ekonomi Kerakyatan (PT KEK) – Rice Commodity;
- PT Konsorsium Ekonomi Kerakyatan (PT KEK) – Cooking Oil Commodity (Non-Warehouse Receipt);
- PT Komoditi Kejayaan Indonesia (PT KKI);
- PT Pangan Indonesia Unggul (PT PINGGUL);

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

- Koperasi Multi Pihak Sarana Agro Lestari (KMP SANTRI).

Mitra dan TJN tidak melaksanakan kewajiban pembayaran (wanprestasi), sehingga KPBI memberikan hingga Surat Peringatan pertama hingga ketiga pada bulan antara Agustus dan September 2025. Selanjutnya, KPBI memberikan usulan atas penyelesaian pembayaran penjaminan dengan nomor surat 420/Sekr KPBI/XII/2025 untuk melakukan pembayaran sebagian terlebih dahulu dan dibuatkan berita acara kesepakatan lanjutan. Pada tanggal 19 Desember 2025 KPBI dan perwakilan Mitra dan TJN melakukan pertemuan langsung untuk dilakukannya pembahasan lanjutan terkait penyelesaian pembayaran penjaminan, namun hingga sampai 31 Desember 2025 tidak terdapat pembayaran atas kondisi pembayaran (wanprestasi).

KPBI meminta kepada otoritas (Bappebti) untuk memfasilitasi mediasi antara KPBI, Mitra dan TJN yang telah dilaksanakan dan alternatif rencana selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2026, namun tidak ada itikad baik dari Mitra dan TJN untuk menyelesaikan kewajibannya.

Pada tanggal 30 Januari 2026, KPBI secara bersamaan telah digugat oleh Mitra dan TJN terkait pembatasan pencairan plafon piutang penjaminan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 68/Pdt.G/2026/PN.Jkt.Pst.

Persidangan telah dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2026 (sidang pertama), 5 Maret 2026 (sidang kedua), dan 2 April 2026 (sidang ketiga), dengan agenda pembahasan terkait pemberkasan administrasi masing-masing pihak, baik penggugat (Mitra dan TJN) maupun tergugat (KPBI).

Selanjutnya, para pihak diberikan waktu selama 30 (tiga puluh) hari dari tanggal 12 Maret 2026 untuk melaksanakan proses mediasi di hadapan pengadilan dengan menggunakan proposal perdamaian. Apabila mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka KPBI akan mengajukan gugatan balik (rekonvensi) atau gugatan baru atas kondisi wanprestasi yang dilakukan oleh Mitra dan TJN.

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

- Koperasi Multi Pihak Sarana Agro Lestari (KMP SANTRI).

The Partner and TJN failed to fulfill its payment obligations (default), therefore the KPBI issue the first through third warning letters between August and September 2025. Subsequently, the KPBI proposed a settlement for the guarantee payment through letter No. 420/Sekr-KPBI/XII/2025, suggesting a partial payment to be made initially, followed by the preparation of a minutes of meeting for further agreement. On December 19, 2025, KPBI and representatives of the Partner and TJN held a direct meeting to discuss the continuation of the settlement of the guarantee payment. However, as of December 31, 2025, no payment had been made with respect to the outstanding payment obligation (default).

KPBI requested the authority (Bappebti) to facilitate mediation between the KPBI, the Partner and TJN, which was conducted, along with discussions on alternative next steps, on February 19, 2026. However, there was no good faith demonstrated by the Partner and TJN to fulfill its obligations.

On January 30, 2026, KPBI was simultaneously sued by the Partner and TJN in relation perkara to the restriction on the disbursement of the guarantee receivable facility at the Central Jakarta District Court under case number 68/Pdt.G/2026/PN.Jkt.Pst.

Court hearings were held on February 27, 2026 (first hearing), March 5, 2026 (second hearing), and March 12, 2026 (third hearing), with the agenda focusing on the administrative documentation submitted by each party, namely the plaintiff (the Partner and TJN) and the defendant (KPBI).

Furthermore, the parties were granted a period of 30 (thirty) days from March 12, 2026 to undertake mediation proceedings before the court using a proposed settlement arrangement. If the mediation does not result in an agreement, KPBI intends to file a counterclaim (reconvention) or initiate a new claim in relation to the default committed by the Partner and TJN.

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Dalam rangka pemulihan aset, kuasa hukum KPBI telah melakukan pelacakan aset terhadap pihak Penggugat dan mengidentifikasi beberapa aset tidak bergerak di berbagai wilayah yang nilainya diperkirakan memadai untuk menjamin seluruh kewajiban.

Proses litigasi hingga putusan tingkat pertama diperkirakan memakan waktu sekitar 4 (empat) bulan, dan pengungkapan ini bersifat kontinjensi dengan tetap mengedepankan upaya optimal pemulihan piutang melalui jalur damai maupun litigasi lanjutan.

34. Manajemen Risiko

Grup terekspos oleh berbagai macam risiko keuangan, yaitu risiko pasar (yang meliputi risiko nilai tukar mata uang asing, risiko tingkat bunga dan risiko harga saham), risiko likuiditas, dan risiko kredit.

Grup memastikan bahwa risiko-risiko tersebut telah dikelola sehingga meminimalkan dampak ketidakpastian pasar keuangan terhadap pencapaian Grup. Tidak ada perbedaan jenis risiko yang dihadapi Grup dibanding tahun sebelumnya, begitu pula dengan tujuan, kebijakan serta proses pengelolaannya.

a. Risiko Mata Uang

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko perubahan nilai instrumen keuangan sebagai akibat adanya perubahan nilai tukar mata uang asing. Grup tidak memiliki eksposur risiko atas mata uang asing yang ditempatkan anggotanya untuk marjin karena risiko tersebut ditanggung sendiri oleh Anggota Kliring.

Untuk aset keuangan milik Grup sendiri, Perusahaan tidak melakukan *hedging* untuk aset-aset keuangan dalam mata uang asing tersebut, karena aset dalam mata uang asing tersebut dimaksudkan untuk digunakan untuk pengeluaran dalam mata uang asing di masa yang akan datang.

Sejauh ini, Grup tidak memiliki liabilitas mata uang Dolar AS dan belum menganggap perlu untuk melakukan upaya lindung nilai mata uang Dolar AS terhadap Rupiah. Pada tanggal laporan posisi keuangan per

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

As part of its asset recovery efforts, the KPBI's legal counsel has conducted asset tracing on the Plaintiffs and identified some of immovable properties across various regions, the value of which is considered sufficient to secure the total outstanding obligations.

The litigation process up to the first-instance decision is estimated to take approximately four (4) months. This disclosure is of a contingent nature, and will continue to pursue optimal recovery of receivables through both amicable settlement and further legal proceedings.

34. Risk Management

The Group is exposed to a wide range of financial risks, such as market risk (which consists of foreign currency risk, interest rate risk, and stock price risk), liquidity risk and credit risk.

The Group ensures that the risks have been managed to minimize the impact of the financial market uncertainty to the Group's achievement. There is no difference in the types of risks faced by the Group in the previous year, as well as the objectives, policy and the management process.

a. Currency Risk

Foreign currency risk is the risk of changes in financial instrument value due to changes in foreign currency exchange rate. The Group does not have the risk exposure over foreign currency which is placed by its members for margin, because that risk was obligated by the member itself.

For the financial asset owned by the Group, the Company did not conduct hedging for the financial assets in foreign currency, because assets in foreign currency are meant to be used in the future foreign currency expenditure.

So far, the Group does not have liabilities denominated in USD and still has not considered having hedging of USD currencies to Rupiah currencies. As of the date of the statements of financial position as per

31 Desember 2025 dan 2024 aset dan liabilitas moneter adalah sebagai berikut:

December 31, 2025 and 2024 assets and monetary liabilities are as follows:

	USD Ekuivalen/ Equivalent USD 31 Desember/ December 31, 2025	USD Ekuivalen/ Equivalent USD 31 Desember/ December 31, 2024	
Aset			Assets
Kas dan Setara Kas	513,371,617	312,796,935	Cash and Cash Equivalents
Jumlah Aset Moneter	513,371,617	312,796,935	Total Monetary Assets Monetary

Risiko Suku Bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko yang mempengaruhi arus kas Grup di masa yang akan datang sebagai akibat adanya perubahan tingkat suku bunga. Grup menghadapi eksposur risiko tingkat suku bunga atas penempatan deposito dana milik Grup dan dana marjin pada perbankan.

Interest Rate Risk

Interest rate risk is a risk that affects the Group's cash flow as the impact of changes in interest rate. The Group faces an interest rate exposure on the deposit placement of clearing members' fund and margin fund in bank.

Grup telah membuat kebijakan Investasi Nomor: 22/K-KBI/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011 sebagai acuan dalam melakukan penempatan dana Perusahaan dan dana *segregated* Perusahaan juga melakukan analisis kinerja perbankan berdasarkan jumlah aset, jumlah simpanan anggota kliring, suku bunga, tingkat layanan dan estimasi tingkat risiko.

The Group has made an Investment Policy Number: 22/K-KBI/X/2011 dated October 3, 2011 as a reference in making placement of the Company funds and segregated funds. The Company has also made banking performance analysis based on total assets, total clearing members' savings, interest rate, service rate and risk rate estimates.

Grup menyadari bahwa apabila Grup lebih mementingkan tingkat keamanan keuangan maka akan berpengaruh kepada penurunan pendapatan. Sebaliknya, apabila Grup menginginkan pendapatan yang tinggi maka akan dipilih perbankan yang bisa memberikan tingkat bunga tinggi dengan tingkat keamanan lebih rendah.

The Group realized that if the Group is more concerned with the security of funds, then it would result in declining revenues. Whereas, if the Group claims for high revenues, it should choose banks that would provide a high interest rate with lower level of security.

Atas risiko, Grup telah melakukan upaya meminimalkan risiko dengan cara:

Based on those risks, the Group has made efforts to minimize the risks by:

Dana Grup

Melakukan diversifikasi penempatan dana pada beberapa bank dengan tingkat bunga yang bervariasi guna menghasilkan tingkat bunga yang optimal dan meminimalkan risiko terhadap kegagalan bank.

Group Funds

Diversifying the placement of funds in several banks with various interest rates in order to produce an optimal interest rate and to minimize the risk of bank failure.

Dana Segregated

Melakukan penempatan dana di bank penyimpanan dana marjin dengan memilih bank yang memberikan bunga yang optimum dan rendah tingkat resikonya sesuai dengan kebijakan Perusahaan di atas.

Segregated Fund

Placing the idle funds in margin banks by choosing a bank that gives the most optimal interest rate and low risk rate based on the abovementioned Company's policy.

Analisis Sensitivitas

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan sensitivitas Laba bersih Grup pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 atas perubahan tingkat suku bunga.

Sensitivity Analysis

The table below shows the sensitivity of the Group's net income against the movement of foreign exchange interest rate as of December 31, 2025 and 2024.

31 Desember 2025	
Perubahan persentase/ Percentage change	Pengaruh terhadap laporan laba rugi/ Impact to profit or loss
+1%	2,988,407,655
-1%	(1,881,590,005)
31 Desember 2024	
Perubahan persentase/ Percentage change	Pengaruh terhadap laporan laba rugi/ Impact to profit or loss
+1%	2,031,045,491
-1%	(553,921,498)

b. Risiko Likuiditas

Grup memiliki liabilitas keuangan kepada Anggotanya atas margin yang dipungut untuk setiap posisi terbuka. Risiko ini dapat terjadi baik dari sisi Perusahaan sebagai Lembaga Kliring dan dari sisi Anggota Kliring.

Grup juga memiliki liabilitas keuangan untuk dana jaminan kliring yang ditempatkan Anggota Kliring. Dana jaminan ini bersifat jangka panjang dan akan ada sepanjang menjadi Anggota Kliring. Penempatan dananya pada deposito pada bank yang telah mendapat persetujuan Bappebti, sehingga secara teoritis aman.

Untuk dana margin, Grup telah melakukan upaya penempatan dana Anggota Kliring dengan komposisi pada deposito dan giro, yang sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan likuiditas pembayaran hak-hak Anggota Kliring tanpa tertunda.

Dari sisi anggota kliring, kemungkinan terjadinya risiko likuiditas dapat terjadi bilamana Anggota Kliring tidak dapat memenuhi liabilitasnya pada tenggat waktu yang telah ditentukan. Walaupun sampai saat ini belum ada kejadian yang menimbulkan risiko likuiditas karena kegagalan bayar pada anggota kliring, namun Grup menganggap risiko kegagalan bayar tersebut masih bisa terjadi.

b. Liquidity Risk

The Group has a financial liability to the Members on the margin collected for each open position. Both the company, as the Clearing House, and the Clearing Members are exposed to this risk.

The Group also has a financial liability for a clearing guarantee fund placed by Clearing Members. Guarantee fund is long term and will be held by the Company as long as they are still registered as Clearing Member. Placement of funds in deposit at the bank was approved by Bappebti, thus, theoretically it is safe.

For margin funds, the Group has undertaken efforts to place the Clearing Members' fund in deposits and current accounts, such that it can meet the liquidity needs of the payment rights of the Clearing Members without delay.

On the Clearing Members' side, the likelihood of liquidity risk can occur if the Clearing Members are not able to meet the liabilities on predetermined deadline. Although until now no event has led to liquidity risk due to clearing members' default, the Group believes that such risk can occur.

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Oleh karena itu, Grup selalu berusaha memantau pergerakan transaksi masing-masing anggota kliring dan memantau kecukupan dana untuk transaksi tersebut.

c. Risiko Permodalan

Permodalan Lembaga Kliring Berjangka menurut Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik No. 49 Tahun 2014 pasal 28 minimal Rp100.000.000.000 dan sampai saat ini modal disetor Grup adalah sebesar Rp500.000.000.000 dan total ekuitas 31 Desember 2025 dan 2024 Rp747.223.264.191 dan Rp693.307.557.139 dan serta aset yang dimiliki diatas Rp3.118.533.401.113 dan Rp2.543.096.276.604. Berdasarkan kebutuhan dan risiko yang terjadi selama ini, Grup menganggap jumlah tersebut sudah cukup untuk menutupi risiko operasional Grup.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No 21/11/PBI/2019 tentang penyelenggaraan *Central Counterparty* untuk transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar *over-the-counter*, Grup memiliki peluang dalam industri tersebut. Grup harus memiliki modal minimum sebesar Rp400.000.000.000.

d. Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan pihak lain memenuhi kewajibannya kepada Grup. Grup menghadapi eksposur risiko kredit dari kegagalan anggotanya memenuhi kewajiban dan risiko kegagalan Bank Penyimpan Dana Marjin.

Kegagalan Anggota Kliring

Melalui proses novasi/substitusi, Grup bertindak sebagai *counterparty* bagi setiap transaksi yang dikliringkannya. Oleh karena itu, Grup terekspose secara signifikan oleh risiko kredit anggotanya.

Grup secara tidak langsung juga terekspos oleh risiko kredit yang berasal dari nasabah anggota kliring. Para pihak tersebut kemungkinan gagal memenuhi kewajibannya karena mengalami kebangkrutan, kekurangan likuiditas, kegagalan usaha atau sebab sebab lainnya.

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

Therefore, the Group is continually trying to monitor the movement of each transaction of the clearing members and monitor the adequacy of funds for such transactions.

c. Capital Risk

Capital of futures clearing house under Article 28 of the Government Regulation No. 49 of 2014 should be at least Rp100,000,000,000 and up to now the Group's paid-in capital amounted to Rp500,000,000,000 and total equity the grand total of equities per December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp747,223,264,191 and Rp693,307,557,139 and assets of over Rp3,118,533,401,113 and Rp2,543,096,276,604. Based on the needs and risks that occur up to the present, the Group considers such amount sufficient to cover operational risks of the Group.

According to The Commodity Futures Trading Agency Number. 21/11/PBI/2019 about Rules of being Central Counterparty of derivative transactions and exchange the-over-counter, Group's have a chance in this industry as long as the Group's having their Paid-in Capital at least Rp400,000,000,000.

d. Credit Risk

Credit Risk is a risk of loss caused by a failure of other parties to comply with their obligations to the Group. The Group faces a credit risk exposure from members' failure to meet their duty and Margin Fund Saving Bank's failure risk.

Clearing Members' Default

By the novation/ substitution process, the Group acts as counterparty for every transaction cleared by itself. Therefore, the Group is exposed significantly to the credit risk of its members.

The Group is, indirectly, also exposed to the credit risk from the clearing members' customers. Such parties may default due to bankruptcy, lack of liquidity, business failure or other reasons.

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Grup melakukan langkah-langkah sebagai upaya untuk mencegah dan mengurangi dampak risiko kredit yang ditimbulkan oleh anggotanya, sebagai berikut:

- Melakukan pemantauan persyaratan permodalan bagi anggotanya (penetapan modal oleh Regulator/Bappebti);
- Melakukan pemantauan kondisi keuangan anggotanya melalui pemantauan Modal Bersih Disesuaikan Anggotanya;
- Memungut Dana Jaminan Kliring;
- Menetapkan dana margin dibayar dimuka bagi anggota kliring yang menjadi penyelenggara SPA minimal Rp 8 milyar atau 125% dari nilai margin, dihitung dari jumlah mana yang lebih besar;
- Menetapkan dan memungut margin awal untuk setiap posisi terbuka yang dimiliki oleh anggotanya. Besaran margin awal yang dipungut oleh Grup untuk setiap posisi terbuka umumnya berada pada kisaran 90%-95% dari pergerakan harga harian kontrak terbuka yang mungkin terjadi;
- Melakukan penyesuaian harian (*marked to market*) atas setiap posisi terbuka pada akhir hari perdagangan;
- Memungut margin variasi keesokan harinya dari anggota kliring yang memiliki nilai *settlement variation negative*.

Melaksanakan ketentuan SE Direksi No. 02/SE-KBI/VII/2017 perihal Ketentuan Mengenai Pemenuhan Kewajiban Keuangan Anggota Kliring, dengan cara melakukan pembatasan transaksi awal perdagangan (pukul 06.40 WIB) kepada AK yang mengalami *shortage* di atas Rp500.000.000 dan melakukan pembatasan transaksi pukul 12.00 WIB kepada AK yang mengalami *shortage* Rp500.000.000 ke bawah.

Apabila sampai dengan pukul 13.30 WIB AK yang bersangkutan belum memenuhi kewajiban keuangannya, maka statusnya ditingkatkan menjadi suspensi.

Dalam hal anggota kliring gagal memenuhi kewajibannya, Grup telah menetapkan prosedur penyelesaian sebagai berikut:

- Penunjukan anggota kliring untuk menerima posisi terbuka nasabah non cidera janji;

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

The Group undertakes measures to prevent and to reduce the effect of credit risks caused by the members, such as:

- *Establishing the capital requirements for the members;*
- *Monitoring the members' financial condition by monitoring the Members' Adjusted Net Capital;*
- *Collecting the Clearing Guarantee Funds;*
- *Establishing prepaid margin fund for clearing members who become the SPA Organizer amounting at least Rp 5 billion or 125% of the margin value, calculated from which ever has the greater amount;*
- *Establishing and collecting the initial margin for every open position owned by the members. The amount of the initial margin collected by the Group for every open position is generally ranging between 90%-95% of the daily price movement of the open contract which may occur;*
- *Making daily adjustment (marked to market) for every open position at the end of the trading day;*
- *Collecting the variance margin on the following day from the clearing members with negative value of settlement variation.*

Implementing the Circular Letter of the Board of Director No. 02/SE-KBI/VII/2017 concerning Financial Obligations of Clearing Members through transaction limitation on initial trading (at 06.40 am) to Clearing Members who experience shortage over Rp500,000,000 and limiting transaction at 12.00 am to Clearing Members who experience shortage under Rp500,000,000.

If until 01.30 pm the said Clearing Members have not fulfilled their financial obligation, then their status will be set as suspended.

In case that a clearing member defaults, the Group has established the following procedures:

- *Assigning a clearing member to receive the open position of the defaulting customer;*

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

- Pengalihan posisi anggota kliring penyelenggara dalam keadaan cidera janji kepada anggota kliring penyelenggara lainnya;
- Menggunakan sisa margin dan Dana Jaminan Kliring milik anggota kliring dalam keadaan cidera janji untuk memenuhi kewajibannya kepada Grup;
- Mengupayakan pemenuhan sisa kewajiban anggota kliring dalam keadaan cidera janji kepada Grup dengan menunjuk kurator untuk melikuidasi aset lain milik anggota kliring.

Pada tanggal pelaporan, eksposur maksimum Grup terhadap risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat masing-masing kategori aset keuangan yang disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp	
Kas dan Setara Kas	66,833,667,350	22,043,296,016	Cash and Cash Equivalents
Saldo Rekening Anggota Kliring	2,239,573,720,466	1,667,312,244,047	Balance with Clearing Members
Penempatan Dana			Placement of Commodity
Pasar Fisik Komoditi	58,654,373,241	121,783,906,226	Physical Market
Efek-efek	20,000,000,000	46,365,886,698	Marketable Securities
Investasi Jangka Pendek	316,334,676,728	187,285,393,533	Short-term Investment
Piutang Penjaminan	207,396,256,319	255,631,229,230	Guarantee Receivables
Piutang Lain-lain	3,466,261,005	1,009,901,726	Other Receivables
Piutang Pihak Berelasi	124,996,392,547	174,975,888,368	Other Receivables - Related Party
Pendapatan yang Masih akan Diterima	12,056,517,274	18,816,335,721	Accrued Income
Uang Jaminan	76,091,898	76,091,898	Security Deposit
Jumlah	3,049,387,956,827	2,495,300,173,463	Total

Kualitas Kredit Aset Keuangan

Grup mengelola risiko kredit yang terkait dengan rekening bank dan saldo dengan anggota kliring dengan memonitor reputasi, peringkat kredit, dan membatasi risiko agregat dari masing-masing pihak dalam kontrak. Untuk bank, hanya pihak-pihak independen dengan predikat baik yang diterima.

Kualitas kredit dari aset keuangan baik yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai dapat dinilai dengan mengacu pada peringkat kredit eksternal (jika tersedia) atau mengacu pada informasi historis mengenai tingkat gagal bayar debitur, sebagai berikut:

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

- Transferring the position of the organizing clearing member in default to another organizing clearing member;
- Using the rest of margin and Clearing Guarantee Fund owned by clearing members to fulfill the liability to the Group;
- Undertaking any effort towards fulfilling the remaining liabilities of the clearing member in default to the Group by appointing a curator to liquidate other assets owned by the clearing member.

At the reporting date, the Group maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each class of financial assets presented in the consolidated statements of financial position.

Credit Quality of Financial Assets

The Group manage credit risk exposed from its deposits with banks and balance with clearing members by monitoring reputation, credit ratings and limiting the aggregate risk to any individual counterparty. For banks, only independent parties with a good rating are accepted.

The credit quality of financial assets that are neither past due nor impaired can be assessed by reference to external credit ratings (if available) or to historical information about counterparty defaults rates, as follows:

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp	
Bank - Pihak Ketiga			Cash in Banks - Third Parties
Dengan pihak yang memiliki kredit eksternal			Counterparties with external credit rating
Pefindo:			Pefindo:
idAAA	2,087,931,138	808,356,439	idAAA
idAA	--	9,648,801	idAA
idAA-	122,364,139	3,621,159,324	idAA-
idA+	--	5,383,183	idA+
idBBB+	191,356,887	6,046,848	idBBB+
idBBB	1,124,201,138	150,960,037	idBBB
idCCC	5,499,150	5,962,050	idCCC
Bank - Pihak Berelasi (Catatan 35)			Cash in Banks - Related Parties (Note 35)
Dengan pihak yang memiliki kredit eksternal			Counterparties with external credit rating
Pefindo:			Pefindo:
idAAA	6,164,143,181	2,261,617,031	idAAA
idAA+	70,619,385	71,240,649	idAA+
Deposito Berjangka - Pihak Ketiga			Time Deposits - Third Parties
Dengan pihak yang memiliki kredit eksternal			Counterparties with external credit rating
Pefindo:			Pefindo:
idBBB+	--	10,000,000,000	idBBB+
Deposito Berjangka - Pihak Berelasi			Time Deposits - Related Parties
Dengan pihak yang memiliki kredit eksternal			Counterparties with external credit rating
Pefindo:			Pefindo:
idAAA	57,000,000,000	5,000,000,000	idAAA
Jumlah	66,766,115,017	21,940,374,362	Total

Untuk menerima dan melakukan pembayaran margin dari Anggota Kliring, Grup menetapkan 15 (lima belas) bank sebagai Bank Penyimpan Dana Margin, yaitu: PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank BCA Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Capital Tbk, PT Bank MNC International Tbk, PT Bank Artha Graha International Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Ina Perdana Tbk, PT China Construction Bank Indonesia Tbk, PT Bank Raykat Indonesia Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, PT Bank Pan Indonesia Tbk, PT Bank Muamalat Indoensia Tbk dan PT Bank Victoria International Tbk. Disamping bank tersebut, Grup juga telah menempatkan dana milik Grup sendiri dalam bentuk Deposito di beberapa bank. Risiko kegagalan bank bisa diminimalisir dengan menempatkan dana pada bank-bank yang mempunyai kinerja baik dan melakukan pemantauan secara berkala

To receive and to pay the margin fund from the clearing members, the Group established 15 (fifteen) banks as the beneficiary bank for margin deposits, namely: PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank BCA Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Capital Tbk, PT Bank MNC International Tbk, PT Bank Artha Graha International Tbk, and PT Bank Tabungan negara (Persero) Tbk, PT Bank Ina Perdana Tbk, PT China Construction Bank Indonesia Tbk, PT Bank Raykat Indonesia Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, PT Bank Pan Indonesia Tbk, PT Bank Muamalat Indoensia Tbk and PT Bank Victoria International Tbk. In addition to the said banks, the Group also placed Group's fund in deposits in several banks. The bank failure risk can be minimized by placing the funds in a bank which has good performance and by monitoring the bank's performance periodically. However, since the Indonesia

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

terhadap kinerja perbankan. Namun demikian, karena LPS hanya menjamin sampai dengan Rp2.000.000.000, maka risiko kegagalan bank masih akan tetap muncul.

Untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya suatu bank gagal memenuhi kewajibannya, Grup melakukan seleksi berdasarkan kriteria antara lain: kecukupan modal, rasio likuiditas, Net interest margin, BOPO, yang ditetapkan dalam SK Direksi mengenai Kebijakan Pemilihan Bank Penyimpan Dana Marjin No. 22/K-KBI/IV/2010 tanggal 14 April 2010. Namun demikian, LKB dapat berkerjasama dengan Bank yang ditunjuk BAPPEBTI.

Antisipasi Atas Kemungkinan Gagal Bayar

Grup setiap bulan membentuk cadangan penjaminan sebesar 2,5% dari jumlah pendapatan neto kliring untuk mengantisipasi kerugian lembaga kliring akibat timbulnya kegagalan penyelesaian anggota kliring, penyelesaian atas kredit resi gudang dan resiko investasi.

Beban penjaminan yang telah dibebankan pada laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dengan secara berurutan Rp656.449.830 dan Rp532.371.172. (Catatan 30.c).

Berdasarkan Nota Dinas Pengantar Internal dengan Nomor: ND-054/DKA/XI/2019 dan Nomor: ND-097/BISNIS/XI/2019 yang dibuat pada tanggal 25 November 2019, di tahun 2022, Perusahaan telah sepakat menggunakan cadangan penjaminan sebagai pengurang dari cadangan kerugian penurunan nilai atas investasi di efek-efek (Catatan 8) yang akan terpakai jika kondisi memenuhi sebesar Rp8.621.218.452 dan Rp7.964.768.622 pada 31 Desember 2025 dan 2024 digunakan sebagai cadangan kerugian penurunan nilai.

e. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/ atau tidak berfungsinya proses internal, kegagalan sistem, kesalahan manusia dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Grup.

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

Deposit Insurance Corporation (LPS) only guarantees up to Rp2,000,000,000, the risk of the bank's failure still exists.

To minimize the possibility of bank defaults, the Group selected the banks based on these criteria : adequacy of stocks, liquidity ratio, net interest margin, BOPO, as stipulated in the Decree of the Board of Director regarding the Policy of Selection of Beneficiary Banks for Margin Deposits No. 22/K-KBI/IV/2010 dated April 14, 2010. However, LKB can cooperate with a Bank elected by BAPPEBTI.

Anticipation of Possible Defaults

The Group annually establishes a guarantee reserve of 2.5% of the total net clearing income in anticipation of clearing house losses due to the failure of clearing member settlements, settlements on warehouse's receipt and investment risks.

Guarantee expenses charged to statements of profit or loss for the year December 31, 2025 and 2024 are Rp656,449,830 and Rp532,371,172, respectively (Note 30.c).

Based on the Internal Cover Note with Reference Number: ND-054/DKA/XI/2019 and Reference Number: ND-097/BISNIS/XI/2019 dated November 25, 2019, in the year 2022, the Company has agreed to use the guarantee reserves as a deduction from the reserves for impairment losses on investments in securities (Note 8), which will be utilized if the conditions are met, in the amounts of Rp8,621,218,452 and Rp7,964,768,622 as of December 31, 2025 and 2024, respectively, used as impairment loss reserves.

e. Operational Risk

Operational risk is the risk due to inadequacy and failure of internal processes, system errors, human errors and/or external events which have an impact on the Group's operations.

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Pengelolaan risiko operasional terus ditingkatkan dalam rangka memitigasi munculnya risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal. Sumber risiko operasional dapat disebabkan antara lain oleh sumber daya manusia, proses, sistem dan kejadian eksternal.

Untuk meminimalisasi risiko operasional terutama yang bersumber dari sumber daya manusia, Grup melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Grup mengembangkan kerangka kerja manajemen risiko operasional meliputi hal sebagai berikut:

1. Penyempurnaan sistem rekrutmen SDM yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan organisasi;
2. Perencanaan sistem *Workload Analysis*;
3. Perencanaan program *Assessment* untuk kompetensi pegawai;
4. Peningkatan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan bisnis;
5. Perencanaan sistem akuntansi dan keuangan yang disesuaikan dengan perubahan regulasi dan perkembangan bisnis;
6. Penyempurnaan sistem transaksi penjaminan yang disesuaikan dengan kebutuhan, perubahan regulasi dan perkembangan bisnis;
7. Penyempurnaan sistem keamanan teknologi informasi Grup dengan menerapkan ISO 27001.

35. Transaksi dan Saldo Dengan Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi berdasarkan ketentuan dan kondisi yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

Operational risk management continues to be improved in order to mitigate risks arising from inadequacy and failure of internal processes, human errors, system errors, and/or external events. Operational risk can be caused, among others, by human resources, processes, systems and external events.

To minimize operational risks, especially those originating from human resources, the Group undertakes the following efforts:

The Group develops a operational risk management framework that covers:

- 1. Enhancing the HR recruitment system that is tailored to the needs and development of the organization;*
- 2. Planning Workload Analysis System;*
- 3. Planning an Assessment program for employee competencies;*
- 4. Improving HR competencies through education and training tailored to the needs and development of the business;*
- 5. Planning the accounting and financial systems that are adjusted to changes in regulations and business development;*
- 6. Improving the guarantee transaction system that is tailored to the needs, changes in regulations and business development;*
- 7. Enhancing the Group's information technology security system by applying ISO 27001.*

35. Transactions and Balances with Related Parties

In conducting their business, the Group has several transactions with related parties based on terms and conditions agreed by both parties.

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

Pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat dari Hubungan/ Relationship	Transaksi/ Transaction
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Badan Usaha Milik Negara/ <i>State Owned Enterprise</i>	Rekening Giro dan Deposito/ <i>Current Account and Time Deposit</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Badan Usaha Milik Negara/ <i>State Owned Enterprise</i>	Rekening Giro dan Deposito/ <i>Current Account and Time Deposit</i>
PT Danareksa (Persero)	Badan Usaha Milik Negara dan Pemegang Saham Induk/ <i>State Owned Enterprise and Parent Shareholders</i>	Piutang Lain-lain dan <i>Management Fee</i> / <i>Other Receivable and Management Fee</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Badan Usaha Milik Negara/ <i>State Owned Enterprise</i>	Rekening Giro dan Deposito/ <i>Current Account and Time Deposit</i>
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Badan Usaha Milik Negara/ <i>State Owned Enterprise</i>	Rekening Giro dan Deposito/ <i>Current Account and Time Deposit</i>
PT Perusahaan Pengelola Aset	Entitas di Bawah Pengendalian yang Sama/ <i>Entity Under Common Control</i>	Beban Operasional/ <i>Operating Expense</i>
PT Danareksa Capital	Entitas di Bawah Pengendalian yang Sama/ <i>Entity Under Common Control</i>	Beban Operasional/ <i>Operating Expense</i>
PT Danareksa Finance	Entitas di Bawah Pengendalian yang Sama/ <i>Entity Under Common Control</i>	Beban Operasional/ <i>Operating Expense</i>
PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	Entitas di Bawah Pengendalian yang Sama/ <i>Entity Under Common Control</i>	Beban Operasional/ <i>Operating Expense</i>
PT Kawasan Industri Medan	Entitas di Bawah Pengendalian yang Sama/ <i>Entity Under Common Control</i>	Beban Operasional/ <i>Operating Expense</i>
PT Kawasan Berikat Nusantara	Entitas di Bawah Pengendalian yang Sama/ <i>Entity Under Common Control</i>	Beban Operasional/ <i>Operating Expense</i>
PT Jalin Pembayaran Nusantara	Entitas di Bawah Pengendalian yang Sama/ <i>Entity Under Common Control</i>	Beban Operasional/ <i>Operating Expense</i>
PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	Entitas di Bawah Pengendalian yang Sama/ <i>Entity Under Common Control</i>	Beban Operasional/ <i>Operating Expense</i>
PT Kawasan Industri Makasar	Entitas di Bawah Pengendalian yang Sama/ <i>Entity Under Common Control</i>	Beban Operasional/ <i>Operating Expense</i>
PT Nindya Karya	Entitas di Bawah Pengendalian yang Sama/ <i>Entity Under Common Control</i>	Beban Operasional/ <i>Operating Expense</i>
PT Kawasan Industri Wijayakusuma	Entitas di Bawah Pengendalian yang Sama/ <i>Entity Under Common Control</i>	Beban Operasional/ <i>Operating Expense</i>
PT Kawasan Industri Terpadu Batang	Entitas di Bawah Pengendalian yang Sama/ <i>Entity Under Common Control</i>	Beban Operasional/ <i>Operating Expense</i>

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

Transaksi dengan Pihak Berelasi

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp
Kas dan Setara Kas		
Rekening Giro		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5,098,942,687	1,882,945,351
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	394,845,853	87,116,016
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	326,420,641	142,855,523
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	70,619,385	71,240,649
Sub Jumlah	<u>5,890,828,565</u>	<u>2,184,157,539</u>
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	343,934,000	148,700,141
Jumlah Rekening Giro	<u>6,234,762,565</u>	<u>2,332,857,680</u>
Deposito		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	57,000,000,000	--
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	--	5,000,000,000
Jumlah Deposito	<u>57,000,000,000</u>	<u>5,000,000,000</u>
Jumlah Kas dan Setara Kas	<u>63,234,762,565</u>	<u>7,332,857,680</u>
Saldo		
Rekening Anggota Kliring		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	320,965,366,138	100,550,948,901
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	203,417,114,678	103,262,899,807
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	150,417,842,300	117,087,405,597
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	--	833,561,155
Sub Jumlah	<u>674,800,323,117</u>	<u>321,734,815,460</u>
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	18,821,902,278	--
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	10,691,729,465	4,546,061,322
PT Mandiri (Persero) Tbk	9,118,903,978	10,866,442,214
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	8,753,206,745	2,058,865,829
Sub Jumlah	<u>47,385,742,466</u>	<u>17,471,369,365</u>
Jumlah Giro	<u>722,186,065,583</u>	<u>339,206,184,825</u>

Transaction with Related Parties

Cash and Cash Equivalents	
Current Accounts	
<u>Rupiah</u>	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	
Sub Total	
<u>United States Dollar</u>	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
Total Current Account	
Time Deposits	
<u>Rupiah</u>	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	
Total Time Deposit	
Total Cash and Cash Equivalents	
Balance of Clearing Member's Account	
<u>Rupiah</u>	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
Sub Total	
<u>Dolar Amerika Serikat</u>	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
Sub Total	
Total Current Account	

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp	
Deposito			Time Deposit
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
PT Bank Rakyat			PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk	728,552,879,663	258,250,000,000	Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia			PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk	7,500,000,000	2,500,000,000	(Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1,720,495,811	1,444,475,874	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara			PT Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk	--	400,000,000,000	(Persero) Tbk
Sub Jumlah	737,773,375,474	662,194,475,874	Sub Total
 <u>Dolar Amerika Serikat</u>			 <u>United States Dollar</u>
PT Bank Tabungan			PT Bank Tabungan
Negara (Persero) Tbk	43,633,200,000	42,008,200,000	Negara (Persero) Tbk
Jumlah	1,503,592,641,057	1,043,408,860,699	Total
 Rekening Pasar Fisik Timah			 Tin Physical Market Account
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	58,621,560,403	121,736,225,142	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat			PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk	13,689,245	13,972,897	Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara			PT Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk	4,231,413	5,249,409	Indonesia (Persero) Tbk
Jumlah	58,639,481,062	121,736,225,142	Sub Total
 Saldo Rekening Aset Digital			 Balance of Digital Assets Accounts
<u>Giro</u>			<u>Current Accounts</u>
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	8,526,774	11,370,733	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara			PT Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk	1,208,061	149,392	Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara			PT Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk	1,084,974	1,409,974	(Persero) Tbk
PT Bank Rakyat			PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk	--	1,628,061	Indonesia (Persero) Tbk
Jumlah	10,819,809	14,558,160	Total
 Piutang Pihak Berelasi			 Other Receivables - Related Party
PT Danareksa (Persero)	125,000,000,000	175,000,000,000	PT Danareksa (Persero)
Dikurangi: Cadangan Kerugian			Less: Allowance
Penurunan Nilai	(3,607,453)	(24,111,632)	for Impairment Losses
	124,996,392,547	174,975,888,368	
 Pendapatan Operasional			 Operating Revenue
PT Danareksa (Persero)	9,069,861,110	7,721,227,429	PT Danareksa (Persero)
 Beban Operasional			 Operating Expenses
PT Danareksa (Persero)	139,920,041	493,676,289	PT Danareksa (Persero)

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

Manajemen Kunci

Berikut adalah honorarium dan imbalan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit Grup:

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp	
Gaji, Tunjangan dan Tantiem Direksi	5,334,096,752	6,332,572,879	Director's Salaries, Allowances, and Tantiem
Honorarium Dewan Komisaris dan Tantiem	2,391,634,621	2,589,792,405	Commissioner's Honorarium and Tantiem
Honorarium Komite Audit	1,300,540,776	1,317,070,008	Audit Committee's Honorarium
Jumlah	9,026,272,149	10,239,435,292	Total

Honorarium dan imbalan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit sesuai dengan Surat Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 dan Keputusan Direksi PT Kliring Berjangka Indonesia Nomor: 22/K-KBI/LGL/VIII/2023.

Honorarium and benefits for the Board of Commissioners, Board of Directors, and Audit Committee are determined based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-3/MBU/03/2023 and the Board of Directors Decree of PT Kliring Berjangka Indonesia No. 22/K-KBI/LGL/VIII/2023.

Penetapan penghasilan 2025 dan 2024 atas Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan sesuai dengan Surat No S-813/DR/DIRUT/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024.

Determination of the income for 2025 and 2024 and Bonuses for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company in accordance with Letter No. S-813/DR/CEO/10/2024 dated October 21, 2024.

36. Informasi Tambahan Terkait Arus Kas

36. Additional Information Related to Cash Flows

Transaksi non-kas

Tabel di bawah ini menunjukkan transaksi nonkas Perusahaan selama periode berjalan sebagai berikut:

	2025 Rp	2024 Rp	
Penambahan/ (pengurangan) aset hak guna melalui liabilitas sewa	544,273,608	523,998,725	Additions/ (Disposal) of right of use assets through lease liabilities

Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan

Reconciliation of liabilities arising from financing activities

31 Desember/ December 31, 2025				
Saldo Awal/ Beginning Balance	Arus Kas/ Cash Flow		Perubahan Transaksi Non Kas/ Non-Cash	Saldo Akhir/ Ending Balance
	Penerimaan/ Receipt	Pembayaran/ Payment		
Liabilitas Sewa/ Lease Liabilities	6,761,162,832	--	544,273,608	--
Utang Bank/ Bank Loan	14,175,000,000	(7,305,436,440) (14,175,000,000)	--	--

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

31 Desember/ December 31, 2024

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Arus Kas/ Cash Flow		Perubahan Transaksi Non Kas/ Non-Cash	Saldo Akhir/ Ending Balance
		Penerimaan/ Receipt	Pembayaran/ Payment		
Liabilitas Sewa	13,542,600,547	--	(7,305,436,440)	523,998,725	6,761,162,832
Utang Bank		14,175,000,000	--		14,175,000,000

37. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan. Bapak Hernawan Bakti Sasongko menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan selaku Ketua Komite Etik merangkap Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan untuk periode 2026–2031.

Berdasarkan hal tersebut, Bapak Hernawan Bakti Sasongko telah mengakhiri masa jabatannya sebagai Komisaris Independen PT Kliring Berjangka Indonesia.

37. Event after the Reporting Period

Based on the Decree of the President of the Republic of Indonesia No. 30/P of 2026 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority, Mr. Hernawan Bakti Sasongko has been appointed as Vice Chairman of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority, serving as Chairman of the Ethics Committee concurrently as a Member of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority for the 2026–2031 period.

Accordingly, Mr. Hernawan Bakti Sasongko has ended his tenure as the PT Kliring Berjangka Indonesia's Independent Commissioner.

38. Informasi Tambahan

Informasi keuangan Perusahaan (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk") yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian yang diharuskan menurut SAK Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian.

38. Supplementary Information

The accompanying financial information of the Company (parent), which comprises the statements of financial position as of December 31, 2025, and the statement of comprehensive income, statements of changes equity, and statements of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information (collectively referred to as the "Parent Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the consolidated financial statements under Indonesian SAK. The Parent Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the consolidated financial statements.

**39. Tanggung Jawab Manajemen Atas
Laporan Keuangan Konsolidasian**

Manajemen Grup bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian yang diotorisasi oleh Direksi untuk terbit pada tanggal 31 Maret 2026.

**39. Management Responsibility of the
Consolidated Financial Statements**

The management of the Grup is responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements that were approved for issuance by Directors on March 31, 2026.

LAMPIRAN I

APPENDIX I

PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
INDUK PERUSAHAAN

Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
PARENT COMPANY

December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

	2025 Rp	2024 Rp	
ASET			ASSETS
ASET LANCAR			CURRENT ASSETS
Kas dan Setara Kas	61,323,626,423	6,415,775,560	Cash and Cash Equivalents
Penempatan Dana Anggota Kliring	2,239,573,720,466	1,667,312,244,047	Placement of Clearing Member's Fund
Penempatan Dana Pasar Fisik Komoditas	58,654,373,241	121,783,906,226	Placement of Commodity Physical Market
Penempatan Transaksi Aset Digital	22,918,605,769	2,303,378,063	Placement of Transactions Digital Asset
Efek-efek	20,000,000,000	46,365,886,698	Marketable Securities
Investasi Jangka Pendek	316,334,676,728	187,285,393,533	Short-term Investment
Piutang - Pihak Berelasi	259,959,548,359	332,970,586,854	Account Receivables - Related Party
Piutang Lain-lain	3,503,105,194	1,015,203,241	Other Receivables
Persediaan Emas	--	712,707,181	Gold Inventories
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	12,889,850,608	10,323,890,645	Accrued Revenues
Biaya Dibayar Dimuka	2,804,568,521	874,941,658	Prepaid Expenses
Pajak Dibayar Dimuka	--	391,407,651	Prepaid Taxes
JUMLAH ASET LANCAR	2,997,962,075,308	2,377,755,321,357	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR			NON-CURRENT ASSETS
Aset Tetap - Bersih	17,889,968,008	22,839,054,047	Fixed Assets - Net
Aset Takberwujud - Bersih	5,580,173,741	2,332,110,597	Intangible Assets - Net
Aset Pajak Tangguhan	3,685,627,803	2,896,291,356	Deferred Tax Assets
Uang Jaminan	76,091,898	76,091,898	Security Deposits
Aset Lainnya	--	15,008,011	Other Assets
Investasi Pada Entitas Anak	51,000,000,000	51,000,000,000	Investment in Subsidiary
Investasi Saham	3,500,000,000	3,500,000,000	Investment in Shares
Aset Hak Guna - Bersih	3,743,430,488	10,504,593,319	Right-of-Use-Assets - Net
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	85,475,291,938	93,163,149,228	TOTAL NON-CURRENT ASSETS
JUMLAH ASET	3,083,437,367,246	2,470,918,470,585	TOTAL ASSETS

LAMPIRAN I

PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
INDUK PERUSAHAAN (Lanjutan)
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

APPENDIX I

PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
PARENT COMPANY (Continued)
December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

	2025 Rp	2024 Rp	
LIABILITAS DAN EKUITAS			LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK			CURRENT LIABILITIES
Liabilitas Jangka Pendek Tidak Berbunga			Non-Interest Bearing Current Liabilities
Saldo Dana Anggota Kliring	2,239,573,720,466	1,667,312,244,048	Clearing's Member Fund Balance
Saldo Dana Transaksi Pasar			Physical Commodities Market Transaction
Fisik Komoditas	58,654,373,241	121,783,906,226	Fund Balance
Saldo Dana Transaksi Aset Digital	22,918,605,769	2,303,378,063	Digital Asset Transaction Fund Balance
Beban Akrua	20,514,460,042	15,665,912,572	Accruals
Liabilitas Lain-lain	4,505,201,366	779,168,758	Other Liabilities
Utang Pajak	4,304,750,073	3,662,884,476	Taxes Payable
Liabilitas Sewa	--	6,761,162,832	Lease Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Tidak Berbunga	2,350,471,110,957	1,818,268,656,975	Total Non-Interest Bearing Current Liabilities
Liabilitas Jangka Pendek Berbunga	--	--	Non-Interest Bearing Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG			NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas Imbalan Kerja	9,627,897,650	6,455,078,501	Liabilities for Employee Benefits
Cadangan Penjaminan Kliring	8,621,218,452	7,964,768,622	Clearing Guarantee Reserves
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Tidak Berbunga	18,249,116,102	14,419,847,123	Total Non-Interest Bearing Non-Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang Berbunga	--	--	Interest Bearing Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS	2,368,720,227,059	1,832,688,504,098	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS			EQUITY
Modal Saham			Share Capital
Nominal Rp1.000.000 per saham			Nominal Value Rp1,000,000 per share
Modal Dasar Pada 31 Desember 2025 dan 2024			Authorized Capital as of December 31, 2025 and 2024
Sebesar 2.000.000			amounting to 2,000,000
Modal Ditempatkan dan Disetor			Issued and Fully Paid
Pada 31 Desember 2025 dan 2024			As of December 31, 2025 and 2024
Sebesar 500.000	499,674,527,488	499,674,527,488	amounting to 500,000
Saldo Laba			Retained Earnings
Ditentukan Penggunaannya	54,383,919,286	54,383,919,285	Appropriated
Belum Ditentukan Penggunaannya	162,055,787,893	84,143,438,746	Unappropriated
Kerugian Pengukuran			Loss on Remeasurement
Kembali Program Imbalan			of Defined Benefit
Pasti - Setelah Pajak	(1,397,094,482)	28,080,967	Plan - Net of Tax
JUMLAH EKUITAS	714,717,140,187	638,229,966,487	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	3,083,437,367,246	2,470,918,470,585	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

LAMPIRAN II

APPENDIX II

PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
INDUK PERUSAHAAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
PARENT COMPANY

For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

	2025 Rp	2024 Rp
PENDAPATAN OPERASIONAL		
Fee Kliring	26,250,062,741	21,239,730,398
Pasar Fisik Komoditas	21,353,298,832	16,685,099,799
Resi Gudang	14,903,823,847	18,208,451,313
Iuran Anggota	8,318,596,499	8,604,600,500
Pendapatan Dana Penyelesaian Transaksi	82,829,290,761	74,834,616,888
Pendapatan Aset Digital	5,428,484,617	2,548,347,861
Pendapatan Kegiatan <i>Treasury</i>		
Bunga Dana Perusahaan	23,051,254,203	14,391,308,829
Pendapatan Reksadana	9,798,086,788	11,557,101,122
Jumlah Pendapatan Operasional	191,932,898,288	168,069,256,710
BEBAN OPERASIONAL		
Manajemen dan Pegawai	42,946,159,595	39,030,774,687
Umum dan Administrasi	47,188,344,662	42,557,527,630
Pembentukan Cadangan Dana Jaminan	656,449,831	532,371,172
Beban (Pemulihan) Penurunan Nilai	345,069,939	(913,888,364)
Jumlah Beban Operasional	91,136,024,027	81,206,785,124
LABA OPERASIONAL	100,796,874,261	86,862,471,586
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
Pendapatan Non Operasional	4,653,155,272	3,476,806,610
Beban Non Operasional	(523,663,987)	(1,215,474,248)
Jumlah Pendapatan (Beban) Bukan Operasional	4,129,491,284	2,261,332,363
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN	104,926,365,545	89,123,803,948
BEBAN PAJAK FINAL	20,974,770,789	17,453,779,472
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	83,951,594,756	71,670,024,477
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		
Kini	(6,426,609,497)	(5,154,291,018)
Tangguhan	387,363,884	145,295,184
Jumlah	(6,039,245,613)	(5,008,995,834)
LABA TAHUN BERJALAN	77,912,349,147	66,661,028,643
Penghasilan komprehensif Lainnya		
Keuntungan (Kerugian) Pengukuran		
Kembali Program Imbalan Pasti Setelah Pajak	(1,827,148,011)	(593,918,638)
Pajak Penghasilan Komprehensif	401,972,562	130,662,100
	(1,425,175,449)	(463,256,537)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	76,487,173,699	66,197,772,105

OPERATING REVENUES
Clearing Fee
Commodity Physical Market Revenue
Receipts of Warehouse
Membership Fee
Settlement Fund Revenue
Digital Asset Revenue
Treasury Revenue
Interest from Corporate Fund
Mutual Fund Investment Revenue
Total Operating Revenues
OPERATING EXPENSES
Management and Employee
General and Administrative
Provision of Guarantee Reserves
Impairment Expense (Recovery)
Total Operating Expenses
OPERATING PROFIT
NON-OPERATING REVENUE (EXPENSES)
Non-Operating Revenue
Non-Operating Expenses
Total Non-Operating Revenue (Expenses)
PROFIT BEFORE FINAL TAXES AND INCOME TAXES
FINAL TAXES
PROFIT BEFORE INCOME TAXES
INCOME (EXPENSES) TAXES
Current
Deferred
Total
PROFIT FOR THE YEAR
Other Comprehensive Income
Gain (loss) on Remeasurement
of Defined Benefit Plan - Net of Tax
Comprehensive Income Tax
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

APPENDIX III

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
PARENT COMPANY**

*For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)*

	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued And Fully Paid-Up Capital	Saldo Laba / Retained Earning	Yang	Keuntungan (Kerugian) Pengukuran kembali program imbalan pasti/ Gain (loss) from remeasurement of defined benefit plan	Jumlah Ekuitas/ Total equity	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
SALDO 1 JANUARI 2024	499,674,527,488	45,768,275,747	53,963,836,311	491,337,504	599,897,977,051	BALANCE AS OF JANUARY 1, 2024
Pembentukan cadangan Dividen	--	8,615,643,539	(8,615,643,539)	--	--	Appropriation for reserves Dividends
Laba tahun berjalan	--	--	(27,865,782,670)	--	(27,865,782,670)	Profit for the year
Keuntungan (Kerugian) pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak	--	--	66,661,028,643	--	66,661,028,643	Gain (loss) on remeasurement of defined benefit plan - net of tax
SALDO 31 DESEMBER 2024	499,674,527,488	54,383,919,286	84,143,438,746	28,080,966	638,229,966,487	BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2024
Laba tahun berjalan	--	--	77,912,349,147	--	77,912,349,147	Profit for the year
Keuntungan (Kerugian) pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak	--	--	--	(1,425,175,449)	(1,425,175,449)	Gain (loss) on remeasurement of defined benefit plan - net of tax
SALDO 31 DESEMBER 2025	499,674,527,488	54,383,919,286	162,055,787,893	(1,397,094,482)	714,717,140,187	BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2025

LAMPIRAN IV

APPENDIX IV

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
INDUK PERUSAHAAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
STATEMENTS OF CASH FLOWS
PARENT COMPANY**

For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

	2025 Rp	2024 Rp	
ARUS KAS DARI			CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI			OPERATING ACTIVITIES
Pendapatan Fee, Resi Gudang dan Pasar Lelang	52,589,866,550	41,518,387,824	Fee Income, Warehouse and Physical Auction Market
Pendapatan Uang Iuran Anggota	8,318,596,499	8,604,600,500	Membership Revenues
Pendapatan Bunga	107,483,704,487	102,354,592,505	Interest Income
Pendapatan Lainnya	4,503,686,362	3,367,468,245	Other Revenues
Beban Administrasi dan Umum	(33,446,876,879)	(25,517,013,022)	General and Administrative Expenses
Beban Kepegawaian	(37,897,467,273)	(35,135,587,655)	Employee's Expenses
Beban Lainnya	(1,514,619,613)	(1,215,474,248)	Other Expenses
Pajak Penghasilan	(5,133,538,688)	(3,976,333,719)	Income Tax
Pembayaran Piutang Lainnya - Bersih	(1,804,194,772)	(159,000,581)	Payment for Other Receivables
Penerimaan Utang Jangka Pendek Lainnya - Bersih	3,691,569,518	229,597,762	Receipt of Other Short Term Liabilities - Net
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	96,819,726,191	90,042,237,611	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI			CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS INVESTASI			INVESTING ACTIVITIES
Penjualan Investasi Jangka Pendek	(129,049,283,195)	(68,500,000,000)	Sale of Short-Term Investment
Pembayaran Piutang Lainnya Pihak Berelasi	--	(132,650,000,000)	Payment of Other Receivables Related Party
Penerimaan Piutang Lainnya Pihak Berelasi	73,000,000,000	--	Receipt of Other Receivables Related Party
Penjualan Efek - Efek	27,000,000,000	38,300,000,000	Sale of Marketable Securities
Penjualan Aset Tetap	160,787,028	109,338,351	Sale of Fixed Assets
Penambahan Aset Tetap	(1,242,722,292)	(7,676,929,839)	Additional of Fixed Assets
Penambahan Aset Tidak Berwujud	(4,472,724,489)	(216,326,531)	Additional of Intangible Assets
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(34,603,942,948)	(170,633,918,019)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI			CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS PENDANAAN			FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran Liabilitas Sewa	(7,305,436,440)	(7,305,436,440)	Lease Liabilities Payment
Pembayaran Dividen	--	(27,865,782,670)	Dividend Payment
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(7,305,436,440)	(35,171,219,110)	Net Cash Used in Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	54,910,346,803	(115,762,899,518)	NET INCREASE (DECREASE) OF CASH AND CASH EQUIVALENT
Dampak Selisih Kurs atas Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun	44,978	50,782	Effect of Foreign Exchange on Cash and Cash Equivalent at end of the Year
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	6,415,775,560	122,178,745,285	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	61,326,167,341	6,415,896,549	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR
Rekonsiliasi Jumlah Kas dan Setara Kas			Reconciliation of Total Cash and Cash Equivalents
Jumlah yang dilaporkan pada laporan arus kas	61,326,167,341	6,415,896,549	Amount as reported in statement of cash flow
Cadangan penyisihan kerugian penurunan nilai kas dan setara kas	(2,540,919)	(120,989)	Allowance for Impairment Losses of cash and cash equivalent
Jumlah yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan	61,323,626,423	6,415,775,560	Amount as reported in statement of financial position

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
PENGUNGKAPAN LAINNYA
INDUK PERUSAHAAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA
OTHERS DISCLOSURES
PARENT COMPANY**

For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(In full Rupiah, unless otherwise stated)

1. Laporan Keuangan Tersendiri

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas terlampir adalah laporan keuangan tersendiri yang merupakan informasi tambahan atas laporan keuangan konsolidasian.

1. Separate Financial Statements

Statements of financial position, statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity and the statements of cash flow is attached which is a separate financial statements additional information to consolidated financial statements.

2. Investasi Pada Entitas Anak

Investasi pada entitas anak sebagaimana disebutkan dalam laporan keuangan tersendiri dicatat menggunakan metode biaya perolehan.

2. Investments in Subsidiaries

Investments in subsidiaries as mentioned in the separate financial statements are recorded using the cost method.

3. Daftar Investasi Pada Entitas Anak

3. Detail of Investments in Subsidiaries

Entitas Anak/ Subsidiaries	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Nilai Tercatat/ Carrying Value 31 Desember 2025	Nilai Tercatat/ Carrying Value 31 Desember 2024
PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia	98,08%	51.000.000.000	51.000.000.000



Laporan Tahunan
Annual Report

PROSPER TOGETHER *with* INDONESIA



KLIRING
BERJANGKA
INDONESIA

Member of  Danareksa

PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA

Kantor Pusat/Head Office
Menara Danareksa Lt. 6
Jl. Medan Merdeka Selatan
No. 14, Jakarta 10110

T [62-21] 35280000
F [62-21] 35282000

W www.ptkbi.com | **E** kpbj@ptkbi.com